



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 140);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
14. Peraturan.....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 67);
17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021.

Pasal 1.....

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Boyolali untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- b. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c. memadukan dan mensinergikan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021; dan
- d. mendukung terlaksananya pembangunan daerah Tahun 2021 oleh seluruh pelaku pembangunan.

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021, meliputi:
 - a. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
 - c. prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2021; dan
 - d. rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2021.
- (2) Uraian RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

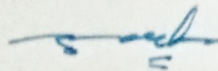
Pasal 4.....

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 14 Juli 2020

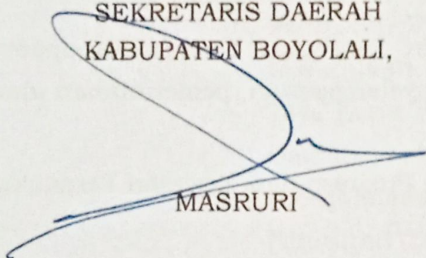
BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

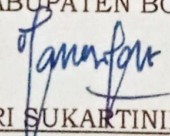


MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 1994032009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GRAFIK xii

DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... 6

 1.3. Hubungan Antar Dokumen..... 7

 1.4. Maksud dan Tujuan..... 8

 1.5. Kaidah Pelaksanaan..... 9

 1.6. Sistematika RKPD..... 10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... 11

 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah..... 11

 2.1.1 Aspek Geografi..... 11

 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah..... 11

 2.1.1.2 Penggunaan Lahan..... 22

 2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah..... 23

 2.1.1.4 Kawasan Rawan Bencana..... 26

 2.1.2 Aspek Demografis..... 27

 2.1.2.1 Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kabupaten
 Boyolali 27

 2.1.2.2 StrukturPenduduk..... 29

 2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... 30

 2.1.3. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 30

 2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial..... 34

 2.1.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga..... 45

 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum..... 46

 2.1.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar. 46

 2.1.4.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan
 Dasar..... 65

 2.1.4.3 Urusan Pilihan..... 94

 2.1.4.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
 KewenangaDaerah..... 105

 2.1.4.5 Fungsi lainnya..... 110

	2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah.....	112
	2.1.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	112
	2.1.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	112
	2.1.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi.....	113
	2.1.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia.....	114
	2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun	
	Berjalan dan Realisasi RPJM.....	114
	2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD.....	114
	2.2.2 Realisasi Capaian RPJMD.....	118
	2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	134
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	137
	3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	137
	3.1.1 Arah Kebijakan Nasional	137
	3.1.2 Kondisi Perekonomian Daerah	138
	3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun	
	2020 dan Tahun 2021	145
	3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	146
	3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	147
	3.2.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan daerah.....	147
	3.2.1.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	150
	3.2.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	153
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
	TAHUN 2021.....	155
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	155
	4.2 Prioritas Pembangunan Daerah.....	161
	4.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	162
	4.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Boyolali	164
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	172
	5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas	173
	5.1.1 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar.....	173
	5.1.2 Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar.....	179
	5.1.3 Urusan Pilihan.....	187
	5.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi	
	Kewenangan Daerah	189
	5.1.5 Fungsi Lainnya.....	192
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	198
	6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021.....	198

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 198

BAB VII PENUTUP.....226

LAMPIRAN II 1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Topografi wilayah Kabupaten Boyolali Berdasarkan Ketinggian.....	11
Tabel II.2	Jenis tanah di Kabupaten Boyolali.....	12
Tabel II.3	Rata-rata Debit pada Waduk di Kabupaten Boyolali.....	13
Tabel II.4	Daftar Sungai Beserta Panjang dan Debitnya di Kabupaten Boyolali.....	14
Tabel II.5	Daftar Mata Air Kabupaten Boyolali.....	15
Tabel II.6	Daftar Waduk/Embung Kabupaten Boyolali.....	18
Tabel II.7	Penggunaan Lahan Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2015 - 2019	23
Tabel II.8	Luas Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 - 2019.....	24
Tabel II.9	Kawasan Rawan Bencana Alam di Kabupaten Boyolali.....	26
Tabel II.10	Data Kependudukan Tahun 2015- 2019 Kabupaten Boyolali	27
Tabel II.11	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019.....	28
Tabel II.12	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019.....	29
Tabel II.13	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019.....	29
Tabel II.14	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019.....	31
Tabel II.15	PDRB ADHB Eks Karesidenan Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019.....	31
Tabel II.16	PDRB ADHK Eks Karesidenan Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018.....	32
Tabel II.17	Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019	33
Tabel II.18	Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Se- Eks Karisidenan Surakarta (Rupiah/Kapital/Bulan) pada Tahun 2015 – 2019	34
Tabel II.19	Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019	34
Tabel II.20	Perbandingan IPM Kab/Kota di Eks Karisidenan Surakarta Tahun 2015 -2019	35

Tabel II.21	Angka Melek Huruf , Lama Sekolah dan Angka Partisipasi Tahun 2015 – 2019 dan Target Tahun 2020	36
Tabel II.22	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019	37
Tabel II.23	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019 dan Target Tahun 2020.....	37
Tabel II.24	Ketersediaan Guru yang Layak Mengajar dengan Kualifikasi Pendidikan D4/S1 Tahun 2015 – 2019 dan Target Tahun 2020....	37
Tabel II.25	Rasio Guru dan Murid Jenjang pendidikan Dasar Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019 dan Target Tahun 2020.....	37
Tabel II.26	Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019 dan Target Tahun 2020.....	38
Tabel II.27	Indikator Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019 dan Target Tahun 2020	42
Tabel II.28	Pelayanan RSUD Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019	43
Tabel II.29	Capaian Fokus Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019 dan Target Tahun 2020....	43
Tabel II.30	Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019 dan Target Tahun 2020.....	44
Tabel II.31	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019 dan Target Tahun 2020.....	44
Tabel II.32	Capaian Fokus Bidang Kebudayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019.....	45
Tabel II.33	Capaian Fokus Bidang Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019 dan Target Tahun 2020.....	46
Tabel II.34	Capaian Aspek Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019.....	47
Tabel II.35	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pendidikan untuk fasilitas Pendidikan Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019.....	48
Tabel II.36	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pendidikan Untuk PAUD Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019	48
Tabel II.37	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pendidikan untuk Angka Putus Sekolah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019	48
Tabel II.38	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pendidikan untuk Angka Kelulusan Kabupaten Boyolali 2015- 2019	49
Tabel II.39	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kesehatan Kabupaten Boyolali	

	Tahun 2015 – 2019 dan Target 2020	50
Tabel II.40	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kesehatan di RSUD Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020	52
Tabel II.41	Jumlah Balita Mengalami Stunting Tahun 2015 – 2019	53
Tabel II.42	Gambaran Jaminan Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan Kabupaten Boyolali	54
Tabel II.43	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum untuk Kondisi Jalan dan Irigasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019 dan Target Tahun 2020	54
Tabel II.44	Aspek Cakupan Penggunaan Air Bersih	55
Tabel II.45	Penduduk yang Mengakses Sanitasi Sehat Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020.....	55
Tabel II.46	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Penataan Ruang Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2018 dan Target Tahun 2019.....	56
Tabel II.47	Gambaran Kinerja RTLH di Kabupaten Boyolali.....	57
Tabel II.48	Gambaran Kinerja RTLH di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2021.....	58
Tabel II.49	Gambaran Kinerja Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 -2021.....	59
Tabel II.50	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020.....	59
Tabel II.51	Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020.....	62
Tabel II.52	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Sosial Kabupaten Boyolali Tahun 2015 -2019 dan Target Tahun 2020.....	64
Tabel II.53	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020.....	64
Tabel II.54	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019 dan Target Tahun 2020	65
Tabel II.55	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali Target Tahun 2020.....	65
Tabel II.56	Jumlah Korban Kekerasan Tahun 2015-2020.....	67

Tabel II.57	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2020.....	68
Tabel II.58	Target Aspek Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali Tahun 2020.....	69
Tabel II.59	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pertanahan Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020.....	70
Tabel II.60	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2020.....	71
Tabel II.61	Target Aspek Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019.....	72
Tabel II.62	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020.....	76
Tabel II.63	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020.....	77
Tabel II.64	Capaian Kinerja Dalam Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Guna “Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel”	79
Tabel II.65	Capaian Kinerja Dalam Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Guna “Meningkatnya Kemampuan Produktifitas dan Daya Saing Masyarakat”	80
Tabel II.66	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019 dan Target Tahun 2020.....	81
Tabel II.67	Target Aspek Pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Boyolali Tahun 2020.....	81
Tabel II.68	Jumlah Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2015-2020.....	83
Tabel II.69	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perhubungan Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020.....	85
Tabel II.70	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020.....	86
Tabel II.71	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 -2019 dan Target Tahun 2020.....	87

Tabel II.72	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Penanaman Modal Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target 2020	87
Tabel II.73	Perkembangan Jumlah Investor dan Nilai Investasi Tahun 2015 - 2019.....	87
Tabel II.74	Perkembangan Jumlah Investor dan Nilai Investasi PMDN Tahun 2015-2019.....	88
Tabel II.75	Data Investasi dan Investor PMDN Tahun 2019.....	88
Tabel II.76	Perkembangan Investasi PMA di Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019.....	88
Tabel II.77	Data Perusahaan PMA di Kabupaten Boyolali.....	89
Tabel II.78	Standar Waktu Pelayanan dan Jumlah Pemohon Tahun 2015 - 2019	89
Tabel II.79	Jumlah Izin yang diterbitkan Tahun 2015 – 2019.....	90
Tabel II.80	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2018 dan Target Tahun 2019.....	91
Tabel II.81	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Statistik Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020.....	92
Tabel II.82	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Persandian Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020.....	92
Tabel II.83	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kebudayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2017- 2019 dan Target Tahun 2020.....	93
Tabel II.84	Pengiriman Duta Seni Kabupaten Boyolali ke Luar Negeri Tahun 2015 – 2019.....	93
Tabel II.85	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perpustakaan Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020.....	94
Tabel II.86	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kearsipan Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020.....	94
Tabel II.87	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dan Target Tahun 2020.....	94
Tabel II.88	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pertanian untuk peternakan Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dan Target Tahun 2020.....	95

Tabel II.89	Jumlah PAD Sektor Pariwisata Tahun 2015-2018.....	97
Tabel II.90	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pariwisata Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020.....	97
Tabel II.91	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2017 - 2019.....	98
Tabel II.92	Perkembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019.....	100
Tabel II.93	Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019.....	100
Tabel II.94	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pertanian untuk Peternakan Kabupaten Boyolali Tahun 2018 dan 2019	101
Tabel II.95	Capaian Aspek Pelayanan Bidang KehutananKabupaten Boyolali Tahun 2017-2019 dan Target Tahun 2020.....	104
Tabel II.96	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2019 dan Target Tahun 2020.....	104
Tabel II.97	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perdagangan Kabupaten Boyolali Tahun 2017 – 2019.....	104
Tabel II.98	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2019.....	105
Tabel II.99	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Ketransmigrasian Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020.....	105
Tabel II.100	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020.....	106
Tabel II.101	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020.....	106
Tabel II.102	Jumlah Data ASN Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon II, III dan IV Tahun 2015-2019.....	107
Tabel II.103	Diklat Aparatur Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019 dan Target 2020.....	109
Tabel II.104	Perkembangan Ekonomi dan Prospek Ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 –2019.....	112

Tabel II.105	Capaian Aspek Daya Saing Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Bidang Perhubungan Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020.....	113
Tabel II.106	Capaian Aspek Daya Saing Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020.....	113
Tabel II.107	Capaian Aspek Daya Saing Daerah Fokus Iklim Berinvestasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020....	113
Tabel III.108	Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2019.....	114
Tabel III.109	Rekapitulasi Kesesuaian Kegiatan antara RKPD dan APBD Tahun 2019 (Perubahan).....	116
Tabel II.110	Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2019 Kabupaten Boyolali.....	118
Tabel II.111	Rekapitulasi Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2019 Kabupaten Boyolali.....	134
Tabel III.1	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Boyolali 2015-2019.....	140
Tabel III.2	PDRB ADHB Eks Karesidenan Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018.....	140
Tabel III.3	PDRB ADHK Eks Karesidenan Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018.....	140
Tabel III.4	Pertumbuhan PDRB 2015-2018 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen).....	140
Tabel III.5	Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2015-2018.....	141
Tabel III.6	Distribusi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2015-2018.....	142
Tabel III.7	Distribusi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2015-2018.....	142
Tabel III.8	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2015-2019.....	143
Tabel III.9	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2015-2019.....	143

Tabel III.10	Rekapitulasi Realisasi dan Prediksi Keuangan Kabupaten Boyolali dan Kerangka Pendanaan Kabupaten Boyolali Tahun 2019 sampai Tahun 2020 dengan Proyeksi Tahun 2021.....	147
Tabel III.11	Realisasi Pendapatan Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2020.....	149
Tabel III.12	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Boyolali Tahun 2021.....	150
Tabel III.13	Realisasi Belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2019 – 2020	152
Tabel III.14	Proyeksi Belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2021.....	152
Tabel III.15	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2021.....	153
Tabel IV.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	156
Tabel IV.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahap Ke IV RPJMD.....	157
Tabel IV.3	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional.....	167
Tabel V.1	Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021.....	172
Tabel V.2	Tabel Pagu Indikatif Rancangan RKPD Tahun 2021.....	194
Tabel V.3	Alokasi Recovery Covid-19 RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021.....	197
Tabel VI.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Boyolali Tahun 2021.....	198
Tabel VI.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021.....	199

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019...	30
Grafik II.2	PDRB ADHB Eks Karesidenan Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015–2018.....	31
Grafik II.3	Laju Inflasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019.....	32
Grafik II.4	Angka Kemiskinan Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019.....	33
Grafik II.5	Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019.....	34
Grafik II.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019.....	35
Grafik II.7	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019.....	35
Grafik II.8	Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum Untuk Rasio Tempat Pembuangan Sampah Kabupaten Boyolali Tahun 2017- 2018 dan Target Tahun 2019.....	56
Grafik II.9	Jumlah disabilitas dan bantuan yang diberikan tahun 2018-2019..	64
Grafik II.10	Grafik jumlah produksi padi dari Tahun 2014–2019.....	99
Grafik II.11	Grafik tingkat produktivitas padi dari Tahun 2014-2019.....	99
Grafik III.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Boyolali Tahun 2015-2019.....	139
Grafik III.2	Laju Inflasi Boyolali Tahun 2015-2019.....	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021.....	6
Gambar I.2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	8
Gambar II.1	Peta Lereng Kabupaten Boyolali.....	11
Gambar II.1	Peta Rencana Sumber Daya Air.....	13
Gambar II.3	Peta Curah Hujan Kabupaten Boyolali.....	22
Gambar II.4	Peta Penggunaan Lahan.....	22
Gambar II.5	Peta Rencana Pola Ruang.....	24
Gambar II.6	Peta Rawan Bencana.....	26
Gambar II.7	Peta Kepadatan Penduduk.....	28
Gambar II.8	Peta Jaringan Jalan Kabupaten Boyolali.....	54
Gambar III.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2021.....	138

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 atau dikenal dengan sebutan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan perencanaan pembangunan tahunan kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan **“Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera”**.

Makna pernyataan visi RPJMD Kabupaten Boyolali 2016-2021 dijabarkan berikut ini guna membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pro investasi, berarti meneruskan peningkatan kemudahan segala layanan dan perijinan investasi. Visi pro investasi diupayakan melalui:

- Pengembangan sistem *“one stop service”*,
- Membuka pusat informasi investasi;
- Penataan regulasi yang menjamin investasi dan eksekusi sistem produksinya tidak membahayakan keberlanjutan lingkungan serta humanis;
- Peningkatan sarana prasarana dan aparat pelaksana yang memadai.

Indikator yang digunakan mengukur antara lain dengan bertambahnya nilai investasi, jumlah investor, dan Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan.

Maju, mewakili gambaran kondisi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Boyolali secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Maju juga diarahkan pada terbentuknya kemandirian berbasis potensi unggulan daerah melalui sinergitas pemangku kepentingan dan kerja sama antar daerah. Indikator yang digunakan mengukur antara lain:

- Prosentase jaringan jalan dan drainase dalam kondisi baik;
- panjang pembangunan jalan baru;
- Rasio jaringan irigasi;
- Kecukupan air bersih;
- Kecukupan sarana dan prasarana lalu lintas; dan
- Bertambahnya rasio panjang jalan per jumlah penduduk.

Sejahtera, direpresentasikan dengan konsep nyaman, aman, dan mapan. Ketiga konsep ini mewakili kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial, secara adil dan merata. Nyaman, berarti mengembangkan Kabupaten Boyolali sebagai daerah yang nyaman untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, tempat persinggahan, rekreasi, dan berkreasi melestarikan adat istiadat. Aman, mencerminkan kondusivitas wilayah mencakup tertib pemerintahan dan, tertib bermasyarakat pendukung terwujudnya keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Kondisi masyarakat sejahtera ditunjukkan dengan terpenuhinya hak sosial dasar masyarakat yang mencakup pangan, kesehatan, pendidikan, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, akses aman air minum, rumah layak huni, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial, peningkatan hubungan sosial masyarakat, mempunyai akses terhadap informasi, tersedianya prasarana dan sarana pelayanan publik, serta didukung dengan kondisi infrastruktur perekonomian yang memadai dan terpelihara dengan baik utamanya jalan dan jembatan.

Masyarakat yang sejahtera dan mapan dalam konteks membangun ekonomi Kabupaten Boyolali dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mencapai daya saing yang kompetitif utamanya meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga meningkatnya daya beli untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya. Indikator kuantitatif dari kesejahteraan antara lain:

- Tingkat pertumbuhan ekonomi;
- Tingkat pendapatan per kapita;
- Penurunan tingkat pengangguran;
- Menurunnya jumlah penduduk miskin;
- Tingkat Indeks Pembangunan Manusia;
- Penurunan tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- Prestasi pemuda dan olah raga;
- Meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan dan menurunnya ketimpangan gender; dan
- Penurunan jumlah kriminalitas.

Dalam rangka perwujudan visi pembangunan daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 seraya tetap mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda untuk setiap tahunnya serta untuk menjaga kesinambungan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Boyolali tahun 2021 ditujukan untuk **“Kolaborasi Pemasaran Citra Kabupaten Boyolali”**. Periode Tahun 2021 merupakan peluang penyempurnaan pencapaian target RPJMD, tercapainya masyarakat yang maju, berdaya saing, sejahtera dengan unggulan sebagai Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (*Smart City*).

Pada saat penyusunan RKPD Tahun 2021 ini tepatnya mulai bulan Maret 2020 terjadi Pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap seluruh dunia termasuk Indonesia umumnya dan Kabupaten Boyolali khususnya. Secara otomatis jalannya pembangunan di Kabupaten Boyolali akan terdampak. Terdampaknya agenda pembangunan di Tahun terakhir RPJMD Periode 2016-2021 menuntut untuk dilakukannya penyesuaian terhadap Tema Pembangunan Tahun 2021 Kabupaten Boyolali disesuaikan menjadi **“Kolaborasi Pemasaran Citra Kabupaten Boyolali untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Tatahan Sosial Baru”**.

Tahap ini merupakan periode pelengkap, jika ada target yang belum terpenuhi di tahapan berikutnya masih dilanjutkan pada tahun kelima. Namun dengan adanya Pandemi Covid-19 membutuhkan penyesuaian pada Agenda Pembangunan di Kabupaten Boyolali. Mulai Maret 2020 secara logika ada 2 (dua) Tahun Pembangunan RPJMD yang terdampak terutama karena prioritas anggaran untuk Penanganan dan Recovery Covid-19, sehingga dimungkinkan ada beberapa capaian RPJMD Tahun 2016-2021 yang tidak dapat berjalan secara optimal. Secara khusus periode penutup RPJMD tahap III (2016-2021) ditekankan pada partisipasi masyarakat untuk mengembangkan kemandirian usaha perekonomian berbasis teknologi informasi. Aktivitas perekonomian dan aktivitas sosial masyarakat diharapkan membantu pemerintah memasarkan citra kota (*branding*) sebagai daerah yang berdaya saing dengan berbagai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatifnya. Ditengah Pandemi Covid-19 aktivitas ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru. Tahun kelima ini juga menjadi periode menguatkan partisipasi masyarakat sebagai pilar penyangga pemerintahan yang berdemokrasi.

Prioritas Tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru secara garis besar diarahkan mendukung:

1. Pemasaran Citra Daerah, yaitu memasarkan popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali: pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata berbasis E-commerce;
2. Program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana pemerintahan menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel sesuai standar Protokol Covid-19;
3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau;
4. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan/perikanan, pariwisata dan kebudayaan untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata dan budaya, peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru ;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dan optimalisasi kemandirian wilayah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdaya saing tinggi di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial serta mempersiapkan mekanisme layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial sesuai standar Protokol Covid-19; dan
6. Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusivitas wilayah.

Arah kebijakan yang akan dikembangkan pada Tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru adalah:

1. Peningkatan kesetaraan akses memperoleh pendapatan termasuk upaya recovery golongan terdampak Covid-19;
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya penanganan dan pencegahan dampak Covid-19;
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan mempersiapkan mekanisme layanan pendidikan sesuai standar Protokol Covid-19;
4. Peningkatan produksi dan industri berbasis hasil peternakan dan perikanan serta pemasaran berbasis Perdagangan Elektronik (E-commerce);
5. Peningkatan partisipasi masyarakat membangun daya saing daerah dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi; dan
6. Peningkatan daya saing perdagangan berbasis Perdagangan Elektronik (E-commerce).

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Boyolali tahun 2021 terutama adalah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021 yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,2% - 6,6%, laju inflasi sebesar 4,9%–5,2%, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,49. Selain itu adalah untuk mendukung upaya percepatan penurunan persentase penduduk miskin pada kisaran 7,17%-9,55%, dan tingkat pengangguran menjadi 3,15%. Akibat terdampak Pandemi Covid-19 secara otomatis akan berdampak pada penyesuaian terhadap target pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. Sebagai gambaran dan perbandingan secara nasional yang tertuang dalam sasaran dan target pembangunan nasional dalam RKP 2021 adalah tercapainya Pertumbuhan Ekonomi Nasional berkisar 4,5% - 5,5%, laju inflasi berkisar antara 3,0%, IPM menjadi 72,78 – 72,90, Tingkat Kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7% dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,5% – 8,2%.

Pembangunan daerah Kabupaten Boyolali tahun 2021 sebagai tahun kelima periode RPJMD Tahun 2016-2021 juga diarahkan untuk menuntaskan permasalahan dan isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Boyolali selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu kemiskinan, pengangguran,

infrastruktur, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, serta peningkatan tata kelola pemerintahan, kondusivitas daerah dan demokratisasi.

Kondisi kemiskinan saat ini di Kabupaten Boyolali masih cukup tinggi yaitu sebanyak 93.700 jiwa atau 9,53% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,12%. Angka tersebut diperkirakan akan bertambah akibat terdampak Pandemi Covid-19. Dunia usaha cukup signifikan terdampak, di Kabupaten Boyolali sebanyak 19 (Sembilan Belas) perusahaan terdampak sehingga terjadi PHK maupun merumahkan para pekerjanya. Data per Bulan April 2020 terdapat 1.364 pekerja yang mengalami PHK dan 3.424 pekerja yang dirumahkan sehingga angka secara keseluruhan berjumlah 4.788 orang pekerja. Terhadap situasi tersebut seluruh pekerja yang mengalami PHK dan dirumahkan telah diusulkan untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja yang merupakan program dari Kementerian Tenaga Kerja. Kondisi kemiskinan tersebut masih memerlukan percepatan penanganan dengan lebih mempertajam penerapan strategi pengurangan beban pengeluaran dengan fokus pada pemberian stimulan RTLH, jambanisasi, SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu), sebagai Single System Service (SWS) Program perlindungan sosial dan penanggulangan masalah sosial. SLRT adalah sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Data Terpadu Orang Tidak Mampu (DT-OTM) dan menghubungkan masyarakat miskin tersebut dengan program-program perlindungan sosial serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat miskin keluar dari lingkaran kemiskinan berdasarkan kemampuannya sendiri. Langkah strategis yang dilaksanakan dalam rangka penguatan dan penjaminan terhadap aspek Kesehatan, Sosial, Ekonomi, Keamanan dan Ketertiban Umum serta aspek strategis lainnya, ditengah pandemik global Covid-19 yaitu dengan Sinergitas Stakeholder baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Jajaran Forkopimda sampai Forkopimca, Dunia Usaha dan Industri, Gugus Tugas Kabupaten Boyolali sampai dengan Gugus Tugas di tingkat Desa/Kelurahan/RT/RW dengan melibatkan Babinkamtibmas, Babinsa, bidan desa, kader kesehatan, pendamping desa, relawan Toga Tomas dan Ormas. Infrastruktur sosial percepatan penanganan Covid-19 terdapat 6.651 Gugus Tugas Tingkat RT yang terhubung dengan 267 Gugus Tugas ditingkat Desa/Kelurahan terhubung dengan 22 Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan terhubung 1 Pusdalops (Gugus Tugas Tingkat Kabupaten).

Selanjutnya guna mewujudkan kedaulatan pangan di tengah Pandemi Covid-19 masih perlu dukungan infrastruktur pendukung pangan, efisiensi alur distribusi dan stabilitas harga pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kelembagaan petani. Demikian juga dengan infrastruktur, yang masih perlu dukungan terutama infrastruktur jalan dan jembatan, jaringan irigasi, infrastruktur penyedia air baku seperti embung dan bendung, dan akses air minum dan sanitasi layak, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk mewujudkan kesemuanya, maka perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 dalam penyusunannya diupayakan lebih komprehensif, integratif dan sinergis seraya melihat berbagai hal yang berpengaruh terhadap kondisi daerah seperti kondisi global dan kebijakan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali pada Tahun 2018 mencapai 5,72%. Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali diperkirakan akan menurun dibandingkan Tahun 2019 dan 2020. Kondisi ini akan dapat diantisipasi apabila dilakukan dengan perbaikan kinerja ekonomi daerah yang didukung oleh kinerja mitra dagang utama melalui kegiatan ekspor, komitmen pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha, serta komitmen dalam pembangunan infrastruktur.

Tantangan perekonomian ke depan antara lain pelambatan ekonomi global yang diperkirakan masih berlanjut akibat terdampak Covid-19, akan berpengaruh terhadap permintaan yang lemah dan penurunan harga komoditas, dan akan menyebabkan perdagangan internasional melemah, sehingga akan mempengaruhi kinerja ekspor dan impor.

Rencana pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2021 dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021 yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, dan disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021 merupakan amanat ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang pada intinya menyatakan bahwa Bappeda atau perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah menyusun RKPD.

RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Boyolali serta urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021 menjadi pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021, sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2021. Selain itu, RKPD juga akan digunakan sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan RKPD dari sisi proses ditempuh melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*) dan dilakukan melalui pentahapan yaitu:

- Persiapan Penyusunan RKPD;
- Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- Penyusunan Rancangan RKPD;
- Pelaksanaan Musrenbang;
- Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
- Penetapan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

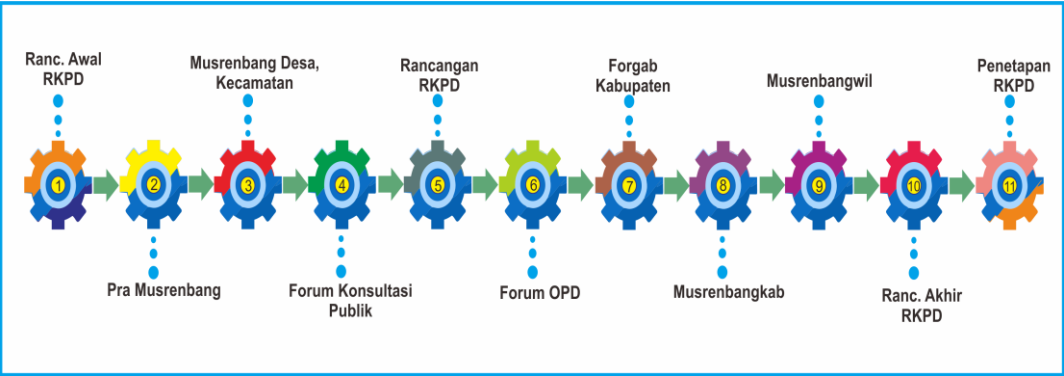
Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah di Tahun 2021;

Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 yang akan diusulkan oleh Bupati untuk disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Alur proses penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar I.1:



Gambar I.1

Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021 adalah:

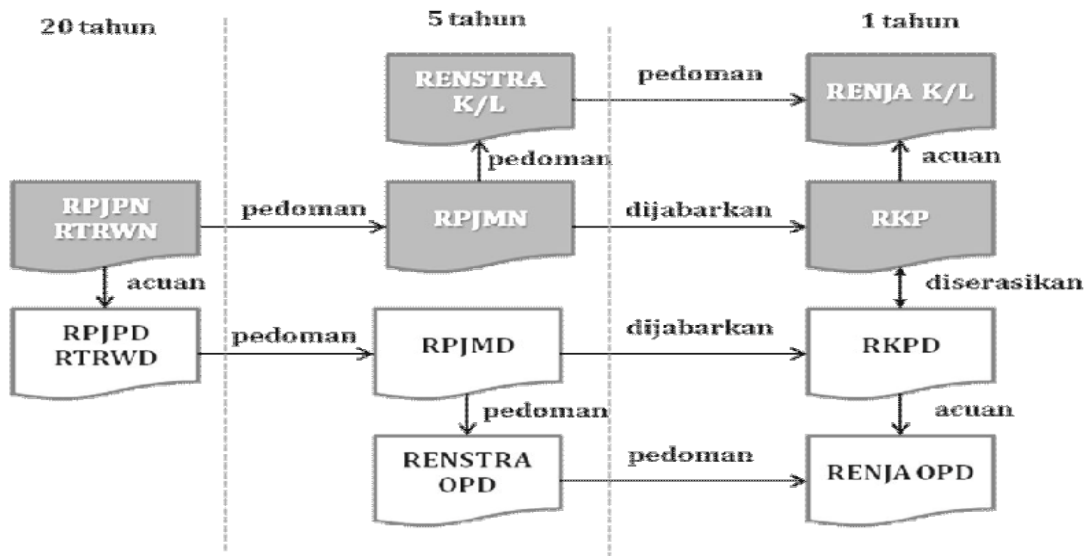
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai periodisasi penutup tahap ketiga RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025, tahun kelima RPJMD 2016-2021 serta diselaraskan dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan dokumen perencanaan lainnya antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031.

Secara umum keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.2. Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. RKPD menjadi pedoman bagi OPD untuk menyusun Renja OPD. RKPD Kabupaten diserasikan dengan RKPD Provinsi melalui forum Musrenbang Provinsi dan disesuaikan dengan RKP melalui Musrenbang Nasional. Berdasarkan uraian di atas, maka RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen-dokumen lain, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten.



Gambar I.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021 selain memperhatikan regulasi formal (UU/PP/Perpres) dan kebijakan pembangunan nasional (RPJMN, RKP), juga tetap harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral baik nasional maupun daerah. Beberapa dokumen perencanaan multi sektor di tingkat nasional yang memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021 yaitu: 1) *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; 2) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025; dan 3) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

Selanjutnya RKPD Kabupaten Boyolali juga memperhatikan Dokumen Rancangan RKPD Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang memberikan arah program strategis Jawa Tengah di Kabupaten/Kota serta dengan memperhatikan program strategis nasional di Jawa Tengah serta memanfaatkan *competitiveness* dan *comparative advantage* wilayah perbatasan dengan kabupaten/kota dan Provinsi lain.

Membangun kesepahaman dari perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan melalui mekanisme koordinatif antar wilayah dan lintas sektor yang merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang holistik, tematik, integratif berbasis spasial. Pengembangan pola kerjasama antar wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah di Kabupaten Boyolali.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021 dimaksudkan untuk:

- Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2021;
- Mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang holistik, tematik, terintegrasi, dan berorientasi spasial di Tahun 2021.

Adapun tujuannya adalah untuk:

- Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021;
- Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021;

- Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2021;
- Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.5 Kaidah Pelaksanaan

1. RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021 merupakan rencana kerja pemerintah selama satu tahun yang disusun dengan mendasarkan permasalahan, tantangan dan peluang, potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan.
2. Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021 dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 3 4 3 , yaitu dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
 - Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
 - Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD.
4. Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
5. Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
6. Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
7. Perubahan RKPD meliputi perubahan:
 - Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - Target sasaran pembangunan Daerah;
 - Prioritas pembangunan daerah;
 - Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
 - Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
8. Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilakukan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
9. Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada nomor 5 merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
10. Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.6 Sistematika RKPD

RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, kaidah pelaksanaan, sistematika RKPD, serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah, lingkungan strategis yang terdiri atas internal dan eksternal, permasalahan pembangunan daerah, serta isu strategis pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2021, serta arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah, prioritas pembangunan daerah tahun 2021, dan kebijakan dan strategi pengembangan kewilayahan Kabupaten Boyolali.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2021

Memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja utama daerah tahun 2021 dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Boyolali kurang lebih 101.510,10 hektar yang membentang dari Barat-Timur sejauh 48 km dan Utara-Selatan sejauh 54 km, yang secara administratif dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) kecamatan terdiri 261 (dua ratus enam puluh satu) desa dan 6 (enam) kelurahan.

Kabupaten Boyolali terletak pada posisi geografis antara 110⁰22' - 110⁰50' Bujur Timur dan antara 7⁰7' - 7⁰36' Lintang Selatan. Posisi geografis wilayah Kabupaten Boyolali yang strategis merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah karena berada pada segitiga emas wilayah Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar). Di samping itu, seiring dengan mulai pembangunan jalan tol Solo-Semarang dan Solo-Mantingan yang melintasi wilayah Kabupaten Boyolali serta pengembangan Bandara Internasional di Boyolali, maka diharapkan menjadi faktor pemicu percepatan pengembangan potensi Kabupaten Boyolali, terutama dalam sektor perekonomian dan industri menjadi sangat besar.

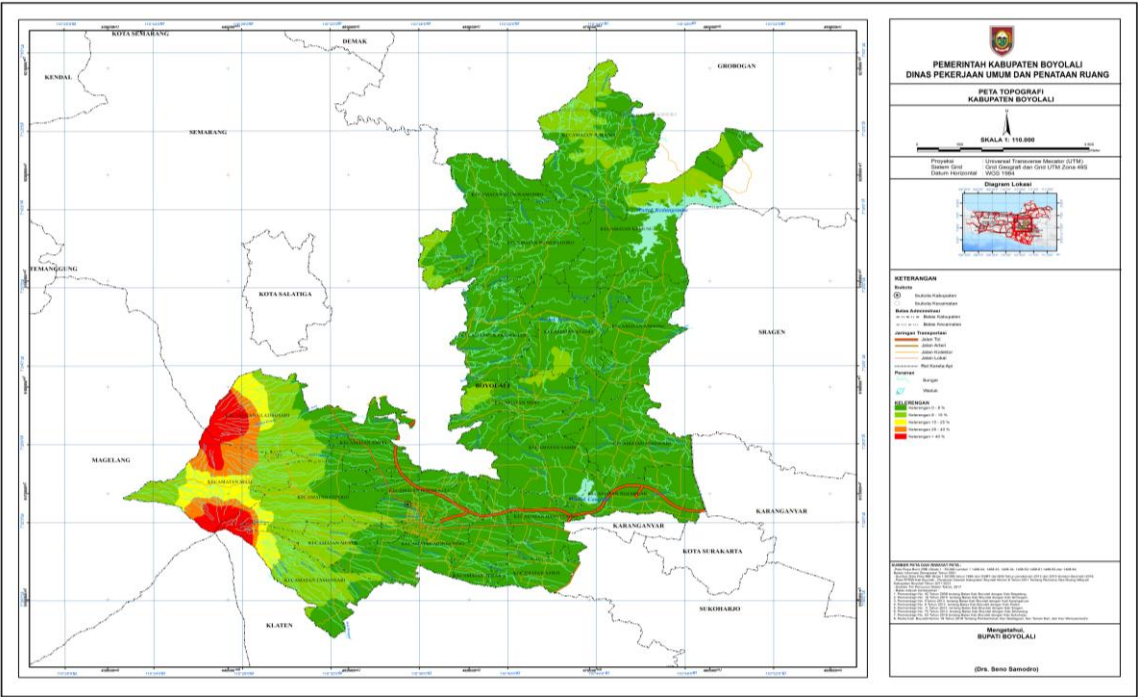
Topografi wilayah Kabupaten Boyolali secara umum dibagi menjadi beberapa wilayah berdasar ketinggian dari permukaan laut (dpl), sebagai berikut:

Tabel II.1

Topografi Wlayah Kabupaten Boyolali Berdasarkan Ketinggian

No	Ketinggian (Mdpl)	Lokasi (Kecamatan)
1	75 – 400	Kecamatan Teras, Banyudono, Sawit, Mojosongo, Ngemplak, Simo, Nogosari, Kemusu, Karanggede, dan sebagian Boyolali
2	400 – 700	Kecamatan Boyolali, Musuk, Tamansari, Mojosongo, Cepogo, Ampel, dan Karanggede
3	700 - 1.000	Kecamatan Musuk, Tamansari, Ampel, dan Cepogo
4	1.000 - 1.300	Kecamatan Cepogo, Gladagsari, dan Selo
5	1.300 - 1.500	Kecamatan Selo

Berikut disajikan peta topografi wilayah Kabupaten Boyolali Berdasarkan Ketinggian :



Gambar II.1 Peta Lereng Kabupaten Boyolali
(Peta Sumber data: Peraturan daerah kab. Boyolali no 8 tahun 2019)

Sebagian besar wilayah Kabupaten Boyolali adalah dataran rendah dan dataran bergelombang dengan perbukitan yang tidak begitu terjal. Kabupaten Boyolali secara umum termasuk bagian lereng gunung api kuarter Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Sedangkan di bagian utara terdapat waduk Kedungombo.

Secara umum topografi tinggi terletak di wilayah barat mulai dari Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk yang merupakan kaki lereng Gunung Merapi dan Kecamatan Ampel yang merupakan lereng Gunung Merbabu. Kemudian secara berangsur semakin bertopografi rendah ke arah timur Kecamatan Teras dan ke arah timur laut Kecamatan Simo. Kondisi tersebut, membuat Boyolali kaya dengan jenis tanah sesuai struktur tanahnya sebagai berikut :

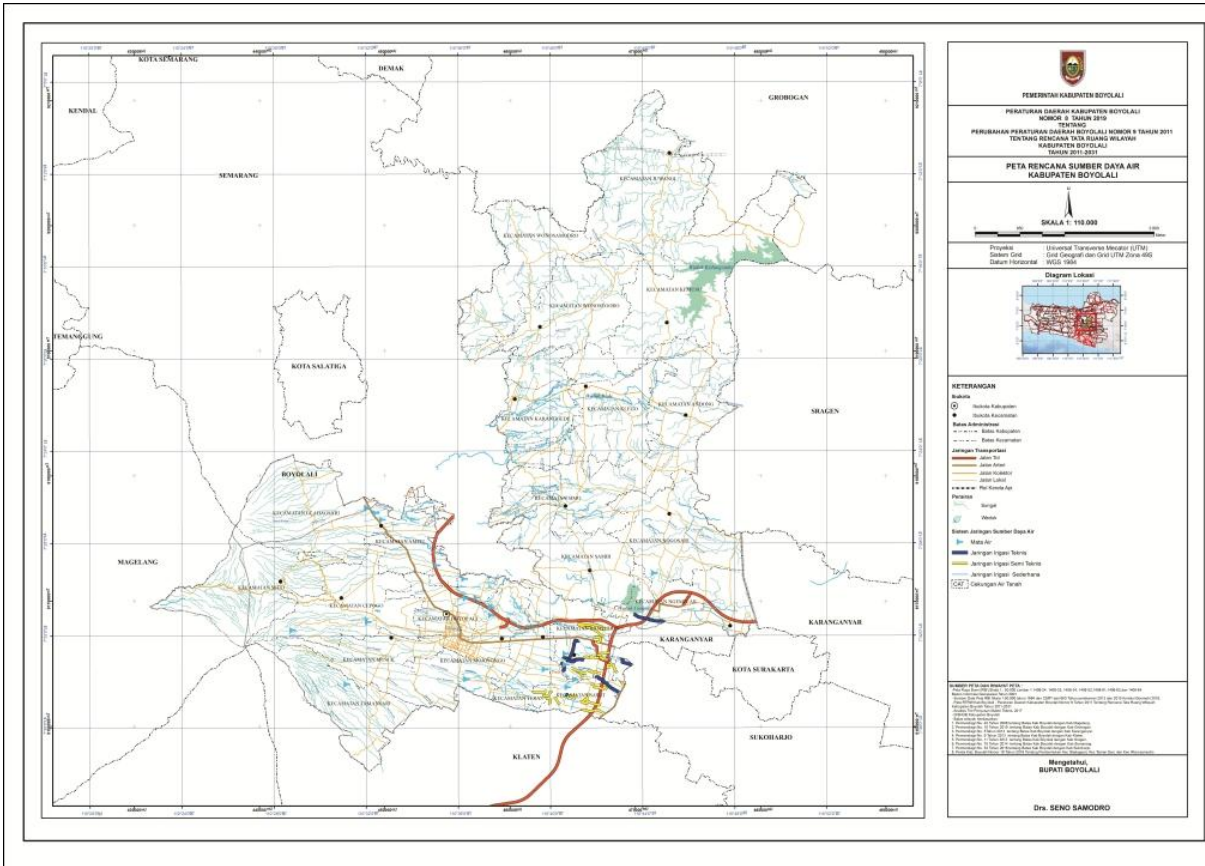
Tabel II.2

Jenis Tanah di Kabupaten Boyolali

No	Jenis Tanah	Lokasi (Kecamatan)
1	Asosiasi litosol dan grumusol	Kecamatan Kemusu, Klego, Andong, Karanggede, Wonosegoro dan Juwangi.
2	Litosol coklat	Kecamatan Cepogo, Ampel dan Selo.
3	Regosol kelabu	Kecamatan Cepogo, Ampel, Boyolali, Mojosongo, Banyudono, Teras dan Sawit.
4	Regosol coklat	Kecamatan Cepogo, Musuk, Mojosongo, Teras, Sawit dan Banyudono.
5	Andosol coklat	Kecamatan Cepogo, Ampel dan Selo.
6	Kompleks regosol kelabu dan grumusol	Kecamatan Kemusu, Wonosegoro dan Juwangi.
7	Grumosol kelabu tua dan latosol	Kecamatan Simo, Sambu, Nogosari, dan Ngemplak.
8	Kompleks andosol kelabu tua dan latosol	Kecamatan Cepogo, Ampel dan Selo.
9	Asosiasi grumosol kelabu tua dan latosol	Kecamatan Simo, Sambu, Nogosari dan Ngemplak.
10	Mediteranian coklat tua	Kecamatan Kemusu, Klego, Andong, Karanggede, Wonosegoro, Simo, Nogosari, Ngemplak, Mojosongo, Sambu, Teras dan Banyudono.

Sumber: DPU dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali

Potensi Hidrologi yang dimiliki Kabupaten Boyolali dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi maupun kepentingan lainnya, baik alami maupun buatan. Kondisi hidrologi di Kabupaten Boyolali sangat bervariasi antara satu tempat dengan tempat yang lain. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah perubahan iklim, topografi, dan struktur geologi.



Gambar II.2 Peta Rencana Sumber Daya Air
(Peta Sumber data: Peraturan daerah kab. Boyolali no 8 tahun 2019)

Keadaan hidrologi tersebut secara terinci terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.3
Rata-Rata Debit Pada Waduk Di Kabupaten Boyolali

No.	Nama/Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)
1.	Waduk Cengklik	336	
a.	Ds. Senting Kec. Sambu		8.525.200
b.	Ds.Ngargorejo, Ds.Sobokerto Kec. Ngemplak		381.354
2.	Waduk Bade	56,34	
	Ds. Bade, Ds. Klego, Ds. Blumbang, Kec. Klego		1.900.000

Sumber: DPU dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali

Data sungai berikut potensi debit air yang dimiliki oleh masing-masing sungai di wilayah Kabupaten Boyolali tersaji dalam data berikut dibawah ini:

Tabel II.4
Daftar Sungai Beserta Panjang
dan Debitnya di Kabupaten Boyolali

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Debit Air (m³/dtk)
1	Serang	15	6.844/0.441
2	Pepe	11.5	24.346/11179
3	Irang Grenjeng	4.8	0.830
4	Kapuk	3.7	0.660
5	Wates	5.1	0.760
6	Gondang	5.4	0.340
7	Rejoso	5.1	0.286
8	Bogo	4	1.800
9	Nongko	7.4	0.530
10	Pule	8	3.698
11	Sombo	7.6	1.639
12	Luwuk	6.5	0.320
13	Gandul	28.5	7.128/6.960
14	Palang	4.2	0.150
15	Klumpit	7.9	-
16	Mati	7.3	-
17	Tambakan	7.2	-
18	Mojolegi	2.6	-
19	Kedungmangir	6.3	-
20	Selo	5.3	-
21	Makasih	8.7	0.050
22	Bodeh	1.9	0.050
23	Klampok	3.9	0.050
24	Grenjengan	1.9	0.050
25	Jengglong	6.2	0.180
26	Bendungan	9.7	0.130
27	Timo	4	1.100
28	Bagor	7	1.100
29	Bedoyo	17.3	1.100
30	Dungguyangan	6.6	1.100
31	Dungori	1	1.100
32	Lunyu	6	1.100

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Debit Air (m³/dtk)
33	Kedungrong	12.2	0.075
34	Sranten	3.1	0.075
35	Bengle	11.6	0.180
36	Pringapus	7.7	0.070
37	Kedungbendo	4.4	1.012
38	Gebang	4.3	11.651
39	Nanas	4.3	-
40	Jowo	9.3	-
41	Cemoro	16.3	4.485/0.154

Sumber data: DPU dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali

Berikut disajikan daftar 95 mata air berikut luas area oncoran dan debit airnya di wilayah Kabupaten Boyolali, sebagai berikut.

Tabel II.5
Daftar Mata Air Kabupaten Boyolali

No	Nama Mata Air	Lokasi		Luas Area Oncoran (Ha)	Debit Sumber (lt/dt)
		Desa	Kecamatan		
1	Sungsang	Bendan	Banyudono	117.10	334.00
2	Tirtomoyo	Dukuh	Banyudono	12.20	23.00
3	Dahar	Dukuh	Banyudono	55.80	45.00
4	Bon Siji	Dukuh	Banyudono	57.60	45.00
5	Gumilang	Cangkringan	Banyudono	8.00	25.00
6	Loo	Cangkringan	Banyudono	5.00	18.00
7	Blawong	Cangkringan	Banyudono	6.50	25.00
8	Siaren	Cangkringan	Banyudono	2.50	5.00
9	Siwiyu	Cangkringan	Banyudono	5.00	18.00
10	Karangkulon	Cangkringan	Banyudono	37.10	25.00
11	Cabeyan	Cangkringan	Banyudono	2.50	5.00
12	Kliwonan	Cangkringan	Banyudono	3.50	10.00
13	Bergundung	Cangkringan	Banyudono	2.00	5.00
14	Simendung	Candi	Ampel	20.70	7.00
15	Urut Sewu	Urut Sewu	Ampel	NA	6.00
16	Berbeji/ Beji	Gd Slamet	Ampel	10.20	14.00
17	Widadar	Candi	Ampel	NA	3.00
18	Ngrancah	Urut Sewu	Ampel	4.20	6.00
19	Secere	Urut Sewu	Ampel	NA	6.00

No	Nama Mata Air	Lokasi		Luas Area Oncoran (Ha)	Debit Sumber (lt/dt)
		Desa	Kecamatan		
20	Pendes	Urut Sewu	Ampel	25.00	5.00
21	Bendo/Blimbing	Kemiri	Mojosongo	21.50	5.00
22	Mudal	Candi	Ampel	18.20	6.00
23	Sikolo	Ngenden	Ampel	6.00	5.00
24	Sibajing	Candi	Ampel	5.00	6.00
25	Bendo	Selodoko	Ampel	15.00	6.00
26	Jokotarub	Selodoko	Ampel	32.00	6.00
27	Pantaran	Ngagrong	Ampel	NA	80.00
28	Sililin	Kiringan	Boyolali	7.00	21.00
29	Sikuat	Mudal	Boyolali	35.00	2.00
30	Tlatar	Kebonbimo	Boyolali	14.30	294.00
31	Sipawon	Kiringan	Boyolali	8.00	5.00
32	Sungsang	Kiringan	Boyolali	31.80	17.00
33	Silenguk	Kaligentong	Ampel	13.60	5.00
34	Suyudan	Kiringan	Boyolali	12.00	10.00
35	Lerak	Metuk	Mojosongo	2.50	3.00
36	Karang Andong	Metuk	Mojosongo	32.30	28.00
37	Tawang Sari	Dlingo	Mojosongo	5.30	6.00
38	Sembo	Dlingo	Mojosongo	1.40	2.00
39	Cebong	Kragilan	Mojosongo	5.20	4.00
40	Berduk	Kragilan	Mojosongo	7.30	5.00
41	Manggis	Manggis	Mojosongo	379.90	10.00
42	Blumbang	Manggis	Mojosongo	3.90	2.00
43	Ngrancah	Manggis	Mojosongo	18.00	3.00
44	Sendang Songo	Jurug	Mojosongo	13.00	26.00
45	Gondang	Nepen	Teras	12.80	5.00
46	Tangarus	Jurug	Mojosongo	4.50	2.00
47	Gendol	Tambak	Mojosongo	14.00	13.00
48	Bendo	Tambak	Mojosongo	3.40	3.00
49	Manggis	Nepen	Teras	179.90	323.00
50	Langse	Nepen	Teras	118.60	152.00
51	Lanang Wadon	Nepen	Teras	266.20	60.00
52	Karang Duwet	Nepen	Teras	50.60	210.00
53	Soko	Jenengan	Sawit	15.20	10.00
54	Kebatan	Jenengan	Sawit	37.65	68.00

No	Nama Mata Air	Lokasi		Luas Area Oncoran (Ha)	Debit Sumber (lt/dt)
		Desa	Kecamatan		
55	Gombong	Gombong	Sawit	81.10	60.00
56	Majan	Kemasan	Sawit	23.81	10.00
57	Tegal Sono	Cepoko Sawit	Sawit	6.30	5.00
58	Ledok	Cepoko Sawit	Sawit	4.60	20.00
59	Kenteng	Cepoko Sawit	Sawit	25.30	15.00
60	Cepoko Sawit	Cepoko Sawit	Sawit	25.30	25.00
61	Gombang	Cepoko Sawit	Sawit	24.80	10.00
62	Kedungnongko	Keyongan	Nogosari	34.00	24.00
63	Pracinowesi	Keyongan	Nogosari	3.40	3.00
64	Sukabumi	Keyongan	Nogosari	NA	25.00
65	Sirah	Gunungan	Simo	10.00	15.00
66	Pinggir	Pinggir	Karanggede	11.00	15.00
67	Bantengan	Bantengan	Karanggede	11.30	15.00
68	Sangge	Sangge	Andong	15.00	5.00
69	Klego	Klego	Klego	12.00	15.00
70	Tanjung	Tanjung	klego	11.00	15.00
71	Senting	Senting	Senting	2.20	15.00
72	Rembang	Senting	Senting	16.70	NA
73	Tirtoguno	Senting	Senting	12.20	NA
74	Kopen	Cangkringan	Banyudono	14.00	NA
75	Gemuling	Cangkringan	Banyudono	13.00	NA
76	Siringan	Guwokajen	Sawit	19.70	15.00
77	Toprayan	Guwokajen	Sawit	51.70	NA
78	Mungup I	Kemasan	Sawit	174.77	90.00
79	Mungup II	Kemasan	Sawit	69.80	50.00
80	Gombang	Gombang	Sawit	80.10	NA
81	Mliwis	Mliwis	Cepogo	15.00	12.00
82	Blimbing	Manggis	Mojosongo	25.30	NA
83	Wonopedut	Wonodoyo	Cepogo	NA	80.00
84	Sumur songo	Candi Gatak	Cepogo	NA	2.00
85	Sumbung	Sumbung	Cepogo	16.00	13.00
86	Senden	Klatah	Selo	NA	NA
87	Tuk baban	Selo	Selo	NA	NA
88	Tuk Pakis	Klatah	Selo	NA	NA
89	Tlogolele	Tlogolele	Selo	105.00	400.00

No	Nama Mata Air	Lokasi		Luas Area Oncoran (Ha)	Debit Sumber (lt/dt)
		Desa	Kecamatan		
90	Sumurup	Jenengan	Sawit	11.00	10.00
91	Mranggen	Jenengan	Sawit	7.45	10.00
92	Kamal	Babadan	Sambi	31.00	3.00
93	Manggis	Nepen	Teras	293.20	267.00
94	Nyamplung	Nepen	Teras	429.98	493.00
95	Tulangan	Lencoh	Selo	NA	10.00

Sumber: DPU dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali

Berikut disajikan daftar 95 Waduk/Embung berikut luas dan volume tampung airnya di wilayah Kabupaten Boyolali, sebagai berikut:

Tabel II.6
Daftar Waduk/Embung Kabupaten Boyolali

No.	Nama Waduk/ Embung	Luas (Ha)	Volume (m³)	Lokasi (Kecamatan)
1	Waduk Kedung Ombo	3.536	723.000.000	Kemusu
2	Waduk Cengklik	336	9.299.240	Ngemplak
3	Waduk Bade	80	2.844.400	Klego
4	Drajitan	0,12	1.200	Musuk
5	Randusari 1	0,1	500	Musuk
6	Barat Blimbing	0,1	1.500	Musuk
7	Karang Kendal	0,1	550	Musuk
8	Bendosari	0,05	200	Musuk
9	Setro	0,2	5.000	Musuk
10	Karanganyar 1	0,1	500	Musuk
11	Ngipik	0,15	600	Musuk
12	Karanganyar 2	0,05	250	Musuk
13	Wonodadi	0,15	300	Musuk
14	Tagunggede	0,01	200	Musuk
15	Keposong 1	1,0	1.000	Musuk
16	Keposong 2	2,0	2.400	Musuk

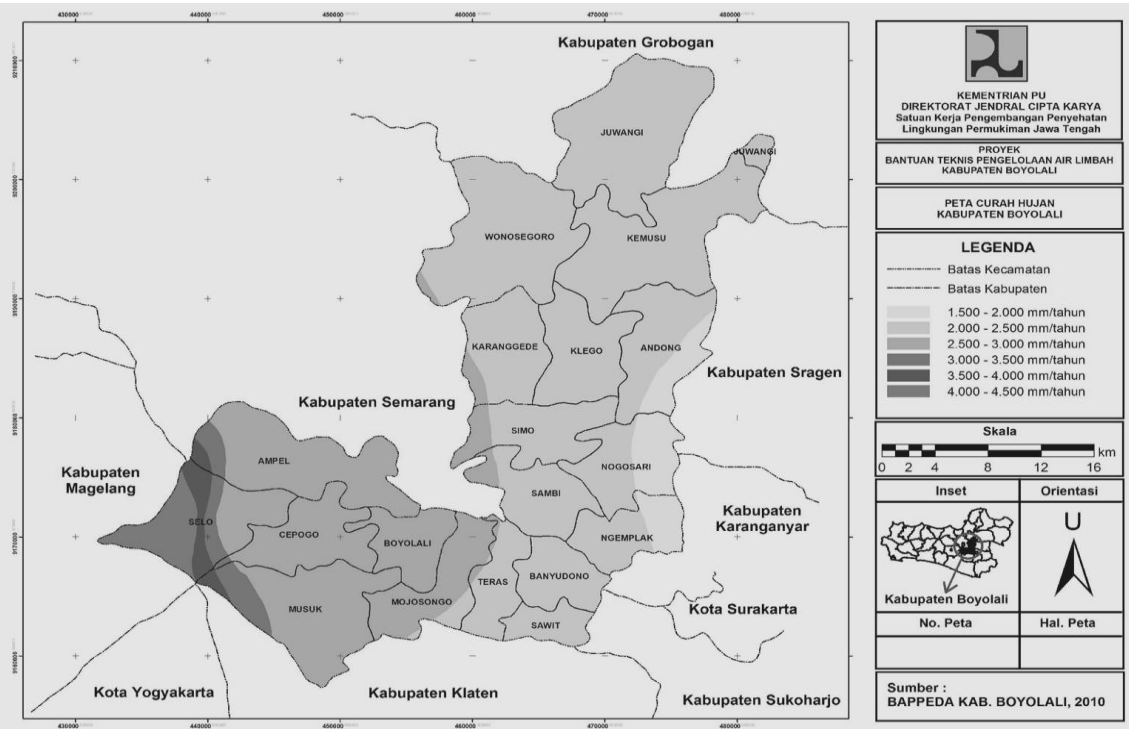
No.	Nama Waduk/ Embung	Luas (Ha)	Volume (m ³)	Lokasi (Kecamatan)
17	Randusari 2	0,2	400	Musuk
18	Kewarangan	0,2	350	Musuk
19	Tegalsari	0,2	300	Musuk
20	Karangasem	0,15	250	Musuk
21	Tegalrejo	0,3	5.000	Musuk
22	Blabur	0,1	200	Musuk
23	Lampargedede	0,2	1.500	Musuk
24	Randukuning	0,1	9.000	Musuk
25	Soko	0,6	10.000	Musuk
26	Sambirejo	0,01	100	Musuk
27	Pager Jurang	0,15	3.125	Musuk
28	Timur Sodong	0,1	150	Musuk
29	Manggung	0,15	200	Musuk
30	Kepoh	0,1	150	Musuk
31	Sukorejo	0,05	75	Musuk
32	Dukuh Rejo	0,05	75	Musuk
33	Brongkol	0,2	200	Musuk
34	Ngargowinangun	0,03	50	Musuk
35	Sangen	0,2	200	Musuk
36	Wonorejo	0,15	200	Musuk
37	Madang	0,1	150	Musuk
38	Janur	0,1	200	Musuk
39	Sidomulyo	0,15	150	Musuk
40	Margomulyo	0,1	200	Musuk
41	Banyusri	0,12	175	Musuk
42	Tempel	0,1	200	Musuk
43	Kalianyar	0,1	150	Musuk

No.	Nama Waduk/ Embung	Luas (Ha)	Volume (m ³)	Lokasi (Kecamatan)
44	Gendulan	0,25	325	Musuk
45	Tritis	0,1	100	Musuk
46	Jamprongan	0,1	100	Musuk
47	Weru	0,1	100	Musuk
48	Sumur	0,05	50	Musuk
49	Badranrejo	0,05	50	Musuk
50	Sumur Wetan	0,06	60	Musuk
51	Banjar	0,15	150	Musuk
52	Doyosari	0,1	100	Musuk
53	Tembelang	0,1	100	Musuk
54	Dk. Poko Musuk	2,3	2.000	Musuk
55	Check Dam Gupaan	0,5	6.250	Andong
56	Jatisari	0,625	6.250	Sambi
57	Tretes	0,3	3.650	Sambi
58	Glintang	0,3	338	Sambi
59	Bangsalan	0,3	338	Teras
60	Singosari	0,6	600	Mojosongo
61	Selo	0,2	180	Selo
62	Kiringan	1,2	12.600	Boyolali
63	Kiringan	0,1	2.000	Boyolali
64	Kadipaten	0,1	180	Andong
65	Klumpit	0,2	180	Karangede
66	Demangan	0,15	180	Sambi
67	Sukorame	0,2	180	Musuk
68	Kembang	0,18	180	Ampel
69	Mliwis	0,1	180	Cepogo
70	Juwangi	0,125	180	Juwangi

No.	Nama Waduk/ Embung	Luas (Ha)	Volume (m ³)	Lokasi (Kecamatan)
71	Dologan	0,175	180	Karanggede
72	Jurug	1,5	1.560	Mojosongo
73	Kalangan	0,5	550	Klego
74	Kendel	1,0	10.000	Kemusu
75	Jagir	0,3	12.000	Musuk
76	Jemowo	0,25	10.000	Musuk
77	Metuk	0,15	4.500	Mojosongo
78	Catur	0,15	3.000	Sambi
79	Klego	0,15	3.000	Klego
80	Gondanglegi	0,15	4.500	Klego
81	Kembang Kuning (Th. 2015)	0,25	7.500	Cepogo
82	Lampar (Th. 2015)	0,25	7.500	Musuk
83	Sempu (Th. 2016)	0,25	7.500	Andong
84	Lanjaran (Th. 2016)	0,25	7.500	Musuk
85	Dragan (Th. 2016)	0,25	7.500	Musuk
86	Cluntang (Th. 2016)	0,25	7.500	Musuk
87	Sangup (Th. 2016)	0,25	7.500	Musuk
88	Cepogo (Th. 2016)	0,25	7.500	Cepogo
89	Jenengan (Th. 2016)	0,25	7.500	Sawit
90	Cepoko Sawit (Th. 2016)	0,25	7.500	Sawit
91	Sumur (Th. 2016)	0,25	7.500	Musuk
92	Tawengan (Th. 2017)	0.19	5.104	Sambi
93	Lanjaran 2 (Th. 2017)	0.20	6.006	Musuk
94	Tegalrejo (Th. 2017)	0.23	6.918	Karanggede
95	Wonosegoro (Th. 2017)	0.19	5.876,25	Wonosegoro
96	Karangatak (Th. 2017)	0.18	5.472	Klego
97	Melian (Th.2018)	1.28	53.265,47	Cepogo
98	Gendulan (Th.2018)	0.16	4066,01	Jemowo

Sumber: DPU dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali

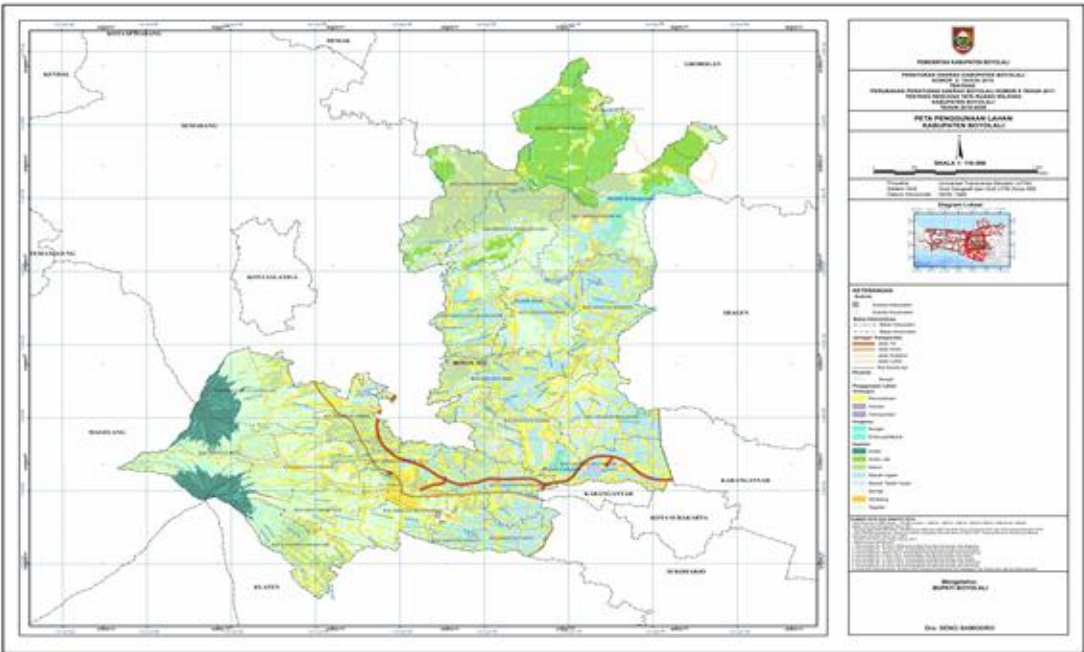
Kabupaten Boyolali mempunyai curah hujan yang tinggi dan memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas masyarakatnya, termasuk iklim tropis dengan rata-rata curah hujan sekitar 2.000 milimeter/tahun.



Gambar II.3 Peta Curah Hujan Kabupaten Boyolali
(Peta Sumber data: Peraturan daerah kab. Boyolali no 8 tahun 2019)

2.1.1.2 Penggunaan Lahan

Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 seluas 101.510,19 ha, sebagian besar (77,63%) merupakan lahan kering baik berupa tegalan, pekarangan, maupun hutan dan sisanya berupa sawah, waduk/kolam, dan lahan lainnya. Wilayah yang memiliki lahan kritis dan lahan kering meliputi Kecamatan Sambu, Simo, Nogosari, Andong, Klego, Karanggede, Wonosegoro, Wonosamudro, Kemusu, dan Juwangi. Kondisi tersebut kurang menguntungkan pengembangan pertanian dan upaya pemasaran dalam menarik investor. Sementara itu wilayah Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel, Gladagsari, Tamansari dan Musuk beriklim cukup sejuk yang mendukung untuk pengembangan budidaya peternakan sapi dan hortikultura.



Gambar II.4 Peta Penggunaan Lahan
(Peta Sumber data: Peraturan daerah kab. Boyolali no 8 tahun 2019)

Prosentase penggunaan lahan selama lima tahun baik lahan sawah maupun tanah kering dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.7
Penggunaan Lahan Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2015 - 2019

No	Penggunaan Lahan	2015		2016		2017		2018		2019	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1.	Lahan Sawah	23.824	22	22.711	22	22.686,16	22,3	22.693	22,4	22.390	22,1
a.	Irigasi Teknis	7.465	5	5.074	5	5.049,25	4,9	5.054	22,3	5.022	22,4
b.	Irigasi Setengah Teknis	4.927	5	4.853	5	4.852,75	4,7	4.862	21,4	4.697	21,0
c.	Irigasi Sederhana	2.007	3	2.665	3	2.665,34	2,6	2.665	11,7	2.561	11,4
d.	Tadah Hujan	9.425	10	10.119	10	10.118,81	9,9	10.112	44,6	10.110	45,2
2.	Tanah Kering	77.676	78	78.801	78	78.902,53	77,6	78.817	77,6	79.120	77,9
a.	Pekarangan/ Bangunan	25.290	25	25.280	25	25.228,67	24,8	28.741	36,5	25.280	32,0
b.	Tegal/ Kebun	30.466	30	30.471	30	30.482,26	30	26.707	33,9	30.471	38,5
c.	Padang Gembala	982,67	1	983	1	983,33	0,96	983	1,2	983	1,2
d.	Tambak/ Kolam	819,51	1	820	1	821,71	0,8	821	1,0	821	1,0
e.	Hutan Negara	14.835	15	14.835	15	14.836,40	14,6	14.835	18,8	14.835	18,8
f.	Perkebunan Negara/Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g.	Lainnya	5.283	6	6.410	6	6.550,16	1,5	6.730	8,5	6.730	8,5
JUMLAH		101.510	100	101.510	100	101.588,69	100	101.510	100	101.510	100,0

Sumber data: Statistik Pertanian Tahun 2019

2.1.1.3 **Potensi Pengembangan Wilayah**

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Boyolali sangat bervariasi meliputi sektor pertanian, industri, jasa serta pariwisata. Pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Boyolali dilaksanakan berdasar potensi komoditas unggulan, kondisi sosial, ekonomi serta pengaturan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali. Penetapan kawasan pada RTRW Kabupaten Boyolali dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya.

Kriteria untuk mendefinisikan kawasan/sub kawasan budidaya secara umum lebih didasarkan pada faktor kesesuaian lahan. Dilihat dari kriterianya, pada dasarnya terdapat wilayah yang dapat saja memenuhi kriteria untuk pengembangan beberapa jenis kegiatan budidaya (misalnya pertanian tanaman pangan lahan basah, pertanian tanaman pangan lahan kering dan pertanian tanaman tahunan/perkebunan lahan kering).

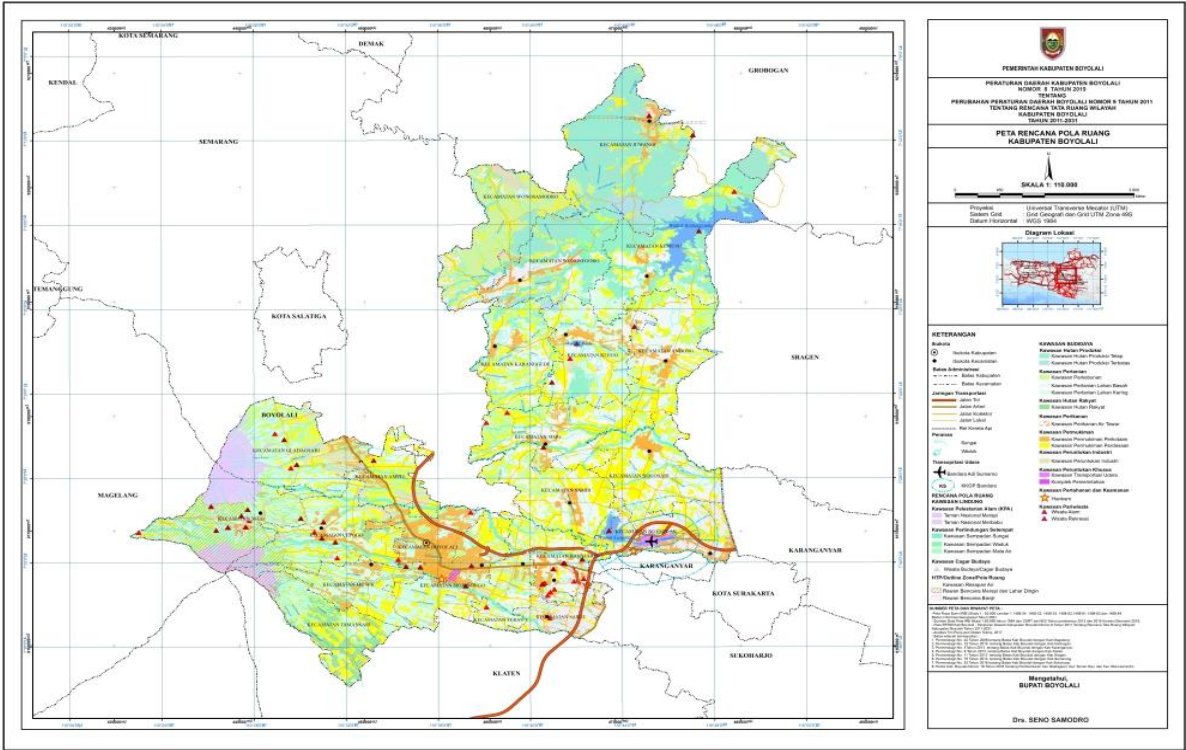
Hal ini berarti penggarisannya di atas peta akan menjadi tumpang tindih. Dengan demikian, pengalokasian ruangnya di samping didasarkan pada kesesuaian lahan juga mempertimbangkan aspek ekonomis serta kebijaksanaan secara nasional atau daerah bagi prioritasnya.

Arahan pengelolaan kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya serta untuk pemenuhan kebutuhan akan ruang budidaya, menghindari konflik pemanfaatan ruang, dan kelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan sasaran yang diinginkan dari pengelolaan kawasan budidaya adalah:

- Terselenggaranya pemanfaatan ruang dan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- Pemenuhan kebutuhan akan ruang budidaya yang sesuai kriteria/standar ruang masing-masing sektoral; dan
- Terhindarnya konflik pemanfaatan sumber daya dengan pengertian pemanfaatan ruang yang berdasarkan pada prioritas pemanfaatan bagi kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar pada masyarakat.

Adapun identifikasi potensi pengembangan wilayah Kabupaten Boyolali termaktub dalam beberapa jenis kawasan sebagaimana dalam Peta Rencana Pola Ruang dibawah ini :



Gambar II.5 Peta Rencana Pola Ruang
(Peta Sumber data: Peraturan daerah kab. Boyolali no 8 tahun 2019)

Kawasan budidaya yang dikelola pemanfaatan ruangnya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan peruntukan hutan rakyat dan Kawasan peruntukan pertanian. Kawasan budidaya hutan produksi, meliputi hutan produksi tetap seluas kurang lebih 12.461 hektar (Kecamatan Karanggede, Klego, Kemusu, Wonosegoro, Wonosamodro dan Juwangi) dan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 1.204 hektar (Kecamatan Klego, Kemusu, dan Juwangi). Kawasan peruntukan hutan rakyat. Kawasan hutan rakyat terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali, seluas kurang lebih 19.993 hektar. Adapun Potensi kawasan peruntukan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 22.711 hektar, sedang target yang akan dicapai yaitu sebagai berikut :

Tabel II.8
Luas Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Jumlah (Ha)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Selo	35	35	35	35	35
2.	Ampel	531	531	531	531	531
3.	Cepogo	55	55	55	55	55
4.	Musuk	-	-	-	-	-
5.	Boyolali	290	290	285	285	285
6.	Mojosongo	943	943	943	922	891
7.	Teras	1.427	1.427	1.427	1.423	1.423
8.	Sawit	1.267	1.267	1.267	1.267	1263
9.	Banyudono	1.520	1.520	1.520	1.520	1490
10.	Sambi	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123
11.	Ngemplak	1.459	1.459	1.459	1.404	1.404
12.	Nogosari	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490

No.	Kecamatan	Jumlah (Ha)				
		2015	2016	2017	2018	2019
13.	Simo	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
14.	Karanggede	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586
15.	Klego	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
16.	Andong	2.233	2.233	2.233	2.233	2.233
17.	Kemusu	503	503	503	503	503
18.	Wonosegoro	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
19.	Juwangi	578	578	578	578	380
20.	Tamansari	-	-	-	-	-
21.	Gladagsari	40	40	40	40	-
22.	Wonosamodro	789	789	789	789	789
Jumlah		22.778	22.778	22.773	22.693	22.390

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali

Potensi kawasan pertanian lahan kering dibedakan ke dalam kawasan tegalan seluas kurang lebih 30.145 hektar tersebar di 22 (dua puluh dua) kecamatan. Lokasi kawasan pertanian holtikultura yang berada di Kecamatan Selo, Ampel, Gladagsari, Cepogo, Musuk, Tamansari, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosamodro dan Wonosegoro.

Peruntukan perikanan budidaya perkolaman berada di seluruh kecamatan. Peruntukan perikanan budidaya karamba meliputi: Kecamatan Sambu, Ngemplak, Kemusu dan Juwangi. Peruntukan perikanan tangkap di perairan umum meliputi: Kecamatan Sambu, Ngemplak, Klego, Kemusu, Juwangi. Peruntukan minapolitan terdiri atas: Kawasan inti minapolitan seluas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar meliputi: Kecamatan Teras, Sawit, dan Banyudono. Sedangkan penyangga minapolitan meliputi selain ketiga kecamatan tersebut. Rencana pengembangan jaringan perikanan berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT)–Balai Benih Ikan (BBI) yaitu Balai Benih Ikan (BBI) Tlatar dan Bangak.

Rencana kawasan pertambangan belum bisa direncanakan, tetapi langkahnya adalah: Menetapkan kawasan peruntukan pertambangan atau dapat diartikan sebagai wilayah yang berpotensi pertambangan, Investarisasi bahan tambang bernilai tinggi yang indikasinya telah ada dan ekplorasi kekayaan tambang dan mineral dengan persiapan studi kelayakan, rencana tindak dan sistem kerjasama yang akan dikembangkan.

Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) hektar meliputi 19 (sembilan belas) kecamatan: Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Teras, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sambu, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Simo, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Klego, Kecamatan Andong, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Wonosegoro, Kecamatan Juwangi, Kecamatan Gladagsari, dan Kecamatan Wonosamodro. Industri besar terdiri atas jenis industri permesinan, listrik, tekstil, alat angkutan, makanan, galian bukan logam, industri kayu, dan industri sejenis lainnya. Industri menengah terdiri atas jenis industri pertanian, kertas, industri kayu, penerbit, percetakan, pakaian jadi dan industri sejenis lainnya.

Kawasan wisata alam terdiri atas: Air Terjun Kedung Kayang berada di Kecamatan Selo, Sumber Sipendok berada di Kecamatan Gladagsari Agrowisata Sapi Perah berada di Kecamatan Cepogo, Kawasan Wisata Arga Merapi-Merbabu dan lain-lain. Kawasan wisata religi terdiri atas: Makam Ki Ageng Kebo Kanigoro berada di Kecamatan Selo, Makam Ki Ageng Pantaran berada di Kecamatan Gladagsari. Kawasan wisata budaya terdiri atas: Kesenian tradisional dan upacara tradisional berada di Kecamatan Selo, Wayang berada di Kecamatan Sawit, Upacara tradisional berada di Kecamatan Banyudono dan lain-lain. Kawasan wisata rekreasi terdapat di kawasan wisata: Pesanggrahan Paras berada di Kecamatan Cepogo, Waduk Cengklik berada di Kecamatan Ngemplak, Waduk Kedungombo berada di Kecamatan Kemusu dan lain-lain.

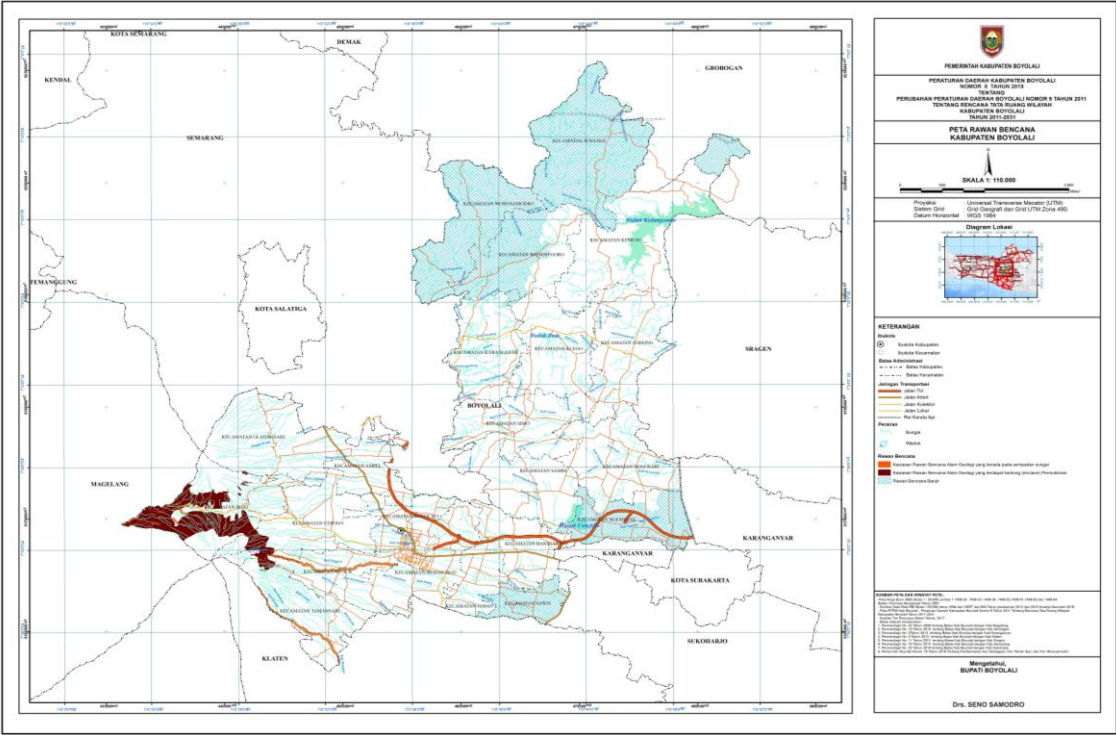
Permukiman Kota, yaitu Kawasan permukiman kota mencakup wilayah pengembangan kota untuk ibukota Kabupaten dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) baik yang telah mempunyai RUTRK maupun belum). Kebijakan pemanfaatan ruangnya didasarkan pada tujuan pengembangan sarana prasarana penunjangnya yang meliputi: penataan ruang kota yang mencakup penyusunan dan peninjauan kembali (evaluasi, revisi) rencana tata ruang kota.

Permukiman Perdesaan, yaitu Kebijakan Pemanfaatan Ruang Permukiman Perdesaan didasarkan pada tujuan untuk mengembangkan kawasan permukiman yang terkait dengan kegiatan budidaya pertanian yang meliputi pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang terdapat dalam Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D). Sedangkan, permukiman pedesaan di luar KTP2D mencakup perkampungan yang ada dan arahan bagi perluasannya.

2.1.1.4 Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang memiliki kondisi geografis dan topografis yang memungkinkan terjadinya beberapa jenis bencana di wilayah. Kondisi tersebut dapat terjadi karena faktor alam maupun non alam.

Data peta rawan bencana di wilayah Kabupaten Boyolali berupa peta Rawan Bencana Banjir Air dan Lahar Dingin, Rawan Bencana Longsor, Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi, Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Rawan Bencana Gempa Bumi, Kekeringan dan angin Topan dapat disampaikan berikut dibawah ini :



Gambar II.6 Peta Rawan Bencana
(Peta Sumber data: Peraturan daerah kab. Boyolali no 8 tahun 2019)

Beberapa kejadian bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Boyolali dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel II.9
Kawasan Rawan Bencana Alam di Kabupaten Boyolali

No	Bencana Alam	Kawasan/Wilayah
1	Banjir	Kecamatan Ngemplak, Nogosari, Sawit, Banyudono, Kemusu, Selo, Wonosegoro, Wonosamodro, dan Juwangi.
2	Banjir lahar dingin	Kecamatan Selo, Musuk, Tamansari, Cepogo, Boyolali dan Mojosongo.
3	Tanah longsor/ Gerakan Tanah	Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel, Kemusu, Klego, Tamansari dan Musuk.
4	Letusan gunung berapi	Kecamatan Selo (Desa Suroteleng), Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk, Kecamatan Tamansari.
5	Kebakaran hutan	Kecamatan Ampel, Selo, Cepogo, Juwangi
6	Angin Ribut	Semua (19) Kecamatan di Boyolali

No	Bencana Alam	Kawasan/Wilayah
7	Kekeringan	Di Kecamatan Musuk, Tamansari, Sambu, Nogosari, Simo, Andong, Wonosegoro, Wonosamodro, Kemusu, dan Juwangi.
8	Gempa bumi	Kecamatan Selo, Musuk, Tamansari, Cepogo, Banyudono dan Sawit.

Sumber: BPBD Kabupaten Boyolali

Oleh karena itu dalam rangka pengembangan kawasan rawan bencana tersebut, dilakukan dengan:

- Menghindari kawasan yang rawan bencana alam banjir, banjir lahar, tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, angin topan, kekeringan, gerakan tanah dan gempa bumi sebagai kawasan terbangun;
- Memberikan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam; mengembangkan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa; dan
- Membangun jalur evakuasi bencana.

2.1.2 Aspek Demografis

2.1.2.1 Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Boyolali

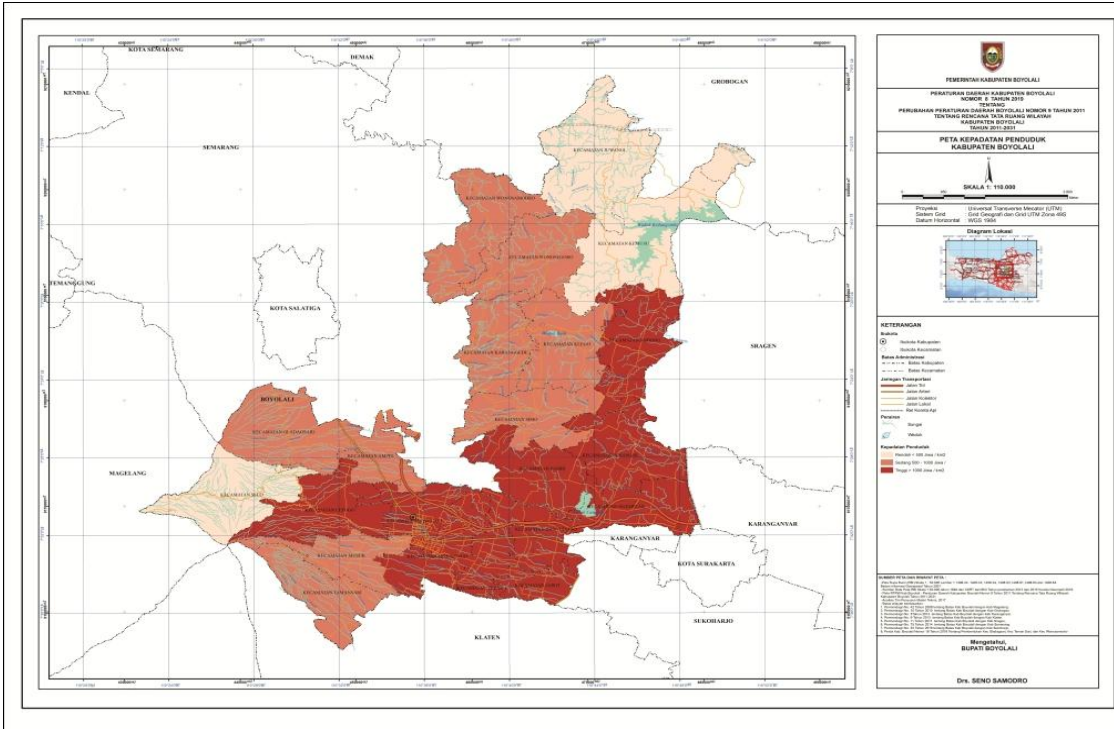
Penduduk Kabupaten Boyolali pada Tahun 2016 berjumlah 969.325 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 477.189 jiwa dan perempuan sebanyak 492.136 jiwa, dengan luas wilayah 101.510,20 ha maka kepadatan penduduk sebesar 955 jiwa/Km². Sedangkan pada akhir Tahun 2019 berdasarkan data base kependudukan semester I yang direalisasi bulan September 2019 jumlah penduduk menjadi 1.051.867 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 529.904 jiwa dan perempuan sebanyak 521.963 jiwa, serta kepadatan penduduk sebesar 1.036 jiwa/Km². Data tersebut memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk Kabupaten Boyolali selama 4 tahun terjadi penambahan 68.829 jiwa atau terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun 1,67%. Data perkembangan penduduk Kabupaten Boyolali sejak akhir Tahun 2016 sampai dengan akhir Tahun 2019, tersaji sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.10
Data Kependudukan Tahun 2015-2019
Kabupaten Boyolali

No	Tahun	Jesnis Kelamin		Jumlah	Peru- bahan	Pertumb uhan (%)	Kepadatan penduduk (Jiwa /Km ²)
		Laki-laki	Perempuan				
1	2015						
2	2016	477.189	492.136	969.325	5.635	0,58	955
3	2017	479.972	494.787	974.579	5.254	0,54	960
4	2018	522.127	517.946	1.040.073	46.146	4.44	1.024
5	2019	529.904	521.963	1.051.867	11.794	1.12	1.036

Sumber data:Angka Proyeksi Penduduk Kabupaten Boyolali (Dispendukcapil Kab.Boyolali)

Penjelasan tabel di atas, bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Boyolali dari Tahun 2016 sampai Tahun 2019 rata-rata sebesar 1,67 %, dan Tahun 2018 tingkat pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan sebesar 3,9% dari Tahun 2017 menjadi sebesar 4,44% dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan lagi sebesar 3,32 % menjadi sebesar 1,12%. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk maka tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi sehingga perlu menjadi perhatian utama dalam penyediaan lahan pemukiman dan pertanian.



Gambar II.7 Peta Kepadatan Penduduk
(Peta Sumber data: Peraturan daerah kab. Boyolali no 8 tahun 2019)
Untuk mengetahui data perkembangan penduduk Kabupaten Boyolali per Kecamatan pada tahun 2016-2019, bisa dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.11
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Boyolali
Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Penduduk				
		2015	2016	2017	2018	2019*)
1.	Selo	29.055	29.580	29.740	29.177	29.342
2.	Ampel	78.217	78.737	79.164	81.527	82.444
3.	Cepogo	55.700	56.579	56.886	58.294	59.351
4.	Musuk	59.417	57.037	57.346	60.807	61.329
5.	Boyolali	68.917	68.773	69.146	71.273	71.965
6.	Mojosongo	53.782	52.736	53.022	56.946	57.996
7.	Teras	46.145	44.892	45.135	48.477	49.209
8.	Sawit	31.426	30.933	31.101	32.673	32.954
9.	Banyudono	50.054	49.644	49.913	52.082	52.907
10.	Sambu	45.735	42.938	43.171	47.142	47.549
11.	Ngemplak	80.572	85.212	85.674	87.535	88.840
12.	Nogosari	64.542	65.963	66.321	71.265	72.199
13.	Simo	46.887	45.916	46.165	49.308	50.130
14.	Karanggede	42.517	39.191	39.403	45.928	46.326
15.	Klego	43.934	40.825	41.046	48.104	48.670
16.	Andong	57.508	55.661	55.963	61.243	61.751
17.	Kemusu	41.622	40.841	41.062	45.132	45.592
18.	Wonosegoro	47.766	51.017	51.294	57.147	57.794
19.	Juwangi	30.522	32.661	33.030	35.419	35.519
20.	Gladagsari	-	-	-	-	-
21.	Tamansari	-	-	-	-	-
22.	Wonosamodro	-	-	-	-	-
JUMLAH		974.318	969.325	974.579	1.040.073	1.051.867

Sumber data: *) Dispendukcapil Kabupaten Boyolali.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2019 tingkat jumlah penduduk paling tinggi yaitu Kecamatan Ngemplak dengan jumlah penduduk 88.840 jiwa, sedang Kecamatan Selo dengan jumlah penduduk paling rendah sejumlah 29.342 jiwa.

2.1.2.2 Struktur Penduduk

Penduduk Kabupaten Boyolali pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 apabila dibagi menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.12
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019

Rentang Usia (Tahun)	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019*)
0 – 4	59.908	55.828	56.131	74.241	74.583
5 – 9	69.333	75.614	76.024	77.840	83.452
10 – 14	74.255	77.543	77.964	74.483	81.411
15 -19	70.456	81.806	81.707	73.686	69.593
20 – 24	77.702	63.535	70.041	77.688	78.520
25 – 29	73.818	64.815	59.180	77.290	77.297
30 – 34	82.308	72.413	69.151	79.241	77.333
35 – 39	76.059	66.573	68.394	83.385	83.634
40 – 44	69.893	72.176	67.155	73.516	74.513
45-49	69.179	67.066	68.343	72.903	72.474
50 -54	62.925	63.473	63.063	67.187	68.404
55 – 59	56.779	50.283	55.834	60.552	61.401
60 – 64	40.617	40.162	42.916	48.184	48.761
> 65	91.086	118.037	118.679	99.877	100.491
JUMLAH	974.318	969.325	974.579	1.040.073	1.051.867

Sumber data: *) Dispendukcapil Kabupaten Boyolali.

Pengelompokkan penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam penataan jumlah angkatan kerja penduduk yang umurnya adalah usia di atas 15 tahun sampai dengan di bawah 64 tahun atau yang dikenal dengan usia produktif. Pada gilirannya usia produktif tersebut akan berkurang perkembangannya tiap tahun karena sejumlah penduduk melanjutkan sekolah dan sejumlah penduduk terserap pada lapangan kerja, selisihnya dikenal dengan angka pengangguran.

Tabel II.13
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Boyolali
Tahun 2015-2019

Kelompok Umur	2015	2016	2017	2018	2019*)
0 – 14	203.828	208.986	226.893	226.564	239.446
15 – 64	641.901	642.302	644.896	713.632	711.930
> 65	117.961	118.037	102.790	99.877	100.491
JUMLAH	963.690	969.325	974.579	1.040.073	1.051.867

Sumber data: *) Dispendukcapil Kab. Boyolali.

Perubahan struktur penduduk menurut umur mempengaruhi besarnya angka ratio ketergantungan. Angka rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan penduduk tidak produktif (65 tahun ke atas) dan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun). Tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya rasio ketergantungan. Semakin tinggi rasio ketergantungan, beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif akan semakin besar. Hal ini diakibatkan hambatan atas upaya perkembangan daerah akan semakin besar pula.

Angka rasio ketergantungan Kabupaten Boyolali berdasarkan proyeksi penduduk Tahun 2019 sebesar 20,94% yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif

menanggung sekitar 2.094 orang penduduk tidak produktif. Sedangkan proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Boyolali pada Tahun 2019 sebesar 711.930 jiwa.

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

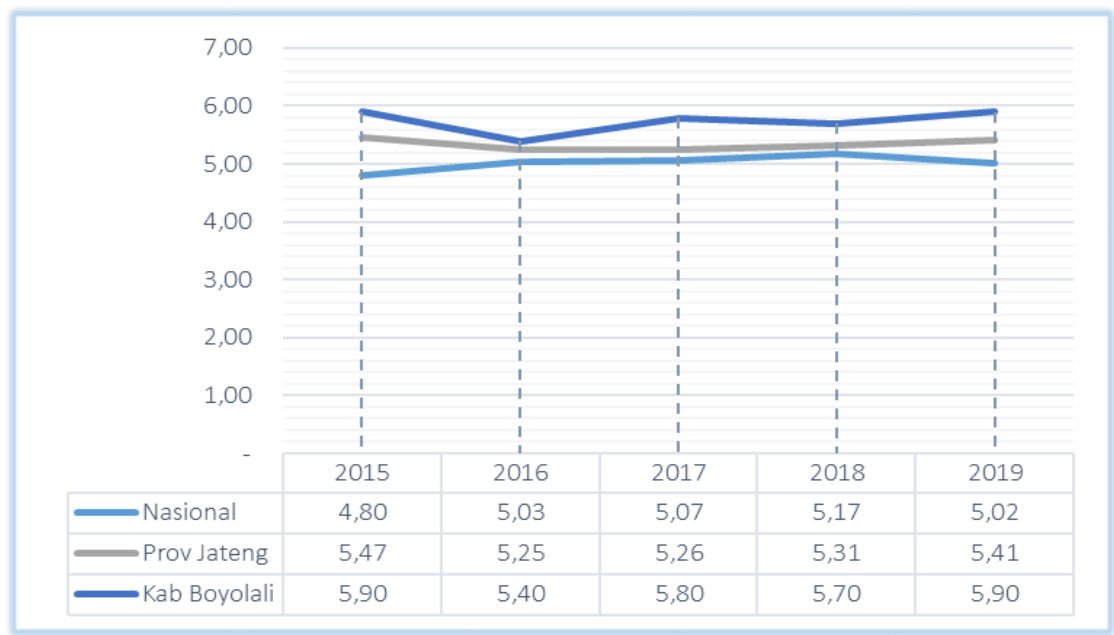
Salah satu persepsi kesejahteraan masyarakat, dilihat dari peran pemerintah adalah melakukan pembangunan ekonomi, yakni serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan :

- memperluas lapangan kerja,
- pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat,
- meningkatkan hubungan ekonomi regional dan
- melakukan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Pembangunan ekonomi dapat pula diartikan sebagai usaha agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Ekonomi Kabupaten Boyolali selama periode waktu lima tahun terakhir (2015-2019) tumbuh relatif stabil pada kisaran 5 persen. Bahkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali senantiasa lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali mencapai 5,90 persen, Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,41 persen, sedangkan nasional tumbuh sebesar 5,02 persen.

Grafik II.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 - 2019



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara agregat ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 rata-rata terjadi kenaikan sebesar 8,37%. Sedangkan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 rata-rata terjadi kenaikan sebesar 7,67%.

Adapun kondisi perkembangan PDRB Kabupaten Boyolali Tahun 2015 sampai Tahun 2019 atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) dapat dilihat pada tampilan tabel berikut.

Tabel II.14
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Boyolali
Tahun 2015- 2019

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai (Juta Rupiah)	(%) pertumbuhan	Nilai (Juta Rupiah)	(%) pertumbuhan
2015	23.567.823,14	11,70	18.170.383,95	11,58
2016	25.756.715,67	5,33	19.139.359,22	9,31
2017	27.894.681,55	8,30	20.249.399,44	5,80
2018	30.221.796,39	8,34	21.407.484,05	5,72
2019	32.704.381,16	8,21	22.681.097,81	5,95

Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

Tabulasi kondisi perkembangan PDRB Eks Karesidenan Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sampai Tahun 2019 atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) dapat dilihat pada tampilan tabel berikut.

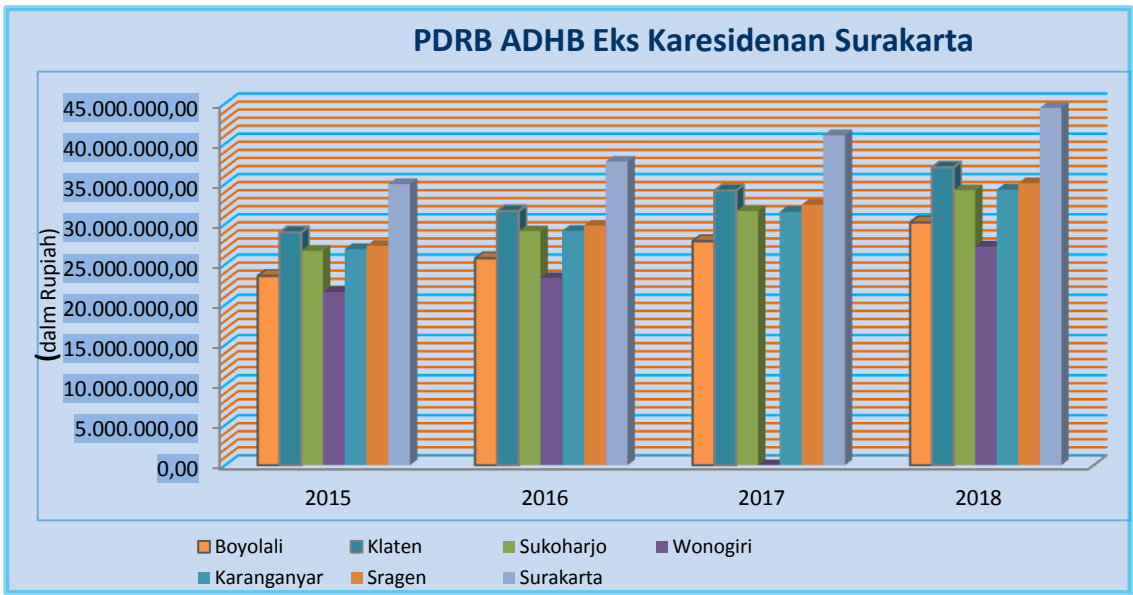
Tabel II.15
PDRB ADHB Eks Karesidenan Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015–2019

KABUPATEN /KOTA/ PROVINSI	PDRB ADHB (Dalam Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018*	2019
1. Boyolali	23.567.823,14	25.756.715,67	27.894.681,55	30.221.796,39	32.704.381,16
2. Klaten	28.988.778,55	31.619.241,19	34.197.239,30	37.055.979,36	27,829,653.91
3. Sukoharjo	26.700.716,80	29.130.306,98	31.621.414,17	34.204.232,73	27,076,442.63
4. Wonogiri	21.585.475,62	23.329.378,86	25. 128.774,50	27.229.271,26	20,856,209.49
5. Karanganyar	26.904.049,89	29.172.749,37	31.538.339,97	34.287.872,56	26,641,186.38
6. Sragen	27.315.123,08	29.826.142,98	32.409.757,15	35.097.579,81	26,853,059.12
7. Surakarta	34.970.374,09	37.771.066,12	41.043.339,48	44.427.890,52	35,443,181.34
8. Jawa Tengah	1.010.986.637,17	1.087.316.682,68	1.172.794.523,68	1.268.454.783,96	1.268.454.783,96

Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

Grafik kondisi perkembangan PDRB Eks Karesidenan Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sampai Tahun 2018 atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) dapat dilihat pada tampilan tabel berikut.

Grafik II.2
PDRB ADHB Eks Karesidenan Surakarta
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015–2018



Tabulasi kondisi perkembangan PDRB ADHK Eks Karesidenan Surakarta dan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2015–2018 dapat dilihat pada tampilan berikut.

Tabel II.16
PDRB ADHK Eks Karesidenan Surakarta dan Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2015–2018

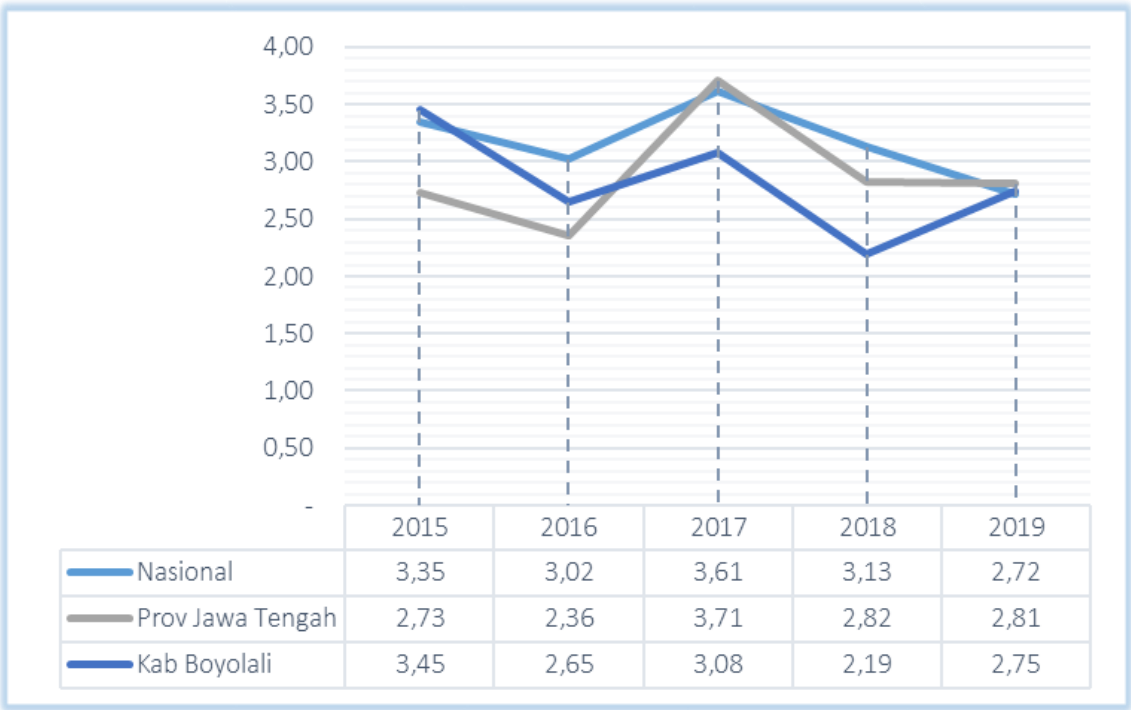
KABUPATEN/ KOTA/ PROVINSI	PDRB ADHK (dalam juta rupiah)			
	2015	2016	2017	2018*
1. BOYOLALI	18.170.383,95	19.139.359,22	20.249.399,44	21.407.484,05
2. KLATEN	22.558.976,15	23.725.740,98	24.989.902,87	26.381.363,13
3. SUKOHARJO	21.612.078,19	22.847.982,81	24.163.939,48	25.570.865,09
4. WONOGIRI	16.977.198,56	17.869.145,42	18.820.497,77	19.839.038,83
5. KARANGANYAR	21.286.287,14	22.436.293,80	23.731.952,05	25.150.277,73
6. SRAGEN	21.390.871,20	22.625.821,66	23.976.752,18	25.355.124,94
7. SURAKARTA	28.453.493,87	29.975.873,01	31.685.480,46	33.506.170,40
8. JAWA TENGAH	806.765.092,17	849.099.354,69	893.750.296,17	941.164.118,75

Keterangan: *: angka sementara
Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

Inflasi adalah besarnya perubahan harga barang dan jasa secara rata-rata yang mencakup ratusan komoditas yang dikonsumsi masyarakat. Indikator ini menunjukkan tingkat stabilitas perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. Inflasi yang rendah dan terkendali merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi, karena kegiatan produksi barang dan jasa berlangsung sesuai hukum pasar yang berlaku dan dapat diprediksi sifat dan perilakunya di pasar.

Tiga tahun terakhir yakni 2017, 2018 dan 2019, angka Inflasi Kabupaten Boyolali dibawah angka Inflasi Nasional dan Provinsi, dapat dilihat pada tampilan berikut :

Grafik II.3
Laju Inflasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 - 2019



Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, angkatan kerja yang masuk pada pasar kerja mengalami peningkatan pula. Permasalahan akan muncul ketika jumlah para pencari kerja tidak seimbang dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Mengingat urgensi dari aspek ketenagakerjaan, di mana manfaat langsung dari pembangunan dapat diukur melalui tingginya kesempatan kerja, setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja. Dengan kata lain,

salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru untuk menyerap angkatan kerja.

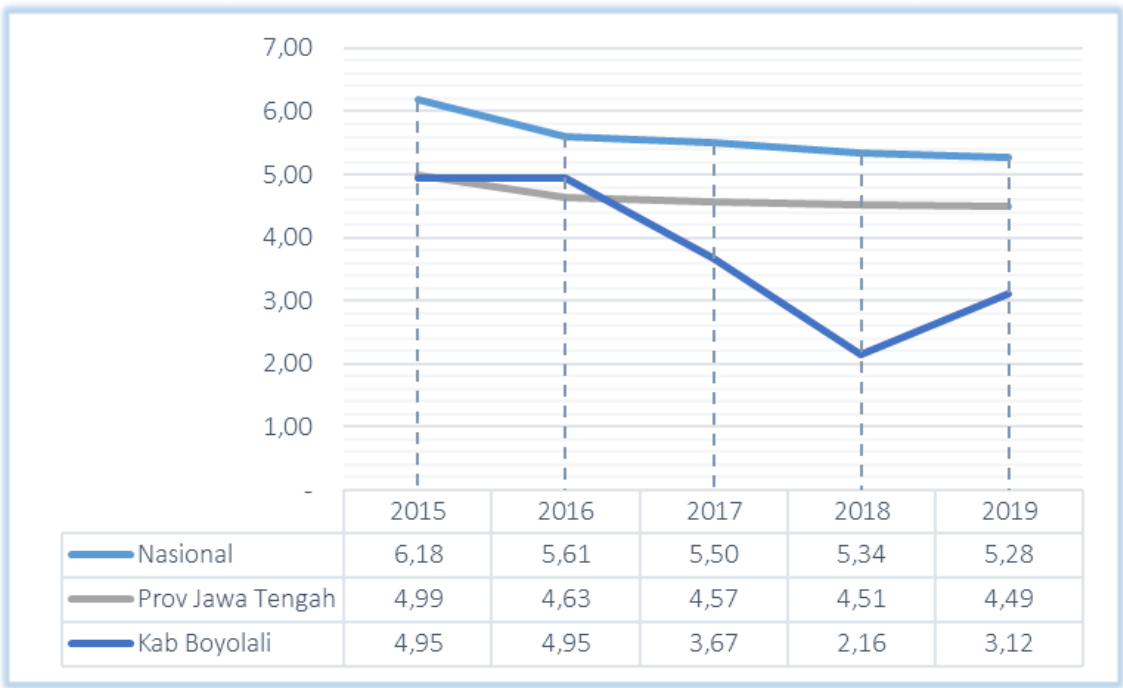
Tabel II.17
Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Boyolali
Tahun 2015-2019

No.	Tahun	TPAK	TPT
1	2015	74.68	4.95
2	2016*	N/A	N/A
3	2017	69.96	3.67
4	2018	72.14	2.16
5	2019	72.39	3.12

Sumber: BPS Jawa Tengah
*BPS tidak merilis data pada tahun 2016

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Tahun 2019 TPT Kabupaten Boyolali mencapai 3,12 persen. Sejak 2017, angka TPT Kabupaten Boyolali selalu lebih baik jika dibandingkan dengan TPT Provinsi dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran di Boyolali terus berkurang dari tahun ke tahun dari total jumlah angkatan kerja yang ada. Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini dengan asumsi tahun 2016 karena BPS tidak merilis data, diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya.

Grafik II.4
Angka Kemiskinan Kabupaten Boyolali Tahun 2015 - 2019



Dalam upaya perumusan kebijakan dan intervensi program penanggulangan kemiskinan, secara nasional data yang digunakan adalah data hasil pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 dengan hasil berupa Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 yang telah diserahkan kepada Kementerian Sosial dan dirilis oleh Tim Nasional Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. PBDT Tahun 2015 disepakati untuk digunakan sebagai *single data*/data tunggal dalam program penanggulangan kemiskinan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Konsep BPS untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta (Rupiah/kapita/bulan) pada Tahun 2015-2019 dapat kami sajikan data sebagai berikut:

Tabel II.18
Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta
(Rupiah/Kapita/Bulan) pada Tahun 2015-2019

No	Kab/Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Boyolali	263.734,00	283.921,00	293.405,00	304.575,00	332.996,00
2	Klaten	340.484,00	364.240,00	376.305,00	397.447,00	405.537,00
3	Sukoharjo	303.030,00	327.217,00	337.037,00	345.363,00	337.319,00
4	Wonogiri	252.930,00	275.507,00	284.710,00	293.357,00	327.364,00
5	Karangayar	252.930,00	329.531,00	340.538,00	348.896,00	365.151,00
6	Sragen	303.056,00	283.649,00	292.544,00	312.106,00	335.334,00
7	Kota Surakarta	263.199,00	430.293,00	448.062,00	464.063,00	437.516,00

Sumber Data: BPS Provinsi Jawa Tengah

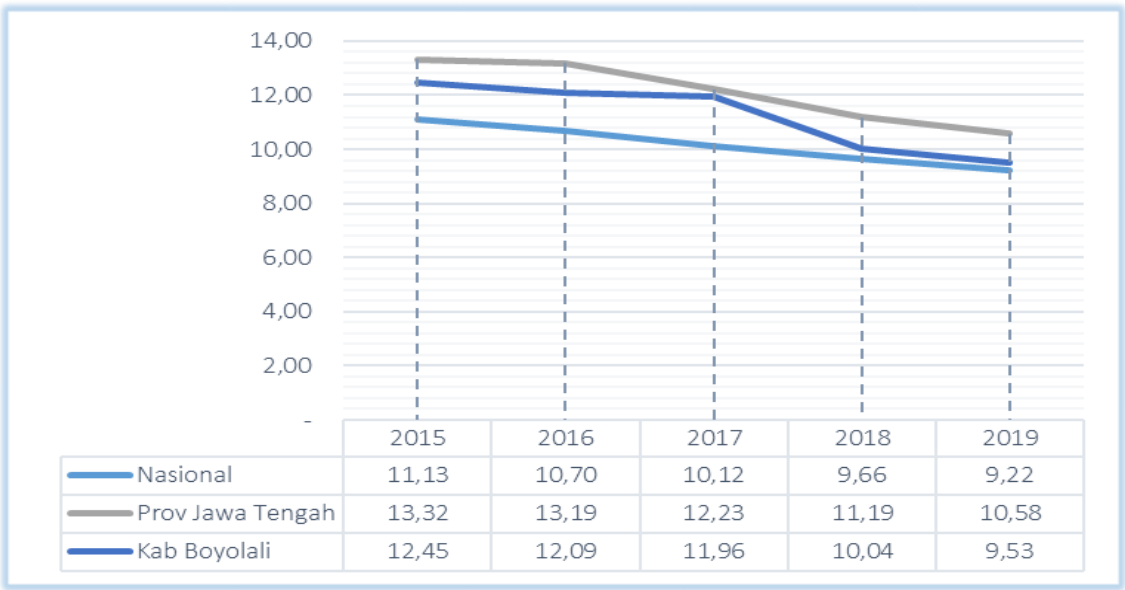
Tabel II.19
Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Boyolali
Tahun 2015-2019

No	Tahun	Prosentase Penduduk Miskin (%)
1	2015	12,45
2	2016	12,09
3	2017	11,96
4	2018	10,04
5	2019	9,53

Sumber Data: BPS Provinsi Jawa Tengah

Selama kurun waktu 2015-2019 kemiskinan di Kabupaten Boyolali, terus mengalami penurunan. Prosentase kemiskinan selama lima tahun terakhir di Kabupaten Boyolali lebih kecil dari prosentase atau tingkat kemiskinan provinsi jawa tengah, namun masih lebih besar dari prosentase atau tingkat kemiskinan Nasional. Data selengkapnya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :

Grafik II.5
Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019

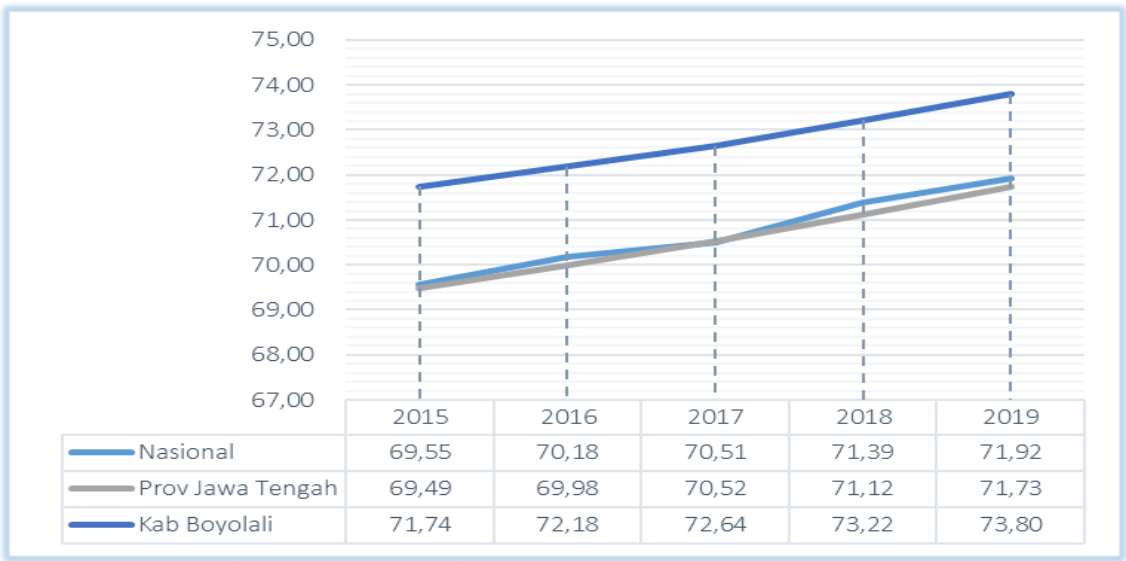


2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Boyolali secara umum mengalami kemajuan yang konsisten selama periode 2015 hingga 2019. IPM Kabupaten Boyolali konstan selalu diatas IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dimana di tahun

2015 IPM Kabupaten Boyolali mencapai angka 71,74, Provinsi 69,49 dan Nasional 69,55. Adapun ditahun 2019 IPM Kabupaten Boyolali telah mencapai mencapai angka 73,80, Provinsi 71,73 dan Nasional 71,92.

Grafik II.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019



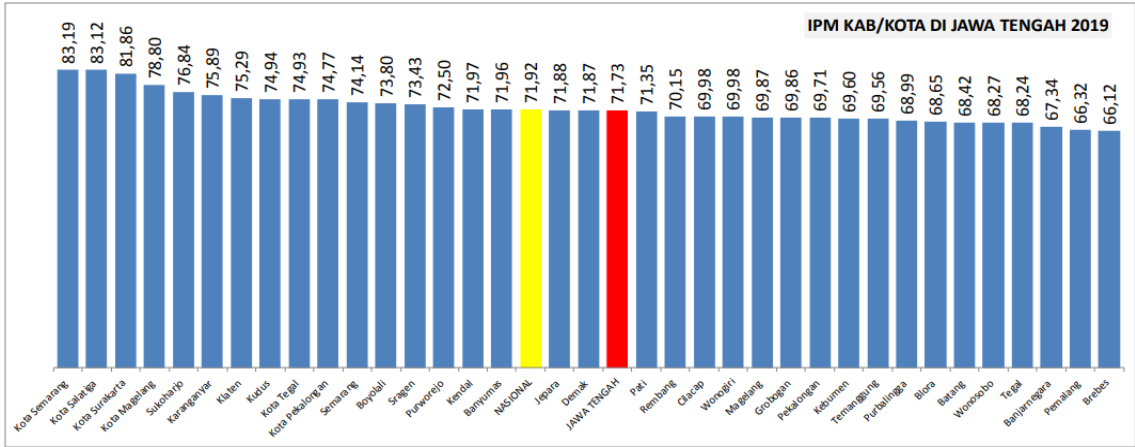
Perbandingan IPM kabupaten/kota di eks Karisidenan Surakarta tahun 2019 menggambarkan bahwa Kabupaten Boyolali berada dibawah Kota Surakarta, Kabupetan Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Klaten, serta berada diatas Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri.

Tabel II.20
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Eks Karisidenan Surakarta
Tahun 2015 - 2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Boyolali	71.74	72.18	72.64	73.22	73.80
Sukoharjo	71.10	71.43	72.40	72.96	76.84
Wonogiri	67.76	68.23	68.66	69.37	69.98
Sragen	71.10	71.43	72.40	72.96	73.43
Surakarta	80.14	80.76	80.85	81.46	81.86
Klaten	73.81	73.97	74.25	74.79	75.29
Karanganyar	74.26	74.90	75.22	75.54	75.89

Perbandingan IPM kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2019 menggambarkan bahwa Kabupaten Boyolali termasuk peringkat 12 besar.

Grafik II.7
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2015 – 2019



Dari empat indikator pembentuk IPM di Kabupaten Boyolali, seluruh indikator meningkat dalam lima tahun terakhir, terutama didorong oleh peningkatan pada dimensi standar hidup layak yang dipresentasikan pada pengeluaran per kapita disesuaikan, dimana pada periode tahun 2015-2019, pengeluaran per kapita masyarakat tumbuh 8.064 persen dari Rp. 11.806.000,00 di tahun 2015 menjadi Rp. 12.758.000,00 di tahun 2019.

Angka Harapan Hidup

Pada periode 2018-2019, AHH Kabupaten Boyolali tahun 2019 berada **di posisi 11** dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, meskipun secara capaian AHH kabupaten Boyolali 2019 memiliki pertumbuhan **terendah** yaitu sebesar 0,07 persen.

Kualitas kesehatan masyarakat Boyolali secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. AHH Boyolali naik dari 75,63 pada tahun 2015 menjadi 75,83 pada tahun 2019, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia **73 – 74 tahun**. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan.

Harapan Lama Sekolah

Pada periode 2018-2019, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Boyolali tahun 2019 **berada di posisi ke-5**, meskipun secara capaian HLS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 umumnya di bawah provinsi lain di Pulau Jawa, namun memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu sebesar 0,40 persen. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi kedua setelah Jawa Timur yang tumbuh sebesar 0,46 persen.

Rata Rata Lama Sekolah

Pada periode 2018-2019, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 berada di posisi ke-6, meskipun secara capaian RLS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 umumnya di bawah provinsi lain di Pulau Jawa, namun memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu sebesar 2,45 persen. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi ketiga setelah Jawa Timur yang tumbuh sebesar 2,71 persen, dan Jawa Barat sebesar 2,70 persen.

Pengeluaran Per Kapita

Pada periode 2018-2019, Pengeluaran Per Kapita Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 berada di posisi ke-6, meskipun secara capaian Pengeluaran Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 umumnya di bawah provinsi lain di Pulau Jawa, namun memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu sebesar 0,86 persen. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi ke-empat setelah Jawa Barat yang tumbuh sebesar 3,35 persen, DI Yogyakarta sebesar 3,21 persen, dan Jawa Timur sebesar 3,15 persen.

Pendidikan

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang Pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.21

Angka Melek Huruf, Lama Sekolah dan Angka Partisipasi
Tahun 2015- 2019 dan Target Tahun2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Target 2020
1	Angka melek huruf	98,68	99,68	99,68	99,68	99,89	-
2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	-
3	APK (Angka Partisipasi Kasar):						
	APKSD/MI	99,35	99,53	99,65	99,76	101,60	102,72
	APK SMP/MTs	94,2	94,35	95,06	96,45	100,80	102,88

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Target 2020
	APKSMA/MA/SMK*	72,89	78,33	-	-	-	-
4	APM (Angka Partisipasi Murni):						
	a. APMSD/MI	86,01	86,00	87,92	90,33	91,83	86,75
	b. APM SMP/MTs	69,95	68,10	69,96	74,54	75,75	73,5
	c. APMSMA/MA/SMK*	49,02	50,91	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali
 *Mulai Tahun 2017 urusan pendidikan di tingkat SMA/ SMK dikelola oleh Provinsi

Tabel II.22
 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019

No	JenjangPendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	APSSD/MI	96,53	96,56	98,56	97,97	99,72
2	APSSMP/MTs	91,84	91,61	92,60	97,47	98,40
3	APSSMA/MA/SMK	52,52	55,51	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali

Tabel II.23
 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015 -2019

No	JenjangPendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	RasioSD/MI	83,15	82,63	82,02	82,71	86,92
2	RasioSMP/MTs	26,39	27,19	28,41	29,58	33,41
3	RasioSMA/MA/SMK	19,42	19,03	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali

Tabel II.24
 Ketersediaan Guru yang Layak Mengajar dengan Kualifikasi Pendidikan D4/S1
 Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	TK	937	964	1.155	1.556	1.801
2	SD	6.3	6.584	6.73	6.222	5.086
3	SMP	3.008	3.025	2.807	2.902	1.874
4	SMU/SMK	2.622	2.645	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali

Tabel II.25
 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015 -2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio SD/MI	13	13	13	14	14
2	Rasio SMP/MTs	14	14	15	15,7	17
3	Rasio SMA/MA/SMK	12	12	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali

Tabel II.26
Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan
Kabupaten Boyolali Tahun 2015 -2019 dan Target Tahun 2020

No	UraianData		2015	2016	2017	2018	2019	Target 2020
1.	TamanKanak-kanak							
	a	Jumlah sekolah						
		-Negeri	3	3	3	3	3	
		-Swasta	553	556	561	563	569	
	b	Jumlah guru						
		-Negeri	24	23	24	23	21	
		-Swasta	1570	1664	1.595	1.632	1.641	
	c	Jumlah tenaga non guru						
		-Negeri	4	4	4	4	4	
		-Swasta	-			7	18	
	d	Jumlah siswa						
		-Negeri	266	239	272	240	255	
		-Swasta	21.403	21.447	22.066	20.406	20.474	
2.	Sekolah Dasar/MI							
	a	Jumlah Sekolah						
		-Negeri	583	583	574	574	573	
		-Swasta	221	222	223	228	230	
	b	Jumlah guru						
		-Negeri	5710	5.689	5.419	4.589	5.041	
		-Swasta	2136	2.221	2.196	2.104	2.188	
	c	Jumlah tenaga non guru						
		-Negeri	778	742	742	729	1.038	
		-Swasta	77	76	76	82	70	
	d	Jumlah siswa						
		-Negeri	71.477	70.387	68.914	67.456	63.437	
		-Swasta	24.866	26.475	27.866	28.963	33.333	
3.	SMP/MTs							
	a	Jumlah sekolah						
		-Negeri	66	66	66	66	67	
		-Swasta	65	67	70	73	79	
	b	Jumlah guru						
		-Negeri	2.257	2.200	2.125	2.097	1701	
		-Swasta	1.113	1.103	927	932	562	
		Jumlah tenaga non						
		-Negeri	499	469	469	433	467	
		-Swasta	195	193	193	183	112	
	c	Jumlah siswa						
		-Negeri	35.629	35.274	35.295	34.720	35.029	
		-Swasta	10.568	10.189	10.046	10.260	11.588	
4.	SMA/MA							
	a	Jumlah sekolah						
		-Negeri	21	21				
		-Swasta	22	23				

No	UraianData		2015	2016	2017	2018	2019	Target 2020
	b	Jumlah guru						
		-Negeri	533	854				
		-Swasta	453	423				
	c	Jumlah tenaga non guru						
		-Negeri	216	247				
		-Swasta	87	84				
	d	Jumlah siswa						
		-Negeri	10.684	11.379				
		-Swasta	2.825	2.982				
5.		SMK						
	a	Jumlah sekolah						
		-Negeri	10	11				
		-Swasta	33	31				
	b	Jumlah guru						
		-Negeri	563	620				
		-Swasta	937	890				
	c	Jumlah tenaga						
		-Negeri	147	150				
		-Swasta	222	218				
	d	Jumlah siswa						
		-Negeri	7.769	8.520				
		-Swasta	10.432	10.452				
6.		Kondisi Bangunan Sekolah						
	a	Jumlah Ruang SD						
		-Baik	4.770	4.798	4.778	4.946	4568	
		- Rusak Berat	301	341	319		308	
	b	Jumlah Ruang SLTP						
		-Baik	1.506	1.507	1.490	1.494	1621	
		- Rusak Berat	53	52	81	114	126	
	c	Jumlah Ruang SLTA						
		-Baik	1.046	1.080				
		- Rusak Berat	37	27				
B		Pendidikan Luar Sekolah		1462				
1.		Lembaga Pendidikan Kursus		2104				
	a	Jumlah lembaga	64	26	26	26	25	
	b	Jumlah tutor	64	78	79	80	47	
	c	Jumlah warga belajar	320	390	402	421	886	
2.		Sanggar kegiatan belajar						
	a	Jumlah kegiatan	3	3	3	3	1	
	b	Jumlah pamong belajar	6	3	3	3	3	
3		Play Group (Kelompok Bermain)						
	a	Jumlah tutor	175	515	604	315	695	
	b	Jumlah kelompok	175	110	194	174	220	
	c	Jumlah warga belajar	4478	6.774	5.771	421	5.572	

No	UraianData		2015	2016	2017	2018	2019	Target 2020
4.	TPA							
	a	Jumlah tutor		20	50	23	49	
	b	Jumlah kelompok	17	8	16	12	16	
	c	Jumlah warga belajar	246	264	363	238	284	
5.	Satuan PAUD Sejenis							
	a	Jumlah tutor	1085	2.818	2.998	2.872		
	b	Jumlah kelompok	1085	1.051	1.011	980		
	c	Jumlah warga belajar	1948	31.805	36.608	33.942		
C	Hasil Pelayanan Publik							
1.	Angka Partisipasi Kasar(%)							
	a	SD	99,35	99,53	99,65	99,76	101,60	
	b	SMP	94,20	94,35	95,06	96,45	100,80	
	c	SMU/SMK	72,89	78,33	-	-	-	
2.	Angka Partisipasi Murni(%)							
	a	SD	86,01	86,00	87,92	90,33	91,83	
	b	SMP	69,95	68,10	69,96	96,45	75,75	
	c	SMU/SMK	49,02	50,91	-	-	-	
3.	Anak Putus Sekolah							
	a	SD	47	25	7	11	13	
	b	SMP	98	43	7	2	16	
	c	SMU/SMK	125	102	-	-	-	
4.	Rasio Siswa : Sekolah							
	a	TK		39	40	120		
	b	SD	120	120	121	121	121	
	c	SMP	353	343	353	353	353	
	d	SMU/SMK	369	388				
5.	Rasio Siswa : Guru							
	a	TK						
	b	SD	13	15	14	14,25	14	
	c	SMP	14	15	13	16,50	17	
	d	SMU/SMK	12	13	15	-	-	
6.	Rasio Siswa : Kelas							
	a	SD	19	19	14	19	18,21	
	b	SMP	30	30	13	29	27,57	
	c	SMU/SMK	28	28	15	-	-	
7.	Rata-rata nilai hasil belajar							
	a	UANS D	7,31	7,35	7,38			
	b	UANS MP	6,89	6,91	6,93	5,17	59,49	
	c	UANS MA	7,31	7,35	-	-	-	
	d	UANS MK	7,28	7,32	-	-	-	
8.	Rata-rata Kelulusan(%)							
	a	SD	100	100	100	100	100	
	b	SMP	100	100	100	100	100	
	c	SMU/SMK	100	99,97	-	-	-	

No	UraianData		2015	2016	2017	2018	2019	Target 2020
9.	Jumlah guru yang layak mengajar							
	a	TK	937	964	1.155	1.531	1801	
	b	SD	6.300	6.584	6.730	6.221	5086	
	c	SMP	3.008	3.025	2.807	2.686	1874	
	d	SMU/SMK	2.622	2.645				

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali

APK SD

Indikator ini pada tahun 2019 dengan target 101,00% dapat terealisasi 101,60% atau capaian kinerja sebesar 100,59%. Capaian indikator ini didukung oleh kegiatan-kegiatan: Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD; Penyelenggaraan Paket A Setara SD dan Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan cukup berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah masih kurangnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah.

Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah optimalisasi kegiatan yang mempunyai output perluasan akses dan pemerataan serta peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Boyolali.

APK SMP

Indikator ini pada tahun 2019 dengan target 97,60% dapat terealisasi 100,80% atau capaian kinerja sebesar 103,28%. Capaian kinerja ini didukung adanya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP; Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SMP; Penyelenggaraan Paket B Setara SMP dan Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, namun secara umum program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah masih kurangnya peningkatan perluasan akses dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah

Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan memberikan lebih banyak lagi subsidi untuk membantu anak dalam menjangkau hak pendidikannya, seperti beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin dan optimalisasi SMP Terbuka yang bertujuan memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada anak-anak lulusan SD atau sederajat yang tidak dapat mengikuti pendidikan SMP Reguler karena berbagai hambatan yang dihadapinya.

Faktor-faktor pendukung Capaian Fokus Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan meliputi kondisi geografis yang relatif mendukung, hampir rata-rata daerah (kecamatan dan desa) yang berhasil tersebut terletak pada daerah sentral/geografis sehingga segala akses transportasi dan informasi dapat dengan mudah masuk daerah tersebut, anggaran pendidikan tepat sasaran, kebersamaan dan keseriusan Pemerintah Daerah bersama masyarakat membangun pendidikan di Kabupaten Boyolali.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Fokus Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan ini adalah kemampuan ekonomi masyarakat dan faktor geografi yang menyebabkan wilayah-wilayah tertentu di pedesaan dan pegunungan menjadi wilayah tersulit dalam jangkauan layanan pendidikan.

Alternatif solusi yang dapat diambil adalah pemberian lebih banyak subsidi untuk membantu anak dalam menjangkau hak pendidikannya, seperti beasiswa dan

pendirian sekolah satu atap, serta pendirian SMP Terbuka yang bertujuan memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada anak-anak lulusan SD/MI atau sederajat yang tidak dapat mengikuti pendidikan SMP reguler karena berbagai hambatan yang dihadapinya. Solusi lainnya ialah penjangkaran anak usia sekolah baik yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah untuk masuk ke dalam sistem pendidikan.Selain itu, program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu ditawarkan untuk menarik anak usia jenjang pendidikan dasar yang berada di luar sistem sekolah, dengan tetap memberi perhatian pada keadilan dan kesetaraan gender.

Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Bupati Boyolali, pada misi 4 yaitu Boyolali sehat, produktif dan berdaya saing. Adapun sasarannya adalah meningkatkan derajat kesehatan. Adapun capaian indikatornya pembangunan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.27
Indikator Kesehatan Kabupaten Boyolali
Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Target 2020
1.	Usia harapan hidup rata-rata : - Laki – laki - Perempuan	75.61 *	75.61 *	75,72 *	75,79 *	NA	NA
2.	Angka Kematian Bayi/1.000KH	9.0	8.2	9.4	9	8.82	8.4
3.	Kasus Kematian Ibu	21	16	16	15	13	19
4.	Persentase Balita gizi buruk	0.85	0.83	0.21	0,02	0.02	0.02
5.	Universal Child Immunization/UCI (%)	100	99.62	100	100	100	100
6.	Balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100
7.	Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (%)	99	96	99.9	99,96	100	100
8.	Cakupan Rumah Tangga Sehat (%)	80	81.92	80.1	83,26	85.4	74
9.	Cakupan Penggunaan Air Bersih (%)	80	81.85	86.53	96,36		
10.	Cakupan Penggunaan Jamban Keluarga (%)	88	92.44	91.8	100	100	100

Sumber data: Dinas kesehatan dan DPUPR Kabupaten Boyolali

Ket : * data BPS <https://boyolalikab.bps.go.id/>

Usia Harapan Hidup tahun 2019 sebesar 75,83. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa angka kematian Ibu dari tahun 2019 sebanyak 13 kasus (AKI 94,83/100.000 kh) dan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 15 kasus (108/100.000 KH). Penyebab Kematian Ibu didominasi oleh Preeklampsi/Eklampsi (Hipertensi dalam kehamilan) sebanyak 8 kasus, infeksi 1 kasus, pendarahan 2 kasus, Chf 1 Kasus dan Suspect Get 1 Kasus. Jumlah kematian bayi tahun 2019, sebanyak 121 kasus, atau AKI sebesar 8,82/1000kh, jika dibandingkan dengan tahun 2018, juga menurun. Prosentase balita gizi buruk tahun 2019 adalah 0,02% jumlah balita 73.300, yang menderita gizi buruk sebanyak 17 balita. Masih adanya kasus gizi buruk disebabkan oleh penyakit bawaan Cerebral Palsy (kelainan otak) dan penyakit jantung bawaan, sehingga mengalami penurunan nafsu makan (asupan gizi menjadi kurang) dan memerlukan perlakuan medis khusus.

Di Boyolali tahun 2019 seluruh desa sudah 100% Universal Child Immunization/UCI yang artinya seluruh desa sudah terlayani imunisasi. Balita gizi buruk

mendapat perawatan Adanya dan seluruhnya atau 100 % sudah mendapatkan perawatan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan cakupannya 100%, disimpulkan bahwa pada tahun 2019, tidak terdapat ibu bersalin yang melaksanakan persalinan yang tidak ditangani oleh tenaga kesehatan, dibandingkan dengan tahun 2018, mengalami peningkatan.

Tahun 2019, sebanyak 257,089 (89,8 %) rumah tangga yang dipantau PHBS nya dari 301,403 rumah tangga yang tercatat di Kabupaten Boyolali, dari jumlah rumah tangga yang dipantau tersebut, terdapat 219,513 rumah tangga yang memenuhi syarat PHBS atau (85,4%) strata utama dan paripurna. Cakupan penggunaan jamban keluarga target indikator tahun 2019 terealisasi 100%, keadaan ini menunjukan bahwa seluruh keluarga sudah memiliki akses terhadap jamban sehat.

Sedangkan pencapaian indikator pelayanan RSUD secara terperinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.28
Pelayanan RSUD Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	HASIL				
		2015	2016	2017	2018	2019 **
1	Tingkat hunian (<i>Bed Occupancy Rate/BOR</i>) (%)					
	1. RSUD Simo	69,25	57,58	52,94	47,33	52,1
	2. RSUD Pandan Arang	69	70,08	65,66	65,58	65,3
	3. RSUD Waras Wiris	59,13	46	48	52	52
2	Lama tinggal (<i>Length Of Stay/LOS</i>) (Hari)					
	1. RSUD Simo	4,87	3,87	3,29	3,07	3
	2. RSUD Pandan Arang	3,64	3,66	3,46	3,29	3
	3. RSUD Waras Wiris	4,65	5	4	3,9	3
3	<i>Turn Over Interval</i> (TOI) (Hari)					
	1. RSUD Simo	2,68	2,28	2,92	3,14	3
	2. RSUD Pandan Arang	1,64	1,62	1,86	1,81	2
	3. RSUD Waras Wiris	3,21	6	3,1	4,3	3
4	<i>Bed Turn Over</i> (BTO). Pasien (kali)					
	1. RSUD Simo	4,610	5,44	58,73	56,32	60
	2. RSUD Pandan Arang	6,689	67,26	67,56	69,39	74
	3. RSUD Waras Wiris	4,600	33	35	34	52
5	<i>Gross Death Rate</i> (GDR) (%)					
	1. RSUD Simo	0,83	1,8995	2,1566	15,635	13,5
	2. RSUD Pandan Arang	2,47	2,57	3,3	3,23	25,1
	3. RSUD Waras Wiris	2,62	2,54	1,4	2,9	40,9
6	Menurunnya angka kematian murni <i>Net Death Rate</i> (NDR) (%)					
	1. RSUD Simo	0,24	0,94	0,9364	7,696	5,3
	2. RSUD Pandan Arang	1,44	1,49	1,7	1,64	13,8
	3. RSUD Waras Wiris	1,17	0,99	0,1	1,26	21,1

Sumber: RSUD Pandan Arang, RSUD Simo dan RSUD Waras Wiris
Ket: **sumber data Seksi Yankes Rujukan

Tabel II.29
Capaian Fokus Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	75.63	75,1	75,72*	75,79*	75,83	NA
2	Prosentase Balita Gizi Buruk	%	0.85	9,2	9,2	0,02	0.02	0.02
3	Prosentase balita Gizi Baik	%	80,7	80,4	80,4	99,98		

Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Boyolali tahun 2018 sebesar 545.227 orang dengan rincian 533.462 adalah penduduk yang bekerja (97,84%) sedangkan jumlah pengangguran terbuka sebesar 11.765 atau 2,16%. Dengan jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Boyolali sebanyak 755.802 orang, maka didapat angka partisipasi Angkatan kerja sebesar 72,14%.

Prosentase pencari kerja yang ditempatkan tahun 2018 sebesar 48%. Hal ini bila dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5%. Prosentase angka penyelesaian perselisihan pengusaha dan pekerja di tahun 2019 sebesar 100%. Ada 7 Kasus di perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Boyolali, 6 Kasus di selesaikan dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja dan di buat Perjanjian Bersama, 1 (satu) kasus di keluarkan anjuran agar para pihak menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Negri Semarang.

Rasio penduduk yang bekerja pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.30
Perkembangan Ketenagakerjaan
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Target 2020
1.	Penduduk yang Bekerja (%)	95,05	97,97	96,33	97,84	96,87	96,87
2.	Penduduk yang Tidak Bekerja (%)	4,95	2,03	3,67	2,16	3,12	3,12
3.	Angka partisipasi kerja (%)	74,82	74,68	69,96	72,14	72,39	72,39

Sumber: Diskopnaker Kabupaten Boyolali

Pelaksanaan urusan tenaga kerja diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, antara lain tersaji pada tabel berikut:

Tabel II.31
Indikator Ketenagakerjaan
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

NO	INDIKATOR	TAHUN					TARGET
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	74,82	76,68	69,96	72,14	72,39	72,14
2	Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	42,59	40,52	53	47,9	51,8	37,2
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,95	2,03	3,67	2,16	3,12	3,12
4	Keselamatan dan Perlindungan/K3 (%)	100	100	Sesuai UU no 23 Tahun 2014 dengan perubahannya sudah menjadi kewenangan Provinsi, sehingga Kabupate ntidak bias memberi	Sesuai UU No 1 tahun 1971 tentang g kesela matan dan keseha tan Kerja	Sesuai UU No 1 tahun 1971 tentan g kesela matan dan keseha tan Kerja	Sesuai UU No 1 tahun 1971 tentang keselamat an dan kesehatan Kerja

NO	INDIKATOR	TAHUN					TARGET
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
				kan data dimaksud			
5	Angka penyelesaian perselisihan pengusaha dan pekerja (%)	100	100	84	100	100	100

Sumber data: Diskopnaker dan BPS Kab. Boyolali

Rasio penduduk yang bekerja adalah merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio jumlah penduduk yang bekerja Tahun 2019 sebesar 96,87%, dimana jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 534.762 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 552.006 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang tidak bekerja sebanyak 17.244 orang.

2.1.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Capaian pembangunan Bidang Kebudayaan Tahun 2017 pada jumlah grup/pelaku kesenian berjumlah 579. Jumlah ini sama dengan Tahun 2016. Pendataan pelaku/grup kesenian di Kabupaten Boyolali sangat perlu demi kemudahan dalam pembinaan dan penyeleksian dalam mengikuti berbagai *event*. Potensi kesenian di Kabupaten Boyolali yang perlu digali secara serius masih besar.

Tabel II.32

Capaian Fokus Bidang Kebudayaan Kabupaten Boyolali
Tahun 2015-2019

No.	CapaianPembangunan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah grup kesenian	585	579	579	579	608
2	Jumlah gedung & tempat kesenian	7	9	9	9	11

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Boyolali

Jumlah tempat dan sarana penyelenggaraan kesenian yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 sebanyak 9 meliputi: Joglo Mandala Krida, *Ampitheatre* di lokasi Obyek Wisata Pengging, Gedung Kapujanggan (Ngestipuro) Pengging, Panggung Tlatar, Panggung Alun-alun Kidul, Simpang Lima dan Taman Pandan Alas, Gelanggang Anuraga dan Balai Mahesa.

Jumlah klub olahraga yang di bawah binaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 ditargetkan menjadi sebanyak 32 klub, dan pada 2019 tercapai 33 klub. Klub-klub ini terbagi di dalam 30 wadah organisasi olah raga atau pengurus cabang (pengcab) di Boyolali. Meskipun cabang olah raga diffabel keluar dari organisasi induk (KONI), pertumbuhan cabang olah raga regular cukup pesat. Dan untuk pengurus cabang sendiri pada tahun 2019 ini bertambah 2 pengcab dimana di dalam RPJMD ditargetkan untuk penambahan 1 pengcab, yaitu Cabang Olahraga Tarung Drajad dan Sepatu Roda.

Jumlah gedung olahraga yang dikelola Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali Tahun 2019 bertambah sebanyak 3 gedung/ sarana olahraga yaitu sirkuit gokart, gelanggang atletik dan stadion paras. Di samping itu, untuk jumlah lapangan keseluruhan baik *outdoor* maupun *indoor* yang berada di Kabupaten Boyolali sebanyak 420 buah, baik yang menjadi milik/pengelolaan pemda, organisasi, swasta, maupun masyarakat. Sementara sarana olah raga di bawah pembinaan Pemerintah Daerah ada 20 buah terbagi sebagai berikut: 3 lapangan sepak bola, 1 lapangan basket, 3 lapangan bulutangkis, 5 kolam renang, 4 lapangan tenis, 1 lapangan futsal, 1 sikuit, 1 gelanggang atletik, 1 lapangan volley, 1 sasana tinju.

Organisasi kepemudaan di bawah binaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali sejumlah 12 organisasi dan pada Tahun 2019 kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan kepemudaan.

Upaya untuk mendorong kegiatan kepemudaan dan pramuka dengan memberikan dukungan berupa sarana pendukung dan motivasi kepada peserta didik, inovasi kegiatan kepramukaan dengan kegiatan yang menarik, menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik, perkembangan zaman dan tantangan global. Selain itu,

pembina pramuka harus memperbanyak bekal pengetahuan, keterampilan, dan wawasan dalam membina, sehingga dalam proses pembinaan berjalan sesuai dengan kurikulum pembinaan gerakan pramuka.

Kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali pada Tahun 2019 sebanyak 9 kegiatan.

Berikut ini data tabel capaian fokus bidang pemuda dan olahraga Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan target tahun 2020 :

Tabel II.33
Capaian Fokus Bidang Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah klub olahraga	Buah	31	27	31	31	33	33
2	Jumlah gedung olahraga	Buah	1	2	2	3	3	4

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Boyolali

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Pendidikan

Kondisi capaian aspek pelayanan pendidikan dasar dan menengah Kabupaten Boyolali sebagai berikut : Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2019 sebesar 99,72%. Angka partisipasi ini didukung oleh Program dan kegiatan yang dilaksanakan cukup berhasil memenuhi target kinerja. Secara umum program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah kurangnya perluasan akses yang dapat dijangkau dengan mudah dan murah, dan pemerataan serta pemerataan kualitas pendidikan. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah optimalisasi kegiatan yang mempunyai *output* perluasan akses dan pemerataan serta peningkatan kualitas pendidikan dengan memperhatikan keadilan antar wilayah baik wilayah utara-selatan maupun wilayah perbatasan barat-timur serta wilayah pegunungan.

Rasio siswa terhadap guru Sekolah Dasar (SD) sebesar 14, sedangkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 17. Jika dilihat dari angka rasio ini maka jumlah guru sudah lebih dari cukup, namun permasalahannya adalah persebaran guru yang tidak merata di beberapa sekolah. Terjadi kekurangan guru pada jenjang SD, namun sebaliknya di sisi lain, banyak SMP yang kelebihan guru.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja Rasio Murid dengan Guru adalah tidak adanya penambahan guru khususnya PNS dikarenakan moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil.

Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah mengoptimalkan sumber daya yang tersedia (guru wiyata bhakti dan guru mengampu di beberapa sekolah).

Target kinerja melek huruf sesuai dengan target dari pemerintah pusat sebesar 97% pada Tahun 2019 terealisasi sebesar 99,89%. Pencapaian ini diraih melalui kegiatan penerapan pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan, serta pembelajaran pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah sasaran target berasal dari keluarga miskin. Kemiskinan sering kali menjadi kendala praktis dalam upaya pembelajaran masyarakat, sebagai contoh banyak penyandang buta aksara sudah berusia terlalu tua sehingga kemampuan menyerap ilmu lebih lambat.

Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti dengan organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan swasta.

Berikut ini data tabel capaian aspek pelayanan pendidikan dasar dan menengah Kabupaten Boyolali tahun 2015 - 2019 :

Tabel II.34
Capaian Aspek Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah
Kabupaten Boyolali Tahun 2015 - 2019

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendidikan dasar:						
	Angka partisipasi sekolah	%	94,94	94.90	96,59	97,81	99,06
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	%	63,74	64.11	64,32	65,37	60,16
	Rasio Siswa Terhadap Guru SD	Org	12,97	12.71	12,68	14,25	14
	Rasio Siswa Terhadap Guru SMP	Org	11,40	12,6	16,11	16,50	17
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,66	99,68	99,68	99,68	99,89

Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Boyolali

Kondisi capaian aspek pelayanan bidang pendidikan untuk fasilitas pendidikan Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

Pada indikator persentase ruang kelas SD kondisi baik, Indikator ini pada tahun 2019 dengan target 94,22% dapat terealisasi 93,69% atau capaian kinerja sebesar 99,44%, sehingga indikator ini belum dapat tercapai secara optimal. Capaian indikator ini didukung anggaran dari APBD kabupaten Boyolali dan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, sub bidang pendidikan SD untuk rehabilitasi ruang kelas rusak sebanyak 126 ruang kelas dan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya sebanyak 4 ruang.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja, secara umum program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah sisi pembiayaan atau dana, di mana anggaran yang tersedia masih belum dapat menjangkau seluruh ruang kelas yang rusak. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah kinerja mengupayakan pemeliharaan bangunan yang rusak ringan dilakukan mandiri oleh sekolah dengan menggunakan dana yang dikelola sekolah, sedangkan ruang kelas rusak sedang/berat menjadikan prioritas di tingkat dinas.

Pada indikator persentase kelas SMP kondisi baik, yakni pada tahun 2019 dengan target 98,10% dapat terealisasi 88,80% atau capaian kinerja sebesar 90,62%, sehingga indikator ini belum dapat tercapai secara optimal. Capaian indikator ini didukung anggaran dari APBD kabupaten Boyolali dan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang pendidikan SMP, untuk rehabilitasi ruang kelas rusak sebanyak 37 ruang kelas dan pembangunan 1 ruang kelas baru.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah sisi pembiayaan atau dana, dimana anggaran yang tersedia masih belum dapat menjangkau seluruh ruang kelas yang rusak. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah mengupayakan pemeliharaan bangunan yang rusak ringan dilakukan mandiri oleh sekolah dengan menggunakan dana yang dikelola sekolah, sedangkan ruang kelas rusak sedang/berat menjadikan prioritas di tingkat dinas.

Tabel II.35

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pendidikan Untuk Fasilitas Pendidikan Kabupaten Boyolali Tahun 2015 - 2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL				
			2015	2016	2017	2018	2019
	Fasilitas Pendidikan:						
1	Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik	%	94,06	94,10	95,87	91,82	93,69
2	Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik	%	96,59	97,20	94,80	85,32	88,80

Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Boyolali

Berikut ini kondisi pada indikator capaian aspek pelayanan bidang pendidikan PAUD Kabupaten Boyolali Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.36

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pendidikan untuk PAUD Kabupaten Boyolali Tahun 2015 - 2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	APK PAUD	%		71,80	74,41	75,22	75,60

Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Boyolali

Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Tahun 2019 dapat terealisasi 75,60%. Capaian pada indikator ini diraih berkat pelaksanaan program yang mempunyai dampak secara signifikan pada indikator ini yaitu Program Pendidikan Anak Usia Dini, melalui kegiatan-kegiatan: pembangunan gedung sekolah, sarana air bersih dan *sanitary*, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pelatihan kompetensi tenaga pendidik, pengembangan PAUD, penyelenggaraan PAUD, publikasi dan sosialisasi PAUD dan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi PAUD secara berkesinambungan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah masih kurangnya akses anak-anak usia dini yang berasal dari keluarga miskin serta pemahaman orang tua yang masih rendah akan pentingnya pendidikan anak pada usia dini. Penyelenggaraan PAUD dengan biaya pendidikan murah belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana, serta masih perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam PAUD, terlebih pada masyarakat pedesaan. Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan PAUD antara lain melalui peningkatan hubungan silaturahmi dan kerja sama antara lembaga PAUD dengan orang tua anak didik. Fokus dapat dipusatkan pada perencanaan program agar tujuan dari program bisa dicapai secara maksimal dan meningkatkan peranan orang tua murid dalam pelaksanaan program-program lembaga.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam PAUD antara lain dilakukan dengan cara mendorong pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam pendirian lembaga PAUD, memperkuat pelayanan PAUD di daerah-daerah pegunungan, perbatasan dan pelosok, dengan demikian, akan tercipta pemerataan pendidikan usia dini.

Adapun capaian pada aspek pelayanan bidang pendidikan khususnya untuk mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Boyolali pada kurun waktu tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Tabel II. 45 sebagai berikut:

Tabel II.37

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pendidikan untuk Angka Putus Sekolah Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL

			2015	2016	2017	2018	2019
	Angka Putus Sekolah:						
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,05	0,03	0,03	0,01	0,03
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,21	0,09	0,25	0,01	0,08
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0,41	0,32	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Boyolali

- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI pada Tahun 2019 dengan target 0,03% terealisasi 0,03% atau capaian kinerja sebesar 100%.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah beberapa faktor, yaitu kemiskinan, minat anak yang kurang, perhatian orang tua rendah, faktor budaya, fasilitas belajar kurang, kurangnya akses terhadap sarana dan anak berkebutuhan khusus. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah pemberian beasiswa untuk siswa miskin, mendekatkan akses kepada anak di daerah pedesaan dan sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs pada Tahun 2019 terealisasi pada angka 0,08%. Dengan kata lain, indikator ini dapat tercapai.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah kemiskinan, budaya dan pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dasar. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah adanya beasiswa retrieval, pemberian pengertian kepada orang tua melalui guru/tokoh masyarakat.

Tabel II.38
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pendidikan untuk Angka Kelulusan
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
	Angka Kelulusan:						
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100
3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98,40	98,16	98,64	99,75	99,59

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali

- Angka Kelulusan (AL) SD/MI pada Tahun 2019 dapat terealisasi 100% atau capaian kinerja sebesar 100%, sehingga indicator ini dapat tercapai.
- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs pada Tahun 2019 dapat terealisasi 100% atau capaian kinerja sebesar 100%, sehingga indikator inidapattercapai.
- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dapat terealisasi 99,59%.

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah sisi pembiayaan atau dana, budaya, geografis dansisi ketersediaan sekolah dengan biaya murah. Upaya-upaya mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan mengupayakan subsidi pembiayaan atau dana operasional sekolah bagi anak kurang mampu (untuk seragam, transportasi dan lainnya) dan mengupayakan akses sekolah murah.

Kesehatan

Capaian aspek pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Boyolali tahun 2017 sampai dengan 2019 dan target tahun 2020 bisa di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.39
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kesehatan
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

N O	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Rasio Posyandu per satuan balita	Per 1.000 balita	24.9	25.06	25.06	25.7		NA
2	Rasio puskesmas, poliklinik, postu per satuan penduduk	NA	0	0.00010	0.00010	0,00093	0,00085	NA
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 100.000 Penduduk	11	11	11	0,97	0.95	NA
4	Rasio Dokter (umum) per satuan penduduk	Per 100.000 Penduduk	15.06	17.5	17.5	16,08	16	16.4
5	Rasio tenaga medis (umum & gigi) per satuan penduduk	Per 100.000 Penduduk	19.3					
	Bidan		56.53	63.40	63.40	64.03	54	57.8
	Perawat		89.9	1004.7	1004.7	109.16	87	97.6
6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	116	100	100	100	100	100
7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	95.32	91.6	91.6	99.96	100	100
8	Cakupan Desa/ kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Orang	143	163	163	866	1500	
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Per 100.000 Penduduk	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	%	42.36	8.6	8.6	43.83	43.14	39.6
13	Rawat Jalan	%	15.92	25.44	25.44	155	26	15
14	Rawat inap	%	1.33	1.5	1.5	7.6	1.06	1.5
15	Cakupan kunjungan bayi	%	92.03	99.4	99.4	93.73	99.11	100
16	Cakupan Puskesmas	Unit	29	29	29	26	25	25
17	Cakupan Puskesmas Pembantu	Unit	44	41	41	41	41	41

Sumber data: Dinas Kesehatan Kab. Boyolali

- Rasio Posyandu per satuan balita pada Tahun 2019 sebesar 25.29 per 1.000 balita, atau sejumlah 1.854 posyandu, sedangkan jumlah balita yang ada 73.300 balita.
- Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) per jumlah seluruh penduduk: jumlah Puskesmas sebanyak 25, jumlah klinik 24, jumlah Pustu 41, sehingga dari jumlah keseluruhan dibagi jumlah penduduk 1.051.867 didapatkan rasio 0,000085 (8,5 per 100.000 penduduk)
- Jumlah rumah sakit pada Tahun 2018 sebanyak 11 Rumah sakit, pada tahun 2019 ada satu rumah sakit yang ijin operasionalnya habis dan dinyatakan ditutup. Rasio RS per satuan penduduk adalah 0,95
- Rasio dokter per satuan penduduk : jumlah dokter umum sebanyak 164 orang sehingga rasio per 100.000 penduduk adalah 16.0
- Rasio tenaga medis per satuan penduduk : Bidan jumlah bidan sebanyak 564 orang sehingga rasio bidan 54. per 100.000 penduduk. Jumlah perawat sebanyak 913 orang sehingga rasio per 100.000 penduduk 87.
- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah sebagai berikut : Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada Tahun 2019 diperoleh dari jumlah kasus

komplikasi yang ada sebanyak 5,053 kasus, dan secara keseluruhan telah ditangani, sehingga capaian 100%.

- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan : Pertolongan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (dokter dan bidan) diperoleh dari jumlah sasaran ibu bersalin pada Tahun 2019 sejumlah 13.699 ibu bersalin, dan yang persalinannya dilakukan oleh tenaga kesehatan sejumlah 13.699 ibu bersalin juga, sehingga cakupannya 100%. Tidak ada persalinan yang ditolong oleh dukun bayi atau bukan tenaga kesehatan.
- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) : Tahun 2018 capaian desa UCI mencapai 100 %. Tahun 2019, desa UCI capaiannya juga 100%. Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah adanya mobilitas penduduk antar kabupaten di Boyolali, sehingga pendataan secara periodik selalu dilakukan.
- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan : Tahun 2018 terdapat 11 kasus balita gizi buruk. Capaian indikator ini yaitu 100% karena semua balita yang menderita gizi buruk telah mendapatkan perawatan baik di rumah, rawat jalan maupun rawat inap di Rumah Sakit.
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA : Tahun 2019 Penemuan pasien baru TB BTA (+) 953 orang atau 50% dari suspek. Pencarian suspek TB Paru dengan peran serta dari fasyankes dan Peran dokter praktik mandiri dalam pelaporan adanya suspek TB, dapat tercapai sebanyak 1.500 kasus.
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD : Target indikator Tahun 2019 sebesar 100% dari sasaran penderita DBD 443 orang, realisasi 100% atau semua penderita DBD tertangani. Sedangkan jumlah yang meninggal sebanyak 1 orang.
- Indikator Cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin pada tahun 2019 dengan target 39,20% dapat terealisasi 43,14%. Jumlah peserta KIS 2019 masyarakat miskin Kabupaten Boyolali sebanyak 453.777 jiwa (43,14%) dari total jumlah penduduk sebanyak 1.051.867 jiwa.
- Rawat Jalan : Cakupan total kunjungan rawat jalan adalah cakupan kunjungan rawat jalan baru di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sarana kesehatan yang dimaksud meliputi, puskesmas, klinik, praktek bersama dan perseorangan.
- Cakupan total rawat jalan (selain di Rumah Sakit swasta dan Pemerintah) di Kabupaten Boyolali selama Tahun 2019 tercatat sebanyak 273.636 kunjungan dari target sebesar 153.905 kunjungan. Jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali sejumlah 1.026.034 jiwa (2018), sehingga cakupan *kunjungan total* mencapai sebesar 26% dari jumlah penduduk.
- Peningkatan ini oleh karena kesadaran masyarakat yang semakin meningkat sehingga angka kunjungan di fasilitas pelayanan kesehatan mengalami peningkatan. Namun yang lebih diharapkan kunjungan masyarakat ke layanan kesehatan bukan merupakan kunjungan sakit namun kunjungan sehat sejalan dengan perubahan paradigma sakit menjadi paradigma sehat.
- Cakupan Rawat Inap : Cakupan total kunjungan rawat inap dihitung berdasarkan jumlah seluruh kunjungan baru di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada Tahun 2019 jumlah kunjungan rawat inap sejumlah 11.177 pasien atau sebesar 1.06% dari seluruh jumlah penduduk (1.051.867).
- Cakupan kunjungan bayi : Jumlah sasaran bayi pada Tahun 2019, sebanyak 13.708 bayi lahir hidup, sedangkan yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 13.586 bayi, sehingga cakupan 99,1%.
- Cakupan Puskesmas : Sesuai dengan rumus perhitungan jumlah puskesmas sebanyak 25 Puskesmas, dan jumlah kecamatan di Kabupaten Boyolali 22, maka cakupan puskesmas sebesar 136,8%.

- Cakupan Puskesmas Pembantu : Sesuai dengan rumus perhitungan jumlah Pustu sebanyak 41 Pustu Puskesmas, dan jumlah desa di Kabupaten Boyolali 267, maka cakupan puskesmas pembantu sebesar 15,3%.

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kesehatan di RSUD Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2019 tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel II.40
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kesehatan di RSUD
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	HASIL					TARGET 2020
		2015	2016	2017	2018	2019 **	
1	Tingkat hunian (<i>Bed Occupancy Rate/BOR</i>) (%)						
	1. RSUD Simo	69,25	57,58	52,94	47,33	52,1	73.15
	2. RSUD Pandan Arang	69	70,08	65,66	65,58	65,3	83.72
	3. RSUD Waras Wiris	59,13	46	48	52	52	74
2	Lama tinggal (<i>Length Of Stay/LOS</i>) (Hari)						
	1. RSUD Simo	4,87	3,87	3,29	3,07	3	4.51
	2. RSUD Pandan Arang	3,64	3,66	3,46	3,29	3	5
	3. RSUD Waras Wiris	4,65	5	4	3,9	3	5.75
3	<i>Turn Over Interval</i> (TOI) (Hari)						
	1. RSUD Simo	2,68	2,28	2,92	3,14	3	1.92
	2. RSUD Pandan Arang	1,64	1,62	1,86	1,81	2	1.6
	3. RSUD Waras Wiris	3,21	6	3,1	4,3	3	2
4	<i>Bed Turn Over</i> (BTO). Pasien (kali)						
	1. RSUD Simo	4,610	5,44	58,73	56,32	60	46.1
	2. RSUD Pandan Arang	6,689	67,26	67,56	69,39	74	61.75
	3. RSUD Waras Wiris	4,600	33	35	34	52	48
5	<i>Gross Death Rate</i> (GDR) (%)						
	1. RSUD Simo	0,83	1,8995	2,1566	15,635	13,5	0.21
	2. RSUD Pandan Arang	2,47	2,57	3,3	3,23	25,1	1.3
	3. RSUD Waras Wiris	2,62	2,54	1,4	2,9	40,9	0.6
6	Menurunnya angka kematian murni <i>Net Death Rate</i> (NDR) (%)						
	1. RSUD Simo	0,24	0,94	0,9364	7,696	5,3	0.73
	2. RSUD Pandan Arang	1,44	1,49	1,7	1,64	13,8	2.09
	3. RSUD Waras Wiris	1,17	0,99	0,1	1,26	21,1	1

Sumber data: RSUD Pandanarang, RSUD Waras-wiris, RSUD Simo Kab. Boyolali

Nilai BOR ditentukan oleh angka rata-rata pemakaian tempat tidur yang digunakan di Rumah sakit. Tingkat hunian (BOR) pada Tahun 2019 di RSUD Simo sebesar 52,1; RSUD Pandan Arang sebesar 65,3%; RSUD Waras-wiris sebesar 52%.

Untuk rata-rata jumlah hari pasien rawat inap tinggal di rumah sakit, (LOS) pada Tahun 2019 di RSUD Simo sebesar 3 hari; RSUD Pandan Arang sebesar 3 hari; RSUD Waras-wiris sebesar 3 hari. Angka LOS tersebut ditentukan oleh jumlah hari kalender pasien mendapatkan perawatan (rawat inap) hingga keluar dari rumah sakit (discharge) baik kondisi pasien keluar dari rumah sakit baik dalam kondisi hidup ataupun mati.

TOI pada Tahun 2019 di RSUD Simo sebesar 3 hari; RSUD Pandan Arang sebesar 2 hari; RSUD Waras-wiris sebesar 3 hari. Angka TOI tersebut diperoleh dari rata-rata pasien yang menempati tempat atau ruangan dengan jumlah hari tidak terjadi kekosongan pasien sudah sembuh pulang dan selanjutnya ada pasien yang menunggu antrian pasien yang akan masuk.

BTO adalah beberapa kali satu tempat tidur dipakai oleh pasien dalam periode tertentu, di RS Simo 60; RS Pandan Arang 74; dan RS waras Wiris 52.

Stunting merupakan satu kondisi dimana tubuh anak menjadi lebih pendek jika dibandingkan dengan tinggi anak pada seumurannya. Di Indonesia, kasus ini masih menjadi perhatian dan prioritas utama oleh jajaran kesehatan. Stunting ini diyakini menghambat tumbuh kembang anak yang berpengaruh pada prestasi sekolah dan keberhasilan pendidikan. Kasus stunting menjadi isu nasional yang mendapat perhatian khusus. Sesuai dengan prioritas nasional terkait dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kualitas SDM, untuk mewujudkan SDM yang unggul. Demi menekan pertumbuhan stunting di Provinsi Jawa Tengah, di susun lima pilar penting penanganan stunting tersebut yakni komitmen, kampanye, konvergensi program, akses pangan bergizi dan monitoring program.

Kondisi di Kabupaten Boyolali, persoalan stunting dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Hal itu terbukti, dengan semakin turunnya angka kasus stunting di Boyolali. Pada tahun 2017 Kabupaten Boyolali sudah sudah menyelesaikan pilar stop BABS (buang air besar sembarangan). Penurunan kasus stunting di Boyolali tidak lepas dari peran semua pihak di dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Pada tahun 2017, berdasarkan data PSG (Pemantauan Status Gizi Kemeterian Kesehatan), stunting di Kabupaten Boyolali hanya 18 persen lebih kecil dari standar nasional 20 persen. Di tahun 2018, berdasarkan data riil, ternyata semakin membaik turun lagi datanya menjadi 9,4 persen. Sebagaimana arahan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bahwa penanganan stunting tidak hanya dari sisi kecukupan gizi, tapi juga perlu dibudayakan hidup sehat, sehingga, kekurangan gizi kronis bisa diatasi. Demikian juga Kabupaten Boyolali membudayakan hidup bersih dan sehat sehingga angka stunting di Kabupaten Boyolali jumlahnya sangat rendah.

Khusus data Balita stunting di Kabupaten Boyolali, mengalami penurunan dari tahun 2018 adalah sebanyak 5.366 balita menjadi 4.566 balita pada tahun 2019. Upaya penurunan Balita stunting dilakukan dengan pemberian suplemen gizi dan intervensi gizi, sehingga balita yang stunting menjadi normal.

Berikut ini tabel data Balita Stunting di Kabupaten Boyolali untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 :

Tabel II.41

Jumlah Balita Mengalami Stunting Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Balita
1	2015	-
2	2016	-
3	2017	-
4	2018	5.366
5	2019	4,566

Sumber: Dinas Kesehatan

Indikator Jaminan Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan ini ditujukan untuk pembayaran premi Kesehatan bagi masyarakat miskin non PBI, dan pembayaran klaim untuk masyarakat miskin yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat namun memerlukan perawatan/pengobatan, sehingga masyarakat miskin dapat diringankan beban biayanya bilamana memerlukan pengobatan.

Target Indikator ini pada tahun 2019 dengan target 39,20% dapat terealisasi 43,14%. Jumlah peserta KIS 2019 masyarakat miskin Kabupaten Boyolali sebanyak 453.777 jiwa (43,14%) dari total jumlah penduduk sebanyak 1.051.867 jiwa.

Tabel Gambaran Jaminan Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan Kabupaten Boyolali bisa di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.42
Gambaran Jaminan Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan
Kabupaten Boyolali

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	REALISASI				TARGET		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Capaian akhir
1.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat/ penduduk miskin	%	38,26	41,08	42,98	43,14	39,6	40	40

Sumber: Lap akhir Bid SDK

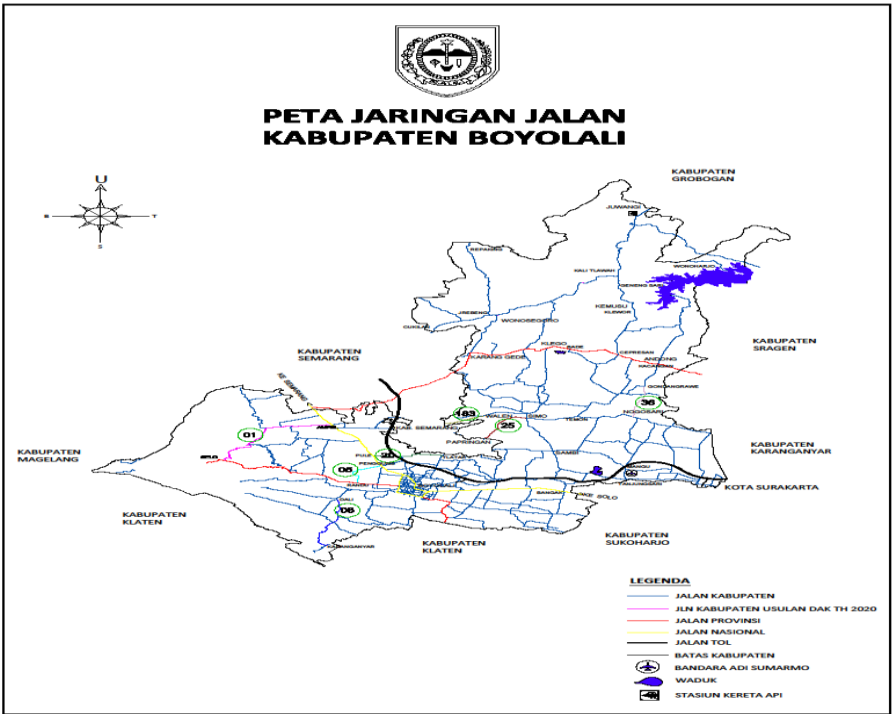
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 900/228 Tahun 2018 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Nomor 900/0245 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Di Wilayah Kabupaten Boyolali bahwa jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 203 ruas jalan dan panjang jalan adalah 678,35 km. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, untuk tahun 2018 menjadi sebesar 73,96% atau 501,43 km dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 678,35 km, atau naik 6,5 km bila dibandingkan kondisi untuk tahun 2017, sehingga jalan kabupaten sampai akhir tahun 2018 dalam kondisi mantap (kondisi baik + kondisi sedang) sepanjang 578,91 Km. Untuk kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat berkurang 3,21 km.

Tabel II.43
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum
untuk Kondisi Jalan dan Irigasi Kabupaten Boyolali
Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	HASIL					TARGET 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	71,00	71,24	73,00	73,96	74,35	74,72
2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/Jam)	Km	48,38	483,44	494,93	501,43	407,45	412.33
3	Rasio Jaringan Irigasi	%	79,98	80,98	82,36	84,73	86,98	88,98
4	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	802,41	9.013,71	8.805,39	8321,30	8626,36	8682.01

Sumber: DPU dan Penataan Ruang Kab. Boyolali



Gambar II.8 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Boyolali

Permasalahan sektor bina marga di Kabupaten Boyolali antara lain:

- Tonase angkutan barang yang seringkali melewati batas yang diijinkan sehingga banyak mengakibatkan kerusakan jalan;
- Dibutuhkan alokasi anggaran yang cukup banyak untuk menangani seluruh infrastruktur jalan dan jembatan;
- Pembangunan infrastruktur jalan yang tidak dilengkapi satu kesatuan dengan drainase jalan;
- Pilihan struktur jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan dan atau struktur tanah.

Dalam aspek cakupan penggunaan air bersih pada tahun 2018 sebesar 90,47% dari target 88,87 % dan pada tahun 2019 terealisasi 90,99 % dari target 90,88%. Peningkatan akses air minum yang berkualitas dicapai melalui beberapa kegiatan antara lain: peningkatan jaringan perpipaan dan ketersediaan air baku PUDAM, BPSPAM, peningkatan jumlah embung pada daerah yang sulit air, penyediaan sara swadaya masyarakat dan pembangunan sumur uji. Selain itu untuk meningkatkan kualitas air dilakukan pengawasan kualitas air baik secara bakteriologis maupun kimiawi.

Tabel II.44
Aspek Cakupan Penggunaan Air Bersih

No	Indikator kinerja		Realisasi					Target
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Perkotaan	Jiwa	289.884	294.884	299.384	304.384	309.384	318.000
		%	35.00	53.00	35.00	34.58	34.47	35.24
2	Pedesaan	Jiwa	538.362	545.862	555.952	575.962	588.062	584.434
		%	65.00	64.93	65.00	65.42	65.53	64.76
3	Total Capaian Kab Boyolali	Jiwa	828.246	840.746	855.346	880.346	897.446	902.434
		%	85.84	86.61	87.58	89.78	90.99	91.84

Sumber: DPU dan Penataan Ruang Kab. Boyolali

Dalam aspek sanitasi akses masyarakat terhadap sanitasi sehat pada tahun 2018 tercapai sebesar 96,35 % dari target 94,46% dan pada tahun 2019 terealisasi 97,93 % dari target 94,66%. Peningkatan akses terhadap sanitasi sehat dicapai melalui beberapa kegiatan antara lain kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air limbah pada DPUR, kegiatan jambanisasi pada Dinas Kesehatan serta penanganan limbah B3 dan program pengelolaan sampah pada DLH.

Tabel II.45
Penduduk yang Mengakses Sanitasi Sehat Kabupaten Boyolali
Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

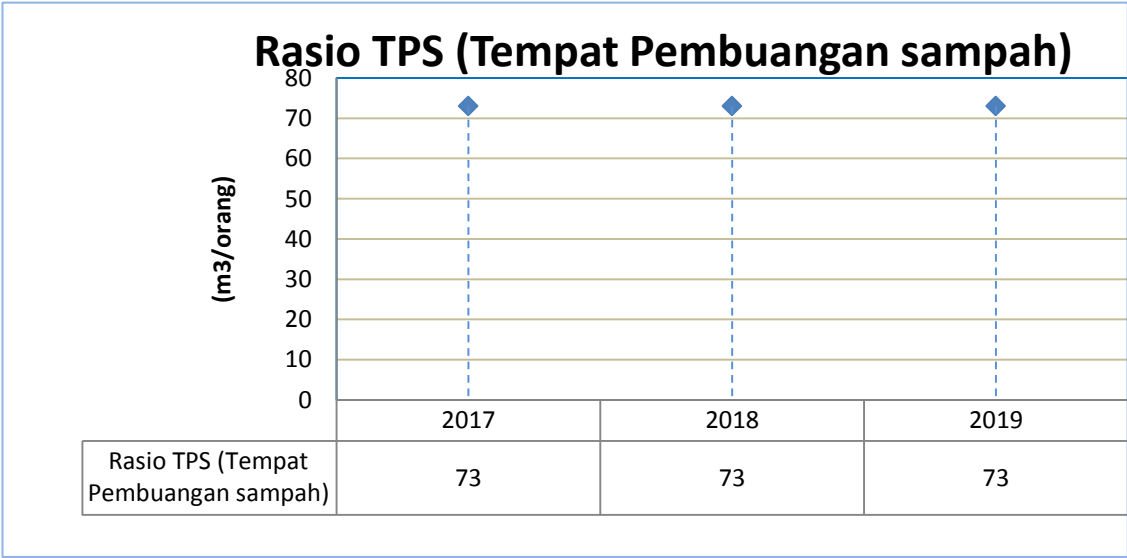
No	Indikator kinerja		Realisasi					Target
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Perkotaan	Jiwa	283.700	288.919	296.919	305.419	314.054	281.919
		%	31.63	31.88	32.13	32.33	32.52	29.36
2	Pedesaan	Jiwa	613.252	617.252	627.252	639.252	651.752	678.252
		%	68.37	68.12	67.87	67.67	67.48	70.64
3	Total Capaian Kab Boyolali	Jiwa	896.952	906.171	924.171	944.671	965.806	960.171

No	Indikator kinerja		Realisasi					Target
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
		%	92.96	93.35	94.63	96.35	97.93	97.72

Sumber: DPU dan Penataan Ruang Kab. Boyolali

Dalam Aspek Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum untuk Rasio Tempat Pembuangan Sampah Kabupaten Boyolali tercapai realisasi Tahun 2017 sebesar 73 m³/orang dan Tahun 2018 sebesar 73 m³/orang, tersaji pada Grafik II. sebagai berikut:

Grafik II.8
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum
 untuk Rasio Tempat Pembuangan Sampah
 Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2018 dan Target Tahun 2019



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Boyolali

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Tahun 2015 sebesar 2.200 orang/TPS.

Tabel II.46
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Penataan Ruang
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2018 dan Target Tahun 2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Keserasian pembangunan antar sektor	%	100	100	100	NA	NA
2	Sosialisasi Perda RTRW Kab. Boyolali sebagai pedoman pemanfaatan ruang di Kab. Boyolali	paket	1	1	1	NA	NA
3	Website penataan ruang	paket	NA	NA		NA	NA
4	Monitoring kegiatan pemanfaatan ruang	Kec.	19	19		NA	NA

Sumber: DPU dan Penataan Ruang Kab. Boyolali

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Boyolali antara lain;

- Masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah sendiri, sementara untuk mendirikan rumah bersubsidi sangat sulit karena harga tanah sudah diatas 250.000 per m2 ;
- Banyaknya rumah yang berdiri di atas tanah ilegal, tanah lestari, sepandan jalan, sungai dan lain-lain, sehingga hal tersebut menimbulkan persoalan kawasan sehingga muncul kawasan kumuh di berbagai lokasi;
- Kesadaran masyarakat untuk hidup tertib dan bersih masih sangat rendah, sehingga sering kali membuang sampah di sungai, pinggir jalan dan lain-lain.

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara rumah layak huni dengan jumlah rumah penduduk di seluruh wilayah kabupaten. Perkembangan pembangunan perumahan di Kabupaten Boyolali dengan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.47
Gambaran Kinerja RTLH di Kabupaten Boyolali

Target/Realisasi	Indikator Kinerja Utama		Target pada Akhir Tahun Perencanaan
	Terwujudnya Pembangunan Rumah	Satuan	60
Target 2016	10	Unit	
Realisasi 2016	0	Unit	
Target 2017	10	Unit	
Realisasi 2017	254	Unit	
Target 2018	10	Unit	
Realisasi 2018	708	Unit	
Target 2019	10	Unit	
Realisasi 2019	780	Unit	
Target 2020	10	Unit	
Target 2021	10	Unit	
Target 2016	225	Unit	
Realisasi 2016	458	Unit	
Target 2017	300	Unit	
Realisasi 2017	948	Unit	
Target 2018	350	Unit	
Realisasi 2018	762	Unit	
Target 2019	300	Unit	
Realisasi 2019	782	Unit	
Target 2020	400	Unit	
Target 2021	300	Unit	
Target 2016	1000	Unit	
Realisasi 2016	1000	Unit	
Target 2017	1000	Unit	
Realisasi 2017	1889	Unit	
Target 2018	999	Unit	
Realisasi 2018	1000	Unit	
Target 2019	1000	Unit	
Realisasi 2019	832	Unit	
Target 2020	1000	Unit	
Target 2021	1000	Unit	
Target 2016	0	%	
Realisasi 2016	0	%	
Target 2017	85	%	
Realisasi 2017	81.34	%	
Target 2018	88	%	
Realisasi 2018	84.185	%	
Target 2019	87	%	

Target/Realisasi	Indikator Kinerja Utama		Target pada Akhir Tahun Perencanaan
	Terwujudnya Pembangunan Rumah	Satuan	60
Realisasi 2019	87.174	%	
Target 2020	88	%	
Target 2021	89	%	

Sumber: Evaluasi RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Penanganan permukiman tidak layak huni di Kabupaten Boyolali telah dilaksanakan dengan memberikan stimulan untuk penanganan rumah tidak layak huni. Sedangkan sumber pendanaan pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali, Dana Desa. Target penanganan perbaikan rumah tidak layak huni Tahun 2019 sesuai dengan RPJMD adalah sebanyak 1.310 unit dengan rincian dari dana APBN 10 unit, Provinsi Jawa Tengah 300 unit dan APBD Kabupaten Boyolali 1.000 unit. Adapun realisasi peningkatan kualitas RTLH pada tahun 2019 adalah dari Dana APBN terealisasi sebanyak 780 unit dari target 10 unit, dana APBD Provinsi Jawa Tengah terealisasi 782 unit dari target 300 unit, dan dana APBD Kabupaten Boyolali teralisasi 832 unit, 1 unit tidak direalisasikan karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sehingga total RTLH yang berhasil ditingkatkan kualitasnya sebanyak 2.394 unit atau 187,75 % dari target.

Sedangkan untuk penanganan Kawasan Permukiman di Kabupaten Boyolali di Tahun 2019 terealisasi seluas 39,77 Ha dari target RPJMD 1,65 Ha atau terealisasi 2.410 % dari target RPJMD.

Penanganan RTLH di Kabupaten Boyolali dilaksanakan dengan kegiatan pembangunan baru dan peningkatan rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu dalam rangka mewujudkan target Rasio Rumah Layak Huni. Sumber dana dari kegiatan ini adalah dari APBN melalui DAK dan BSPS, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara rumah layak huni dengan jumlah rumah penduduk di seluruh wilayah kabupaten. Dari rekapitulasi data yang berasal PBDT BPS Tahun 2015 jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 53.959 unit, setelah dilakukan intervensi periode 2015-2019 jumlah RTLH di akhir 2019 menjadi 40.232 unit atau 12,826%. Sedangkan jumlah rumah layak huni 273.441 unit atau 87,174%.

Pada tabel di bawah ini disajikan gambaran kinerja RTLH di Kabupaten Boyolali. Pada indikator terwujudnya pembangunan RTLH dari dana DAK dan BSPS (Bantuan stimulan perumahan swadaya), realisasi secara umum lebih bear dari target. Indikator terwujudnya pembangunan RTLH dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah, secara umum realisasi lebih besar dari target. Demikian juga yang bersumber dari APBD Kabupaten Boyolali rata-rata realisasi lebih besar dari target.

Berikut ini tabel gambaran kinerja RTLH di Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021:

Tabel II.48
Gambaran Kinerja RTLH di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	RPJMD								
			2016	Realisasi 2016	2017	Realisasi 2017	2018	Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021

1.	Terwujudnya Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (DAK & BSPS)	Unit	10	0	10	254	10	708	10	10	10	60
2.	Terwujudnya pembangunan rumah tidak layak huni (APBD Prov)	Unit	225	458	300	948	350	762	300	400	300	1875
3.	Terwujudnya bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi Gakin (APBD Kab. Boyolali)	Unit	1000	1000	1000	1889	1000	999	1000	1000	1000	6000
4.	Rasio rumah layak huni	%	0	0	85	81,34	86	84,185	87	88	89	89

Sumber: Evaluasi RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2018

Berdasarkan SK Bupati Boyolali Nomor : 663/324 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017. Sesuai SK tersebut luasan kumuh di Wilayah Kabupaten Boyolali seluas 48,61 Ha, setelah dilakukan intervensi di tahun 2017, luasan kumuh berkurang 7,4 Ha, sehingga luasan kumuh tersisa seluas 41,21 Ha. Sedangkan di tahun 2018 telah ditangani 3,3 ha, sehingga luas kawasan kumuh yang masih perlu ditangani seluas 37,91 ha.

Kondisi kawasan kumuh di Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 sebagai berikut: Luas kawasan kumuh 8,85 ha atau 0,0087% dari seluruh luas wilayah kabupaten boyolali yaitu 101.510 ha.

Gambaran Kinerja Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Boyolali di sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel II.49
Gambaran Kinerja Penanganan Kawasan Kumuh
di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	RPJMD									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target pada Akhir Tahun Perencanaan
1	Penanganan lingkungan pemukiman kumuh	Ha	0	0	0,55	7,4	1,1	10,7	1,65	2,2	2,75	2,75

Sumber: Evaluasi RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2018

Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Kegiatan pembinaan terhadap ormas, LSM dan OKP, aspek ini menjelaskan tentang jumlah kegiatan pembinaan dan jumlah cakupan LSM, Ormas dan OKP yang dibina untuk membantu pemerintah dalam membantu kegiatan sosial kemasyarakatan. Jumlah LSM, Ormas dan OKP yang dibina sebanyak 87 ormas, LSM/OKP baik yang masih aktif atau tidak tetapi sudah terdaftar. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali mengadakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan tujuan untuk dapat membina dan menyebarluaskan anti radikalisme, mengevaluasi keberadaan Ormas, LSM setempat. Agar terhindar dari paham radikalisme serta meningkatkan peran agar bermanfaat bagi masing-masing negara. Menghimbau agar melakukan pencatatan Organisasinya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali.

Kegiatan pembinaan politik daerah, aspek ini menjelaskan tentang terwujudnya kegiatan pembinaan politik daerah sehingga dapat terlaksana sesuai dengan jumlah kegiatan yang telah direncanakan dan jadwal yang telah ditentukan.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali mengadakan 4 (empat) kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan politik daerah di Kabupaten Boyolali, diantaranya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik, kegiatan forum- forum diskusi politik dan kegiatan pengkondisian wilayah dan sosialisasi pemilu. adapun tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut untuk menjalin koordinasi dengan mitra kerja, baik birokrasi yang terkait, partai politik maupun tokoh masyarakat yang berkecimpung dalam kegiatan berpolitik.

Pada aspek Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kabupaten Boyolali capaian Tahun 2016-2018 dan Target Tahun 2019 tersaji pada Tabel II.53, sebagai berikut:

Tabel II.50
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boyolali
Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL					TARGET 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	%	0	92	93,9	96,34	97,56	98,78
2	Cakupan sosialisasi/fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	%	0	30	30,32	65,12	76,74	88,37
3	Cakupan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Kegiatan	3	17	22	22	22	22
4	Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani	%	0	42	42,86	57,14	71,43	85,71
5	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	%	0	78	78	80,00	80,00	82,00
6	Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan.	Kegiatan	0	0	38	38	38	38
7	Cakupan kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian kebisingan dan pengendalian keamanan lingkungan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3
8	Cakupan kegiatan <i>event</i> pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan.	Kegiatan	20	20	20	20	20	20
9	Cakupan kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat	Kegiatan	20	15	15	15	15	15
10	Cakupan pelayanan kebakaran di kabupaten	%	100	100	100	100	100	100
11	Jumlah Desa/Kelurahan yang menerapkan Desa/Kelurahan tangguh bencana	Desa	2	4	4	2	0	1
12	Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani	%			67	68	69	70
13	Tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>)	%	55	55	45	40	30	30

Sumber data: Kesbangpol, BPBD & Satpol PP Kab. Boyolali

Dengan melihat hasil dengan melihat hasil dari tabel di atas tentang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kabupaten Boyolali maka dapat direncanakan target pada Tahun 2020 sesuai dengan isian tabel tersebut, antara lain:

- Prosentase LSM yang mempunyai Surat Keterangan Tercatat dengan hasil capaian pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan dengan tren

kenaikan setiap tahunnya pada Tahun 2019 mencapai hasil sebesar 97,56 %, maka pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 98,78%. Untuk mencapai target tersebut maka diadakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap keberadaan Ormas, LSM dan OKP, serta kepemilikan Surat Keterangan Tercatat.

- Cakupan sosialisasi/fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Hasil capaian pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan dengan tren kenaikan setiap tahunnya pada Tahun 2019 mencapai hasil sebesar 76,74 %, maka pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 88,37%. Sosialisasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA dengan diadakan kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat dengan tujuan untuk menyamakan Visi Misi dalam menjaga dan meningkatkan rasa solidaritas, mempererat rasa persaudaraan dalam kesatuan dan persatuan dan mengembangkan wawasan kebangsaan serta menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dikalangan siswa tingkat SLTA.
- Cakupan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang dijalankan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali dengan disediakan kegiatan fasilitasi pencapaian *halaqoh* dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan, Menyatukan Pimpinan Pondok Pesantren Se Kabupaten Boyolali.
- Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani. Hasil capaian pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan dengan tren kenaikan setiap tahunnya pada Tahun 2019 mencapai hasil sebesar 71,43 %, maka pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 85,71 %. Kegiatan pencegahan dan pengkondisian konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali dengan melaksanakan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang diantaranya ada Cipta Kondisi dan Ketahanan Ekonomi
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Hasil capaian pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan dengan tren kenaikan setiap tahunnya pada Tahun 2019 mencapai hasil sebesar 80 %, maka pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 82 %. Dalam rangka menjaga partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum maka dilaksanakan kegiatan pengkondisian wilayah dan sosialisasi pemilu.
- Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan. Hasil capaian pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami tren yang stabil dengan jumlah kegiatan yang sama setiap tahunnya sebanyak 38 Kegiatan, dan pada Tahun 2020 masih ditargetkan sebanyak 38 Kegiatan juga. Penyediaan fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap kecamatan dengan diadakan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, diantaranya dilaksanakan kegiatan Orketbang (Orientasi Ketahanan Bangsa), Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) dan lomba pengucapan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang di ikuti 132 peserta.
- Cakupan kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian kebisingan dan pengendalian keamanan lingkungan melalui Pembinaan anggota linmas, dan Peningkatan kapasitas Satpol PP, Pelaksanaan operasi tipiring, Pelaksanaan operasi cukai tembakau, dan Pelaksanaan operasi PKL dan Reklame. Pelaksanaan patroli wilayah, Pelaksanaan operasi terpadu, Pengamanan lebaran, Natal dan Tahun Baru, dan Pengamanan Giat Umum/*Car Free Day*. Cakupan kegiatan tersebut pada Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 adalah sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan dilaksanakan dengan prosentase pelaksanaan sebesar 100%. Untuk Tahun 2020 ditargetkan sama sebanyak 3 kegiatan.
- Cakupan kegiatan *event* pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui Cakupan kegiatan ini adalah kegiatan Korsik (Korp Musik Praja Wibawa) dalam mengiringi setiap upacara hari-hari besar dan upacara kenegaraan lainnya. Upacara-

upacara tersebut antara lain: Hari ulang Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (17 Agustus), Upacara KBBT (Karya Bakti Boyolali Tersenyum), Upacara TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa), Upacara Hari Pahlawan, Upacara Hari Jadi Kabupaten Boyolali, Upacara Hari Kesaktian Pancasila, dan upacara-upacara lainnya yang diselenggarakan di Kabupaten Boyolali. Kegiatan event pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dilaksanakan masing-masing sebanyak 20 kegiatan dan telah terlaksana sebesar 100 %. Untuk Tahun 2020 ditargetkan melaksanakan kegiatan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan.

- Cakupan kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat melalui kegiatan ini adalah melakukan Penyuluhan dan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi di wilayah Kabupaten Boyolali. Kegiatan tersebut berupa sidak dan operasi di lokasi yang disinyalir merupakan tempat mangkalnya pekerja seks komersial (PSK), antara lain di warung remang-remang, panti pijat, salon-salon, hotel, karaoke, penginapan-penginapan dan tempat-tempat lain yang pantas dicurigai sebagai tempat mangkal PSK. Kegiatan operasi dilaksanakan secara gabungan yang melibatkan unsur dari Kepolisian dan juga jajaran TNI. Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat pada Tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 20 (dua puluh) kali dan Tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 15 (lima belas) kali. Turunnya frekuensi kegiatan disebabkan karena turunnya pagu anggaran akibat keterbatasan keuangan daerah. Akibatnya, jumlah kegiatan harus disesuaikan. Meskipun mengalami penurunan secara kuantitas, namun pelaksanaannya tetap dilaksanakan dengan maksimal. Tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan. Untuk Tahun 2020 ditargetkan sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan.
- Cakupan pelayanan kebakaran adalah kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran di mana tugasnya adalah pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di Kabupaten Boyolali. Pihak-pihak yang dilayani adalah semua warga tanpa terkecuali baik yang berupa perumahan perorangan, tempat usaha perekonomian, instansi pemerintah, instansi swasta dan juga instansi-instansi lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali. Untuk mendukung keberhasilan pelayanan kebakaran di wilayah Kabupaten Boyolali, maka cakupan pelayanan kebakaran meliputi kegiatan-kegiatan antara lain: mengadakan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan THL (Tenaga Harian Lepas) Bidang Dakar (Pemadam Kebakaran), pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.
- Kegiatan untuk cakupan pelayanan kebakaran di wilayah Kabupaten Boyolali pada Tahun 2017 sebesar 67% dan Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar 68%. Pada Tahun 2019 Cakupan sebesar 69% untuk Tahun 2020 cakupan ditargetkan naik menjadi 70%. Cakupan pelayanan kebakaran di wilayah Kabupaten Boyolali tahun 2019 meliputi kejadian kebakaran sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) kejadian kebakaran. Hal ini disebabkan terjadinya kemarau panjang pada tahun 2019. Tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) hampir tercapai 100% karena jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (kurang dari 1 jam setelah pengaduan). Berdasarkan data dari laporan penerapan dan pencapaian SPM untuk jenis pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat adalah, Indikator penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah pada tahun 2015 sebesar 90%, 2016 sebesar 85%, 2017 sebesar 75%, 2018 sebesar 67% dan 2019 sebesar 84% serta target tahun 2020 sebesar 100%. Indikator patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sudah mencapai 3 patroli dalam satu wilayah kecamatan dari target nilai sebanyak 3 kali patroli dalam sehari. Indikator rasio petugas linmas baru mencapai 1 orang per-RT dari target nilai 1 orang setiap RT.

Tabel II.51

Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum,
Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boyolali Tahun
2015-2019 dan Target Tahun 2020

SPM	TARGET	2015	2016	2017	2018	2019	Target2020
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota	100%	90	85	75	67	84	100
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	3x sehari	3	3	3	3	3	3
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	1 orang	1	1	1	1	1	1

Sumber data: Satpol PP Kab. Boyolali

Sosial

Pada tahun 2019 terdapat 16 (enam belas) sarana sosial yang terdiri dari 16 Panti asuhan yang mendapatkan pelayanan berupa pembinaan, pelatihan bagi penghuni panti, pemberian bantuan sosial per-makanan panti dan bantuan sosial sarana prasarana panti .Sarana sosial lain yang dikelola Dinas Sosial yaitu Rumah Singgah atau Rumah Perlindungan sementara bagi PMKS yang seharusnya ditangani di Rumah Singgah. Rumah Singgah sudah dioperasikan mulai tahun 2019. Dalam mengatasi permasalahan PMKS Dinas Sosial Kabupaten Boyolali melakukan berbagai kegiatan seperti razia PGOT, pembinaan dan pelatihan PMKS, pemberian bantuan sosial dan penyuluhan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Boyolali selama ini dengan bekerja sama dengan instansi laian seperti Balai Resos Taruna Yudha Sukoharjo, RSJD Surakarta, RSJ Klaten dan instansi terkait.

Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial adalah perbandingan jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial dengan Jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Boyolali. Pada tahun 2018 prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 71,2 %. Sedangkan tahun 2019 prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial rsebesar 87,7 %. Jumlah PMKS pada tahun 2019 sebanyak 72.336 jiwa dan yang menerima bantuan sosial sebanyak 63.451 jiwa.

Prosentase penanganan terhadap PMKS adalah perbandingan jumlah PMKS yang tertangani dengan jumlah PMKS yang ada. Penanganan PMKS tahun 2019 sebesar 89,7% atau jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 64.852 orang dan jumlah PMKS yang ada pada tahun 2019 yaitu sebanyak 72.336 orang. Realisasi cukup tinggi karena adanya program dari kementerian Sosial RI yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program-program yang ada tentunya berdampak positif yaitu dapat meringankan beban keluarga tidak mampu dan meningkatkan kemandirian PMKS di Kabupaten Boyolali.

Tabel II.52
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Sosial
Kabupaten Boyolali Tahun 2015 -2019 dan Target Tahun 2020

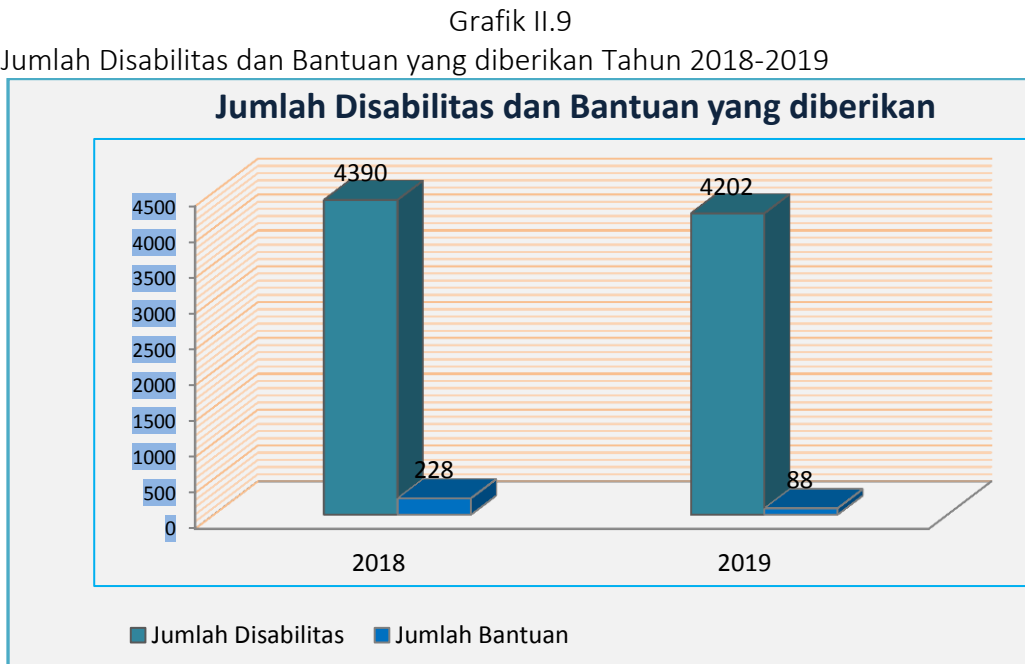
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1.1	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit				16	16	16
2.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%				71.2	87,7	35,77
3.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan	%				77,67	89,7	35,77

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Boyolali

Data disabilitas di Kabupaten Boyolali pada tahun 2018 adalah sebanyak 4.390 orang, dengan jumlah bantuan yang diberikan sebanyak 288 bantuan. Pada tahun 2019 jumlah disabilitas sedikit menurun menjadi 4.202 orang dengan jumlah bantuan sebanyak 88 bantuan.

Penanganan penyandang disabilitas dilakukan dengan pemberian alat-alat bantu bagi disabilitas seperti kursi roda, memberikan bantuan modal usaha, pelatihan ketrampilan, pelatihan tata boga, pelatihan menjahit (dengan bantuan mesin jahit dan etalase). Bantuan yang lain berupa sembako dan uang tunai. Pada masa pandemi covid-19 tahun 2020 diberikan bantuan sembako dan uang tunai bagi disabilitas di Kabupaten Boyolali.

Berikut ini grafik data disabilitas dan bantuan di Kabupaten Boyolali untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 :



Sumber: Dinas Sosial

2.1.4.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan

Capaian pada aspek pelayanan bidang ketenagakerjaan Kabupaten Boyolali pada Tahun 2017-2019 dan target yang akan dicapai pada Tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel II.55 sebagai berikut:

Tabel II.53

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	74,82	76,68	74,76	72,14	73,39	73,39
2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun	Kasus	42,59	40,52	20	7	7	20

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
3	Pencari kerja yang ditempatkan	Orang	4,95	2,03	3465	5395	4796	2900
4	Tingkat pengangguran terbuka	%	100	100	2	2,16	3,12	3,12
5	Keselamatan dan perlindungan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab. Boyolali

Angka partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan antara jumlah Penduduk Angkatan Kerja (PAK) dan jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK). Jumlah PAK sebanyak 552.006 orang sedangkan PUK sebanyak 762.559 orang. Sehingga didapat angka partisipasi angkatan kerja sebesar 72,39%.

Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun adalah jumlah sengketa atau perselisihan yang dilaporkan. Angka sengketa pengusaha pada Tahun 2019 sebanyak 7 (tujuh) kasus.

Dengan semakin berkurangnya kasus atau sengketa maka menunjukkan kinerja yang baik dimana pembinaan tata cara penyelesaian HI (Hubungan Industrial) telah berhasil. Selain itu tidak semua sengketa dilaporkan. Kasus-kasus yang terjadi dapat tertangani dengan baik dan selesai dengan PB (Perjanjian Bersama) tidak sampai ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan kepada pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat minat dan kemampuan. Pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2019 sebanyak 4.796 orang. Penempatan melalui mekanisme Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dan jumlah angkatan kerja. Jumlah penganggur terbuka Tahun 2019 sebanyak 17.244 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 552.006 orang. Sehingga prosentase tingkat pengangguran terbuka Tahun 2019 sebesar 3,12%.

Prosentase tingkat pengangguran Tahun 2019 di dapat dari:

$$\frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka (17.244 org)}}{\text{Jumlah Angkatan kerja (552.006 org)}} = 3,12\%$$

Keselamatan dan perlindungan adalah perbandingan jumlah perusahaan yang menerapkan K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) pada Tahun *n* dengan jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada Tahun *n*.

Jumlah perusahaan di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 sebanyak 627 perusahaan meliputi perusahaan besar, sedang dan kecil. Dengan demikian jumlah perusahaan yang menerapkan K3 adalah sama dengan jumlah perusahaan wajib lapor yaitu 627 perusahaan. Berdirinya sebuah perusahaan atau tempat usaha dimana ada aktivitas dan tenaga kerjanya maka perusahaan ini wajib menerapkan K3. Namun tidak atau belum semua perusahaan mempunyai unsur-unsur K3 seperti P2K3 (Pengurus Pengelola K3).

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian aspek pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Boyolali pada tahun 2016-2018 tersaji sebagai berikut:

Tabel II.54

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target 2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Hasil					TARGET 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	32	50	43	43	25	20
2	Penyediaan data pilah gender	%	100	100	100	100	0	0
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49,6	50,87	52,15	51,38	51,3	51
4	Rasio KDRT	Kasus	17	7	21	21	3	2

5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	100	100	100	100

sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Boyolali

Adapun Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali Target Tahun 2020 tersaji sebagai berikut:

Tabel II.55
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Boyolali Target Tahun 2020

N O	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	IndeksPemberdayaan Gender (IDG)	-	65.82	(tidak di publish)	69,56	65,61	69,57	69,58
2	JumlahDesaLayakAnak	desa	(tahap sosialisasi)	19	25	25	67	34
3	KecamatanSayangIbudanAnak	%		26	26	26	57	78
4	Jumlahprodukkebijakanpemb erdayaanperempuanandanperlin dungananak	dokumen		3	3	3	3	1
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-		(tidak di publish)	92,96	93,24	69,32	69,32
6	Cakupanpenangananaduan	%			100	100	100	100

Sumber:DinasPengendalianPenduduk,KeluargaBerencana,PemberdayaanPerempuan Dan PerlindunganAnak Kab. Boyolali

Prosentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dapat dilihat dari komposisi jumlah PNS di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 sebanyak 9.528 orang dengan rincian 4.681 laki-laki dan 4.847 perempuan. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sudah mengalami peningkatan dari 50,87% di Tahun 2016 menjadi 52,15% di Tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan partisipasi perempuan dalam pemerintahan yang hanya mencapai 51,38%, penyebabnya adalah tidak ada rekrutmen ASN & memasuki masa purna tugas. Namun kesertaan perempuan dalam pemerintahan tetap pada angka 50%.

Untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan, pada Tahun 2016 terdapat sebanyak 7 kasus. Tahun 2017 terdapat 21 kasus. Pada Tahun 2017 dapat tertangani sebanyak 21 kasus. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan pada Tahun 2018 sebanyak 21 kasus, Seluruh pengaduan telah ditindak lanjuti sesuai dengan jenis kasusnya.

Rasio Kekerasan Terhadap Anakmengalami penurunan selama kurun 2016-2018. Pada Tahun 2016 terjadi 50 kasus kekerasan terhadap anak, Tahun 2017 terjadi 43 kasus dan Tahun 2018 terjadi 43 kasus. Penurunan ini merupakan bentuk upaya yang telah dilakukan oleh Bidang P3A DP2KBP3A melalui kegiatan disetiap kecamatan berupa pembekalan terhadap para tokoh masyarakat & perangkat desa untuk memperhatikan pertumbuhan & lingkungan pergaulan anak-anak disekitar lingkungan mereka.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.Tahun 2016 dan 2018 tercapai 69,56 ditargetkan Tahun 2019 meningkat pada kisaran angka 69,60.Jumlah Desa Layak AnakTahun 2015 sebanyak 5 desa, Tahun 2016 meningkatkan menjadi 22 dan Tahun 2017 menjadi 25 desa, Tahun 2018 meningkat menjadi 26 desa. Sedangkan untuk tahun 2019 diprediksi mencanangkan desa baru sebagai desa layak anak sebanyak 28 desa. Desa Layak Anak ini merupakan indikator yang sangat strategis dalam menciptakan lingkungan yang optimal bagi tumbuh kembang dan perlindungan hak anak.

Jumlah Kecamatan Sayang Ibu dan Anak pada Tahun 2015 telah mencapai 31,6 % atau sebanyak 6 kecamatan, Tahun 2016 meningkatkan menjadi 42% atau sebanyak 8 kecamatan dan Tahun 2017 menjadi 52,6% atau sebanyak 10 kecamatan. Sedangkan

Tahun 2018 meningkat menjadi 63% atau sebanyak 12 kecamatan. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Boyolali melakukan pemekaran Kecamatan yang awalnya sejumlah 19 Kecamatan, maka sekarang menjadi 22 Kecamatan. Kami menargetkan pada tahun 2019 mencanangkan 4 Kecamatan dapat menyusul Kecamatan lain yang sudah terbentuk sebagai Kecamatan Sayang Ibu dan Anak. Kecamatan Sayang Ibu dan Anak ini merupakan indikator yang sangat strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ibu dan anak.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran tingkat keberhasilan pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menekankan pada status perempuan Tahun 2015 dan 2016 tercapai 69,30. Pada tahun 2017 mencapai 69,31 dan Tahun 2018 tercapai 69,33. Sedangkan pada tahun 2019 ini memprediksi akan mencapai angka 69,40. Produk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat penting dalam rangka mendorong pengarusutamaan gender dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan anak. Ketahanan Pangan.

Jumlah korban kekerasan di Kabupaten Boyolali semakin menurun dari tahun ke tahun. Korban kekerasan lebih banyak terjadi pada kaum perempuan, dengan asumsi perempuan lebih lemah daripada laki-laki.

Pada tahun 2017 jumlah korban kekerasan sebanyak 44 orang, tahun 2018 sebanyak 33 orang, tahun 2019 naik menjadi sebanyak 40 orang, dan pada tahun 2020 menurun menjadi sebanyak 25 orang.

Berikut ini tabel data korban di Kabupaten Boyolali dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 :

Tabel II.56
Jumlah Korban Kekerasan Tahun 2015-2020

No	Tahun	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah
		Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	
1	2015	7	9	17	23	66
2	2016	2	7	9	12	40
3	2017	1	1	28	14	44
4	2018	9	3	10	11	33
5	2019	5	1	21	13	40
6	2020	3	1	15	10	25

Sumber: DP2KBP3A

Pangan

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

- Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) dibandingkan kebutuhan konsumsi penduduk. Kondisi ketersediaan pangan dari tahun 2016 s/d 2018 selalu surplus dibandingkan kebutuhan konsumsi. Target Tahun 2018 sebesar 1,73 realisasi 1,67 (capaian kinerja 96,65%). Artinya jumlah ketersediaan pangan strategis (beras) beras selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi penduduk selama 1 (satu) tahun masih surplus dengan perbandingan 1,67 kali. Faktor kunci keberhasilannya adalah jumlah produksi pangan khususnya beras lebih tinggi (surplus) dibanding kebutuhan konsumsi. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah tidak tercapainya target produksi beras, karena kegagalan panen di beberapa tempat akibat bencana kekeringan yang berpengaruh pada produksi dan produktifitas padi.
- Ketersediaan energi per kapita. Ketersediaan energi pada tahun 2016 s/d 2018 selalu surplus dibanding standar kecukupan energi. Realisasi pada Tahun 2018 sebesar 3.597,79 kkal/kap/hari. Artinya, ketersediaan energi yang berasal dari produksi bahan

pangan pada Tahun 2018 sudah melebihi standar angka kecukupan energi sebesar 2.150 kkal/kapita/hari.

- Ketersediaan protein per kapita. Kondisi ketersediaan protein dari tahun 2016 s/d 2018 sudah mencukupi, bahkan melebihi standar. Pada tahun 2018 ketersediaan protein sebesar 113,56 gram/kapita/hari dari standar angka kecukupan protein sebesar 62 gram/kapita/hari. Ketersediaan protein sudah mencukupi dan melebihi standar kecukupan, yang berasal dari pangan nabati maupun hewani.
- Penguatan cadangan pangan di daerah. Kondisi cadangan pangan (beras) di Kabupaten Boyolali pada tahun 2016 s/d 2018 berdasarkan pendekatan jumlah produksi padi sudah melebihi standar cadangan pangan kabupaten, yaitu 100 ton per hari. Capaian cadangan pangan pada tahun 2018 sebanyak 174,81 ton. Faktor kunci keberhasilan peningkatan jumlah produksi padi dan berkembangnya kelembagaan cadangan pangan masyarakat.
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Capaian skor PPH Kabupaten Boyolali pada tahun 2016 s/d 2018 selalu mengalami kenaikan dari 86,5 sampai angka 86,9 pada tahun 2018. Skor PPH menggambarkan tingkat penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (umbi-umbian, sereal, kacang-kacangan, daging, ikan, buah, sayur, dsb) semakin beragam dan seimbang sesuai dengan PPH. Capaian ini sudah cukup baik walaupun belum mencapai target RPJMD. Faktor kunci keberhasilan dari skor PPH antara lain; meningkatnya sosialisasi dan fasilitasi untuk mendukung diversifikasi pangan serta berkembangnya konsumsi pangan lokal serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman. Kendalanya masih tingginya tingkat konsumsi beras pada masyarakat.
- Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Pada Tahun 2016 capaian target sebesar 82,6%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 80,56%. Artinya dari hasil pemantauan, pengawasan dan pengujian sampel pangan berupa pangan segar dan pangan olahan, 82,6% (dari 72 sampel, 52 diantaranya dinyatakan aman, tidak melebihi batas ambang residu pestisida dan penggunaan boraks). Faktor kunci keberhasilan pencapaian ini meliputi meningkatnya kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan pangan, dan pemantauan serta pengawasan produk pangan secara rutin, serta sosialisasi dan pembinaan tentang keamanan pangan. Kendalanya masih banyak beredarnya makanan atau jajanan-jajanan yang kurang sehat dan kurang aman di masyarakat dan di sekolah-sekolah.
- Regulasi ketahanan pangan
Regulasi tentang ketahanan pangan di Kabupaten Boyolali sampai dengan Tahun 2018, antara lain Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Boyolali ; Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Boyolali ; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketahanan Pangan ; Instruksi Bupati Boyolali Nomor 02925 Tahun 2014 tentang Penggunaan bahan pangan dan makanan produk lokal pada acara rapat/pertemuan, resepsi/jamuan makan di Kabupaten Boyolali.
- Ketersediaan pangan utama (beras)
Ketersediaan beras di Kabupaten Boyolali pada Tahun 2016 s/d 2018 selalu mengalami surplus dibandingkan kebutuhan konsumsi beras selama satu tahun. Pada tahun 2018 ketersediaan beras sebesar 159.431 ton, sedangkan kebutuhan beras sebesar 95.626 sehingga surplus 63.805 ton. Secara perbandingan maka ketersediaan beras dibanding kebutuhan konsumsi sebesar 166,72%.
- Pengeluaran konsumsi pangan per kapita. Berdasarkan hasil survey PPH Tahun 2018, pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Boyolali menunjukkan keberagaman dan keseimbangan dalam komposisi bahan pangan yang dikonsumsi, dengan skor PPH sebesar yaitu 86,9. Skor PPH Tahun 2018 mengalami kenaikan dibanding dengan Tahun 2016 dan 2017, tetapi belum mencapai target RPJMD. Faktor kunci keberhasilan ketersediaan sumber bahan pangan yang beraneka macam dalam

jumlah yang mencukupi dan meningkatnya kesadaran konsumsi pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman (B2SA). Kendalanya dalam pengukuran tingkat konsumsi bahan pangan berdasarkan hasil survey ke masyarakat, yang terkadang terjadi kurangnya keakuratan data.

- Ketersediaan pangan utama. Ketersediaan pangan untuk komoditas beras, jagung, dan ubi kayu, dan kacang tanah melebihi kebutuhan, sedangkan ketersediaan komoditas kedelai dan ubi jalar masih belum mencukupi. Faktor kunci keberhasilan yaitu produksi komoditas pangan yang masih melebihi jumlah kebutuhan konsumsi masyarakat. Kendalanya masih rendahnya ketersediaan kedelai, yang disebabkan kurangnya produksi kedelai di masyarakat. Hal ini juga ditambah dengan masyarakat masih lebih suka menggunakan kedelai impor dalam pembuatan tahu tempe.

Tabel II.57
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	HASIL					TARGET
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) dibandingkan kebutuhan konsumsi penduduk	Skor	1,38	1,76	1,59	1,67	1,56	1,75
2	Ketersediaan energi per kapita	Kal/kap /hari	144,98	4.172,92	4.342,62	3.597,79	4,927	4,927
3	Ketersediaan protein per kapita	gr/kap /hari		107,37	130,19	113,56	197,19	198
4	Penguatan cadangan pangan di daerah	%		127,33	149,67	174,81	365	100
5	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	87,1	86,5	86,8	86,9	90,10	91
6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	82,6	82,6	-	80,56	85	100
7	Regulasi Ketahanan Pangan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Ketersediaan pangan utama	%	138	176,45	159,11	166,72	155,61	177,50
9	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	-						
	- beras	kg/kap/th	95,1	77,3	88,4	80,75	81,8	82
	- jagung	kg/kap/th	7,3	0,4	24,6	0,39	0,4	0,5
	- kedelai	kg/kap/th	40,3	13,4	6,9	14,05	10,8	10,8
	- kacang tanah	kg/kap/th	0,77	1,8	2,4	1,81	0,2	0,3
	- ubi jalar	kg/kap/th	3,2	7,1	18,2	7,47	1,6	1,6
	- ubi kayu	kg/kap/th	15,9	18,6	20,46	19,39	12,7	12,8
10	Ketersediaan pangan utama							
	- beras	Ton	154.849	166.561,2	147.048	159.431	152.914	160.000
	- jagung	Ton	97.702	157.779,2	105.017	129.950	122.905	1125.000
	- kedelai	Ton	4.556	4.547,5	4.998	2.278	685	700
	- kacang tanah	Ton	2.282	2.799,7	2.615	2.939	2.862	3.000
	- ubi jalar	Ton	347	353,8	122	458	102	105
	- ubi kayu	Ton	97.526	88.135,2	73.544	53.830	75.242	75.300

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali

Tabel II.58
Target Aspek Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan
Kabupaten Boyolali Tahun 2020

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Realisasi					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa	%	16,85	17,6	19,46	21,35	23,22	25,09
2	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	%	91,68	91,75	92	95	97	100

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Realisasi					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87,1	91,75	89	89,5	90,10	91
4	Regulasi Ketahanan Pangan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Persentase Ketersediaan pangan utama (beras)	%	162,41	178	175	172,5	175	177,50
	Ketersediaan pangan utama							
	- beras	Ton	154.849	166.561,1	147.048	159.431	152.914	160.000
	- jagung	Ton	97.702	157.77,2	105.017	129.950	122.905	130.000
	- kedelai	Ton	4.556	4.547,5	4.998	2.278	685	5.000
	- kacang tanah	Ton	2.282	2.799,7	2.800	2.799	2.862	3.000
	- ubi jalar	Ton	347	353,8	122	458	102	450
	- ubi kayu	Ton	97.526	88.135,2	73.544	53.830	75.242	75.300

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali

- Prosentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Desa.
 Indikator kinerja target ini berupa penumbuhan dan pengembangan kelembagaan lumbung pangan di tingkat desa yaitu Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) sebesar 23,22%. Artinya pada Tahun 2019 ini 23,22% desa di Kabupaten Boyolali sudah memiliki LPMD. Cara mencapai target yaitu melalui penumbuhan kelompok-kelompok LPMD baru dan pengembangan kelompok yang sudah ada, melalui fasilitasi bantuan gabah dan pembinaan serta pelatihan kelompok LPMD.
- Prosentase penguatan cadangan pangan daerah.
 Indikator kinerja target ini berupa penyediaan dan pengembangan cadangan pangan daerah, baik yang ada di pemerintah maupun di masyarakat (LPMD dan LDPM). Target kinerja sebesar 97% artinya jumlah cadangan pangan yang ada di Kabupaten Boyolali minimal sebesar 97% dari standar 100 ton, yaitu sebesar 97 ton. Cadangan pangan ini digunakan jika terjadi kondisi rawan pangan, baik rawan pangan kronis maupun akibat bencana alam. Cara mencapai target yaitu melalui pengadaan gabah untuk cadangan pangan serta pengelolaan cadangan pangan.
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
 Indikator kinerja target ini berupa upaya pencapaian konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragam, seimbang, dan aman (B2SA) baik dari segi keseimbangan gizi maupun keragaman jenis pangan. Target kinerja sebesar 90, artinya kondisi konsumsi pangan masyarakat dari segi keseimbangan gizi dan keragaman jenis pangan 90% dari skor maksimal 100%. Cara mencapai target melalui kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, sosialisasi dan kampanye konsumsi pangan lokal, dan pelatihan-pelatihan pengolahan pangan lokal.
- Regulasi Ketahanan Pangan
 Indikator kinerja ini berupa adanya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketahanan pangan baik yang sudah ada dan masih berlaku maupun peraturan baru. Target kinerja berupa terlaksananya regulasi ketahanan pangan dan dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders*. Pada tahun 2019 ini diharapkan Perda Ketahanan Pangan dan Gizi sudah bisa disahkan sebagai revisi dari Perda Ketahanan Pangan No.11 Tahun 2013.
- Persentase ketersediaan pangan utama (beras)
 Indikator kinerja ini berupa ketersediaan pangan, terutama beras berdasarkan perhitungan jumlah produksi dan jumlah kebutuhan konsumsi masyarakat. Target kinerja sebesar 175%, artinya jumlah ketersediaan beras melebihi (surplus) jika dibandingkan dengan kebutuhan, dengan rasio sebesar 175%. Cara mencapai target dengan peningkatan produksi beras dan pengurangan tingkat konsumsi beras masyarakat.
- Ketersediaan pangan utama.
 Indikator ini berupa pencapaian kondisi ketersediaan beberapa komoditas pangan utama sesuai dengan tabel di atas. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target

berupa koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan produksi komoditas pangan.

Pertanahan

Penanganan permasalahan di bidang keagrariaan pada Tahun 2018 terealisasi 45%, Tahun 2019 terealisasi 97% sedangkan target tahun 2020 sebesar 69%. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

Tabel II.59
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pertanahan
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL					TARGET 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Penanganan permasalahan di bidang keagrariaan	%	34	41	48	55	62	69
2	Fasilitasi pengelolaan, pemanfaatan, pelepasan dan alih fungsi tanah kas desa	desa	10	10	10	10	10	10

Sumber data: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Boyolali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan DPU PR Kab. Boyolali

Penanganan permasalahan di bidang keagrariaan dapat tercapai dengan baik disebabkan :

- Telah terbentuknya Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017;
- Adanya koordinasi lintas sektoral antara dinas/instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing;
- Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penatagunaan, kepemilikan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah.

Permasalahan Pertanahan. Tugas Tim dimaksud, antara lain:

- Melakukan kajian terhadap laporan/pengaduan masyarakat atas permasalahan pertanahan;
- Melakukan rapat-rapat koordinasi untuk menetapkan langkah-langkah fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
- Memfasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan penyelesaian.

Kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik. Kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan dengan indikator tertib administrasi pemerintahan di bidang Keagrariaan sudah tercapai. Permasalahan dalam fasilitasi penyelesaian pertanahan diantaranya adalah tidak semua kewenangan penyelesaian permasalahan berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten, namun merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait perlu ditingkatkan. Disamping itu pengendalian pemanfaatan ruang yang terkendala perbedaan peraturan daerah dan BPN Pusat; serta penegakkan pengendalian pemanfaatan ruang yang harus sesuai dengan perda tata ruang yang masih perlu ditingkatkan.

Fasilitasi Pengelolaan, pemanfaatan, pelepasan dan alih fungsi tanah kas desa merupakan implementasi dari permendagri No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa pada tahun sehingga pelaksanaan sebagian kegiatan memerlukan persetujuan dari Pemerintah Provinsi maupun ke Kementerian. Dispermasdes Kabupaten melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan, pemanfaatan, pelepasan dan alih fungsi tanah kas pada 2018 target 10 desa terealisasi 14 desa atau 140%, tahun 2019 dengan target 10 desa terealisasi 11 desa atau 110% adapun target tahun 2020 sejumlah 10 desa sampai dengan juni 2020 sudah terealisasi 8 desa.

Lingkungan Hidup

Tabel II.60
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penanganan sampah	%	78,4	NA	NA	NA	NA	NA
2	Pencemaran status mutu air	Usaha/Keg	10	10	10	NA	NA	NA
3	(Cakupan jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan adm. dan teknis pencegahan pencemaran air)	%	100	100	NA	NA	NA	NA
4	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL	%	94,1	100	NA	NA	NA	NA
5	(Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti)	%	100	100	NA	NA	NA	NA
6	Pencemaran kualitas udara	Usaha/Keg	10	10	NA	NA	NA	NA
7	Prosentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan adm. dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	100	100	NA	NA	NA	NA
8	Cakupan luas lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	Kec (Ha)	19 kec	19 kec	NA	NA	NA	NA

Tabel II.61
Target Aspek Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019

No	Bidang Urusan/Indikator	Sat	2015	2016	2017	2018	2019	Realisasi	Program
1	Luasan RTH Publik wil. Kota/ kawasan perkotaan (akumulasi RTH total) RTH Tahun 2016 : ± 1.289.322 m2	M2	1.190.322	1.289.322	1.324.322	1.354.322	1.384.322	1.417.734	Pengell. RTH
2	% ketersediaan luasan RTH Publik sebesar 20% dari wilayah kota/ kwsn perkotaan	%	2,65	2,87	2,95	3,02	3,09	3,09	
3	Sumur resapan dan sejenisnya	unit	1415	1540	1.540	912	1.515	1.615	Perindungan dan Konservasi SDA & LH
4	Cakupan pengelolaan sampah mandiri	Desa/ kel	-	2	2	2	2	3	Pengembangan Kinerja Pengell. Persampahan
5	Prosentase aduan dugaan pencemaran dan atau kerusakan	%	100	100	100	100	100	100	Pengendalian Pencemaran dan

	lingkungan ditindaklanjuti								Perusakan Lingkungan
6	Prosentase usaha/ kegiatan yang ramah lingkungan	%	-	-	10	12	15	15	Peningkatan Pengendalian Polusi
7	Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan (IPAL Biogas)		10	79 (DPU 66, DLH 13)		46	15	15	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Boyolali
Keterangan : * Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 01 tahun 2014

Luasan RTH Publik wilayah kota/kawasan perkotaan.

Dengan Visi Pro Investasi mewujudkan Boyolali yang maju dan lebih sejahtera, akan berdampak pembangunan di kabupaten boyolali berkembang lebih pesat. Pembangunan yang dilaksanakan seringkali berdampak terhadap berkurangnya Ruang terbuka Hijau terutama adanya alih fungsi lahan yang dimanfaatkan untuk pendirian usaha dan atau kegiatan (dalam hal ini perusahaan), permukiman (perumahan) serta kegiatan kegiatan lain yang memerlukan alih fungsi lahan.

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku bahwa Luas RTH kawasan perkotaan yang ideal adalah sebesar 20 % dari luas RTH perkotaan secara keseluruhan (RDRT). Sebagai pengertian bahwa luas RTH perkotaan sampai dengan tahun 2015 diperkirakan baru 2,65 % atau 1.190.322 m2 dari luas ideal, sehingga masih sangat kecil prosentase pemenuhannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH sebagai indikator utama untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selama 5 (lima) tahun telah ditargetkan untuk mencapai luasan RTH sebesar 1 % atau 247.000 m2. Sedangkan untuk tahun 2019 ditetapkan target luasan RTH perkotaan 1.384.322 m2 yang dilaksanakan oleh DLH dan instansi terkait, dari target tersebut dapat terealisasi seluas 1.417.734 m2 yang merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya (ada penambahan sekitar 21.900 m2).

Ketersediaan luasan RTH Publik sebesar 20% dari wilayah kota/kawasan perkotaan

Dengan Visi Pro Investasi mewujudkan Boyolali yang maju dan lebih sejahtera, akan berdampak pembangunan di kabupaten boyolali berkembang lebih pesat . Pembangunan yang dilaksanakan seringkali berdampak terhadap berkurangnya Ruang terbuka Hijau terutama adanya alih fungsi lahan yang dimanfaatkan untuk pendirian usaha dan atau kegiatan (dalam hal ini perusahaan), permukiman (perumahan) serta kegiatan kegiatan lain yang memerlukan alih fungsi lahan.

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku bahwa Luas RTH perkotaan yang ideal adalah sebesar 20 % dari luas RTH perkotaan secara keseluruhan (RDRT). Sebagai pengertian bahwa luas RTH perkotaan sampai dengan tahun 2015 diperkirakan baru 8 % atau 1.190.322 m2 dari luas ideal, sehingga masih sangat kecil prosentase pemenuhannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH sebagai indikator utama untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selama 5 (lima) tahun telah ditargetkan untuk mencapai luasan RTH sebesar 1 % atau 247.000 m2. Sedangkan untuk tahun 2019 ditetapkan target luasan RTH perkotaan 1.384.322 m2 yang dilaksanakan oleh DLH dan instansi terkait, dari target tersebut dapat terealisasi seluas 1.417.734 m2 yang merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya atau diperkirakan 3,15 dari prosentase ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan.

Sumur resapan dan sejenisya

Dengan Visi Boyolali Pro Investasi, pembangunan di kabupaten boyolali berkembang pesat . Pembangunan yang sedang giat dilaksanakan seringkali berdampak negatif terhadap keberadaan sumber/ mata air. Perubahan fungsi lahan untuk industri dan permukiman serta berkurangnya ruang terbuka hijau dapat berdampak terhadap berkurangnya daya resap dan daya serap lahan terhadap air hujan.

Pembangunan gedung, pengaspalan, cor beton dll . menjadikan air hujan lebih cepat dan lebih banyak yang mengalir ke sungai dari pada yang meresap ke dalam tanah, sehingga debit air tanah/ mata air semakin kecil. Untuk mengatasi hal tersebut melalui kegiatan ini, dibangun sumur resapan dan sejenisnya (biopori) yang diharapkan dapat meningkatkan resapan air hujan ke dalam tanah dan mengurangi laju limpasan permukaan, dapat memperpanjang siklus hidrologis serta menekan terjadinya bencana banjir.

Seperti pada tahun tahun sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup (Badan Lingkungan Hidup) telah melakukan pembuatan prototype sumur resapan rata-rata 40 unit per tahun dan lubang biopori rata rata 1000 lebih yang berguna untuk meningkatkan resapan air hujan, sedangkan untuk tahun 2019 ini Dinas lingkungan Hidup merencanakan untuk membuat sumur resapan dan biopori sebanyak 1615 unit dengan rincian peralatan lubang biopori sebanyak 80 set yang setiap set nya dapat membuat 20 (dua puluh) lubang biopori (perkiraan dapat membuat 1600 biopori), serta sumur resapan sebanyak 15 unit.

Cakupan pengelolaan sampah mandiri

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan aktifitasnya, semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan.

Sesuai Dengan Undang – undang 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah salah satu tugas pemerintah dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan maka pemerintah wajib memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Tempat pemrosesan Akhir (TPA) kabupaten boyolali saat ini mempunyai luas lahan 3,8 ha dengan lahan yang telah digunakan lebih dari 2,5 ha dengan rata-rata volume sampah yang masuk ke TPA antara 55 s/d 65 ton/ hari diperkirakan umur pemanfaatan TPA tinggal beberapa tahun saja apabila kondisi/ metode pengelolaan sampah tidak berubah.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meminimalisasi volume sampah yang dikirim ke TPA antara lain dengan melakukan pengelolaan sampah di sumbernya (permukiman, pasar, perkantoran dan sekolahan sebelum dikirim ke TPA) maupun dengan pengelolaan sampah TPS 3R, Rumah Kompos, Bank sampah dan daur ulang sampah sektor informal (pemulung, lapak dan pengepul).

Tahun 2019 dinas lingkungan hidup menetapkan target adanya cakupan pengelolaan sampah mandiri terutama wilayah perkotaan sebanyak 2 (dua) wilayah. Dari target tersebut dapat terealisasi 3 (tiga) unit bank sampah yang berlokasi di Desa Kemasan Kec. Sawit, Desa Sendang Kec. Karanggede, Desa Ngenden Kec. Ampel.

Melalui kegiatan bank sampah/ tps 3R yang dilakukan masyarakat diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA. Selain itu adanya penambahan luas TPA dengan pembelian lahan (tukar guling). Tahun 2020 direncanakan ada penambahan lahan untuk perluasan area TPA.

Prosentase aduan dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan ditindaklanjuti.

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sebelumnya merupakan salah satu jenis pelayanan Dasar SPM Bidang Lingkungan Hidup. Dengan berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, sehingga tidak lagi melaksanakan SPM. Meskipun tidak lagi melaksanakan SPM bidang Lingkungan Hidup bukan berarti hal ini serta merta ditinggalkan. Tindak lanjut terhadap adanya aduan dugaan

pencemaran dan atau kerusakan lingkungan merupakan salah satu pelayanan publik yang dilakukan pemerintah kabupaten boyolali terhadap masyarakat sebagai salah satu upaya penegakan hukum lingkungan untuk mewujudkan usaha yang ramah lingkungan dalam rangka menciptakan green economy.

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100% dapat terealisasi 100%, hal ini berarti semua aduan adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang masuk ke BLH telah/ dapat ditindaklanjuti.

Pada tahun 2017 aduan yang masuk ke DLH sebanyak 14 kasus, turun dari jumlah aduan tahun 2016 sebanyak 17 aduan. Penanganan kasus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan standar pelayanan yaitu identifikasi, klarifikasi, koordinasi/mediasi sehingga dicapai kesepakatan-kesepakatan, serta monitoring/pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Meningkatnya jumlah kasus yang terjadi dapat mengindikasikan semakin bertambahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sehingga menjadi peka dan sensitif terhadap permasalahan lingkungan, ataupun pengelolaan lingkungan yang belum baik dari para pelaku usaha/kegiatan sehingga perlu adanya pengawasan terhadap ketaatan usaha/kegiatan dalam melaksanakan janjinya sesuai dokumen lingkungan yang dimiliki.

Demikian pula untuk tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup menargetkan untuk dapat menindaklanjuti semua aduan dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan (100%) sehingga tidak ada aduan yang tidak ditindaklanjuti. Pada tahun 2019 terdapat 11 aduan kasus lingkungan dan semua telah ditindaklanjuti untuk diselesaikan.

Aduan yang disampaikan masyarakat ke Dinas Lingkungan Hidup dapat melalui surat tertulis, sms, email, atau secara lisan sesuai prosedur yang berlaku.

Prosentase usaha/kegiatan yang ramah lingkungan

Dengan visi Boyolali Pro Investasi berdampak semakin mudahnya melakukan investasi di kabupaten Boyolali yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Boyolali. Meningkatnya jumlah perusahaan membawa konsekuensi pula terhadap kualitas lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya pencegahan dan pengendalian terhadap dampak buruk yang mungkin terjadi melalui pembinaan monitoring serta pengawasan terhadap perusahaan yang berpotensi terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, terutama terhadap perusahaan menengah dan besar serta jenis usaha/produksinya sehingga green economy dapat terwujud.

Apabila dilihat secara sepiantas indikator ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup sebelumnya yaitu pelayanan pencegahan pencemaran air dan pencemaran udara.

Pada tahun 2019 Dinas lingkungan Hidup menetapkan target 15 % usaha dan atau kegiatan yang ramah lingkungan, yaitu usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dokumen lingkungan yang dimiliki.

Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan (IPAL Biogas)

Kabupaten Boyolali terkenal dengan sebutan Kabupaten/Kota Susu, hal ini menunjukkan bahwa kabupaten boyolali merupakan penghasil susu sapi yang cukup diperhitungkan di wilayah Provinsi Jawa Tengah maupun skala nasional. Susu dihasilkan dari peternakan sapi perah yang tersebar di sebagian wilayah Kabupaten Boyolali, terutama di Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel, Musuk, Mojosongo, teras, Nogosari dan beberapa wilayah kecamatan di Boyolali bagian utara. Disamping menghasilkan susu yang berkualitas, peternakan (sapi) di Boyolali juga berpotensi untuk menimbulkan dampak yang kurang baik bagi lingkungan yaitu potensi pencemaran limbah ternak. Secara tradisional limbah ternak sapi dimanfaatkan untuk pupuk kandang.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, limbah ternak sapi mulai dimanfaatkan sebagai sumber energi baru terbarukan untuk mengurangi pemakaian energi minyak bumi dan gas LPG yang terbatas jumlahnya, yaitu dengan mengolah limbah ternak sapi (kotoran dan air kencing) menjadi energi biogas yang ramah lingkungan melalui pembuatan digester biogas. Pembuatan IPAL Biogas (volume dan desain) disesuaikan dengan jumlah sapi yang dimiliki peternak/ kelompok ternak sehingga energi yang dihasilkan bisa optimal. Selain menghasilkan biogas yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari hari (memasak dan penerangan), IPAL ini juga dapat menghasilkan pupuk organik (padat dan cair) yang ramah lingkungan, yang bisa langsung digunakan untuk tanaman.

Perkembangan pembangunan IPAL Biogas dari tahun ke tahun mengalami pasang surut, sesuai dengan alokasi anggaran, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun Dana Alokasi Khusus.

Tahun 2016 BLH/DLH bersama DPU PR membangun IPAL Biogas sebanyak 79 unit, dengan rincian 13 unit oleh BLH/DLH dan 66 unit oleh DPU PR namun dengan volume yang berbeda. Pada tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup telah membangun 15 (lima belas) unit IPAL Biogas yang bersumber dari APBD Kabupaten (DAK Nihil), pada tahun 2018 membuat sebanyak 46 (empat puluh enam) unit IPAL Biogas yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit bersumber dari APBD Kabupaten dan 26 (dua puluh enam) unit bersumber dari DAK Fisik bidang Lingkungan Hidup. Sedangkan tahun 2019, DLH menargetkan pembuatan IPAL Biogas Ternak sebanyak 15 unit (4 unit dari DAK Fisik sub bidang LH, 11 unit dari APBD) dan dapat terealisasi sebanyak 15 (lima belas) unit.

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel II.62

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali
Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk	%	96,02	97,44	99,84	99,10	99.43	100
2	Rasio anak berakte kelahiran	%	82,73	83,12	93,06	89,51	90.34	93
3	Rasio pasangan berakte nikah	%	100	100	100	100	100	100
4	Kepemilikan KTP	jumlah	703.364	748.154	763.148	772.635	789.406	793.959
5	Kepemilikan Akte kelahiran per 1000 penduduk	%	62,00	63,88	64,95	64,84	65.22	80
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ blm	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
7	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	ada/ tidak	Ada	ada	ada	Ada	ada	ada
a. Indikator RPJMD								
	- Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	96,02	97,94	99,84	98,10	99.43	100
	- Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan penerbitan Kutipan Akte Kelahiran Penduduk usia 0 - 18	%	-	83,12	93,06	87,18	90.34	93
	- Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	%	62	63,88	64,95	63,97	65.22	80
	- Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	%	3,58	43,20	97,28	120	100	8
	- Cakupan Kecamatan	%	-	26,32	47	79	81	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
	yang telah melaksanakan pencetakan KTP-el							

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Boyolali

Sejak Tahun 2006 Kabupaten Boyolali sudah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten sudah ada. Tingkat capaian cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk mencapai target, dengan capaian sebesar 99,43 % dari target RPJMD 98 % (tingkat capaian 101,45 %), dapat mencapai target karena wajib KTP atau penduduk yang pada Tahun 2019 sudah berusia 17 tahun yang berjumlah 793.959 orang sudah melaksanakan perekaman sebanyak 789.406 orang , dan sebagian besar sudah tercetak KTP-el dan masih ada yang masih diterbitkan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el yang berlaku selama 6 bulan dan Surat Keterangan tersebut diperpanjang setiap 6 bulan sampai KTP-el tercetak. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) pada Tahun 2019 berdasarkan data, Kepala Keluarga yang mendaftarkan permohonan KK tercapai sebesar 100% dari target 100% atau tingkat capaian sebesar 100%, karena dari jumlah pemohon sejumlah 93.206 KK sudah dilayani dan Kartu Keluarga sudah dicetak dan didistribusikan kepada pemohon.

Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran usia 0 – 18 pada tahun 2019 terealisasi 90.34 % dari target 90% (tingkat capaian 100,37%) . jumlah penduduk usia 0 – 18 pada tahun 2019 yang berjumlah 283.818 orang dan yang sudah memiliki akte kelahiran berjumlah 256.412 orang. Sedangkan Untuk tingkat capaian cakupan penerbitan akta kelahiran dari jumlah penduduk tidak dapat mencapai target, atau terealisasi 65.22% dari target RPJMD 75% (tingkat capaian 87%) hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk yang sudah berusia lanjut (tua) tidak mengajukan permohonan penerbitan akte kelahiran.

Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian terealisasi 100 %, dari target 7 % (dari peristiwa kematian yang dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), peristiwa kematian yang dilaporkan pada tahun 2019 sejumlah 2.212 orang, yang telah mengajukan permohonan dan telah diterbitkan kutipan akte kematian sejumlah 2.212 orang, namun demikian prosentase kepemilikan akte kematian masih sangat rendah dikarenakan akte kematian saat ini belum dibutuhkan oleh masyarakat, karena akte kematian belum dimanfaatkan sebagai persyaratan untuk pengurusan dokumen yang berkaitan dengan kematian seseorang, baik di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.

Cakupan Kecamatan yang telah melaksanakan pencetakan KTP-el tahun 2019 terealisasi 81 % dari target 100% (tingkat capaian 81%), karena dari 22 Kecamatan baru 18 Kecamatan yang sudah melaksanakan pencetakan KTP-el, sedangkan 4 Kecamatan yang belum melaksanakan pencetakan KTP-el yaitu; Kecamatan Tamansari, Gladagsari, Wonosamudro dan Mojosongo hal ini disebabkan ke 4 kecamatan tersebut belum mempunyai tempat /gedung pelayanan yang memadai.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel II.63

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	LPM	267	267	267	267	267	267
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	-	55	55	55	55	55
3	Jumlah LSM	LSM	267	267	267	267	267	267
4	LPM Berprestasi	%						

5	PKK Aktif	kelompok	287	287	287	287	290	287
6	Posyandu aktif	kelompok	-	1.209	1.804	1341	1407	1473

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Boyolali

Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Boyolali berjumlah 267 desa dan kelurahan yang terbagi menjadi 261 desa dan 6 kalurahan, Status desa di Kabupaten Boyolali berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020 desa di Kabupaten Boyolali terdiri dari 8 desa mandiri, 90 desa maju, 174 desa berkembang.

Dalam penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa capaian rata-rata sudah 80%, dengan indikator sebagai berikut :

- Dalam hal perencanaan desa telah membuat Musdes, RKPDES dan RPJMDes secara terjadwal dan sesuai waktu yang telah ditentukan;
- Dalam hal Penganggaran desa telah tepat waktu dalam membuat perencanaan anggaran (APBDesa dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes) dengan di awali membuat RAPBDesa yg telah di evaluasi Tim Kecamatan;
- Dalam hal penatausahaan, desa sudah melaksanakan pembayaran secara NCT (Non Cash Transaction), serta permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
- Dalam hal Pelaporan, Desa sudah dilaksanakan secara tertib dengan mengirim Realisasi penggunaan ADD, laporan Capaian output DD beserta SPJnya dan membuat realisasi Penggunaan Anggaran Di APBDesa serta secara tertib sudah mencatat asset Desa;
- Dalam partisipasi masyarakat Desa juga telah melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dalam program PKTD (Padat Karya Tunai Desa);
- Dalam hal Transparansi keuangan, desa sudah membuat infografis yang berupa IPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) yang berisi jumlah anggaran dan realisasi anggaran dalam 1 (satu) tahun dan dipasang di Tempat – tempat strategis.

Jumlah Persentase BumDes Aktif sejumlah 51,34% atau 134 desa dari 261 desa di Kabupaten Boyolali yang terbagi menjadi beberapa kriteria antara lain dasar 65 BUMDes, tumbuh 64 BUMDes, maju 1 BUMDes dan Berkembang 4 BUMDes.

Pengembangan Kawasan Pedesaan yang dirintis di Kabupaten Boyolali berada di kecamatan selo dengan 3 desa (selo, lencoh dan samiran) sebagai satu kawasan yang di padukan sebagai satu kawasan wisata.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait dengan penggunaan dana desa untuk meningkatkan hubungan ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui upaya meningkatkan dan mengelola COVID-19. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Surat Edaran ini diterbitkan (1) Penegasan PKTD, (2) Desa Tanggap COVID-19; dan (3) Penjelasan perubahan APBDes.

Untuk menentang penyebaran Covid-19 yang disebut dalam edaran ini adalah, desa di instruksikan untuk membuat Relawan Desa Lawan Covid-19 yang terdiri dari semua elemen perangkat desa, tokoh masyarakat dan bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Implementasi kegiatan Relawan antara lain, sosialisasi Covid-19, pendataan penduduk yang rentan, pendataan fasilitas kesehatan, penyiapan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, pengembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP), dan juga dapat digunakan sebagai tempat wisata rapat atau kerumunan dalam rangka Fisik Jarak. Sementara dalam situasi pemulihan, Relawan dapat mengembalikan kepada warga yang datang dari daerah terdampak Covid-19 untuk melakukan isolasi diri masing-masing dirumah masing-masing dengan masing-masing dengan perlindungan atau tempat isolasi yang telah disediakan desa.

Target kinerja rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 target kinerja 267

LPM terealisasi 267 atau capaian kinerja 100%, Adapun bentuk kegiatan meningkatkan kemampuan LPMD/K melalui bimbingan teknis dan pelatihan pengurus LPD sedangkan Tahun 2020 target kinerja 267 LPMD dengan kegiatan moniroting LPM di desa binaan.

Target kinerja jumlah kelompok binaan PKK pada Tahun 2017 sebesar 57% atau capaian kinerjanya 100%. Pada Tahun 2017 capaian kinerja 66%, sedangkan Tahun 2018 target kinerja 55 Desa terealisasi 100% dan tahun 2019 target 55 desa terealisasi 100%. karena kegiatan berupa peningkatan peran perempuan di pedesaan, melalui kunjungan langsung ke TP. PKK Desa sedangkan untuk tahun 2020 target kinerjanya 55 Desa.

Target kinerja jumlah LSM pada Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 target kinerja 267 terealisasi 100%. Apapun bentuk kegiatannya berupa pendataan LSM, sedangkan tahun 2020 target kinerja sejumlah 267 LSM.

Target kinerja PKK Aktif pada Tahun 2017, Tahun 2018 target kinerja 287 PKK aktiv tercapai 100% dan Tahun 2019 dari target 287 PKK aktiv terealisasi sebesar 290 PKK Aktiv atau 115,79% dikarenakan adanya 3 kecamatan baru. Adapun jumlah PKK Aktiv terdiri dari 267 PKK Desa 22 PKK Kecamatan dan 1 PKK Kabupaten dan bentuk kegiatannya berupa Peningkatan Peran Perempuan Pedesaan, Tahun 2020 target kinerja yang dicanangkan sejumlah 287 PKK Aktif.

Capaian kinerja untuk Posyandu Aktif pada Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 berjumlah 1407 dengan capaian kinerja 100% melalui koordinasi dengan OPD terkait posyandu sedangkan Tahun 2020 dengan target kinerja 1.473 Posyandu Aktif.

Secara spesifik capaian kinerja dalam fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna “Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel” terdapat dalam tabel berikut:

Tabel II.64
 Capaian Kinerja Dalam Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Guna
 “Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel”

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RENSTRA TAHUN 2021	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA			TAHUN 2019			Kategori	BIDANG PENGAMPU
			2016	2017	2018	K	REALISASI	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Prosentase desa yang administrasi penyelenggaraan pemerintahannya baik	%	100	-	100	100	100	100	B	Bidang Bina Pemerintahan Desa
2	Cakupan pengisian kepala desa dan atau perangkat desa	%	100	-	100	97,55	100	100	B	Bidang Bina Pemerintahan Desa
3	Cakupan aparatur pemerintah	%	100	-	100	100	100	100	B	Bidang Bina Pemerintahan Desa

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RENSTRA TAHUN 2021	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA			TAHUN 2019			Kategori	BIDANG PENGAMPU
				2016	2017	2018	K	REALISASI	(%)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	h desa yang telah mendapat bimbingan teknis sesuai tugas										
4	Prosentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu	%	100	-	100	100	100	96	96	B	Bidang Bina Perencanaan dan Keuangan Desa
5	Prosentase temuan hasil pemeriksaan keuangan dan kekayaan desa yang ditindaklanjuti	%	100	-	100	79,03	100	88,5	88,5	B	Bidang Bina Perencanaan dan Keuangan Desa

Capaian kinerja dalam fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna “Meningkatnya kemampuan produktifitas dan daya saing masyarakat” terdapat dalam tabel berikut:

Tabel II.65
 Capaian Kinerja Dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Guna “Meningkatnya Kemampuan Produktifitas dan Daya Saing Masyarakat”

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RENSTRA TAHUN 2021	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA			TAHUN 2019			Kategori	BIDANG PENGAMPU
				2016	2017	2018	K	REALISASI	%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kemampuan kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K).	Desa	322	261	101	106	55	95	172,73	A	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa
	Pembangunan infrastruktur desa yang difasilitasi pelaksanaannya	Desa	36	6	6	6	6	6	100	B	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa
	Kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	Desa	317	186	33	71	55	53	96,36	B	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa
	Jumlah TTG/Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Inovasi	36	6	6	6	6	6	100	B	Bidang Pengembangan Perekonomian, Potensi Desa, dan Teknologi

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RENSTRA TAHUN 2021	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA			TAHUN 2019			Kategori	BIDANG PENGAMPU
			2016	2017	2018	K	REALISASI	%		
										Tepat Guna
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.	Kecamatan	19	0	19	19	19	22	115,79	A	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.	Kecamatan	19	0	19	19	19	22	115,79	A	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa
Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	Orang	460	19	212	119	80	122	152,5	A	Bidang Pengembangan Perekonomian, Potensi Desa, dan Teknologi Tepat Guna
Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	Kecamatan/desa	285	186	57	57	57	57	100	B	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa
Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat	Kelompok	152	93	110	122	132	169	128	A	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa
Cakupan pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan	%	50	0	0	0	0	0	0	D	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa
Pengurus PKK Desa/Kelurahan kemampuannya meningkat.	Desa	323	38	57	55	55	55	100	B	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa
Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Kecamatan	19	0	18	19	19	22	115,79	A	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada Tabel II.65 dan Target yang akan dicapai tersaji pada tabel II.66 sebagai berikut:

Tabel II.66

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL					TARGET
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan peserta KB aktif	%	79.99	80.95	75	77	71,69	80
2	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Keluarga	76.675	77.794	77.928	70.536	886	750
3	Cakupanpeserta KB Pria	%	2,17	2,18	2,48	2,31	0,88	0,90
4	Terpenuhinyakebutuhan model operasional BKB – Posyandu PADU	%			0,97	1,01	1,01	1,02
5	Terpenuhinyakebutuhanal atkontrasepsibagikeluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL					TARGET
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	Cakupanjumlahkelompok KRR aktif	kelompok			24	34	57	57
7	Cakupandesayangmendapatlayanan KIE KB KS	desa	28	30	33	36		
8	Tersedianyadata jumlah KK yang terkini	KK	176.505/PUS	175.606/PUS	340.763	345.482	310.042**	345.482
9	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi program KB	kecamatan	19	19	19	19	19	19

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Boyolali

Tabel II.67
Target Aspek Pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Boyolali Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	REALISASI 2019	TARGET 2020
1	Cakupan peserta KB aktif	%	79.99	80.95	75	77	71,69	71,69
2	Angkakelahiran total (TFR)	%	2.1	2.1	2.07	1.91	2,1	2,1
3	Menurunnyatingkatputuspa kaikontrasepsi /DO	%	9.39	16.540	-	8.032	7,11	7
4	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>).	%	10.49	10,44	-	13.97	14,29	14,25
5	Cakupanpeserta MKJP.	%	38.88	38.83	49.27	30.42	31,98	32
6	Cakupanpemenuhan data pengendalianpenduduk.	dokumen	5	5	5	5	5	5
7	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 Tahun	%	0.85	0,89	1.01	1.03	1,02	1
8	Cakupanjumlahkelompok KRR aktif	%	10.98	20.48	28.92	40.96	57	75,90
9	CakupandesayangmemilikikelompokTribinaAktif (BKB, BKR, dan BKL)	%	21	21	21	42	63	84
10	Cakupankaderaktifdalam pemberiainformasitentangpe ngasuhandanpembinaantu mbuhkembanganak	Orang	-	-	58	116	174	232

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Boyolali

Ket : Untuk no. 8. Tersedianyadata jumlah KK yang terkini merupakan angka masuk per 31 Desember 2019 dan belum semua data terentry ke data basis

Cakupan peserta KB aktif Kabupaten Boyolali sudah mencapai dari PUS sebesar 171.319 dengan PA sebesar 137.084. Tahun 2017 tercapai sebesar 75% dari PUS sebesar 172.484 dengan peserta KB aktif 144.967. Tahun 2018 tercapai sebesar 77% dari PUS sebesar 188.562 dengan peserta KB aktif 145.192, Cakupan Peserta KB Aktif pada tahun 2019 ini sebanyak 127.748 yaitu 71,69% dari total Pasangan Usia Subur (PUS) Tahun 2019 sebanyak 178.204. Capaian dari Peserta KB Aktif ini meningkat sekitar 0,04 % dari tahun 2018 lalu yang Peserta KB Aktifnya 71,65%. Keberhasilan pencapaian Cakupan Peserta KB tahun 2019 disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

- Semakin gencarnya sosialisasi tentang program-program KB, pentingnya mengikuti KB, dan juga pengetahuan tentang alokon-alokon yang aman, baik, dan dapat digunakan oleh masyarakat;
- Kesadaran dari masyarakat dan kesadaran dari Kader KB akan pentingnya program KB;
- Meningkatnya partisipasi warga dalam Safari KB yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Petugas Lapangan KB, Bidan Desa, dan Kader KB. Pada tahun 2019, peningkatan jumlah partisipasi warga masyarakat cukup banyak sehingga beberapa kali pernah menolak karena kondisi kesehatannya secara medis tidak memenuhi syarat untuk dilayani.

Dalam rangka meningkatkan Capaian Peserta KB Aktif ini, bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan selalu melakukan upaya yang diperlukan untuk dapat meningkatkan Capaian Peserta KB Aktif tahun-tahun berikutnya, yaitu antara lain :

- Pelatihan kembali untuk merefresh dalam Pencatatan dan Pelaporan (R/R) bagi pengelola R/R tersebut, sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan dalam hal double pencatatan dan pelaporan bagi peserta KB;
- Peningkatan pengawasan terhadap kinerja R/R oleh PKB Kabupaten Boyolali untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam hal pencatatan;
- Mengadakan peningkatan pelatihan untuk para pelayan medis dalam penyediaan jasa layanan bagi peserta KB.

Dengan keterbatasan jumlah Penyuluh KB sebanyak 34 orang yang dibagi kedalam 22 wilayah Kecamatan (masing-masing Kecamatan hanya mendapatkan 2 orang PKB bahkan ada yang hanya 1 (satu) orang per Kecamatan), dapat melakukan pelayanan dengan baik kepada peserta KB di Kecamatan masing-masing. Memanfaatkan Kader KB tingkat Desa (PPKBD dan Sub-PPKBD) untuk membantu pengelolaan Program KKBPK di tingkat kecamatan.

Pencapaian penurunan tingkat putus pakai kontrasepsi (Drop Out/DO) tahun 2019 ini 7,11% yaitu menurun sebesar 2,09% dari tahun 2018 lalu. Hal ini dipengaruhi oleh lebih baik dalam pelayanan terhadap peserta KB karena hal tersebut berpengaruh besar terhadap penambahan Peserta KB Baru terhadap jumlah Peserta KB Aktif di Kabupaten Boyolali. Artinya Peserta KB Baru Tahun 2019 ini menyokong sebagian besar prosentase capaian bagi Peserta KB Aktif Tahun 2019. Cakupan Peserta KB Aktif pada tahun 2019 ini sebanyak 127.748 yaitu 71,69% dari total Pasangan Usia Subur (PUS) Tahun 2019 sebanyak 178.204. Capaian dari Peserta KB Aktif ini meningkat sekitar 0,04 % dari tahun 2018 lalu yang Peserta KB Aktifnya 71,65%. Keberhasilan pencapaian Cakupan Peserta KB tahun 2019 disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

- Semakin gencarnya sosialisasi tentang program-program KB, pentingnya mengikuti KB, dan juga pengetahuan tentang alokon-alokon yang aman, baik, dan dapat digunakan oleh masyarakat;
- Kesadaran dari masyarakat dan kesadaran dari Kader KB akan pentingnya program KB;
- Meningkatnya partisipasi warga dalam Safari KB yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Petugas Lapangan KB, Bidan Desa, dan Kader KB. Pada tahun 2019, peningkatan jumlah partisipasi warga masyarakat cukup banyak sehingga beberapa kali pernah menolak karena kondisi kesehatannya secara medis tidak memenuhi syarat untuk dilayani.

Dalam rangka meningkatkan Capaian Peserta KB Aktif ini, bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan selalu melakukan upaya yang diperlukan untuk dapat meningkatkan Capaian Peserta KB Aktif tahun-tahun berikutnya, yaitu antara lain :

- Pelatihan kembali untuk merefresh dalam Pencatatan dan Pelaporan (R/R) bagi pengelola R/R tersebut, sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan dalam hal double pencatatan dan pelaporan bagi peserta KB;
- Peningkatan pengawasan terhadap kinerja R/R oleh PKB Kabupaten Boyolali untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam hal pencatatan;
- Mengadakan peningkatan pelatihan untuk para pelayan medis dalam penyediaan jasa layanan bagi peserta KB.

Dengan keterbatasan jumlah Penyuluh KB sebanyak 34 orang yang dibagi kedalam 22 wilayah Kecamatan (masing-masing Kecamatan hanya mendapatkan 2 orang PKB bahkan ada yang hanya 1 (satu) orang per Kecamatan), dapat melakukan pelayanan dengan baik kepada peserta KB di Kecamatan masing-masing. Memanfaatkan Kader KB tingkat Desa (PPKBD dan Sub-PPKBD) untuk membantu pengelolaan Program KKBPK di tingkat kecamatan.

Pencapaian penurunan tingkat putus pakai kontrasepsi (Drop Out/DO) tahun 2019 ini 7,11% yaitu menurun sebesar 2,09% dari tahun 2018 lalu. Hal ini dipengaruhi

oleh lebih baik dalam pelayanan terhadap peserta KB karena hal tersebut berpengaruh besar terhadap penambahan Peserta KB Baru terhadap jumlah Peserta KB Aktif di Kabupaten Boyolali. Artinya Peserta KB Baru Tahun 2019 ini menyokong sebagian besar prosentase capaian bagi Peserta KB Aktif Tahun 2019.

Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) 15-49 tahun berdasarkan RPJMN ditetapkan maksimal 2,33 untuk Tahun 2017. Sedangkan Tahun 2019 Kabupaten Boyolali menetapkan target 2,20 yaitu 0,13 lebih baik dari target RPJMN. Besarnya angka kejadian putus pakai, kegagalan cara/alat, atau ganti cara/alat dapat dipakai sebagai petunjuk bahwa diperlukan perbaikan dalam pemberian bimbingan tentang pemilihan alat/cara kontrasepsi, pelayanan lanjutan dan penyediaan pelayanan yang lebih luas. Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi ditarget tidak lebih dari 9,2 pada Tahun 2019.

Realisasi Total Fertility Rate di Kabupaten Boyolali pada tahun 2017 sebesar 2,07, tahun 2018 sebesar 1,91, tahun 2019 angka sementara 2,1, dan pada tahun 2020 sebesar 2,1. Berikut ini tabel data Jumlah total fertility rate (THR) Kabupaten Boyolali tahun 2015-2020 :

Tabel II.68
Jumlah Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2015-2020

No	Tahun	Jumlah Balita
1	2015	2,1
2	2016	2,1
3	2017	2,07
4	2018	1,91
5	2019	2,1
6	2020	2,1

Sumber: DP2KBP3A
Ket: Untuk tahun 2020 merupakan target, 2019 angka sementara

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*). *Unmet need* dapat didefinisikan sebagai kelompok yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, mencakup semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah atau hidup bersama dan dianggap aktif secara seksual yang tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun yang ingin menunda kelahiran berikutnya. Cakupan PUS meliputi PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber-KB tetapi belum terlayani, yang berpeluang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa angka (*unmet need*) kontrasepsi di Indonesia sebesar 11,4%. *Unmet need* Kabupaten Boyolali ada Tahun 2015 adalah 10,48% dan Tahun 2016 sebesar 10,45%. Tahun 2017 sebesar 10,40% sedangkan pada tahun 2018 *unmet need* dapat ditekan pada angka sebesar 10,35. Pada tahun 2019 ini kami berupaya untuk menekan angka *unmet need* sebesar 10.30%. Tindakan ini dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan hasil pendataan, cakupan peserta MKJP Tahun 2015 adalah sebesar 38,88%. Tahun 2016 sebesar 39,00%. Tahun 2017 sebesar 39,35%. Tahun 2018 sebesar 39,55%. Pada Tahun 2019 kami prediksi dapat mencapai 39,70%. Namun disadari bahwa data tersebut memiliki kelemahan karena tidak terdapat dobel penghitungan pada peserta yang beralih jenis kontrasepsi, dan beberapa masalah pengolahan data lainnya. Karena itu, dalam rangka melaksanakan validasi data, ditetapkan target 2017 sesuai dengan target Jawa Tengah yaitu sebesar 25,87. Cakupan pemenuhan data pengendalian penduduk sangat strategis perannya dalam pengambilan kebijakan dan pengendalian program Keluarga Berencana. Ditargetkan tercapai 12 dokumen data kependudukan yang valid dalam Tahun 2019.

Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun adalah proporsi PUS yang istrinya dibawah 20 tahun dibandingkan dengan seluruh PUS yang ada di suatu wilayah, upaya peningkatan cakupan dilakukan melalui:

- Peningkatan akses informasi;
- Peningkatan akses pelayanan PIK Remaja;
- Peningkatan kualitas dan pengelolaan, jaringan serta keterpaduanprogram PIK Remaja.

Pada Tahun 2014 tercapai 1,40% dengan kategori sudah melampaui target (capaian lebih kecil lebih baik), pada Tahun 2015 tercapai sebesar 0,94%. Tahun 2016 sebesar 2,0%, diperoleh dari hasil validasi data pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Tahun 2017 tercapai sebesar 1,9%. Untuk Tahun 2018 tercapai 1,8%. Pada tahun 2019 kami menargetkan untuk menekan PUS pada kisaran angka 1,4%. Upaya ini dilakukan untuk menekan angka pernikahan pada usia dini, salah satu melakukan sosialisasi Duta GenRe (Generasi Berencana).

Cakupan kelompok KRR aktif merupakan gambaran kelompok Kesehatan Reproduksi yang berperan aktif dalam memberikan dukungan dan partisipasi dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, khususnya dalam meningkatkan kedewasaan umur perkawinan. Tahun 2015 tercapai 10,98%, Tahun 2016 tercapai 20,48%, Tahun 2017 tercapai sebesar 28,92%, Tahun 2018 tercapai 40,96%. Pada tahun 2019 kami menargetkan pada kisaran angka 56,63%.

Cakupan desa yang memiliki kelompok Tribina Aktif (BKB, BKR, dan BKL) merupakan indikator dukungan dan partisipasi masyarakat dalam bidang Ketahanan keluarga, sekaligus merupakan ukuran keberhasilan dalam penggerakan masyarakat bidang keluarga berencana. Tahun 2015 tercapai sebesar 21,35% dan berhasil dipertahankan pada Tahun 2016 dan 2017. Tahun 2018 mencapai angka 42%. Melihat hasil pada 2018 yang signifikan maka kami optimis untuk mencapai target tahun 2019 pada kisaran angka 63%, dengan harapan dukungan dan partisipasi yang telah ada semakin mantap, untuk dapat diperluas pada Tahun berikutnya.

Cakupan kader aktif dalam pemberian informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuhkembang anak merupakan indikator baru atas program baru yang dimunculkan pada Tahun 2017 untuk menjawab tantangan atas berbagai permasalahan pemenuhan hak anak terutama dalam masa tumbuh kembang untuk mewujudkan salah satu aspek kesejahteraan keluarga yang menjadi wilayah tanggung jawab DP2KBP3A. Tahun 2017 terbentuk dan terlatih sebanyak 58 (lima puluh delapan) kader yang berperan aktif di lingkungannya masing-masing. Pada tahun 2018 kami melakukan pelatihan dan penjaringan kader baru sejumlah 60 (enam puluh) dengan bertambahnya kader tersebut Kabupaten Boyolali menyabet gelar Kabupaten/Kota Layak Anak Kategori Pratama Tahun 2018. Guna mempertahankan gelar Kabupaten/Kota Layak Anak pada Tahun 2019, kami melakukan penambahan 56 (lima puluh enam) kader baru, serta melakukan *Refreshment* dan *Knowledge Upgrade* melalui BINTEK terhadap kader angkatan 2017 dan 2018 yang total 118 Kader, dengan penambahan 56 (lima puluh enam) kader baru ditahun 2019, maka jumlah total kader menjadi 174 Kader, sesuai dengan prediksi target tahun 2019. Diharapkan Kabupaten Boyolali dapat mempertahankan gelar Kabupaten/Kota Layak Anak yang telah dicapai pada tahun 2018.

Perhubungan

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum yang melewati simpul transportasi (terminal, halte dan tempat pemberhentian bus) didapat hasil Tahun 2017 sebanyak 1.039.923 orang/tahun dan pada Tahun 2018 sebanyak 776.304 orang/tahun. Untuk Tahun 2019 sebanyak 548.818 orang/tahun. Target tahun 2020 sebanyak 600.000 orang/tahun.

Tabel II.69
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perhubungan
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Boyolali	1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang/ Tahun	6.870.247	6.817.262	1.039.923	776.304	548.818	600.000
	2	Rasio ijin trayek	%	0,50	0,83	0,383	0,50	0,41	0,45
	3	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	197	144	144	225	245	300
	4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Buah	14	14	13	13	13	13
	5	Angkutan darat	%	0.01	0.012	0,012	0,10	,098	0,12
	6	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	90	92	20	95	99	99%
	7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	24	24	40	24	24	24
	8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp						
		JBB ≤ 2.500		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		JBB ≤ 5.000		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		JBB ≤ 7.500		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		JBB ≤ 10.000		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		JBB >10.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	9	Pemasangan Rambu-rambu	%	100	100	100	100	100	100
	10	Rasio kendaraan umum layak jalan	%	93,4	91,9	177,77	214,9	202,72	220

ang Angkutan Umum yang melewati simpul transportasi (terminal, halte dan tempat pemberhentian bus) didapat hasil Tahun 2017 sebanyak 1.039.923 orang/tahun dan pada Tahun 2018 sebanyak 776.304 orang/tahun. Untuk Tahun 2019 sebanyak 548.818 orang/tahun. Target tahun 2020 sebanyak 600.000 orang/tahun.

Rasio Ijin Trayek yang ada di Dinas Perhubungan Tahun 2017 sebesar 0,383%, Tahun 2018 rasio ijin trayek 0,5% untuk Tahun 2019 untuk rasio ijin trayek 0,41% target tahun 2020 sebesar 0,45%.

Jumlah uji KIR angkutan umum pada Tahun 2017 sejumlah 144 Tahun 2018 terdapat uji KIR sebanyak 225 untuk tahun 2019 sebanyak 245 kendaraan karena banyaknya kendaraan dari luar daerah yang mengikuti uji KIR di Boyolali target tahun 2020 sebanyak 300 kendaraan.

Jumlah Terminal Bus untuk Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tidak mengalami penambahan dari tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah 13 buah disebabkan belum adanya kajian mengenai pergerakan masyarakat Boyolali atau belum adanya matrik OD (Origin and Destination) atau kajian yang menyangkut penetapan lokasi terminal bus , target tahun 2020 sebanyak 13 buah.

Jumlah angkutan darat berdasarkan prosentase pada Tahun 2017 sebesar 0,012% untuk Tahun 2018 sebesar 0,10% target pada Tahun 2019 sebesar 0,098% target tahun 2020 sebesar 0,12%.

Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum berdasarkan prosentase pada Tahun 2017 sebesar 20% sedangkan untuk Tahun 2018 sebesar 95% realisasi untuk tahun 2019 sebesar 99% target tahun 2020 sebanyak 99%.

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Tahun 2017 selama 40 menit dan tahun 2018 dan tahun 2019 selama 24 menit yang lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Hal ini disebabkan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali sudah menggunakan alat uji mekanik sehingga mempercepat waktu pelayanan.

Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan tahun 2019 antara Rp. 30.000,00 sampai dengan Rp. 50.000,00. Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 penarikan retribusi menyangkut jasa umum.

Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas berdasarkan prosentase untuk Tahun 2017 sebesar 100% sedangkan untuk Tahun 2018 sebesar 100% dan realisasi Tahun 2019 sebesar 100% target tahun 2020 sebesar 100%.

Rasio kendaraan umum layak jalan kondisi pada Tahun 2017 sebesar 177,77% meningkat signifikan dan pada akhir tahun 2020 ditargetkan sebesar 220%.

Komunikasi dan Informatika

Tabel II.70
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Hasil					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah jaringan komunikasi	Buah	175	176	179	182	185	200
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	%	5,47	6,47	8,33	8	9	15
3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Buah	4	4	4	4	4	4
4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/ telephon	%	5,16	10,8	12,7	15	30	45
5	Web site milik pemerintah daerah	Site	7	9	12	22	22	30

nas Komunikasi Informasi Kab. Boyolali

Jumlah Jaringan Komunikasi kondisi awal pada Tahun 2015 sebanyak 175 buah, terdapat peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun terakhir Tahun 2019 terealisasi sebanyak 185 buah dan pada Tahun 2020 ditargetkan sebanyak 200 buah.

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk dengan kondisi awal Tahun 2015 sebesar 5,47% meningkat dari tahun ketahun sampai Tahun 2017. Tahun 2018 terdapat sedikit penurunan sebesar 8% kemudian meningkat pada Tahun 2019 dengan besaran 9%. Tahun 2020 ditargetkan sebanyak 15%.

Jumlah penyiaran radio/TV lokal Tahun 2015 sampai dengan 2019 sebanyak 4 buah untuk Tahun 2020 ditargetkan sebanyak 4 buah.

Persentase penduduk yang menggunakan HP/ telepon Tahun 2015 sebagai kondisi awal sebanyak 5,16% dari tahun ketahun mengalami peningkatan cukup signifikan dan pada Tahun 2020 ditargetkan sebanyak 45%.

Jumlah website milik pemerintah daerah pada Tahun 2015 sebanyak 7 web, Realisasi pada Tahun 2019 sebanyak 22 web, sedangkan untuk Tahun 2020 ditargetkan sebanyak 30 web.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase koperasiaktif Tahun 2018 sebesar 65,6%. Presentase Koperasi aktif di tahun 2019 yaitu 64,47% bila di dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,13%, hal ini disebabkan karena bertambahnya koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Boyolali. Pada Tahun 2018 Jumlah koperasi ada 873 koperasi terdiri dari 300 koperasi tidak aktif dan 573 koperasi aktif. Di tahun 2019 jumlah koperasi ada 881 Koperasi,terdiri dari 568 koperasi aktif dan 313 koperasi tidak aktif. Dengan ini perlu adanya peningkatan pembinaan kelembagaan koperasi.

Tabel II.71
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015 -2019 dan Target Tahun 2020

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Persentase	%	79,65	79,67	28.423	65,6	64,47	65,6

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
	koperasi aktif							
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	UKM	28.131	28.140	25,04	25,74	25,74	25,74
3	Jumlah BPR/LKM	LKM	1.132	1.135	25.400	1.109	1109	1.109
4	Usaha Mikro dan Kecil	usaha mikro	88,79	88,84	76,80	80	88,8	88,8

Sumber: Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan Kab. Boyolali

Penanaman Modal

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Penanaman Modal Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2019 dan Target Tahun 2020 tersaji pada Tabel II.74 sebagai berikut

Tabel II.72
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Penanaman Modal
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL				Hasil 2019	Target 2020
			2015	2016	2017	2018		
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Buah	941	568	927	302	2.223	1.013
	PMA	Buah	1	564	1	25	50	
	PMDN	Buah	940	4	926	277	2.173	
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.Juta	1.213.545	2.319.100	1.208.940	1.534.761	1.602.525	1.402.500
	PMA	Rp.Juta	117.000	329.061	120.000	213.684	122.580	100.000
	PMDN	Rp.Juta	1.096.545	1.990.038	1.098.940	1.321.077	1.479.945	1.302.500
3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp.	Turun 74	Naik 894		Naik 325	Naik 158	Naik 200
4	Lama proses perijinan							
	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	hari kerja	7	7	8	7	7	7

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Boyolali

Capaian kinerja di bidang penanaman modal dalam hal jumlah investor dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan yaitu Tahun 2017 sebesar 927, Tahun 2018 sebesar 302, dan terjadi kenaikan Tahun 2019 sebesar 2.223. Sedangkan untuk realisasi Investasi selalu mengalami kenaikan. Kenaikan realisasi investasi total di Kabupaten Boyolali selama 3 (tiga) tahun terakhir digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel II.73
 Perkembangan Jumlah Investor dan Nilai Investasi
 Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Investor Masuk	Akumulasi Jumlah Investor	Nilai Realisasi Investasi per Tahun (Rp)	Akumulasi Jumlah Investasi (Rp)	Prosentase Kenaikan akumulasi
2015	941	6.461	1.213.545.000.000	6.295.940.692.958	23,88
2016	568	7.031	2.319.100.557.970	8.615.041.250.928	36,83
2017	359	7.390	1.260.730.587.526	9.875.771.838.454	14,63
2018	302	7.692	1.534.761.852.808	11.410.533.691.262	15,54
2019	2.223	9.914	1.602.525.458.306	13.001.099.149.604	14,04

Sumber data: DPMPTSP Kab. Boyolali

Tabel II.74
 Perkembangan Jumlah Investor dan Nilai Investasi PMDN
 Tahun 2015-2019

Sumber data:
DPMPTSP Kab. Boyolali

T
a

Tahun	Jumlah Investor Masuk	Akumulasi Jumlah Investor	Nilai Realisasi Investasi per Tahun (Rp)	Akumulasi Jumlah Investasi (Rp)
2015	940	6.453	1.096.545.000.000	4.751.614.805.358
2016	564	7.017	1.990.038.854.201	6.741.853.659.559
2017	357	7.374	992.585.347.562	7.734.239.007.121
2018	277	7.651	1.321.077.052.808	9.055.316.059.929
2019	2.173	9.824	1.479.945.458.306	10.535.261.518.235

bel II.75
Data Investasi dan Investor PMDN Tahun 2019

NO.	SEKTOR	TOTAL 2019		
		Jml. Unit Usaha / Perusahaan	Investasi (Juta Rupiah)	Tenaga Kerja (Orang)
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	0	0	0
2	Peternakan	5	950	19
3	Kehutanan	0	0	0
4	Perikanan	0	0	0
5	Pertambangan	0	0	0
6	Industri Makanan	2	6.888	204
7	Industri Tekstil	5	3.047	259
8	Ind. Brg dari Kulit & Alas Kaki	0	0	0
9	Industri Kayu	0	0	0
10	Industri Kertas & Percetakan	0	0	0
11	Industri Kimia dan Farmasi	2	184	4
12	Industri Karet dan Plastik	3	3.112	150
13	Ind. Mineral Non Logam	0	0	0
14	Industri Logam, Mesin & Elektronik	2	510	13
15	Ind. Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam	0	0	0
16	Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0
17	Industri Lainnya	1	310	4
18	Listrik, Gas, Air Minum	0	0	0
19	Konstruksi	0	0	0
20	Perdagangan & Reparasi	283	66.742	1.121
21	Hotel & Restoran	1	350	10
22	Transportasi, Gudang & Komunikasi	9	1.850	51
23	Perumahan, Kaw. Industri & Perkantoran	0	0	0
24	Jasa Lainnya	47	77.376	594
JUMLAH		360	161.322	2.429

Sumber data: DPMPTSP Kab. Boyolali

Tabel II.76
Perkembangan Investasi PMA di Kabupaten Boyolali
Tahun 2015-2017

No	TAHUN	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI	INVESTASI KUMULATIF
1	2015	1	US \$ 9.000.000	US \$ 64.275.500 / total Rp 835.581.500.000 dan Rp. 696.784.387.600
2	2016	4	US \$ 23.120.000	Rp.1.832.925.887.600
3	2017	2	Rp.268.145.240.000	Rp.2.129.572.831.369
4	2018	25	Rp.213.684.800.000	Rp.2.343.257.631.369
	2019	50	Rp 122.580.000.000	Rp.2.465.837.631.369

MPTSP Kab. Boyolali, dengan kurs 1 US\$ = Rp 13.000

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara Elektronik (OSS) maka pelayanan perizinan menggunakan laman oss.go.id sejak bulan Juli 2018. Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali nomor 22 Tahun 2019 tentang pelayanan Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka terdapat 13 bidang pelayanan perizinan, dari 13 bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP, hanya 1 perizinan yang dikenakan retribusi daerah yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Standar waktu layanan perizinan dan jumlah izin yang terbit dari Tahun 2014–2019 tersaji pada tabel berikut:

Tabel II.77
Data Perusahaan PMA di Kabupaten Boyolali

NO	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	NILAI INVESTASI	
			US \$	Rp. (000.000)
1	PT HANIL INDONESIA	1995	11.552.000	0
2	PT TUPAI ADYAMAS IND	1995	1.500.000	0
3	PT BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA	2001	1.000.000	0
4	PT PRIMAYUDHA MANDIRI JAYA	2008	35.052.000	0
5	PT CARTINI LINGERIE IND	2010	920.000	0
6	PT NOVA INDONESIA (Perluasan)	2011	245.000	0
7	PT. NEDIN	2012	6.500	0
8	PT. SO GOOD FOOD	2013	0	76.784
9	PT. LASPO	2014	5.000.000	0
10	PT.TUN HONG GARMENT IND	2014	0	20.000
11	PT.ECO Smart Garment Indonesia (SAMBI)	2014	0	300.000
12	PT.ECO Smart Garment Indonesia (KLEGO)	2014	0	300.000
13	PT. Andalan Mandiri Busana	2015	9.000.000	0
14	PT CARTINI LINGERIE INDONESIA (Perluasan)	2016	1.200.000	0
16	PT SAM KYUNG JAYA BUSANA	2016	7.300.000	
17	PT SAN HUAN INDONESIA	2016	1.200.000	
18	PT MADEI MANUFACTURE AND DESIGN	2016	1.000.000	
JUMLAH			74.975.500	696.784

Sumber data: DPMPTSP Kab. Boyolali

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 4 Tahun 2012 tentang pelayanan perijinan dan non perizinan terpadu di Kabupaten Boyolali yang diselenggarakan oleh DPMPTSP terdapat 46 perizinan dan non perizinan yang ditangani oleh DPMPTSP yang terdiri dari 39 perizinan dan 7 non perizinan berupa rekomendasi. Dari 46 perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP, hanya 2 perizinan yang dikenakan retribusi daerah yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO), sedangkan 44 perizinan dan non perizinan yang lain tidak dikenakan retribusi daerah.

Standar waktu layanan perizinan dan jumlah izin yang terbit dari Tahun 2015–2019 tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.78
Standar Waktu Pelayanan dan Jumlah Pemohon
Tahun 2015 – 2019

JENIS – JENIS IZIN	WAKTU (HARI)	JUMLAH PEMOHON				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Izin lokasi	10	7	9	13	13	15
2. Izin Gangguan	10	980	938	532	#	#
3. IMB	10	590	801	688	432	367
4. SIUP	3	706	784	723	499	#
5. TDG	3	26	26	30	14	#
6. RMU	3	15	22	21	4	#
7. TDUP	3	87	61	76	56	#
8. SIUI	10	124	117	67	45	#
9. TDP	3	836	903	772	553	#
10. NIB						1500

Sumber data : DPMPTSP Kabupaten Boyolali; # keterangan tidak berlaku lagi

Tabel II.79
Jumlah Izin yang Diterbitkan Tahun 2015 – 2019

JENIS – JENIS IZIN	JUMLAH IZIN TERBIT

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Izin lokasi	6	8	12	13	15
2. Izin Gangguan	936	955	515	*	*
3. IMB	454	722	623	432	343
4. SIUP	626	777	703	499	*
5. TDG	19	22	25	14	*
6. RMU	14	19	21	4	*
7. TDUP	65	59	71	56	*
8. SIUI	94	105	59	45	*
9. TDP	758	896	763	553	*
10. NIB					1500

Sumber data: DPMPTSP Kabupaten Boyolali

* keterangan tidak berlaku lagi

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dahulu menangani 12 perijinan, menjadi 46 perizinan dan non perizinan. Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan penghargaan kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi, Kabupaten/kota terbaik 2016. Penghargaan ini diberikan kepada 3 (tiga) penyelenggara PTSP terbaik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Kabupaten Boyolali mendapat Juara 3 tingkat Nasional dalam lomba PTSP Tahun 2016. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada penyelenggara PTSP di daerah berdasarkan hasil kualifikasi dari total 561 (lima ratus enam puluh satu) daerah provinsi, kabupaten, kota, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas tercatat 526 daerah telah membentuk PTSP.

Kabupaten Boyolali mendapat juara dalam Penilaian PTSP ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menyederhanakan Peraturan Daerah (Perda) dari 33 (tiga puluh tiga) Perda menjadi 3 (tiga) Perda yakni Perda Pelayanan Investasi, Perda Retribusi serta Perda Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BPMP2T. Penyederhanaan Perda ini dimaksudkan untuk mempermudah para investor, baik investor dalam negeri maupun luar negeri, dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Boyolali. Selain itu dari 46 (empat puluh enam) jenis perizinan yang ada, hanya 2 (dua) layanan perizinan yang masih ditarik retribusinya yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan/HO. Khusus Izin HO untuk Industri kecil UMKM mulai Tahun 2016 digratiskan tanpa membayar biaya sepeserpun.Sedangkan Mulai 2017 HO sudah dihapus, dan mulai menggunakan OSS di tahun 2018 Selain itu DPMPTSP juga memberikan layanan inovasi berbasis IT yang intinya bisa memberikan kemudahan kepada para investor seperti layanan Perizinan *Online*, Peta Potensi Investasi *online*, *SMS Gateway*, *paperless*, *elektronik document*, Aplikasi *Top Screen*, *Geographic Information Sistem Survey* (GIS) serta *Barcode* yang berfungsi untuk mengantisipasi pemalsuan dokumen.

- Dari 46 perizinan dan non perizinan yang ditangani hanya 2 perizinan yang dikenakan retribusi daerah yaitu Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan.
- Penerapan sistem aplikasi perizinan, dari *Front Office* sampai *Back Office*.
- Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) untuk Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Tetap Penanaman Modal.
- Pemohon bisa mengunduh formulir perizinan di *website* DPMPTSP di
- Adanya sarana pengaduan online di *website* DPMPTSP dan melalui SMS di nomor 085725585522.
- Penerapan Perizinan Online, yaitu pemohon bisa mendaftar perizinan melalui website DPMPTSP.
- Penerapan SMS Gateway, yaitu setiap pemohon bisa mengetahui proses perizinan lewat SMS.
- Penerapan Touchscreen Informasi Perizinan.
- Pengarsipan dokumen secara elektronik (e-document).
- Adanya peta potensi investasi yang memuat potensi investasi di Kab. Boyolali yang ada di website DPMPTSP yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

- Pengaplikasian Barcode dalam SK Perizinan.
- Adanya fasilitas GIS (Geographic Information System) dalam menentukan lokasi usaha yang disurvey.
- Aplikasi Nomer Antrian Bagi Pemohon.
- Adanya TV informasi Pelayanan Perizinan .

Kepemudaan dan Olah Raga

Dari jumlah organisasi pemuda yang ada pada akhir Tahun 2018 sejumlah 32 kelompok, dari total akhir Tahun 2019 yang ada bertambah di angka 36 kelompok, beberapa factor penyebab, yang antara lain:

- Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, melalui meningkatnya lapangan kerja yang dibuka di wilayah Kabupaten Boyolali.
- Meningkatnya animo masyarakat untuk mendirikan organisasi pemuda.
- Kondisi pemerintahan yang kondusif, sehingga masyarakat memanfaatkan waktunya untuk berorganisasi, sehingga menambah manfaat di kehidupannya.

Sedangkan jumlah organisasi olahraga atau umum di sebut pengcab yang tergabung dalam organisasi induk KONI data terakhir menyebutkan ada 30 pengcab. Dimana pada tahun ini ada penambahan 2 pengcab yaitu sepatu roda dan tarung derajad. Terjadi pengurangan dari target dikarenakan organisasi olahraga yang tergabung dalam NPC juga ikut keluar secara Nasional dari organisasi Induk (KONI).

Tabel II.80
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2018 dan Target Tahun 2019

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL				2019	
			2015	2016	2017	2018	Target	Hasil
1	Jumlah organisasi pemuda	Buah	30	31	31	32	32	36
2	Jumlah organisasi olahraga	Buah	30	30	31	31	33	30
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	Keg	17	25	93	27	15	15
4	Jumlah kegiatan olahraga	Keg	10	9	15	12	8	8
5	Lapangan olahraga	Buah	16	16	17	19	20	20

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Boyolali

Kemudian jumlah kegiatan kepemudaan Tahun 2017 sejumlah 93 kegiatan, sedangkan di akhir Tahun 2019 sebesar 15 kegiatan hal ini disebabkan karena level atau kualitas kegiatan yang ditingkatkan, pada tahun 2017 kegiatan masih berada pada tingkat kelompok atau kecamatan sedangkan pada tahun 2019 kita mulai berkiprah pada tingkat lokal, provinsi, maupun nasional dan awal pada tahun 2019 kita ditargetkan dapat berkiprah di tingkat internasional, sebagai contoh ikut sertanya pemuda Boyolali dalam Festival Seni Budaya di Equador mewakili Indonesia.

Untuk jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2019 terdapat 8 kegiatan baik yang bertaraf lokal maupun provinsi, beberapa kegiatan difokuskan untuk penjangrian atlet-atlet untuk menciptakan atlet berprestasi.

Selain itu, jumlah lapangan olahraga di Boyolali sebanyak 17 buah pada tahun 2017. Jumlah lapangan meningkat pada Tahun 2019 menjadi 20 buah terbagi sebagai berikut: 3 lapangan sepak bola, 1 lapangan basket, 3 lapangan bulutangkis, 5 kolam renang, 4 lapangan tenis, 1 lapangan futsal, 1 sikuit, 1 gelanggang atletik, 1 lapangan volley, 1 sasana tinju, dimana sirkuit gokart dan gelanggang atletik sudah mulai bias untuk difungsingan, meskipun masih ada beberapa kekurangan sarana dan prasaranannya.Sementara untuk total jumlah lapangan yang ada di Boyolali Baik dikelola pemerintah daerah maupun pihak desa maupun swasta pada tahun ini data terakhir berjumlah 420 buah.

Statistik

Tabel II.81
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Statistik

Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Penyediaan Buku Boyolali Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka	Dokumen	2	2	2	2	2	2
2	Penyediaan data tentang informasi perubahan harga kebutuhan pokok Kab. Boyolali	Dokumen	1	1	1	1	1	1

Sumber: BP3D Kab. Boyolali

Capaian kinerja di atas dapat disampaikan sebagai berikut:

Penyediaan Buku Boyolali Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka dari tahun ke tahun ditargetkan 2 dokumen dan dapat direalisasikan. Hasil yang diharapkan dari dokumen tersebut adalah sebagai bahan acuan pengambilan kebijakan dan keputusan bagi pemangku kepentingan.

Penyediaan data tentang informasi perubahan harga kebutuhan pokok Kab. Boyolali dari tahun ketahun dapat direalisasikan 1 (satu) dokumen dan di targetkan pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) dokumen.

Persandian

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan maka diperlukan peningkatan kapasitas pertahanan serta stabilitas keamanan dan ketertiban. Peningkatan tersebut dapat terwujud melalui penyelenggaraan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara Tahun 2015-2019, yang diarahkan pada sasaran “Terjaminnya layanan sistem keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara (information assurance)”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Untuk Kabupaten Boyolali, pelaksanaan urusan persandian dengan indikator terlaksananya fasilitasi layanan persandian pada tahun 2020 ditargetkan 100 % dengan pembagian tanggung jawab disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Tabel II.82
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Persandian
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Terlaksananya fasilitasi layanan persandian	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Boyolali

Kebudayaan

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kebudayaan kepada masyarakat bukan hanya dititikberatkan pada pelayanan hiburan atau seni kepada masyarakat, tetapi juga memberikan pelayanan dalam bentuk pemberian bantuan, kaderisasi dan sosialisasi sehingga diharapkan kekayaan budaya lokal yang mengandung kearifan lokal dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini perlu digali dan disebarkan kepada masyarakat luas khususnya generasi penerus agar memahami makna setiap budaya daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional.

Tabel II.83
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kebudayaan

Kabupaten Boyolali Tahun 2017 – 2019 dan Target Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL			Target 2020
			2017	2018	2019	
1	Budaya tradisi lokal yang dilestarikan	Budaya	13	11	12	11
2	Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan.	%	92	94	96	98
3	Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Tempat	9	10	12	11
4	Pelaku seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	Group	39	39	66	43
5	Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya	Kali	56	56	57	60
6	Event seni dan budaya	Kali	4	6	5	4

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali

Penyelenggaraan event seni dan budaya yang diselenggarakan pada Tahun 2019 dapat mencapai target. Hal ini didukung oleh komitmen dan kebijakan dalam pengembangan dan pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Boyolali, serta adanya dukungan masyarakat sehingga pelaksanaan festival dapat berjalan dengan baik dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pembangunan Gelanggang Anuraga dan Balai Mahesa pada Tahun 2019, sebagai tempat/arena penyelenggaraan kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Boyolali, merupakan salah satu bukti kepedulian pemerintah Kabupaten Boyolali dalam bidang kebudayaan. Gedung tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan kegiatan kesenian, kebudayaan dan sebagai sarana edukasi. Gelanggang Anuraga dan Balai Mahesa merupakan sarana yang sangat strategis guna mengembangkan khasanah kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Boyolali.

Upaya pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya juga memerlukan perubahan cara pandang kita, bahwa pemerintah bukan lagi satu-satunya pihak yang berkepentingan melestarikan seni budaya tradisional, akan tetapi memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, baik itu lembaga, komunitas seni, maupun perorangan. Diharapkan agar semua elemen masyarakat dapat bersama-sama berpartisipasi serta berperan dalam pelestarian, pengelolaan dan pengembangan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya.

Kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Boyolali memiliki potensi bagus untuk dikembangkan. Jika dikelola dengan baik, kesenian dan kebudayaan local akan menjadi sebuah komoditas yang dapat mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Boyolali. Pemerintah Kabupaten Boyolali akan terus berupaya memberikan pelayanan bidang kebudayaan kepada masyarakat Boyolali secara optimal.

Berbagai atraksi kesenian tradisional yang menjadi andalan hingga saat ini belum dikenal secara internasional, sehingga dari tahun ke tahun dilaksanakan misi kebudayaan dengan pengiriman Duta Seni Pelajar diharapkan dapat sebagai salah satu ajang untuk mengenalkan kebudayaan khas asli Kabupaten Boyolali dan promosi potensi wisata di tingkat internasional. Adapun realisasi pengiriman Duta Seni dan Kebudayaan ke Luar Negeri dapat kami sampaikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.84

Pengiriman Duta Seni Kabupaten Boyolali ke Luar Negeri
Tahun 2015 – 2019

No.	Tahun	Jumlah Pelajar	Pendamping	Negara Tujuan
1.	2015	22	6	Tiongkok dan Korea
2.	2016	18	6	Rusia dan Dubai
3.	2017	18	6	Austria, Swiss, Ceko
4.	2017	34	8	Rusia
5.	2018	18	6	Denmark, Swedia, Norwegia
6.	2019	18	8	Belanda, Prancis, Jerman

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali

Perpustakaan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ini diarahkan dalam rangka pencapaian misi ke kedua yaitu **“Boyolali Membangun Untuk Lebih Maju dan Berkelanjutan”**. Tujuannya adalah Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing dan kesejahteraan daerah. Sasarannya terpenuhinya infrastruktur sosial. Arah Kebijakan Pemenuhan dan Pemerataan akses infrastruktur melalui strategi yaitu Pengembangan infra struktur berdasarkan rasio kebutuhan pelayanan publik dengan capaian aspek pelayanan bidang perpustakaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel II.85
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perpustakaan
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Peningkatan upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca	orang	32.756	32.269	51.302	53.183	60.228	34.000

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Boyolali

Peningkatan upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca dilaksanakan melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan diantaranya : pengembangan minat dan budaya baca, supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah.

Kearsipan

Tabel II.86
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kearsipan
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pengelola arsip secara baku	%	100	100	100	100	100	100
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Boyolali

Peningkatan SDM pengelola kearsipan dapat tercapai dengan meningkatnya kualitas SDM dalam pengelolaan kearsipan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 dengan target sebesar 100% melalui kegiatan kajian sistem administrasi kearsipan, bimbingan teknis kearsipan bagi petugas pengelola kearsipan sebanyak 50 orang dari 50 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Boyolali.

Pada tahun 2019, demi peningkatan SDM pengelola kearsipan, ditargetkan 1 kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan dengan peserta yang diundang 50 orang dari UPT Dikdas LS.

2.1.4.3 Urusan Pilihan
 Kelautan dan Perikanan

Tabel II.87
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kelautan dan Perikanan
 Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dan Target Tahun 2020

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		Target 2020
			Target	Realisasi	
5	Persentase peningkatan produksi hasil perikanan				
1.	Produksi ikan budidaya	Ton	28.673	34.845	30.107
2.m	Produksi ikan tangkap	Ton	1.805	2.130	1.895
3.	Produksi pengolahan perikanan	Ton	69,62	150	73,10

er: Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Boyolali, 2019

Produksi ikan budidaya, untuk tahun 2019, produksi ikan budi daya dari target 28.673 ton terealisasi sebesar 34.845 ton. Sehingga keberhasilan capaian indicator

kinerja ini sebesar 121 %. Hal ini terbukti telah diproduksi ikan lele konsumsi, nila dan carper sebanyak 34.845 ton di wilayah Kab. Boyolali. Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh Jaminan ketersediaan induk dan benih unggul oleh UPT BBI baik yang ada di Tlatar maupun di Bangak; Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB); Pembinaan kelompok oleh petugas teknis dan keikutsertaan petugas penyuluh pusat yang ditempatkan di Kabupaten Boyolali, serta Program/kegiatan secara umum telah sesuai dengan Renstra Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019. Target produksi budidaya Tahun 2019 sebesar 28.673 ton, indikator ini merupakan akumulasi produksi budidaya dalam 1 tahun.

Produksi ikan tangkap Tahun 2019, produksi ikan tangkap mempunyai target sebesar 1.805 ton dan tercapai sebesar 2.130 ton. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah tercapainya indikator kinerja sebesar 118 %. Estimasi 10 tahun mendatang produktivitas ikan tangkapan bisa di estimasikan pada angka 2.000-3.000 ton per Tahun dan dampak lebih lanjut petani penangkap ikan akan banyak menganggur dan berpindah haluan pekerjaan karena pekerjaan utama menangkap ikan tidak maksimal, maka hal yang dapat dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan adalah pemulihan daya dukung fisik waduk/sungai, dengan rehabilitasi luasan dan kedalaman waduk/sungai serta pelestarian lingkungan/kapasitas air waduk/sungai. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan daya dukung waduk/sungai tersebut. Penebaran benih ikan juga diharapkan dapat mengembalikan plasma nutfah yang ada di waduk ataupun di sungai tersebut. Target produksi ikan tangkap Tahun 2019 sebesar 1.805 ton. Indikator ini merupakan akumulasi produksi ikan tangkap dalam 1 tahun.

Produksi pengolahan perikanan dengan target produksi pengolahan ikan tahun 2019 di Kabupaten Boyolali sebesar 69,62 ton dan realisasinya tercapai sebesar 150 ton. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah tercapainya indikator kinerja sebesar 215 %. Produksi pengolahan ini berasal dari komoditas utama ikan lele dan nila dengan varian produk keripik, abon dan lain-lain. Produksi 70 ton tersebut 70% berada Kec. Banyudono, Sawit, Ngemplak dan 30 % di Kec. Kemusu dan Wonosegoro. Target produksi pengolahan Tahun 2019 sebesar 69,62 ton, indikator ini merupakan akumulasi produksi pengolahan dalam 1 tahun.

Tabel II.88
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pertanian untuk Peternakan
Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dan Target Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2019		Target 2020
			Target	Realisasi	
	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan				
1	Produksi susu sapi	Juta liter	47,526	49,717	47,851
2	Produksi daging sapi	Ribu ton	8,345	14,148	8,400
3	Produksi daging ayam	Ribu ton	3,795	19,226	3,796
4	Produksi telur unggas	Ribu ton	12,661	27,932	12,663
5	Populasi sapi potong	Ekor	88.650	106.599	89.275
6	Populasi sapi perah	Ekor	88.010	94.088	88.635
7	Populasi kambing	Ekor	89.881	101.418	90.456
8	Populasi domba	Ekor	49.640	55.412	50.015
9	Populasi ayam buras	Ekor	506.553	778.799	507.553
10	Populasi itik	Ekor	135.079	166.168	136.079

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Boyolali

- **Produksi susu sapi**
Target produksi susu sapi tahun 2019 sebesar 47,526 juta liter tercapai sebesar 49,717 juta liter. Sehingga capaian indikator kinerja ini sebesar 105 %. Hal ini dikarenakan oleh faktor utama yaitu jaminan kehidupan keseharian masyarakat peternak sapi perah karena harga jual susu yang cukup menguntungkan/menjanjikan dan dapat disisihkan untuk kebutuhan lain (tabungan). Terlepas dari itu, kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali akan berfokus memulihkan citra Boyolali sebagai Kota Susu, dengan penguatan modal pemerintah berupa bantuan pakan, dan iklim usaha susu yang cukup kompetitif. Target produksi susu sapi tahun 2019 sebesar 47,526 juta liter, indikator ini merupakan akumulasi produksi susu sapi dalam 1

tahun. Target produksi daging sapi tahun 2019 sebesar 8.345 ton dan tercapai sebesar 14.148 ton. Indikator kinerja ini tercapai sebesar 170 %. Jumlah produksi daging tersebut diperoleh dari produksi daging sapi (perah dan potong). Target produksi daging sapi Tahun 2019 sebesar 8.345 ton, indikator ini merupakan akumulasi produksi daging sapi dalam 1 tahun.

- Produksi daging ayam

Target produksi daging ayam tahun 2019 sebesar 3.795 ton dan tercapai sebesar 19.226 ton. Berdasarkan capaian realisasi tersebut maka indikator kinerja ini mencapai 506 %/surplus. Jumlah produksi daging tersebut diperoleh dari produksi daging ayam potong/pedaging, ayam buras, ayam petelur. Target produksi daging ayam Tahun 2019 sebesar 3,795 ribu ton, indikator ini merupakan akumulasi produksi daging ayam dalam 1 tahun.

- Produksi telur unggas

Target produksi telur unggas tahun 2019 sebesar 12.661 ton dan tercapai sebesar 27.932 ton. Sehingga indikator kinerja ini mencapai 221 %. Jumlah produksi telur unggas tersebut diperoleh dari telur ayam dan jenis unggas lainnya. Target produksi telur unggas Tahun 2019 sebesar 12.661 ton, indikator ini merupakan akumulasi produksi telur unggas dalam 1 tahun.

- Populasi sapi potong

Target populasi sapi potong tahun 2019 sebesar 88.650 ekor dan tercapai sebesar 106.599 ekor. Sehingga indikator kinerja ini mencapai 120 %. Capaian sebesar ini diduga karena keberhasilan pengendalian penyakit hewan di Kabupaten Boyolali serta keberhasilan program Pemeriksaan Kebuntingan (PKB), Asisten Teknik Reproduksi (ATR) dan Inseminasi Buatan (IB). Target populasi sapi potong Tahun 2019 sebesar 88.650 ekor, indikator ini merupakan penambahan populasi dalam 1 tahun dan sebagai pembanding tercapai/ tidak tercapainya kinerja Tahun 2019 antara target penambahan populasi sapi potong (500 ekor) dengan realisasi penambahan populasi sapi potong diakhir Tahun 2019.

- Populasi sapi perah.

Target populasi sapi perah tahun 2019 sebesar 88.010 ekor dan tercapai sebesar 94.088 ekor. Tercapainya indikator kinerja ini 107 % diduga karena keberhasilan pengendalian penyakit hewan ternak di Kabupaten Boyolali serta keberhasilan program Pemeriksaan Kebuntingan (PKB), Asisten Teknik Reproduksi (ATR) dan Inseminasi Buatan (IB). Faktor lain diduga adanya fakta pada kalangan masyarakat dengan adanya harga susu yang potensial akan menjamin kehidupan sehari-hari peternak tersebut, penguatan modal dari pemerintah melalui Disnakan berupa bantuan ternak sapi perah *dara* dan pakan sapi perah dan program pembuatan BUMD Persusuan yang akan lebih memihak kepentingan peternak sapi perah. Target populasi sapi perah tahun 2019 sebesar 88.010 ekor, indikator ini merupakan penambahan populasi dalam 1 tahun dan sebagai pembanding tercapai/ tidak tercapainya kinerja Tahun 2019 antara target penambahan populasi sapi perah dengan realisasi penambahan populasi sapi perah diakhir Tahun 2019.

- Populasi kambing.

Target populasi kambing tahun 2019 sebesar 89.881 ekor dan tercapai sebesar 101.418 ekor. Tercapainya indikator kinerja ini 113 % diduga karena keberhasilan pengendalian ternak keluar dan pemotongan di Kabupaten Boyolali. Target populasi kambing Tahun 2019 sebesar 89.881 ekor, indikator ini merupakan penambahan populasi dalam 1 tahun dan sebagai pembanding tercapai/ tidak tercapainya kinerja Tahun 2019 antara target penambahan populasi kambing dengan realisasi penambahan populasi kambing diakhir tahun 2019.

- Populasi domba.

Target populasi domba tahun 2019 sebesar 49.640 ekor dan tercapai sebesar 55.412 ekor. Tercapainya indicator kinerja ini 117 % diduga karena keberhasilan pengendalian ternak keluar dan pemotongan di Kabupaten Boyolali. Target populasi domba Tahun 2019 sebesar 49.640 ekor, indikator ini merupakan penambahan populasi dalam 1 tahun dan sebagai pembanding tercapai/ tidak tercapainya kinerja Tahun 2019 antara target penambahan populasi domba dengan realisasi penambahan populasi domba diakhir Tahun 2019.

- Populasi ayam buras.
Target populasi ayam buras tahun 2019 sebesar 506.553 ekordantercapaisebesar 778.799 ekor. Tercapainya indicator kinerja ini sebesar 154 % diduga karena masyarakat sudah meyakini bahwa virus flu burung telah diminimalisir dan banyak permintaan ayam buras dipasaran saat ini. Target populasi ayam buras tahun 2019 sebesar 506.553 ekor.Indikator ini merupakan penambahan populasi dalam 1 tahun dan sebagai pembanding tercapai/tidak tercapainya kinerja Tahun 2019 antara target penambahan populasi ayam buras dengan realisasi penambahan populasi ayam buras diakhir Tahun 2019.
- Populasi itik.
Target populasi itik tahun 2019 sebesar 135.079 ekor dan tercapai sebesar 166.168 ekor. Tercapainya indicator kinerja ini 123 % diduga karena itik sebagai ternak substitusi unggas potensial dengan kelebihantahan penyakit dan permintaan pasar yang selalu meningkat dan pemeliharaan yang mudah walaupun memiliki kekurangan polusi udara (bau kotoran) yang dihasilkan. Akan tetapi dengan pemeliharaan yang terintegrasi dengan teknis pemeliharaan yang baik maka kelemahan tersebut dapat dikurangi, sebagai contoh penggunaan bakteri pengurai yang telah banyak tersedia di toko/*poultry shop* untuk mengurangi polusi udara/bau kotoran. Target populasi itik tahun 2019 sebesar 135.079 ekor.Indikator ini merupakan penambahan populasi dalam 1 tahun dan sebagai pembanding tercapai/tidak tercapainya kinerja Tahun 2019 antara target penambahan populasi itik dengan realisasi penambahan populasi itik diakhir Tahun 2019.

Pariwisata

Sektor pariwisata dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, mulai dari tahun 2015 sebesar 1.418.800.000, 2016 sebesar 1.500.805.000 dan Tahun 2018 sebesar 2.055.968.000. Data selengkapnya sebagai berikut:

Tabel II.89
Jumlah PAD Sektor Pariwisata Tahun 2015-2018

Tahun	PAD Sekor Pariwisata
2015	1.418.800.000
2016	1.500.805.000
2017	1.579.698.000
2018	2.055.968.000

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Adapun capaian Aspek Pelayanan Bidang Pariwisata Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2019 dan Target Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel II.90
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pariwisata Kabupaten Boyolali
Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL					2020
			2015	2016	2017	2018	2019	Target
1	Kunjungan wisatawan	orang	432.767	554.248	437.087	651.739	598.174	450.335
2	Jenis, kelas, dan jumlah restoran.	buah	82	82	82	83	96	99
3	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan /hotel.	buah	19	19	19	21	21	22

Tercapainya target kunjungan wisatawan yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 445.875 orang, dapat terealisasi sebanyak 598.174 orang, jumlah ini merupakan jumlah wisatawan yang tercatat melalui retribusi dan obyek-obyek wisata yang dikelola pemerintah daerah kab Boyolali.

Hal ini disebabkan karena beberapa obyek wisata mengalami beberapa pembenahan baik aksesibilitas maupun amenitasnya. Hal yang tak kalah pentingnya adalah branding Boyolali dengan beberapa event pariwisatanya dan ikon-ikon Boyolali yang mempesona.

Untuk jenis, kelas, dan jumlah restoran di Boyolali seiring dengan tingkat keramaian di beberapa titik pusat kota boyolali dan pembangunan di beberapa daerah kecaamatan terdapat kenaikan walaupun masih didominasi kelas rumah makan yang terdaftar, dimana 2018 terdapat 83 restoran dan rumah makan, yang terdiri dari 11 restoran dan 42 rumah makan dan ditahun 2019 menjadi 96 restoran dan rumah makan.

Sedangkan jenis, kelas, dan jumlah penginapan /hotel di Boyolali pada tahun ini menunjukkan angka tetap, dimana pada tahun 2018 terdapat 21 hotel dan penginapan sementara pada tahun 2019 masih sama yaitu terdapat 21 hotel dan penginapan yang terdiri dari 2 buah hotel bintang dua, 1 buah hotel bintang tiga dan 18 hotel melati. Disamping itu terdapat sebaran homestay milik warga masyarakat yang jumlahnya mencapai 104 buah dan siap untuk menampung para tamu yang bersedia tinggal.

Pertanian

Interpretasi capaian kinerja Tahun 2019 untuk produktivitas tanaman pangan yaitu padi sawah, padi ladang, dan ubi kayu apabila dibandingkan dengan target Tahun 2019 maka yang tidak bisa mencapai target adalah produktivitas jagung, kedelai, kacang tanah dan ubi jalar. Sedangkan komoditas tanaman pangan yang lain dapat melampaui target. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2018, maka hanya padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah dan ubi jalar yang mengalami penurunan, sedangkan yang lain mengalami kenaikan.

Tabel II.91
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pertanian
Kabupaten Boyolali Tahun 2017 -2019

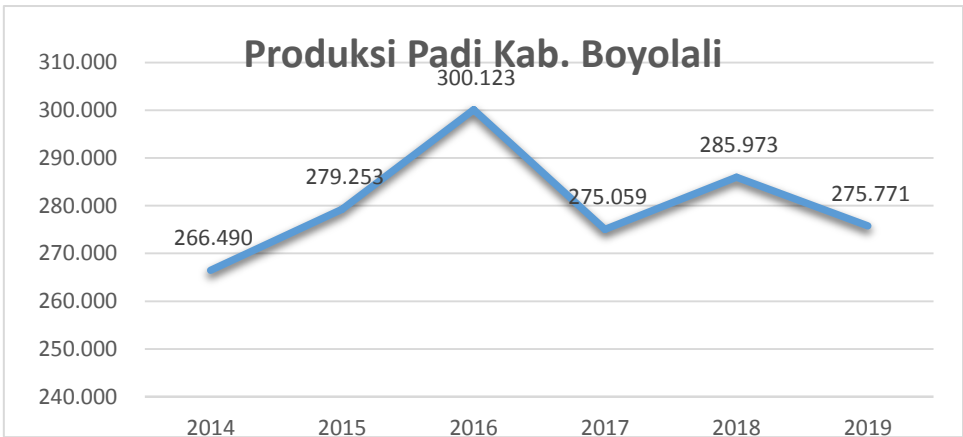
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL			2019
			2017	2018	Target	Realisasi
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar					
	1. padi sawah	Ku / Ha	57,52	58,02	58,05	58,32
	2. padi ladang	Ku / Ha	34,13	36,72	34,93	34,97
	3. jagung	Ku / Ha	54,63	55,42	53,59	53,15
	4. kedele	Ku / Ha	14,22	13,11	13,43	10,12
	5. kacang tanah	Ku / Ha	13,33	13,32	12,65	12,37
	6. ubi kayu	Ku / Ha	213,87	208,27	218,77	323,37
2	7. ubi jalar	Ku / Ha	122,10	60,00	58,78	48,33
	Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Cakupan bina kelompok petani	Kelompok	139	148	140	570

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Boyolali

Berkaitan dengan capaian produksi komoditas padi (padi sawah dan padi ladang), yang merupakan bahan pangan utama bagi penduduk di Kab. Boyolali dari Tahun 2014–2018, maka dapat dibuat grafik di bawah ini:

Grafik II.10

Grafik Jumlah Produksi Padi dari Tahun 2014–2019



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali

Adapun dengan capaian produktivitas komoditas padi (padi sawah dan padi ladang), sebagaimana grafik di bawah ini:

Grafik II.11
Grafik Tingkat Produktivitas Padi dari Tahun 2014-2019



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali

Dari kedua grafik di atas dapat dilihat bahwa tren jumlah produksi dan produktivitas padi dari Tahun 2014-2018 mengalami kenaikan. Penurunan produksi padi sangat berkaitan dengan penurunan produktivitas. Permasalahan yang menyebabkan penurunan produktivitas pada rentang tahun sebelumnya diantaranya adalah:

- Adanya serangan OPT utama padi (wereng, tikus, dan penggerek batang, *blast*, BLB, dan virus kerdil) pada daerah-daerah kantong produksi padi, yaitu sebagian wilayah Kec. Sawit, Banyudono, Ngemplak, dan Nogosari. Serangan OPT ini cukup signifikan dalam menyumbang angka penurunan produktivitas padi di Kab. Boyolali.
- Kurangnya penerapan teknologi pertanian:
- Hal ini sangat berkaitan dengan sifat petani yang malas/enggan meninggalkan kebiasaan cara berbudidaya padi secara tradisional. Teknologi pertanian yang sudah dikenalkan kepada petani biasanya akan segera ditinggalkan oleh petani, dan mereka kembali beralih ke cara lama begitu program dari pemerintah selesai dilaksanakan.
- Penggunaan pupuk yang tidak berimbang:
Petani masih sulit untuk diajak menggunakan pupuk secara berimbang baik dalam dosis penggunaan yang sesuai rekomendasi spesifik lokasi maupun dalam jenis penggunaan yaitu penggunaan pupuk organik.
- Banyak jaringan irigasi yang mulai rusak sehingga menyebabkan berkurangnya suplesi air pertanian.

Dalam mengendalikan dan mengantisipasi adanya serangan OPT maka upaya dilakukan:

- Pemerintah bersama-sama dengan kelompok tani mengadakan gerakan pengendalian secara serempak.
- Berkoordinasi dengan kabupaten yang berbatasan terutama kabupaten yang masuk dalam segitiga emas penyebaran OPT yaitu Kab. Klaten dan Kab. Sukoharjo untuk mengadakan gerakan pengendalian bersama-sama.
- Himbauan kepada kelompok tani untuk menerapkan pengendalian OPT dengan prinsip PHT (Pengendalian Hama Terpadu).
- Penggalakan penggunaan predator alami dan pestisida hayati.
- Penyelenggaraan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan Sekola Lapang Iklim (SLI).
- Penumbuhan kesadaran, motivasi, dan semangat kelompok untuk menerapkan teknologi pertanian melalui pembinaan, penyuluhan, pendampingan, dan pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT).
- Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait (DPU dan PR) dalam perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi.
- Penguatan kelembagaan P3A/GP3A.
- Pengaturan kembali jadwal tanam.

Masalah yang menjadi tantangan ke depan sekaligus berpotensi menjadi kendala dalam peningkatan produksi dan produktivitas padi pada khususnya dan produk pertanian pada umumnya adalah laju alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat.

Tabel II.92
Perkembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Hektare	16.500,990	16.500,990	16.500,990	16.500,990

Sumber: BP3D Kabupaten Boyolali

Semakin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian telah mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Dalam mewujudkan misi kelima bahwa Boyolali sebagai lumbung padi dan pangan nasional, maka salah satu upaya melindungi lahan pertanian dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Boyolali seluas 16.500 ha.

Dalam rangka pengendalian lahan pertanian tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2018 bahwa Kabupaten Boyolali memberikan insentif bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebesar 90% (*Sembilan puluh perseratus*) pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) beririgasi teknis dengan luasan maksimum per bidang seluas 5.000 m² (*lima ribu meter persegi*).

Adapun rincian alih fungsi lahan di Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.93
Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019

NO	TAHUN	Penggunaan Tanah Semula			Penggunaan Tanah Saat Ini					Jumlah (m ²)
		Swh (m ²)	Tegalan (m ²)	Sawah dan tegalan (m ²)	Permukiman (m ²)	Industri (m ²)	Prasaran/ Jalan /Jasa (m ²)	Perdagangan (m ²)	Lain-lain (m ²)	
1	2015	143.400	210.881	354.281	291.179	30.921	32.181	-	-	354.281
2	2016	88.500 ha	17,1 ha	25,95	9,807 ha	13,15 ha	2 ha	1 ha	-	25,95

NO	TAHUN	Penggunaan Tanah Semula			Penggunaan Tanah Saat Ini					Jumlah (m²)
		Swah (m²)	Tegalan (m²)	Sawah dan tegalan (m²)	Permukiman (m²)	Industri (m²)	Prasarana/ Jalan /Jasa (m²)	Perdagangan (m²)	Lain-lain (m²)	
3	2017	185.116	719.625	904.741	566.165	248.794	28.250	39.553	31.437	914.199
4	2018	326.642	616.895	943.537	678.586	33.201	224.717	7.033	-	943.537
5	2019	174.402	468.274	642.676	485.154	107.924	35.655	13.943		642.676

Sumber: BP3D Kabupaten Boyolali

Salah satu masalah pada sektor pertanian adalah terjadinya alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian. Pada kurun waktu tahun 2014 hingga 2019 terdapat perubahan lahan pertanian ke non pertanian yang memiliki kecenderungan meningkat terutama pada sawah beririgasi sederhana, sawah tadah hujan dan tegalan. Dari periode tersebut, alih fungsi lahan pertanian paling banyak digunakan untuk pemukiman (rumah tinggal, sekolah, rumah peribadatan, perumahan). Sektor lain berupa industri, perdagangan dan prasarana/jalan juga memegang peranan yang besar pada berkurangnya lahan pertanian.

Oleh karena itu diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian melalui Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan di Kabupaten Boyolali serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan system irigasi yang baik.

Namun demikian, berkurangnya lahan pertanian tidak serta merta menyebabkan berkurangnya produksi tanaman padi. Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara melakukan intensifikasi lahan pertanian yaitu dengan mengoptimalkan lahan pertanian yang ada. Intensifikasi yang dilakukan di Kabupaten Boyolali adalah :

- Penggunaan bibit unggul yang bersertifikat dan berlabel.
- Penerapan teknologi pertanian (Jajar Legowo, System Rice Of Intensification/ SRI)
- Pembangunan/Rehabilitasi Sumber-Sumber Air (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Pembangunan Embung, Dam Parit, Irigasi Tanah Dangkal, Irigasi Tanah Dalam, Long Storage, Pengembangan Irigasi Perpompaan) dalam rangka upaya pemenuhan air irigasi untuk pertanian.
- Penyediaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen (Traktor Roda Dua, Traktor Roda Empat, Rice Transplanter, Cultivator, Pompa Air) dan Pasca Panen (Combine Harvester, Power Thresher).
- Penyediaan pupuk bersubsidi (Urea, Phonska, ZA, SP-36 dan Organik) dan penerapan penggunaan pupuk berimbang berdasarkan spesifik lokasi.

Tabel II.94
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pertanian untuk Peternakan
Kabupaten Boyolali Tahun 2018 dan 2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2018		2019	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan					
1	Produksi susu sapi	Juta liter	46,98	47,226	49,537	49,716
2	Produksi daging sapi	Ribu ton	8,25	8,295	13,294	14,147
3	Produksi daging ayam	Ribu ton	3,79	3,794	17,892	19,225
4	Produksi telur unggas	Ribu ton	12,65	12,659	26,000	27,938
5	Populasi sapi potong	ekor	87.500	88.050	99.311	106.599
6	Populasi sapi perah	ekor	86.910	87.445	92.856	94.088
7	Populasi kambing	ekor	88.781	89.331	95.428	101.418
8	Populasi domba	ekor	48.940	49.290	50.717	55.412
9	Populasi ayam buras	ekor	504.553	505.553	780.255	778.799
10	Populasi itik	ekor	133.079	134.079	166.687	166.168

Sumber: Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Boyolali

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pertanian untuk peternakan secara terinci sebagai berikut:

- **Produksi susu sapi.**
Target produksi susu sapi tahu 2018 sebesar 46,98 juta liter tercapai sebesar 47,226 juta liter. Sehingga capaian indikator kinerja ini sebesar 105 %. Hal ini dikarenakan oleh faktor utama yaitu jaminan kehidupan keseharian masyarakat peternak sapi perah karena harga jual susu yang cukup menguntungkan/menjanjikan dan dapat disisihkan untuk kebutuhan lain (tabungan). Terlepas dari itu, kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali akan berfokus memulihkan citra Boyolali sebagai Kota Susu, dengan penguatan modal pemerintah berupa bantuan pakan, dan iklim usaha susu yang cukup kompetitif.
Target produksi susu sapi Tahun 2019 sebesar 49,537 juta liter realisasi 49,537 juta liter, indikator ini merupakan akumulasi produksi susu sapi dalam 1 tahun dan sebagai pembanding tercapai/tidak tercapainya kinerja Tahun 2020 antara target dengan realisasi capaian Tahun 2020.
- **Produksi daging sapi**
Target produksi daging sapi tahun 2018 sebesar 8.250 ton dan tercapai sebesar 8.295 ton. Indikator kinerja ini tercapai sebesar 100,55%. Jumlah produksi daging tersebut diperoleh dari produksi daging sapi (perah dan potong).
Target produksi daging sapi Tahun 2019 sebesar 13.294 ton, realisasi 14.147 ton, indikator ini merupakan akumulasi produksi daging sapi dalam 1 tahun dan sebagai pembanding tercapai/tidak tercapainya kinerja Tahun 2020 antara target dengan realisasi capaian Tahun 2020.
- **Produksi daging ayam**
Target produksi daging ayam tahun 2018 sebesar 3.790 ton dan tercapai sebesar 3.794 ton. Jumlah produksi daging tersebut diperoleh dari produksi daging ayam potong/pedaging, ayam buras, ayam petelur.
Target produksi daging ayam Tahun 2019 sebesar 17.892 ton realisasi sebesar 19.225 ton, indikator ini merupakan akumulasi produksi daging ayam dalam 1 tahun dan sebagai pembanding tercapai/tidak tercapainya kinerja Tahun 2019 antara target dengan realisasi capaian Tahun 2019 mendatang.
- **Produksi telur unggas**
Target produksi telur unggas tahun 2018 sebesar 12,65 ribu ton dan tercapai sebesar 12,659 ribu ton. Jumlah produksi telur unggas tersebut diperoleh dari telur ayam dan jenis unggas lainnya.
Target produksi telur unggas Tahun 2019 sebesar 26.000 ton terealisasi 27.938 ton, indikator ini merupakan akumulasi produksi telur unggas dalam 1 tahun dan sebagai pembanding tercapai/tidak tercapainya kinerja Tahun 2020 antara target dengan realisasi capaian Tahun 2020.
- **Populasi sapi potong**
Target populasi sapi potong tahun 2018 sebesar 87.500 ekor dan tercapai sebesar 88.050 ekor. Capaian ini disebabkan karena keberhasilan pengendalian penyakit hewan di Kabupaten Boyolali serta keberhasilan program Pemeriksaan Kebuntingan (PKB), Asisten Teknik Reproduksi (ATR) dan Inseminasi Buatan (IB).
Target populasi sapi potong Tahun 2019 sebesar 99.311 ekor tercapai 106.599 ekor, indikator ini merupakan penambahan populasi dalam 1 tahun dan sebagai pembanding tercapai/ tidak tercapainya kinerja Tahun 2020 antara target penambahan populasi sapi potong (500 ekor) dengan realisasi penambahan populasi sapi potong di akhir Tahun 2020.
- **Populasi sapi perah.**
Target populasi sapi perah tahu 2018 sebesar 86.910 ekor dan tercapai sebesar 87.445 ekor. Tercapainya indikator kinerja ini 106% diduga karena keberhasilan pengendalian penyakit hewan ternak di Kabupaten Boyolali serta keberhasilan program Pemeriksaan Kebuntingan (PKB), Asisten Teknik Reproduksi (ATR) dan Inseminasi Buatan (IB). Faktor lain diduga adanya fakta pada kalangan masyarakat dengan adanya harga susu yang potensial akan menjamin kehidupan sehari-hari peternak tersebut, penguatan modal dari pemerintah melalui Disnakkam berupa

bantuan ternak sapi perah dara dan pakan sapi perah dan program pembuatan BUMD Persusuan yang akan lebih memihak kepentingan peternak sapi perah.

Target populasi sapi perah Tahun 2019 sebesar 92.856 ekor realisasi 94.088 ekor, indikator ini merupakan penambahan populasi dalam 1 tahun dan sebagai pembanding tercapai/ tidak tercapainya kinerja Tahun 2020 antara target penambahan populasi sapi perah dengan realisasi penambahan populasi sapi perah di akhir Tahun 2020 mendatang.

- Populasi kambing.

Target populasi kambing tahun 2018 sebesar 88.781 ekor dan tercapai sebesar 89.331 ekor. Tercapainya indikator dikarenakan keberhasilan pengendalian ternak keluar dan pemotongan di Kabupaten Boyolali.

Target populasi kambing Tahun 2019 sebesar 95.428 ekor terealisasi 101.418 ekor, indikator ini merupakan penambahan populasi dalam 1 tahun dan sebagai pembanding tercapai/ tidak tercapainya kinerja Tahun 2020 antara target penambahan populasi kambing dengan realisasi penambahan populasi kambing di akhir Tahun 2020.

- Populasi domba.

Target populasi domba tahun 2018 sebesar 48.940 ekor dan tercapai sebesar 49.290 ekor. Tercapainya indikator kinerja ini karena keberhasilan pengendalian ternak keluar dan pemotongan di Kabupaten Boyolali.

Target populasi domba Tahun 2019 sebesar 50.717 ekor, terealisasi 55.412 ekor, indikator ini merupakan penambahan populasi dalam 1 tahun dan sebagai pembanding tercapai/ tidak tercapainya kinerja Tahun 2020 antara target penambahan populasi domba dengan realisasi penambahan populasi domba di akhir Tahun 2020.

- Populasi ayam buras.

Target populasi ayam buras tahun 2018 sebesar 504.553 ekor dan tercapai sebesar 505.553 ekor. Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan karena masyarakat sudah meyakini bahwa virus flu burung telah diminimalisir dan banyak permintaan ayam buras dipasaran saat ini.

Target populasi ayam buras Tahun 2019 sebesar 780.255 ekor tercapai 778.799 ekor. Indikator ini merupakan penambahan populasi dalam 1 tahun dan sebagai pembanding tercapai/tidak tercapainya kinerja Tahun 2020 antara target penambahan populasi ayam buras dengan realisasi penambahan populasi ayam buras di akhir Tahun 2020.

- Populasi itik.

Target populasi itik tahun 2018 sebesar 133.079 ekor dan tercapai sebesar 134.079 ekor. Tercapainya indikator kinerja ini karena itik sebagai ternak substitusi unggas potensial dengan kelebihan tahan penyakit dan permintaan pasar yang selalu meningkat dan pemeliharaan yang mudah walaupun memiliki kekurangan polusi udara (bau kotoran) yang dihasilkan. Akan tetapi dengan pemeliharaan yang terintegrasi dengan teknis pemeliharaan yang baik maka kelemahan tersebut dapat dikurangi, sebagai contoh penggunaan bakteri pengurai yang telah banyak tersedia di toko/*poultry shop* untuk mengurangi polusi udara/bau kotoran.

Target populasi itik Tahun 2019 sebesar 166.687 ekor realisasi 166.168. Indikator ini merupakan penambahan populasi dalam 1 tahun dan sebagai pembanding tercapai/tidak tercapainya kinerja Tahun 2020 antara target penambahan populasi itik dengan realisasi penambahan populasi ayam buras di akhir Tahun 2020.

Kehutanan

Tabel II.95
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kehutanan
Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2019 dan Target Tahun 2020

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL			Target 2020
			2017	2018	2019	
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	-	-	-	-
2	Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Boyolali

Tahun 2017-2020 kewenangan bidang kehutanan sudah beralih ke Provinsi, sehingga data tidak tersedia.

Energi dan Sumberdaya Mineral

Tahun 2017-2020 kewenangan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator bidang urusan yaitu pertambangan tanpa ijin bukan merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah namun sudah beralih ke Provinsi, sehingga data tidak tersedia.

Tabel II.96
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Boyolali
Tahun 2017-2019 dan Target Tahun 2020

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL			Target 2020
			2017	2018	2019	
1	Pertambangan tanpa ijin	%	-	-	-	-

Sumber: DPU dan PR Kab. Boyolali

Perdagangan

Capaian Aspek Pelayanan bidang Perdagangan Tahun 2018 didukung oleh ekspor bersih perdagangan yang mengalami kenaikan dari US \$ 244.218.547,96 menjadi US \$ 183.992.77 pada tahun 2019. Hal ini disebabkan adanya lonjakan nilai ekspor berupa barang modal yang melebihi kebutuhan untuk belanja impor dibutuhkan oleh industri besar.

Tabel II.97
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perdagangan Kabupaten Boyolali Tahun 2017 - 2019

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	HASIL (000)		Realisasi 2019
			2017	2018	
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,50	11,92	12,84
		Juta(Rp)	**		3.878.980.76
		%	**		
		Juta(Rp)	**		30.221.796.89
2	Ekspor Bersih Perdagangan	US \$	**		183.992.77
	Ekspor	US \$	136.500	99.139.48	379.053.94
3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	UPTD/ Kelompok	12	15	20

Sumber data: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Boyolali

Keterangan:
* = Data dari BPS (not available)
** = Tidak menjadi indikator Disdagperin pada RPJMD 2016–2021

Ekspor bersih = US \$ 379.053.94 - US \$ 195.061.17
= - US \$ 183.992.77

Perindustrian

Tabel II.98
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perindustrian
Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2019

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		Realisasi 2019
			2017	2018	
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	**	**	28.07
		Juta (Rp)	**		8.482.155.35
		%	**		-
		Juta (Rp)	**		30.221.796.89
2	Pertumbuhan Industri	%	1.4	1,7	4.02
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	33	33	60
4	Semakin berkembangnya industri kecil dan menengah	IKM	150	158	165
5	Meningkatnya penerapan teknologi dan standar produk industri daerah	IKM	155	163	175

Sumber data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Boyolali

Keterangan:

* = tidaktersedia data dari BPS

** = tidak menjadi indikator Disdagperin pada RPJMD 2016-2021

Pada Tahun 2015 sektor industri mempunyai andil sebesar 16,35 (ADHB) sedangkan untuk pertumbuhan industri di Tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 38,42% dan 1,34% dengan cakupan bina kelompok pengrajin mencapai 60 (enam puluh) kelompok.

Adapun industri kecil dan menengah yang dibina sehingga berkembang usahanya mencapai 120 IKM pada Tahun 2016, pada tahun 2017 meningkat menjadi 150 IKM dan target tahun 2018 diharapkan mencapai 158 IKM. Sedangkan target untuk meningkatkan penerapan teknologi dan standar produk industri daerah pada Tahun 2015 mencapai 65 IKM, Tahun 2016 mencapai 180 IKM, namun tahun 2017 turun menjadi 155 IKM dan target tahun 2018 diharapkan mencapai 163 IKM, adapun tahun 2019 jumlah IKM yang berkembang terealisasi 165 IKM.

Transmigrasi

Tabel II.99
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Ketransmigrasian
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Transmigran swakarsa	%	0	0	0	0	0	0
2	Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB	%	33	33,3	30	40	40	25

Sumber: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab. Boyolali

Jumlah Transmigran Swakarsa pada Tahun 2019 tidak ada atau 0 (nol). Mulai Tahun 2012 Kabupaten Boyolali tidak memberangkatkan Transmigrasi Swakarsa. Program penempatan Transmigrasi Swakarsa dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang direncanakan periode Tahun 2010-2014, hanya dapat terlaksana sampai Tahun 2012, karena banyaknya permasalahan yang muncul, baik transmigran maupun daerah penempatan. Mulai Tahun 2011 tidak ada penempatan transmigran swakarsa, karena dari Pemerintah Pusat sendiri sudah tidak ada program tersebut.

Penempatan transmigrasi umum untuk Tahun 2019 sebanyak 4 Kepala Keluarga dengan target sebanyak 10 Kepala Keluarga. Sehingga kontribusi transmigran terhadap PDRB sebesar 40%.

2.1.4.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan penunjang yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana

pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Demi terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan pembangunan secara periodik untuk kurun waktu tertentu. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dua puluh tahunan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025. Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Bupati. Setiap dokumen perencanaan pembangunan disusun dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031.

Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.100
Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Boyolali
Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Peraturan Kepala Daerah)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ke dalam RKPd (Rencana Kerja Perangkat Daerah)	%	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

Sumber: BP3D Kabupaten Boyolali

Pada tabel dibawah ini disajikan gambaran capaian aspek pelayanan bidang perencanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali. Secara umum dalam aspek ini hasilnya mencapai 100%.

Tabel II.101
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Penyusunan Buku IPM Kab. Boyolali	%	100	100	100	100	100	100
2	Pelacakan Batas Daerah	%	40	40	40	40	40	40
3	Penyusunan dokumen RKPd	Dokumen	2	2	2	2	2	2
4	Penyusunan Lap. Evaluasi Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100
5	Penyelenggaraan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD dan Gubernur	%	100	100	100	100	100	100
6	Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Mendagri	%	100	100	100	100	100	100
7	Penyediaan data profil peluang investasi	%	100	100	100	100	100	100
8	Pembinaan kelembagaan petani	Dokumen	2	2	2	2	2	2

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
9	Pembangunan <i>database</i> dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan ekonomi	Dokumen	1	1	1	1	1	1
10	Koordinasi pelaksanaan pendidikan untuk semua tersedianya laporan kegiatan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: BP3D Kabupaten Boyolali

Administrasi Keuangan

Kabupaten Boyolali telah mendapat piagam penghargaan WTP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 merupakan tahun kedelapan kalinya memperoleh WTP dari BPK. Opini WTP yang diberikan BPK memberikan gambaran bahwa sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan daerah di Boyolali telah sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah.

Hal ini merupakan wujud penghargaan dan komitmen Pemerintah kepada seluruh kementerian, lembaga negara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang laporan keuangannya sudah diperiksa BPK dan mendapat status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Prioritas pemanfaatan aset daerah difokuskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Optimalisasi penataan, pengelolaan dan pemberdayaan aset daerah dilakukan secara periodik antara lain melalui sertifikasi, pemasangan label dan patok batas tanah, inventarisasi dan identifikasi nilai aset serta validasi neraca aset serta penyelesaian kasus/sengketa.

Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Pengembangan sumber daya aparatur merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kinerja aparatur. Pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur pemerintahan, melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) merupakan faktor dominan dalam meningkatkan efisiensi kinerja, serta produktivitas kinerja pegawai agar pegawai dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan nasional dan tantangan global. Dalam upaya meningkatkan efisiensi kinerja, serta produktivitas kinerja aparatur melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan serta pembinaan-pembinaan terhadap pegawai. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur antara lain dilaksanakan melalui pengiriman Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tugas belajar dan fasilitasi ijin belajar, pelaksanaan diklat, bimbingan teknis, dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui promosi terbuka dan *assessment centre* pegawai.

Data jumlah ASN perempuan yang menduduki jabatan eselon II, III dan IV di Kabupaten Boyolali pada tahun 2018 sebanyak 1.877 orang dan pada tahun 2019 sedikit menurun menjadi sebanyak 1.837 orang. Berikut ini tabel data ASN perempuan di Kabupaten Boyolali :

Tabel II.102
Jumlah Data ASN Perempuan Yang Menduduki Jabatan Eselon II, III dan IV
Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Pegawai
1	2015	332
2	2016	316
3	2017	337
4	2018	316
5	2019	321
6	2020	288

Pada Tahun Anggaran 2019 jumlah peserta Diklat Pemerintah Kabupaten Boyolali direncanakan 627 orang.

Diklat Teknis untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam bentuk rapat koordinasi, rapat teknis dan lokakarya (69 orang). Dengan rincian sebagai berikut :

- Pelatihan distric food inspektor (pengawas pangan daerah) sebanyak 1 orang.
- Pelatihan teknis pemerintahan desa sebanyak 2 orang.
- Pelatihan teknis pelayanan publik sebanyak 1 orang.
- Pelatihan teknis pengembangan teknologi budidaya perikanan prov. Jateng sebanyak 1 orang.
- Bimbingan teknis keprotokoleran sebanyak 1 orang.
- Diklat rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebanyak 1 orang.
- Pelatihan jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat jenjang ahli sebanyak 1 orang.
- Pengembangan kompetensi penyusunan dalam hal penerapan SPM di daerah sebanyak 1 orang.
- Pelatihan teknis pendampingan sertifikasi sistem pertanian organik prov. Jateng sebanyak 1 orang.
- Pelatihan database development tingkat dasar angkatan I dan II sebanyak 1 orang.
- Bimbingan teknis elektronik tentang daftar usulan penilaian angka kredit (e-DUPAK) analisis kepegawaian sebanyak 4 orang.
- Diklat penjenjangan auditor pertama ke auditor muda secara tatap muka sebanyak 1 orang .
- Pelatihan dasar manajemen bencana prov. Jateng sebanyak 1 orang
- Bimtek inspeksi proteksi kebakaran perkotaan sebanyak 2 orang
- Pelatihan quantum GIS sebanyak 2 orang.
- Bimtek pembinaan PNS sebanyak 1 orang.
- Diklat manajemen perpustakaan angkatan IV sebanyak 1 orang.
- Pelatihan MAP FISIPOL UGM (penyusunan proses bisnis) sebanyak 1 orang.
- Pelatihan fungsional pengembangan metodologi pertanian berbasis partisipatif bagi penyuluh pertanian sebanyak 1 orang.
- Workshop tata cara penyusunan dan penilaian DUPAK berbasis E-DUPAK sebanyak 1 orang.
- Pelatihan dan sertifikasi manajemen ASN jenjang pengawas sebanyak 1 orang.
- Pelatihan teknis pengawas lingkungan hidup prov. Jateng sebanyak 1 orang.
- Pelatihan teknis capacity building prov. Jateng sebanyak 1 orang.
- Pelatihan berbasis kompetensi finishing bidang furniture sebanyak 1 orang.
- Diklat kepamongprajaan bagi camat pemerintah daerah angkatan III sebanyak 1 orang.
- Diklat kepamongprajaan bagi camat pemerintah daerah angkatan II sebanyak 1 orang.
- Pelatihan fungsional kewirausahaan bagi penyuluh pertanian sebanyak 1 orang.
- Pelatihan teknis pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh prov. Jateng sebanyak 1 orang.
- Diklat dasar pekerjaan sosial di lingkungan prov. Jateng sebanyak 1 orang.
- Sosialisasi pra uji kompetensi jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (P2PUD) sebanyak 2 orang.
- Sosialisasi pra uji kompetensi jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (P2PUD) sebanyak 3 orang.
- Bimtek aplikasi SIMDA barang milik daerah (BMD) pemerintah daerah se-provinsi Jateng sebanyak 4 orang.
- Pelatihan teknis deteksi dini prov Jateng sebanyak 1 orang.
- Diklat penguji kendaraan bermotor sebanyak 1 orang.

- Pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah bagi lurah angkatan IV sebanyak 2 orang.
- Pelatihan teknis manajemen pengembangan investasi daerah sebanyak 1 orang.
- Pelatihan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sebanyak 3 orang.
- Bimbingan dan ujian setifikasi pengadaan barang dan jasa berbasis komputer (UBK) sebanyak 3 orang.
- Pertemuan pengelolaan barang milik negara (BMN) terkait sertifikat hak pakai (SHP) atas tanah di lingkungan kementerian kesehatan sebanyak 1 orang.
- Pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah bagi camat angkatan II sebanyak 2 orang.
- Diklat inspektur muda kebakaran dan fire rescues program 200 jam pelatihan sebanyak 2 orang.
- Bimtek penyusunan RAD penanggulangan TB 2 orang
- Diklat audit investigatif sebanyak 2 orang.
- Pelatihan teknis pengelolaan keuangan berbasis akrual prov jateng sebanyak 1 orang.
- Pelatihan teknis standarisasi bahan pangan prov jateng sebanyak 1 orang.
- Workshop peningkatan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan daerah sebanyak 6 orang.
- Diklat fungsional direncanakan untuk 40 orang berupa diklat pengadaan barang/jasa pemerintah
- Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM) direncanakan untuk 11 orang dengan perincian Diklat PIM II untuk 1 orang; Diklat PIM III untuk 5 orang; Diklat PIM IV untuk 5 orang.

Diklat Prajabatan direncanakan 467 orang untuk formasi umum yang diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Untuk target tahun 2020 pada diklat teknis dan diklat fungsional ditargetkan jadi satu sejumlah 250 orang menyesuaikan penawaran dari Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.

Berikut ini tabel beberapa bidang Diklat Aparatur di Kabupaten Boyolali tahun 2015-2019 dan Target 2020

Tabel II.103
Diklat Aparatur Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019 dan Target Tahun 2020

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Diklat Teknis	Orang	566	459	350	40	69	0
2	Diklat Fungsional	Orang	20	8	5	24	40	0
3	Diklat Kepemimpinan	Orang	36	41	50	43	11	8
4	Diklat Pemerintah Daerah	Orang	0	0	0	0	40	0
5	Diklat Prajabatan	Orang	437	36	34	105	467	150
Jumlah							627	158

Sumber: BKP2D Kabupaten Boyolali

Pelaksanaan SKB CPNS 2019 terhenti di karenakan pandemi covid 19. Setelah pemerintah menerapkan new normal secara bertahap. kemungkinan SKB CPNS 2019 akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk waktu pelaksanaan menunggu arahan dari panselnas. Oleh karena itu anggaran pelaksanaan SKB CPNS tetap dimasukkan APBD 2020, disamping itu pelaksanaannya akan disesuaikan dengan Protokol Covid-19 untuk melindungi panitia dari terpaparnya covid 19.

Indikator kinerja Urusan Kepegawaian yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Boyolali telah mengakomodir Sistem Merit yang mencakup point penting : perencanaan kebutuhan pegawai; pengadaan pegawai; pengembangan karier dan peningkatan kompetensi; mutasi, rotasi dan demosi; pengelolaan kinerja; penggajian, penghargaan dan disiplin; perlindungan; serta sistem informasi. Hal ini ditunjukkan dengan:

- Perencanaan kebutuhan pegawai sudah sesuai dengan permintaan kementerian yaitu sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja tiap Perangkat Daerah

- Pengadaan pegawai menggunakan CAT sehingga sangat transparan dan obyektif
- Peningkatan kompetensi sudah dilakukan uji kompetensi terhadap para pejabat struktural sebagai bank data, begitu pula dengan proses promosi dan mutasi
- Sistem informasi dikelola menggunakan aplikasi SIMPEG setiap Perangkat Daerah, secara garis besar sistem merit kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan sudah dijalankan.

2.1.4.5 Fungsi lainnya

Kesekretariatan DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sebagai dukungan terhadap peningkatan kapasitas lembaga DPRD dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya.

Fungsi Legislatif/fungsi pembentukan Perda, dilaksanakan dengan cara :

- Menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati,
- Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda,
- Mengajukan usul rancangan perda.

Faktor pendukung terhadap fungsi tersebut antara lain:

- Semakin meningkatnya kualitas dan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Kualitas Pembahasan Ranperda;
- Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas kedewanan;
- Meningkatnya optimalisasi pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan;
- Untuk menjamin agar anggota DPRD adalah kader-kader yang memiliki kompetensi yang memadai perlu dibangun sistem pengembangan SDM.

Fungsi Anggaran:

Diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan Bupati. Agar hasilnya lebih optimal sesuai rencana ketepatan sangat diutamakan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam fungsi anggaran meliputi:

- Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- Membahas rancangan Perda tentang APBD,
- Membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD,
- Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Cakupan kegiatannya meliputi rapat-rapat gabungan, dengar pendapat dengan Perangkat Daerah.

Fungsi Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan :

- Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Pelaksanaan Tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Fungsi Pengawasan dilaksanakan melalui rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah, Kegiatan Kunjungan kerja untuk mendapatkan masukan tentang peran dan Penguatan Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan tupoksinya, rapat dengar pendapat umum dan pengaduan masyarakat. Manfaatnya adalah:

- Semakin meningkatnya kualitas peran dan fungsi lembaga DPRD, semakin menguatnya kapasitas kelembagaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) dalam mendukung pelaksanaan Tupoksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

- Semakin meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kode etik dan peraturan-peraturan yang ada.

Adapun langkah-langkah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali untuk mendukung Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat adalah:

- Peningkatan pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan dewan;
- Peningkatan sumber dana yang berprinsip efisien;
- Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- Perencanaan kegiatan dewan yang disesuaikan dengan keputusan tata tertib dewan;
- Peningkatan koordinasi lintas kinerja Sekretariat Dewan;
- Optimalisasi pelaksanaan koordinasi lintas Sekretariat Dewan dengan dewan;
- Peningkatan dan optimalisasi kinerja setwan dalam memfasilitasi kegiatan dewan.

Penyusunan Kebijakan, Koordinasi Administratif dan Pelayanan

Kebijakan diperlukan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat serta mewujudkan ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat. Penyusunan kebijakan Kabupaten Boyolali dituangkan melalui Penataan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan produk hukum atau regulasi daerah yang berbasis pada prolegda.

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utamanya adalah pepaduan pembangunan daerah dan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi maupun kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah, diharapkan kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum berkurang, terutama pada di wilayah perbatasan antar daerah. Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah, serta menyelesaikan permasalahan dalam daerah dan antar daerah.

Hal ini sangat relevan dengan visi Kabupaten Boyolali mewujudkan masyarakat Kabupaten Boyolali yang lebih sejahtera, berdaya saing dan pro investasi. Sehingga kerjasama daerah merupakan gerbang utama untuk membuka dan menarik investasi di Kabupaten Boyolali. Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mengoptimalkan kerjasama, baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga, telah membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD). Sejak Tahun 2015 tim telah melaksanakan tugasnya antara lain melakukan penjangkauan maupun fasilitasi pembahasan kerjasama dengan berbagai pihak baik antar daerah maupun pihak ketiga.

Kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali meliputi kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Kerjasama Kabupaten Boyolali dengan daerah lain meliputi bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian, tata ruang dan sumber daya serta lingkungan hidup, pembangunan sarana dan prasarana, perhubungan dan pariwisata, kependudukan, permukiman dari masalah sosial, air bersih, perindustrian dan perdagangan, penelitian dan pengembangan iptek, sumber daya manusia, kesehatan, pertanian dan pengairan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, perlindungan khusus terhadap anak, Java Promo, Forum Merapi, dan transmigrasi.

Kerjasama Kabupaten Boyolali dengan pihak ketiga meliputi bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan penunjukan tempat penyimpanan dan pembayaran dana.

Pembinaan dan Pengawasan

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Boyolali telah melakukan berbagai kegiatan pemeriksaan dengan pencapaian yang bervariasi. Pencapaian tersebut meliputi pemeriksaan reguler sebanyak 103 (seratus tiga) Obrik, pemeriksaan kasus/khusus dari target 32 (empat puluh) LHP dapat tercapai sebanyak 38 LHP, *Review* laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat tercapai 1 (satu) LHP, Laporan *Review* LAKIP 1 (satu) LHR, dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dapat tercapai 1 (satu) kegiatan. Lebih lanjut pada pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN) dari target 8.000 (sepuluh ribu delapan ratus) laporan, dapat tercapai 8.323 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) laporan, dan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) tercapai 1 (satu) kegiatan.

Dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang dijabarkan melalui beberapa tahapan Road Map. Dalam rangka perwujudan good governance telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 oleh pemerintah pusat yang harus diacu oleh pemerintah daerah. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Road Map tersebut telah menetapkan 8 area perubahan yang sudah diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta mind-set dan culture set aparatur.

Administrasi Umum pada Semua Perangkat Daerah

Untuk mendukung terlaksananya semua kegiatan dalam pembangunan daerah, maka administrasi umum sangat diperlukan demi kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Administrasi umum pada semua perangkat daerah meliputi kegiatan rutin yang ada di setiap Perangkat Daerah

2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

NTP pada Tahun 2014 sebesar 105, sedangkan di Tahun 2015 naik menjadi 106. Selanjutnya pada Tahun 2016 105-107, Tahun 2017 NTP tetap sebesar 105-107, Tahun 2018 102,17.

Secara umum perkembangan ekonomi makro dan prospek Ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2014-2018 dan target Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.104
Perkembangan Ekonomi dan Prospek Ekonomi
Kabupaten Boyolali Tahun 2015 –2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	PDRB :					
	Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp)	23,567	27,894	27,894	30,221	30,221*
	Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp)	18,170	19,139	20,249	21,407	21,407*
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9	5,4	5,8	5,7	5,9
3.	Inflasi (%)	7,45	3,08	3,08	2,19	2,75
4.	Indeks Gini	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,03	NA	3,67	2,16	3,12
6.	Kemiskinan	12,45	11,96	11,96	10,04	9,53
7.	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,34	101,77	107,87	NA	NA

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali.

2.1.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Capaian Aspek Daya Saing Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/infrastruktur Bidang Perhubungan adalah Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan untuk pada Tahun 2017 sebesar 0,039 dan untuk Tahun 2018 sebesar 0,008. Rasio diperoleh dari jumlah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan Tahun 2019 sebesar 0,002 target tahun 2020 sebesar 0,038. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Tahun 2017

sebanyak 1.250.000 orang, Tahun 2018 sebanyak 776.304 orang, dan Tahun 2019 sebanyak 548.818 orang target tahun 2020 sebanyak 600.000 orang/tahun. Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun, Tahun 2017 sebanyak 6.800.000 orang, Tahun 2018 sebanyak 776.304 orang, dan Tahun 2019 sebanyak 777.304 orang target tahun 2020 sebanyak 600.000 orang/tahun. Berikut ini tabel Fokus Fasilitas Bidang Perhubungan di Kabupaten Boyolali tahun 2017-2019 :

Tabel II.105
 Capaian Aspek Daya Saing Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Bidang Perhubungan Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Volume/ Kapasitas	0,033	0,038	0,039	0,008	0,002	0,038
2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang (barang)	1.562 .966	1.456. 500	1.250. 000	776.30 4	548.818	600.00 0
3	Jumlah orang/barang melalui terminal per Tahun	Orang (barang)	6.870 .247	6.817. 262	1.250. 000	776.30 4	548.818	600.00 0

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali

Capaian Aspek Daya Saing Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Bidang Komunikasi dan Informatika adalah Rasio ketersediaan daya listrik Tahun 2018 sebesar 250.000 VA, prosentase ini diperoleh dari jumlah daya listrik terpasang dibagi jumlah daya listrik tersedia/kebutuhan satuan VA. Untuk Tahun 2019 rasio ketersediaan daya listrik yaitu sebesar 300.000 VA. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Tahun 2018 sebesar 92%, sedangkan Tahun 2019 sebesar 95%. Untuk Tahun 2020, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik ditargetkan sebesar 95%.

Tabel II.106
 Capaian Aspek Daya Saing Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

No	Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	HASIL					Target 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Rasio ketersediaan daya listrik	VA	140.555	214.605	220.000	250.000	300.000	450.000
2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	85	89	90	92	95	95

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Boyolali

2.1.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Diharapkan angka kriminalitas yang terjadi turun prosentasenya dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan masalah keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif untuk ditinggali dan untuk berinvestasi.

Capaian jumlah demo yang berkurang dibanding tahun sebelumnya karena diasumsikan masyarakat semakin puas terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Boyolali maupun Pemerintah Pusat yang berimplikasi ke daerah.

Tabel II.107
 Capaian Aspek Daya Saing Daerah Fokus Iklim Berinvestasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 dan Target Tahun 2020

No	Bidang Urusan /Indikator	Satuan	HASIL					TARGET 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Angka kriminalitas	%	80	80	80	80	80	80
2	Jumlah demo	Kali	3	3	2	2	2	2
3	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Pajak Daerah	11	11	11	11	11	11
		Retribusi umum	10	7	7	7	7	7
		Retribusi usaha	10	10	10	10	10	10
		Retribusi Perijinan	3	2	2	1	1	1
4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda	0	0	2	2	1	1

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Boyolali

2.1.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu indikator pembangunan pada bidang Sumber Daya Manusia adalah tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan).

Ketergantungan dalam hal ini adalah ketergantungan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup seseorang karena tidak memiliki penghasilan sendiri. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-15 ditambah jumlah penduduk di atas usia 64 tahun dibagi jumlah penduduk usia 15-64 tahun kali 100.

Rasio ketergantungan pada Tahun 2017 sebesar 50,70% yang berarti bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung sekitar 51 orang yang belum atau sudah tidak produktif lagi. Kondisi ini relatif stabil jika dibandingkan denganTahun 2016 yang berada pada angka 52,30%.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD

Evaluasi Pelaksanaan RKPD bermaksud untuk mengetahui sejauh mana Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Boyolali sampai dengan Triwulan IV. Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2019 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2019 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi maupun nasional Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Boyolali mempunyai 60 Perangkat Daerah (termasuk 10 Bagian di Sekretariat Daerah) dan 6 Kelurahan, sehingga total kuesioner evaluasi RKPD yang disebarakan sejumlah 60 buah. Capaian pelaksanaan RKPD Kabupaten Boyolali 2019 sampai dengan Triwulan IV per Perangkat Daerah tersaji pada tabel berikut:

Tabel II.108
Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2019

No	OPD	TOTAL			REALISASI KEUANGAN		REALISASI I FISIK
		(dalam APBD)					
		Program	Kegiatan	Anggaran	Rupiah	%	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	63	164,777,988,000	133,000,824,814	80.72	98.57
2	Dinas Kesehatan	17	52	105,989,017,000	96,756,269,002	91.29	98.83
3	Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang	2	3	115,187,434,000	104,944,255,901	91.11	95
4	Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris	3	4	28,476,072,000	25,724,649,910	90.34	97.5
5	Rumah Sakit Umum Daerah Simo	2	4	39,967,934,000	37,791,480,267	94.61	75

No	OPD	TOTAL			REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
		(dalam APBD)			Rupiah	%	K (%)
		Program	Kegiatan	Anggaran			
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15	38	246,908,952,000	241,329,245,195	97.74	94.48
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	6	23	4,136,764,000	4,066,524,797	98.3	204.03
8	Satuan Polisi Pamong Praja	6	23	4,676,545,000	4,406,050,547	95.23	100
9	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	8	34	1,661,771,000	1,506,961,756	90.71	98.82
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	43	9,208,354,000	4,502,544,602	48.9	98.84
11	Dinas Sosial	9	36	4,378,623,000	4,060,047,881	92.72	100
12	Dinas Ketahanan Pangan	5	31	2,310,086,000	2,233,538,431	96.69	100
13	Dinas Lingkungan Hidup	11	44	42,778,842,000	38,432,087,854	89.84	97.43
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	35	6,829,019,000	6,386,781,545	93.52	97
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10	34	9,035,270,000	8,532,048,567	94.43	115.84
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	15	44	7,912,120,000	6,998,280,058	88.45	92.83
17	Dinas Perhubungan	10	37	31,749,796,000	31,246,268,937	98.41	97.3
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	31	15,395,040,000	14,196,735,466	92.22	100
19	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	11	47	4,527,554,000	4,453,220,974	98.36	98.62
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	28	1,764,156,000	1,675,752,638	94.99	100
21	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	10	40	35,117,883,000	34,898,704,838	99.38	81.25
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9	30	4,451,040,000	4,362,470,405	98.01	96.77
23	Dinas Pertanian	9	42	13,440,949,000	13,125,342,921	97.65	100
24	Dinas Peternakan dan Perikanan	7	31	5,370,025,000	5,255,218,921	97.86	100
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11	39	63,793,133,000	62,356,171,245	97.75	81.93
26	Kepala Daerah dan Wakil	3	22	2,849,180,000	2,186,828,244	76.75	95.45
27	Sekretariat Daerah	23	75	15,647,622,000	13,917,559,693	81.19	97.71
28	Sekretariat DPRD	5	30	29,083,167,000	28,680,458,224	98.62	96.94
29	Kecamatan Boyolali	14	35	701,252,000	684,593,222	97.62	99.85
30	Kelurahan Banaran	8	24	1,338,338,000	1,260,020,291	94.15	98.61
31	Kelurahan Pulisen	7	22	1,319,991,000	1,306,545,368	98.98	80.34
32	Kelurahan Siswodipuran	6	22	1,649,506,000	1,620,039,831	98.21	91.55
33	Kecamatan Musuk	13	35	1,401,201,000	1,349,433,725	96.31	86.46
34	Kecamatan Mojosongo	12	33	1,517,115,000	1,460,918,688	96.3	94.39
35	Kelurahan Mojosongo	7	23	1,856,890,000	1,835,071,474	98.82	95.06
36	Kelurahan Kemiri	8	24	1,490,401,000	1,452,660,225	97.47	93.75
37	Kecamatan Teras	14	37	1,101,739,000	1,083,178,747	98.32	99.72
38	Kecamatan Banyudono	14	32	2,004,678,000	1,951,464,218	97.35	91.25
39	Kecamatan Sawit	14	33	1,141,551,000	1,112,603,502	97.46	97.48
40	Kecamatan Sambu	14	36	1,635,080,000	1,596,961,867	97.67	86.99
41	Kecamatan Ngemplak	14	36	920,694,000	886,349,695	96.27	99.29
42	Kecamatan Simo	12	30	767,031,000	735,869,624	95.94	100
43	Kecamatan Nogosari	14	36	889,607,000	865,507,596	97.29	93.78
44	Kecamatan Klego	13	37	962,292,000	937,227,907	97.4	100
45	Kecamatan Andong	16	41	1,075,480,000	1,038,690,733	96.58	100
46	Kecamatan Wonosegoro	14	35	2,149,525,000	1,999,586,046	93.02	97.14

No	OPD	TOTAL			REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
		(dalam APBD)			Rupiah	%	K (%)
		Program	Kegiatan	Anggaran			
47	Kecamatan Karanggede	14	32	760,400,000	742,613,231	97.66	90.63
48	Kecamatan Kemusu	14	35	985,706,000	969,050,919	98.31	97.44
49	Kecamatan Juwangi	13	32	1,031,677,000	989,364,353	95.9	91.72
50	Kelurahan Sambeng	7	20	1,368,501,000	1,134,140,309	82.87	78.32
51	Kecamatan Ampel	14	36	1,460,789,000	1,404,398,921	96.14	100
52	Kecamatan Cepogo	8	19	989,527,000	956,829,188	96.7	100
53	Kecamatan Selo	14	36	746,835,000	732,894,287	98.13	97.18
54	Kecamatan Gladagsari	11	32	212,183,000	148,427.168	69.95	100
55	Kecamatan Tamansari	13	30	340,179,000	310.295.588	91.22	100
56	Kecamatan Wonosamodro	12	30	622,397,000	480,035,585	77.13	163.68
57	Inspektorat Daerah	5	32	2,131,462,000	1,765,021,082	82.81	77.44
58	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	16	46	4,328,137,000	4,085,821,918	94.4	100
59	Badan Keuangan Daerah	7	53	42,640,553,000	37,606,230,545	88.19	83.77
60	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	8	37	11,353,486,000	8,304,041,319	73.14	94.59
	Total	610	2.014	1.110.381.539.000	1.019.832.210.805	92.56	98.18

Sumber: Data Analisis BP3D

Jumlah anggaran APBD 2019 sejumlah Rp.1.110.381.539.000,00 ini termasuk anggaran yang ada di 6 kelurahan yaitu sejumlah Rp 9.023.627.000,00. Sebagai catatan, anggaran untuk 6 kelurahan tersebut sudah masuk dalam RKPD Kabupaten Boyolali 2019 dan sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Boyolali 2019. Perincian untuk alokasi untuk masing-masing tersebut adalah sebagai berikut: Kecamatan Boyolali mencakup Kelurahan Banaran sebesar Rp 1.338.338.000,00. Kelurahan Siswodipuran sebesar Rp 1.649.506.000,00 dan Kelurahan Pulisen sebesar Rp 1.319.991.000,00. Kecamatan Mojosongo terdiri dari Kelurahan Mojosongo sebesar Rp 1.856.890.000,00 dan Kelurahan Kemiri sebesar Rp 1.490.401.000,00 Kecamatan Juwangi terdiri dari Kelurahan Sambeng sebesar Rp 1.368.501.000,00.

Adapun kesesuaian kegiatan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2019 sampai dengan Triwulan 4 (semester 2) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 terangkum pada tabel berikut:

Tabel II.109
Rekapitulasi Kesesuaian Kegiatan
antara RKPD dan APBD Tahun 2019 (Perubahan)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / UNIT ORGANISASI /UPT	Direncanakan dalam RKPD		Didanai APBD
		Didanai APBD	Tidak Didanai APBD	Tidak ada RKPD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63	9	0
2	Dinas Kesehatan	54	0	0
3	Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang (ABPD)	3	0	0
4	Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris (ABPD)	4	1	0
5	Rumah Sakit Umum Daerah Simo (ABPD)	1	1	0
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37	1	0
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	23	2	0
8	Satuan Polisi Pamong Praja	23	8	0
9	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	34	0	0
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43	13	0
11	Dinas Sosial	36	1	0
12	Dinas Ketahanan Pangan	31	0	0
13	Dinas Lingkungan Hidup	44	0	0

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / UNIT ORGANISASI /UPT	Direncanakan dalam RKPD		Didanai APBD
		Didanai APBD	Tidak Didanai APBD	Tidak ada RKPD
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	35	1	0
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34	2	0
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	44	7	0
17	Dinas Perhubungan	37	1	0
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	31	2	0
19	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	47	2	0
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28	1	0
21	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	40	8	0
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	30	6	0
23	Dinas Pertanian	42	0	0
24	Dinas Peternakan dan Perikanan	31	12	0
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	39	1	0
26	Kepala Daerah dan Wakil	21	0	0
27	Sekretariat Daerah	75	7	0
36	Sekretariat DPRD	30	0	0
37	Kecamatan Boyolali	35	0	0
38	Kelurahan Pulisen	22	2	0
39	Kelurahan Siswodipuran	22	1	0
40	Kelurahan Banaran	24	4	0
41	Kecamatan Musuk	35	1	0
42	Kecamatan Mojosongo	33	0	2
43	Kelurahan Kemiri	24	2	0
44	Kelurahan Mojosongo	23	2	0
45	Kecamatan Teras	37	0	3
46	Kecamatan Banyudono	32	0	1
47	Kecamatan Sawit	33	0	0
48	Kecamatan Sambu	36	0	2
49	Kecamatan Ngemplak	36	0	2
50	Kecamatan Simo	30	1	0
51	Kecamatan Nogosari	36	0	0
52	Kecamatan Klego	37	0	1
53	Kecamatan Andong	41	0	0
54	Kecamatan Wonosegoro	35	3	0
55	Kecamatan Karanggede	32	1	0
56	Kecamatan Kemusu	35	1	0
57	Kecamatan Juwangi	32	0	0
58	Kelurahan Sambeng	20	8	0
59	Kecamatan Ampel	36	0	2
60	Kecamatan Cepogo	19	16	0
61	Kecamatan Selo	36	2	0
62	Kecamatan Gladagsari	32	3	0
63	Kecamatan Tamansari	30	1	0
64	Kecamatan Wonosamodro	30	0	2
65	Inspektorat Daerah	32	2	0
66	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	45	11	0
67	Badan Keuangan Daerah (SKPD)	52	12	0
68	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	37	8	0
Jumlah		1.999	167	15

Sumber: Olah Data BP3D

Dari hasil Evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

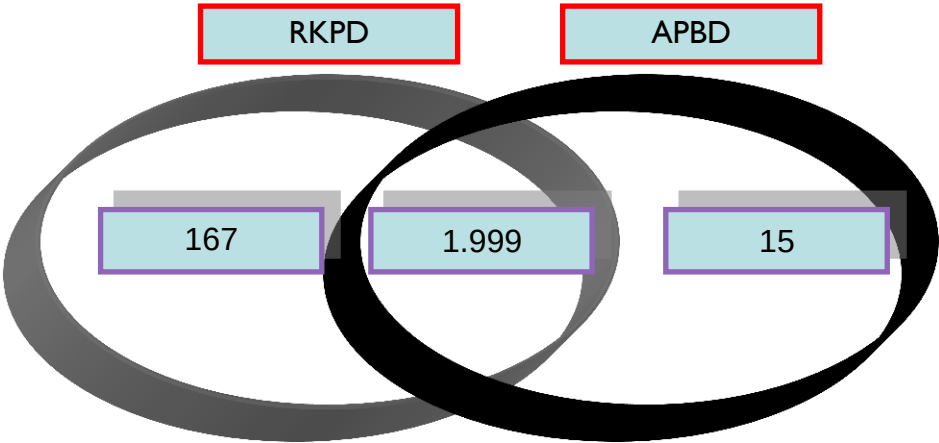
- 1. Kegiatan yang direncanakan di Perubahan RKPD Tahun 2019 dan kemudian ditindaklanjuti dalam Perubahan APBD Tahun 2019 sebanyak 1.999 kegiatan.
- 2. Kegiatan yang direncanakan di Perubahan RKPD Tahun 2019 namun tidak masuk dalam Perubahan APBD Tahun 2019 sebanyak 167 kegiatan.
- 3. Kegiatan Perubahan APBD Tahun 2019 yang tidak direncanakan dalam RKPD Perubahan Tahun 2019 sebanyak 15 kegiatan.

Dari uraian diatas dapat digambarkan irisan sebagai berikut:

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 1.999 kegiatan, dengan tingkat kesesuaian kegiatan = $(1.999/2.014) \times 100\% = 99,25\%$.

2.2.2 Realisasi Capaian RPJMD

Untuk realisasi capaian RPJMD 2016-2021 pada pelaksanaan RPJMD Tahun 2019 tersaji pada Tabel II.116 berikut:



Tabel II.110
Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2019
Kabupaten Boyolali

No .	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	Target Akhir RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	Tingkat Capaian RPJMD s.d Th 2019	PD PELAKSANA
1.1	Pendidikan							DISDIKBUD
		Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun	%	82.00	79,87	75,6	92.20	
		Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/ Paket A	%	102.50	101	102,72	99.21	
		Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/ Paket B	%	100.20	97,6	102,88	102.67	
		Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/ Paket A	%	87.50	86,5	92,62	104.95	
		Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ SMPLB/Paket B	%	75.50	71,5	84.52	133.51	
		Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah	%	0.03	0,03	0,004	100	
		Persentase peserta didik SMP/ SMPLB putus sekolah	%	0.15	0,2	0,03	140	
		Persentase lulusan SD/ sederajat yang melanjutkan ke jenjang SMP	%	99.50	99,15	99,75	100.09	

		Persentase RK SD dalam kondisi baik	%	95.00	94,22	91,82	98.62	
		Persentase Ruang Kelas SMP kondisi baik	%	98.70	98,10	85,32	90.07	
		Persentase guru SD bersertifikat pendidik	%	62.50	57,16	55,61	88.48	
		Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	%	75.00	68,44	72,02	97.47	
		Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD	%	20.00	20	14,25	68.65	
		Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP	%	20.00	20	16,7	84.50	
		Presentase Buta Aksara > 15 tahun	%	0.15	0,21	0,32	125.67	
		Presentase SD Berakreditasi minimal B	%	95.00	93,75	87,79	103.47	
		Presentase SMP berakreditasi minimal B	%	85.00	83,75	82,11	96.60	
1.2	Kesehatan							Dinkes
		Cakupan kunjungan bayi	%	95	90	99.96	105.22	
		Cakupan pelayanan anak balita	%	95	90	99.96	105.22	
		Prosentase Puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia	%	100	100	100	100	
		Prosentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	90	90	95	105.56	
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat/ penduduk miskin	%	40	39,6	43.14	107.85	
		Prosentase ketersediaan obat dan persediaan kesehatan	%	90	90	94	104.44	
		Proporsi pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian	%	45	45	42	93.33	
		Proporsi pembinaan dan pengawasan Produksi, distribusi makanan, dan minuman	%	45	45	48	106.67	
		Angka kesakitan DBD (<i>Incident rate</i> /IR)	Per 100.000	47.5	48	43.17	109.12	
		Angka kematian DBD (CFR)	% dari jumlah penderita	1.6	1,7	0.23	185.63	
		Prosentase Jumlah orang yang dites HIV dan menerima hasil dari kelompok resiko	%	50	30	77.4	154.80	
		Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi	%	>85	75	84.72	99.67	
		Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu	%	50	40	50	100	

		PTM						
		Cakupan Desa UCI	%	100	100	100	100	
		Puskesmas Terakreditasi	Pusk	10	6	6	290	
		Cakupan Rawat Jalan (Pusk)	%	15	15	25	166.67	
		Cakupan Rawat Inap (Pusk)	%	1.5	1,5	2.48	165.33	
		Cakupan respon aduan kegawat daruratan kesehatan yang ditangani	%	90	90	100	111	
		Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Masyarakat)	%	100	100	100	100	
		Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Perorangan)	%	100	100	100	100	
		Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Pemenkes	%	20.69	13,79	13.79	66.65	
		Dokter dan tenaga kesehatan dikirim pelatihan	Orang	50	30	36	164	
		Rasio dokter	%	17.0	16	1.8	94.12	
		Rasio dokter gigi	%	5.9	5,1	0.3	84.75	
		Rasio perawat	%	100.3	95,3	92	91.72	
		Rasio bidan	%	58.4	57,2	56	95.89	
		Prosentase Puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi	%	100	60,0	100	100	
		Cakupan Desa/ Kel Siaga Aktif Mandiri	Desa	120	93	94	89.17	
		Proporsi Rumah tangga sehat	%	75	73	122.8	163.73	
		Cakupan Desa STBM	Desa	267	175	212	79.40	
	RSUD PA	Tingkat hunian (<i>Bed Occupancy Rate/ BOR</i>)	%	73	71	65.03	77.22	
	RSUD PA	Lama tinggal (<i>Length of Stay/ LOS</i>)	Hari	5	4.53	3.27	145.50	
	RSUD PA	<i>Turn Over Internal</i> (TOI)	Hari	2	1,88	1,8	90.00	
	RSUD PA	Bed Turn Over (BTO)	Pasien(kali)	46	45,7	95,53	159.72	
	RSUD PA	Angka kematian murni (<i>Net Death Rate/ NDR</i>)	%	0	0,24	1,3	81.82	
	RSUD PA	<i>Gross Death Rate</i> (GDR)	%	1	0,80	3,1	45.77	
	RSUD PA	Pemenuhan standar sarana dan prasarana rumah sakit	%	80	70	35	36.84	
	RSUD PA	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit	%	85	72	50,18	52.82	

	RSUD WW	Tingkat hunian (<i>Bed Occupancy Rate/ BOR</i>)	%	82.21	83,7	58.4	77.91	
	RSUD WW	Lama tinggal (<i>Length of Stay/ LOS</i>)	Hari	6	4,2	4,2	70	
	RSUD WW	<i>Turn Over Internal</i> (TOI)	Hari	2	1,58	2,6	130	
	RSUD WW	<i>Bed Turn Over</i> (BTO)	Pasien (kali)	59.81	63,88	51,6	106.88	
	RSUD WW	Angka Kematian Murni (<i>Net Death Rate/ NDR</i>)	%	1.1	1,27	2.1	-220	
	RSUD WW	<i>Gross Death Rate</i> (GDR)	%	2.01	2,18	4,09	-209	
	RSUD WW	Pemenuhan standar sarana dan prasarana rumah sakit	%	95	85	80	75	
	RSUD WW	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit	%	95	85	75	70	
	RSUD SIMO	Tingkat hunian (<i>Bed Occupancy Rate/ BOR</i>)	%	75	73	51	69.72	
	RSUD SIMO	Lama tinggal (<i>Length of Stay/ LOS</i>)	Hari	6	5,5	3	133.48	
	RSUD SIMO	<i>Turn Over Internal</i> (TOI)	Hari	2	2	2	104.17	
	RSUD SIMO	<i>Bed Turn Over</i> (BTO)	(kali)	48	47	10,94	10.85	
	RSUD SIMO	Angka kematian murni (<i>Net Death Rate/ NDR</i>)	%	0.5	0,7	4,5	200	
	RSUD SIMO	<i>Gross Death Rate</i> (GDR)	%	1	1,5	2,1	63.01	
	RSUD SIMO	Pemenuhan standar sarana dan prasarana rumah sakit	%	100	80	0	125	
	RSUD SIMO	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit	%	100	75	0	94.12	
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							DPU PR DISHUB
		Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) yang melaksanakan pengelolaan irigasi secara partisipatif	Kelompok	16	3	2	75	
		Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	417.28	407,45	222,143	53.24	
		Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kab boyolali dengan pembangunan jalan baru (km)	Km	7.125	1.796	2.774	159.41	
		Panjang talud tebing sungai yang dibangun	Km	7.032	1.405	0.37	26.18	
		Panjang Talud jalan yang dibangun	Km	5.834,63	601,00	800,75	81.89	
		Panjang Jaringan Jalan yang dipertahankan Dalam Kondisi baik	Km	131.20	20	96	127.44	
		Panjang drainase dibangun sebagai bangunan pelengkap jalan	Km	8.240	7.240	315	3.82	
		Luas sawah yang dapat dialiri air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	Ha	8737.67	8.626,36	5.172,8	59.20	

		Tersedianya air baku Melalui pembangunan embung	Unit	49	8	10	73.47	
		Bertambahnya sanitasi berupa IPAL	Unit	34	6	6	64.71	
		Tersedianya data potensi air bawah tanah (data potensi air tanah/Sumur Uji)	Dokumen	16	3	3	100	
		Sambungan Rumah terbangun untuk mendapatkan akses air minum yang aman/Cakupan rumah tangga pengguna air bersih	Unit	425	375	960	225.88	
		Penambahan titik lampu	titik lampu	10.240	2.000	1.358	39.92	
		Desa/kelurahan Terbangun infrastrukturnya	Desa	100	20	261	301	
		SIUJK yang diterbitkan	Lembar	245	40	55	75.10	
		Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Dokumen	11	2	5	118.18	
		Tersusunnya peta dasar RDTR	Dokumen	8	2	1	137.50	
		Pelayanan Legalisasi rekomteks IMB	Rekomenda si	1.440	240	400	79.17	
		Pelayanan Legalisasi site plan	Dokumen	288	48	48	47.22	
1.4	Perumahan dan Kawasan Pemukiman							DPKP
		Terwujudnya pembangunan rumah tidak layak huni	Unit	1.875	300	781	133.71	
		Terwujudnya bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi Gakin	Unit	6.000	1000	832	78.67	
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							SATPOL PP, KES BANGPOL, BPBD & BAG. KESRA
		Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani	%	100	71,43	71,43	71.43	
		Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	%	100	97,56	100,45	98.00	
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	%	82.00	80	85	82.93	
		Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	%	100	76,74	93,48	72.40	
		Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Kegiatan	190	22	38	61.06	
		Kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian kebisingan dan pengendalian keamanan lingkungan	Kegiatan	18	3	3	66.67	
		Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	Kegiatan	95	19	19	60	

		Kegiatan <i>event</i> pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan.	Kegiatan	120	20	20	66.67	
		Cakupan penyelesaian konflik antar umat beragama	%	100	100	100	100	
		Cakupan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	%	2.21	1,58	1.6	72.40	
		Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat	Kegiatan	90	15	15	66.67	
		Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan	Skor	27.5	24,7	26	94.70	
		Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Skor	12.1	10,90	13	107.25	
		Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Skor	39.6	35,6	40	101.07	
		Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Skor	15.4	13,8	18	117.16	
		Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Skor	30.2	27,2	30	99.20	
		Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana	Skor	12.1	10,9	14	80.33	
		Ketersediaan kebijakan (Buah)	Buah	27	5	27	115.50	
		Ketersediaan lembaga (buah)	Buah	25	11	0	116	
		Tingkat waktu tanggap rata-rata se-Kabupaten	Menit	225	35	30	75.56	
1.6	Sosial							DINSOS
		Persentase fakir miskin yang diberdayakan	%	35	29	63,2	180.57	
		Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	%	35	29	87.5	250	
		Prosentase Penyandang disabilitas yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan sosial	%	48	8	7.5	81.85	
		Pelayanan dan pembinaan bagi panti asuhan	panti	16	16	16	100	
		Meningkatnya pemahaman PSKS dalam penanganan PMKS serta peran aktif dan kepedulian masyarakat dalam UKS	Desa	16	16	16	100	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
2.1	Tenaga Kerja							DINKOPNAKER
		Cakupan perusahaan yang membayar sesuai regulasi	%	100	100	97	97	
		Penempatan pencari kerja yang terdaftar (jiwa)	Jiwa	16.500	2800	115.70	4796	
		Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya	orang	1.440	240	168.89	1056	
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							DP2KBP3A
		Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Bagi	%	21	16	76.19	32	

		Perempuan Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera						
		Peningkatan Pemahaman tentang Kesetaraan gender dalam pembangunan.	Organisasi Wanita	87	15	51.72	15	
		Pemenuhan Hak Anak.	Desa	159	28	59.12	28	
		Meningkatnya penanganan kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	
		Peningkatan Kapasitas jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak.	%	100	58	116	55	
2.3	Pangan							DKP
		Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	%	26.97	23.22	23.22	23.22	
		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	92	90	97.93	90.1	
		Kelompok tani yang meningkat kelas kelembagaannya	Kelompok	600	100	67.67	102	
		Balai Penyuluhan yang meningkat kelas kelembagaannya	Unit BP3K	21	4	66.67	4	
2.4	Pertanahan							DPU PR & Bag Pembangunan
		Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan	%	80	62	121.25	97	
		Terlaksananya fasilitasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.	%	100	100	100	100	
		Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan	Dokumen	5	1	140	5	
2.5	Lingkungan Hidup							DLH
L,		Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan	m2	1.437.322	1.384.322	98.64	1.417.734	
		% ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	3.21	3,09	98.27	3,15	
		Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki rekomendasi UKL/UPL, kelayakan Amdal, dan atau izin lingkungan	pelaku usaha	233	40	209	487	
		Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	

		Data SDA dan LH	paket	6	1	83.33	5	
		Hasil perhitungan beban pencemaran yang meliputi parameter BOD, COD, TSS air sungai dan waduk	BOD mg/L (100%)	6	6	100	6	
			COD mg/L (100%)	50	50	100	50	
			TSS mg/L (100%)	400	400	100	400	
		hasil uji kualitas udara ambien (SO2, CO, NO2, TSP)	SO2 ug/Nm3 (100%)	632	632	100	632	
			CO ug/Nm3 (100%)	15000	15000	100	15000	
			NO2 ug/Nm3 (100%)	316	316	100	316	
			TSP ug/Nm3 (100%)	230	230	100	230	
		Peningkatan cadangan air tanah	unit	9.240	1.540	55.44	5123	
		Cakupan wilayah yang melakukan pengelolaan sampah mandiri di lingkungan perkotaan	desa/kel	12	2	75	3	
		Persentasi Pengurangan persampahan	%	19.73	2	103.29	2	
		Persentasi Pengangkutan Sampah	%	69.30	12,42	117.29	12,42	
		Persentasi Pengelolaan TPA	%	65.53	0,18	91.81	0,00	
2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							DISDUKCAPIL
		Cakupan penerbitan kartu keluarga	%	100	100	100	100	
		Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	%	100	98	99.43	101,46	
		cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran penduduk usia 0-18th	%	95	90	95.09	90,34	
		Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran dari jumlah penduduk	%	85	75	76.73	86,96	
		Cakupan penerbitan kutipan akte kematian	%	10	7	1000	100	
		Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	%	100	100	81	81	
2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							DISPERMASDES
		Kemampuan kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K).	Desa	322	55	174.84	95	
		Pembangunan infrastruktur desa yang difasilitasi pelaksanaannya	Desa	35	6	66.67	6	
		Kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan	Desa	317	55	108.20	53	

		masyarakat						
		Jumlah TTG/Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Inovasi	36	6	66.67	6	
		Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.	Kec.	19	19	115.79	22	
		Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.	Kec.	19	19	115	22	
		Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	Orang	460	80	138.91	122	
		Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha utk mendukung kebutuhan masyarakat	Kec/Desa	285	57	66.67	57	
		Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat	Kelompok	152	132	111.18	169	
		Cakupan pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan	%	50	40	0	0	
		Pengurus PKK Desa/Kelurahan kemampuannya meningkat.	Desa	323	55	63.47	55	
		Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Kecamatan	19	19	115.79	22	
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							DP2KBP3A
		Meningkatnya Kualitas Tribina	%	21	21	100	21	
		Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Dokumen	18	3	66.67	3	
		Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Kegiatan	6	1	66.67	1	
		Meningkatnya Pelayanan KB	%	80	77	89.88	71,9	
		Pelayanan KB (Peran PPKBD)	%	100	100	100	100	
		Capaian Peserta KB MKJP	%	100	100	100	100	
		Cakupan Jumlah Kelompok KRR Yang Aktif	%	100	56,63	56.63	56,63	
		Berkembangnya Kelompok PIK Remaja.	Kelompok	72	13	50	13	
		Cakupan Pemahaman Perempuan dan Remaja tentang Narkoba dan HIV/AIDS	%	100	100	100	100	

		Terpenuhinya Dokumen rumusan kebijakan kependudukan	Dokumen	10	2	60	2	
		Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah	Kegiatan	10	2	60	2	
		Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kependudukan dan KB	Dokumen	25	5	60	5	
		Meningkatnya Pemahaman terhadap Informasi Kependudukan dan KB	Kegiatan	5	1	60	1	
2.9	Perhubungan							DISHUB
		Tersedianya sarpras pelayanan angkutan umum	Buah	132	22	87	21	
		Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ	Buah	72	12	66.67	12	
		Tersusunnya dokumen kajian perhubungan	Dokumen	13	3	69.23	3	
		Tersedianya sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan	%	100	100	100	100	
		Tersedianya kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor	%	100	100	100	100	
2.10	Komunikasi dan Informatika							DISKOMINFO
		Tersedianya kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	52	50	96.15	50	
		Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan daerah	%	93	91	97.85	91	
		Rumusan kebijakan teknis kerjasama informasi dengan media massa	Dokumen	40	6	70	6	
		Tersedianya sarana telekomunikasi dan informasi yang mendukung pelayanan kepada masyarakat	%	77	65	109.09	84	
		Cakupan publikasi hasil-hasil pembangunan	%	100	100		100	
		Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi dan protocol	Dokumen	43	7	48.84	10	
2.11	Koperasi dan UMKM							DINKOPNAKER
		UMKM yang melaksanakan pola kemitraan	UMKM	11	2	109.09	7	
		SDM UMKM yang terlatih	UMKM	180	30	150	150	
		Koperasi yang di bina yang meningkat nilai kesehatannya	Koperasi	295	50	64.41	35	
		Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit	Koperasi	175	30	200.57	56	
2.12	Penanaman Modal							DPMPSTP
		Rata - rata lama pengurusan perijinan	hari	7	7	100	7	
		Peningkatan jumlah tenaga kerja bagi perusahaan yang	TK	64.684	10.927	56.67	15.113	

		mempunyai ijin						
		Peningkatan nilai investasi	Rp	1.475.475.174	1.340.857.301	93.13	1.374.046.105.185	
		Peningkatan jumlah investor	Inventor	1.043	983	285.15	1.747	
		Meningkatnya sarana dan prasarana promosi	Paket	2	-	150	1	
		Penambahan jumlah produk hukum daerah yang pro investasi	dok	5	1	80	2	
2.1 3	Kepemudaan dan Olahraga							DISPORAPAR
		Pemuda mendapat penghargaan tingkat Provinsi	orang	52	9	111.54	53	
		Jumlah Pemuda dalam Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)	orang	32	6	56.225	18	
		Peringkat PORDA	Peringkat	8	9	112.50	7	
		Bertambahnya Cabang Olahraga	Pengurus cabang	6	1	83.33	5	
		Bertambahnya lapangan olahraga	lapangan	18	3	55.56	10	
2.1 4	Statistik							DISKOMINFO
		Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	Dokumen	42	7	57.14	10	
2.1 5	Persandian							
		Terlaksananya fasilitasi layanan persandian	%	100	100	100	100	
2.1 6	Kebudayaan							DISDIKBUD
		Budaya tradisi lokal yang dilestarikan	Budaya	12	10	100	12	
		Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan	%	100	96	178	80	
		Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Tempat	59	11	66.10	12	
		Pelaku seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	Group	240	41	75.83	66	
		Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya	kali	339	58	66.67	57	
		Event seni dan budaya	kali	24	4	87.50	5	
2.1 7	Perpustakaan							DISPUSARSIPDA
		Peningkatan upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca	orang	35.000	33.000	87.63	30.669	
2.1 8	Kearsipan							DISPUSARSIPDA
		Tertibnya penyimpanan arsip dinamis in aktif dari satuan kerja	%	25	15	56	14	
		Peningkatan pemahaman pengelolaan kearsipan bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kab. Boyolali	%	100	100	95	95	
		Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan	%	100	100	100	100	

		kearsipan dilinkungan Pemerintah Kab. Boyolali						
		Tertibnya penyimpanan arsip in aktif dari satuan kerja	%	100	100	100	100	
3	Urusan Pilihan							
3.1	Kelautan dan Perikanan							DISNAKKAN
		Meningkatnya produksi ikan (ton)	Ton	33.602	30,478	108.36	36,410	
		Meningkatnya produk olahan ikan (ton)	Ton	409	70	72.86	99	
3.2	Pariwisata							DISPORAPAR
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara.	Orang	452.731	443.811	132.02	597.689	
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara.	Orang	2.117	2.064	22.91	485	
		Prosentase sarana dan prasarana pariwisata yang layak	%	85	70	70.59	60	
		Potensi wisata yang akan dibangun menjadi obyek wisata	Obyek	2	1	100	2	
		Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha pariwisata	%	19	5	151.74	28.83	
		Cakupan Sarana Promosi Pariwisata yang dikembangkan	%	100	100	100	100	
		Kerjasama Promosi antar daerah	Forum	12	2	83.33	10	
		Desa Wisata	Desa	33	6	84.85	28	
		Kelompok Sadar Wisata	Kelompok	83	15	67.47	56	
3.3	Pertanian							DISPERTAN
		Produksi pangan utama (Ton) : Padi	Ton	298	292.987	98.31	293.695	
		Produksi pangan lainnya :	Ton					
		- Jagung		138.456	137.082	100.76	139.506	
		- Kedelai		6.898	6.829	81.30	5.608	
		Produksi tanaman hortikultura utama	Kuintal					
		- Pepaya		126.121	123.636	222.24	280.286	
		- Cabe		115.611	113.333	585.56	676.973	
		- Bawang Merah		31.530	30.909	583.09	183.847	
		- Jahe		10.773	10.561	220.76	23.782	
		- Kencur		17.342	17.000	154.76	26.838	
		Jumlah produksi tanaman perkebunan :	Ton					

		- Cengkeh		382.88	347,29	142.86	547	
		- Kopi		153.15	138,92	241.59	370	
		- Kelapa		5.572.25	5.054,19	83.48	4.651,73	
		- Tembakau		5.234.03	4.747,42	141.46	7.404	
		- Tebu		36.246.40	32.876	70.11	25,412	
		- Lada		24.25	21,99	74.02	17,95	
		- Atsiri	kuintal	59.99	54,41	96.67	57,39	
		Volume perdagangan produk usaha pertanian	Ton	83.857.78	78.298,13	297.33	249.336	
		Cakupan petani yang mendapat pelatihan, bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu	Orang	1.219	1.062	118.13	1.440	
		Meningkatnya produksi daging	Ton	8.460	8.345	167.09	14.135	
		Meningkatnya produksi susu (kilo liter)	Kilo liter	48.201	47.526	103.07	49.680	
		Pertambahan populasi ternak sapi, kambing dan domba	Ekor	320.731	316.181	111.47	357.517	
		Sapi potong	Ekor	90.000	88.650	118.44	106.599	
		Sapi perah	Ekor	89.310	88.010	105.35	94.088	
		Kambing dan domba	Ekor	141.421	139.521	110.90	156.830	
		Pengobatan ternak	Ekor(Ayam)	35.000	37.000	145.83	18.960	
			Sampel	1.050	950	130.29	1.368	
3.4	Energi dan Sumber Daya Mineral							DLH
		Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	Unit	225	35	63.11	15	
3.5	Perdagangan							DISDAGPERIN
		Meningkatnya sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll)	Unit	495	85	133.33	660	
		Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	Rp (000)	5.239.335.000	5.139.335	166.65	8.731.134	
		Lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata	Lokasi	30	20	166.67	20	
		Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen	Pelaku usaha	25.200	4.200	53.99	4.295	

		Nilai ekspor barang (USD)	US \$	884.209	150.451	88.58	384.669	
3.6	Perindustrian							DISDAGPERIN
		Semakin berkembangnya IKM	IKM	182	165	90.66	165	
		Meningkatnya penerapan teknologi dan standart produk industri daerah	IKM	188	171	93.09	175	
		Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk unggulan	IKM	60	50	100	60	
		Pembentukan kawasan peruntukkan industri	Kawasan	2	0	50.00	1	
4	Fungsi Penunjang							
4.1	Perencanaan							SETDA, BP3D
		Dokumen RKPD dan RPJMD	Dokumen	14	2	64.29	2	
		Dokumen Renja dan Renstra PD	Dokumen	14	2	64.29	2	
		Tersusunnya DSP usulan kegiatan Kecamatan/Kelurahan	Dokumen	150	25	66.67	25	
		Tersusunnya Profil Kelurahan	Dokumen	36	6	66.67	0	
		Dokumen Evaluasi	Dokumen	12	2	66.67	2	
		Dokumen laporan Pertanggungjawaban	Dokumen	30	5	110	6	
		Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD	Dokumen	12	2	66.67	2	
		Terverifikasinya RKA SKPD	Dokumen	588	98	69.39	100	
		Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	Dokumen	12	2	75	2	
		Dokumen data/informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan	Dokumen	27	5	62.96	5	
		Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan ekonomi	Dokumen	16	3	68.75	3	
		Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan sosial budaya	Dokumen	27	4	70.73	4	
		Kajian rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Dokumen	8	2	37.50	0	
		Tersusunnya studi data infrastruktur dan potensi rawan bencana	Dokumen	5	1	60	1	
		Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan prasarana dan sumber daya alam (proposal)	Dokumen	90	15	67.78	15	
		Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan	Dokumen	25	5	70.37	7	

		permukiman perdesaan						
		Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan air minum/air bersih dan sanitasi	Dokumen	8	1	62.50	2	
		Kerjasama pembangunan daerah yang di-implementasikan	Kegiatan	17	3	64.71	3	
		Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana	%	100	75	75	75	
4.2	Keuangan							BKD
		Pengembalian kerugian daerah (Rp. 000)	Rp	1.200	3.600	-29.17	2.750	
		Bertambahnya PAD	Rp	412.068.642	337.352.845	260.66	1.074.116.481	
		Peningkatan PAD per tahun	Rp	39.304.005	31.914.321	489.71	1.92.476.037	
			%	10.544	10.449	113.62	11.94	
		Opini BPK atas laporan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Terlaksananya evaluasi pengelolaan keuangan daerah	Dokumen	72	48	116.67	84	
4.3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan							BKP2D
		Prosentase pejabat struktural yang telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai tingkatan	%	85	82,75	97.35	82,75	
		Prosentase Aparatur yang memiliki sertifikasi pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugasnya	%	12.00	8,00	66.67	8,00	
		Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	%	81.00	79,00	97.53	79,00	
		Prosentase penyelesaian kasus-kasus kepegawaian	%	90	90	100	90	
		Prosentase pegawai yang memperoleh keputusan pensiun tepat waktu	%	100	100	100	100	
		Cakupan tingkat ketaatan aparatur terhadap peraturan peraturan kepegawaian	%	100	100	119.88	119,88	
		Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur beserta perlengkapannya	%	100	100	100	100	
4.4	Penelitian dan Pengembangan							BP3D
		Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	inovasi	8	6	75	6	
4.5	Fungsi Lainnya:							

1)	Kesekretariatan DPRD							SETWAN
		Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	%	100	100	100	100	
2)	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan							SETDA, BP3D, DINAS KOMINFO
		Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda	%	90	90	37	33.3	
		Cakupan ketersediaan data/informasi jabatan	%	100	100	100	100	
		Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Skor	70.00	64,00	138	0	
		Rata-rata tingkat penerapan ketatalaksanaan Perangkat Daerah	%	90.0	75	0	0	
		Rumusan kebijakan teknis pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administrasi	Dokumen	371	135	33.42	62	
		Terlaksananya Rakor Muspika/Perangkat Kelurahan	Kecamatan	19	19	0	0	
		Cakupan kerjasama antar daerah yang difasilitasi sampai dengan rencana aksi	%	90	90	0	0	
		Tersusunnya kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan	Dokumen	25	5	36	4	
		Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan	Dokumen	58	5	131.04	11	
		Nilai IKM Kabupaten Boyolali	%	80	79,5	102.46	81.97	
		Kebijakan teknis di bidang organisasi dan tata laksana serta kepegawaian	Dokumen	70	66	22.86	2	
		Prosentase sanggahan lelang	%	4	4.8	137.75	2.45	
		Kualitas layanan <i>e-procurement</i>	%	81	80	103.54	0	
		Terlaksananya fungsi layanan di Kecamatan	%	100	100	0	100	
		Terlaksananya pengisian perangkat desa/kelurahan	Kecamatan	19	19	115.79	22	
		Rumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa	Dokumen	405	266	79.26	200	
		Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan.	Kecamatan	19	19	115.79	22	
3)	Pembinaan dan Pengawasan							INSPEKTORAT
		Menurunnya temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	Temuan/Rekomendasi	25	27	92	27	

		Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional	%	86	78	93.02	80	
4)	Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah							PD Se Kab. Boyolali
		Terlaksananya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.	%	100	100	100	100	
		Terlaksananya fungsi layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah.	%	100	100	100	100	
		Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah.	%	100	100	100	100	
		Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah.	%	100	100	100	100	



= telah tercapai (252 indikator)



= akan tercapai (59 indikator)



= perlu perhatian/upaya keras(15 indikator)

Berikut disajikan Rekapitulasi Realisasi Capaian RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2019, dengan jumlah akhir indikator kinerja 326 dengan rasio capaian akhir 108,66% sebagai berikut :

Tabel II.111
Rekapitulasi Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2019
Kabupaten Boyolali

No	Misi	Jumlah Indikator Kinerja	Rasio Capaian Akhir (%)
			K
1	MISI : Boyolali Meneruskan semangat Pro Investasi	23	108.56
2	MISI : Boyolali Membangun Untuk Lebih Maju dan Berkelanjutan	28	88.90
3	MISI : Boyolali, bersih, berintegritas, sejahtera	127	123.61
4	MISI : Boyolali, sehat, produktif dan berdaya saing	96	98.74
5	MISI : Boyolali, lumbung padi dan pangan nasional	29	159.39
6	MISI : Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan	2	90.61
7	MISI : Boyolali, lebih maju dan berteknologi	21	90.81
Rata-rata		326	108.66

Indikator terbanyak yakni 127 pada misi, Boyolali, bersih, berintegritas, sejahtera dengan capaian 123%, dan capaian terendahnya pada misi Boyolali Membangun Untuk Lebih Maju dan Berkelanjutan dengan indikator sebanyak 28 capan 88,90.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara rencana pencapaian dengan kondisi nyata saat perencanaan disusun. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah umumnya timbul dari potensi kekuatan yang belum di optimalkan, kelemahan yang tak di atasi, peluang yang tak di manfaatkan, dan ancaman yang tidak di antisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi, demografi,

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta mengacu pada hasil evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2019 dan capaian RPJMD sampai dengan tahun 2019.

Dalam Bab IV RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Boyolali diterjemahkan sebagai permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Secara umum permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dikelompokkan dalam 6 (enam) bidang:

Pertama, permasalahan tata kelola pemerintahan, antara lain meliputi:

- Belum optimalnya implementasi standar pelayanan (urusan wajib pelayanan dasar);
- Belum optimalnya harmonisasi dan implementasi regulasi (urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang administrasi pemerintahan);
- Belum optimalnya rasio kecukupan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dengan kompetensi khusus sesuai fungsi yang dibutuhkan masih kurang (urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang kepegawaian);
- Belum optimalnya tingkat kemandirian keuangan daerah (urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan);
- Belum optimalnya kemampuan Perangkat Daerah dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat masih kurang;
- Belum optimalnya implementasi dokumen kajian untuk kebijakan teknis masih rendah (urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan);
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan (urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil);
- Belum optimalnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat waktu (urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang statistik); dan
- Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip (urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang kearsipan).

Kedua, permasalahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah, antara lain meliputi:

- Belum optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, penunjang, sosial dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (urusan wajib pelayanan dasar);
- Belum optimalnya pengelolaan tata guna lahan sesuai dengan peruntukannya (urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang); dan
- Belum optimalnya pemanfaatan pengembangan energi terbarukan.

Ketiga, permasalahan tingkat kesejahteraan, antara lain meliputi:

- Belum optimalnya penanganan kemiskinan (urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial) dan pengangguran (urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang tenaga kerja);
- Belum optimalnya kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan (urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan), dan kesejahteraan (urusan wajib pelayanan dasar);
- Belum optimalnya pemanfaatan peran perempuan, dan perlindungan ibu dan anak (urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak); dan
- Belum optimalnya penanganan kerawanan sosial (urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial).
- Kesejahteraan yang menurun akibat Pandemi Covid-19.

Keempat, permasalahan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi lokal, antara lain meliputi:

- Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dan pemanfaatan Teknologi Informasi (urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika) untuk menunjang E-commerce;
- Belum optimalnya pelestarian budaya (urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang kebudayaan) dan pengembangan potensi wisata (urusan pilihan bidang pariwisata);
- Belum optimalnya fungsi kelembagaan masyarakat (urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat desa);
- Belum optimalnya pengembangan Usaha Menengah Keuangan Mikro (UMKM) untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 (urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang koperasi usaha kecil dan menengah);
- Belum optimalnya tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat (urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pangan);
- Belum optimalnya produktivitas pertanian, masih rendahnya pemasaran produk pertanian dan produk lain secara E-commerce serta masih maraknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (urusan pilihan bidang pertanian); dan
- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) perdagangan, pengembangan nilai tambah produk unggulan (urusan pilihan bidang perdagangan) dan akses permodalan (urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang penanaman modal).

Kelima, permasalahan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan, antara lain belum optimalnya penanganan persampahan, pencemaran (urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup), dan bencana alam (urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat).

Keenam, Permasalahan kondusivitas lingkungan sosial, politik, hukum, ketertiban dan keamanan:

- Belum optimalnya kesadaran masyarakat berdemokrasi (urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat).; dan
- Belum optimalnya penanganan gangguan ketertiban umum, dan penyakit masyarakat (urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat).
- Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menuju tatanan baru sosial yang masih rendah.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Arah Kebijakan Nasional

Sebelum pandemi COVID-19, awal tahun 2020 diwarnai optimisme dan diperkirakan akan menjadi tahun yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia, dibandingkan dengan tahun 2019. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang mulai mereda dan beberapa indikator ekonomi global yang menunjukkan arah perbaikan diperkirakan dapat menjadi faktor positif pendorong kinerja perekonomian nasional di tahun 2020. Dalam UU APBN 2020 yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR, asumsi-asumsi makro ekonomi yang menjadi dasar penyusunan APBN 2020 juga menunjukkan nuansa optimisme. Namun pandemi COVID-19 mengubah secara drastis outlook perekonomian Indonesia.

Eskalasi dampak pandemi COVID-19 ke Indonesia dimulai sejak pertengahan Maret 2020, ketika jumlah penderita termasuk korban jiwa terus meningkat. Langkah-langkah pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial yang diambil oleh Pemerintah berakibat pada berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi. Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang bersifat extraordinary untuk memitigasi dampak kesehatan kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan dunia usaha serta stabilitas sektor keuangan. Jika tidak dilakukan, hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan ekonomi baik dari sisi permintaan maupun penawaran dan memberikan tekanan berat terhadap perekonomian nasional, terutama sektor-sektor produksi utama melalui jalur ekspor, impor, investasi dan konsumsi.

Selain melakukan langkah-langkah pengamanan dan pencegahan terjadinya krisis kesehatan, Pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah kebijakan ekonomi berupa, antara lain, refocusing dan realokasi APBN, serta pemberian stimulus fiskal, moneter dan sektor keuangan. Fokus utama kebijakan Pemerintah dalam penanganan COVID-19 adalah mendukung anggaran kesehatan, memperluas social safety net untuk menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industri. Langkah-langkah extraordinary ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga diperlukan fleksibilitas APBN yang memastikan ketersediaan anggaran dengan tetap menjaga kesinambungan keuangan negara. Postur APBN 2020 juga telah disesuaikan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dalam postur APBN baru ini, penerimaan Negara diperkirakan mengalami penurunan namun belanja negara meningkat sehingga akan terjadi pelebaran defisit menjadi sekitar 5,07 persen terhadap PDB.

Laju inflasi Indonesia tahun 2020 diupayakan tetap masih berada dalam sasaran inflasi tahun 2020 sebesar $3,0 \pm 1,0$ persen (yoy). Meskipun demikian, beberapa faktor risiko membayangi pergerakan inflasi sepanjang tahun 2020, terutama eskalasi penyebaran wabah COVID-19 yang semakin akseleratif. Sepanjang Januari–April 2020, laju inflasi masih relatif terkendali di dalam sasaran inflasi. Laju inflasi mencapai 2,67 persen (yoy) pada Maret 2020 atau mencapai sebesar 0,84 persen (ytd). Laju inflasi masih melanjutkan tren penurunan di bawah 3,0 persen (yoy), didorong oleh masih berlanjutnya perlambatan inflasi pada seluruh komponen.

Langkah-langkah pemberian stimulus bertujuan untuk membantu pelaku ekonomi bertahan menghadapi dampak COVID-19, menjaga daya beli masyarakat, memberikan kemudahan ekspor-impor, meminimalisir jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), membantu perbankan memberikan relaksasi dan likuiditas, dan mencegah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan. Namun demikian, efektivitas stimulus tersebut akan sangat tergantung pada efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan kasus

COVID-19 di Indonesia. Tidak hanya sangat tergantung dari skenario efektivitas penanganan COVID-19, proyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia juga akan tergantung pada unsur ketidakpastian atas gangguan di sisi penawaran, pengetatan di pasar keuangan, perubahan pola belanja masyarakat, dan fluktuasi harga komoditas global. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut Pemerintah menyusun dua skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020, yaitu skenario berat dan skenario sangat berat. Dalam skenario-skenario tersebut, Pemerintah berusaha keras agar krisis saat ini tidak menjadi krisis keuangan. Pemerintah menggunakan skenario-skenario rambatan dan dampak pandemi COVID-19 tersebut karena perkembangan situasi penyebaran COVID-19 yang sangat cepat serta potensi dampak yang menimbulkan ketidakpastian tinggi dalam perekonomian menyulitkan penentuan outlook perekonomian. Tingginya ketidakpastian kondisi perekonomian dunia dan domestik saat ini juga tercermin dari beragamnya proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020 oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional. Ketidakpastian tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan penilaian atas tingkat efektivitas kebijakan pencegahan COVID-19 dan kebijakan ekonomi yang tercermin dari perbedaan skenario yang dipergunakan. Hal ini menyebabkan angka proyeksi menjadi sangat dinamis dan sangat beragam tidak konvergen ke suatu angka tertentu, namun semuanya mengarah kepada pemburukan perekonomian. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada dalam kisaran -3,5 persen (skenario terburuk) sampai dengan 2,1 persen (skenario baseline). IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 0,5 persen. Proyeksi yang lebih optimis sebesar 2,5 persen diberikan oleh Bank Pembangunan Asia, namun lembaga rating Moody's mempunyai proyeksi lebih tinggi sebesar 3,0 persen. Proyeksi lembaga-lembaga ekonomi internasional ini didasari oleh kuatnya daya tahan ekonomi Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif masih lebih baik dibandingkan negara-negara lain selama tahun 2019.

Pada tahun 2021 arah kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal akan berfokus pada upaya-upaya pemulihan ekonomi. Sekaligus upaya reformasi untuk mengatasi masalah fundamental ekonomi jangka menengah panjang, sebagai dampak dari wabah virus corona di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi diasumsikan berkisar antara 4,5%-5,5% dengan tingkat inflasi antara 3,0%. Kemudian, tingkat suku bunga SBN 10 tahun antara 6,67% hingga 9,5%.

Gambar III.1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2021

World Bank		ADB		Moody's		IMF	
2020	-3,5% s.d 2,1%	2020	2,5%	2020	3,0%	2020	0,5%
2021	5,2% s.d 5,6%	2021	5,0%	2021	4,3%	2021	8,2%

3.1.2. Kondisi Perekonomian Daerah

Secara umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Boyolali cukup baik yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, meskipun di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi selama lima tahun terakhir. Kondisi perekonomian Boyolali didorong oleh lima kategori lapangan usaha, di antaranya industri pengolahan, pertanian, kehutanan, konstruksi dan jasa, perdagangan besar dan eceran. Kondisi ekonomi makro di Kabupaten Boyolali ini tidak terlepas dari sektor pertanian sebagai daerah dengan basis ekonomi utama.

Pola pertumbuhan ekonomi inklusif disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu diharapkan dapat

mengurangi tingkat kemiskinan menjadi sebesar 8,5 – 9,5 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,8 – 5,2 persen dan Indeks Gini yang menggambarkan ketimpangan antarkelompok pendapatan dapat diturunkan pada kisaran 0,38 – 0,39.

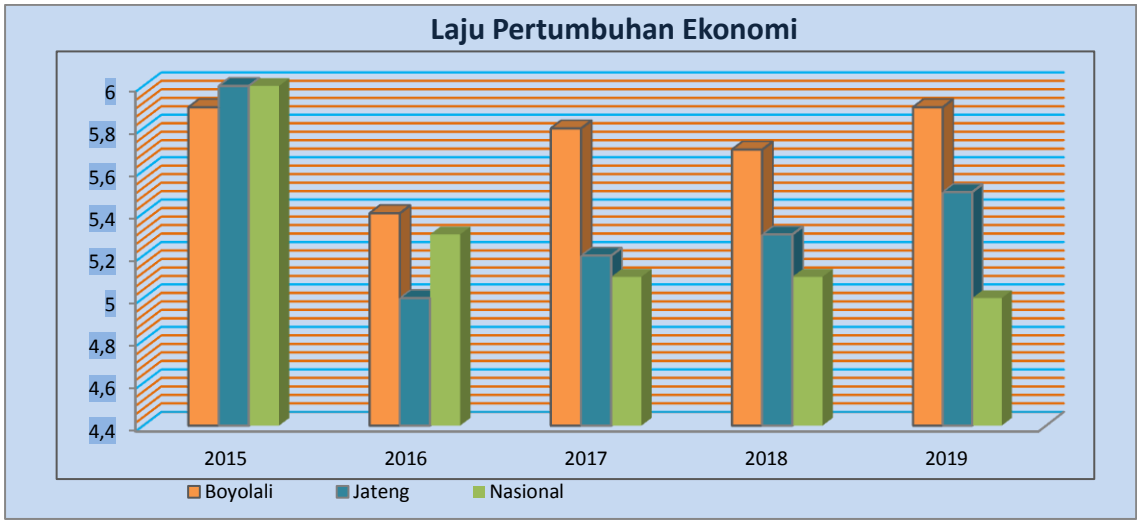
Kenaikan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun pada prinsipnya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut, untuk itu dengan memaksimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki menjadi kata kunci dalam menyongsong pembangunan di Tahun 2021 yang akan datang.

Saat ini muncul Pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Boyolali. Penguatan fungsi dan peran kelembagaan Tim Gugus Tugas melalui program kerja yang dilaksanakan dalam penanganan dampak COVID-19 berkontribusi terhadap kondisi tersebut. Dalam penanganan Pandemi COVID-19 ini Kabupaten Boyolali mengalami Perubahan Penjabaran APBD kedua Rp.18.910.112.000,00 dari refocusing belanja langsung, belanja pegawai, pergeseran internal anggaran BLUD ke kegiatan penanganan COVID, Perubahan ketiga Rp.16.263.000.000,00 dari refocusing belanja langsung termasuk yang bersumber dari DAK BOK Dinkes, dan belanja pegawai ke kegiatan penanganan COVID. Perubahan keempat realokasi 50% belanja BM dan 50% BJ ke penanganan COVID melalui Belanja Tidak Terduga. Perubahan keempat realokasi 50% belanja BM dan 50% BJ sebesar Rp.376.581.208.000,00 ke penanganan COVID melalui Belanja Tidak Terduga.

Secara terinci, perkembangan capaian **pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dalam empat tahun terakhir (2015-2019)** tersaji pada uraian berikut :
Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali selama 5 tahun terakhir (2015-2019) tersaji pada Grafik III.1 berikut:

Grafik III.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Boyolali Tahun 2015-2019



Sumber: Olah Data BP3D Kabupaten Boyolali

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara agregat ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 rata-rata terjadi kenaikan sebesar 8,37%. Sedangkan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 rata-rata terjadi kenaikan sebesar 7,67%.

Adapun kondisi perkembangan PDRB Kabupaten Boyolali Tahun 2015 sampai Tahun 2019 atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) dapat dilihat, tabel berikut:

Tabel III.1
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Boyolali 2015-2019

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai (Juta Rupiah)	(%) pertumbuhan	Nilai (Juta Rupiah)	(%) pertumbuhan
2015	23.567.823,14	11,70	18.170.383,95	11,58
2016	25.756.715,67	5,33	19.139.359,22	9,31
2017	27.894.681,55	8,30	20.249.399,44	5,80
2018	30.221.796,39	8,34	21.407.484,05	5,72
2019	32.704.381,16	8,21	22.681.097,81	5,95

Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

Tabel III.2
PDRB ADHB Eks Karesidenan Surakarta
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018

KABUPATEN/ KOTA/ PROVINSI	PDRB ADHB (dalam juta rupiah) PDRB ADHK			
	2015	2016	2017	2018*
1. BOYOLALI	23.567.823,14	25.756.715,67	27.894.681,55	30.221.796,39
2. KLATEN	28.988.778,55	31.619.241,19	34.197.239,30	37.055.979,36
3. SUKOHARJO	26.700.716,80	29.130.306,98	31.621.414,17	34.204.232,73
4. WONOGIRI	21.585.475,62	23.329.378,86	25. 128.774,50	27.229.271,26
5. KARANGANYAR	26.904.049,89	29.172.749,37	31.538.339,97	34.287.872,56
6. SRAGEN	27.315.123,08	29.826.142,98	32.409.757,15	35.097.579,81
7. SURAKARTA	34.970.374,09	37.771.066,12	41.043.339,48	44.427.890,52
JAWA TENGAH	1.010.986.637,17	1.087.316.682,68	1.172.794.523,68	1.268.454.783,96

Keterangan: *: angka sementara

Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

Tabel III.3
PDRB ADHK Eks Karesidenan Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018

KABUPATEN/ KOTA/ PROVINSI	PDRB ADHK (dalam juta rupiah)			
	2015	2016	2017	2018
1. BOYOLALI	18.170.383,95	19.139.359,22	20.249.399,44	21.407.484,05
2. KLATEN	22.558.976,15	23.725.740,98	24.989.902,87	26.381.363,13
3. SUKOHARJO	21.612.078,19	22.847.982,81	24.163.939,48	25.570.865,09
4. WONOGIRI	16.977.198,56	17.869.145,42	18.820.497,77	19.839.038,83
5.KARANGANYAR	21.286.287,14	22.436.293,80	23.731,952,05	25.150.277,73
6. SRAGEN	21.390.871,20	22.625.821,66	23.976.752,18	25.355.124,94
7. SURAKARTA	28.453.493,87	29.975.873,01	31.685.480,46	33.506.170,40
8.JAWA TENGAH	806.765.092,17	849.099.354,69	893.750.296,17	941.164.118,75

Keterangan: *: angka sementara

Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

Tabel III.4
Pertumbuhan PDRB 2015-2018 Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (persen)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,56	4,22	0,69	4,66
B	Pertambangan dan Penggalian	2,04	-0,51	4,59	3,66
C	Industri Pengolahan	6,83	5,08	7,86	5,09

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,17	6,09	4,83	5,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,05	1,80	4,67	-10,76
F	Konstruksi	6,26	7,46	7,13	5,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,63	4,38	5,50	5,55
H	Transportasi dan Pergudangan	7,78	6,81	7,91	7,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,44	6,52	6,56	6,41
J	Informasi dan Komunikasi	10,27	9,57	14,35	14,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,15	8,41	6,28	3,19
L	Real Estate	8,92	8,64	7,66	5,64
M,N	Jasa Perusahaan	9,12	8,82	9,46	9,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,76	2,20	2,19	2,49
P	Jasa Pendidikan	7,47	9,62	8,10	8,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,32	10,15	9,29	9,89
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,97	6,64	8,26	8,09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,96	5,33	5,80	5,72

Keterangan: *: angka sementara

Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

Tabel III.5
Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(persen) Tahun 2015-2018

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,26	6,59	6,59	6,59
B	Pertambangan dan Penggalan	20,70	2,04	2,04	2,04
C	Industri Pengolahan	11,95	6,44	6,44	6,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,54	-3,04	-3,04	-3,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,01	1,05	1,05	1,05
F	Konstruksi	11,43	6,26	6,26	6,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,68	3,63	3,63	3,63
H	Transportasi dan Pergudangan	14,94	7,77	7,77	7,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,07	7,44	7,44	7,44
J	Informasi dan Komunikasi	8,68	10,27	10,27	10,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,12	7,16	7,16	7,16
L	Real Estate	11,29	8,92	8,92	8,92
M,N	Jasa Perusahaan	15,69	9,12	9,12	9,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,26	4,76	4,76	4,76
P	Jasa Pendidikan	10,48	7,47	7,47	7,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,03	7,32	7,32	7,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,39	2,97	2,97	2,97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		10,17	10,71	6,08	6,08

Keterangan: *: angka sementara

Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

Tabel III.6
Distribusi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2015-2018

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,68	23,50	22,25	22,16
B	Pertambangan dan Penggalian	4,50	4,28	4,26	4,12
C	Industri Pengolahan	28,11	28,09	28,66	28,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,04
F	Konstruksi	6,37	6,48	6,57	6,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,94	12,79	12,75	12,69
H	Transportasi dan Pergudangan	5,09	5,22	5,35	5,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,61	2,60	2,59	2,57
J	Informasi dan Komunikasi	2,23	2,24	2,45	2,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,25	2,31	2,36	2,32
L	Real Estate	1,07	1,08	1,10	1,10
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,35	0,37	0,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,71	2,71	2,64	2,53
P	Jasa Pendidikan	5,48	5,67	5,94	6,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,92	0,95	0,98	1,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,62	1,64	1,67	1,68
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *: angka sementara
Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

Tabel III.7
Distribusi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2015-2018

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,68	22,2	22,2	22,2
B	Pertambangan dan Penggalian	4,50	3,9	3,9	3,9
C	Industri Pengolahan	28,11	28,5	28,5	28,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,0	0,0	0,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,1	0,1	0,1
F	Konstruksi	6,37	6,4	6,4	6,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,94	14,2	14,2	14,2
H	Transportasi dan Pergudangan	5,09	4,7	4,7	4,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,61	2,8	2,8	2,8
J	Informasi dan Komunikasi	2,23	3,1	3,1	3,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,25	2,2	2,2	2,2

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*
L	Real Estate	1,07	1,3	1,3	1,3
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,3	0,3	0,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,71	2,7	2,7	2,7
P	Jasa Pendidikan	5,48	4,9	4,9	4,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,92	0,9	0,9	0,9
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,62	1,8	1,8	1,8
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,0	100,0	100,0	100,0

Keterangan: *: angka sementara
 Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

Tabel III.8
 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.581.251,40	6.053.064,77	6.210.831,25	6.704.105,08	7.070.485,61
B	Pertambangan dan Penggalian	1.060.826,50	1.102.296,07	1.190.330,49	1.247.291,27	1.319.412,41
C	Industri Pengolahan	6.625.200,60	7.234.196,71	8.000.064,73	8.646.705,35	9.414.204,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.507,04	5.015,42	5.641,93	6.128,83	6.471,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.465,98	13.071,15	13.790,78	12.336,64	14.204,99
F	Konstruksi	1.500.300,17	1.668.819,34	1.833.166,53	2.030.694,64	2.252.481,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.050.289,90	3.295.189,54	3.560.478,25	3.838.980,26	4.143.391,58
H	Transportasi dan Pergudangan	1.200.597,00	1.344.726,71	1.493.063,63	1.646.281,75	1.798.623,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	615.651,19	670.728,24	722.315,48	776.471,44	848.033,55
J	Informasi dan Komunikasi	525.361,79	577.590,77	684.827,98	786.170,15	903.970,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	529.737,65	594.290,40	657.518,40	703.066,35	734.113,38
L	Real Estate	251.304,36	279.227,24	306.500,39	332.956,81	358.401,65
M,N	Jasa Perusahaan	78.773,44	89.974,76	103.574,50	116.560,86	132.557,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	639.551,14	697.703,35	737.012,25	765.352,32	794.355,37
P	Jasa Pendidikan	1.292.428,07	1.461.688,08	1.657.225,94	1.834.225,35	2.029.399,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	217.702,18	245.547,43	272.423,91	303.134,92	330.826,45
R,S,T,U	Jasa lainnya	381.874,73	423.585,69	465.850,11	508.344,37	553.447,26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		23.567.823,14	25.756.715,67	27.914.646,55	30.258.836,39	32.704.381,16

Keterangan: *: angka sementara
 Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

Tabel III.9
 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan
 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.053.719,79	4.224.693,28	4.253.754,64	4.452.029,26	4.601.442,50
B	Pertambangan dan Penggalian	710.934,91	707.298,20	739.750,38	766.808,23	801.216,72

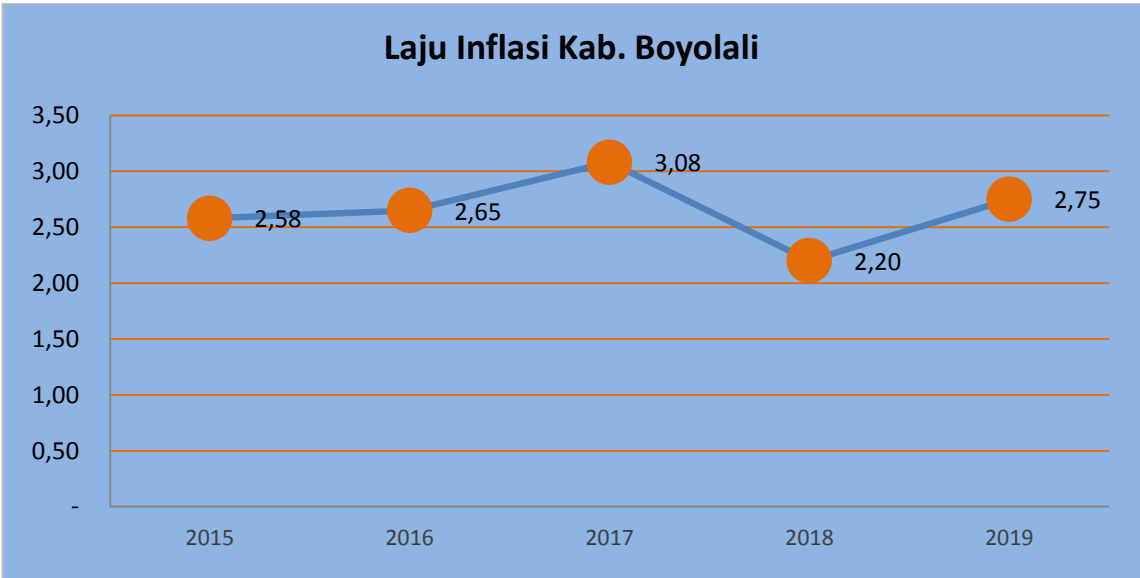
Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
C	Industri Pengolahan	5.109.080,49	5.453.559,63	5.882.381,38	6.181.500,62	6.617.820,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.289,29	4.550,66	4.770,42	5.022,72	5.289,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.339,21	11.543,24	12.081,80	10.781,44	12.222,42
F	Konstruksi	1.167.365,81	1.254.484,23	1.343.959,54	1.423.318,99	1.505.689,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.567.851,88	2.680.239,02	2.827.663,02	2.984.473,42	3.150.031,08
H	Transportasi dan Pergudangan	838.213,64	895.326,70	966.116,46	1.042.710,97	1.102.212,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	513.043,52	546.493,51	582.326,14	619.646,76	666.833,94
J	Informasi dan Komunikasi	564.540,79	618.582,52	707.348,75	807.393,53	916.325,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	398.155,91	431.633,25	458.734,10	473.365,34	486.163,61
L	Real Estate	228.433,15	248.168,23	265.693,43	280.681,58	298.065,57
M,N	Jasa Perusahaan	62.620,73	68.134,36	74.592,24	82.025,61	90.630,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	482.683,14	493.781,09	504.607,98	517.175,29	529.563,51
P	Jasa Pendidikan	895.946,20	982.096,96	1.061.651,83	1.146.825,22	1.237.334,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	161.299,94	177.667,08	194.174,34	213.387,64	228.541,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	319.866,37	341.098,27	369.242,99	399.122,31	431.715,34
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		18.170.383,95	19.139.359,22	20.248.849,44	21.406.268,93	22.681.097,81

Keterangan: *: angka sementara
Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Boyolali cenderung fluktuatif, yang dipengaruhi oleh berbagai indikator pemicu inflasi baik yang bersifat internal maupun eksternal antara lain disebabkan oleh kenaikan BBM dan tarif dasar listrik yang berdampak kenaikan harga bahan pokok di pasar yang berdampak kenaikan dan faktor eksternal lainnya. Adapun perkembangan inflasi di Boyolali seperti pada Grafik III.2 sebagai berikut :

Grafik III.2
Laju Inflasi Boyolali Tahun 2015-2019



Sumber : Olah Data BP3D Kab. Boyolali

Dari tabel prediksi Indikator Ekonomi Makro tersebut di atas, mengindikasikan bahwa pada Tahun 2015 hingga Tahun 2019 indikator ekonomi makro Kabupaten Boyolali terus mengalami peningkatan. Tingginya angka Inflasi Tahun 2017 pada Juni 2017 adalah sumbangan *administered price* atau kebijakan harga pemerintah, salah satunya adalah tarif dasar listrik (TDL). Penyesuaian tarif listrik yang terjadi selama tiga periode, yaitu Januari, Maret dan Mei 2017 akan memberikan dampak terhadap kenaikan inflasi menjelang Lebaran, kemudian adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks semua kelompok pengeluaran yang ada yaitu: kelompok bahan makanan diikuti kelompok kesehatan, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok sandang. Oleh karena itu kebijakan pembangunan ekonomi Tahun 2020 yang akan datang merupakan rangkaian dari kebijakan pembangunan ekonomi Tahun 2019, yang berpedoman pada visi RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 yaitu "Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera". Dalam rangka pelaksanaan visi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh sebagai berikut sedangkan berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Boyolali adalah:

- Mengoptimalkan pemasaran produk-produk unggulan daerah baik di dalam negeri maupun keluar negeri.
- Meningkatkan produktivitas hasil pertanian (dalam arti luas) dan pengolahan produk-produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan.
- Mengembangkan obyek dan daya tarik wisata daerah.
- Meningkatkan produksi perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.
- Meningkatkan pemerataan distribusi dan akses pangan masyarakat sampai tingkat rumah tangga.

3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021

Selain didasarkan pada kondisi ekonomi Tahun 2019 dan Tahun 2020, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali untuk Tahun 2021 akan sangat dipengaruhi juga oleh berbagai faktor eksternal yang berupa tantangan dan prospek ke depannya. Tantangan dan prospek perekonomian daerah ini dapat berupa kebijakan pemerintah baik kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten sendiri maupun pemerintah di atasnya ataupun berupa fenomena-fenomena lainnya baik yang bersifat lokal, nasional, maupun global. Sejalan dengan kondisi tersebut, *tantangan yang dihadapi Kabupaten Boyolali* dalam perekonomian daerah adalah:

- Implementasi ASEAN *Economic Community* (AEC) memberikan tantangan bagi persaingan tenaga kerja profesional dan peningkatan standar kualitas produk;
- Fluktuasi harga BBM dunia mengakibatkan ketidakpastian ekonomi;
- Kondisi geografis wilayah terhadap kerentanan bencana;
- Alih fungsi lahan tidak sesuai dengan peruntukan;
- Masih rendahnya kualitas SDM mengakibatkan daya saing yang rendah;
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah; dan
- Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan sektoral.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, **peluang yang dapat dimanfaatkan** adalah:

- Meningkatnya peluang investasi;
- Semakin terbukanya peluang pasar ekspor bagi produk Boyolali;
- Upah tenaga kerja di Boyolali yang kompetitif;
- Komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang mendukung perekonomian;
- Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah berdasar pada RTRW;
- Tingginya komitmen dan dukungan pemerintah pada pengembangan potensi daerah.

Mengacu pada perekonomian nasional maupun regional, yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah Kabupaten Boyolali maka untuk **memantapkan pertumbuhan ekonomi**, *upaya-upaya* yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
- meningkatkan daya saing daerah, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan yang akan mempengaruhi keberlangsungan usaha dan perekonomian daerah sehingga dapat mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bahkan mungkin dapat menambah lapangan kerja.
- menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas sebagai sarana agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan guna mendukung masuknya investasi.
- meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan.
- meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Boyolali, guna menciptakan lapangan kerja.
- meningkatkan koordinasi dengan pemerintahan di atasnya guna terwujudnya pembangunan sektoral yang optimal.
- mengantisipasi kerentanan wilayah terhadap bencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari system pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Boyolali secara umum difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah baik dalam pengelolaan potensi pendapatan daerah yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya maupun pengelolaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program Kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2021.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 sebagai pelaksanaan agenda Pembangunan Tahun ke-5 (lima) pada RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan pada asumsi-asumsi tersebut di atas, maka untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah, diperlukan **langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan daerah** yang mengacu pada:

- Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui perluasan obyek pajak yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas SDM pengelola dan koordinasi antara SKPD terkait;
- Penataan performance budgeting melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisiensi, efektif dan berkesinambungan;
- Anggaran daerah yang bertumpu pada kepentingan publik dan tepat sasaran.

Adapun **Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2021** terdiri dari beberapa komponen-komponen sebagai berikut:

- Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah;
- Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung;
- Pembiayaan Daerah.

3.2.1. **Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Tabel III.10
Rekapitulasi Realisasi dan Prediksi
Keuangan Kabupaten Boyolali dan Kerangka Pendanaan
Kabupaten Boyolali Tahun 2019 sampai Tahun 2020 dengan Proyeksi Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019 (belum diaudit)	Anggaran Tahun Berjalan (2020)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2021
1	2	4	5	6
1	PENDAPATAN	2.341.658.525.505,00	2.388.366.025.000,00	2.324.129.963.000,00
2	BELANJA	1.979.989.453.309,00	2.094.803.184.000,00	2.321.498.963.000,00
3	PEMBIAYAAN	128.220.845.798,50	78.077.398.000,00	-2.631.000,00

Sumber: BKD Kab. Boyolali

3.2.1.1 **Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar

mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru.

Realisasi pendapatan pada Tahun 2018 naik sebesar Rp51.282.949.258,00 dari Tahun 2017 sedangkan pada Tahun 2019 naik sebesar Rp113.877.815.443,00 dari tahun 2018. Untuk Tahun Anggaran 2020, anggaran pendapatan ditargetkan sebesar 2.388.366.025.000,00, sedangkan pada Tahun 2021 mendatang, pendapatan diproyeksikan sebesar Rp2.324.129.963.000,00. **Asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2021 antara lain:**

- Realisasi Pajak Daerah TA 2021 diasumsikan bisa melebihi realisasi Tahun 2020;
- Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang sah yang mempunyai trend meningkat dari tahun ke tahun;
- Dana Perimbangan asumsinya tidak berkurang dari Tahun 2019 bahkan diharapkan lebih, walaupun ada asumsi Dana Insentif Daerah yang dapat dimungkinkan tidak sebesar Tahun 2020;
- Rumus Baku Penentuan Kenaikan dan Penurunan DAU didasarkan pada Alokasi Dasar ditambah celah fiskal adapun yang dimaksud dengan Alokasi Dasar, Celah Fiskal dan komponen yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:
 1. Alokasi Dasar : Kebutuhan Aparatur Daerah
 2. Celah Fiskal : Kemampuan Keuangan Fiskal Daerah dan berapa kebutuhan fiskal daerah
 3. Komponennya adalah :
 - ✓ Data jumlah penduduk yang valid
 - ✓ Index pembangunan manusia
 - ✓ Index kemahalan konstruksi
 - ✓ PDRB.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pada dasarnya PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah yang menuntut ketergantungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Salah satu isu yang menarik terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal adalah menyangkut peningkatan kapasitas daerah untuk meningkatkan PAD atau yang disebut dengan *taxing power*. Namun demikian, undang-undang mengamanatkan bahwa peningkatan *PAD tidak boleh menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang menghambat pelayanan publik dan iklim dunia usaha*.

Secara teoritis besar kecilnya potensi PAD pada suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan, terutama pada sektor industri dan jasa. Sebab kedua sektor tersebut merupakan basis PAD yang sangat dominan. Dengan demikian, untuk mengestimasi besarnya PAD dan pertumbuhan PAD setiap tahunnya dapat digunakan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang digunakan. Komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD.

Dalam pengelolaannya harus diperhatikan upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Upaya ekstensifikasi pajak tidak hanya cukup mengandalkan kondisi sarana prasarana yang ada saat ini. Untuk itu, prioritas pembangunan harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Beberapa arah yang akan dilakukan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi:
 1. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
 2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
 3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
 4. Optimalisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah;
 5. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 6. Memberikan insentif dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target dalam satu tahun anggaran.
- Dana Perimbangan yang meliputi:
 1. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
 2. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);
 3. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Asumsi-asumsi terkait prakiraan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021:

1. Diperkirakan ada peningkatan wajib pajak baru;
2. Semakin meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;
3. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah;
4. Menurunnya pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah;
5. Meningkatnya penerimaan dari dana bagi hasil pajak provinsi;
6. Meningkatnya alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat, antara lain DAU, DAK, dan Bagi Hasil.

Proyeksi rencana kebijakan pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel III.11 dan Tabel III.12 berikut ini.

Tabel III.11
Realisasi Pendapatan Kabupaten Boyolali
Tahun 2019-2020

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Target pada Tahun Rencana 2020	Rencana Pendapatan setelah PMK 35/Tahun 2020
1	2	3	4	5
1.	Pendapatan			
1.1	Pendapatan asli daerah	364.528.449.000,00	369.369.271.000,00	345.778.205.000,00
1.1.1	Pajak daerah	132.800.000.000,00	133.211.748.000,00	113.075.815.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	17.714.669.000,00	15.329.346.000,00	11.879.213.000,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.950.961.000,00	14.950.961.000,00	14.950.961.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	200.062.819.000,00	205.877.216.000,00	205.877.216.000,00
1.2	Dana perimbangan	1.845.463.382.000,00	1.495.998.683.000,00	1.330.395.930.000,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	45.543.716.000,00	41.057.303.000,00	43.921.973.000,00
1.2.2	Dana alokasi umum	1.045.669.922.000,00	1.064.047.626.000,00	966.489.944.000,00

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Target pada Tahun Rencana 2020	Rencana Pendapatan setelah PMK 35/Tahun 2020
1	2	3	4	5
1.2.3	Dana alokasi khusus	360.784.905.000,00	390.893.754.000,00	319.984.013.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	513.968.211.000,00	522.998.071.000,00	568.719.765.000,00
1.3.1	Hibah	85.048.372.000,00	73.137.370.000,00	81.162.500.000,00
1.3.2	DBH Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	127.322.554.000,00	127.322.554.000,00	141.441.138.000,00
1.3.3	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	266.142.285.000,00	322.538.147.000,00	308.122.676.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	35.455.000.000,00	0,00	37.993.451.000,00

Sumber: BKD Kab. Boyolali

Tabel III.12
 Proyeksi Pendapatan
 Kabupaten Boyolali Tahun 2021

No.	Uraian	Proyeksi pada Tahun Rencana 2021
1	2	3
1.	Pendapatan	
1.1	Pendapatan asli daerah	384.369.271.000,00
1.1.1	Pajak daerah	148.211.748.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	15.329.346.000,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	14.950.961.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	205.877.216.000,00
1.2	Dana perimbangan	1.866.623.322.000,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	41.057.303.000,00
1.2.2	Dana alokasi umum	1.064.047.626.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	390.893.754.000,00
1.2.4	Pendapatan Transfer Lainnya	370.624.639.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	73.137.370.000,00
1.3.1	Hibah	73.137.370.000,00
1.3.2	Dana darurat	0,00
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai PUU	0,00

Sumber: BKD Kab. Boyolali

3.2.1.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut.

- Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak untuk mengembangkan sistem jam **Kondisi Perekonomian Daerah** inan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.
- Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Reliable, Time) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
 1. Mencukupi kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
 2. Mendanai perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan, dan jembatan;
 3. Mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/*cost sharing* pada program/kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan PP 12 Tahun 2019 Komposisi Belanja Kabupaten Boyolali dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Operasi pada Tahun 2021 masih didominasi oleh belanja pegawai. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan belanja pegawai sehingga kebijakan pemerintah Kabupaten Boyolali memprioritaskan belanja wajib khususnya belanja pegawai. Belanja Hibah diprediksikan menurun dibandingkan Tahun 2020 dikarenakan Puncak Pilkada telah dilaksanakan Tahun 2020. Untuk Belanja Bantuan Sosial cenderung relatif sama dibandingkan dengan Tahun 2020. Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Tahun 2021 diprediksikan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2020 seiring diharapkannya kondisi perekonomian yang berangsur membaik dikarenakan terdampak Pandemi Covid-19. Namun kenaikan tersebut diprediksikan masih dibawah Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Tahun 2019 dan Tahun 2018.

Belanja Transfer yang meliputi Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa serta Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa diprediksikan akan sama dengan angka Tahun 2020 dengan asumsi sebelum Pandemi Covid-19.

Untuk Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa, arah pengelolaan belanja daerah antara lain untuk pemenuhan belanja yang bersifat mengikat sesuai dengan regulasi maupun petunjuk teknis pengalokasian jenis sumber dana antara lain BLUD (Badan Layanan Umum Daerah, DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), dan pendampingan DAK (Dana Alokasi Khusus). Selain itu juga dalam rangka mewujudkan program/kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2021 serta sinergitas rencana program/kegiatan kabupaten dengan pemerintah provinsi maupun pusat yaitu:

- Mempercepat Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi;
- Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;

- Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Penguatan ketahanan bencana;
- Pemasaran Citra Daerah, yaitu memasarkan popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali: pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata berbasis E-commerce;
- Program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana pemerintahan dan penunjang menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel sesuai standar Protokol Covid-19;
- Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau;
- Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan/perikanan, pariwisata dan kebudayaan untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata dan budaya, peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru;
- Menguatkan partisipasi masyarakat dan optimalisasi kemandirian wilayah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdaya saing tinggi di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial serta mempersiapkan mekanisme layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial sesuai standar Protokol Covid-19; dan
- Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Berikut realisasi belanja daerah Tahun 2019-2020 dan proyeksi belanja daerah tahun 2021 tersaji dalam Tabel III.13 dan Tabel III.14 berikut ini:

Tabel III.13
Realisasi Belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2019 – 2020

NO	Uraian	Realisasi Tahun 2019 (belum diaudit)	Target pada Tahun Rencana 2020	Rencana Belanja setelah PMK 35/Tahun 2020
1	2	3	4	5
2.1.1	Belanja pegawai	898.026.621.720,00	941.764.067.000,00	981.567.977.000
2.1.2	Belanja bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja hibah	39.492.443.000,00	82.947.711.000,00	77.444.511.000
2.1.5	Belanja bantuan sosial	14.338.500.000,00	15.397.262.000,00	15.376.498.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	11.021.120.500,00	14.854.110.000,00	12.496.004.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	372.588.827.717,00	356.786.129.000,00	353.762.502.000,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	665.277.140,00	2.000.000.000,00	378.072.029.000,00
2.2.2	Belanja barang dan jasa	505.482.480.654,00	548.619.362.000,00	244.022.303.000,00
2.2.3	Belanja modal	525.825.683.053,00	504.074.782.000,00	251.503.391.000,00

Sumber: BKD Kab. Boyolali

Tabel III.14
Proyeksi Belanja Kabupaten Boyolali
Tahun 2021

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2021
	1	2
2	Belanja	
2.1	Belanja Operasi	1.501.532.530.000,00
2.1.1	Belanja pegawai	1.002.168.822.000,00
2.1.2	Belanja barang jasa	438.018.735.000,00
2.1.3	Belanja bunga	0

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2021
2.1.4	Belanja subsidi	0
2.1.5	Belanja hibah	45.947.711.000,00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	15.397.262.000,00
2.2	Belanja Modal	446.326.194.000,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	371.640.239.000,00
2.4.1	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	14.854.110.000,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	356.786.129.000,00

Sumber: BKD Kab. Boyolali

3.2.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah bagi BUMD.

Komponen penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Tahun 2019-2021 utamanya didominasi oleh Sisa Lebih Anggaran tahun lalu (SiLPA). SiLPA akan menjadi alternatif pertama yang akan digunakan apabila terjadi defisit anggaran. Ada tidaknya SiLPA dan besar kecilnya SiLPA sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Dengan demikian SiLPA tersebut memberikan sinyal adanya kinerja yang baik pada tahun anggaran bersangkutan.

Dalam komponen Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021 direncanakan penyertaan modal sebesar Rp12.631.000.000,- kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam era ekonomi dan desentralisasi fiskal sekarang ini pemerintah daerah perlu meningkatkan keahlian dalam manajemen dana dan manajemen investasi agar keuangan daerah dapat dikelola secara optimal sehingga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Misi dan motivasi kegiatan investasi atau penyertaan modal tidak hanya semata-mata menambah penerimaan daerah namun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik.

Struktur realisasi dan prediksi pembiayaan daerah pada Tahun 2019, target 2020, proyeksi 2021 tersaji pada Tabel III.15 berikut ini:

Tabel III.15
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Boyolali
Tahun 2019-2021

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi Tahun 2019 (belum diaudit)	Target pada 2020	Proyeksi pada 2021
1	2	3	4	5
3	Pembiayaan			
3.1	Penerimaan pembiayaan	156.656.845.798,50	92.261.114.000,00	10.000.000.000,00
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	146.425.731.355,50	90.000.000.000,00	10.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan pinjaman	7.900.000.000,00	0,00	0,00

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi Tahun 2019 (belum diaudit)	Target pada 2020	Proyeksi pada 2021
	daerah			
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	2.331.114.443,00	2.261.114.000,00	0,00
3.1.6	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai PUU	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan	28.436.000.000,00	14.183.716.000,00	12.631.000.000,00
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	10.836.000.000,00	14.183.716.000,00	12.631.000.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	17.600.000.000,00	0,00	0,00

Sumber: BKD Kab. Boyolali

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Disamping itu sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Klasifikasi Urusan Pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dari pembagian urusan tersebut Kabupaten Boyolali memiliki 24 urusan wajib (6 pelayanan dasar dan 18 non pelayanan dasar). Urusan wajib pelayanan dasar mencakup: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Urusan wajib non pelayanan dasar mencakup: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Terdapat 6 urusan pilihan yang merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Boyolali, antara lain: perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Boyolali tahun 2021 diwujudkan dengan melaksanakan program, indikator kinerja dan target kinerja dalam RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021.

4.1. Tujuan dan sasaran pembangunan

Tahun 2021 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. Dalam merencanakan pembangunan tahun 2021 harus memperhatikan dan berpedoman pada RPJPD, di mana Rencana Pembangunan Tahun 2021 merupakan bagian perencanaan tahapan lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Tahap IV di mana pembangunan pada tahap ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing ekonomi.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahun keempat, RPJMD tahun kelima Kabupaten Boyolali ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing ekonomi.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka ditetapkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan tehnologi serta penguatan daya saing ekonomi Tahun 2016-2021 lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan tehnologi serta penguatan daya saing ekonomi adalah **"Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera"**.

Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan dengan 9 (sembilan) tujuan dan 19 sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1:		
Boyolali, Meneruskan semangat Pro Investasi	Meningkatkan jumlah nilai investasi	Tersedianya sistem layanan investasi yang kondusif;
		Meningkatnya nilai investasi
	Meningkatkan daya saing perekonomian, pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya tata kelola daerah yang ramah lingkungan
		Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berwawasan lingkungan (<i>green economy</i>)
Misi 2:		
Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan	Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing dan kesejahteraan daerah.	Terpenuhinya infrastruktur dasar;
		Terpenuhinya infrastruktur penunjang;
		Terpenuhinya infrastruktur sosial.
Misi 3:		
Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), responsif dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel;
		Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
	Mewujudkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial	Terwujudnya masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial
Misi 4:		
Boyolali sehat, produktif, berdaya saing	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia mendukung produktivitas dan daya saing daerah	Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat
		Meningkatnya derajat kesehatan

Misi	Tujuan	Sasaran
		Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk
		Meningkatnya daya saing industri
		Meningkatnya daya saing perdagangan
Misi 5:		
Boyolali lumbung padi dan pangan nasional	Meningkatkan produksi bahan pangan pertanian sebagai lumbung pangan nasional	Meningkatnya produksi bahan pangan untuk berkontribusi pada pasar nasional
Misi 6:		
Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan	Meningkatkan produksi bahan pangan dari usaha peternakan dan perikanan	Meningkatnya produksi, pengolahan hasil ternak dan perikanan untuk berkontribusi pada pasar nasional
Misi 7:		
Boyolali lebih maju dan berteknologi	Meningkatkan pemasaran citra daerah dan pelayanan publik melalui teknologi informasi menuju Kabupaten Cerdas (<i>Smart City</i>)	Meningkatnya layanan pemerintah, yang dapat dioperasikan dengan teknologi informasi
		Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memanfaatkan potensi yang tersedia, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan masyarakat menuju tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Perencanaan pembangunan membutuhkan sinergitas rencana antara rencana pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten sesuai dengan kapasitas serta tingkat kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Tabel IV.2

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahap Ke IV RPJMD

No.	Visi dan Misi	Tujuan dan sasaran pokok	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Tahap ke IV RPJMD
Pro Investasi Mewujudkan Boyolali yang maju dan lebih sejahtera				
1.	Boyolali, Meneruskan semangat Pro Investasi	a. Meningkatkan jumlah nilai investasi, dengan sasaran: 1.Tersedianya sistem layanan investasi yang kondusif; 2.Meningkatnya nilai investasi;	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang ramah investasi dan berbasis teknologi informasi	1. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian,peter nakan/perikana n,pariwisata dan kebudayaan

No.	Visi dan Misi	Tujuan dan sasaran pokok	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Tahap ke IV RPJMD
		b. Meningkatkan daya saing perekonomian, pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan, dengan sasaran: 1. Terwujudnya tata kelola daerah yang ramah lingkungan; 2. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berwawasan lingkungan (<i>green economy</i>)	a. Reformasi tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berwasan pembangunan berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>) b. Meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH c. Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan	untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata, peningkatan kesejahteraan, penurunan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan 2. Program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana pemerintahan menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsi dan akuntabel 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau 4. Pengembangan infrastruktur sosial untuk menurunkan resiko penyandang masalah kesejahteraan sosial; 5. Menguatkan partisipasi masyarakat dan optimalisasi kemandirian wilayah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

No.	Visi dan Misi	Tujuan dan sasaran pokok	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Tahap ke IV RPJMD
				berdaya saing tinggi di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; 6. Penguatan ketertiban, keamanan, dan kondusifitas wilayah; 7. Pemasaran citra daerah, yaitu memasarkan popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali, di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan kebudayaan;
2.	Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan	Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing dan kesejahteraan daerah. 1. Terpenuhinya infrastruktur dasar; 2. Terpenuhinya infrastruktur penunjang; 3. Terpenuhinya infrastruktur sosial.	-Pemenuhan dan Pemera-taan akses infrastruktur	
3.	Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera	a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), responsif dan akuntabel, dengan sasaran : 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel; 2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel; b. Mewujudkan kemitraan pemerintah dan masyarakat	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang pro kesejahteraan rakyat 2. Peningkatan layanan publik yang responsif dan akuntabel 3. Peningkatan kondusivitas wilayah dan kesejahteraan sosial	

No.	Visi dan Misi	Tujuan dan sasaran pokok	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Tahap ke IV RPJMD
		untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial, dengan sasaran: - Terwujudnya masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial;		
4.	Boyolali sehat, produktif, berdaya saing	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia mendukung produktivitas dan daya saing daerah, dengan sasaran: 1. Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat; 2. Meningkatnya derajat kesehatan; 3. Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk; 4. Meningkatnya daya saing industri; dan 5. Meningkatnya daya saing perdagangan.	1. Peningkatan kesetaraan akses memperoleh pendapatan 2. Peningkatan kualitas layanan, kesehatan 3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan 4. Peningkatan daya saing industri yang berbasis sumber daya lokal 5. Peningkatan daya saing perdagangan	
5.	Boyolali lumbung padi dan pangan nasional	Meningkatkan produksi bahan pangan pertanian sebagai lumbung pangan nasional, dengan sasaran: meningkatnya produksi bahan pangan untuk berkontribusi pada pasar nasional.	- Peningkatan produksi dan industri berbasis pertanian	
6.	Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan	Meningkatkan produksi bahan pangan dari usaha peternakan dan perikanan, dengan sasaran: meningkatnya produksi, pengolahan hasil ternak dan perikanan untuk berkontribusi pada pasar nasional;	- Peningkatan produksi dan industri berbasis hasil peternakan dan perikanan	

No.	Visi dan Misi	Tujuan dan sasaran pokok	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Tahap ke IV RPJMD
7.	Boyolali lebih maju dan berteknologi	Meningkatkan pemasaran citra daerah dan pelayanan publik melalui teknologi informasi menuju Kabupaten Cerdas (<i>Smart City</i>), dengan sasaran: 1. meningkatnya layanan pemerintah, yang dapat dioperasikan dengan teknologi informasi; 2. Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali.	1. Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan kolaboratif 2. Peningkatan partisipasi masyarakat membangun daya saing daerah dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi	

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 difokuskan pada upaya-upaya untuk melanjutkan geliat ekonomi yang berwawasan lingkungan dan mengoptimalkan teknologi informasi, memberikan perlindungan jaminan sosial bagi kelompok rentan, dan serta mengevaluasi kondisi kemiskinan daerah untuk mengukur efisiensi dari program peningkatan kualitas hidup masyarakat Boyolali. Selain itu, pembangunan daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan Kabupaten Boyolali untuk maju sejahtera bersama.

Perencanaan pembangunan nasional Tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Tema RKP Tahun 2021 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Tatanan sosial baru”**.

Arah Pembangunan Nasional Tahun 2021 diprioritaskan pada:

- Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi;
- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
- Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Sasaran dan Target Pembangunan Nasional Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5%;
- Tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0%;
- Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7%;
- IPM menjadi 72,78-72,90;
- Gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379;
- Tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2%.

Lima (5) Arahan Utama Presiden dalam Pembangunan Nasional Tahun 2021 adalah:

Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat.

Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan *omnibus law*. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuh (7) Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2021:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selain itu pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanaan Reses juga menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Boyolali. Pokok-pokok pikiran DPRD untuk rancangan awal RKPD Tahun 2021 meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan dan jembatan untuk peningkatan keselamatan dan aksesibilitas;
2. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih, air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS);
3. Upaya penanganan masalah sanitasi dan pembangunan drainase / gorong-gorong;
4. Upaya penanggulangan bencana termasuk banjir, pencegahan erosi dan longsor;
5. Penyediaan sarana penerangan jalan umum (PJU);
6. Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
7. Pembangunan pertanian dalam arti luas untuk mewujudkan kedaulatan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas pertanian dengan perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi, embung), subsidi pupuk, bibit, alsintan, pembiayaan, pengembangan potensi pasar produk pertanian;
8. Pengembangan dan penataan potensi pariwisata dalam rangka mendukung perekonomian daerah, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
9. Sinergi seluruh komponen dari Pemerintah, stakeholders pembangunan, swasta dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2021 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu strategis serta kebijakan pembangunan nasional, maka kebijakan pembangunan daerah Tahun 2021 ditujukan “Percepatan

Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Daya Saing SDM". Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2021 tersebut, ditetapkan **Prioritas Pembangunan Jawa Tengah** Tahun 2021, meliputi:

- Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;
- Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM Berdaya Saing;
- Penguatan ketahanan bencana;
- Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2021 difokuskan pada:

- Pemulihan dan penguatan sektor perekonomian terdampak (industri, pariwisata, perdagangan, investasi dan pertanian);
- Pengurangan *Kingur* termasuk kelompok miskin baru;
- Kualitas SDM;
- Ketahanan bencana dengan penguatan bidang kesehatan, pengelolaan bencana, pangan, infrastruktur desa dan pariwisata;
- Program unggulan dan strategis RPJMD diutamakan pada yang sinergis dengan upaya pemulihan pasca Covid-19.

Dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah yang dituangkan dalam **Perpres 79 tahun 2019** tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Kawasan Subosukawonosraten dan Kawasan Bregasmalang. Kabupaten Boyolali dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 masuk dalam prioritas rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam Kawasan Perkotaan Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri - Sragen-Klaten (Subosukawonosraten). Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kawasan perkotaan, meliputi :

1. Peningkatan kawasan permukiman
2. Pengembangan infrastruktur wilayah yang memadai, antara lain Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) Regional, Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional, Sistem Jaringan Jalan, Pelayanan Perhubungan (Transportasi Massal, Bandara, Perkeretaapian, Terminal) dan Energi.
3. Pengembangan sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan.

Disamping itu Kabupaten Boyolali masuk dalam **Kawasan Agropolitan Kawasan Strategis Provinsi SEMARBOYONG (Semarang, Boyolali, Magelang)**. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kawasan agropolitan berbasis pertanian terintegrasi meliputi :

1. Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Petani;
2. Pengembangan pendidikan vokasi yang mendukung pertanian;
3. Peningkatan akses modal;
4. Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam budidaya pertanian;
5. Pengembangan pengolahan hasil pertanian;
6. Pengembangan sistem distribusi dan pemasaran;
7. Pengembangan sarana dan prasarana

Percepatan pembangunan ekonomi kawasan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Induk.

Dalam peningkatan akses pelayanan kewilayahan akan dilakukan peningkatan konektivitas di Solo Raya salah satunya yaitu Fasilitasi Pengembangan Bandara Adi Soemarmo Boyolali.

Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup akan dilakukan : Penanganan lahan kritis Merapi dan Lawu (Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen), Konservasi CAT (Cekungan Air Tanah) Karanganyar-Boyolali.

4.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Boyolali

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan, serta sebagai pedoman untuk menentukan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu.

Penetapan tema atau fokus tahunan tidak berarti mengabaikan kondisi lain yang memang harus dikerjakan terus menerus setiap tahun. Alokasi program rutin dan penyelenggaraan layanan publik terus menerus ada dan dialokasikan anggaran. Hal ini didasari prinsip perencanaan strategik teknokratis. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah; (2) Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Arah kebijakan Periode Tahun 2021 merupakan peluang penyempurnaan pencapaian target RPJMD, tercapainya masyarakat yang maju, berdaya saing, sejahtera dengan unggulan sebagai Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (Smart City), tema pembangunan tahap ini adalah:

" Kolaborasi Pemasaran Citra Kabupaten Boyolali untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Tatanan Sosial Baru"

Tahap ini merupakan periode pelengkap, jika ada target yang belum terpenuhi di tahapan berikutnya masih dilanjutkan pada tahun kelima. Namun dengan adanya Pandemi Covid-19 membutuhkan penyesuaian pada Agenda Pembangunan di Kabupaten Boyolali. Mulai Maret 2020 secara logika ada 2 (dua) Tahun Pembangunan RPJMD yang terdampak terutama karena prioritas anggaran untuk Penanganan dan Recovery Covid-19, sehingga dimungkinkan ada beberapa capaian RPJMD Tahun 2016-2021 yang tidak dapat berjalan secara optimal. Secara khusus periode penutup RPJMD tahap III (2016-2021) ditekankan pada partisipasi masyarakat untuk mengembangkan kemandirian usaha perekonomian berbasis teknologi informasi. Aktivitas perekonomian dan aktivitas sosial masyarakat diharapkan membantu pemerintah memasarkan citra kota (branding) sebagai daerah yang berdaya saing dengan berbagai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatifnya. Ditengah Pandemi Covid-19 aktivitas ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru. Tahun kelima ini juga menjadi periode menguatkan partisipasi masyarakat sebagai pilar penyangga pemerintahan yang berdemokrasi.

Prioritas Kabupaten Boyolali Tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru secara garis besar diarahkan mendukung:

- Pemasaran Citra Daerah, yaitu memasarkan popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali: pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata berbasis E-commerce;
- Program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana pemerintahan dan penunjang menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel sesuai standar Protokol Covid-19;
- Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau;
- Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan/perikanan, pariwisata dan kebudayaan untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata dan budaya, peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru;

- Memperkuat partisipasi masyarakat dan optimalisasi kemandirian wilayah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdaya saing tinggi di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial serta mempersiapkan mekanisme layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial sesuai standar Protokol Covid-19; dan
- Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusivitas wilayah.

Arah kebijakan yang akan dikembangkan pada Tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru adalah:

- Peningkatan kesetaraan akses memperoleh pendapatan termasuk upaya recovery golongan terdampak Covid-19;
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya penanganan dan pencegahan dampak Covid-19;
- Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan mempersiapkan mekanisme layanan pendidikan sesuai standar Protokol Covid-19;
- Peningkatan produksi dan industri berbasis hasil peternakan dan perikanan serta pemasaran berbasis Perdagangan Elektronik (E-commerce);
- Peningkatan partisipasi masyarakat membangun daya saing daerah dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi; dan
- Peningkatan daya saing perdagangan berbasis Perdagangan Elektronik (E-commerce).

Dalam rangka mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah yang dituangkan dalam **Perpres 79 tahun 2019** tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Subosukawonosraten, dimana Kabupaten Boyolali mendapatkan 3 (tiga) prioritas Program/ Kegiatan antara lain:

1. Revitalisasi waduk Cengklik. Masuk dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali, Program Utama 2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana, 2.4 Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, Poin 3 Peningkatan kapasitas tampung waduk-waduk eksisting melalui upaya pengerukan. Dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2016-2021 masuk dalam Kebijakan Umum (Bab VII RPJMD), Misi 2, Tujuan 3, PUPR (Meningkatkan kecukupan kebutuhan air baku untuk air minum dan pertanian dengan menyediakan sempadan disekitar sumber air baku (sempadan mata air, waduk, embung dan bendung)). Lahan revitalisasi seluas 250 Ha telah dalam kondisi siap, DED (Detailed Engineering Design) direncanakan tahun 2022 dan konstruksi tahun 2023.
2. Pembangunan Pasar Induk Simo dan Ampel. Masuk dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Boyolali, Program Utama 2. Perwujudan Kawasan Budidaya, 2.7 Kawasan Permukiman, a. Kawasan Permukiman Perkotaan, Poin 1 Penyediaan sarana atau fasilitas permukiman. Dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2016-2021 masuk dalam Kebijakan Umum (Bab VII RPJMD), Misi 4, Tujuan 6, Perdagangan (Meningkatkan kualitas sarana perdagangan tradisional dan modern, menata PKL serta meningkatkan ekspor). Lahan telah disiapkan di Kecamatan Ampel seluas 4,3 Ha dan Kecamatan Simo seluas 2 Ha. DED (Detailed Engineering Design) sudah ada dan konstruksi direncanakan pada tahun 2021.
3. Pembangunan Infrastruktur Pendukung KI Klego. Masuk dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Boyolali, Program Utama 2. Perwujudan Kawasan Budidaya, 2.5. Kawasan Peruntukan Industri, Poin 3 Penyediaan sarana prasarana kawasan industri sesuai dengan ketentuan. Dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2016-2021 masuk dalam Kebijakan Umum (Bab VII RPJMD), Misi 4, Tujuan 6, Perindustrian (Mengembangkan kawasan industri sesuai dengan tata guna lahan dan tata ruang wilayah). DED (Detailed Engineering Design) direncanakan tahun 2022 dan konstruksi pada tahun 2023.

Untuk mendukung pengembangan Kawasan Agropolitan Kawasan Strategis Provinsi SEMARBOYONG (Semarang, Boyolali, Magelang) Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 sedang melaksanakan kajian kawasan agropolitan.

Dalam peningkatan akses pelayanan kewilayahan peningkatan konektifitas di Solo Raya untuk Fasilitasi Pengembangan Bandara Adi Soemarmo Boyolali, dukungan yang dilakukan antara lain dengan turut mendukung terlaksananya pembangunan Tol Bandara Adi Soemarmo. Disamping itu terkait tata ruang di kawasan Bandara Adi Soemarmo sudah dilakukan penyesuaian untuk dapat dilakukan fasilitasi pengembangan.

Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup lahan kritis Merapi dan Lawu dan sebagai upaya Konservasi CAT (Cekungan Air Tanah) telah dilakukan penanaman 6500 bibit tanaman di Taman Nasional Gunung Merbabu, Bukit Kinasih Dukuh Pasha Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali pada Maret 2020.

Prioritas penanggulangan kemiskinan khususnya pada strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat dan Peningkatan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin pasca Pandemi Covid – 19 dengan Fokus penanggulangan adalah pada Social dan Economic Safety Net sebagai upaya pemulihan dan penguatan pasca pandemi Covid – 19 direncanakan akan dilaksanakan:

- Beasiswa miskin di bidang pendidikan;
- Jaminan Sosial Daerah di bidang kesehatan dan sosial;
- Insentif pertanian berupa bantuan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian;
- Insentif peternakan dan perikanan dengan bantuan bibit, pakan dan kesehatan hewan;
- Padat karya dengan sumber dana APBD maupun Dana Desa;
- Pengembangan UMKM, pendidikan dan pelatihan di Balai Latihan Kerja;
- Pengembangan investasi industry yang merekrut tenaga kerja local.

Dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good governance) dalam prioritas pembangunan tahun 2021 dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid – 19, Pemerintah Kabupaten Boyolali tetap berusaha mempertahankan capaian korpsurgah KPK, TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan), Indeks Survey Penilaian Integritas, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Reformasi Birokrasi (RB). Disamping itu berusaha mewujudkan tatanan baru termasuk pola kerja pegawai, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian yang lebih memanfaatkan Teknologi Informasi, pengembangan sistim pengendalian intern, inovasi dan efisiensi anggaran diantaranya E-Planning, E-Budgeting, E-PL, sistim informasi manajemen kepegawaian yang tersinkronisasi dengan kinerja dan presensi, E-Audit, review pendampingan dan siswakeudes. Pengadaan CPNS tahun 2021 tetap direncanakan untuk dilaksanakan.

Tabel IV.3
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 dengan
Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah/Fokus	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan V RPJMD
1.	Pandemi Covid-19	Percepatan pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru	a. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup; b. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran; c. Pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM Berdaya Saing; d. Penguatan ketahanan bencana; e. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.	a. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi; b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; c. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; d. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.	a. Pemasaran Citra Daerah, yaitu memasarkan popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali: pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata berbasis E-commerce; b. Program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana pemerintahan dan penunjang menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel sesuai standar Protokol Covid-19; c. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau; d. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian,peternakan/perikanan, pariwisata dan kebudayaan untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata dan budaya, peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru ; e. Memperkuat partisipasi masyarakat dan optimalisasi kemandirian wilayah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdaya saing tinggi di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial serta mempersiapkan mekanisme layanan

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah/Fokus	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan V RPJMD
					pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial sesuai standar Protokol Covid-19; dan f. Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusivitas wilayah.
2.	Perlindungan Lingkungan Hidup Implementasi Green Economy	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau;	a. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana.	a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; b. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; c. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.	a. Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air. b. Meningkatkan perlindungan sumber air dan ekosistemnya. c. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata. d. Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS. e. Meningkatkan kesadaran terkait sumber daya air. f. Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan melalui strategi menyelaraskan tumbuhnya investasi pada pengembangan produk unggulan daerah yang berwawasan lingkungan. g. Penegakan regulasi pengembangan bisnis/ usaha ramah lingkungan.
3.	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Akuntabel dan Demokratis	Program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana pemerintahan menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;	a. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.	a. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; b. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	a. Peningkatan kualitas perencanaan, tatalaksana penganggaran, pengelolaan keuangan daerah dan sinergitas sistem informasi daerah dengan sistem informasi pemeriksaan serta peningkatan kapasitas pemeriksa/auditor; b. Pengaturan struktur organisasi pemerintah beserta infrastruktur pendukungnya sesuai rasionalitas tuntutan kebutuhan berdasarkan

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah/Fokus	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan V RPJMD
					regulasi yang berlaku; c. Optimalisasi kemandirian pelayanan masyarakat; d. Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; e. Penyediaan ruang monitoring, evaluasi, dan komplain
4.	Pembangunan Infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau;	a. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana; b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing.	a. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	a. Pengembangan kerjasama multi pihak untuk pembangunan infrastruktur, termasuk partisipasi masyarakat; b. Pengembangan infrastruktur yang mengungkit pencapaian daya saing ekonomi, Kabupaten Hijau, Kabupaten Cerdas (<i>Smart City</i>); c. Pengembangan infrastruktur berdasarkan rasio kebutuhan pelayanan publik.
5.	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pengembangan infrastruktur sosial untuk menurunkan resiko penyandang masalah kesejahteraan sosial;	a. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran; b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing.	a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin	1. Peningkatan kesetaraan akses memperoleh pendapatan; 2. Pengembangan kebijakan daerah yang kondusif bagi peningkatan produksi peternakan/perikanan dan pemasaran hasil produk pertanian/peternakan/perikanan; 3. Pengembangan teknologi untuk peningkatan nilai tambah hasil peternakan/ perikanan; 4. Peningkatan upaya pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; 5. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah/Fokus	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan V RPJMD
				pemerataan; c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; d. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.	6. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. 7. Pemerataan infrastruktur kesehatan; 8. Peningkatan kesadaran masyarakat promosi dan preventif kesehatan; 9. Pemerataan infrastruktur pendidikan formal dan non formal;
6.	Peningkatan Daya Saing Daerah	a. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan/perikanan, pariwisata dan kebudayaan untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata, peningkatan kesejahteraan, penurunan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan; b. Memperkuat partisipasi masyarakat dan optimalisasi kemandirian wilayah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdaya saing tinggi di bidang pendidikan, kesehatan, dan	a. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana; b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing.	a. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; b. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;	a. Peningkatan daya saing industri yang berbasis sumber daya lokal; b. Peningkatan daya saing perdagangan; c. Peningkatan produksi dan industri berbasis pertanian; d. Peningkatan produksi dan industri berbasis hasil peternakan dan perikanan; e. Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana. f. Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/nilai, dan pemanfaatan inovasi. g. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui: pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah/Fokus	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan V RPJMD
		kesejahteraan sosial; c. Pemasaran citra daerah, yaitu memasarkan popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali, di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan kebudayaan.			eksport terutama produk hilirisasi, dan penguatan kemitraan. h. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan. i. Mengembangkan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM, Iptek, Pengembangan litbang keilmuan strategis, dan pengembangan teknologi <i>frontier</i>.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Tahun 2021 yang diusulkan melalui Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali diperkirakan sebesar Rp 2.321.498.963.000,00. Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk alokasi Belanja Operasi sebesar Rp 1.501.532.530.000,00, Belanja Modal sebesar Rp 446.326.194.000,00, Belanja Tak Terduga Rp 2.000.000.000,00 dan Belanja Transfer Rp 371.640.239.000,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 12.631.000.000,00. Proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 2.324.129.963.000,00 dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 10.000.000.000,00.

Tabel V.1
Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2021

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2021
1.	Pendapatan	2.324.129.963.000,00
1.1.	Pendapatan asli daerah	384.369.271.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	148.211.748.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	15.329.346.000,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	14.950.961.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah	205.877.216.000,00
1.2	Dana perimbangan	1.866.623.322.000,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	41.057.303.000,00
1.2.2	Dana alokasi umum	1.064.047.626.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	390.893.754.000,00
1.2.4	Dana Transfer Lainnya	370.624.639.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	73.137.370.000,00
1.3.1	Hibah	73.137.370.000,00
1.3.2	Dana darurat	0,00
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai PUU	0,00
2.	Belanja	2.321.498.963.000,00
2.1	Belanja Operasi	1.501.532.530.000,00
2.1.1	Belanja pegawai	1.002.168.822.000,00
2.1.2	Belanja barang jasa	438.018.735.000,00
2.1.3	Belanja bunga	0,00
2.1.4	Belanja subsidi	0,00
2.1.5	Belanja hibah	45.947.711.000,00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	15.397.262.000,00
2.2	Belanja Modal	446.326.194.000,00
2.3	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	371.640.239.000,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	14.854.110.000,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	356.786.129.000,00
3	Pembiayaan	-2.631.000.000,00

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2021
3.1	Penerimaan pembiayaan	10.000.000.000,00
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SilPA)	10.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan dana cadangan	0,00
3.1.3	Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0
3.2	Pengeluaran pembiayaan	12.631.000.000,00
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	12.631.000.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0
	Silpa	

Sumber: BKD Kab. Boyolali

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Program dan kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah merupakan urusan konkuren yang terdiri dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan serta fungsi lainnya yang menjadi kewenangan daerah.

5.1.1. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

Sesuai Pasal 12 UU 23 tahun 2014 meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial.

Urusan Pendidikan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Program Pendidikan Anak Usia Dini**
 Kegiatan diarahkan pada, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pengadaan alat praktik dan peraga siswa , pengadaan mebeluer sekolah, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik, Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini , Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini, dan Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini.
 Indikator program adalah ini Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun.
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**
 Kegiatan diarahkan pada Penambahan ruang kelas sekolah, Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah, Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah, Pembangunan perpustakaan sekolah, Pembangunan sarana air bersih dan sanitary, Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa, Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, Pelatihan kompetensi siswa berprestasi, Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS, Penyelenggaraan Paket A Setara SD, Penyelenggaraan Paket B Setara SMP, Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa, Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah, Monitoring evaluasi dan pelaporan, Peningkatan Manajemen Operasional Sekolah, Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Reguler).

Indikator program ini adalah Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/Paket A, Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/Paket B, Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Paket A, Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/Paket B.

- *Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan*
Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Sertifikasi pendidik, Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik, Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan, Monitoring evaluasi dan pelaporan, Fasilitasi Pengembangan Profesi.
Indikator program ini adalah persentase guru SD bersertifikat pendidik, persentase guru SMP bersertifikat pendidik, rasio guru terhadap jumlah siswa SD, rasio guru terhadap jumlah siswa SMP.
- *Program Pendidikan Non Formal*
Kegiatan diarahkan pada Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan, Pengembangan pendidikan keaksaraan, Pengembangan pendidikan kecakapan hidup, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal, publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal, Monitoring evaluasi dan pelaporan, Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha.
Indikator program adalah Presentase Buta Aksara > 15 tahun.
- *Program Manajemen Pelayanan Pendidikan*
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan, Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan, Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan.
Indikator program adalah Presentase SD berakreditasi minimal B dan Presentase SMP berakreditasi minimal B.

Kesehatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga*
Kegiatan diarahkan untuk Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi, Peningkatan Pelayanan Persalinan (Jampersal), Peningkatan pelayanan kesehatan balita, anak sekolah dan remaja, Peningkatan pelayanan gizi masyarakat, Pelayanan kesehatan lansia.
Indikator program adalah penurunan AKI AKB AKABA , terlaksananya pelayanan kesehatan balita anak sekolah dan remaja, Cakupan kunjungan bayi, Cakupan pelayanan anak balita, prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia, prosentase (%) Balita kurus yang mendapat makanan tambahan.
- *Program Pembiayaan kesehatan masyarakat*
Kegiatan diarahkan untuk Penyediaan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.
Indikator program adalah Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi masyarakat atau penduduk miskin.
- *Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.*
Kegiatan diarahkan untuk Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan, Pembinaan dan pengawasan bidang Kefarmasian.
Indikator program adalah Prosentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kefarmasian.
- *Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan*
Kegiatan diarahkan untuk Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga.
Indikator program adalah terlaksananya pemantauan kesehatan dan keamanan pangan di pasaran dan tempat produksi.

- Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit*

Kegiatan diarahkan untuk Peningkatan imunisasi dan vaksinasi, Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan KLB, Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung, Pencegahan dan penanggulangan penyakit tular vektor dan zoonotik, Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular termasuk gangguan jiwa.

Indikator program adalah terlaksananya kegiatan imunisasi sesuai jadwal pada bayi (0 - 12 bl) dan imunisasi ulangan pada anak SD dan bumil, terlaksananya surveillance dan respons terhadap KLB/Wabah, terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit tular vektor dan zoonotik, terlayannya penderita penyakit tidak menular dan gangguan jiwa, Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR), Angka kematian DBD (CFR), Prosentase Jumlah orang yang dites HIV dan menerima hasil dari kelompok resiko, Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi, Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM, Cakupan Desa UCI.
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan*

Kegiatan diarahkan untuk Peningkatan pelayanan Kesehatan Dasar, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan, Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar, Peningkatan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, Pembinaan Kesehatan Tradisional dan komplementer.

Indikator program adalah jumlah puskesmas terakreditasi, Cakupan rawat jalan (Puskesmas), Cakupan rawat inap (Puskesmas), cakupan respon aduan kegawatdaruratan kesehatan yang ditangani, dan tersedianya data pelayanan tradisional dan komplementer.
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat*

Kegiatan diarahkan untuk Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (Jasa Pelayanan), Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan, Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Indikator program adalah peningkatan pelayanan pada laboratorium kesehatan daerah, terlaksananya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olah raga, Cakupan SPM di Puskesmas (upaya kesehatan masyarakat).
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD*

Kegiatan diarahkan untuk Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan. Indikator program adalah operasional BLUD pada puskesmas lancar, Cakupan SPM di Puskesmas (upaya kesehatan perorangan).
- Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya*

Kegiatan diarahkan untuk pembangunan puskesmas. Indikator program adalah Jumlah Puskesmas Memenuhi Standar Permenkes.
- Program Pengembangan sumber daya kesehatan*

Kegiatan diarahkan untuk Peningkatan kapasitas dan kualitas dokter dan tenaga kesehatan.

Indikator program adalah Jumlah dokter dan tenaga kesehatan dikirim pelatihan, rasio dokter, rasio dokter gigi, rasio perawat, rasio bidan.
- Program Manajemen informasi dan regulasi kesehatan*

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan data dan informasi kesehatan.

Indikator program adalah prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi.
- Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat*

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, Pemberdayaan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Institusi.

Indikator program adalah Jumlah kampanye kesehatan melalui media elektronik, media cetak dan luar ruangan, Cakupan Desa atau Kelurahan Siaga Aktif Mandiri, Proporsi Rumah Tangga Sehat.
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat*

Kegiatan diarahkan untuk Penyediaan/Pengawasan Sarana Air Bersih Jamban dan SPAL, pengawasan higienitas dan sanitasi TTU dan TPM, Pengembangan Desa STBM. Indikator program adalah proporsi jamban sehat, Cakupan Desa STBM.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Pembangunan jalan dan jembatan*
Kegiatan diarahkan untuk Pembangunan jalan, Pembangunan jembatan.
Indikator program adalah Tersedianya data DED Jalan dan DED jembatan, proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik.
- *Program Pembangunan turap/talud/bronjong*
Kegiatan diarahkan untuk pembangunan turap/talud/bronjong.
Indikator program adalah panjang talud tebing sungai yang dibangun.
- *Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan*
Kegiatan diarahkan untuk rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.
Indikator program adalah panjang jaringan jalan yang dipertahankan dalam kondisi baik.
- *Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong*
Kegiatan diarahkan untuk pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
Indikator program adalah panjang drainase yang dibangun sebagai bangunan pelengkap jalan.
- *Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya*
Kegiatan diarahkan untuk Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air, Pemberdayaan petani pemakai air, Monitoring evaluasi dan pelaporan.
Indikator program adalah Luas sawah yang dapat dialiri air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.
- *Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya*
Kegiatan diarahkan untuk Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya.
Indikator program adalah Tersedianya air baku Melalui pembangunan embung.
- *Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah*
Kegiatan diarahkan untuk Terlaksana Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Penyediaan prasarana dan sarana air limbah.
Indikator program adalah Bertambahnya sanitasi berupa IPAL.
- *Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.*
Kegiatan diarahkan untuk Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa.
Indikator program adalah Terbangunya jaringan air bersih dengan sumber mata air bagi masyarakat, Tersedianya air bersih melalui sumur air tanah, Terkendalinya kegiatan penyediaan dan pengelolaan air baku di kab Boyolali, tersedianya data potensi air bawah tanah (data potensi air tanah/sumur uji).
- *Program Pengawasan jasa konstruksi*
Kegiatan diarahkan untuk Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.
Indikator program adalah Jumlah SIUJK yang diterbitkan.
- *Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang*
Kegiatan diarahkan untuk Survey dan pemetaan, Pengawasan pemanfaatan ruang.
Indikator program adalah Terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR - terwujudnya tertib tata ruang di Kabupaten Boyolali, Pelayanan Legalisasi Rekomteks IMB.

- *Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah*
Kegiatan diarahkan untuk Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
Indikator program Terlaksananya fasilitasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
- *Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan*
Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan pertanahan secara elektronik dan memudahkan pengusaha untuk berinvestasi.
Indikator program Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan.

Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Pengembangan Perumahan*
Kegiatan diarahkan untuk Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan, Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan, Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, Fasilitasi dan koordinasi kelistrikan bagi masyarakat kurang mampu, Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat.
Indikator program adalah tersusunnya kebijakan, strategi dan program perumahan dengan baik, terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan, Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi masyarakat Kurang mampu, Menurunnya kawasan kumuh, Terfasilitasinya sambungan jaringan listrik baru bagi masyarakat kurang mampu, tersedianya Dokumen RP3KP.
- *Program Lingkungan Sehat Perumahan*
Kegiatan diarahkan untuk Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan.
Indikator kegiatan adalah Terlaksananya Program Pendampingan Kota Tanpa Kumuh, menurunnya resiko pencemaran lingkungan.
- *Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan*
Kegiatan diarahkan untuk Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.
Indikator program adalah terlaksananya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan uu perumahan, Tercapainya Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
- *Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial*
Kegiatan diarahkan untuk Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam, dan Fasilitasi dan Stimulasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban Relokasi Proyek Pemerintah Kabupaten.
Indikator program adalah Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana alam, terfasilitasinya pembangunan perumahan akibat bencana alam.

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan*
Kegiatan diarahkan untuk penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat, pengendalian keamanan lingkungan.
Indikator program adalah Terkirimnya Satlinmas Pada Upacara Hari Besar dan Pelatihan/Kursus Singkat, Terpenuhinya kegiatan operasi tipiring, cukai tembakau, PKL dan baliho/iklan, Terpenuhinya kegiatan patroli wilayah, tertib lalu lintas terpadu, pengamanan lebaran, natal dan tahun baru, cakupan kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian kebisingan dan pengendalian keamanan lingkungan.

- *Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.*
Kegiatan diarahkan untuk Pentas seni dan budaya festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. Disamping itu kegiatan juga diarahkan untuk fasilitasi pencapaian *Halaqoh* dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan, seminar *talk show* diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.
Indikator program adalah cakupan kegiatan *event* pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan cakupan penyelesaian konflik antar umat beragama.
- *Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.*
Kegiatan diarahkan untuk penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi. Indikator program adalah cakupan kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat.
- *Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran*
Kegiatan diarahkan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran, pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.
Indikator program adalah tersedianya tenaga yang terlatih, sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, Kesiapan tanggap darurat kebakaran.
- *Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat*
Kegiatan diarahkan untuk Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi, peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba.
Indikator program adalah cakupan Sosialisasi P4GN.

Sosial

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial Lainnya.*
Kegiatan diarahkan untuk Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin, Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, Operasional dan Monitoring Program Keluarga Harapan, Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Indikator program adalah Terlaksananya pembinaan bagi masyarakat miskin (melalui KUBE dan KRSE), Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi PMKS, Tersedianya data PMKS, Terpantaunya penerima manfaat PKH tepat sasaran.
- *Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial*
Kegiatan diarahkan untuk Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia, Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana, Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS, Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, Monitoring evaluasi dan pelaporan, persentase fakir miskin yang diberdayakan, Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan, Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah singgah.
Indikator program adalah Terlaksananya pelatihan bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal, Terlaksananya pembinaan bagi TAGANA, Tersedianya kebutuhan rumah perlindungan sosial, Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial.
- *Program Pembinaan anak terlantar*
Kegiatan diarahkan untuk pembangunan sarana prasarana tempat penampungan anak terlantar, pelatihan ketrampilan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar.
Indikator program adalah Terbangunnya gedung/RPS (lanjutan) bagi PMKS, Meningkatnya ketrampilan bagi anak terlantar, Tersusunnya data dan analisa masalah anak terlantar.

- *Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma*
Kegiatan diarahkan untuk Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma. Indikator program adalah prosentase penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan sosial.
- *Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo*
Kegiatan diarahkan untuk Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo, Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo. Indikator program adalah Terlaksananya pelayanan terhadap panti asuhan /panti jompo, Meningkatnya ketrampilan bagi penghuni panti, meningkatnya pemahaman PSKS dalam penanganan PMKS serta peran aktif dan kepedulian masyarakat dalam UKS.
- *Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial*
Kegiatan diarahkan untuk Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha, Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat, Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial. Indikator program adalah meningkatnya pemahaman PSKS dalam penanganan PMKS serta peran aktif dan kepedulian masyarakat dalam UKS.

5.1.2. Urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar

Tenaga Kerja

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Peningkatan Kesempatan Kerja*
Kegiatan diarahkan untuk penyusunan informasi bursa tenaga kerja, penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, kerjasama pendidikan dan pelatihan, penyiapan tenaga kerja siap pakai, pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan, pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat, dan monitoring evaluasi dan pelaporan. Indikator program adalah terlaksananya penyusunan buku IPK, pelatihan pencari kerja unit pencari kerja tertentu, terciptanya LPKS yang berkualitas, terlaksananya pelatihan wirausaha baru bagi tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur, terserapnya tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur, jumlah penempatan pencari kerja yang terdaftar (jiwa).
- *Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja*
Kegiatan diarahkan untuk pembangunan Balai Latihan Kerja, Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja, Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, dan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK. Indikator program adalah terbangunnya gedung balai latihan kerjatersedianya peralatan untuk menunjang pelatihan, tenaga kerja yang meningkat kompetensinya, Jumlah Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya (jiwa).

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan*
Kegiatan diarahkan untuk Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan, Pendidikan dan Pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender, Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera, Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha, dan Monitoring dan Evaluasi dan pelaporan. Indikator program adalah Jumlah Organisasi Perempuan Terbina, jumlah penyuluhan bagi ibu rumah tangga, Terlaksananya monev dan SIGA, jumlah kelompok uppks dan pos daya yang aktif.

- *Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utama Gender dan Anak*
Kegiatan diarahkan untuk Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2), Penguatan kelembagaan Pengarus Utama Gender dan anak, dan Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Indikator program adalah meningkatnya jumlah desa layak anak, Terlaksananya evaluasi Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi, Pemenuhan Hak Anak, Meningkatnya penanganan kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- *Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan*
Kegiatan diarahkan untuk Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan, Monitoring evaluasi dan pelaporan, dan Pembinaan sarana hubungan industrial kesejahteraan pekerja pengupahan dan usulan UMK.
Indikator program adalah jumlah pembinaan yang dilakukan tentang hubungan industrial, jumlah perusahaan yang memenuhi syarat-syarat kerja dan perlindungan pekerja, jumlah perusahaan yang membayar sesuai regulasi (perusahaan).
- *Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan*
Kegiatan diarahkan untuk Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, dan Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT.
Indikator program adalah terlaksananya pelatihan bagi pelatih pendamping KDRT, meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Pangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan*
Kegiatan diarahkan untuk Penanganan daerah rawan pangan, Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan, Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan, Monitoring evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberasan, Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, Pemantauan dan analisis harga pangan pokok, Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, Pengembangan cadangan pangan daerah, Pengembangan desa mandiri pangan, Pengembangan lumbung pangan desa, Pengembangan model distribusi pangan yang efisien, Peningkatan mutu dan keamanan pangan, Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen, Penyelenggaraan lomba/pameran ketahanan pangan, dan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.
Indikator program adalah Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), Tersedianya dokumen Neraca Bahan Makanan, Terpantaunya pengelolaan kelembagaan dan kegiatan LPMD, Meningkatnya pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari, LDPM, dan PUPM, Data dan informasi harga, akses, dan pasokan pangan, Jumlah replikasi Desa Mandiri Pangan, Jumlah anggota KWT yang meningkat ketrampilannya, Jumlah keikutsertaan lomba cipta menu dan pameran ketahanan pangan, Jumlah rakor Dewan Ketahanan pangan, dan Skor Pola Pangan Harapan.

Lingkungan Hidup

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*
Kegiatan diarahkan untuk Penataan RTH, Pemeliharaan RTH, Pengembangan Taman Rekreasi, Koordinasi Pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau, dan Pengawasan dan pengendalian RTH.
Indikator program adalah Luasan RTH publik.

- *Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan*
Kegiatan diarahkan untuk Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura, Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Pengkajian dampak lingkungan, Koordinasi penyusunan AMDAL, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.
Indikator program adalah Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki rekomendasiUKL/UPL, kelayakan Amdal, dan atau izin lingkungan dan Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ditindak lanjuti, Tersedianya dokumen hasil kajian dampak lingkungan hidup, jumlah a sekolah peduli lingkungan.
- *Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH*
Kegiatan diarahkan untuk Pengembangan data dan informasi lingkungan.
Indikator program adalah Data SDA dan LH.
- *Program Peningkatan Pengendalian Polusi*
Kegiatan diarahkan untuk Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri, Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair, Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi dan Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran.
Indikator program adalah hasil perhitungan beban pencemaran yang meliputi parameter BOD, COD, TSS air sungai dan waduk dan hasil uji kualitas udara ambien (SO₂, CO, NO₂, TSP).
- *Program Perlindungan dan Konservasi SDA*
Kegiatan diarahkan untuk Pengembangan Ekowisata dan jasa lingkungan, Pengendalian dampak perubahan iklim, Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan air dan sumber-sumber air, dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA.
Indikator program adalah bertambahnya sarana kelengkapan Kebun Raya Indrokilo, terjaganya k2 aneka ragam hayati/ tersusunnya buku report Inventarisasi Emisi GRK, meningkatnya jumlah sumur resapan, bertambahnya lubang resapan biopori, peningkatan cadangan air tanah.
- *Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan*
Kegiatan diarahkan untuk Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, Pengembangan teknologi pengolahan persampahan, Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan, dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
Indikator program adalah cakupan wilayah yang melakukan pengelolaan sampah mandiri di lingkungan perkotaan, meningkatnya jumlah bank sampah beserta kelengkapannya.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Penataan Administrasi Kependudukan*
Kegiatan diarahkan untuk pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu, koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, pengembangan data base kependudukan, peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil, sosialisasi kebijakan kependudukan, peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan, monitoring evaluasi dan pelaporan, peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil, pelayanan administrasi kependudukan, penanganan pengaduan pelayanan adminduk, dan penyediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Indikator program adalah cakupan penerbitan kartu keluarga, cakupan penerbitan kartu tanda penduduk, cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun, cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran dari jumlah penduduk, cakupan penerbitan kutipan akte kematian, dan cakupan kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-el.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/ Kelurahan*
Kegiatan diarahkan untuk Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat, dan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa.
Indikator program adalah Cakupan kemampuan kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K), Cakupan pembangunan infrastruktur desa yang difasilitasi pelaksanaannya, Cakupan kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat, Jumlah TTG/Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Cakupan kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
- *Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan/kelurahan*
Kegiatan diarahkan untuk Monitoring evaluasi dan pelaporan.
Indikator program adalah Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
- *Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.*
Kegiatan diarahkan untuk Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa, dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat.
Indikator program adalah Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat.
- *Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan*
Kegiatan diarahkan untuk Fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas PKK kabupaten/ desa/ kelurahan.
Indikator program adalah meningkatnya kemampuan pengurus PKK desa/kelurahan.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga*
Kegiatan diarahkan untuk Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan.
Indikator program adalah Meningkatnya Kualitas Tribina.
- *Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri*
Kegiatan diarahkan untuk Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB, dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader dan Kelompok Masyarakat Peduli KB.
Indikator program adalah Pengelolaan Data dan Informasi Program KB, dan Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Program KB.
- *Program Informasi Kependudukan dan KB*
Kegiatan diarahkan untuk Koordinasi Pengelolaan Program, Pengelolaan Data dan Informasi Program KB, Koordinasi Pengendalian Penduduk, Analisa Data Pengendalian Kependudukan, dan Fasilitasi Kualisi Penduduk Pembangunan serta Fasedu.
Indikator program adalah Tersusunnya dokumen analisa data pengendalian penduduk, Meningkatnya peran Toma,Toga dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk, Terlaksananya pengelolaan data dan laporan program KB/KS, terpenuhinya dokumen rumusan kebijakan Kependudukan.

- *Program Keluarga Berencana*
Kegiatan diarahkan untuk Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin, Pelayanan KIE, Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu, Pembinaan Keluarga Berencana, Pengadaan sarana mobilitas tim KB Keliling, dan Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan kesehatan reproduksi.
Indikator program adalah Meningkatnya Pelayanan KB, Terlaksanannya KIE Program KB-KS Melalui Mupen, Pemberian bantuan kepada akseptor kegagalan/komplikasi, jumlah kelompok KB pria terbina.
- *Program Pelayanan Kontrasepsi*
Kegiatan diarahkan untuk Pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB.
Indikator program adalah Meningkatnya peserta KB di daerah Galcitas.
- *Program Kesehatan Reproduksi Remaja*
Kegiatan diarahkan untuk Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
Indikator program adalah Cakupan Jumlah Kelompok KKR yang Aktif.
- *Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR*
Kegiatan diarahkan untuk Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah.
Indikator program adalah Berkembangnya Kelompok PIK Remaja.
- *Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS*
Kegiatan diarahkan untuk Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS.
Indikator program adalah Cakupan Pemahaman Perempuan dan Remaja tentang Narkoba dan HIV/AIDS.

Perhubungan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program pengembangan pengelolaan penerangan jalan umum*
Pembangunan penerangan jalan umum.
Indikator program adalah Terlaksananya pembangunan lampu PJU
- *Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan*
Kegiatan diarahkan untuk Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan, dan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan.
Indikator program adalah Tersedianya dokumen sebagai pengambil kebijakan di bidang perhubungan
- *Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ*
Kegiatan diarahkan untuk Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor, Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan, dan Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana gedung pengujian kendaraan bermotor.
Indikator program adalah Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ
- *Program peningkatan pelayanan angkutan*
Kegiatan diarahkan untuk kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang, Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum, Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan, dan Kegiatan pemilihan, pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan, dan Pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ.
Indikator program adalah Tersedianya sarpras pelayanan angkutan umum
- *Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan*
Kegiatan diarahkan untuk penataan lingkungan sarana perhubungan.
Indikator program adalah Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan
- *Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas*
Kegiatan diarahkan untuk Pengadaan rambu-rambu lalu lintas, Pengadaan marka jalan, Pengadaan pagar pengaman jalan, Inspeksi keselamatan lalu lintas, dan Peningkatan kapasitas keselamatan berlalu-lintas.

Indikator program adalah Tersedianya sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan

- *Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor*
Kegiatan diarahkan untuk Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor, Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, dan Penyediaan sistem informasi pelayanan dan data base kendaraan.
Indikator program adalah Tersedianya kelenkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor.

Komunikasi dan Informatika

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa*
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, Pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Intensifikasi Retribusi Menara Telekomunikasi, dan Penyebarluasan publikasi hasil-hasil pembangunan.
Indikator program adalah Tersedianya sarana telekomunikasi dan informasi yang mendukung pelayanan kepada masyarakat.
- *Program Kerjasama informasi dengan mas media.*
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan penyebaran informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.
Indikator program adalah terwujudnya penyebaran informasi pembangunan daerah.
- *Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.*
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
Indikator program adalah Jumlah kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi dan protokol.
- *Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.*
Kegiatan ini diarahkan pada Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah, Penyusunan dan pengumpulan data PDRB, Pengolahan, updating dan analisis data PDRB , Penyusunan dan Analisis data/ Informasi Perencanaan pembangunan Ekonomi (NTP), dan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah (IE).
- *Program penyelenggaraan persandian*
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Kegiatan bidang persandian yang telah dilaksanakan di lingkungan Setda Kabupaten Boyolali.
Indikator program adalah Terlaksananya fasilitasi layanan persandian.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif*
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah, dan Perencanaan koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah.
Indikator program adalah jumlah UMKM yang melaksanakan pola kemitraan.
- *Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM*
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi, Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, dan Monitoring evaluasi dan pelaporan.
Indikator program adalah Jumlah SDM UMKM yang terlatih.
- *Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi*
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian, Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian, Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi

berprestasi, Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, dan Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi.

Indikator program adalah Jumlah Koperasi yang di bina yang meningkat nilai kesehatannya.

- *Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM*

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi, Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga, Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah, Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal, dan Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga industri kecil dan industri menengah.

Indikator program adalah Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit.

Penanaman Modal.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.*

Kegiatan diarahkan untuk Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal, dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan.

Indikator program adalah rata-rata lama pengurusan perizinan dan meningkatnya realisasi investasi .

- *Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi.*

Kegiatan diarahkan untuk pengembangan potensi unggulan daerah, Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, Peningkatan kegiatan values pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, dan Penyelenggaraan pameran investasi.

Indikator program adalah meningkatnya jumlah Investasi.

- *Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah.*

Kegiatan diarahkan untuk Penyusunan Regulasi Daerah Guna Peningkatan Pelayanan Investasi.

Indikator program adalah penyederhanaan produk hukum daerah yang pro investasi.

Kepemudaan dan Olah Raga

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program peningkatan peran serta kepemudaan.*

Kegiatan diarahkan untuk Pembinaan organisasi kepemudaan, Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan, dan Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan.

Indikator program adalah Jumlah Pemuda mendapat penghargaan tingkat propinsi.

- *Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.*

Kegiatan diarahkan untuk Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda.

Indikator program adalah Jumlah pemuda dalam pengembangan kepedulian dan kekeloporan pemuda (PKKP).

- *Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga.*

Kegiatan diarahkan untuk Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah, Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah, Penyelenggaraan kompetisi olahraga, Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi, Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat, dan Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih peneliti praktisi dan teknisi olahraga.

Indikator program adalah Peringkat PORDA.

- *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.*

Kegiatan diarahkan untuk Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga dan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga.
Indikator program adalah bertambahnya lapangan olahraga, dan sarana dan prasarana olah raga keadaan baik.

Kebudayaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Pengembangan Nilai Budaya.*
Kegiatan diarahkan untuk pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.
Indikator program adalah terlestarikannya dan terlaksananya event budaya.
- *Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.*
Kegiatan diarahkan untuk Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, dan Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala museum dan peninggalan bawah air.
Indikator program adalah Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan dan terpelihara baik.
- *Program Pengelolaan Keragaman Budaya.*
Kegiatan diarahkan untuk Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, Penyelenggaraan dialog kebudayaan, Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah, dan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.
Indikator program adalah Jumlah tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya, Jumlah pelaku seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan, Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya dan *event* seni dan budaya.

Perpustakaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Pengembangan Budaya baca dan pembinaan Perpustakaan.*
Kegiatan diarahkan untuk Pengembangan minat dan budaya baca, Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum perpustakaan khusus perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan.
Indikator program adalah Peningkatan upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca.

Kearsipan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan.*
Kegiatan diarahkan untuk Pembangunan data base informasi kearsipan, kajian sistem administrasi kearsipan.
Indikator program adalah Tertibnya penyimpanan arsip dinamis in aktif dari satuan kerja.
- *Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi.*
Kegiatan diarahkan untuk Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip, Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta.
Indikator program adalah Peningkatan pemahaman pengelolaan kearsipan bagi pejabat dilingkungan Pemerintah Kab. Boyolali.
- *Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasara kearsipan.*
Kegiatan diarahkan untuk Monitoring evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.
Indikator program adalah Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kab. Boyolali.
- *Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.*
Kegiatan diarahkan untuk Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
Indikator program adalah tertibnya penyimpanan arsip in aktif dari satuan kerja.

5.1.3. Urusan Pilihan.

Kelautan dan Perikanan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Pengembangan Budidaya Perikanan*
Kegiatan diarahkan untuk Pengembangan bibit ikan unggul, Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan, Pembinaan dan pengembangan perikanan.
Indikator Program adalah Meningkatnya produksi ikan (ton).
- *Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan*
Kegiatan diarahkan untuk Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
Indikator Program adalah Meningkatnya produk olahan ikan (ton).
- *Program pengembangan perikanan tangkap*
Kegiatan diarahkan untuk Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap.
Indikator Program adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap.
- *Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan*
Kegiatan diarahkan untuk Kajian sistem penyuluhan perikanan.
Indikator Program adalah meningkatnya produksi ikan
- *Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar*
Kegiatan diarahkan untuk Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
Indikator Program adalah meningkatnya produksi ikan.

Pariwisata

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Pengembangan Destinasi Pariwisata*
Kegiatan diarahkan untuk Pengembangan objek pariwisata, unggulan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan, Pengembangan daerah tujuan wisata, Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi.
Indikator Program adalah Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, prosentase sarana dan prasarana pariwisata yang layak, jumlah potensi wisata yang akan dibangun menjadi obyek wisata, prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha pariwisata.
- *Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata*
Kegiatan diarahkan untuk Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata, Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.
Indikator Program adalah Cakupan Sarana Promosi Pariwisata.
- *Program Pengembangan Kemitraan*
Kegiatan diarahkan untuk Pengembangan dan penguatan informasi dan database, Pengembangan Sumber Daya manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata, Monitoring evaluasi dan pelaporan.
Indikator Program adalah Jumlah Desa Wisata.

Pertanian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan*
Kegiatan diarahkan untuk Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan, Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian, Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan, Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ramah Lingkungan Tanaman Obat, Peningkatan Produksi

dan Produktivitas Produk Sayuran Ramah Lingkungan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sarana dan prasarana pertanian, Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A. Indikator Program adalah Jumlah produksi pangan utama (Ton) : Padi, Jumlah produksi pangan lainnya (Ton) : - Jagung, Kedelai, Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Pepaya, Cabe, Bawang Merah, Jahe, Kencur

- *Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan*

Kegiatan diarahkan untuk Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar, Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim, Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan, Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan, Pengembangan pengelolaan perbenihan perkebunan, Fasilitasi penggunaan dan pengelolaan Alat Mesin Perkebunan, Pengembangan usaha kelembagaan dan SDM perkebunan.

Indikator Program adalah Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Cengkeh, kopi, kelapa, tembakau, tebu, lada, atsiri.

- *Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.*

Kegiatan diarahkan untuk Penelitian dan Pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah, Pengembangan Pengolahan Atas Hasil Pertanian.

Indikator Program adalah Volume perdagangan produk usaha pertanian (ton).

- *Program Peningkatan Kesejahteraan Petani*

Kegiatan diarahkan untuk Peningkatan kemampuan lembaga petani, Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani, Fasilitasi pengelolaan hasil, pasca panen dan pemasaran komoditas perkebunan.

Indikator Program adalah Cakupan petani yang mendapat pelatihan, bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu.

- *Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.*

Kegiatan ini diarahkan pada kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.

Indikator program adalah jumlah percontohan budidaya dan teknologi pertanian.

- *Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan.*

Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan.

Indikator program adalah peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani.

Perdagangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri*

Kegiatan diarahkan untuk Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk, Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha, Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan, Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan, Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pengelolaan Pendapatan retribusi pasar milik Pemda, Pendataan potensi pasar milik Pemda.

Indikator Program adalah Meningkatnya sarpras perdagangan yang representatif.

- *Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan*

Kegiatan diarahkan untuk Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.

Indikator Program adalah Lokasi pedagang pasar, PKL, dan Asongan yang tertib dan tertata.

- *Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan*

Kegiatan diarahkan untuk Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah, Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen.

Indikator Program adalah Jumlah pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen.

- *Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor*

Kegiatan diarahkan untuk Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor, Kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional bilateral regional dan internasional, Pembangunan promosi perdagangan internasional.

Indikator Program adalah Meningkatnya nilai ekspor barang (USD).

Perindustrian.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah*

Kegiatan diarahkan untuk Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri.

Indikator Program adalah Semakin berkembangnya IKM.

- *Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri*

Kegiatan diarahkan untuk Pembinaan kemampuan teknologi industri.

Indikator Program adalah Meningkatnya penerapan teknologi dan standart produk industri daerah.

- *Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.*

Kegiatan diarahkan untuk Pengembangan sistem inovasi teknologi industri.

Indikator Program adalah Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk unggulan.

Transmigrasi

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Pengembangan wilayah transmigrasi.*

Kegiatan diarahkan untuk Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM.

Indikator Program adalah Transmigran yang ditempatkan (KK).

5.1.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Perencanaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Perencanaan pembangunan daerah.*

Kegiatan diarahkan untuk Penyusunan rancangan RPJMD , Penyusunan rancangan RKPD, Monitoring evaluasi dan pelaporan, Penyusunan Renstra dan Renja PD, Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS , Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Indikator program adalah Jumlah dokumen RKPD dan RPJMD, Jumlah dokumen Evaluasi, Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD, dan Terverifikasinya RKA OPD.

- *Program Pengembangan data/informasi.*

Kegiatan diarahkan untuk Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, Penyusunan Profil Daerah, Pengelolaan dan Pengelolaan SIPD Online, dan Pengelolaan dan Pengembangan Web.

Indikator program adalah Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencanaan.

- *Program Perencanaan pembangunan ekonomi.*

Kegiatan diarahkan untuk Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah, Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat, dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

Indikator program adalah Jumlah rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan ekonomi (dokumen).

- *Program Perencanaan pembangunan sosial budaya.*
Kegiatan diarahkan untuk Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan dan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya.
Indikator program adalah Jumlah rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan sosial budaya.
- *Program Perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam.*
Kegiatan diarahkan untuk penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (KLHS).
Indikator program adalah Jumlah kajian rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam.
- *Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.*
Kegiatan diarahkan untuk Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana.
Indikator program adalah tersusunnya studi data infrastruktur dan potensi rawan bencana.
- *Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.*
Kegiatan diarahkan untuk Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
Indikator program adalah Jumlah rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan prasarana dan sumber daya alam (proposal).
- *Program Perencanaan Pembangunan bidang pemerintahan.*
Kegiatan diarahkan untuk Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Renaksi PPK dan aksi HAM.
Indikator program adalah Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan.
- *Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.*
Kegiatan diarahkan untuk Koordinasi perencanaan air minum drainase dan sanitasi perkotaan.
Indikator program adalah Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan air minum/air bersih dan sanitasi.
- *Program Kerjasama pembangunan daerah.*
Kegiatan diarahkan untuk Penguatan Kelembagaan FEDEP dan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah.
Indikator program adalah Jumlah kerjasama pembangunan daerah yang diimplementasikan.
- *Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.*
Kegiatan diarahkan untuk Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana.
Indikator program adalah Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana.

Keuangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.*
Kegiatan diarahkan untuk Penyusunan analisa standar belanja , Penyusunan standar satuan harga, Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, Peningkatan manajemen aset/barang daerah, Peningkatan manajemen investasi daerah, Revaluasi/appraisal aset/barang daerah, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, Intensifikasi Pajak Daerah, Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB, Intensifikasi Pendapatan Lain-Lain, Koordinasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Perencanaan dan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan

Barang Milik Daerah, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindah Tanganan Aset Daerah, Penyusunan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah, Pengendalian Pengeluaran Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Daerah, Pengendalian Operasional Pendapatan Daerah, Pengelolaan Kas Daerah, Penelitian dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD, Pemeliharaan Data PBB dan BPHTB, Peningkatan Pelayanan Publik Bidang PBB dan BPHTB, Pengembangan Pengelolaan Gaji, dan penyusunan Perda dan Perbup BMD.

Indikator program adalah Opini BPK atas laporan.

- *Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.*
Kegiatan diarahkan untuk Evaluasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
Indikator program adalah Terlaksananya evaluasi program pengelolaan keuangan daerah.
- *Program Pengendalian Kerugian Daerah.*
Kegiatan diarahkan untuk Penyelesaian Tuntutan Perpendaharaan TPTGR.
Indikator program adalah terselesaainya kasus TPTGR.

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Pendidikan kedinasan*
Kegiatan diarahkan untuk Pendidikan penjenjangan structural, Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan, Peningkatan keterampilan dan profesionalisme, dan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
Indikator program adalah Prosentase pejabat struktural yang telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai tingkatan.
- *Program Pembinaan dan pengembangan aparatur*
Kegiatan diarahkan untuk Seleksi penerimaan calon PNS, Penempatan PNS, Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS, Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah, Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS, Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar, Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, Penyelenggaraan diklat teknis fungsional dan kepemimpinan, Pembinaan Mental Pegawai, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
Indikator program adalah Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- *Program Fasilitasi pindah/purna tugas*
Kegiatan diarahkan untuk Pemulangan pegawai yang pensiun dan Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki masa purna tugas.
Indikator program adalah Prosentase pegawai yang memperoleh keputusan pensiun tepat waktu.
- *Program peningkatan disiplin aparatur.*
Kegiatan diarahkan pada Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.*
Kegiatan diarahkan pada sosialisasi peraturan perundang-undangan, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah, Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah.

Penelitian dan Pengembangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Penelitian dan pengembangan inovasi daerah.*
Penjaringan KRENOVA Kabupaten Boyolali, Koordiasi bidang penelitian dan pengembangan, Kajian penelitian dan pengembangan, Penguatan sistem inovasi daerah dan Fasilitasi penerapan hasil penelitian dan pengembangan.

Indikator program adalah Jumlah inovasi hasil pemenang lomba krenova , Jumlah dokumen kajian litbang , Terwujudnya kapasitas kelembagaan SIDa yang memadahi (1 dokumen) , Jumlah dokumen kerjasama penerapa hasil penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan inovasi kesejahteraan masyarakat.

5.1.5. Fungsi Lainnya

Kesekretariatan DPRD

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- *Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.*
Pembahasan rancangan peraturan daerah, Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, Rapat-rapat paripurna, kegiatan Reses, Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, Penyebarluasan Informasi DPRD.
Indikator program adalah terlaksananya layanan fasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan.

Pembinaan dan Pengawasan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.*
Kegiatan diarahkan untuk pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala, Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, Inverisasi temuan pengawasan, Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara, Reviu dan Evaluasi SAKIP, Penanganan Gratifikasi, Review Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penerapan SPIP, Penanganan Saberpungli, Zona Integritas.
Indikator program adalah Menurunnya jumlah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI.
- *Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.*
Kegiatan diarahkan untuk pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
Indikator program adalah Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional.

Penyusunan Kebijakan, Koordinasi Administrasi dan Pelayanan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- *Program Pendidikan Politik Masyarakat*
Kegiatan diarahkan untuk jumlah Penyuluhan kepada masyarakat, fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik, Koordinasi forum-forum diskusi politik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pengkondisian Wilayah dan Sosialisasi Pemilu.
Indikator program adalah jumlah kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, data dan jumlah kasus perselisihan partai yang tertangani, jumlah diskusi politik yang dilaksanakan, Laporan Hasil monev, jumlah wilayah kondisi politik keadaan baik.
- *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH*
Kegiatan diarahkan untuk Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala, Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, Inventarisasi temuan pengawasan, Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara, Reviu dan Evaluasi SAKIP, Penanganan Gratifikasi, Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penerapan SPIP,

Penanganan Saberpungli, Zona Integritas, Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Indikator program adalah Persentase pelaksanaan pemeriksaan reguler terhadap seluruh objek pemeriksaan, Prosentase aduan masyarakat atau sumber lain yang ditindak lanjuti, Dokumen laporan Gelar Pengawasan Daerah, Jumlah dokumen tindak lanjut LHP, Laporan hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara, Tersusunnya laporan reviu dan laporan SAKIP, Dokumen laporan penanganan gratifikasi, Tersusunnya dokumen Reviu LKPD dan Reviu RKA, Meningkatnya level maturitas SPIP, Laporan pelaksanaan saberpungli, Jumlah OPD yang menjadi pilot project ZI, Laporan pengawasan pemerintah dan pembangunan daerah.

- *Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan*
Kegiatan diarahkan untuk Fasilitasi dan Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan.
- *Program Peningkatan Pelayanan Publik*
Kegiatan diarahkan untuk Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Perangkat Perangkat Daerah.
- *Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*
Kegiatan diarahkan untuk Rapat Koordinasi Unsur Muspida dan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah/Perangkat Kelurahan.
- *Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*
Kegiatan diarahkan untuk koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya (APKASI).
- *Program penataan daerah otonomi baru*
Kegiatan diarahkan untuk fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah.
- *Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan*
Kegiatan diarahkan untuk pelayanan administrasi dan publik kecamatan/kelurahan.
- *Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan*
Kegiatan diarahkan untuk Monitoring evaluasi dan pelaporan. Indikator program adalah Terlaksananya Rakor Bidang Pertambangan dan pemanfaatan air tanah.
- *Program Pengembangan data/informasi*
Kegiatan diarahkan untuk Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi.
- *Program pengembangan wilayah Transmigrasi*
Kegiatan diarahkan untuk Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.
- *Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi*
Kegiatan diarahkan untuk Penyelenggaraan Pameran Investasi.
- *Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi*
Kegiatan diarahkan untuk kajian kebijakan penanaman modal dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- *Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah*
Kegiatan diarahkan untuk sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan perumusan kebijakan pembangunan Bina Ekonomi Daerah.
- *Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa*
Kegiatan diarahkan untuk Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Fasilitasi Pelayanan LPSE, Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa, dan Ketersediaan dan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor.
Indikator program adalah prosentase sanggahan lelang dan Kualitas layanan *e-procurement*.
- *Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah*
Kegiatan diarahkan untuk Koordinasi bidang sosial dan keagamaan, Koordinasi bidang Bina Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan, dan Koordinasi bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga.

- Indikator program adalah Rumusan kebijakan teknis pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administrasi.
- Program penataan daerah otonomi baru*
 Kegiatan diarahkan untuk Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru. Indikator program adalah Prosentase PD yang memiliki postur organisasi tepat ukuran.
 - Program Peningkatan Pelayanan Publik*
 Kegiatan diarahkan untuk Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan, Penyusunan Standart Pelayanan, dan Penyusunan SOP Instansi Pemerintah.
 Indikator program adalah Prosentase satuan unit pelayanan publik yang mempunyai nilai baik.
 - Program pembinaan dan pengembangan aparatur*
 Kegiatan diarahkan untuk Penyusunan Instrumen analisis jabatan PNS, dan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 Indikator program adalah Cakupan ketersediaan data/informasi jabatan dan Prosentase terpenuhinya target dalam Road Map RB.
 - Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan*
 Kegiatan diarahkan untuk Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan, Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan, Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan, Publikasi peraturan perundang-undangan, dan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah.
 Indikator program adalah Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda.
 - Program Perencanaan Pembangunan*
 Kegiatan diarahkan untuk Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Indikator program adalah Persentase OPD yang mempunyai nilai SAKIP minimal B.

Administrasi Umum pada semua Perangkat Daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan OPD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional OPD sebagai berikut:

- Program manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah*
 Kegiatan antara lain meliputi administrasi pelayanan keuangan perangkat daerah, pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah, penyediaan jasa komunikasi, air, listrik perangkat daerah; penyediaan jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah; rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah; pelayanan penyediaan makan minum rapat; penyediaan bahan bacaan/buku perpustakaan; pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung kantor/kendaraan dinas/operasional; pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah; penyediaan sarana dan prasarana kantor; rehab gedung kantor; pengadaan kendaraan dinas/operasional; pengadaan pakaian dinas; pendidikan dan pelatihan formal; pelayanan informasi perangkat daerah.
- Program perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*
 Kegiatan antara lain meliputi penyusunan dokumen perencanaan serta penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.

Tabel V.2

Tabel Pagu Indikatif Rancangan RKPD Tahun 2021

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU USULAN TAHUN 2021	JUMLAH	
			PROGRAM	KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	139.903.439.800	11	68
2	DINAS KESEHATAN	118.722.023.400	17	52

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU USULAN TAHUN 2021	JUMLAH	
			PROGRAM	KEGIATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG	144.170.900.364	2	3
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS	44.457.000.000	4	5
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMO	45.255.144.909	2	5
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	270.205.763.000	15	38
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	32.516.747.000	4	22
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.040.743.500	6	26
9	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.179.700.000	8	34
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.452.891.000	3	42
11	DINAS SOSIAL	12.547.729.000	9	43
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.338.000.000	3	26
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	46.129.150.000	9	41
14	DISDUKCAPIL	6.649.989.000	3	29
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.503.702.000	8	30
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.720.888.000	15	41
17	DINAS PERHUBUNGAN	42.431.000.000	8	37
18	DINAS KOMINFO	13.588.000.000	7	29
19	DINAS KOPERASI DAN UMKM	3.584.343.000	11	48
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	26.545.773.000	6	24
21	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	18.357.057.000	12	53
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	16.462.421.600	6	24
23	DINAS PERTANIAN	15.653.697.700	9	36
24	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3.749.317.750	8	28
25	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	194.138.624.200	13	48
26	SEKRETARIAT DAERAH	11.367.627.000	27	71
27	KEPALA DAERAH DAN WAKIL	3.164.735.000	3	22
28	SEKRETARIAT DPRD	36.076.000.000	5	30
29	KEC. BOYOLALI	1.407.475.000	11	23
30	KELURAHAN BANARAN	1.630.616.000	7	26
31	KELURAHAN PULISEN	1.751.550.000	7	23
32	KELURAHAN SISWADIPURAN	1.761.506.000	7	24
33	KEC. MUSUK	1.356.215.000	13	29
34	KEC. TAMANSARI	2.543.965.000	10	44
35	KEC. MOJOSONGO	1.494.144.000	10	27
36	KELURAHAN MOJOSONGO	1.928.837.000	7	23

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU USULAN TAHUN 2021	JUMLAH	
			PROGRAM	KEGIATAN
37	KELURAHAN KEMIRI	1.615.305.000	8	25
38	KEC. TERAS	1.156.200.000	9	25
39	KEC. BANYUDONO	1.080.925.000	13	32
40	KEC. SAWIT	1.119.995.000	9	22
41	KEC. SAMBI	1.293.050.000	11	25
42	KEC. NGEMPLAK	1.093.820.000	11	26
43	KEC. SIMO	1.218.220.000	10	26
44	KEC. NOGOSARI	1.120.721.000	14	33
45	KEC. KLEGO	1.243.475.000	13	36
46	KEC. ANDONG	1.202.790.000	9	22
47	KEC. WONOSEGORO	1.121.338.000	13	30
48	KEC. WONOSAMODRO	1.614.835.000	14	34
49	KEC. KARANGGEDE	1.075.080.000	12	23
50	KEC. KEMUSU	1.238.815.000	12	28
51	KEC. JUWANGI	1.325.480.000	10	25
52	KELURAHAN SAMBENG	1.230.641.000	3	18
53	KEC. AMPEL	1.081.580.000	11	25
54	KEC. GLADAGSARI	1.224.090.000	14	37
55	KEC. CEPOGO	1.205.040.000	9	21
56	KEC. SELO	817.140.000	11	26
57	INSPEKTORAT	1.632.843.000	4	23
58	BADAN PERENCANA, LIT DAN BANG	4.088.000.000	13	36
59	BADAN KEUANGAN DAERAH	28.138.402.000	3	35
60	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	7.493.091.000	8	33
TOTAL		1.354.217.591.223	550	1.840

Sebagai informasi tambahan dalam rangka upaya transisi ke PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 90 tahun 2019 untuk belanja operasi terdapat komponen belanja pegawai yang bersumber dari belanja tak langsung gaji sebesar Rp. 941.764.067.000,00 belanja hibah sebesar Rp. 68.315.641.400,00 dan belanja bansos sebesar Rp. 3.262.000.000,00 (dari jumlah awal bansos Rp. 15.397.262.000,00 dikurangi BTL Perumahan yang dipindah ke Belanja Langsung DPKP sebesar Rp. 12.135.262.000,00) disamping itu ada belanja transfer untuk belanja bagi hasil sebesar Rp. 14.854.110.000,00 dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 356.786.129.000,00 secara keseluruhan beberapa jenis belanja tersebut diatas sudah dilakukan upaya pemetaan di dalam lampiran III RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021. Untuk belanja hibah sebesar Rp. 68.315.641.400,00, disamping berasal dari belanja hibah reguler juga merupakan proyeksi belanja sisa transfer hibah pilkada tahun 2020 jika penyelenggaraan Pilkada serentak ditunda tahun 2021.

Dalam upaya recovery Covid-19 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru dalam RKPD tahun 2021 dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 290.337.745.273,00 untuk menunjang program dan kegiatan recovery Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3
Alokasi Recovery Covid-19
RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021

No	OPD	Pagu
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	500.000.000
2	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	751.365.000
3	DINAS PERTANIAN	3.919.000.000
4	DINAS KOPERASI DAN UMKM	406.755.000
5	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	325.000.000
6	DINAS KETAHANAN PANGAN	570.000.000
7	RSUD PANDAN ARANG	144.170.900.364
8	RSUD SIMO	45.255.144.909
9	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	311.221.000
10	DINAS SOSIAL	7.244.490.000
11	DINAS KESEHATAN	35.900.000.000
12	RSUD WARAS WIRIS	44.457.000.000
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.345.369.000
14	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	181.500.000
TOTAL		290.337.745.273

Sumber Data: Olah Data BP3D 2020
Pagu tersebut termasuk operasional BLUD 3 RS sebesar Rp. 139.694.709.545,00

BAB VI
RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2021, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel VI.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Target 2020	Target 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,96	6,1-6,5	6,2-6,6
2	Laju Inflasi	%	2,75	5,0-5,3	4,9-5,2
3	PDRB Per Kapita	Juta (Rp)	N/A	22.498,00	24.220,21
4	Presentase Penduduk Miskin	%	9,53	7,43-10,5	7,17-9,55
5	Indeks Wiliamson	Angka	N/A	0,30 - 0,35	0,30 - 0,35
6	Indeks Gini	Angka	N/A	0,3 sd 0,4	0,3 sd 0,4
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	73,80	73,04	73,49
	a. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,83	75,79	75,82
	b. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs)	Tahun	12,43	12,55	12,7
	c. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25 th+=MYS)	Tahun	7,56	7,17	7,25
	d.Tingkat pengeluaran per kapita per bulan (Rp/kapita/bulan)		1.089.917	690.000 sd 700.000	700.000 sd 710.000
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,50	72,59	73,06
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	N/A	71,88	72,25
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Rp	3,12	3,21	3,15
11	Rasio jalan dalam kondisi baik	Rp	74	74,72	75,62
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	B	B	B
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,97	79,75	80
14	Opini BPK	Skor	WTP	WTP	WTP
15	Nilai SAKIP	Skor			1

Sumber : RPJMD Kabupaten Boyolali 2016-2021

6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Tabel 6.2. merupakan indikator program prioritas pada urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD Kabupaten Boyolali.

Tabel VI.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2021

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar						
1.1	Pendidikan						
	Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun	%	75,6	80,93	82,00	DISDIKBUD
	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/Paket A	%	102,72	102	102,50	
		Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/Paket B	%	102,88	98,4	100,20	
		Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Paket A	%	92,62	86,75	87,50	
		Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/Paket B	%	84,52	73,5	75,50	
	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah	%	0,004	0,03	0,03	
		Persentase peserta didik SMP/ SMPLB putus sekolah	%	0,03	0,2	0,15	
		Persentase RK SD dalam kondisi baik	%	91,82	94,61	95,00	
		Persentase RK SMP dalam kondisi baik	%	85,32	98,4	98,70	
	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga	Persentase guru SD bersertifikat pendidik	%	55,61	57,16	62,50	
	Kependidikan	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	%	72,02	68,44	75,00	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD	%	14,25	20,06	20,00	
		Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP	%	16,7	20	20,00	
	Pendidikan Non Formal	Presentase Buta Aksara > 15 tahun	%	0,32	0,21	0,15	
	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Presentase SD berakreditasi minimal B	%	87,79	93,75	95,00	
		Presentase SMP berakreditasi minimal B	%	82,11	83,75	85,00	
1.2	Kesehatan						DINAS KESEHATAN
	Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga	Cakupan kunjungan bayi	%	99.96	90	95	
		Cakupan pelayanan anak balita	%	99.96	90	95	
		Prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia	%	100	100	100	
		Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	95	90	90	
	Pembiayaan kesehatan masyarakat	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat/penduduk miskin	%	43.14	39,6	40	
	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	%	94	90	90	
		Proporsi Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kefarmasian	%	42	45	45	
	Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Proporsi Pembinaan dan Pengawasan Produksi, Makanan, dan Minuman	%	48	45	45	
	Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR)	per 100,000	43.17	48	47,5	
		Angka kematian DBD (CFR)	% dari	0.23	1,7	1,6	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
			jumlah penderita				
	Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Prosentase orang dilakukan test HIV dan menerima hasil dari kelompok resiko	%	77.4	40	50	
		Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi	%	> 84,27	> 80	> 85	
		Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	%	50,00	50	50	
		Cakupan Desa UCI	%	100	100	100	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi	Pusk	6	8	10	
		Cakupan rawat jalan (pusk)	%	25	15	15	
		Cakupan Rawat inap (pusk)	%	2.48	1,5	1,5	
		Cakupan respon aduan kegawatdaruratan kesehatan yang ditangani	%	100	90	90	
	Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan SPM di Puskesmas (upaya kesehatan masyarakat)	%	100	100	100	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya kesehatan perorangan)	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Permenkes	%	13,79	17,24	20,69	
	Pengembangan sumber daya kesehatan	Dokter dan tenaga kesehatan dikirim pelatihan	Orang	36	40	50	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rasio dokter	%	1.8	16,4	17	
		Rasio dokter gigi	%	0.3	5,4	5,9	
		Rasio perawat	%	92	97,6	100,3	
		Rasio bidan	%	56	57,8	58,4	
	Manajemen informasi dan regulasi kesehatan	Prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi	%	100	80	100	
	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Desa /Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	Desa	94	106	120	
		Proporsi Rumah Tangga Sehat	%	122.8	74	75	
	Pengembangan Lingkungan Sehat	Desa STBM	Desa	212	200	267	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR)	%	65.03	72	73	
		Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS)	Hari	3.27	4,25	5	
		Turn Over Internal (TOI)	Hari	1,8	1,9	2	
		Bed Turn Over (BTO)	Pasien (kali)	95,53	46	46	
		angka kematian murni (Net Death Rate/ NDR)	%	1,3	0,23	0	
		Gross Death Rate (GDR)	%	3,1	0,75	1	
	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;	Pemenuhan standart sarana dan prasarana rumah sakit	%	35	75	80	
	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan standart pelayanan kesehatan rumah sakit	%	50,18	77	85	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR)	%	58.4	83,72	84,21	DINAS KESEHATAN

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS)	Hari	4,2	5	6	
		Turn Over Internal (TOI)	Hari	2,6	1,6	2	
		Bed Turn Over (BTO)	Pasien (kali)	51,6	61,75	59,81	
		Angka Kematian Murni (Net Death Rate/ NDR)	%	2.1	1,3	1,1	
		Gross Death Rate (GDR)	%	4,09	2,09	2,01	
	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;	Pemenuhan standar sarana dan prasarana rumah sakit	%	80	90	95	
	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit	%	75	90	95	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR)	%	51	74	75	
		Lama tinggal (Length Of Stay/ LOS)	Hari	3	5,75	6	
		Turn Over Internal (TOI)	Hari	2	2	2	
		Bed Turn Over (BTO)	(kali)	10,94	48	48	
		Angka kematian murni (Net Death Rate/ NDR)	%	4,5	0,6	0,5	
		Gross Death Rate (GDR)	%	2,1	1	1	
	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit,rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;	Pemenuhan standar sarana dan prasarana rumah sakit	%	50.3	90	100	
	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan standar pelayanan	%	75	85	100	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
		kesehatan rumah sakit					
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif	Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) yang melaksanakan pengelolaan irigasi secara partisipatif	Kelompok	2	3	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pembangunan jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	222,143	412,34	417,28	
		Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kab boyolali dengan pembangunan jalan baru (km)	Km	2.774	599	-	
	Pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang talud tebing sungai yang dibangun	Km	0.37	1.447	1.49	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Panjang Talud jalan yang dibangun	Km	800,75	619,03	637,60	
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang Jaringan Jalan yang dipertahankan Dalam Kondisi baik	Km	96	20	20	
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase dibangun sebagai bangunan pelengkap jalan	Km	315	7,74	8.24	
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Luas sawah yang dapat dialiri air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	Ha	5.172,8	8682,02	8737,67	
	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Tersedianya air baku Melalui pembangunan embung	Unit	10	8	8	
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air	Bertambahnya sanitasi berupa IPAL	Unit	6	6	6	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Limbah						
	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tersedianya data potensi air bawah tanah(data potensi air tanah/Sumur Uji)	Dokumen	3	3	3	
		Sambungan Rumah terbangun untuk mendapatkan akses air minum yang aman/Cakupan rumah tangga pengguna air bersih	Unit	960	400	425	
	Pengembangan pengelolaan penerangan jalan umum	Penambahan titik lampu	Unit	1.358	2	2	
	Pembangunan infrastruktur perdesaan	Desa/kelurahan Terbangun infrastrukturnya	Desa	261	20	20	
	Pengawasan jasa konstruksi	SIUJK yang diterbitkan	Lembar	55	40	40	
	Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Dokumen	5	1	1	
		Tersusunnya peta dasar RDTR	Dokumen	1	1	1	
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pelayanan Legalisasi rekomteks IMB	Rekomendasi	400	240	240	
		Pelayanan Legalisasi site plan	Dokumen	48	48	48	
1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Pengembangan Perumahan	Terwujudnya pembangunan rumah tidak layak huni	Unit	782	400	300	
			Unit	780	10	10	
		Terwujudnya bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi Gakin	Unit		1	1	
Unit	832		534	534			
1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pendidikan Politik Masyarakat	Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	%	100,45	98,78	100	Kantor Kesbangpol
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	%	85	82	82	
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	%	93,48	88,37	100	
		Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan	Kegiatan	38	38	38	
		Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Kegiatan	22	22	22	
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani	%	71,43	85,71	100	Satpol PP
		Kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian kebisingan dan pengendalian keamanan lingkungan	Kegiatan	3	3	3	
		Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	Kegiatan	19	19	19	
	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kegiatan event pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan.	Kegiatan	20	20	20	Kantor Kesbangol, Kecamatan
		Cakupan penyelesaian konflik antar umat beragama	%	100	100	100	Kantor Kesbangpol
	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Cakupan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	%	1.6	1,89	2,21	Kantor Kesbangpol
		Kegiatan untuk operasi penyakit	Kegiatan	15	15	15	Satpol PP

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
		masyarakat					
	Penigkatan kapasitas penanggulangan bencana	Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan	Skor	26	26,1	27,5	BPBD
		Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Skor	13	11,5	12,1	BPBD
		Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Skor	40	35,6	39,6	BPBD
		Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Skor	18	13,8	15,4	
		Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Skor	30	27,2	30,2	
		Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Skor	56	62,7	69,7	
		Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana	Skor	14	10,9	12,1	
	Peningkatan penanggulangan bahaya kebakaran	Ketersediaan kebijakan (Buah)	Buah	27	5	7	Satpol PP
		Ketersediaan lembaga (buah)	Buah	0	11	17	
		Tingkat waktu tanggap rata-rata se-Kabupaten (mnt)	menit	30	35	25	
1.6.	Sosial						
	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase fakir miskin yang diberdayakan	%	63,2	29	35	DINAS SOSIAL
	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	%	87.5	29	35	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Prosentase Penyandang disabilitas yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan sosial	%	7.5	8	8	
	Pembinaan panti asuhan/panti jompo	Pelayanan dan pembinaan bagi panti asuhan	panti	16	16	16	
	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Meningkatnya pemahaman PSKS dalam penanganan PMKS serta peran aktif dan kepedulian masyarakat dalam UKS	Desa	16	16	16	
	Pembinaan anak terlantar	Prosentase anak terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	%		30	30	
2	Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar						
2.1.	Tenaga Kerja						
	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penempatan pencari kerja yang terdaftar (jiwa)	Jiwa	4796	2900	3000	DINKOP NAKER
	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya (jiwa)	Jiwa	1092	240	240	
	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Cakupan perusahaan yang membayar sesuai regulasi	%	97	100	100	
2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Bagi Perempuan Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera	%	32	21	21	DP2KBP3A
		Peningkatan Pemahaman tentang Kesetaraan gender dalam	Organisasi Wanita	15	20	22	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
		pembangunan.					
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemenuhan Hak Anak.	Desa	28	31	34	
		Meningkatnya penanganan kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	
		Peningkatan Kapasitas jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak.	%	116	79	100	
	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.	Meningkatnya Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan.	%	55	65	75	
	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya Pemahaman Kesetaraan Gender, Perempuan dan Anak	Kegiatan	1	1	1	
2.3.	Pangan						
	Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan	Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	%	23.22	25,09	26,90	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	90.1	91	92	
	Peningkatan kesejahteraan petani	Kelompok tani yang meningkat kelas kelembagaannya	Kelompok	102	100	100	DINAS PERTANIAN
	Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Balai Penyuluhan yang meningkat kelas kelembagaannya	Unit BP3K	4	4	4	
2.4.	Pertanahan						PERTANAHAN
	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan	%	97	69	80	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya fasilitasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.	%	100	100	100	
	Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan	Dokumen	5	1	1	
2.5.	Lingkungan Hidup						
	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan	m2	1.417.734	1.414.322	1.437.322	Lingkungan Hidup
		% ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	3,15	3,15	3,21	
	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki rekomendasi UKL/UPL, kelayakan Amdal, dan atau izin lingkungan	pelaku usaha	487	40	40	
		Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ditindak lanjuti	%	100	100	100	
	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Data SDA dan LH	paket	5	1	1	
	Peningkatan Pengendalian Polusi	hasil perhitungan beban pencemaran yang meliputi parameter BOD, COD, TSS air sungai dan waduk	BOD mg/L (100%)	6	6	6	
			COD mg/L (100%)	50	50	50	
			TSS mg/L (100%)	400	400	400	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
		hasil uji kualitas udara ambien (SO2, CO, NO2, TSP)	ug/Nm3 (100%)	632	SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230	SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230	
	Perlindungan dan Konservasi SDA	Peningkatan cadangan air tanah	unit	5123	1.54	1.54	
	Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan	Cakupan wilayah yang melakukan pengelolaan sampah mandiri di lingkungan perkotaan	desa/kel	3	2	2	
		Persentasi Pengurangan persampahan	%	2	2	3	
		Persentasi Pengangkutan Sampah	%	12,42	11,88	12,96	
		Persentasi Pengelolaan TPA	%	0,00	0	0	
2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						DISDUKCAPIL
	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan kartu keluarga	%	100	100	100	
		Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	%	101,46	100	100	
		cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran penduduk usia 0-18th	%	90,34	93	95	
		Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran dari jumlah penduduk	%	86,96	80	85	
		Cakupan penerbitan kutipan akte kematian	%	100	8	10	
		Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	%	81	100	100	
2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan /kelurahan	Kemampuan kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Desa	95	55	47	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kelurahan (LPMD/K).					
		Pembangunan infrastruktur desa yang difasilitasi pelaksanaannya	Desa	6	6	6	
		Kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	Desa	53	55	47	
		Jumlah TTG/Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Inovasi	6	6	6	
		Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.	Kec.	22	19	19	
		Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.	Kec.	22	19	19	
	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan/ kelurahan	Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	Orang	122	80	80	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	Kec. / desa	57	57	57	
		Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat	kelompok	169	142	152	
		Cakupan pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan	%	0	45	50	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan	Pengurus PKK Desa/Kelurahan kemampuannya meningkat.	Desa	55	55	47	
		Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan	kecamatan	22	19	19	
2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.	Meningkatnya Kualitas Tribina.	%	21	21	21	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB.	Dokumen	3	3	3	
		Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Program KB.	Kegiatan	1	1	1	
	Keluarga Berencana	Meningkatnya Pelayanan KB.	%	71,9	80	80	
		Pelayanan KB (Peran PPKBD)	%	100	100	100	
	Pelayanan Kontrasepsi.	Capaian Peserta KB MKJP.	%	100	100	100	
	Kesehatan Reproduksi Remaja.	Cakupan Jumlah Kelompok KRR Yang Aktif	%	56,63	75,9	100	
	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.	Berkembangnya Kelompok PIK Remaja.	Kelompok	13	16	20	
	Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS's.	Cakupan Pemahaman Perempuan dan Remaja tentang Narkoba dan HIV/AIDS's.	%	100	100	100	
	Peningkatan Informasi Kependudukan dan KB	Terpenuhinya Dokumen rumusan kebijakan kependudukan	Dokumen	2	2	2	
		Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah	Kegiatan	2	2	2	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kependudukan dan KB	Dokumen	5	5	5	
		Meningkatnya Pemahaman terhadap Informasi Kependudukan dan KB	Kegiatan	1	1	1	
2.9.	Perhubungan						
	Peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya sarpras pelayanan angkutan umum	Buah	21	22	22	Perhubungan
	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ	Buah	12	12	12	
	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersusunnya Dokumen kajian perhubungan	Dokumen	3	1	1	
	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tersedianya sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan	%	100	100	100	
	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Tersedianya kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor	%	100	100	100	
2.10	Komunikasi dan Informatika						
	Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Tersedianya kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	50	51	52	Komunikasi dan Informatika
	Kerjasama informasi dan media massa	Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan daerah	%	91	92	93	
		Rumusan kebijakan teknis kerjasama informasi dengan media massa	Dokumen	6	7	5	
	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Tersedianya sarana telekomunikasi dan informasi yang mendukung pelayanan kepada masyarakat	%	84	71	77	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Cakupan publikasi hasil-hasil pembangunan	%	100	100	100	
	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi dan protokol	Dokumen	10	8	9	
2.11	Koperasi dan UMKM						
	Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif	UMKM yang melaksanakan pola kemitraan	UMKM	7	2	2	Koperasi dan UMKM
	Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	SDM UMKM yang terlatih	UMKM	150	30	30	
	Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi	Koperasi yang di bina yang meningkat nilai kesehatannya	Koperasi	46	50	50	
	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit	Koperasi	56	30	30	
2.12	Penanaman Modal						
	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rata - rata lama pengurusan perijinan	hari	7	7	7	Penanaman Modal
		Peningkatan jumlah tenaga kerja bagi perusahaan yang mempunyai ijin	TK	15.113	11,255	11.593	
	Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi	Peningkatan nilai investasi	Rp	1.374.046.105.185	1.402.500.166	1.475.475.174	
		Peningkatan jumlah investor	Investor	1.747	1.013	1.043	
		Meningkatnya sarana dan prasarana promosi.	Paket	1	0	0	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah	Penambahan jumlah produk hukum daerah yang pro investasi	dok	2	1	1	
2.13	Kepemudaan dan Olahraga						
	Peningkatan peran serta kepemudaan	Pemuda mendapat penghargaan tingkat propinsi	orang	53	9	10	Kepemudaan dan Olahraga
	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Pemuda dalam Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)	orang	18	7	7	
	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Peringkat PORDA	peringkat	7	8	8	
		Bertambahnya Cabang Olahraga	Pengcab	5	1	1	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Bertambahnya Lapangan Olahraga	Lapangan	10	4	4	
2.14	Statistik						
	Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	Dokumen	10	7	7	STATISTIK
2.2	Persandian						
	Penyelenggaraan persandian	Terlaksananya fasilitasi layanan persandian	%	100	100	100	PERSANDIAN
2.2	Kebudayaan						
	Pengembangan Nilai Budaya	Budaya tradisi lokal yang dilestarikan	Budaya	12	11	12	KEBUDAYAAN
	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan.	%	80	98	100	
	Pengelolaan Keragaman Budaya	Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Tempat	12	11	12	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelaku seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	Group	66	43	45	
		Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya	Kali	57	60	62	
		Event seni dan budaya	Kali	5	4	4	
2.2	Perpustakaan						
	Pengembangan Budaya baca dan pembinaan Perpustakaan	Peningkatan upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca	orang	30.669	34	35	Perpustakaan
2.2	Kearsipan						
	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Tertibnya penyimpanan arsip dinamis in aktif dari satuan kerja	%	14	20	25	KEARSIPAN
	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Peningkatan pemahaman pengelola kearsipan bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kab. Boyolali	%	95	100	100	
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kab. Boyolali	%	100	100	100	
	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Tertibnya penyimpanan arsip in aktif dari satuan kerja	%	100	100	100	
3	Urusan Pilihan						
3.1.	Kelautan dan Perikanan						
	Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi ikan (ton)	Ton	36,410	32.002	33.602	Kelautan dan Perikanan
	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya produk olahan ikan (ton)	Ton	99	73	77	
3.2.	Pariwisata						

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara.	Orang	597.689	448.249	452.731	PARIWISATA
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara.	Orang	485	2,086	2.117	
		Prosentase sarana dan prasarana pariwisata yang layak	%	60	75	85	
		Potensi wisata yang akan dibangun menjadi obyek wisata	Obyek	2	0	0	
		Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha pariwisata	%	28.83	5	3	
	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Sarana Promosi Pariwisata yang dikembangkan	%	100	100	100	
		Kerjasama Promosi antar daerah	Forum	10	2	2	
	Pengembangan Kemitraan	Desa Wisata	Desa	28	7	7	
		Kelompok Sadar Wisata	Kelompok	56	17	17	
3.3.	Pertanian						
	Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Produksi pangan utama (Ton) : Padi	Ton	293.695	.295.855	298.751	PERTANIAN
		Produksi pangan lainnya (Ton)	Ton				
		- Jagung		139.506	137.767	138.456	
		- Kedelai		5.608	6.864	6.898	
		Produksi tanaman hortikultura utama :	Ku				
		- Pepaya		280.286	124.872	126.121	
		- Cabe		676.973	114.466	115.611	
		- Bawang Merah		183.847	31.218	31.53	
		- Jahe		23.782	10.667	10.773	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Kencur		26.838	17.17	17.342	
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Produksi tanaman perkebunan:	Ton				
		- Cengkeh		547	365,65	382,88	
		- Kopi		370	145,86	153,15	
		- Kelapa		4.651,73	5.396,90	5.572,25	
		- Tembakau		7.404	4.984,79	5.234,03	
		- Tebu		25,412	34.520,38	36.246,40	
		- Lada		17,95	23,09	24,25	
		- Atsiri	Kw Minyak	57,39	57,13	59,99	
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Volume perdagangan produk usaha pertanian	Ton	249.336	81.042,88	83.857,78	
	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan petani yang mendapat pelatihan, bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu	Orang	1.44	1.123	1.219	
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya produksi daging	Ton	14.135	8.4	8.46	PERTANIAN (PETERNAKAN)
		Meningkatnya produksi susu (kilo liter)	Kilo Liter	49.68	47.851	48.201	
	Peningkatan Produksi Peternakan	Pertambahan populasi ternak sapi, kambing dan domba		357.517	318.381	320.731	
		Sapi potong	Ekor	106.599	89.275	90	PERTANIAN (PETERNAKAN)
		Sapi perah	Ekor	94.088	88.635	89.31	
		Kambing dan domba	Ekor	156.83	140.471	141.421	
	Pencegahan dan Penanggulangan	Pengobatan ternak	Ekor(Ayam)	18.96	36	35	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyakit Ternak						
			Sampel	1.368	1000	1050	
3.4.	Energi dan Sumber Daya Mineral						
	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	Unit	15	35	35	Energi dan Sumber Daya Mineral
3.5	Perdagangan						
	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	Unit	660	90	95	PERDAGANGAN
		Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	Rp	8.731.134	5.189.335.000	5.239.335.000	
	Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan	Lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata	Lokasi	20	25	30	
	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen	Pelaku usaha dan konsumen	4.295	4.2	4.2	
	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor barang (USD)	USD	384.669	158.016	165.917	
3.6.	Perindustrian						
	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Semakin berkembangnya IKM	IKM	165	174	182	PERINDUSTRIAN
	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya penerapan teknologi dan standart produk industri daerah	IKM	175	179	188	
	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk unggulan	IKM	60	55	60	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana	Terbentuknya kawasan peruntukkan industri	Kawasan	1	1	0	
4	Fungsi Penunjang :						
4.1.	Perencanaan						
	Perencanaan pembangunan daerah	Dokumen RKPD dan RPJMD	Dokumen	2	2	3	BP3D
		Dokumen Renja dan Renstra PD	Dokumen	2	2	3	PD SE-KAB.BOYOLALI
		Tersusunnya DSP usulan kegiatan Kecamatan/Kelurahan	Dokumen	25	25	25	Kecamatan/Kelurahan Se-Kab. Boyolali
		Tersusunnya Profil Kelurahan	Dokumen	0	6	6	Kelurahan Se-Kab. Boyolali
		Dokumen Evaluasi	Dokumen	2	2	2	BP3D
		Dokumen laporan Pertanggungjawaban	Dokumen	6	5	6	SETDA
		Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD	Dokumen	2	2	2	BP3D
		Terverifikasinya RKA SKPD	Dokumen	100	98	98	
		Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	Dokumen	2	2	2	
	Pengembangan data/informasi	Dokumen data/informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan	Dokumen	5	5	5	
	Perencanaan pembangunan ekonomi	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan ekonomi	Dokumen	3	3	3	
	Perencanaan pembangunan sosial budaya	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan sosial budaya	Dokumen	4	4	4	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Kajian rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Dokumen	0	1	1	
	Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Tersusunnya studi data infrastruktur dan potensi rawan bencana	Dokumen	1	1	1	
	Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan prasarana dan sumber daya alam (proposal)	Dokumen	15	15	15	
	Perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan permukiman perdesaan	Dokumen	7	5	5	
	Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan air minum/air bersih dan sanitasi	Dokumen	2	2	2	
	Kerjasama pembangunan daerah	Kerjasama pembangunan daerah yang diimplementasikan	Kegiatan	3	3	3	BP3D dan SETDA
	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana	%	75	75	100	BP3D
4.2.	Keuangan						
	Pengendalian Kerugian Daerah	Pengembalian kerugian daerah (Rp. 000)	Rp	2.75	2.4	1.2	BKD
	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Bertambahnya PAD	Rp	1.074.16.481	372.764.637	412.068.642	
		Peningkatan PAD per tahun	Rp	1.92.476.037	35.411.792	39.304.005	
			%	11.94	10,497	10,544	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Opini BPK atas laporan		WTP	WTP	WTP	
	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya evaluasi pengelolaan keuangan daerah	Dokumen	84	60	72	
4.3.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						BKP2D
	Pendidikan kedinasan	Prosentase pejabat struktural yang telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai tingkatan	%	82,75	82	85	
	Peningkatan kapasitas sumber daya	Prosentase Aparatur yang memiliki sertifikasi pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugasnya	%	8,00	10	12	
	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	%	79,00	80	81	
		Prosentase penyelesaian kasus-kasus kepegawaian	%	90	90	90	
	Fasilitasi pindah/purna tugas	Prosentase pegawai yang memperoleh keputusan pensiun tepat waktu	%	100	100	100	
	Peningkatan disiplin aparatur	Cakupan tingkat ketaatan aparatur terhadap peraturan kepegawaian	%	119,88	100	100	
		Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur beserta perlengkapannya	%	100	100	100	
4.4.	Penelitian dan Pengembangan						

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penelitian dan pengembangan inovasi daerah	Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	inovasi	6	7	8	BP3D
		Terbangunnya TechnoPark	unit		-	-	
5	Fungsi Lainnya :						
5.1.	Kesekretariatan DPRD						
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	%	100	100	100	SETWAN
5.2.	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan						
	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda	%	33.3	90	90	SETDA
	Pengembangan data/informasi jabatan.	Cakupan ketersediaan data/informasi jabatan	%	100	100	100	
	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Skor	0	67	70	
	Peningkatan ketatalaksanaan	Rata-rata tingkat penerapan ketatalaksanaan Perangkat Daerah	%	0	80	90	
5.3.	Pembinaan dan Pengawasan						INSPEKTORAT
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Menurunnya temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	Temuan/Rekomendasi	27	26	25	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparat pengawasan	Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional	%	80	82	86	
5.4.	Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah						
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.	%	100			PD SE-KAB.BOYOLALI
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah.	%	100			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah.	%	100			
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah.	%	100			

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021 ini merupakan tahapan strategis dalam rangkaian proses perencanaan telah disusun seoptimal mungkin dengan melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah daerah, agregasi aspirasi berbagai lapisan masyarakat serta memfokuskan program dan kegiatan ke dalam program dan kegiatan yang prioritas segera dilaksanakan. Segenap sumber daya yang dimiliki dan semangat kerja dari seluruh komponen masyarakat di daerah hendaknya diupayakan untuk dapat mendukung prioritas pembangunan daerah tersebut.

Perencanaan pembangunan di daerah merupakan sebagian kecil dari keseluruhan tahapan pembangunan daerah dengan mengikuti prinsip *money follow priority program* dan berorientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Memulai pembangunan melalui sebuah perencanaan pembangunan yang baik menjadi itikad baik pemerintah daerah untuk mengupayakan penyelesaian berbagai permasalahan secara terencana. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menjadi komitmen bersama segenap komponen pembangunan daerah di Boyolali, baik eksekutif maupun legislatif, dan masyarakat untuk mencapai hasil-hasil yang bermanfaat bagi semua pihak sehingga hasil capaian pembangunan diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan langsung kepada masyarakat secara adil dan merata.

Dokumen RKPD ini antara lain memuat rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan berikut pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Boyolali serta urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dokumen RKPD ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021 selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk finalisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan bahan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2021.

Keberhasilan dalam tahap implementasi adalah merupakan keberhasilan dalam melakukan upaya terhadap kebutuhan berbagai pihak. Demikian pula sebaliknya apabila beberapa hal belum berhasil dicapai menjadi komitmen bersama segenap komponen pembangunan daerah untuk memperbaiki/melakukan penyempurnaan-penyempurnaan pada periode berikutnya.

BUPATI BOYOLALI

SENO SAMODRO

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 Bulan	4.775.000	-	-	4.775.000		12 Bulan	5.500.000
1	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	246.000.000	-	-	246.000.000	Dinas + Museum	12 Bulan	270.500.000
1	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional terpelihara dengan baik	12 Bulan	74.600.000	-	-	74.600.000		12 Bulan	82.000.000
1	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penata usahaan keuangan sesuai dengan akuntansi yang memadai	12 Bulan	2.500.000	-	-	2.500.000		12 Bulan	3.000.000
1	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	12 Bulan	49.800.000	-	-	49.800.000		12 Bulan	55.000.000
1	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	210.259.000	-	-	210.259.000		12 Bulan	231.500.000
1	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Jasa Penggandaan	12 Bulan	571.600.000	-	-	571.600.000		12 Bulan	629.000.000
1	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tercukupinya Komponen instalasi listrik/telepon	12 Bulan	20.000.000	-	-	20.000.000		12 Bulan	22.000.000
1	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya Peralatan dan perlengkapan Rumah tangga	12 Bulan	22.990.800	-	-	22.990.800		12 Bulan	25.500.000
1	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3.600.000	-	-	3.600.000		12 Bulan	4.000.000
1	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	123.378.000	-	-	123.378.000		12 Bulan	135.500.000
1	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya Kebutuhan makanan dan minuman	12 Bulan	319.286.000	-	-	319.286.000		12 Bulan	351.000.000
1	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	427.959.000	-	-	427.959.000		12 Bulan	471.000.000
1	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tercukupinya Jasa Administrasi Perkantoran (K2)	12 Bulan	612.000.000	-	-	612.000.000	THL	12 Bulan	184.800.000
						12 Bulan	168.000.000	-	-	168.000.000	Jaga/Kebersihan	12 Bulan	672.000.000
						12 Bulan	13.128.000.000	-	-	13.128.000.000	K2	12 Bulan	14.440.800.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-	-			
4	1	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya Perlengkapan gedung kantor	1 Paket	85.000.000	-	-	85.000.000		1 Paket	150.000.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	191.124.000	-	-	191.124.000		12 Bulan	210.000.000
1	1	2	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Paket	90.000.000	-	-	90.000.000		1 Paket	150.000.000
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				-	-	-			
4	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tercapainya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dokumen	18.680.000	-	-	18.680.000		4 Dokumen	25.000.000
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-			
1	1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan						-			
1	1	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun	82%							
				Pembangunan gedung sekolah			-	-	-	-		1 paket	200.000.000
1	1	15	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Tercukupinya buku pembelajaran untuk guru dan siswa	5 Paket	30.000.000	-	120.000.000	150.000.000		20 Paket	150.000.000
1	1	15	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tercukupinya alat praktik dan peraga siswa	7 Paket	125.000.000	-	120.000.000	245.000.000		20 Paket	200.000.000
1	1	15	19	Pengadaan mebeluer sekolah	Tercukupinya mebeluer yang memenuhi syarat	20 Paket	22.500.000	-		22.500.000		30 Paket	125.000.000

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
				Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah						-			4 Paket	200.000.000
1	1	15	57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatnya kompetensi pendidik PAUD	1 Kegiatan	100.000.000	-		100.000.000			1 Kegiatan	110.000.000
1	1	15	58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya lomba gugus PAUD dan lomba KB/TK	1 Kegiatan	74.000.000	-		74.000.000			1 Kegiatan	85.000.000
1	1	15	59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya PAUD holitik integratif	12 Bulan	100.000.000	-		100.000.000			12 Bulan	150.000.000
1	1	15	65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	1 Kegiatan	35.000.000	-		35.000.000			1 Kegiatan	50.000.000
1	1	15	66	Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang PAUD	12 Bulan	30.000.000	-		30.000.000			12 Bulan	50.000.000
1	1	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/Paket A / Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Paket A / Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/Paket B / Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/Paket B / Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah / Persentase peserta didik SMP/ SMPLB putus sekolah / Persentase lulusan SD/ sederajat yang melanjutkan yang ke jenjang SMP / Persentase RK SD dalam kondisi baik / Persentase RK SMP dalam kondisi baik	102,50%/98,40%/98,40%/73,50%/0,03%/0,15%/99,50%/95%/98,70%								-
				Pembangunan gedung sekolah										
1	1	16	3	Penambahan ruang kelas sekolah	Tercukupinya ruang kelas sekolah	4 Ruang	-	-	800.000.000	800.000.000			5 Ruang	1.000.000.000
				Penambahan ruang kelas sekolah	Tercukupinya ruang kelas sekolah	1 Ruang	200.000.000	-		200.000.000			3 Ruang	450.000.000
1	1	16	5	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Bertambahnya Ruang Lab TIK/Bahasa	3 Ruang	100.000.000	-	500.000.000	600.000.000			4 Ruang	1.500.000.000
1	1	16	10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Tersedianya ruang UKS sekolah	11 Ruang	50.000.000	-	750.000.000	800.000.000			10 Ruang	1.000.000.000
				Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Tersedianya ruang UKS sekolah		100.000.000	-		100.000.000				110.000.000
1	1	16	12	Pembangunan perpustakaan sekolah	Tersedianya perpustakaan sekolah	6 Ruang	-	-	500.000.000	500.000.000			6 Ruang	1.500.000.000
				Pembangunan perpustakaan sekolah	Tersedianya perpustakaan sekolah			-	250.000.000	250.000.000				275.000.000
1	1	16	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tercukupi fasilitas sanitary sekolah	6 Unit	40.000.000	-	650.000.000	690.000.000			8 Unit	800.000.000
				Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tercukupi fasilitas sanitary sekolah	2 Unit	60.000.000	-	250.000.000	310.000.000			4 Unit	400.000.000
1	1	16	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Tersedianya buku-buku siswa	95 Paket	-	-	3.500.000.000	3.500.000.000			50 Paket	2.500.000.000
				Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Tersedianya buku-buku siswa		215.000.000	-		215.000.000			52 Paket	1.300.000.000
1	1	16	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tercukupinya alat praktik dan peraga siswa	35 Paket	160.000.000	-	2.000.000.000	2.160.000.000			60 Paket	2.700.000.000
				Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tercukupinya alat praktik dan peraga siswa	30 paket	200.000.000	-	1.340.000.000	1.540.000.000			52 Paket	2.500.000.000
1	1	16	41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya perbaikan bangunan sekolah, Meningkatnya ruang kelas kondisi baik	80 Ruang	200.000.000	-	2.250.000.000	2.450.000.000			90 Ruang	3.600.000.000
				Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya perbaikan bangunan sekolah, Meningkatnya ruang kelas kondisi baik	38 Ruang	180.000.000	-	2.400.000.000	2.580.000.000			52 Ruang	4.680.000.000
1	1	16	58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Terlaksananya Pelatihan bagi siswa berprestasi melalui wisata edukasi	1 Kegiatan	20.000.000	-		20.000.000			1 Kegiatan	30.000.000
				Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Terlaksananya Pelatihan bagi siswa berprestasi melalui wisata edukasi	1 Kegiatan	15.000.000	-		15.000.000			1 Kegiatan	25.000.000
1	1	16	66	Penyediaan dana pengembangansekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/ MTS	Terfasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP serta Tersedianya Fasilitas Pendidikan Inklusi	12 Bulan	65.000.000	-		65.000.000			12 Bulan	75.000.000
				Penyediaan dana pengembangansekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/ MTS	Terfasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP serta Tersedianya Fasilitas Pendidikan Inklusi	12 Bulan	35.000.000	-		35.000.000			12 Bulan	50.000.000
1	1	16	67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Terselenggaranya kegiatan kejar paket A setara SD	1 Kegiatan	30.000.000	-		30.000.000			1 Kegiatan	40.000.000
1	1	16	68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Terselenggaranya kegiatan kejar paket B setara SMP	1 Kegiatan	45.000.000	-		45.000.000			1 Kegiatan	50.000.000
1	1	16	70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terselenggaranya lomba-lomba siswa	12 Bulan	244.350.000	-		244.350.000			12 Bulan	270.000.000
				Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terselenggaranya lomba-lomba siswa	1 Kegiatan	150.000.000	-		150.000.000			1 Kegiatan	165.000.000

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	16	74	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	Tersedianya beasiswa retrieval untuk anak rentan dan/atau putus sekolah SD dan SMP	100 Siswa	-	-	-	-	-	100 Siswa	350.000.000
				Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	Tersedianya beasiswa retrieval untuk anak rentan dan/atau putus sekolah SD dan SMP	100 Siswa	200.000.000	-	-	200.000.000	-	100 Siswa	250.000.000
1	1	16	78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantaunya Program Wajardikdas dan Terinformasikannya Kebijakan Pendidikan Dasar dan Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Dasar (SPM- SNP - SD dan SMP)	12 Bulan	30.000.000	-	-	30.000.000	-	12 Bulan	35.000.000
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantaunya Program Wajardikdas dan Terinformasikannya Kebijakan Pendidikan Dasar dan Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Dasar (SPM- SNP - SD dan SMP)	12 Bulan	30.000.000	-	-	30.000.000	-	12 Bulan	35.000.000
1	1	16	79	Peningkatan Manajemen Operasional Sekolah	Meningkatnya manajemen pengelolaan sekolah	12 Bulan	-	-	-	-	-	12 Bulan	40.000.000
				Peningkatan Manajemen Operasional Sekolah	Meningkatnya manajemen pengelolaan sekolah	1 Kegiatan	50.000.000	-	-	50.000.000	-	1 Kegiatan	60.000.000
1	1	16	80	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Reguler)	Tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	12 Bulan	-	-	81.331.400.000	81.331.400.000	-	12 Bulan	85.000.000.000
				Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Reguler)	Tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	12 Bulan	-	-	-	-	-	12 Bulan	-
1	1	18		Program Pendidikan Non Formal	Presentase Buta Aksara > 15 tahun	0,15%	-	-	-	-	-	-	-
1	1	18	3	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Terfasilitasinya sarana pendidikan kursus dan kelembagaan	1 Kegiatan	45.000.000	-	-	45.000.000	-	1 Kegiatan	50.000.000
1	1	18	4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terfasilitasi keaksaraan dasar dan lanjutan	1 Kegiatan	50.000.000	-	-	50.000.000	-	1 Kegiatan	80.000.000
1	1	18	5	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terfasilitasinya pendidikan kecakapan hidup	1 Kegiatan	50.000.000	-	-	50.000.000	-	1 Kegiatan	75.000.000
1	1	18	6	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana PNF	2 Ruang	850.000.000	-	200.000.000	1.050.000.000	-	2 Ruang	450.000.000
						3 Paket	22.797.000	-	600.000.000	622.797.000	-	3 Paket	750.000.000
1	1	18	12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Terinformasikannya pendidikan non formal	1 Kegiatan	25.000.000	-	-	25.000.000	-	1 Kegiatan	35.000.000
1	1	18	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantaunya kebijakan pendidikan non formal	12 Bulan	25.000.000	-	-	25.000.000	-	12 Bulan	30.000.000
1	1	18	14	Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha	Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha (KBU) & Terselenggaranya Operasional SKB	12 Bulan	80.000.000	-	-	80.000.000	Operasional SKB	12 Bulan	100.000.000
1	1	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru SD bersertifikat pendidik/Persentase guru SMP bersertifikat pendidik/Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD/Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP	62,50%/75%/20%/20%	-	-	-	-	-	-	-
1	1	20	2	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Terseleksinya calon kepala sekolah	1 Kegiatan	400.000.000	-	-	400.000.000	-	1 Kegiatan	800.000.000
1	1	20	3	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Terlaksananya pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi/ PPG	1 Kegiatan	150.000.000	-	-	150.000.000	-	1 Kegiatan	200.000.000
1	1	20	8	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga	Terselenggaranya pemilihan kepala/guru/pengawas sekolah berprestasi	1 Kegiatan	80.000.000	-	-	80.000.000	-	1 Kegiatan	100.000.000
1	1	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terkelolanya kasus, PAK dan PKG serta Pemberian Kesra Bagi WB/PTK Non PNS	1 Tahun	13.543.000.000	-	-	13.543.000.000	kesra	1 Tahun	15.000.000.000
1	1	20	11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Terselenggaranya diklat penilaian dan peningkatan mutu PTK	1 Kegiatan	100.000.000	-	-	100.000.000	-	1 Kegiatan	100.000.000
1	1	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Presentase SD berakreditasi minimal B/Persentase SMP berakreditasi minimal B	95%/83,75%	-	-	-	-	-	-	-
1	1	22	1	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	tercapainya evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan (US, UN dan UNPK),dan terpenuhinya pelayanan pendidikan pada UPT/ Satuan Pendidikan	1 Kegiatan	190.000.000	-	-	190.000.000	-	1 Kegiatan	200.000.000

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						12 Bulan	1.100.000.000			1.100.000.000	Operasional Koord, DPA UPT	12 Bulan	1.540.000.000
						1 Kegiatan	110.000.000	-		110.000.000		1 Kegiatan	150.000.000
						1 Kegiatan	1.212.000.000	-		1.212.000.000		1 Kegiatan	25.000.000
1	1	22	2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	terfasilitasinya masyarakat Boyolali melanjutkan/menempuh pendidikan Sarjana dan tersedianya penghargaan/ beasiswa bagi siswa yang berprestasi	1 Kegiatan	100.000.000			100.000.000		1 Kegiatan	150.000.000
						1 Kegiatan	100.000.000			100.000.000		1 Kegiatan	150.000.000
							-	-		-	Beasiswa, join degree, kerja sama pddkan		-
1	1	22	7	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Tersedianya sarana dan sarana SIM Pendidika, Dapodik dan profil pendidikan	1 Paket	50.000.000	-		50.000.000		1 Paket	75.000.000
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				-		-			-
2	16			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan				-		-			-
2	16	15		Program Pengembangan Nilai Budaya	Budaya tradisi lokal yang dilestarikan	12 Budaya							-
2	16	15	1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlestarikannya dan terlaksananya event budaya	30 Kali	1.660.000.000	-	80.000.000	1.740.000.000		45 Kali	3.500.000.000
2	16	15	1		Tungguk Tembakau (DBHCHT)	1 Kegiatan	100.000.000	-	-	100.000.000		45 Kali	3.500.000.000
02	16	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan.	100%		-		-			-
2	16	16	4	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Terlaksananya sosialisasi tentang BCB dan Permeseuman serta penghayat kepercayaan	1 Kegiatan	31.750.000	-	-	31.750.000		1 Kegiatan	50.000.000
2	16	16	5	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terkelolanya museum dengan baik	1 Kegiatan	25.000.000	-	200.000.000	225.000.000		1 Kegiatan	250.000.000
						1 Kegiatan	30.000.000	-	200.000.000	230.000.000		1 Kegiatan	250.000.000
						12 Bulan	52.091.000	-	200.000.000	252.091.000		12 Bulan	300.000.000
2	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya/Pelaku seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan /Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya/Event seni dan budaya	12 Tempat /45 Grup/62 Kali/ 4 Kali							
2	16	17	1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Tersedianya duta seni yang melaksanakan pementasan	4 Event	1.910.000.000	-	-	1.910.000.000		4 Event	2.200.000.000
2	16	17	3	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Terlaksana dan tergalinya cerita rakyat dan berkembangnya bahasa daerah	1 Kegiatan	40.000.000	-	-	40.000.000		1 Kegiatan	50.000.000
2	16	17	4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terlestar dan terselenggaranya berbagai ragam seni budaya Boyolali	2 Kegiatan	45.000.000	-	-	45.000.000		2 Kegiatan	50.000.000
2	16	17	5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya pelaksanaan festival budaya dan festival seni di wilayah Kabupaten Boyolali dan Provinsi Jawa Tengah	5 Kali	180.000.000	-	-	180.000.000		5 Kali	200.000.000
TOTAL PAGU 1							41.662.039.800	-	98.241.400.000	139.903.439.800			160.638.100.000
5	1	1		Belanja Pegawai			567.816.714.000			567.816.714.000			567.816.714.000
1	1	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini									
1	1	15	59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	1 tahun	-		17.350.200.000	17.350.200.000		1 tahun	17.350.200.000
					Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (Non Penerima DAK Non Fisik)	1 tahun	400.000.000			400.000.000		1 tahun	400.000.000
1	1	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun									
1	1	16	74	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	Bantuan beasiswa untuk pelajar tidak mampu jenjang SD	1 tahun	750.000.000			750.000.000		1 tahun	750.000.000
					Bantuan beasiswa untuk pelajar tidak mampu jenjang SMP	1 tahun	375.000.000			375.000.000		1 tahun	375.000.000

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	16	79	Peningkatan Manajemen Operasional Sekolah	Hibah Dana BOS ke SD Swasta	1 tahun	266.790.000			266.790.000		1 tahun	266.790.000
					Hibah Dana BOS ke SMP Swasta	1 tahun	306.500.000			306.500.000		1 tahun	306.500.000
1	1	18		Program Pendidikan Non Formal									
1	1	18	4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)	1 tahun	-		1.730.500.000	1.730.500.000		1 tahun	1.730.500.000
1	1	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
1	1	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Fasilitasi operasional pendidickan formal swasta (kesra PTK PAUD)	1 Tahun	3.005.410.000			3.005.410.000		1 Tahun	3.005.410.000
1	1	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan									
1	1	22	2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Bantuan kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Boyolali	1 thn	75.000.000			75.000.000		1 thn	100.000.000
1	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya									
2	16	17	1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Bantuan kepada Dewan Kesenian Kabupaten Boyolali,	1 thn	75.000.000			75.000.000		1 thn	100.000.000
					Bantuan kepada Sanggar / Group/paguyuban seni/ budaya	1 thn	100.000.000			100.000.000		1 thn	125.000.000
TOTAL PAGU 2							614.832.453.800	-	117.322.100.000	732.154.553.800	-	-	752.964.214.000

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	6.440.000			6.440.000		12 Bulan	8.260.000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi. sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	200.000.000			200.000.000		12 Bulan	230.000.000
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya biaya/jasa pemeliharaan. perizinan dan operasional kendaraan dinas	12 Bulan	82.228.000			82.228.000		12 Bulan	172.500.000
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan dan bahan kebersihan kantor	12 Bulan	45.000.000			45.000.000		12 Bulan	57.500.000
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	40.000.000			40.000.000		12 Bulan	57.500.000
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	64.574.000			64.574.000		12 Bulan	80.500.000
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	97.495.000			97.495.000		12 Bulan	138.000.000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	9.000.000			9.000.000		12 Bulan	11.500.000
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksananya penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	5 Unit	180.000.000			180.000.000		2 unit	230.000.000
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	24 Buah	3.000.000			3.000.000		2 jenis	5.175.000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	2.600 Liter	89.712.000			89.712.000		12.000 Liter	115.000.000
				Penyediaan bahan logistik kantor	Tercukupinya Bahan Bakar	8.000 liter							
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	tercukupinya kebutuhan makanan minuman pegawai. rapat dan tamu	12 Bulan	90.407.500			90.407.500		12 Bulan	126.500.000
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	231.528.900			231.528.900		12 Bulan	333.500.000
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	terbayarnya gaji/upah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	12 Bulan	975.300.000			975.300.000		12 Bulan	1.150.000.000
					Tersedianya Gaji PTT/Karyawan	12 Bulan							
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah								
4	1	2	10	Pengadaan mebeleur	terlaksananya pengadaan mebelair dinas kesehatan	1 Paket	190.000.000			190.000.000		1 Paket	100.000.000
					Kelancaran Pelaksanaan Administrasi	1 Paket						1 Paket	
4	1	2	11	Pengadaan Tanah		1 lokasi	2.000.000.000			2.000.000.000	PEMETAAN PINDAH KE BKD	1 lokasi	2.300.000.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dinas kesehatan	12 Bulan	95.000.000			95.000.000		12 Bulan	350.000.000
					Terpeliharanya Gedung Kantor/pemindahan kantor	1 Paket	4.918.400.000			4.918.400.000		1 Paket	
4	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah	2 Dokumen							
4	1	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	terselesainya pembahasan rancangan peraturan bupati/peraturan daerah	2 Dokumen	50.000.000			50.000.000		1 dokumen	57.500.000
					Kelancaran Pelaksanaan Administrasi	12 Bulan							
4	1	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya bimtek peraturan perundangan	12 Bulan	110.000.000			110.000.000		1 kali	345.000.000
					Terbitnya serfitikasi ISO. dan Perbup	1 Kali						1 Kali	
01	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
01	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.	12	Rp 20.000.000			20.000.000			
01	01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya dokumen pelaporan keuangan	2	Rp 11.000.000			11.000.000			

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	2			Kesehatan									
1	2	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan/Proporsi Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kefarmasian	90%/45%							
1	2	15	1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	1 paket	50.000.000		4.500.000.000	4.550.000.000		1 paket	8.107.500.000
					obat dan perbekalan kesehatan dikelola sesuai standar								
					terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	12 Bulan			2.500.000.000	2.500.000.000		12 Bulan	
1	2	15	2	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	terlaksananya pengelolaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan (distribusi Obat)	12 Bulan	35.000.000		100.000.000	135.000.000		12 Bulan	155.250.000
							15.000.000		0	15.000.000			18.000.000
1	2	15	7	Pengadaan Alat Kesehatan	Terlaksanya pengadaan alat kesehatan	1 Puskesmas	200.000.000		2.000.000.000	2.200.000.000		2 Puskesmas	2.530.000.000
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan SPM di Puskesmas (upaya kesehatan masyarakat)	100%							
				Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Terlaksananya pelayanan kesehatan di BLUD PUSKESMAS	25 PUSKESMAS	44.000.000.000		44.000.000.000	IN OUT PUSKESMAS		26 PUSKESMAS	45.000.000.000
					cakupan rawat jalan dan rawat inap	15 Prosentase						15 Prosentase	
1	2	16	27	Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan	terlaksananya program bantuan operasional kesehatan di Puskesmas (BOK PUSKESMAS) dan MANAGEMEN BOK/JAMPERSAL	12 Bulan	0		18.500.000.000	18.500.000.000		12 Bulan	19.000.000.000
					meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	12 Bulan						12 Bulan	
1	2	16	28	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	terlaksananya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olah raga	12 Bulan	25.000.000		55.000.000	80.000.000		12 Bulan	92.000.000
					Tersedianya operasional LABKES	12	225.000.000			225.000.000	IN OUT LABKES		225.000.000
1	2	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat									
1	2	19	1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	terlaksananya pemberdayaan dan penyuluhan kesehatan masyarakat dan institusi	267 Desa / Kelurahan	15.000.000		150.000.000	165.000.000		267 Desa / Kelurahan	200.000.000
					Terlaksananya LOMBA KAMPUNG GERMAS		500.000.000			500.000.000			
1	2	19	13	Pemberdayaan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Institusi	cakupan desa siaga aktif	120 Desa/75%	50.000.000		300.000.000	350.000.000		cakupan desa siaga aktif	242.250.000
					Jumlah kampanye kesehatan melalui media elektronik, media cetak dan luar ruangan dan jumlah pesan tema KIE kepada masyarakat	3 jenis Media						5 jenis media	
1	2	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Desa STBM	267 Desa / Kelurahan							
1	2	21	6	Penyediaan / Pengawasan Sarana Air Bersih, Jamban,	tersedianya jamban untuk masyarakat miskin	98 Prosentase	1.500.000.000		1.500.000.000			98 Prosentase	1.725.000.000
					proporsi jamban sehat								
1	2	21	15	Pengawasan hygiene dan sanitasi TTU dan TPM	terlaksananya pengawasan hygiene dan sanitasi TTU dan TPM	90 Prosentase	5.000.000		20.000.000	25.000.000		90 Prosentase	30.000.000
					proporsi tempat umum dan fasilitas umum sehat		5.000.000		5.000.000	10.000.000			10.500.000
1	2	21	16	Pengembangan Desa STBM	Terlaksananya pengembangan desa STBM	200 Desa / Kelurahan			265.000.000	265.000.000		225 Desa / Kelurahan	304.750.000
					cakupan desa STBM								
1	2	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit									
1	2	22	5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung	terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung	12 Bulan			40.000.000	40.000.000		12 Bulan	69.000.000
					Tersedianya data penyakit menular langsung yang valid dan akurat	12 Bulan			20.000.000	20.000.000		12 Bulan	
					terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit tular vektor dan zoonotik (DBD, FILARIASIS, Pes dll)	12 Bulan			40.000.000	40.000.000		12 Bulan	54.000.000

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	22	8	Peningkatan imunisasi dan vaksinasi	terlaksananya kegiatan imunisasi sesuai jadwal pada bayi (0 - 12 bl) dan imunisasi ulangan pada anak sd dan bumil cakupan bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	95 Prosentase 12 Bulan	10.000.000		85.000.000	95.000.000		95 Prosentase 12 Bulan	109.250.000
1	2	22	9	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan	terlaksananya respons terhadap KLB/Wabah prosentase sinyal kewaspadaan dini KLB yang di respon terlaksananya surveillance penyakit	95 Prosentase 12 Bulan		50.000.000 50.000.000 150.000.000	50.000.000 50.000.000 150.000.000			95 Prosentase 12 Bulan	67.500.000 60.000.000 160.000.000
1	2	22	12	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tular									
1	2	22	13	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular termasuk gangguan jiwa	terlaksananya pengelolaan pencegahan dan pengendalian HT terlaksananya pengelolaan pencegahan dan pengendalian DM terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan jiwa terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit jiwa dan NAPZA	12 Bulan		30.000.000 25.000.000 25.000.000 10.000.000	30.000.000 25.000.000 25.000.000 10.000.000			12 Bulan	103.500.000
1	2	25		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Permenkes	20,69%							
1	2	25	1	Pembangunan puskesmas	puskesmas dilakukan renovasi/pembangunan	1 Puskesmas	150.000.000		6.000.000.000	6.150.000.000		1 Puskesmas	7.072.500.000
					Jumlah Puskesmas Memenuhi Standar Permenkes								
1	2	31		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Proporsi Pembinaan dan Pengawasan Produksi, Makanan, dan Minuman	45%							
1	2	31	2	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	terlaksananya pemantauan kesehatan dan keamanan pangan di pasaran dan tempat produksi produsen makanan memahami penggunaan BTP dan Cara Pengolahan yang Baik (CPPB)	45 Prosentase	12.000.000		100.000.000 50.000.000	112.000.000 50.000.000		50 Prosentase	186.300.000
1	2	33	1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	Cakupan SPM di Puskesmas (upaya kesehatan masyarakat)	100%							
				Pelayanan dan pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD									
1	2	34		Program Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga	Cakupan kunjungan bayi/Cakupan pelayanan anak balita/Prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia/Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	95%/95%/100%/90%							
1	2	34	1	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi	terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan bayi penurunan AKI AKB AKABA	19 Kasus			70.000.000 70.000.000	70.000.000 70.000.000		18 Kasus	80.000.000 81.000.000
1	2	34	2	Peningkatan Pelayanan Persalinan (Jampersal)	beroperasinya rumah tunggu kelahiran penurunan AKI AKB AKABA	12 bulan			2.500.000.000	2.500.000.000		12 Bulan	2.000.000.000 0
1	2	34	3	Peningkatan pelayanan kesehatan balita, anak	terlaksananya pelayanan kesehatan balita terlaksananya pelayanan kesehatan balita anak sekolah pendidikan dasar tersedianya data program dan kegiatan yang valid dan akurat serta tepat waktu	12 Bulan 12 bulan 12 Bulan	10.000.000 5.000.000 10.000.000		10.000.000 5.000.000 10.000.000	20.000.000 10.000.000 10.000.000		12 Bulan	34.500.000 25.000.000
1	2	34	4	Peningkatan pelayanan gizi masyarakat	Terlaksananya pelacakan kasus kurang gizi prosentase balita kurus mendapat maknan tambahan	90 Prosentase 12 Bulan	15.000.000		50.000.000	65.000.000		90 Prosentase 12 Bulan	86.250.000

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
							Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	34	5		Pelayanan kesehatan lansia	terlaksananya pelayanan kesehatan lansia	100 Prosentase	10.000.000		25.000.000	35.000.000		100 Prosentase	40.250.000
1	2	35			Program Pembiayaan kesehatan masyarakat	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat/penduduk miskin	40%							
1	2	35	1		Penyediaan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat	terlaksananya pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin non PBI APBN	40 Prosentase	6.000.000.000	17.000.000.000		23.000.000.000		50 Prosentase	23.000.000.000
						cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat atau penduduk miskin								
1	2	36			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi/Cakupan rawat jalan (pusk)/Cakupan rawat inap (pusk)/Cakupan respon aduan kegawatdaruratan kesehatan yang ditangani	10 Puskesmas/15%/1,5%/90 %							
1	2	36	1		Peningkatan pelayanan Kesehatan Dasar									
1	2	36	2		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	terlaksananya monitoring dan evaluasi pada FKTRL	5 SKPD/UPT	13.250.000			13.250.000		8 SKPD/UPT	46.000.000
						terlaksananya monitoring dan evaluasi pada FKTP	12 Bulan	25.000.000		50.000.000	75.000.000		12 Bulan	86.250.000
1	2	36	3		Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar	terlaksananya pendampingan dan penilaian reakreditasi puskesmas	5 Puskesmas	0		1.000.000.000	1.000.000.000		5 Puskesmas	1.150.000.000
						jumlah puskesmas terakreditasi	5 Puskesmas						5 Puskesmas	
1	2	36	4		Peningkatan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu	terselenggaranya sistem kegawatdaruratan terpadu	12 Bulan	93.948.000			93.948.000		12 Bulan	400.000.000
						Tersedianya AMBULAN SPD MOTOR	3 Unit	126.900.000			126.900.000			
						cakupan respon kegawatdaruratan yang ditangani								
1	2	36	5		Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Komplementer	terlaksananya pembinaan kesehatan tradisional dan komplementer	12 Bulan			100.000.000	100.000.000		12 Bulan	115.000.000
						tersedianya data pelayanan tradisional dan komplementer	12 Bulan						12 Bulan	
1	2	37			Program Pengembangan sumber daya kesehatan	Dokter dan tenaga kesehatan dikirim pelatihan	50 Orang							
1	2	37	1		Peningkatan kapasitas dan kualitas dokter dan									
						Terlaksananya pengiriman pelatihan tenaga kesehatan	10	106.840.000			106.840.000			200.000.000
1	2	38			Program Manajemen informasi dan regulasi kesehatan	Prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi	100%							
1	2	38	1		Pengembangan data dan informasi kesehatan	terlaksananya monitoring SIK dan Simpup terintegrasi secara online	12 Bulan	50.000.000			50.000.000		12 Bulan	57.500.000
						tersajinya data kesehatan yang akurat dalam profil kesehatan	12 Bulan							
TOTAL PAGU 1								62.772.023.400	17.000.000.000	38.950.000.000	118.722.023.400			118.792.485.000
5	1	1			Belanja Pegawai			65.905.107.000			65.905.107.000			65.905.107.000
1	2	22			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit									
1	2	22	5		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung	Bantuan Kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kab Boyolali	1 Thn	300.000.000			300.000.000			
TOTAL PAGU 2								128.977.130.400	17.000.000.000	38.950.000.000	184.927.130.400	-	-	184.697.592.000

OPD : RSUD PANDANARANG

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022				
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
1	2			Kesehatan											
1	2	26		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Pemenuhan Standart Sarana Prasarana Rumah Sakit	90 Prosentase	15.335.450.182	-	15.335.450.182	30.670.900.364		90 Prosentase	33.737.990.400		
1	1	26	01	Pembangunan rumah sakit	terbayarnya sarana dan prasarana rumah sakit (terbayarnya bangunan kesehatan rumah sakit)	90 Prosentase	11.935.447.250		7.935.447.250	19.870.894.500		90 Prosentase	21.857.983.950		
1	2	26	18	Pengadaan alat - alat kesehatan rumah sakit	terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit	90 Prosentase	3.400.002.932		7.400.002.932	10.800.005.864		90 Prosentase	11.880.006.450		
1	2	33		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR)/Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS)/Turn Over Internal (TOI)/Bed Turn Over (BTO)/Angka Kematian Murni (Net Death Rate/ NDR)/Gross Death Rate (GDR)	84,21 Prosentase/6 hari/2 hari/59,81 Pasien/1,1 Prosentase/2,01 Prosentase									
1	2	33	01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		113.500.000.000	0	0	113.500.000.000			124.850.000.000		
					BOR	84,21 Prosentase	113.500.000.000			113.500.000.000		84,21 Prosentase	124.850.000.000		
					LOS	6 hari						6 hari			
					TOI	2 hari						2 hari			
					BTO	59,81 Pasien						59,81 Pasien			
					NDR	1,1 Prosentase						1,1 Prosentase			
					GDR	2,01 Prosentase						2,01 Prosentase			
TOTAL PAGU 1							128.835.450.182		15.335.450.182	144.170.900.364			158.587.990.400		
5	1	1		Belanja Pegawai			22.762.979.000			22.762.979.000			22.762.979.000		
TOTAL PAGU 2							151.598.429.182		15.335.450.182	166.933.879.364			181.350.969.400		

OPD : RSUD WARAS-WIRIS

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	2			Kesehatan									
1	2	33		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD									
1	2	33	1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	BOR, LOS, TOI, BTO SESUAI DENGAN STANDAR DAN MENINGKATNYA NILAI SPM	12 bulan	12.000.000.000			12.000.000.000		12 bulan	15.000.000.000
1	2	26		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Pemenuhan standart sarana dan prasarana rumah sakit	100Prosentase							
1	2	26	1	Pembangunan rumah sakit	Terlaksananya pembangunan rumah sakit	100%	8.000.000.000		10.000.000.000	18.000.000.000		100%	21.500.000.000
1	2	26	18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit	100%	3.200.000.000		5.000.000.000	8.200.000.000		100%	3.500.000.000
1	2	36		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Standart Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100Prosentase							
1	2	36	2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan	100%	757.000.000		5.000.000.000	5.757.000.000		100%	5.084.000.000
1	2	15		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan standart pelayanan kesehatan rumah sakit	100Prosentase							
1	2	15	1	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT SESUAI DENGAN STANDAR	100%	500.000.000			500.000.000		100%	500.000.000
TOTAL PAGU 1							24.457.000.000		20.000.000.000	44.457.000.000			45.584.000.000
5	1	1		Belanja Pegawai			7.491.912.000			7.491.912.000			7.491.912.000
TOTAL PAGU 2							31.948.912.000		20.000.000.000	51.948.912.000			53.075.912.000

OPD : RSUD SIMO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	2			Kesehatan									
1	2	26		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Pemenuhan standart sarana dan prasarana rumah sakit	80Prosentase							
1	2	26	1	Pembangunan rumah sakit	Terbangunnya Gedung baru RSUD Simo	90 Prosentase	8.500.000.000		4.500.000.000	13.000.000.000			12.000.000.000
1	2	26	18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya peralatan kesehatan rumah sakit	75 Prosentase	5.049.960.000		9.296.629.909	14.346.589.909			
					Tercukupinya alat kesehatan								
1	2	26	19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Tercukupinya Kebutuhan Obat dan Perbekalan	12 Bulan	1.700.000.000			1.700.000.000			2.400.000.000
1	2	26	22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Tersedianya Meubelair RSUD Simo	1 Paket	620.000.000			620.000.000			600.000.000
1	2	33		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR)/Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS)/Turn Over Internal (TOI)/Bed Turn Over (BTO)/Angka Kematian Murni (Net Death Rate/ NDR)/Gross Death Rate (GDR)	73%/5 hari/2 hari/46 Pasien/0%/1%							
1	2	33	1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas	12 Bulan	15.588.555.000			15.588.555.000			16.000.000.000
					Pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas								
TOTAL PAGU 1							31.458.515.000		13.796.629.909	45.255.144.909			31.000.000.000
5	1	1		Belanja Pegawai			6.606.033.000			6.606.033.000			6.606.033.000
TOTAL PAGU 2							38.064.548.000		13.796.629.909	51.861.177.909			37.606.033.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat Menyurat	12 bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	15.000.000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya listrik dan telepon untuk kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	150.000.000			150.000.000		12 Bulan	200.000.000
4	1	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tercapainya dan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	180.000.000			180.000.000		12 Bulan	200.000.000
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan alat alat berat DPUPR	12 bulan	500.000.000			500.000.000		12 Bulan	500.000.000
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi siap pakai	12 bulan	94.000.000			94.000.000		12 Bulan	100.000.000
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	85.000.000			85.000.000		12 Bulan	90.000.000
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan	12 bulan	145.000.000			145.000.000		12 Bulan	150.000.000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpeliharanya penerangan kantor	12 bulan	15.000.000			15.000.000		12 Bulan	18.000.000
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan untuk lingkungan kantor	12 bulan	45.000.000			45.000.000		12 Bulan	50.000.000
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bertambahnya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	3.000.000			3.000.000		12 Bulan	3.500.000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya logistik untuk menunjang pelayanan kegiatan kantor	12 bulan	500.000.000			500.000.000		12 Bulan	500.000.000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan konsumsi untuk rapat dan tamu	12 bulan	125.000.000			125.000.000		12 Bulan	130.000.000
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya kegiatan koordinasi baik dalam maupun ke luar daerah	12 bulan	495.000.000			495.000.000		12 Bulan	500.000.000
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Honor bagi PTT dan THL DPUPR	12 bulan	625.000.000			625.000.000		12 Bulan	650.000.000
1	3	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1	3	2	3	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan/Renovasi/Pemeliharaan dan Perawatan Gedung di Wilayah Kabupaten Boyolali	6 unit	34.000.000.000			34.000.000.000		4 unit	34.000.000.000
1	3	2	5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional kantor	2 unit	400.000.000			400.000.000		1 unit	300.000.000
1	3	2	9	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Tercukupinya peralatan gedung dan peralatan	4 unit	200.000.000			200.000.000		4 unit	200.000.000
1	3	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	4 unit	200.000.000			200.000.000		4 unit	200.000.000
1	3	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
1	3	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunya dokumen perencanaan dan laporan rutin lainnya		0			0			
1	3	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik/Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kab boyolali dengan pembangunan jalan baru (km)	417,28 km							
1	3	15	3	Pembangunan Jalan	Porposi panjang jalan dalam keadaan baik	412,34 km	46.821.687.000		37.450.000.000	84.271.687.000		412,34 km	72.950.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
							Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	15	5		Pembangunan Jembatan	Terbangunya dan meningkatnya kondisi jembatan	23 unit	29.950.000.000			29.950.000.000		10 unit	20.000.000.000
						jalan dan jembatan dalam keadaan baik					0			
1	3	16			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang drainase dibangun sebagai bangunan pelengkap jalan	8.240 km				0			
1	3	16	3		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terselenggaranya Pembangunan Saluran Drainase	7,740 km	4.072.076.000			4.072.076.000		7740 km	4.100.000.000
1	3	17			Program Pembangunan Turap/talud/bronjong	Panjang talud tebing sungai yang dibangun / Panjang Talud jalan yang dibangun	1490,49 km/637,60 km				0			
1	3	17	3		Pembangunan Turap/talud/bronjong	Panjang talud tebing sungai yang di bangun	2067 km	1.500.000.000			1.500.000.000		2,067 km	3.000.000.000
						terpeliharanya talud tebing sungai yg di bangun								
1	3	18			Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang Jaringan Jalan yang dipertahankan Dalam Kondisi baik	20 km							
1	3	18	3		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Mempertahankan jalan kabupaten dalam kondisi baik	25 km	48.750.000.000		2.000.000.000	50.750.000.000		25 km	27.000.000.000
1	3	18	4		Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Mempertahankan jembatan kabupaten dalam kondisi baik	1	800.000.000			800.000.000		1	1.200.000.000
1	3	24			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya	Luas sawah yang dapat dialiri air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	8737,67 km							
1	3	24	10		Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Luas sawah yang dapat dialiri air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	8.682 ha	2.000.000.000		10.740.000.000	12.740.000.000		8.682 ha	12.800.000.000
1	3	24	13		Rehabilitasi/pemeliharaan Pintu Air	Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi baik	1	250.000.000			250.000.000		1	250.000.000
1	3	24	16		Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Terlaksananya Pembangunan Konstruksi pada Daerah Irigasi secara Partisipatif	5 GP3A	250.000.000			250.000.000		5 GP3A	300.000.000
1	3	24	17		Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	terpeliharanya pintu air jaringan primer & Skunder	12 bulan	500.000.000			500.000.000		12 bulan	500.000.000
1	3	25			Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tersedianya data potensi air bawah tanah(data potensi air tanah/Sumur Uji)/Sambungan Rumah terbangun untuk mendapatkan akses air minum yang aman/Cakupan rumah tangga pengguna air bersih	3 Dokumen/425 Unit							
1	3	25	1		Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Pamsimas		500.000.000			500.000.000			500.000.000
						Terbangunya jaringan air bersih dengan sumber mata air bagi masyarakat	400 unit	4.000.000.000		4.650.000.000	8.650.000.000		400 unit	10.708.097.000
						terlaksananya pengembangan jaringan air minum		2.000.000.000			2.000.000.000			

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	26		Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, Danau dan sumber daya Air lainnya	Tersedianya air baku Melalui pembangunan embung	8 unit							
1	3	26	1	Pembangunan Embung, dan bangunan penampung air lainnya	Tersedianya air baku melalui pembangunan embung	10 unit	33.200.000.000			33.200.000.000		6 unit	25.000.000.000
1	3	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Bertambahnya sanitasi berupa IPAL	6 unit							
1	3	27	1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Sanitasi	0	200.000.000			200.000.000		0	200.000.000
					Terbangunnya IPAL komunal	6 unit	1.500.000.000			1.500.000.000		6 unit	1.500.000.000
1	3	33		Program Pengawasan jasa konstruksi	SIUJK yang diterbitkan	40 lembar				0			
1	3	33	1	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Terbitnya SIUJK tepat waktu	45 Dokumen	500.000.000			500.000.000		45 dokumen	500.000.000
1	3	36		Program Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	1 Dokumen				0			
1	3	36	5	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	2 Dokumen	200.000.000			200.000.000		2 dokumen	200.000.000
1	3	36	10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Dokumen RDTR Kecamatan dan Dokumen P2 (peraturan Zonasi) Kecamatan	1 Dokumen	100.000.000			100.000.000		1 Dokumen	100.000.000
					Terfasilitasinya koordinasi antar instansi dalam permohonan persetujuan substansi rencana detail tata ruang					0			
1	3	36	13	Survey dan pemetaan	Keserasian antar instansi dalam proses Persetujuan substansi rencana detail tata ruang	1 Dokumen	150.000.000			150.000.000		1 Dkumen	150.000.000
					Dokumen Informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laporan hasil monitoring pemanfaatan ruang	1 Paket	100.000.000			100.000.000		1 Paket	150.000.000
1	3	38		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pelayanan Legalisasi rekomteks IMB/Pelayanan Legalisasi site plan	240 rekomendasi/48 dokumen				0			
1	3	36	5	Pengawasan pemanfaatan ruang	Terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR -terwujudnya tertib tata ruang di Kabupaten Boyolali	48 Dokumen	150.000.000			150.000.000		48 Dokumen	150.000.000
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan						0			
2	3			Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						0			
2	3	18		Program pengembangan sistem informasi pertanahan						0			
2	3	18	1	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan	1 Dokumen	100.000.000			100.000.000		1 Dokumen	100.000.000
TOTAL PAGU I							215.365.763.000		54.840.000.000	270.205.763.000			219.164.597.000

OPD : DPU PR

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1	1		Belanja Pegawai			14.197.974.000			14.197.974.000			14.197.974.000
1	3	25		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tersedianya data potensi air bawah tanah(data potensi air tanah/Sumur Uji)/Sambungan Rumah terbangun untuk mendapatkan akses air minum yang aman/Cakupan rumah tangga pengguna air bersih								
1	3	25	1	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Pamsimas								
					Terbangunya jaringan air bersih dengan sumber mata air bagi masyarakat		1.715.000.000			1.715.000.000			
					terlaksananya pengembangan jaringan air minum		2.000.000.000			2.000.000.000			
1	3	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Bertambahnya sanitasi berupa IPAL								
1	3	27	1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Sanitasi								
					Terbangunnya IPAL komunal		5.319.757.000			5.319.757.000			
TOTAL PAGU 2							238.598.494.000		54.840.000.000	293.438.494.000			233.362.571.000

OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercukupinya semua kebutuhan dalam mendukung kelancaran tugas - tugas kedinasan								
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat menyurat tepat waktu	12 Bulan	8.000.000			8.000.000		12 Bulan	8.000.000
					terfasilitasinya kegiatan surat menyurat					-			-
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya listrik dan telepon untuk kelancaran administrasi perkantoran	12 Bulan	64.820.000			64.820.000		12 Bulan	64.820.000
					terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					-			-
4	1	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedia dan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	6.250.000			6.250.000		12 Bulan	6.250.000
					tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor					-			-
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	12 Bulan	75.000.000			75.000.000		12 Bulan	75.000.000
					terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas					-			-
4	1	1	15	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	750.000			750.000		12 Bulan	750.000
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	35.296.000			35.296.000		12 Bulan	35.296.000
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan untuk menunjang kelancaran tugas tugas kedinasan	12 Bulan	19.000.000			19.000.000		12 Bulan	19.000.000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 Bulan	6.000.000			6.000.000		12 Bulan	6.000.000
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkap kantor		62.000.000			62.000.000		1 Paket	62.000.000
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	2.500.000			2.500.000		367 Buah	2.500.000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	50.401.000			50.401.000		1 Tahun	50.401.000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman penunjang kegiatan kedinasan	12 Bulan	90.000.000			90.000.000		12 Bulan	90.000.000
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya kegiatan operasional dinas	12 Bulan	320.000.000			320.000.000		12 Bulan	320.000.000
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Adminstrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	224.250.000,00			224.250.000		12 bulan	225.000.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur penunjang kegiatan dinas								
4	1	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur penunjang kegiatan dinas		38.230.000			38.230.000		5 Unit	38.230.000
							32.000.000			32.000.000			35.000.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	25.000.000			25.000.000		12 Bulan	25.000.000
4	1	2	19	Penataan Lingkungan Kantor	Tertatanya ruangan dan lingkungan kantor	1 Paket	1.500.000.000			1.500.000.000		1 Paket	1.400.000.000
4	1	18		Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial	Terbangunya Rumah Akibat Bencana Alam								
4	1	18	01	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam	Terbangunnya pembangunan Rumah Layak Huni bagi korban bencana alam kabupaten	70 unit	1.480.000.000,00		-	1.480.000.000,00			
						1 Tahun	1.000.000.000,00		-	1.000.000.000,00		1 tahun	1.250.000.000,00
4	1	18		Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban Relokasi Proyek Pemerintah Kabupaten	Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Relokasi	55 unit	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00		20 unit	750.000.000,00
						1 Paket	50.000.000,00			50.000.000,00		1 Paket	50.000.000,00
						1 Paket	600.000.000,00			600.000.000,00		1 Paket	600.000.000,00
						12 Bulan	-			-		12 Bulan	-
						12 bulan	-			-		12 bulan	-
						1 paket	50.000.000,00			50.000.000,00		1 paket	50.000.000,00

OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	15		Program Pengembangan Perumahan									
1	4	15	17	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat	Terbangangunnya sarana dan prasarana dasar permukiman berbasis masyarakat	1 Paket	198.500.000			198.500.000,00		3 Paket	600.000.000,00
1	4	15	1	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Tersusunnya kebijakan, strategi dan program perumahan dengan baik	1 Paket	100.000.000			100.000.000		1 Paket	100.000.000
1	4	15	1	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan		1 Paket	25.000.000			25.000.000		1 Paket	25.000.000
						1 Paket	90.000.000			90.000.000		1 Paket	90.000.000
1	4	15	6	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi masyarakat Kurang mampu	170 unit	-		3.123.750.000	3.123.750.000		170 unit	3.123.750.000
						2000 unit	20.750.000.000			20.750.000.000		2000 unit	20.750.000.000
1	4	15	10	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Tertanganinya luasan permukiman kumuh	3 Paket	480.000.000			480.000.000		3 Paket	480.000.000
						3 Paket	10.000.000			10.000.000,00		3 Paket	10.000.000
TOTAL PAGU 1							29.392.997.000		3.123.750.000	32.516.747.000			32.516.747.000
5	1	1		Belanja Pegawai			2.417.648.000			2.417.648.000			2.417.648.000
TOTAL PAGU 2							31.810.645.000		3.123.750.000	34.934.395.000			34.934.395.000

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	4			Perumahan dan kawasan pemukiman									
1	4	19		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			85.470.000			85.470.000			94.017.000
1	4	19	5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	tersedianya tenaga yang terlatih	2 kegiatan	21.890.000			21.890.000		2 Kegiatan	24.079.000
1	4	19	8	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Kesiagaan penanggulangan pemadam kebakaran	1 paket	57.580.000			57.580.000		1 Paket	63.338.000
					Kesiapan dalam penanggulangan kebakaran	1 paket						1 Paket	
1	4	19	12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Kesiapan tanggap darurat	12 bulan	6.000.000			6.000.000		12 Bulan	6.600.000
					kesiapan dalam mengatasi kebakaran	12 bulan						12 Bulan	
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			454.728.000			454.728.000			417.700.800
1	5	15	1	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Terkirimnya satlinmas pada upacara hari besar dan pelatihan/kursus singkat, terlaksananya kegiatan Korsik	12 keg	298.568.000			298.568.000		12 kegiatan	245.924.800
												12 Kegiatan	
1	5	15	4	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terpenuhinya dana kegiatan operasi tipiring, cukai tembakau, pkI dan baliho/iklan	56 keg	65.000.000			65.000.000		56 Kegiatan	71.500.000
					Terlaksananya Kegiatan Operasi Tipiring, Cukai Tembakau, PKL dan Baliho/Iklan	56 keg						56 Kegiatan	
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terpenuhinya dana kegiatan patroli wilayah, tertib lalu lintas terpadu, pam lebaran, natal 2018 dan tahun baru 2019	117 keg	91.160.000			91.160.000		117 Kegiatan	100.276.000
					Terselenggaranya Kegiatan Patroli Wilayah, Tertib Lalu Lintas Terpadu, PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru	117 keg						117 Kegiatan	
1	5	18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			0			0			82.500.000
1	5	18	3	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terpenuhinya dana kegiatan korsik	12 bulan	0			0		12 bulan	82.500.000
					Terlaksananya Kegiatan Korsik	12 bulan						12 Bulan	
1	5	20		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			2.400.000			2.400.000			2.640.000
1	5	20	2	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Terpenuhinya dana kegiatan operasi penyakit masyarakat	20 keg	2.400.000			2.400.000		20 Kegiatan	2.640.000
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.435.145.500			3.435.145.500			3.778.660.050
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan perangko dan materei	12 bulan	4.000.000			4.000.000		12 Bulan	4.400.000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan listrik	12 bulan	45.000.000			45.000.000		12 Bulan	49.500.000
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	12 bulan	125.593.500			125.593.500		12 Bulan	138.152.850
					Kendaraan Operasional yang Layak Pakai	12 bulan						12 Bulan	
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa transaksi keuangan	12 bulan	2.074.590.000			2.074.590.000		12 bulan	2.282.049.000
					Kegiatan Laporan Keuangan Tepat Waktu	12 bulan						12 Bulan	

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya alat kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	18.000.000			18.000.000		12 bulan	19.800.000
					Terciptanya Kebersihan Kantor	12 bulan						12 Bulan	
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terpenuhinya dana perbaikan dan kelengkapan kantor	12 bulan	28.000.000			28.000.000		12 bulan	30.800.000
					Kesiapan Peralatan dan Perlengkapan Untuk Mendukung Kegiatan Kantor	12 bulan						12 Bulan	0
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kegiatan perkantoran	12 bulan	15.000.000			15.000.000		12 bulan	16.500.000
					Terlaksananya Kontinuitas Kegiatan Perkantoran	12 bulan						12 Bulan	0
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	19.360.000			19.360.000		12 bulan	21.296.000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpenuhinya penggantian komponen listrik	12 bulan	7.260.000			7.260.000		12 Bulan	7.986.000
					Tercukupinya Penerangan Kantor	12 bulan						12 Bulan	
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya dana penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	65.000.000			65.000.000		12 Bulan	71.500.000
					Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan						12 Bulan	
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan buku perundangan	360 buah	6.000.000			6.000.000		360 Buah	6.600.000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya dana penyedia makanan dan minuman	12 bulan	273.285.000			273.285.000		12 Bulan	300.613.500
					Tercukupinya Kebutuhan Makan dan Minum	12 bulan						12 Bulan	
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya bahan bakar minyak dan belanja perjalanan dinas	12 bulan	754.057.000			754.057.000		12 Bulan	829.462.700
					Terlaksananya Koordinasi	12 bulan						12 Bulan	
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			63.000.000			63.000.000			69.300.000
4	1	2	5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya anggaran pembelian kendaraan dinas		0			0			0
					Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas								
1	5	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	13.000.000			13.000.000		1 paket	14.300.000
					Tercukupinya peralatan gedung kantor	1 paket						1 paket	
4	1	2	1	Pengadaan mebeleur	Tercukupinya anggaran pembelian mebeler	3 unit	20.000.000			20.000.000		3 Unit	22.000.000
					Terpenuhinya Kebutuhan Mebeler	3 unit						3 Unit	
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor	1 paket	30.000.000			30.000.000		1 paket	33.000.000
					Terpeliharanya Gedung Kantor	1 paket						1 paket	

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
							Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL PAGU I								4.040.743.500			4.040.743.500			4.444.817.850
5	1	1			Belanja Pegawai		5.761.488.000				5.761.488.000			5.761.488.000
1	5	15			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan									
1	5	15	5		Pengendalian keamanan lingkungan	Terpenuhinya dana kegiatan patroli wilayah, tertib lalu lintas terpadu, pam lebaran, natal 2018 dan tahun baru	117 keg	3.000.000.000			3.000.000.000			
						Terselenggaranya Kegiatan Patroli Wilayah, Tertib Lalu Lintas Terpadu, PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru	117 keg							
TOTAL PAGU 2								12.802.231.500			12.802.231.500			10.206.305.850

OPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	1.215.700.000			1.215.700.000		12 bulan	1.398.055.000
4	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Materi dan benda pos	12 bulan	3.000.000			3.000.000		12 bulan	3.450.000
					Tersediannya Admistrasi Surat menyurat								
4	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya Biaya Pembayaran langganan Listrik, Air dan Telpo	12 bulan	73.000.000			73.000.000		12 bulan	83.950.000
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik								
4	1	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Biaya Pajak Kendaraan	12 bulan	3.000.000			3.000.000		12 bulan	3.450.000
					Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional								
4	1	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Belanja Buku Cek	12 bulan	3.700.000			3.700.000		12 bulan	4.255.000
					Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan								
4	1	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	3.500.000			3.500.000		12 bulan	4.025.000
					Tersedianya jasa kebersihan kantor								
4	1	1	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	12 bulan	12.000.000			12.000.000		12 bulan	13.800.000
					Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor								
4	1	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	135.000.000			135.000.000		12 bulan	155.250.000
					Tersedianya Alat Tulis Kantor								
4	1	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	12 bulan	100.000.000			100.000.000		12 bulan	115.000.000
					Tersedianya barang cetak dan penggadaan								
4	1	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Telepon	Tersedianya Komponen Intalasi Listrik/Telpon	12 bulan	3.500.000			3.500.000		12 bulan	4.025.000
					Tersedianya Komponen Intalasi Listrik/telepon								
4	1	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	100.000.000			100.000.000		12 bulan	115.000.000
					Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor								
4	1	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	5.100.000			5.100.000		12 bulan	5.865.000
					Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan								
4	1	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan logistik kantor pengisian tabung pemadam, tabung gas dan BBM	12 bulan	50.000.000			50.000.000		12 bulan	57.500.000
					Tersedianya Bahan logistik kantor BBM, Pengisian Tabung Pemadam dan Tabung Gas								
4	1	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan minuman	12 bulan	450.000.000			450.000.000		12 bulan	517.500.000
					Tersedianya Makanan dan minuman								
4	1	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	180.000.000			180.000.000		12 bulan	207.000.000
					Tersedianya pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	93.900.000			93.900.000		12 bulan	107.985.000
					Tersediannya jasa administrasi perkantoran								
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 bulan	50.000.000			50.000.000		12 bulan	57.500.000
4	1	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	25.000.000			25.000.000		12 bulan	28.750.000
					Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor								

OPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	25.000.000			25.000.000		12 bulan	28.750.000
					Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional								
4	3	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		12 bulan	-			-		12 bulan	-
4	3	21	16	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	12 bulan	-			-		12 bulan	-
					Tersusunnya Renstra dan Renja SKPD								
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani/Kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian kebisingan dan pengendalian keamanan lingkungan/Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	100%/3 keg/19 ke	280.000.000			280.000.000		12 bulan	322.000.000
1	5	15	5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Tersedianya penyelenggaraan pengendalian keamanan lingkungan	12 bulan	270.000.000			270.000.000		12 bulan	310.500.000
					Tersedianya penyelenggaraan pengendalian keamanan lingkungan	12 bulan	10.000.000			10.000.000		12 bulan	11.500.000
1	5	15	6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	12 bulan	-			-		12 bulan	-
					Tersedianya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan								
1	5	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA/Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan/Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	100%/38 kegiatan/22 kegiatan	500.000.000			500.000.000		12 bulan	575.000.000
1	5	17	1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Tersedianya Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	100 Orang	10.000.000			10.000.000		100 Orang	11.500.000
					Tersedianya Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama								
1	5	17	2	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat	Tersedianya kegiatan penyelenggaraan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	100 Orang	10.000.000			10.000.000		100 Orang	11.500.000
					Tersediannya kegiatan penyelenggaraan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat								
1	5	17	3	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Tersedianya kegiatan orketbang paskibraka dalam rangkaian kegiatan HUT RI dan penyelenggaraan Lomba pengucapan pancasila dan pembukaan UUD 1945	3 Kegiatan	450.000.000			450.000.000		3 Kegiatan	517.500.000
					Tersedianya kegiatan orketbang, Paskibraka dalam rangkaian kegiatan HUT RI, penyelenggaraan lomba pengucapan pancasila dan pembukaan UUD 1945								
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	tersedianya penyelenggaraan kegiatan, pembinaan peningkatan iman dan taqwa dikalangan masyarakat	100 Orang	10.000.000			10.000.000		100 Orang	11.500.000
					Tersedianya peyelenggaraa kegiatan pembinaan peningkatan iman dan tagwa dikalangan masyarakat								
1	5	17	6	Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah	Tersedianya penyelenggaraan kegiatan sarasehan seni budaya daerah	100 Orang	10.000.000			10.000.000		100 Orang	11.500.000

OPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Tersedianya penyelenggaraan kegiatan sarasehan seni budaya daerah								
1	5	17	7	Pembinaan, Pengawasan dan Harmonisasi Hubungan antar Etnis serta Orang Asing	Tersedianya penyelenggaraan kegiatan pembinaa, pengawasan dan harmonisasi hubungan antar etnis serta orang asing	100 Orang	10.000.000			10.000.000		100 Orang	11.500.000
					Tersedianya penyelenggaraan kegiatan pembinaa, pengawasan dan harmonisasi hubungan antar etnis serta orang asing								
1	5	18		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kegiatan event pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan.	20 keg	60.000.000			60.000.000		12 bulan	69.000.000
1	5	18	1	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Tersedianya fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	1 Kegiatan	50.000.000			50.000.000		1 Kegiatan	57.500.000
					Tersedianya fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan								
1	5	18	2	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Tersedia penyelenggaraan kegiatan seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	100 Orang	10.000.000			10.000.000		100 Orang	11.500.000
					Tersedianya penyelenggaraan kegiatan seminar talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan								
1	5	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Cakupan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)/Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat	2.21%/15 keg	20.000.000			20.000.000		12 bulan	23.000.000
1	5	20	1	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Semakin Meningkatnya Pemahaman Generasi Muda akan Bahaya narkoba	12 bulan	20.000.000			20.000.000		12 bulan	23.000.000
					Tersediannya kegiatan pembentukan keanggotaan BNK Pelaksanaan sosialisasi P4GN								
1	5	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)/Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	100%/82%	54.000.000			54.000.000		5 Parpol	62.100.000
1	5	21	1	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Tersedianya penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat	100 Orang	8.000.000			8.000.000		100 Orang	9.200.000
					tersediannya penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat								
1	5	21	2	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	Tersedianya fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik	5 Parpol	20.000.000			20.000.000		5 Parpol	23.000.000
					Tersedianya Fasilitasi Penyelesaian partai politik								
1	5	21	3	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Tersedianya kegiatan koordinasi forum diskusi politik	100 Orang	10.000.000			10.000.000		100 Orang	11.500.000
					Tersedianya kegiatan koordinasi forum diskusi politik								
1	5	21	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	12 bulan	-			-		12 bulan	-
					Tersdianya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan								
1	5	21	6	Pengkondisian Wilayah dan Sosialisasi Pemilu	Tersedianya penyelenggaraan kegiatan pengkondisian wilayah dan rapat koordinasi desk pemilu	12 bulan	16.000.000			16.000.000		12 bulan	18.400.000
					Tersedianya penyelenggaraan kegiatan pengkondisian wilayah dan sosialisasi pemilu								
TOTAL PAGU I							2.179.700.000			2.179.700.000			2.506.655.000
5	1	1		Belanja Pegawai			1.492.837.000			1.492.837.000			1.492.837.000

OPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat									
1	5	21	6	Pengkondisian Wilayah dan Sosialisasi Pemilu	Tersedianya penyelenggaraan kegiatan pengkondisian wilayah dan rapat koordinasi desk pemilu	12 bulan	21.573.104.400			21.573.104.400			
					Tersedianya penyelenggaraan kegiatan pengkondisian wilayah dan sosialisasi pemilu								
1	5	21	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	12 bulan	2.650.000.000			2.650.000.000			
					Tersdianya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan								
TOTAL PAGU 2							27.895.641.400			27.895.641.400			3.999.492.000

OPD : BPBD

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.148.283.000			2.148.283.000			2.327.950.640
4	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Surat menyurat	12 bln	3.150.000			3.150.000		12 bln	3.500.000
4	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	126.627.000			126.627.000		12 bln	139.350.000
4	1	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	14.983.000			14.983.000		12 bln	16.500.000
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	250.000.000			250.000.000			275.000.000
4	1	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bln	700.000			700.000		12 bln	770.000
4	1	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	11.998.000			11.998.000		12 bln	13.500.000
4	1	1	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bln	9.950.000			9.950.000		12 bln	29.000.000
4	1	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianyanya alat tulis kantor	12 bln	49.531.000			49.531.000		12 bln	54.000.000
4	1	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bln	48.810.000			48.810.000		12 bln	53.000.000
4	1	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bln	18.206.000			18.206.000		12 bln	20.000.000
4	1	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit	8.470.000			8.470.000		3 unit	25.000.000
4	1	1	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat RT	6 unit	3.230.000			3.230.000		3 unit	5.000.000
4	1	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bln	2.502.000			2.502.000		12 bln	3.000.000
4	1	1	16	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bln	235.482.400			235.482.400			259.030.640
4	1	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	12 bln	160.284.000			160.284.000		12 bln	176.000.000
4	1	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat2 koordinasi	12 bln	415.159.600			415.159.600		12 bln	457.000.000
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya gaji TRC	12 bln	789.200.000			789.200.000			798.300.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			662.000.000			662.000.000			662.000.000
4	1	2	5	Pembangunan Gedung Kantor	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Unit	150.000.000			150.000.000			150.000.000
4	1	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Ketersediaan perlengkapan gedung kantor	1 unit	12.000.000			12.000.000		1 unit	12.000.000
					Terpenuhinya perlengkapan kantor								
4	1	2	9	Penataan Lingkungan Kantor	Lingkungan kantor tertata rapi	2 Unit	300.000.000			300.000.000			300.000.000
4	1	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Cakupan pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bln	200.000.000			200.000.000		12 bln	200.000.000
					cakupan terpeliharanya /Bertambahnya sarpras aparatur								
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	22		Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan /Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan Terpadu/Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik/Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana/Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana/Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana/Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana	27,5 skor/12,1 skor/39,6 skor/15,4 skor/30,2 skor/69,7 skor /12,1 skor	5.642.608.000			5.642.608.000		12 bln	5.344.000.000
1	5	22	3	Pengadaan sarana kebencanaan	Cakupan bertambahnya sarpras kebencanaan	615 unit	5.156.193.000			5.156.193.000		3 unit	2.700.000.000
					Bertambahnya sarpras kebencanaan								

OPD : BPBD

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	22	4	Pengadaan logistik kebencanaan	Prosentase Logistik tersalur kepada korban bencana dan tercukupinya bahan bangunan	100 Prosentase	108.000.000			108.000.000		100 Prosentase	250.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan logistik bagi korban bencana								
1	5	22	9	Sosialisasi Kebencanaan	Terlaksananya Sosialisasi Kebencanaan kepada Diasabilitas	500 Orang	15.950.000			15.950.000		500 Orang	176.000.000
					Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi								
1	5	22	12	Rakor Penanganan Bencana	Terlaksananya Singkronisasi Penanganan	5 Kegiatan	20.250.000			20.250.000		5 Kegiatan	25.000.000
					Terlaksanya Persiapan antisipasi menghadapi musim kemarau dan musim penghujan								
1	5	22	13	Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	terlasananya pengurangan resiko bencana / sekolah sungai	2 Kegiatan	4.750.000			4.750.000		2 Kegiatan	275.000.000
					terlaksananya management perkantoran yang efektif dan efisien								
1	5	22	15	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk	5 Desa / Kelurahan	50.000.000			50.000.000		5 Desa / Kelurahan	250.000.000
					Terpenuhinya indikator Destana								
1	5	22	19	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten Boyolali	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon)	1 Dokumen	50.000.000			50.000.000		1 Dokumen	75.000.000
					Tersusunnya Dokumen renkon								
1	5	22	20	Pembentukan Sister Vilage (Desa Bersaudara)	jumlah desa bersaudara	6 Desa / Kelurahan	14.500.000			14.500.000		6 Desa / Kelurahan	159.500.000
1	5	22	21	Pemasangan early Warning System (EWS) Kebencanaan	Terpasangnya EWS Kebencanaan	5 Unit	50.000.000			50.000.000		4 Unit	500.000.000
					Terpasangnya EWS Kebencanaan								
1	5	22	23	Pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi dan papan peringatan desa daerah rawan bencana	terpasangnya rambu jalur evakuasi, papan peringatan desa dll daerah rawan bencana	50 Unit	10.000.000			10.000.000		50 Unit	60.000.000
					terpasangnya rambu jalur evakuasi, papan peringatan desa dll daerah rawan bencana								
1	5	22	25	Pembuatan peta rawan bencana letusan gunung merapi	Tersedianya Peta Rawan Bencana	4 Dokumen	30.000.000			30.000.000		4 Dokumen	121.000.000
					dapat mengetahui daerah rawan bencana								
1	5	22	27	Pendampingan bagi korban bencana (Trauma Healing)	Terlaksananya pendamping thd korban bencana (Trauma Healing)	1 keg	2.620.000			2.620.000		1 keg	15.000.000
					Tercapainya Kegiatan Pendampingan bagi korban bencana (Trauma Healing)								
1	5	22	28	Pengembangan Coorporate Social responbility (Perusahaan kepedulian sosial pasca bencana)	Terjaminnya dan tercapainya pengembangan CSR	30 Perusahaan	19.200.000			19.200.000		30 Perusahaan	25.000.000
					Terlaksananya pengembangan CSR								
1	5	22	30	Glady Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta Glady penanggulangan bencana	1 Kegiatan	42.345.000			42.345.000		1 Kegiatan	250.000.000
					terlaksananya Glady penanggulangan bencana								
1	5	22	31	Bimtek Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	Bertambahnya SDM yg berpengetahuan tentang SIKABI	50 Orang	4.425.000			4.425.000		50 Orang	75.000.000
					Bertambahnya SDM yg berpengetahuan tentang SIKABI								
1	5	22	32	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana	Bertambahnya SDM tentang pengelolaan peralatan bencana	60 Orang	5.050.000			5.050.000		60 Orang	80.000.000
					Bertambahnya SDM tentang pengelolaan peralatan bencana								
1	5	22	33	Peningkatan Kapasitas TRC dan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dalam Penanganan Kedaruratan	bertambahnya pengetahuan TRC dan relawan bencana tentang penyelamatan evakuasi dalam penanganan kedaruratan	50 Orang	8.700.000			8.700.000		50 Orang	85.000.000
					bertambahnya pengetahuan TRC dan relawan bencana tentang penyelamatan evakuasi dalam penanganan kedaruratan								

OPD : BPBD

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	22	34	Pelatihan Kaji Kebutuhan Pasca Bencana (jitupasna)	Jumlah peserta pelatihan jitupasna/perhitungan kerusakan kerugian	60 Orang	10.725.000			10.725.000			60 Orang
					Tersedianya SDM tentang jitupasna/perhitungan kerusakan kerugian/PDNA								
1	5	22	35	Peringatan Hari Pengurangan Resiko Bencanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam peringatan bulan pengurangan resiko bencana.	1 Kegiatan	16.400.000			16.400.000		1 Kegiatan	82.500.000
1	5	22	36	Jambore Penanggulangan Bencana	Jumlah orang yg mengikuti jambore PB	300 Orang	23.500.000			23.500.000		300 Orang	125.000.000
					Jumlah peserta Jambore								
TOTAL PAGU 1							8.452.891.000			8.452.891.000			8.333.950.640
5	1	1		Belanja Pegawai			2.582.454.000			2.582.454.000			2.582.454.000
TOTAL PAGU 2							11.035.345.000			-	11.035.345.000		10.916.404.640

OPD : DINAS SOSIAL

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah								
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Surat menyurat	12 Bulan	12.045.000			12.045.000		12 Bulan	13.851.750
					Terfasilitasinya jasa surat menyurat								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12 Bulan	85.500.000			85.500.000		12 Bulan	98.325.000
					Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air listrik dan internet								
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	800.000			800.000		12 Bulan	920.000
					terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan								
					Tersedianya Upah Petugas Rumah Singgah	12 Bulan	316.680.000			316.680.000		12 Bulan	396.000.000
					Tersedianya Upah Pengolh data Fakir Miskin	12 Bulan	52.800.000						
					Tersedianya Jasa TSKS	12 Bulan	316.800.000						
					Tersedian Upah Pengo;ah Data PBI	12 Bulan	52.800.000						
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan kebersihan kantor	12 Bulan	7.200.000			7.200.000		12 Bulan	8.280.000
					Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12.000.000			12.000.000		12 Bulan	13.800.000
					Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	57.567.000			57.567.000		12 Bulan	66.202.050
					Terpenuhinya alat kantor								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	166.580.000			166.580.000		12 Bulan	191.567.000
					Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon	12 Bulan	6.000.000			6.000.000		12 Bulan	6.900.000
					Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/telepon								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit	96.000.000			96.000.000		10 Unit	110.400.000
					Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Tersedianya bahan bacaan	720 Buah	3.500.000			3.500.000		720 Buah	4.025.000
					Terpenuhinya bahan bacaan								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	3000 l	106.942.000			106.942.000		3000 l	122.983.300
					Tercukupinya kebutuhan bahan logistik kantor								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman kantor	12 Bulan	310.980.000			310.980.000		12 Bulan	357.627.000
					Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman kantor								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi tugas dinas	12 Bulan	445.325.000			445.325.000		12 Bulan	512.123.750
					Terbayarnya perjalanan dinas								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	159.720.000			159.720.000		12 Bulan	183.678.000
					Terbayarnya jasa tenaga kontrak								
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah	12 Bulan							
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	86.400.000			86.400.000		12 Bulan	99.360.000
					Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor								
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	100.000.000			100.000.000		12 Bulan	115.000.000
					Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional								

OPD : DINAS SOSIAL

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah								
4	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan-laporan capaian kinerja kegiatan	12 Bulan	-			-		12 Bulan	-
					Tersusunnya laporan-laporan pelaksanaan kegiatan								
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	6			Sosial									
1	6	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase fakir miskin yang diberdayakan	35%							
1	6	15	3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Terlaksananya pembinaan bagi masyarakat miskin (melalui KUBE dan KRSE)	500 Orang	203.500.000			203.500.000	Tidak ada dalam permen	500 Orang	234.025.000
					meningkatkan pengetahuan anggota KUBE dan KRSE								
1	6	15	5	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi PMKS	80 Orang	18.000.000			18.000.000		80 Orang	20.700.000
					Meningkatnya pengetahuan bagi PMKS								
1	6	15	6	Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya pendataan PMKS	22 kec	133.100.000			133.100.000		22 kec	153.065.000
					Tersedianya data PMKS								
				Pindahan Dinkes		22 kec	2.500.000.000			2.500.000.000			2.500.000.000
1	6	15	7	Operasional dan Monitoring Program Keluarga Harapan	Terlaksananya operasional dan monitoring PKH	22 kec	113.500.000			113.500.000		22 kec	130.525.000
					Terpantaunya penerima manfaat PKH tepat sasaran								
1	6	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	35 prosentase							
1	6	16	1	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia		200 Orang	905.250.000			905.250.000		200 Orang	1.041.037.500
1	6	16	5	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Terlaksananya razia tuna sosial dan PGOT	12 bulan	-			-	anggaran di nol kan	12 bulan	-
					Terlaksananya rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	12 bulan	-			-	anggaran di nol kan	12 bulan	-
1	6	16	7	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Terlaksananya pemeliharaan TMP Ratna Negara	12 bulan	-			-		12 bulan	-
					Terciptanya kebersihan dan keindahan TMP Ratna Negara								
						12 bulan	43.000.000			43.000.000		12 bulan	49.450.000
1	6	16	9	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan	Terlaksananya BPNT sesuai dengan petunjuk	22 kec	21.000.000			21.000.000	Tidak ada dalam permen	22 kec	24.150.000
					Terjalinnya koordinaasi dan sinkronisasi pelaksanaan BPNT								
1	6	16	10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Terlaksananya pengadaan logistik bagi korban bencana	12 Bulan	135.000.000			135.000.000		12 Bulan	155.250.000
					Terlaksananya pembinaan bagi TAGANA								
					Tersedianya logistik bagi korban bencana	12 Bulan	80.000.000			80.000.000		12 Bulan	92.000.000
						2 keg	310.000.000			310.000.000		2 keg	356.500.000
						2 keg	10.000.000			10.000.000		2 keg	11.500.000
						40 orang	50.000.000			50.000.000		40 orang	57.500.000
						50 orang	90.000.000		266.400.000	356.400.000		50 orang	103.500.000

OPD : DINAS SOSIAL

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6	16	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			464.000.000			464.000.000		0	533.600.000
1	6	16	12	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah singgah	Tersedianya kebutuhan rumah perlindungan sosial	12 bulan	180.000.000			180.000.000		12 bulan	207.000.000
					Tercukupinya kebutuhan operasional RPS	12 bulan	40.000.000			40.000.000		12 bulan	46.000.000
						12 bulan	124.400.000			124.400.000	Tidak ada dalam permen	12 bulan	143.060.000
1	6	17	2	Program pembinaan anak terlantar	Prosentase anak terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial Prosentase anak terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	30 prosentas				-	Tidak ada dalam permen	30 prosentas	-
1	6	17	1	Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar	Terbangunnya gedung/RPS (lanjutan) bagi PMKS	1 paket	1.000.000.000			1.000.000.000			
1	6	17	2	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Terlaksananya pelatihan bagi anak terlantar	35 orang	12.500.000			12.500.000		35 orang	14.375.000
					Meningkatnya ketrampilan bagi anak terlantar								
					Prosentase penyandang disabilitas dan mendapatkan pembinaan dan pelayanan sosial								
1	6	18		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Prosentase Penyandang disabilitas yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan sosial	8%							
1	6	18	4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Terlaksananya pembinaan dan pelayanan sosial bagi difabel	80 orang	2.034.190.000		695.750.000	2.729.940.000		80 orang	2.339.318.500
					Pelayanan dan pembinaan bagi panti asuhan	16 Panti	10.000.000			10.000.000	Tidak ada dalam permen	16 Panti	11.500.000
1	6	19	3	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Terlaksananya pelayanan terhadap panti asuhan /panti jompo	17 panti	40.000.000			40.000.000	Tidak ada dalam permen	17 panti	46.000.000
					Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan di panti asuhan								
1	6	19	4	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Terlaksananya pelatihan bagi penghuni panti	17 panti	13.600.000			13.600.000	Tidak ada dalam permen	17 panti	15.640.000
					Meningkatnya ketrampilan bagi penghuni panti								
1	6	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pemahaman PSKS dalam penanganan PMKS serta peran aktif dan kepedulian masyarakat dalam UKS	16 desa							
1	6	21	1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Terwujudnya pelayanan SLRT	4 desa	137.400.000			137.400.000		4 desa	158.010.000
					Terselenggaranya penyuluhan sosial bagi PSKS dan dunia usaha	4 desa	9.600.000			9.600.000		4 desa	11.040.000
1	6	21	2	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Terselenggaranya temu konsultasi orsos, PSM dan Karang Taruna	4 desa	377.300.000			377.300.000		4 desa	433.895.000
					Meningkatnya kerjasama antara pelaku-pelaku UKS masyarakat dalam penanganan PMKS								
1	6	21	3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Terlaksananya penyuluhan sosial	4 desa	127.000.000			127.000.000		4 desa	146.050.000
					Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SDM kesejahteraan sosial masyarakat dalam penanganan PMKS								
1	6	21	4	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Terlaksananya penyuluhan sosial	22 kec	7.600.000			7.600.000		22 kec	8.740.000
					Terbayarnya jasa TKSK	4 desa	-			-		4 desa	-
										-			-
TOTAL PAGU I							11.585.579.000		962.150.000	12.547.729.000			13.323.415.850

OPD : DINAS SOSIAL

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
							Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1	1			Belanja Pegawai			3.474.900.000			3.474.900.000			3.474.900.000
1	6	16			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial									
1	6	16	1		Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia									
					Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar		12 Bulan	65.000.000			65.000.000			
1	6	16	5		Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana									
					Pengiriman PMKS		12 Bulan	9.000.000			9.000.000			
					Bantuan Sosial Pengiriman Orang Gila dan Gelandangan		12 Bulan	20.000.000			20.000.000			
					Bantuan Kehabisan Bekal		12 Bulan	40.000.000			40.000.000			
					Pemakaman Penghuni Panti Orang terlantar		12 Bulan	15.000.000			15.000.000			
					Permkanan Bagi panti Asuhan / jompo Terlantar		12 Bulan	280.500.000			280.500.000			
TOTAL PAGU 2								15.489.979.000		962.150.000	16.452.129.000			16.798.315.850

OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 bulan	5.000.000			5.000.000		12 bulan	6.000.000
					Terwujudnya kelancaran surat menyurat								
4	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan air, listrik, dan internet	12 bulan	80.000.000			80.000.000		12 bulan	85.000.000
					Terwujudnya kelancaran pemenuhan kebutuhan air, listrik, telepon, dan internet								
4	1	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kebersihan dan keamanan kantor	12 bulan	7.000.000			7.000.000		12 bulan	8.000.000
					Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	742 bh	15.000.000			15.000.000		742 bh	17.000.000
					Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai								
4	1	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan ATK kantor	12 bulan	28.000.000			28.000.000		12 bulan	30.000.000
					Terwujudnya pemenuhan kebutuhan ATK untuk menunjang program dan kegiatan								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	40.000.000			40.000.000		12 bulan	45.000.000
					Terwujudnya pemenuhan kebutuhan barang cetak dan penggandaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan listrik dan penerangan bangunan kantor	12 bulan	3.000.000			3.000.000		12 bulan	5.000.000
					Terwujudnya pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/ telepon								
4	1	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	0			0		5 unit	100.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	742 bh	4.000.000			4.000.000		742 bh	4.000.000
					Terwujudnya pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya pengadaan bahan logistik kantor	6000 liter	60.000.000			60.000.000		7000 liter	70.000.000
					Terwujudnya pemenuhan kebutuhan logistik kantor								
4	3	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	12 bulan	90.000.000			90.000.000		12 bulan	100.000.000
					Terwujudnya pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu								
2	3	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah	12 bulan	318.000.000			318.000.000		12 bulan	350.000.000
					Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah								

OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	3	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pengadaan tenaga kontrak administrasi perkantoran	12 bulan	125.000.000			125.000.000		12 bulan	130.000.000
					Terwujudnya pemenuhan kebutuhan tenaga kontrak administrasi perkantoran								
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah								
4	1	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor	12 bulan	35.000.000			35.000.000		12 bulan	100.000.000
					Terwujudnya lingkungan gedung kantor yang rapi dan nyaman								
4	1	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas dan operasional	12 bulan	65.000.000			65.000.000		12 bulan	70.000.000
					Tersedianya kendaraan dinas dan operasional yang siap pakai								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	3			Pangan									
2	3	15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	0							
2	3	15	1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Tertanganinya daerah rawan pangan	5 Kelompok	60.000.000			60.000.000		5 Kelompok	70.000.000
					Terwujudnya penanganan daerah rawan pangan								
2	3	15	3	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Dokumen PPH	1 Dokumen	28.000.000			28.000.000		92	50.000.000
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								
2	3	15	9	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Jumlah KRPL	5 klp	70.000.000			70.000.000		5 klp	80.000.000
					Meningkatnya pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari								
2	3	15	11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Data dan informasi harga, akses, dan pasokan pangan	4 kali	60.000.000			60.000.000		4 kali	125.000.000
					Terwujudnya data dan informasi harga, akses, dan pasokan pangan								
2	3	15	12	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Pelatihan dan apresiasi pengolahan hasil pertanian	3 klp	50.000.000			50.000.000		3 klp	70.000.000
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								
2	3	15	13	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah penumbuhan LPMD	5 klp	250.000.000			250.000.000		5 klp	425.000.000
					Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa								
2	3	15	14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah replikasi Desa Mandiri Pangan	4desa	150.000.000			150.000.000		2 desa	200.000.000
					Meningkatnya pengembangan Desa Mandiri Pangan								
2	3	15	18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah pembangunan gudang lumbung pangan masyarakat	1 Paket	400.000.000			400.000.000		1 Paket	600.000.000
						2 unit						2 unit	0
				Pengembangan Lumbung Pangan Desa		1 RMU						1 RMU	0
				Pengembangan model distribusi pangan yang efisien		1 paket						1 paket	0

OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemantauan dan analisis harga pangan pokok		(pertanian)						(pertanian)	0
				Pemantauan dan analisis harga pangan pokok		4 kali						4 kali	0
					Terwujudnya gudang lumbung cadangan pangan masyarakat								
2	3	15	19	Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	Terlaksananya penyusunan dokumen kajian distribusi pangan yang efisien	1 paket	70.000.000			70.000.000		1 paket	100.000.000
					Terwujudnya dokumen kajian distribusi pangan yang efisien								
2	3	15	22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Pemantauan dan pengawasan keamanan pangan	5 Pelaku Usaha	75.000.000			75.000.000		5 Pelaku Usaha	100.000.000
					Terwujudnya laporan/rekomendasi hasil pemantauan dan pengawasan keamanan pangan								
2	3	15	38	Penyelenggaraan Lomba / Pameran Ketahanan Pangan	Jumlah keikutsertaan lomba cipta menu dan pameran ketahanan pangan	6 Kali	170.000.000			170.000.000		6 Kali	200.000.000
					Terwujudnya lomba dan pameran ketahanan pangan	3 Pelaku Usaha							
						2 Pelaku Usaha							
						5 Pelaku Usaha							
					Terwujudnya lomba dan pameran ketahanan pangan								
2	3	15	39	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah rakor Dewan Ketahanan pangan	1 Tahun	80.000.000			80.000.000		1 Tahun	100.000.000
					Meningkatnya koordinasi Dewan Ketahanan Pangan								
TOTAL PAGU I							2.338.000.000	0	0	2.338.000.000	0		3.240.000.000
5	1	1		Belanja Pegawai			2.796.404.000			2.796.404.000			2.796.404.000
2	3	15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)								
2	3	15	9	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Jumlah KRPL	5 klp	150.000.000			150.000.000			
						di DPA 1 th							
2	3	15	13	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah penumbuhan LPMD	5 klp	200.000.000			200.000.000			
						di DPA 1 th							
2	3	15	14	Pengem bangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah replikasi Desa Mandiri Pangan	4desa	50.000.000			50.000.000			
						di DPA 1 th							
TOTAL PAGU 2							5.534.404.000			5.534.404.000			6.036.404.000

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib pelayanan Dasar									
1	4			Perumahan dan kawasan pemukiman									
1	4	20		Program pengelolaan areal pemakaman									
1	4	20	6	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Terwujudnya sarpras pemakaman	1 paket	150.000.000			150.000.000		1 paket	200.000.000
4				Urusan Fungsi Penunjang						-			
4	1			Administrasi Pemerintahan						-			
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						-			
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya benda-benda pos dan jasa keuangan	12 bulan	8.500.000			8.500.000		12 bulan	10.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan benda pos dan kelengkapan surat menyurat								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa langganan kebutuhan telepon , air , listrik dan internet	12 bulan	540.000.000			540.000.000		12 bulan	600.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan Komunikasi								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kerja	12 bulan	22.100.000			22.100.000		12 bulan	27.500.000
					Terpenuhinya Peralatan Kerja layak pakai.								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	96.000.000			96.000.000		12 bulan	110.000.000
					Terpenuhinya alat tulis kantor								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	93.500.000			93.500.000		12 bulan	110.000.000
					Mendukung terpenuhinya pelayanan administrasi kantor								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpenuhinya kebutuhan alat listrik/elektronik	12 bulan	13.000.000			13.000.000		12 bulan	25.000.000
					Mendukung terpenuhinya persediaan komponen instalasi listrik dan komunikasi								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	30 unit	350.000.000			350.000.000		30 unit	400.000.000
					Mengdukung kelancaran administrasi perkantoran								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	24.000.000			24.000.000		12 bulan	30.000.000
					Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai.								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianyabahan bacaan bagi karyawan/karyawati	1460 bh	7.300.000			7.300.000		1460 bh	12.000.000
					Bertambahnya pengetahuan dan wawasan karyawan/karyawati								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya kebutuhan logistik kantor	12 bulan	870.000.000			870.000.000		12 bulan	900.000.000
					Mendukung kelancaran pelayanan kegiatan kantor								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya mobilitas rapat	12 bulan	125.000.000			125.000.000		12 bulan	190.000.000
					Mendukung kelancaran kegiatan perkantoran								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelancaran mobilitas kegiatan perkantoran	12 bulan	670.000.000			670.000.000		12 bulan	830.000.000
					Mendukung kelancaran kegiatan operasional perkantoran								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor	12 bulan	4.000.000.000			4.000.000.000		12 bulan	4.646.876.000
					Lingkungan kantor yang bersih dan aman serta lancar operasional kegiatan perkantoran					-			
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						-			
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung/kantor	12 bulan	195.000.000			195.000.000		12 bulan	200.000.000
					Lingkungan kerja yang nyaman								
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas operasional	12 bulan	665.000.000			665.000.000		12 bulan	700.000.000
					Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas operasional.					-			

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar						-			
2	5			Lingkungan Hidup						-			
2	5	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan wilayah yang melakukan pengelolaan sampah mandiri di lingkungan perkotaan/Persentasi Pengurangan persampahan/Persentasi Pengangkutan Sampah/Persentasi Pengelolaan TPA	2 desa/3%/12,96%/0%				-			
2	5	15	2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Bertambahnya prasarana dan sarana di TPA	1 paket	2.000.000.000			2.000.000.000		1 paket	2.250.000.000
					Terkelolanya sampah di lingkungan Kabupaten Booyolali								
2	5	15	4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terpeliharanya kondisi sarana dan prasarana persampahan	1 paket	5.800.000.000			5.800.000.000		1 paket	4.500.000.000
					Terwujudnya kondisi sarana dan prasarana persampahan								
2	5	15	5	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Bertambahnya tehnologi pengolahan sampah (Mesin pemecah sampah, komposter, TPSP 3R	1 paket	400.000.000			400.000.000		1 paket	500.000.000
					Tersedianya mesin pencacah sampah, Komposter, bangunan TPS 3R dan alat pengangkut sampah								
2	5	15	10	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan sampah berbasis 3R	1 kegiatan	56.000.000			56.000.000		1 kegiatan	85.000.000
					Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah berbasis 3 R								
2	5	15	11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terwujudnya pengelolaan sampah sarana pendukungnya	2 paket	1.250.000.000		670.000.000	1.920.000.000		2 paket	2.700.000.000
				- Bantuan sarana prasarana dan pelatihan pengolahan limbah ((Musrenbang Kecamatan) - TANJUNG, SENDANGREJO, KALANGAN, SANGGE, JATEN, BLUMBANG, BADE, KLEGO, GONDANGLEGI, KARANGGATAK, BANYUURIP, SUMBERAGUNG, KARANGMOJO,)									
					Tersedianya sarana pengelolaan sampah beserta pendukungnya					-			
2	5	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki rekomendasi UKL/UPL, kelayakan Amdal , dan atau izin lingkungan/Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ditindak lanjuti	40 pelaku usaha/100%				-			
2	5	16	1	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi Program Adipura	3 kec	80.000.000			80.000.000		3 kec	300.000.000
					Persamaan persepsi dalam pelaksanaan program Adipura								
2	5	16	3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan limbah	1 paket	125.000.000			125.000.000		1 paket	425.000.000
					Terkelolanya limbah B3 dari kegiatan UMKM								
					terwujutnya kepatuhan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan								
2	5	16	4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Teridentifikasi dan tertanganinya kasus kasus lingkungan	15 kasus	20.500.000			20.500.000		15 kasus	25.000.000
					Terlaksananya pengawasan penataan lingkungan hidup kepada pelaku usaha								
					terwujutnya kepatuhan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3								
2	5	16	6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Terkelolanya limbah B3 dari usaha dan/kegiatan	50 usaha/ keg	25.000.000			25.000.000		50 usaha/ keg	420.000.000
					Terkelolanya limbah B3 dari rumah tangga								
2	5	16	7	Pengkajian dampak lingkungan	Tersedianya data/ dokumen lingkungan hidup	3 dokumen	200.000.000			200.000.000		3 dokumen	285.000.000
					Tersedianya data/dokumen lingkungan hidup								
2	5	16	13	Koordinasi penyusunan AMDAL	terbinanya pelaku/pemrakarsa kegiatan dalam penyusunan dokumen lingkungsn	50 pelaku usaha	50.200.000			50.200.000		50 pelaku usaha	65.000.000

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Pelaku Usaha lebih peduli terhadap lingkungan								
2	5	16	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Terwujudnya sekolah peduli lingkungan	10 sekolah	132.750.000			132.750.000		10 sekolah	130.000.000
					Merubah Perilaku warga masyarakat dan sekolah menjadi lebih peduli terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan					-			
2	5	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan cadangan air tanah	1.540 unit				-			
2	5	17	4	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Bertambahnya sarana kelengkapan Kebun Raya	1 paket	92.000.000			92.000.000		1 paket	100.000.000
					Kelancaran transportasi Kebun Raya								
2	5	17	5	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Tersusunnya buku report Inventarisasi Emisi GRK	5 eksemplar	55.000.000			55.000.000		5 eksemplar	60.000.000
2	5	17	7	Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber Sumber Air	Bertambahnya sumur resapan	20 unit	195.000.000			195.000.000		20 unit	200.000.000
					Bertambahnya sarana dan prasarana guna pengawetan sumberdaya air.								
2	5	17	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Bertambahnya lubang resapan biopori	2 paket	150.000.000			150.000.000		2 paket	150.000.000
										-			
2	5	19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Data SDA dan LH	1 paket				-			
2	5	19	2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedianya dokumen/ data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan	3 dokumen	250.000.000			250.000.000		3 dokumen	305.000.000
					Tersedianya data lingkungan hidup					-			
2	5	20		Program peningkatan pengendalian polusi	hasil perhitungan beban pencemaran yang meliputi parameter BOD, COD, TSS air sungai dan waduk/hasil uji kualitas udara ambien (SO2, CO, NO2, TSP)	6 BOD mg/L 100%/ug/Nm3 (100%) SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230				-			
2	5	20	2	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Diketahuinya kualitas udara	18 sampel	57.150.000			57.150.000		18 sampel	65.000.000
					Diketahuinya wilayah yang potensi terjadinya pencemaran udara								
2	5	20	3	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Diketahuinya kualitas air	34 sampel	335.150.000			335.150.000		34 sampel	350.000.000
					Diketahuinya daerah yang potensi terjadinya pencemaran air								
					Tersedianya kebutuhan laboratorium lingkungan								
2	5	20	4	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Bertambahnya IPAL biogas Biogas ternak 25 unit, Biogas Tahun 5 unit).	30 unit	900.000.000			900.000.000		30 unit	1.100.000.000
					Berkurangnya ketergantungan terhadap BBM)								
					Terkelolanya limbah cair dari usaha ternak sapi dan tahu								
2	5	20	5	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan sesuai dokumen yang dimiliki	60 pelaku usaha	1.000.000			1.000.000		60 pelaku usaha	2.000.000
					Usaha dan atau kegiatan yang ramah lingkungan					-			

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	5	24		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan/% ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	1.437.322 m2/3,21%				-			
2	5	24	5	Penataan RTH	Terwujudnya penataan lingkungan / taman	10 paket	14.345.000.000			14.345.000.000		10 paket	15.000.000.000
2	5	24	6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	1 paket	3.000.000.000			3.000.000.000		1 paket	3.265.000.000
					Lingkungan Ruang Terbuka Hijau perkotaan menjadi lebih rapi dan rapi								
2	5	24	7	Pengembangan taman rekreasi	Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung Kebun Raya (lanjutan)	10 paket	8.000.000.000			8.000.000.000		10 paket	8.500.000.000
					Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung Kebun Raya lanjutan								
2	5	24	11	Koordinasi Pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau	Terlaksananya pembinaan kampung iklim	6 kampung iklim	110.000.000			110.000.000		6 kampung iklim	120.000.000
					Terwujudnya pembinaan kampung iklim								
				TOTAL PAGU 1			45.459.150.000	-	670.000.000	46.129.150.000	-	-	49.893.376.000
5	1	1		Belanja Pegawai			9.194.056.000			9.194.056.000			9.194.056.000
				TOTAL PAGU 2			54.653.206.000		670.000.000	55.323.206.000			59.087.432.000

OPD : DISDUKCAPIL

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Jasa surat Menyurat								
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat	12 bulan	5.000.000			5.000.000		12 bulan	10.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	170.000.000			170.000.000		12 bulan	240.000.000
					Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik								
4	1	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor	12 bulan	20.000.000			20.000.000		12 bulan	30.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor								
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	5.000.000			5.000.000		12 bulan	20.000.000
					Terpeliharanya kebersihan kantor								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya peralatan kerja	12 bulan	120.000.000			120.000.000		12 bulan	125.000.000
					Tersedianya peralatan siap pakai								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	24.000.000			24.000.000		12 bulan	30.000.000
					Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	80.000.000			80.000.000		12 bulan	100.000.000
					Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12 bulan	60.000.000			60.000.000		12 bulan	10.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor							15 set	130.000.000
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Ketersediaan Kebutuhan rumah tangga	1 tahun	5.000.000			5.000.000		1 tahun	5.000.000
					Terwujudnya kebutuhan rumah tangga								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	5.940 liter	59.400.000			59.400.000		5.940 liter	80.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor								
2	6	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	12 bulan	80.000.000			80.000.000		12 bulan	110.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya biaya koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah	12 bulan	200.000.000			200.000.000		12 bulan	300.000.000
					Terpenuhinya biaya koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah								
2	6	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Ketersediaan gaji PTT dan tenaga kontrak	12 bulan	177.000.000			177.000.000		12 bulan	195.000.000
					Terpenuhinya gaji PTT dan tenaga kontrak								
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
4	1	2		Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya aula dan tempat parkir karyawan	1 kegiatan	500.000.000			500.000.000			
					terwujudnya aula yang nyaman dan tempat parkir yang aman								
4	1	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Ketersediaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	25.000.000			25.000.000		1 paket	30.000.000
					Terpenuhinya perlengkapan kantor								
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung/ kantor Dispendukcapil	12 bulan	150.000.000			150.000.000		12 bulan	200.000.000
					Terpeliharanya gedung/ kantor Dispendukcapil								
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	75.000.000			75.000.000		12 bulan	100.000.000
					Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar									
2	6			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									

OPD : DISDUKCAPIL

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	6	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan kartu keluarga/Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk/cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran penduduk usia 0-18th/Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran dari jumlah penduduk/Cakupan penerbitan kutipan akte kematian /Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	100%/100%/95%/85%/10%/100%							
2	6	15	1	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	kelancaran operasional SIAK di Kabupaten Boyolali	12 bulan	500.000.000			500.000.000		12 bulan	650.000.000
					kelancaran operasional SIAK di Kabupaten Boyolali								
2	6	15	5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	terlaksananya koordinasi dengan petugas register	12 bulan	318.780.000			318.780.000		12 bulan	325.000.000
					terlaksananya koordinasi dengan petugas register								
2	6	15	7	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Penerbitan dokumen kependudukan	95.000 dokumen	210.000.000			210.000.000		95.000 dokumen	251.000.000
					Penerbitan dokumen kependudukan								
2	6	15	8	Pengembangan data base kependudukan	Pemutakhiran data kependudukan	12 bulan	242.000.000			242.000.000		12 bulan	260.000.000
					Pemutakhiran data kependudukan								
				Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	pengadaan seragam karyawan/karyawati							350 meter	75.000.000
					terwujudnya seragam karyawan/karyawati							100 orang	35.000.000
2	6	15	11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Terlaksananya sosialisasi adminduk di Kabupaten Boyolali	12 bulan			267.000.000	267.000.000	DAK Non Fisik	12 bulan	267.000.000
					Terlaksananya sosialisasi adminduk di Kabupaten Boyolali								
2	6	15	14	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	jumlah penerbitan akte pencatatan sipil	25,000 dokumen	200.000.000			200.000.000		25,000 dokumen	289.000.000
					jumlah penerbitan akte pencatatan sipil								
2	6	15	18	Penerbitan Dokumen kependudukan dan identitas resmi anak	jumlah dokumen kependudukan dan kia	145,000 dokumen			2.775.658.000	2.775.658.000	DAK Non Fisik	145,000 dokumen	2.771.239.000
					jumlah dokumen kependudukan dan kia								
2	6	15	19	Pelayanan Dokumen Kependudukan	jumlah pemohon dokumen kependudukan	120,000 dokumen			99.096.000	99.096.000	DAK Non Fisik	120,000 dokumen	100.000.000
					jumlah pemohon dokumen kependudukan								
2	6	15	20	Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan administrasi kependudukan Masyarakat	terpenuhinya biaya rakornas,bintek dan konsultasi	12 bulan			255.570.000	255.570.000	DAK Non Fisik	12 bulan	255.570.000
					terpenuhinya biaya rakornas,bintek dan konsultasi								
2	6	15	21	Pengelolaan Sistem Informasi administrasi kependudukan (SIAK) Masyarakat	terlaksananya kerjasama pemanfaatan data kependudukan berbasis nik	304 kegiatan			26.485.000	26.485.000	DAK Non Fisik	304 kegiatan	30.000.000
					terlaksananya kerjasama pemanfaatan data kependudukan berbasis nik								
TOTAL PAGU 1							3.226.180.000	-	3.423.809.000	6.649.989.000			7.023.809.000
5	1	1		Belanja Pegawai			6.428.919.000			6.428.919.000			6.428.919.000
TOTAL PAGU 2							9.655.099.000		3.423.809.000	13.078.908.000			13.452.728.000

OPD : DISPERMASDES

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Fungsi Layanan Operasional Perangkat daerah	12 Bulan	2.813.702.000			2.813.702.000		12 Bulan	2.879.800.000
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3.680.000			3.680.000		12 Bulan	4.000.000
					Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Jasa Telepon, Air, Internet dan Listrik	12 Bulan	127.600.000			127.600.000		12 Bulan	130.000.000
					Terpenuhinya Jasa Telepon, Air, Internet dan Listrik								
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	68.400.000			68.400.000		12 Bulan	75.000.000
					Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa pemeliharaan peralatan kerja	12 Bulan	36.750.000			36.750.000		12 Bulan	45.000.000
					Terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan kerja								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	97.000.000			97.000.000		12 Bulan	97.000.000
					Terpenuhinya alat tulis kantor								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	120.838.000			120.838.000		12 Bulan	125.000.000
					Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terlaksananya belanja alat-alat listrik	12 Bulan	8.794.000			8.794.000		12 Bulan	10.000.000
					Terpenuhinya alat-alat listrik								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor	2 Paket	110.000.000			110.000.000		2 Unit	40.000.000
					Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	12 Bulan	15.000.000			15.000.000		12 Bulan	20.000.000
					Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	730 Buah	5.640.000			5.640.000		730 Buah	7.000.000
					Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya pengadaan bahan logistik kantor	18.645 Liter	150.000.000			150.000.000		18.000 Liter	150.000.000
					Tercukupinya bahan logistik kantor								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makan minum kantor	12 Bulan	360.000.000			360.000.000		12 Bulan	360.000.000
					Tercukupinya kebutuhan makan minum kantor								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas	12 Bulan	750.000.000			750.000.000		12 Bulan	780.000.000
					Terpenuhinya akomodasi rapat-rapat koordinasi / perjalanan dinas								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	960.000.000			960.000.000		12 Bulan	1.036.800.000
					Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran								
										0			
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Fungsi Layanan Operasional Perangkat daerah	1 Paket	125.000.000			125.000.000		1 Paket	150.000.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya penataan lingkungan kantor	2 Kegiatan	125.000.000			125.000.000		2 Kegiatan	200.000.000
					Terpenuhinya Penataan Lingkungan Kantor								
4	1	2	19	Penataan Lingkungan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Kegiatan	0			0		1 Kegiatan	150.000.000
					Terpeliharanya bangunan gedung kantor								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar									
2	7			Pemberdayaan Masyarakat Desa									

OPD : DISPERMASDES

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	Jumlah TTG/Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	6 inovasi	207.000.000			207.000.000			240.000.000
2	7	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	261 Desa / Kelurahan	72.000.000			72.000.000		261 Desa / Kelurahan	80.000.000
					Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Partisipasi Pembangunan	267 Desa / Kelurahan						267 Desa / Kelurahan	
						1 kegiatan						1 kegiatan	
						2 Kegiatan						2 kegiatan	
2	7	15	2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Lembaga Pemberdayaan dan Desa	377 Orang	80.000.000			80.000.000		377 Orang	90.000.000
					Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Lembaga Pemberdayaan								
2	7	15	3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Terlaksananya Lomba Rekayasa Tehnologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten	6 Inovasi	55.000.000			55.000.000		6 Inovasi	70.000.000
					Temuan/inovasi baru dalam bidang Tehnologi Tepat Guna								
02	07	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan	Pengurus PKK Desa/Kelurahan kemampuannya meningkat.	47 Desa / Kelurahan	98.000.000			98.000.000		55 Desa / Kelurahan	200.000.000
2	7	19	3	Fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas PKK kabupaten/ desa/ kelurahan	Terlaksananya kegiatan PKK	55 Desa / Kelurahan	98.000.000			98.000.000		55 Desa / Kelurahan	200.000.000
					Terlaksana 10 program pokok PKK								
02	07	20		Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	261 Desa / Kelurahan	260.000.000			260.000.000		261 Desa / Kelurahan	385.000.000
2	7	20	1	Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa	-	0			0		5 Jabatan	30.000.000
					Terisnya jabatan kepala desa								
2	7	20	2	Pengisian Perangkat Desa	Terisnya jabatan kepala desa	30 Jabatan	40.000.000			40.000.000		30 Jabatan	40.000.000
					Terisnya jabatan perangkat Desa								
2	7	20	3	Pembekalan Aparat Pemerintah Desa	Terselenggaranya Pembekalan Aparat Pemerintah Desa	100 Orang	10.000.000			10.000.000		100 Orang	40.000.000
					Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat pemerintah desa								
2	7	20	4	Pendataan / Validasi Tanah Kas Desa	Terlaksananya Pendataan/Validasi Tanah Kas Desa	50 desa	70.000.000			70.000.000		50 desa	82.000.000
2	7	20	6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Terselesaikannya Pendataa / Validasi Tanah Kas Desa yang baik sesuai ketentuan yang berlaku	261 Desa / Kelurahan	60.000.000			60.000.000		261 Desa / Kelurahan	63.000.000
					Terlaksananya kegiatan bantuan khusus keuangan desa	50 Desa						50 Desa	
					Termonitoringnya kegiatan bantuan keuangan khusus desa	261 Desa / Kelurahan						261 Desa / Kelurahan	
2	7	20	7	Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	Terlaksananya administrasi desa yang baik sesuai ketentuan yang berlaku	19 Desa / Kelurahan	30.000.000			30.000.000		19 Desa / Kelurahan	30.000.000
					Terselesaikannya administrasi desa yang baik sesuai ketentuan yang berlaku								
2	7	20	8	Penyusunan bahan kebijakan pemerintah desa	Terlaksananya Penyusunan NA/Ranperda dan Ranperbup	8 Dokumen	50.000.000			50.000.000		8 Dokumen	100.000.000
					Terselesaikannya penyusunan Naskah Akademik Pembahasan Ranperda dan Ranperbup								
02	07	16		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	80 orang							
2	7	16	7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		80 Orang	0			0		80 Orang	
							0			0			
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan									

OPD : DISPERMASDES

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	6	7	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD		12 dokumen	0			0		12 dokumen	0

OPD : DISPERMASDES

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	3	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah									
4	3	21	16	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD		3 dokumen	0			0		3 dokumen	0
TOTAL PAGU 1							3.503.702.000			3.503.702.000			3.954.800.000
5	1	1		Belanja Pegawai			5.509.355.000			5.509.355.000			5.509.355.000
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	Jumlah TTG/Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat								
2	7	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan								
					Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Partisipasi Pembangunan								
5	1	5	3	Bantuan Modal Usaha Pemberdayaan masyarakat			250.000.000			250.000.000			
5	1	5	3	Bantuan Modal Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (22 Kecamatan)			220.000.000			220.000.000			
TOTAL PAGU 2							9.483.057.000		-	9.483.057.000			9.464.155.000

OPD : DP2KBP3A

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
												11
2	2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2	2			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2	2	14		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan								
2	2	14	1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan Terbina	20 Organisasi Wanita	4.000.000			4.000.000		100.000.000
					Indikator Outcome							
2	2	14	3	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	jumlah kelompok uppk dan pos daya aktif	21 Kecamatan	2.500.000	-	-	2.500.000	Target capaian Program seharusnya 22 Kecamatan	21 Kecamatan
					meningkatkan pendapatan keluarga							
2	2	14	4	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	terselenggaranya penyuluhan bagi ibu rumah tangga	21 Kecamatan	1.000.000	-	-	1.000.000	Target capaian Program seharusnya 22 Kecamatan	21 Kecamatan
					perekonomian keluarga menjadi lebih baik							
2	2	15		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan (2)								
2	2	15	3	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Pemahaman Kesenjangan Gender, Perempuan dan Anak	1 Kegiatan	4.500.000	-	-	4.500.000	0 1 Kegiatan	25.000.000
					Pemahaman tentang kesetaraan Gender, Perempuan dan Anak							
2	2	16		Program Penguatan Kelembagaan								
2	2	16	2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Berkembangnya fungsi P2TP2A di Kab.Boyolali	20 Orang	18.500.000	-	-	18.500.000	0 20 Orang	50.000.000
					Terfasilitasnya korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak							
2	2	16	5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah desa layak anak	31 Desa	15.000.000			15.000.000		300.000.000
					meningkatkan jumlah desa layak anak							
2	2	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								
2	2	17	2	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Telaksananya pelatihan bagi pelatih pendamping KDRT	50 org	2.200.000	-	-	2.200.000	0 50 org	20.000.000
					Keterampilan bagi pelatih pendamping kasus KDRT							
2	2	17	8	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Terlaksananya upaya peningkatan kemampuan tenaga pendamping korban kekerasan	21Kecamatan	3.000.000	-	-	3.000.000	Target capaian Program seharusnya 22 Kecamatan	40.000.000
					Peningkatan Tenaga Pendamping							
2	8			Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana								
2	8	15		Program Keluarga Berencana	Meningkatnya Pelayanan KB./Pelayanan KB (Peran PPKBD)	80%/100%						
2	8	15	1	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Terlaksananya pelayanan KB		133.400.000			133.400.000		
					Peserta KB terlayani							
2	8	15	2	Pelayanan KIE	Terlaksananya KIE Program KB-KS Melalui Mupen	21 Kecamatan	-	-	3.276.750.000	3.276.750.000	Target capaian Program seharusnya 22 Kecamatan	3.262.250.000
					Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program KB-KS							

OPD : DP2KBP3A

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
												11
2	8	15	3	Peningkatan Perlindungan Hak reproduksi	Pemberian bantuan kepada akseptor kegagalan/komplikasi	100 Prosentase	5.000.000	-	-	5.000.000	0	100 Prosentase
					Terayominya akseptor kegagalan/komplikasi							25.000.000
2	8	15	5	Pembinaan Keluarga Berencana	Tersediannya belanja sarana dan prasarana penyuluh KB	21 Kecamatan	-	-	1.974.788.000	1.974.788.000	Target capaian Program seharusnya 22 Kecamatan	21 Kecamatan
					Tercukupinya biaya sarana dan prasarana penyuluh KB							1.974.788.000
2	8	15	6	Pengadaan sarana mobilitas KB keliling	Balai penyuluh KB dan Smartphone	100 Prosentase	-	-	1.498.000.000	1.498.000.000	0	100 Prosentase
					Tercukupinya sarana prasarana KB							1.660.000.000
2	8	16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Jumlah Kelompok KRR Yang Aktif	100%						
2	8	16	1	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)	Sosialisasi KRR bagi remaja	2 kegiatan	42.200.000	-	-	42.200.000	0	2 Kegiatan
					Meningkatnya pengetahuan remaja tentang KRR							45.000.000
2	8	17		Program pelayanan kontrasepsi	Capaian Peserta KB MKJP.	100%						
2	8	17	2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlayannya Akseptor KB	100 Prosentase	33.750.000	-	-	33.750.000	0	100 Prosentase
					Meningkatnya peserta KB di daerah Galcitas							65.000.000
2	8	18		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB./Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Program KB.	3 dokumen/1 kegiatan						
2	8	18	2	Operasional kelompok masyarakat peduli KB	Terlaksananya KIE KB oleh PPKBD	21 Kecamatan	112.800.000	-	-	112.800.000	Target capaian Program seharusnya 22 Kecamatan	21 Kecamatan
					Target pencapaian peserta KB							150.000.000
2	8	20		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Berkembangnya Kelompok PIK Remaja.	20 kelompok						
2	8	20	2	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Terlaksananya fasilitas forum KRR	21 Kecamatan	2.400.000	-	-	2.400.000	Target capaian Program seharusnya 22 Kecamatan	21 Kecamatan
					Jumlah PIK KRR aktif							20.000.000
2	8	21		Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Cakupan Pemahaman Perempuan dan Remaja tentang Narkoba dan HIV/AIDS.	100%						
2	8	21	2	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS	Terlaksananya Penyuluhan HIV/AIDS	500 orang	9.250.000	-	-	9.250.000	0	500 orang
					Meningkatkannya pengetahuan remaja/masyarakat tentang HIV/AIDS							30.000.000
2	8	22		Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak								
2	8	22	1	Pengumpulan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	50 orang	1.000.000	-	-	1.000.000	0	50 orang
					Kader melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak kepada masyarakat							15.000.000
2	8	23		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Meningkatnya Kualitas Tribina.	21%						
2	8	23	1	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan	Pendampingan Kelompok Bina Keluarga Terlatih	38 orang	-	-	538.520.000	538.520.000	0	38 orang
					Meningkatnya kemampuan tenaga pendamping Bina Keluarga							538.520.000

OPD : DP2KBP3A

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
												11
2	8	25		Peningkatan Informasi Kependudukan dan KB	Terpenuhinya Dokumen rumusan kebijakan kependudukan/Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah/Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kependudukan dan KB/Meningkatnya Pemahaman terhadap Informasi Kependudukan dan KB	2 dokumen/2 kegiatan/5 dokumen/1 kegiatan						
2	8	25	3	Analisa data pengendalian penduduk	Tersusunnya dokumen analisa data pengendalian penduduk	1 dokumen	8.750.000	-	-	8.750.000	0	1 dokumen
					Tersedianya analisa dokumen analisa data pengendalian penduduk di Kab.Bojolali							
2	8	26	4	Fasilitasi kualisi Penduduk Pembangunan serta Fapsedu	Fasilitas koalisi kependudukan serta Fapsedu	2 Kegiatan	4.000.000	-	-	4.000.000	0	2 Kegiatan
					Meningkatnya peran Toma,Toga dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk							
2	8	27	5	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Terlaksananya pengelolaan data dan laporan program KB/KS	5 dokumen	59.640.000	-	-	59.640.000		5 dokumen
					Tersajinya Data hasil pendataan							
4	1			Urusan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan								
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat dinas yang dikirim	12 bulan	7.425.000	-	-	7.425.000	0	12 bulan
					Terkirimnya surat - surat dinas							
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	60.400.000	-	-	60.400.000	0	12 bulan
					terpenuhinya kegiatan perkantoran							
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Tebayarnya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	12 bulan	15.300.000	-	-	15.300.000	0	12 bulan
					Tercukupinnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional							
4	1	1	8	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Bahan pembersih dan alat kebersihan	12 bulan	4.000.000	-	-	4.000.000	0	12 bulan
					Tercukupinnya kebersihan kantor							
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	12.000.000	-	-	12.000.000	0	12 bulan
					Tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja							
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan	12 bulan	23.660.000	-	-	23.660.000	0	12 bulan
					Tercukupinya alat tulis kantor							
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	97.370.000	-	-	97.370.000	0	12 bulan
					Cetak dan penggandaan untuk keperluan dinas							
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik / telepon sesuai kebutuhan	12 bulan	4.000.000	-	-	4.000.000	0	12 bulan
					Komponen instalasi kebutuhan listrik/telepon tercukupi							
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya kebutuhan alat rumah tangga	12 bulan	3.000.000	-	-	3.000.000	0	12 bulan
					Alat rumah tangga untuk kebutuhan rapat dll							
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Bahan bacaan	768 buah	1.400.000	-	-	1.400.000	0	12 bulan
					Tersediannya bahan bacaan							
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Belanja BBM dan Gas dll	9.000 liter	76.500.000	-	-	76.500.000	0	9.000 liter
					Tercukupinya belanja BBM dan Gas							
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan/minuman harian,rapat dan tamu.	12 bulan	173.326.000	-	-	173.326.000	0	12 bulan
					Tercukupinya kebutuhan makanan minuman harian , rapat tamu dll							

OPD : DP2KBP3A

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
												11
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersediannya sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	177.000.000	-	-	177.000.000	0	12 bulan
					Lancarnya rapat koordinasi konsultasi dalam dan luar daerah							300.000.000
4	1	1	19	Penyediaan jasa Administrasi perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 bulan	114.960.000	-	-	114.960.000	0	12 bulan
					Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran							260.000.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
4	1	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tercukupinya peralatan gedung kantor	5 unit	129.599.000	-	-	129.599.000	0	5 unit
					Sarana peralatan kantor yang memadai untuk mendukung kinerja							130.000.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	12.000.000	-	-	12.000.000	0	12 bulan
					Gedung kantor dalam keadaan terpelihara							15.000.000
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12 bulan	54.000.000	-	-	54.000.000	0	12 bulan
					Kendaraan dinas operasional siap pakai							75.000.000
4	1	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	4.000.000	-	-	4.000.000	0	12 bulan
					Peralatan gedung kantor siap pakai							30.000.000
TOTAL PAGU 1							1.432.830.000	-	7.288.058.000	8.720.888.000	-	-
5	1	1		Belanja Pegawai			3.670.086.000			3.670.086.000		
TOTAL PAGU 2							5.102.916.000		7.288.058.000	12.390.974.000		13.358.144.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	3			Pekerjaan umum dan penataan ruang									
1	3	34		Program pengembangan pengelolaan penerangan jalan umum	Penambahan titik lampu							400 Titik Lampu	
1	3	34	1	Pembangunan penerangan jalan umum	Terlaksananya pembangunan lampu PJU	400 Titik Lampu	8.050.000.000			8.050.000.000		400 Titik Lampu	10.000.000.000
					Tersedianya lampu PJU								
1	3	34	2	Pemeliharaan/rehabilitasi penerangan jalan umum	Terpeliharanya lampu PJU	12 bulan	3.000.000.000			3.000.000.000		12 bulan	5.000.000.000
					Tersedianya pemeliharaan lampu PJU								
4				Urusan Urusan Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan administrasi perkantoran								
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan perangko, meterai dan paket pengiriman	12 Bulan	1.800.000			1.800.000		12 Bulan	2.000.000
					Tersedianya meterai dan paket pengiriman surat								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	21.500.000.000			21.500.000.000		12 Bulan	22.000.000.000
					Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik								
4	1	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	75.000.000			75.000.000		12 Bulan	100.000.000
					Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor								
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	175.000.000			175.000.000		12 Bulan	200.000.000
					Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional								
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya belanja jasa administrasi keuangan	12 Bulan	1.500.000			1.500.000		12 Bulan	2.000.000
					Tersedianya jasa administrasi keuangan								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	28.000.000			28.000.000		12 Bulan	30.000.000
					Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	85.000.000			85.000.000		12 Bulan	90.000.000
					Tersedianya barang cetakan dan penggandaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/telepon	12 Bulan	5.000.000			5.000.000		12 Bulan	5.000.000
					Tersedianya komponen listrik								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor	26 unit	475.000.000			475.000.000		26 unit	500.000.000
					Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	720 buah	3.000.000			3.000.000		720 buah	4.000.000
					Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan BBM, minyak pelumas	19.870 Liter	275.000.000			275.000.000		19.870 Liter	300.000.000
					Tersedianya kebutuhan logistik kantor								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum harian pegawai dan rapat	12 Bulan	105.000.000			105.000.000		12 Bulan	115.000.000
					Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya pelaksanaan tugas dalam maupun luar daerah	12 Bulan	315.000.000			315.000.000		12 Bulan	320.000.000
					Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran (PTT)	12 Bulan	1.800.000.000			1.800.000.000		12 Bulan	2.000.000.000
					Tersedianya pembayaran honor ttenaga kontrak								

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	9			Pehubungan									
2	9	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersusunnya Dokumen kajian perhubungan	1 Dukumen							
2	9	15	2	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Tersedianya dokumen sebagai pengambil kebijakan di bidang perhubungan	4 Dokumen	200.000.000			200.000.000		5 dokumen	250.000.000
2	9	15	4	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Tersosialisasikannya kebijakan perhubungan terkait perbengkelan dan karoseri serta pengembangan aplikasi SIM Perbengkelan	12 bulan	46.000.000			46.000.000		12 bulan	50.000.000
					Terpenuhinya sosialisasi kebijakan perhubungan terkait perbengkelan dan karoseri serta pengembangan aplikasi SIM Perbengkelan								
2	9	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ	12 buah							
2	9	16	1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terselenggaranya pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor	12 buah	103.000.000			103.000.000		12 buah	110.000.000
					Terpenuhinya pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor								
2	9	16	4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Terpeliharanya terminal angkutan darat di Kabupaten Boyolali	1 paket	100.000.000			100.000.000		1 paket	125.000.000
					Terlaksananya pemeliharaan terminal di Kabupaten Boyolali								
2	9	17		Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya sarpras pelayanan angkutan umum	22 buah							
2	9	17	3	Temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Terpenuhinya kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	50 Orang	15.000.000			15.000.000		50 Orang	20.000.000
					Terlaksananya kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keelamatan penumpang								
2	9	17	5	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Terpenuhinya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap kendaraan wajib uji	12 Bulan	425.000.000			425.000.000		12 Bulan	370.000.000
					Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap laik kendaraan wajib uji								
2	9	17	8	Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Terpenuhinya kegiatan penataan tempat- tempat pemberhentian angkutan umum	8 Buah	100.000.000			100.000.000		8 Buah	100.000.000
					Terselenggaranya penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum								
2	9	17	15	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Terwujudnya pemilihan sopir/juru mudi/awak angkutan umum kendaraan teladan di Kabupaten Boyolali	3 Orang	30.000.000			30.000.000		3 Orang	35.000.000
	9	17	18	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Terpenuhinya sosialisasi dan pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJdi Kabupaten Boyolali	3 Orang	20.000.000			20.000.000		3 Orang	25.000.000
					Terselenggaranya sosialisasi dan pemilihan pelajar pelopor keselamtn LLAJ di Kabupaten Boyolali								
2	9	18		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan									
2	9	18	4	Penataan Lingkungan sarana Perhubungan	Terlaksananya penataan lingkungan sarana perhubungan	1 paket	700.000.000			700.000.000		1 paket	500.000.000
					Terpenuhinya penataan sarana perhubungan yang ada di Kabupaten Boyolali								
2	9	19		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Tersedianya sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan	100%							
2	9	19	1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Terpenuhinya prasarana perhubungan	100%	700.000.000		362.000.000	1.062.000.000		1	3.200.000.000
					Tersedianya dan terpeliharanya prasarana perhubungan	100%	300.000.000			300.000.000			300.000.000
2	9	19	2	Pengadaan marka jalan	Terpenuhinya pengecatan marka jalan	1 paket	600.000.000			600.000.000		1 paket	700.000.000
					Tersedianya marka jalan								
2	9	19	3	Pengadaan pagar pengaman jalan	Terpasangnya pagar pengaman jalan	1 paket	1.000.000.000			1.000.000.000		1 paket	1.000.000.000
					Tersedianya pagar pengaman jalan								
2	9	19	4	Inspeksi Keselamatan Berlalulintas	Terpenuhinya kegiatan inspeksi keselamatan guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan	bulan	15.700.000			15.700.000	Usulan kegiatan baru (tahun 2019 sudah pernah ada)	-	20.000.000

OPD : DISHUB

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	9	19	2	Penyelenggaraan operasi laik jalan	Terciptanya keselamatan, ketertiban dan keteraturan	23 kegiatan	30.000.000			30.000.000	Usulan kegiatan baru	-	45.000.000
2	9	19	5	Operasional pos terpadu	Terselenggaranya pos terpadu	12 bulan	100.000.000			100.000.000	Usulan kegiatan baru	-	24.000.000
2	9	19	13	Penyelenggaraan car free Sunday	Terselenggaranya kegiatan car free Sunday	23 kegiatan	60.000.000			60.000.000	Usulan kegiatan baru	-	30.000.000
2	9	19	15	Pengawasan dan pengendalian perparkiran	Terciptanya ketertiban perparkiran	12 bulan	90.000.000			90.000.000	Usulan kegiatan baru	-	40.000.000
2	9	20		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Tersedianya kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor	100%							
2	9	20	2	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Terpenuhinya alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar	100%	300.000.000			300.000.000		100%	350.000.000
					Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar pelayanan								
	9	20	5	Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Terpenuhinya pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar	12 bulan	1.200.000.000			1.200.000.000		12 bulan	1.200.000.000
2	9	20	6	Penyediaan sistem informasi pelayanan dan data base kendaraan	Terpenuhinya sistem informasi pelayanan database kendaraan	1 paket	40.000.000			40.000.000		1 paket	50.000.000
					Tersedianya sistem informasi pelayanan dan data base kendaraan								
TOTAL PAGU 1								42.069.000.000		362.000.000	42.431.000.000		49.212.000.000
5	1	1		Belanja Pegawai			4.304.185.000			4.304.185.000			4.304.185.000
TOTAL PAGU 2								46.373.185.000		362.000.000	46.735.185.000		53.516.185.000

OPD : DISKOMINFO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah								
4	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan perangkat,materai , dan paket pengiriman surat	12 Bulan	3.000.000			3.000.000		12 Bulan	5.000.000
					Terlaksananya Kebutuhan perangkat,materai, dan paket pengiriman surat								
4	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	306.000.000			306.000.000		12 Bulan	310.000.000
					Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik								
4	1	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	150.000.000			150.000.000		12 Bulan	150.000.000
					Terlaksananya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor								
4	1	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	terpenuhinya jasa jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	12 Bulan	95.000.000			95.000.000		12 Bulan	95.000.000
					terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional								
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terpenuhinya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	500.000			500.000		12 Bulan	500.000
					Terlaksananya jasa administrasi keuangan								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terawatnya peralatan telekomunikasi pendukung kegiatan pemerintah	12 Bulan	11.000.000			11.000.000		12 Bulan	11.000.000
					Terlaksananya perawatan peralatan telekomunikasi pendukung kegiatan pemerintah								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	50.000.000			50.000.000		12 Bulan	80.000.000
					Terlaksananya kebutuhan alat tulis kantor								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	55.000.000			55.000.000		12 Bulan	60.000.000
					Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan								
4	1	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terpenuhinya komponen instalasi listrik/telpon	12 Bulan	12.500.000			12.500.000		12 Bulan	12.500.000
					Terlaksananya komponen instalasi listrik/telpon								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terpenuhinya kebutuhan peraltan dan perlengkapan kantor	55 unit	50.000.000			50.000.000		55 unit	50.000.000
					Terlaksananya kebutuhan peraltan dan perlengkapan kantor								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terpenuhinya buku bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 Bulan	12.000.000			12.000.000		12 Bulan	12.000.000
					Tersedianya buku bacaan dan peraturan perundang - undangan								
4	1	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan bbm	4.000 liter	80.000.000			80.000.000		4.000 liter	90.000.000
					Terlaksananya kebutuhan bbm								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya makan dan minum harian pegawai maupun rapat	12 Bulan	95.000.000			95.000.000		12 Bulan	100.000.000
					Terlaksananya makan dan minum harian pegawai maupun rapat								

OPD : DISKOMINFO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terpenuhinya pelaksanaan tugas dalam maupun luar daerah	12 Bulan	422.000.000			422.000.000		12 Bulan	600.000.000
					Terlaksananya pelaksanaan tugas dalam maupun luar daerah								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	920.000.000			920.000.000		12 Bulan	930.000.000
					Terlaksananya kebutuhan jasa pelayanan administrasi perkantoran								
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
4	1	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	-			-		12 Laporan	-
					Terwujudnya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD								
4	3			Program perencanaan pembangunan daerah	terpenuhinya jumlah dokumen renja dan renstra Perangkat daerah / PD								
4	3	21	16	Penyusunan Renstra dan Renja	terpenuhinya renja dan renstra SKPD	2 Dokumen	-			-		2 Dokumen	-
					Tersusunnya renja dan renstra SKPD								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	10			Komunikasi dan Informatika									
2	10	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	tersedianya sarana telekomunikasi dan informasi yang mendukung pelayanan kepada masyarakat/Cakupan publikasi hasil-hasil pembangunan	77%/100%							
2	10	15	2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terwujudnya jaringan komunikasi daninformasi	100 Prosentase	7.500.000.000			7.500.000.000		100 Prosentase	8.000.000.000
2					Tersedianya jaringan komunikasi daninformasi								
2	10	15	3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	meningkatnya sumber daya bidang komunikasi dan informasi	80 Prosentase	600.000.000			600.000.000		80 Prosentase	600.000.000
2					Terlaksananya sumber daya bidang komunikasi dan informasi								
2	10	15	7	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	terpenuhinya pelayanan masyarakat berbasis sistem informasi	80 Prosentase	1.600.000.000			1.600.000.000		80 Prosentase	1.600.000.000
					Terlaksananya pelayanan masyarakat berbasis sistem informasi								
2	10	15	13	Intensifikasi Retribusi Menara Telekomunikasi	terpenuhinya pelaksanaan movev dan pengendalian menara	19 Kecamatan	50.000.000			50.000.000		19 Kecamatan	50.000.000
					Terlaksananya pelaksanaan movev dan pengendalian menara								
2	10	15	14	Penyebarluasan publikasi hasil-hasil pembangunan	Penyebarluasan hasil-hasil pembangunan	12 Bulan	100.000.000			100.000.000		12 Bulan	300.000.000
					Terlaksananya penyebarluasan hasil-hasil pembangunan								
2	10	16		Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	kebijakan teknis di bidang pemberitaan , pengumpulan dan distribusi informasi dan protokol	9 Dokumen							
2	10	16	1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	6 Orang	320.000.000			320.000.000		6 Orang	400.000.000
					Terlaksananya pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi								

OPD : DISKOMINFO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	10	18		Program kerjasama informasi dengan media masa	Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan daerah	93%							
2	1	18	1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terpenuhinya penyebaran informasi pembangunan daerah	7 Dokumen	100.000.000			100.000.000		7 Dokumen	200.000.000
2	10	18	2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penyebaran informasi melalui media elektronik	100 Prosentase	500.000.000			500.000.000		100 Prosentase	500.000.000
					Terlaksananya penyebaran informasi melalui media elektronik								
2	10	18	3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Terlaksananya informasi pembangunan daerah	9 Kegiatan	500.000.000			500.000.000		9 Kegiatan	500.000.000
					Terpenuhinya penyebaran informasi pembangunan daerah								
2	14			Statistik									
2	14	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	terwujudnya sistem informasi statistik daerah								
2	14	15	2	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	terwujudnya sistem informasi statistik daerah	1 Kegiatan	15.000.000			15.000.000		1 Kegiatan	15.000.000
					Terlaksananya sistem informasi statistik daerah								
2	14	15	3	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Terwujudnya penyusunan buku PDRB Kab Boyolali	1 Kegiatan	6.500.000			6.500.000		1 Kegiatan	6.500.000
					Terselenggaranya penyusunan buku PDRB Kab Boyolali								
2	14	15	4	Pengolahan, updating dan analisis data PDRB	Terwujudnya buku indeks harga konsumen	1 Kegiatan	14.500.000			14.500.000		1 Kegiatan	14.500.000
					Tersedianya buku indeks harga konsumen								
2	14	15	5	Penyusunan dan Analisis data/ Informasi Perencanaan pembangunan Ekonomi (NTP)	Terwujudnya buku nilai tukar petani	1 Kegiatan	11.000.000			11.000.000		1 Kegiatan	11.000.000
					Tersedianya buku nilai tukar petani								
2	14	15	6	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah (IE)	Terwujudnya buku indikator ekonomi dan statistik industri	1 Kegiatan	9.000.000			9.000.000		1 Kegiatan	9.000.000
					Tersedianya buku indikator ekonomi dan statistik industri								
TOTAL PAGU 1							13.588.000.000			13.588.000.000			14.712.000.000
5	1	1		Belanja Pegawai			3.394.687.000			3.394.687.000			3.394.687.000
TOTAL PAGU 2							16.982.687.000		-	16.982.687.000			18.106.687.000

OPD : DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						-			
2	1			Ketenagakerjaan						-			
2	1	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja						-			
2	1	15	3	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja						-			
2	1	15	6	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	terlaksananya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	160 Orang	160.000.000	-	-	160.000.000		160 orang	200.000.000
					tersedianya peralatan untuk menunjang pelatihan	1 Paket	50.000.000	-	-	50.000.000		1 paket	100.000.000
2	1	15	7	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK						-			
										-			
2	1	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja						-			
2	1	16		Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	tersusunnya buku laporan IPK	13 bulan	-			-		13 bulan	-
					terlaksananya evaluasi Sistem Manajemen Mutu, ISO 9001	1 ISO	50.000.000	-	-	50.000.000		1 ISO	50.000.000
2	1	16	2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	penempatan pencari kerja yang terdaftar	2700 orang	-			-		2700 orang	
					terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	600 orang	-			-		600 orang	-
					terselenggaranya Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1 unit	10.000.000			10.000.000		1 unit	20.000.000
					terlaksananya pengawasan dan pengendalian LPTKS	20 unit	-			-		20 unit	-
					tersedianya layanan kepada calon pekerja migran	200 orang				-		200 orang	
					terlaksananya pemberdayaan pekerja migran purna penempatan	20 orang	20.000.000			20.000.000		20 orang	25.000.000
					telaksananya koordinasi perpanjangan IMTA	20 perusahaan	-			-		20 perusahaan	
2	1	16	4	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	terciptanya LPKS yang berkualitas	25 Unit	25.000.000	-	-	25.000.000		25 Unit	30.000.000
2	1	16	5	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan									
2	1	16	6	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat									
2	1	17		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						-			
2	1	17	2	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terlaksananya kegiatan pembinaan pencegahan perselisihan hubungan industrial	60 Orang	20.000.000	-	-	20.000.000		60 Orang	25.000.000
					Terlaksananya fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	20 Kasus	5.000.000			5.000.000		20 Kasus	5.000.000
2	1	17	4	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Terlaksananya pembinaan peraturan perusahaan	60 Orang	2.500.000	-	-	2.500.000		60 Orang	750.000
					Terfasilitasinya pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	10 Perjanjian	-		-	-		10 Perjanjian	-
					Terlaksananya pendataan informasi sarana hubungan industrial	1 Data	-		-	-		1 Data	
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
2	1	17	9	Pembinaan sarana hubungan industrial, kesejahteraan, pekerja, pengupahan dan usulan UMK	Terlaksananya verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan organisasi pengusaha dan serikat buruh	70 orang	20.000.000		-	20.000.000		70 orang	1.500.000

OPD : DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Terlaksananya koordinasi LKS Tripartit	3 kali	20.000.000		-	20.000.000		3 kali	10.000.000
2	11			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						-			
2	11	15		Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	UMKM yang melaksanakan pola kemitraan	2 UMKM				-			
2	11	15	2	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah									
2	11	15	6	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	terlaksananya pendataan usaha mikro	22 Kecamatan	30.000.000	-	-	30.000.000	Penyusunan data base UMKM	22 Kecamatan	50.000.000
2	11	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	SDM UMKM yang terlatih	30 UMKM				-			
2	11	16	5	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Terlaksananya kemitraan dan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	10 UMKM	40.000.000	-	-	40.000.000		10 UMKM	50.000.000
2	11	16	6	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan UMKM	120 UMKM	150.000.000	-	200.000.000	350.000.000		120 UMKM	400.000.000
2	11	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit	30 UMKM				-			
2	11	17	1	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan usaha mikro bidang permodalan	70 UMKM	5.000.000	-	-	5.000.000		70 UMKM	7.500.000
2	11	17	3	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi	Terlaksananya kegiatan koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha mikro	40 UMKM	5.000.000	-	-	5.000.000		40 UMKM	3.000.000
2	11	17	6	Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah									
2	11	17	7	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga									
2	11	17	10	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal									
2	11	17	12	Penyelenggaraan Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro	30 UMKM	-	-	-	-		30 UMKM	-
2	11	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi yang di bina yang meningkat nilai kesehatannya	50 Koperasi				-			
2	11	18	1	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Terlaksananya pemenuhan izin usaha koperasi	5 Koperasi	20.000.000	-		20.000.000		5 Koperasi	110.000.000
2	11	18	2	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Terlaksananya peningkatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	60 Orang	70.000.000	-	95.000.000	165.000.000		60 Orang	170.000.000
2	11	18	4	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian									
2	11	18	5	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi	60 Koperasi	100.000.000	-	70.000.000	170.000.000		60 Koperasi	180.000.000
2	11	18	6	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi	60 Koperasi	105.000.000	-	105.000.000	210.000.000		60 Koperasi	200.000.000
2	11	18	8	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Terlaksananya peningkatan produktivitas koperasi	25 Koperasi	40.000.000	-	40.000.000	80.000.000		25 Koperasi	100.000.000
3				Urusan Pilihan						-			
3	8			Transmigrasi						-			
3	8	15		Program pengembangan wilayah transmigrasi						-			
3	8	15	5	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Terlaksananya koordinasi kerjasama transmigrasi	1 Kabupaten	-	-	-	-		1 Kabupaten	-

OPD : DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
1				2	3	Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					terlaksananya kegiatan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi	4 Kepala Keluarga	20.000.000			20.000.000		4 Kepala Keluarga	20.000.000
4	1			Urusan Fungsi Penunjang	Terlaksananya penyuluhan transmigrasi lokal	6 Kecamatan	-			-		6 Kecamatan	-
4	1	1		Administrasi Pemerintahan						-			
4	1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						-			
2	11	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 Bulan	5.000.000	-	-	5.000.000		12 Bulan	5.000.000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	150.000.000	-	-	150.000.000		12 Bulan	175.000.000
2	11	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	60.000.000	-	-	60.000.000		12 Bulan	65.000.000
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	10.000.000	-	-	10.000.000		12 Bulan	15.000.000
2	11	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terlaksananya penyediaan jasa perbaikan kerja	12 Bulan	25.000.000	-	-	25.000.000		12 Bulan	30.000.000
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	60.000.000	-	-	60.000.000		12 Bulan	60.000.000
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	120.000.000	-	-	120.000.000		12 Bulan	120.000.000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	12 Bulan	10.000.000	-	-	10.000.000		12 Bulan	12.000.000
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	300.000.000	-	-	300.000.000		12 Bulan	350.000.000
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	35.000.000	-	-	35.000.000		12 Bulan	40.000.000
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	7.000.000	-	-	7.000.000		12 Bulan	10.000.000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	5.280 Liter	110.000.000	-	-	110.000.000		5.300 Liter	120.000.000
2	11	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	terlaksananya penyediaan makan minum rapat,tamu dan pegawai	12 Bulan	200.000.000	-	-	200.000.000		12 Bulan	220.000.000
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	549.843.000	-	-	549.843.000		12 Bulan	575.000.000
2	11	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	terlaksananya penyediaan jasa administrasi kantor	12 Bulan	250.000.000	-	-	250.000.000		12 Bulan	300.000.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						-			
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	12 Bulan	195.000.000	-	-	195.000.000		12 Bulan	225.000.000
					terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	20.000.000			20.000.000		12 Bulan	20.000.000
5	4	5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						-			
5	4	5	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja	12 Bulan	-			-		12 Bulan	-
				Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	12 Bulan	-			-		12 Bulan	-
TOTAL PAGU 1							3.074.343.000	-	510.000.000	3.584.343.000	-	-	4.099.750.000
5	1	1		Belanja Pegawai			6.552.526.000			6.552.526.000			6.552.526.000
TOTAL PAGU 2							9.626.869.000		510.000.000	10.136.869.000			10.652.276.000

OPD : DPMPTSP

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05				Fungsi lainnya									
05	04			Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah									
05	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah.		755.198.000			755.198.000			833.600.000
05	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	3.500.000			3.500.000		12 Bulan	3.900.000
05	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	70.000.000			70.000.000		12 Bulan	80.000.000
05	04	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran	5 mobil, 8 sepeda motor	7.000.000			7.000.000		5 mobil, 8 sepeda motor	7.500.000
05	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1.750.000			1.750.000		12 Bulan	2.000.000
05	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	95.800.000			95.800.000		12 Bulan	105.000.000
05	04	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	22.000.000			22.000.000		12 Bulan	27.000.000
05	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	52.735.000			52.735.000		12 Bulan	58.000.000
05	04	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	64.792.000			64.792.000		12 Bulan	69.000.000
05	04	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	4.000.000			4.000.000		12 Bulan	5.000.000
05	04	01	14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya cakupan sarana administrasi Perkantoran	5 paket	62.100.000			62.100.000		5 paket	75.000.000
05	04	01	15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1 paket	2.000.000			2.000.000		1 paket	2.200.000
05	04	01	16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran	720 buku/koran	2.700.000			2.700.000		720 buku/koran	3.000.000
05	04	01	17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran	5000 liter	64.463.000			64.463.000		5000 liter	68.000.000
05	04	01	18	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	30.000.000			30.000.000		12 Bulan	38.000.000
05	04	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	272.358.000			272.358.000		12 Bulan	290.000.000
05	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah		114.700.000			114.700.000			128.000.000
05	04	02	19	Penataan Lingkungan Kantor	Meningkatnya kualitas sarana prasarana aparatur	1 Paket	40.000.000			40.000.000		1 Paket	45.000.000
05	04	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya kualitas sarana prasarana aparatur	1 Paket	40.000.000			40.000.000		1 Paket	45.000.000
05	04	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kualitas sarana prasarana aparatur	5 mobil, 8 sepeda motor	34.700.000			34.700.000		5 mobil, 8 sepeda motor	38.000.000
05	04	04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah		16.000.000			16.000.000			19.000.000
05	04	04	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	24 ASN	16.000.000			16.000.000		24 ASN	19.000.000
05	04	05		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah		90.000.000			90.000.000			98.000.000
05	04	05	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7 laporan	90.000.000			90.000.000		7 laporan	98.000.000
02	12	01		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rata - rata lama pengurusan perijinan	7 Hari	25.485.000.000			25.485.000.000			600.000.000
					Peningkatan jumlah tenaga kerja bagi perusahaan yang mempunyai ijin								
02	12	01	04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya sarana pendukung peningkatan iklim investasi	1 aplikasi	185.000.000			185.000.000		1 aplikasi	250.000.000
02	12	01	10	Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan	Meningkatkan Realisasi Investasi	investasi 1475475174	25.300.000.000			25.300.000.000		investasi 1475475174249	350.000.000
02	12	02		Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi	Peningkatan jumlah investor	1.043 Investor	84.875.000			84.875.000			93.000.000
					Meningkatnya sarana dan prasarana promosi.								
02	12	02	02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Meningkatnya promosi produk unggulan	1 paket	50.000.000			50.000.000		1 paket	55.000.000
02	12	02	10	Penyelenggaraan pameran investasi	meningkatkan promosi penanaman modal	1043 Investor	34.875.000			34.875.000		1043 Investor	38.000.000
TOTAL PAGU 1							26.545.773.000			26.545.773.000			1.771.600.000
5	1	1		Belanja Pegawai			3.430.364.000			3.430.364.000			3.430.364.000
TOTAL PAGU 2							29.976.137.000		-	29.976.137.000			5.201.964.000

OPD : DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	01	01		Program Perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Renja dan Renstra PD								
04	01	01	16	Penyusunan Renstra dan Renja PD	Terpenuhinya dokumen perencanaan Renja	2 Dok	13.310.000			13.310.000		2 Dok	14.641.000
					Terpenuhinya dokumen perencanaan Renja								
05	04	05		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
05	04	05	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		12bln	0			0			0
05				Fungsi lainnya									
05	04			Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah									
05	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksanannya Fungsi Layanan Operasional perangkat daerah								
05	04	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	12 bln	6.655.000			6.655.000		12 bln	7.320.000
					Pemenuhan Kebutuhan Jasa Surat Menyurat								
05	04	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air	12 bln	302.500.000			302.500.000		12 bln	332.750.000
					Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air								
05	04	01	14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya kebutuhan peralatan kantor	12 bln	0			0		12 bln	0
					Tercukupinya kebutuhan peralatan kantor								
05	04	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 bln	115.555.000			115.555.000		12 bln	127.110.000
					Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional								
05	04	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya kebutuhan buku cek	12 bln	665.000			665.000		12 bln	731.000
					Tercukupinya kebutuhan buku cek								
05	04	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja kantor (komputer, printer, mesin ketik, alat elektronik dan sejenisnya) sehingga dalam kondisi baik dan layak pakai.	12 bln	73.205.000			73.205.000		12 bln	80.525.000
					Terpeliharanya peralatan kerja kantor (komputer, printer, mesin ketik, alat elektronik dan sejenisnya) sehingga dalam kondisi baik dan layak pakai.								
05	04	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	12 bln	77.225.000			77.225.000		12 bln	84.947.000
					Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor								
05	04	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan jasa penggandaan	12 bln	146.410.000			146.410.000		12 bln	161.051.000
					Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan jasa penggandaan								
05	04	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tercukupiny kebutuhan komponen listrik dan lampu listrik	12 bln	153.065.000			153.065.000		12 bln	168.371.000
					Tercukupiny kebutuhan komponen listrik dan lampu listrik								
05	04	01	14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya kebutuhan peralatan kantor	4 Unit	279.510.000			279.510.000		4 Unit	307.461.000
					Tercukupinya kebutuhan peralatan kantor								
05	04	01	15	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih	12 bln	206.205.000			206.205.000		12 bln	226.825.000
					Tercukupinya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih								
05	04	01	16	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan (surat kabar dan majalah)	12 bln	4.000.000			4.000.000		12 bln	4.400.000
					Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan (surat kabar dan majalah)								
05	04	01	17	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercukupinya kebutuhan logistik kantor (BBM, Isi ulang gas LPG, pelumas kendaraan)	15.000 Liter	139.755.000			139.755.000		15.000 Liter	153.730.000
					Tercukupinya kebutuhan logistik kantor (BBM, Isi ulang gas LPG, pelumas kendaraan)								

OPD : DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	04	01	18	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan minuman harian, makan minum rapat dan makan minum tamu.	12 bln	99.825.000			99.825.000		12 bln	109.807.000
					Tercukupinya kebutuhan minuman harian, makan minum rapat dan makan minum tamu.								
05	04	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dihadirinya rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta laporan hasil rapat, koordinasi dan konsultasi.	12 bln	346.060.000			346.060.000		12 bln	380.666.000
					Dihadirinya rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta laporan hasil rapat, koordinasi dan konsultasi.								
05	04	01	20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)	Terpenuhinya kebutuhan tenaga honorer / PTT	12 bln	308.792.000			308.792.000		12 bln	339.671.000
					Terpenuhinya kebutuhan tenaga honorer / PTT								
05	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
05	04	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya perlengkapan gedung kantor	1 Keg	1.449.580.000			1.449.580.000		1 Keg	1.594.538.000
05	04	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya perlengkapan gedung kantor								
05	04	02	17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 thn	544.500.000			544.500.000		1 thn	598.950.000
05	04	04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
05	04	04	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan									
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	13			Kepemudaan dan Olah Raga									
02	13	01		Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Pemuda mendapat penghargaan tingkat propinsi	10 Orang							
02	13	01	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terbinanya Organisasi Kepemudaan di Masyarakat dan terselenggaranya kegiatan	1 keg	827.216.000			827.216.000		1 keg	909.937.000
					Terselenggaranya peningkatan hari Sumpah Pemuda , Koordinasi OKP ,Pelatihan UMKM Pemuda, Seminar Kepemudaan, Temu Pemuda Pembinaan KNPI, Peringatan Hari Pramuka, Sidparcab dan Rakercab, Pembinaan Satuan Karya, Jambore, Seleksi dan Pengiriman kontingen pesta Siaga, Lomba Kwartir, Karang Pamitran, Perkemahan Pramuka dan Operasional Sanggar Pramuka								
02	13	01	02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terselenggaranya pelatihan Osis, Pengiriman Diklat Pemuda dan Diklat Pengembangan Kepemimpinan serta terselenggaranya Kursus Mahir Dasar	8 keg	154.755.000			154.755.000		8 keg	170.230.000
					Terlaksananya pelatihan OSIS SMA/ SMK, Pengiriman peserta Diklat Pemuda dan pelaksanaan latihan pengembangan kepemimpinan.								
02	13	01	03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Terlaksananya Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	3 keg	146.410.000			146.410.000		3 keg	161.051.000
					Terwujudnya Aksi Nyata Bhakti Pemuda di Lingkungan Masyarakat								
02	13	01	07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terselenggaranya Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor tingkat karesidenan dan provinsi	keg	75.108.000			75.108.000		keg	82.618.000
					Kegiatan seleksi dan pengiriman pemuda pelopor tingkat provinsi.								
02	13	02		Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Pemuda dalam Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)	7 Orang							
02	13	02	02	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)	1 Keg	582.053.000			582.053.000		1 Keg	640.258.000
					Terseleksinya Paskibra Tk Kab./pengiriman ke Prov dan Tercukupinya Pakaian Paskibra								

OPD : DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Terseleksinya TUB/PBB Tingkat Karesidenan dan bhakti pemuda antar provinsi (BPAP) serta Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)								
					Terselenggaranya seleksi TUB-BB, PKKP dan PASKIBRA di Tingkat Kabupaten, Karisidenan dan Provinsi								
02	13	03		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Peringkat PORDA/Bertambahnya Cabang Olahraga	8 peringkat/1 Pengkab							
02	13	03	01	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga			0			0			0
02	13	03	02	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	Terselenggaranya lomba 28 KM	1 Keg	146.410.000			146.410.000		1 Keg	161.051.000
					Terselenggaranya lomba 28 KM								
02	13	03	04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	1 Keg	259.878.000			259.878.000		1 Keg	285.865.000
					Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat daerah								
02	13	03	06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terselenggaranya kompetisi olahraga (POPDA SD, SMP dan SMA/K)	3 keg	219.615.000			219.615.000		3 keg	241.576.000
					Terselenggaranya kompetisi olahraga (POPDA SD, SMP dan SMA/K)								
02	13	03	08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Tersalurkannya penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	25 Org	80.525.000			80.525.000		25 Org	88.577.000
					Tersalurkannya penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi								
02	13	03	10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Terselenggaranya kompetisi olahraga dan seni SDLB	1 Keg	80.525.000			80.525.000		1 Keg	88.577.000
					Terselenggaranya kompetisi olahraga dan seni SDLB								
02	13	03	13	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih peneliti praktisi dan teknisi olahraga	Terbinannya pelatih dan atlet olahraga dan keikutsertaan di tingkat selanjutnya	1 Keg	95.166.000			95.166.000		1 Keg	104.682.000
					Terbinannya pelatih dan atlet olahraga dan keikutsertaan di tingkat selanjutnya								
02	13	04		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Bertambahnya Lapangan Olahraga	4 Lapangan							
02	13	04	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Tercukupinya sarana/prasarana olahraga	1 Keg	4.384.000.000			4.384.000.000		1 Keg	532.400.000
					Tercukupinya sarana/prasarana olahraga								
02	13	04	07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Terpeliharanya sarana dan prasarana olah raga	12 bln	484.000.000			484.000.000		12 bln	532.400.000
					Terpeliharanya sarana dan prasarana olah raga								
3				Urusan Pilihan									
3	02			Pariwisata									
03	02	01		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Potensi wisata yang akan dibangun menjadi obyek wisata/Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha pariwisata								
03	02	01	01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas obyek wisata	2 lokasi	2.420.000.000			2.420.000.000		2 lokasi	2.662.000.000
					Meningkatnya kualitas dan kuantitas obyek wisata								
03	02	01	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Meningkatnya daya tarik obyek wisata	8 lokasi	1.152.979.000			1.152.979.000		8 lokasi	1.268.000.000
					Meningkatnya daya tarik obyek wisata								
03	02	01	03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Terlaksananya Event Pariwisata di Obyek pariwisata	4 lokasi	465.850.000			465.850.000		4 lokasi	512.435.000
					Terlaksananya Event Pariwisata di Obyek pariwisata								
03	02	01	06	Pengembangan daerah tujuan wisata	Tersusunnya DED Obyek Wisata		0			0			
					Tersusunnya DED Obyek Wisata								
03	02	01	07	Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Terdata dan terverifikasinya pelaku usaha pariwisata serta memahami SKKNI	19 kec	84.700.000			84.700.000		19 kec	93.170.000

OPD : DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
							Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Terdata dan terverifikasinya pelaku usaha pariwisata serta memahami SKKNI								
03	02	02		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Sarana Promosi Pariwisata yang dikembangkan/Kerjasama Promosi antar daerah	100%/2 Forum								
03	02	02	03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Terlaksananya budaya promosi pariwisata melalui forum kerjasama.	1 th	145.200.000			145.200.000		1 th	159.720.000	
					Terjalinnnya kerjasama promosi pariwisata dan budaya.									
03	02	02	04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Terlaksananya koordinasi promosi dengan duta wisata.	12 bl	42.350.000			42.350.000		12 bl	46.585.000	
					Terpenuhinya koordinasi dengan stakeholder									
03	02	02	05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Optimalnya pemasaran pariwisata melalui media promosi	2 keg	1.089.000.000			1.089.000.000		2 keg	1.197.900.000	
					Optimalnya pemasaran pariwisata melalui media promosi dan prasarana penunjang promosi pariwisata lainnya									
03	02	03		Program Pengembangan Kemitraan	Desa Wisata/Kelompok Sadar Wisata	7 Desa / 17 Kelompok								
03	02	03	01	Pengembangan dan penguatan informasi dan database			0			0				
03	02	03	07	Pengembangan Sumber Daya manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas SDM di Bidang Pariwisata	1 keg	181.500.000			181.500.000		1 keg	199.650.000	
					Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas SDM di Bidang Pariwisata									
03	02	03	08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Optimalnya peranserta masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang berdampak meningkatnya ekonomi masyarakat.	1 th	968.000.000			968.000.000		1 th	1.064.800.000	
					Optimalnya peran serta masyarakat dalam pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang berdampak meningkatnya ekonomi masarakat.									
03	02	03	09	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terlaksannya Monitoring kegiatan, infrastruktur dan aset perangkat daerah.	1 th	5.000.000			5.000.000		1 th	5.000.000	
					Terlaksannya Monitoring kegiatan, infrastruktur dan aset perangkat daerah.									
TOTAL PAGU 1							18.357.057.000			18.357.057.000			15.901.976.000	
5	1	1		Belanja Pegawai			5.423.728.000			5.423.728.000			5.423.728.000	
2	13	1		Program Peningkatan peran serta kepemudaan										
02	13	01	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Bantuan kepada Pramuka Kwarcab Kabupaten Boyolali		80.000.000			80.000.000				
2	13	3		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga										
02	13	03	02	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan	Penguatan Kelembagaan Organisasi KONI Kabupaten Boyolali		2.500.000.000			2.500.000.000				
02	13	03	10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	NPC (Difabel)		250.000.000			250.000.000				
02	13	03	13	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih peneliti	Penguatan Kelembagaan Organisasi FORMI Kabupaten boyolali		85.000.000			85.000.000				
TOTAL PAGU 2							26.695.785.000			26.695.785.000			21.325.704.000	

OPD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	1			Pendidikan									
1	1	21		program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Peningkatan upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca	35.000 Orang	5.238.678.000	-	10.264.773.000	15.503.451.000			748.737.504
1	1	21		Pengembangan minat dan budaya baca	terlaksananya minat budaya baca	12 bulan	14.450.000			14.450.000		12 bulan	176.930.784
				Publikasi sosialisasi minat dan budaya baca	Pengembangan minat dan budaya baca	12 bulan	4.228.000			4.228.000		12 bulan	121.806.720
				penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	12 bulan	20.000.000		264.773.000	284.773.000			
						12 bulan	200.000.000			200.000.000		12 bulan	200.000.000
1	1	21	11	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	12 bulan	5.000.000.000		10.000.000.000	15.000.000.000	DAK	12 bulan	250.000.000
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			905.190.600			905.190.600			1.527.585.696
05	04	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	12 bulan	1.398.000			1.398.000		12 bulan	5.397.408
					Penyediaan jasa surat menyurat								
05	04	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan Listrik	12 bulan	43.776.000			43.776.000		12 bulan	52.531.200
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik								
05	04	01	06	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	62.600.000			62.600.000		12 bulan	243.129.600
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional								
4	1	1	7	penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya jasa administrasi Keuangan	12 bulan	1.000.000			1.000.000		12 bulan	14.905.728
					Penyediaan jasa administrasi keuangan								
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan	12 bulan	7.200.000			7.200.000		12 bulan	8.640.000
					Penyediaan jasa kebersihan kantor								
05	04	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	teredianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	13.904.000			13.904.000		12 bulan	28.684.800
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja								
05	04	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	12 bulan	36.960.000			36.960.000		12 bulan	80.352.000
					Penyediaan alat tulis kantor								
05	04	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	28.800.000			28.800.000		12 bulan	34.560.000
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan								
05	04	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	tersedianya komponen instalasi listrik / telepon	12 bulan	7.200.000			7.200.000		12 bulan	8.640.000
					Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon								
05	04	01	14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	8.800.000			8.800.000		12 bulan	34.560.000
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor								
05	04	01	16	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	peyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	4.665.600			4.665.600		12 bulan	5.598.720
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan								

OPD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	12 bulan	102.168.000			102.168.000		12 bulan	122.601.600
					Tersedianya makan dan minum								
05	04	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	132.640.000			132.640.000		12 bulan	183.168.000
					Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah								
05	04	01	19	penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 bulan	454.079.000			454.079.000		12 bulan	704.816.640
					tersedianya jasa administrasi perkantoran								
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			28.800.000			28.800.000			34.560.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan di Perpustakaan	12 bulan	28.800.000			28.800.000		12 bulan	34.560.000
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	18			Kearsipan									
2	18	15		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Tertibnya penyimpanan arsip dinamis in aktif dari satuan kerja	25%	13.480.000			13.480.000			239.328.000
2	18	15	1	Pembangunan data base informasi kearsipan	Terlaksananya pembangunan data base informasi kearsipan	1 keg	7.480.000			7.480.000			158.976.000
					Pembangunan data base informasi kearsipan								
2	18	15	6	Kajian sistem administrasi kearsipan	terlaksananya kajian sistem administrasi kearsipan	2 keg	6.000.000			6.000.000			80.352.000
					Kajian sistem administrasi kearsipan								
					Tersedianya sistem administrasi kearsipan								
2	18	17		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan kearsipan dilingkungan Pemerintah Kab. Boyolali	100 prosentase	7.000.000			7.000.000			38.400.000
2	18	17	3	Monitoring evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	terlaksananya Monitoring , evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	100 prosen	7.000.000			7.000.000			38.400.000
2	18	18		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Peningkatan pemahaman pengelolaan kearsipan bagi pejabat dilingkungan Pemerintah Kab. Boyolali	100 prosentase	4.500.000			4.500.000			29.420.000
2	18	18	1	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	5 buku	1.500.000			1.500.000			25.920.000
					Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip								
					Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta								
					Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta								
2	18	18	3	sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta			3.000.000			3.000.000			3.500.000
TOTAL PAGU 1							6.197.648.600	-	10.264.773.000	16.462.421.600	-	-	2.618.031.200
5	1	1		Belanja Pegawai			2.771.209.000			2.771.209.000			2.771.209.000
TOTAL PAGU 2							8.968.857.600		10.264.773.000	19.233.630.600			5.389.240.200

OPD : DINAS PERTANIAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran kebutuhan komunikasi, air, listrik, dan internet	12 Bulan	180.000.000			180.000.000		12 Bulan	180.000.000
					Tercukupinya kebutuhan komunikasi, air, listrik, dan internet								
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	83.000.000			83.000.000		12 Bulan	90.000.000
					Kelancaran operasional dinas								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	12 Bulan	40.000.000			40.000.000		12 Bulan	40.000.000
					Terpeliharanya peralatan kantor								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	63.700.000			63.700.000		12 Bulan	70.000.000
					Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	45.828.000			45.828.000		12 Bulan	46.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Penerangan bangunan kantor	12 Bulan	9.000.000			9.000.000		12 Bulan	10.000.000
					Terpenuhinya instalasi listrik dan penerangan kantor								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	30 Unit	87.225.000			87.225.000		30 Unit	100.000.000
					Tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	10.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	610 EksSemplar	5.000.000			5.000.000		610 EksSemplar	5.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercukupinya kebutuhan BBM	6.900 Liter	126.000.000			126.000.000		12 Bulan	125.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor								
					Terciptanya kelancaran administrasi kantor								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya Rakor, Rapat Dinas, Jamuan Tamu, Jamuan Minum	12 Bulan	123.880.000			123.880.000		12 Bulan	130.000.000
					Tersedianya kebutuhan konsumsi								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rakor, konsultasi dan perjalanan dinas	12 Bulan	328.050.000			328.050.000		12 Bulan	365.000.000
					Tersampaikannya informasi dan terjalinnnya komunikasi antar dinas								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kebersihan, keamanan, dan administrasi kantor	12 Bulan	300.000.000			300.000.000		12 Bulan	300.000.000
					Kelancaran administrasi kantor								
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya kenyamanan kantor	12 Bulan	140.000.000			140.000.000		12 Bulan	150.000.000
					Tertatanya lingkungan kantor								
					Terciptanya kenyamanan dan keamanan kantor								

OPD : DINAS PERTANIAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
3	3	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		13 Dokumen	-			-		13 Dokumen	-
3				Urusan Pilihan									0
3	3			Pertanian									0
3	3	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan petani yang mendapat pelatihan, bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu	1.219 Orang							
3	3	15	3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terwujudnya pengembangan agribisnis perdesaan	197 Kelompok	144.000.000			144.000.000		197 Kelompok	200.000.000
					Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya petani dalam pengembangan Unit Pelayanan Jasa Alsintan								
3	3	15	4	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani	Meningkatnya aspek pembiayaan terhadap kelompok tani/gapoktan	4.000 Ha	144.000.000			144.000.000		5.000 Ha	180.000.000
					Terlaksananya Auransi Usaha Tani Padi								
3	3	15	6	Fasilitasi pengelolaan hasil, pasca panen dan pemasaran komoditas perkebunan	Terlaksananya fasilitasi penanganan pasca panen	26 kelompok	744.800.000			744.800.000		30 Kelompok	900.000.000
					Termanfaatkannya bantuan pasca panen perkebunan								
3	3	16		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Volume perdagangan produk usaha pertanian	83.857,78 Ton							
3	3	16	1	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Teridentifikasinya kelompok pelaku pemasaran hasil pertanian	2 Jenis	55.000.000			55.000.000		2 Komoditas	70.000.000
					Teridentifikasinya pelaku pertanian organik / pemasaran hasil pertanian								
3	3	16	7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Terlaksananya promosi hasil produksi pertanian	3 Kali	75.000.000			75.000.000		3 kali	100.000.000
					Terlaksananya promosi produksi pertanian/perkebunan								
3	3	16	14	Pengembangan Pengolahan atas Hasil Pertanian	Terbinanya kelompok pengolah produk pertanian	20 Kelompok	100.000.000			100.000.000		20 Kelompok	120.000.000
					Pengembangan pengolahan hasil pertanian								
3	3	17		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan									
3	3	17	4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya percontohan budidaya dan teknologi pertanian	36 Kelompok	220.000.000			220.000.000		20 Kelompok	300.000.000
					Kontrol dan pengawasan pelaksanaan penyuluhan								
					Mempercepat diseminasi dan adopsi teknologi inovatif								
					Termonitornya kegiatan pendampingan pertanian/perkebunan oleh Penyuluh Pertanian Lapang								
3	3	18		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi pangan utama (Ton) : Padi/Produksi pangan lainnya (Ton)	298.751 Ton/138.456 Jagung							
3	3	18	2	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Fasilitasi sarana prasarana dan infrastruktur pertanian	8 Unit	1.200.000.000	-		1.200.000.000		8 Unit	1.200.000.000
					Terlaksananya pembangunan/perbaikan sumber air dan penyediaan alsintan	2 Unit			240.000.000	240.000.000		2 Unit	240.000.000
						3 Unit			900.000.000	900.000.000		3 Unit	600.000.000

OPD : DINAS PERTANIAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
							Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							3 Unit			360.000.000	360.000.000		3 Unit	240.000.000
							3 Unit			360.000.000	360.000.000		3 Unit	240.000.000
							8 Unit			240.000.000	240.000.000		8 Unit	120.000.000
							2 Unit			1.500.000.000	1.500.000.000		2 Unit	2.500.000.000
							12 Unit			2.400.000.000	2.400.000.000		12 Unit	2.000.000.000
							4 Unit	1.510.214.700			1.510.214.700		3 Unit	860.000.000
3	3	18	5	Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	Terkendalnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman	22 Kecamatan	150.000.000			150.000.000			1.500 ha	175.000.000
					Turunnya populasi OPT pada pertanian pangan/hortikultura									
					Terbinanya wilayah pengembangan intensifikasi pertanian									
3	3	18	6	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura	Pengembangan intensifikasi jagung	200 ha	300.000.000			300.000.000			250 ha	500.000.000
					Bertambahnya kelompok tani yang terbina dalam pengembangan intensifikasi pertanian									
					Bertambahnya luasan pertanian jagung									
3	3	18	8	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan	Terbentuknya kawasan/sentra pengembangan tanaman buah-buahan dan MPTS	5 Kecamatan	800.000.000			800.000.000	Long list 500.000.000		4 kecamatan	500.000.000
3	3	18	9	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ramah Lingkungan Tanaman Obat	Terbentuknya sentra kawasan buah - buahan	5 ha	200.000.000			200.000.000			8 ha	230.000.000
					Terwujudnya pengembangan sentra kawasan tanaman obat									
3	3	18	10	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran Ramah Lingkungan	Terbentuknya kawasan/sentra pengembangan tanaman obat	4 ha	150.000.000			150.000.000			4 ha	200.000.000
					Terwujudnya pengembangan sentra kawasan sayuran									
3	3	18	11	Pemberdayaan Kelembagaan P3A/ GP3A	Terbentuknya sentra kawasan sayuran	6 GP3A	45.000.000			45.000.000			2 GP3A	49.500.000
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Tani GP3A									
3	3	18	12	Pengendalian/ pencegahan alih fungsi lahan pertanian	Peningkatan kapasitas kelembagaan GP3A	16.500 ha	250.000.000			250.000.000			16.500 ha	275.000.000
					Terwujudnya pengendalian pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan									
3	3	18	13	Penyusunan Data dan Informasi Pertanian/Perkebunan	Tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di masa yang akan datang	22Kecamatan	50.000.000			50.000.000			22 kecamatan	100.000.000
					Tersusunnya informasi produksi dan harga komoditas pertanian dan perkebunan									
3	3	19		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan										
3	3	19	1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Penyusunan programa penyuluhan	100 Kelompok	18.000.000			18.000.000			100 Kelompok	30.000.000
					Kelompok tani yang meningkat kelas kelembagaannya									

OPD : DINAS PERTANIAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
							Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Balai Penyuluhan yang meningkat kelas kelembagaannya								
						Tersusunnya programa penyuluhan								
						Peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani								
						Peningkatan kelas kelembagaan Balai Penyuluhan	4 Unit	9.000.000			9.000.000		3 Unit	20.000.000
3	3	24			Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Produksi tanaman perkebunan: '- Cengkeh'- Kopi'- Kelapa'- Tembakau'- Tebu'- Lada'- Atsiri	382,88/153,15/557 2,25/5234,03/3624 6,4/24,25/kw minyak59,99							
3	3	24	2		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim	Luas lahan yang ditanami bibit bantuan	50 ha	750.000.000			750.000.000		50 ha	750.000.000
						Peningkatan luas tanaman semusim								
3	3	24	3		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	Terdistribusinya bantuan bibit tanaman tahunan	35.000 batang	800.000.000			800.000.000		20.000 batang	900.000.000
						Terbinanya kelompok tani tanaman tahunan								
						Terlaksananya peremajaan tanaman tahunan								
						Peningkatan kemampuan kelompok tani tanaman tahunan								
3	3	24	5		Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan	Terdistribusinya pestisida dan sarana pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan	10 ha	122.000.000			122.000.000		15 ha	150.000.000
3	3	24	8		Fasilitasi penggunaan dan pengelolaan alat mesin perkebunan	Terkendalnya serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan	42 Unit	275.000.000			275.000.000		50 unit	350.000.000
						Terdistribusinya bantuan alat mesin perkebunan								
TOTAL PAGU 1								9.653.697.700		6.000.000.000	15.653.697.700			15.720.500.000
5	1	1			Belanja Pegawai			13.943.971.000			13.943.971.000			13.943.971.000
3	3	18			Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi pangan utama (Ton) : Padi/Produksi pangan lainnya (Ton)								
3	3	18	11		Pemberdayaan Kelembagaan P3A/ GP3A	Terbentuknya sentra kawasan sayuran	6 GP3A	150.000.000			150.000.000			
TOTAL PAGU 2								23.747.668.700		6.000.000.000	29.747.668.700			29.664.471.000

OPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Fungsi Layanan Operasional Perangkat daerah	12 Bulan							
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	terselenggaranya surat menyurat	12 Bulan	3.280.000			3.280.000		12 Bulan	3.600.000
					meningkatkan cakupan pelayanan perkantoran								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terbayarnya abonemen jasa telepon, air bersih, listrik dan informasi	12 Bulan	185.200.000			185.200.000		12 Bulan	216.000.000
					meningkatkan cakupan pelayanan perkantoran								
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terbayarnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	12 Bulan	57.376.000			57.376.000		12 Bulan	216.000.000
					meningkatkan cakupan pelayanan perkantoran								
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tercapainya peningkatan kemampuan administrasi keuangan	12 Bulan	915.000			915.000		12 Bulan	43.200.000
					meningkatkan cakupan pelayanan perkantoran								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tercukupinya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	15.000.000			15.000.000		12 Bulan	36.000.000
					meningkatkan cakupan pelayanan perkantoran								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK	12 Bulan	43.200.000			43.200.000		12 Bulan	43.200.000
					meningkatkan cakupan pelayanan perkantoran								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terdukupinya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	43.200.000			43.200.000		12 Bulan	43.200.000
					kelancaran pelayanan perkantoran								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	tercukupinya kebutuhan alat listrik	12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	17.424.000
					meningkatkan cakupan pelayanan perkantoran								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tercukupinya sarana dan prasarana kantor	12 Bulan	15.000.000			15.000.000		12 Bulan	52.272.000
					meningkatkan cakupan pelayanan perkantoran								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	12 Bulan	6.887.000			6.887.000		12 Bulan	8.712.000
					meningkatkan cakupan pelayanan perkantoran								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	tercukupinya kebutuhan makan dan minum pegawai	12 Bulan	42.706.000			42.706.000		12 Bulan	60.984.000
					meningkatkan cakupan pelayanan perkantoran								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terselenggaranya perjalanan dinas luar dan dalam daerah	12 Bulan	216.000.000			216.000.000		12 Bulan	360.000.000
					meningkatkan cakupan pelayanan perkantoran								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	terpenuhinya honor PTT dan jasa jilid ke tiga	12 Bulan	549.900.000			549.900.000		12 Bulan	635.000.000
					meningkatkan cakupan pelayanan perkantoran								
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Fungsi Layanan Operasional Perangkat daerah								
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	6.936.000			6.936.000		12 Bulan	47.520.000
					meningkatkan cakupan pelayanan perkantoran								
4	1	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terlaksananya belanja pemeliharaan kantor	12 Bulan	6.000.000			6.000.000		12 Bulan	23.760.000
					meningkatkan cakupan pelayanan perkantoran								
				Urusan Pilihan									
				Kelautan dan perikanan									
				Program pengembangan budidaya perikanan	meningkatkan produksi perikanan	32.002 Ton							
3	1	20	1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	terselenggaranya keg pembenihan ikan dan terbinanya UPR	6 Kelompok	127.500.000			127.500.000		6 Kelompok	275.000.000
					cakupan produksi perikanan								

OPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	1	20	2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan (Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil)	terlaksananya pembinaan kelompok perikanan	13 Kelompok	10.000.000			10.000.000		13 Kelompok	195.000.000
					cakupan peningkatan produksi perikanan								
3	1	20	3	Pembinaan dan pengembangan perikanan	rehabilitas BBI Dan prasarananya	1 Paket	1.594.459.000			1.594.459.000		1 Paket	3.964.126.950
					cakupan meningkatnya produksi ikan (ton)								
3	1	22		Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	meningkatnya produksi ikan	2 Paket							
3	1	22	1	Kajian sistem penyuluhan perikanan	terlaksananya demonstrasi pembuatan pakan ikan								
					cakupan peningkatan pengolahan produksi hasil perikanan								
3	1	23		Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikan	meningkatnya produksi olahan ikan	73 Ton							
3	1	23	1	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan*	terlaksananya pembinaan kelompok pengolah ikan	4 Kelompok	30.050.000			30.050.000		4 Kelompok	60.000.000
					cakupan peningkatan pengolahan produksi hasil perikanan								
3	3			Pertanian									
3	3	20		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pengobatan ternak	1.050 Sample / Uji							
3	3	20	1	Pendataan masalah peternakan	Jumlah sampel yang diperiksa	720 Sample / Uji	6.000.000			6.000.000		720 Sample / Uji	150.000.000
					cakupan pemeriksaan sampel								
3	3	20	2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah ternak yang divaksin/ diobati	36.000 Ekor	123.000.000			123.000.000		36.000 Ekor	230.000.000
3	3	20	2		cakupan pengobatan/vaksinasi ternak								
3	3	20	4	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Jumlah sampel yang diperiksa	200 Sample / Uji	30.250.000			30.250.000		200 Sample / Uji	150.000.000
					cakupan pemeriksaan sampel								
3	3	21		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertambahan populasi ternak sapi, kambing dan domba	320.731 Ekor							
3	3	21	2	Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah ternak yang diperiksa melalui PKB/ ATR	3.500 Ekor	0					3.500 Ekor	120.000.000
					cakupan peningkatan produksi ternak								
3	3	21	3	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	pengadaan kambing betina	400 ekor	99.000.000			99.000.000		400 ekor	275.000.000
					cakupan peningkatan populasi ternak								
					terselenggaranya kontes ternak								
3	3	21	7	Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak	pelatihan peningkatan kualitas pakan ternak	7 kelompok	110.365.000			110.365.000		7 kelompok	200.000.000
					cakupan peningkatan populasi ternak								
3	3	21	8	Pengembangan agribisnis peternakan	pelatihan pengolahan pakan ternak	1 Paket	48.276.750			48.276.750		1 Paket	237.121.500
					cakupan Peningkatan populasi ternak (ekor)								
3	3	22		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya produksi daging /meningkatnya produksi susu (liter)	8.460 Ton/47.851.000 Kilo liter Liter							
3	3	22	1	Penelitian dan pengembangan hasil produksi peternakan	terlaksananya pengujian sampel secara laboratoris	285 Sample / Uji	37.250.000			37.250.000		285 Sample / Uji	100.000.000
					cakupan peningkatan produksi hasil peternakan/susu sapi								
					Terlaksananya Sosialisasi Hyhiene sanitasi dan Zoonosis, pengawasan unit usaha produk hewan dan pemeriksaan sampel produk hewan								
					Cakupan peningkatan sosialisasi Zoonosis dan Hygiene sanitasi, pengawasan unit usaha produk hewan dan pemeriksaan sampel								
3	3	22	3	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	tercukupinya fasilitas UPT RPH Ampel	2 paket	3.500.000			3.500.000		2 paket	150.000.000

OPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					cakupan peningkatan produksi hasil peternakan/daging sapi								
3	3	22	12	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan	terlayannya pemotongan ternak di UPT RPH Ampel	12 Bulan	328.067.000			328.067.000		12 Bulan	328.067.000
					cakupan peningkatan produksi peternakan(daging sapi)								
TOTAL PAGU 1							3.749.317.750			3.749.317.750			8.241.187.450
5	1	1		Belanja Pegawai			7.276.959.000			7.276.959.000			7.276.959.000
3	3	20		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak									
3	3	20	1	Pendataan masalah peternakan	Hewan ternak yang sakit	1 Tahun							
				Bantuan penggantian ternak		1 Tahun	177.500.000			177.500.000			
TOTAL PAGU 2							11.203.776.750		-	11.203.776.750			15.518.146.450

OPD : DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.909.386.300			4.909.386.300			5.400.351.000
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	9.170.000			9.170.000		12 Bulan	10.087.000
				Cakupan Layanan Jasa Surat Menyurat									
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air listrik	12 Bulan	428.580.000			428.580.000		12 Bulan	471.438.000
				Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik									
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Berfungsinya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	245.700.000			245.700.000		12 Bulan	270.270.000
				Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional									
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	2.405.130.300			2.405.130.300		12 Bulan	2.607.000
				Cakupan Layanan Penuediaan Jasa Administrasi Keuangan									
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	82.000.000			82.000.000		12 Bulan	90.200.000
				Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor									
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Berfungsinya peralatan kerja	12 Bulan	25.000.000			25.000.000		12 Bulan	27.500.000
				Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja									
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	95.500.000			95.500.000		12 Bulan	105.050.000
				Cakupan Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor									
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	166.000.000			166.000.000		12 Bulan	182.600.000
				Cakupan Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya peralatan penerangan kantor	12 Bulan	4.770.000			4.770.000		12 Bulan	5.247.000
				Cakupan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Telepon									
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	120.300.000			120.300.000		12 Bulan	132.330.000
				Cakupan pelayanan administrasi perkantoran									
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya peralatan rumah tangga	12 Bulan	20.000.000			20.000.000		12 Bulan	22.000.000
				Cakupan Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Rupiah	4.320.000			4.320.000		12 Rupiah	4.752.000
				Cakupan Layanan Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan									
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	288.755.000			288.755.000		12 Bulan	317.630.500
				Cakupan Layanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi rapat/kegiatan yang baik	12 Bulan	100.304.000			100.304.000		12 Bulan	110.334.400
				Cakupan Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman									
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya kebutuhan rapat rapat dan konsultasi	12 Bulan	913.857.000			913.857.000		12 Bulan	1.005.242.700
				Cakupan Layanan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah									
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya honorarium PTT	12 Bulan	-			-		12 Bulan	2.643.062.400
				Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran									
6	01	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			-			-			-
						12 Bulan	-			-		12 Bulan	-
						12 Bulan	-			-		12 Bulan	-
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 Bulan	603.000.000			603.000.000		12 Bulan	663.300.000
4	1	2	5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	153.000.000			153.000.000		12 Bulan	168.300.000

OPD : DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas operasional								
4	1	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	190.000.000			190.000.000		12 Bulan	209.000.000
					Cakupan Layanan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor								
4	1	2	10	Pengadaan mebeleur	Tercukupinya kebutuhan mebeleur	12 Bulan	70.000.000			70.000.000		12 Bulan	77.000.000
					Cakupan Layanan Pengadaan Mebeleur								
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Berfungsinya gedung kantor	12 Bulan	190.000.000			190.000.000		12 Bulan	209.000.000
					Terciptanya Gedung Yang Terpelihara/ Terawat								
3				Urusan Pilihan									
3	6			Perdagangan									
3	6	15		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah pelaku usaha dan konsumen yang di fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen	12 Bulan	957.320.000			957.320.000		12 Bulan	8.052.000
3	6	15	4	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	Meningkatnya UTP yang tepat ukuran	12 Bulan	950.000.000			950.000.000		12 Bulan	1.045.000.000
					Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Tera/ Tera Ulang								
3	6	15	1	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Meningkatnya hubungan kerja dan lembaga perlindungan konsumen	12 Bulan	7.320.000			7.320.000		12 Bulan	8.052.000
					Cakupan Layanan Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen								
3	6	17		Program peningkatan dan pengembangan ekspor		12 Bulan	139.110.000			139.110.000		12 Bulan	153.021.000
3	6	17	3	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Peningkatan pemahaman tentang kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen eksim	12 Bulan	14.280.000			14.280.000		12 Bulan	15.708.000
					Memahami Kebijakan dan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor								
3	6	17	5	Kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan internasional	Jumlah petani/pedagang yang meningkat pemahaman tentang standarisasi mutu produk	12 Bulan	9.330.000			9.330.000		12 Bulan	10.263.000
					Peningkatan Kualitas SDM dan mutu produk UKM/ UMKM								
3	6	17	12	Pembangunan promosi perdagangan internasional	Jumlah UMKM/pelaku usaha yang menjalin kontak bisnis	12 Bulan	115.500.000			115.500.000		12 Bulan	127.050.000
					Meningkatnya Nilai Ekspor UMKM								
3	6	18		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll)/Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	12 Bulan	56.097.027.000		131.000.000.000	187.097.027.000		12 Bulan	70.727.345.480
3	6	18	3	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Tersedianya sarpras perdagangan yang representatif (toko,kios,los,kantor,MCK,TPS,Musholla,dll)	12 Bulan				-		12 Bulan	70.125.000.000
					Meningkatnya sarpras perdagangan yang representatif (toko,kios,los,kantor,MCK,TPS,Musholla,dll)		25.000.000.000			25.000.000.000			
							25.000.000.000			25.000.000.000			
							6.000.000.000			6.000.000.000			
									51.000.000.000	51.000.000.000			
									80.000.000.000	80.000.000.000			
3	6	18	6	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Tersedianya informasi perdagangan	12 Bulan	71.391.000			71.391.000		12 Bulan	78.530.100
					Terwujudnya Informasi Perdagangan								
3	6	18	7	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan produk dalam negeri	12 Bulan	25.636.000			25.636.000		12 Bulan	28.199.600
					Terwujudnya Kesadaran Masyarakat Dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri								
3	6	18		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri									
3	6	18	2	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha		20 IKM	-			-		20 IKM	

OPD : DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	6	18	4	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan SDM dan mutu produknya		9.330.000			9.330.000			10.263.000
					Terwujudnya Kemampuan SDM dan Mutu Produk UKM/ UMKM Makanan dan Minuman								
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			220.614.900			220.614.900			242.676.390
3	6	18	8	Pengelolaan Pendapatan retribusi pasar milik Pemda	Tercapainya pendapatan retribusi daerah yang dikelola Pemkab	12 Bulan	220.614.900			220.614.900		12 Bulan	242.676.390
					Pendapatan Retribusi Pasar Daerah Yang Dikelola Pemkab								
				Pendataan Potensi Pasar Milik Pemda		13 Bulan	-			-		12 Bulan	-
3	6	19		Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan		12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	11.000.000
3	6	19	3	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Tersedianya tempat berusaha bagi pedagang pasar,PKL, dan pedagang asongan yang bersih,tertib,dan aman.	12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	11.000.000
					Lokasi Pedagang Pasar,PKL,Asongan Yang Tertib Dan Tertata								
3	7			Perindustrian		12 Bulan				-		12 Bulan	
3	7	15		Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk unggulan	12 Bulan	28.675.000			28.675.000		12 Bulan	31.542.500
3	7	15	5	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Meningkatnya inovasi produk IKM	12 Bulan	28.675.000			28.675.000		12 Bulan	31.542.500
					Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Serta Tumbuhnya Calon Wirausaha Baru								
3	7	16		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Semakin berkembangnya IKM		52.291.000			52.291.000			57.520.100
3	7	16	1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk		11.155.000			11.155.000			12.270.500
3	7	16	2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat	Terciptanya Komunikasi Antar IKM	20 Orang				-		20 Orang	-
					Semakin berkembangnya IKM								
					Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Produk	20 Orang	41.136.000			41.136.000		20 Orang	45.249.600
3	7	17		Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Meningkatnya penerapan teknologi dan standart produk industri daerah	20 UMKM	111.870.000			111.870.000		20 UMKM	123.057.000
3	7	17	1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Meningkatnya penerapan teknologi dan standart produk industri daerah	4200 / pelaku usaha	111.870.000			111.870.000		4200 / pelaku usaha	123.057.000
					Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Produk Tembakau,Gula,Kelapa,Wawasan Mengenai Perijinan Produk,Motivasi Bagi Wirausaha Bagi IKM,Kemampuan SDM dan Mutu Produk IKM Makanan dan Minuman								
3	6	17		Program penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah	Terbentuknya kawasan peruntukkan industri	22 kecamatan	-			-		22 kecamatan	9.975.000
3	6	17	1	Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	Terfasilitasinya terbentuknya kawasan peruntukan perindustrian	22 kecamatan	-			-		22 kecamatan	9.975.000
TOTAL PAGU 1							63.138.624.200	0	131.000.000.000	194.138.624.200	0		77.438.103.470
5	1	1		Belanja Pegawai			12.465.231.000			12.465.231.000			12.465.231.000
TOTAL PAGU 2							75.603.855.200		131.000.000.000	206.603.855.200			89.903.334.470

OPD: SEKRETARIAT DAERAH

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4	1	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terbayarnya jasa pengiriman pos dan kegiatan administrasi lainnya	12 Bulan	14.250.000		14.250.000		12 Bulan	15.675.000
					Terbayarnya jasa pengiriman pos, materai, dan kegiatan administrasi lainnya								
4	1	1	2	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	500.000.000		500.000.000		12 Bulan	550.000.000
4	1	1	3	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terbayarnya sewa alat dan tempat	12 Bulan	89.000.000		89.000.000		12 Bulan	97.900.000
4	1	1	7	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya PBB, retribusi, dan iuran APKASI	1 Tahun	30.000.000		30.000.000		1 Tahun	33.000.000
					Tertibnya jasa administrasi keuangan dan iuran Apkasi		1 Tahun					1 Tahun	
4	1	1	8	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terbayarnya jasa kebersihan dan keamanan kantor	12 Bulan	210.000.000		210.000.000		12 Bulan	231.000.000
					Terjaganya kebersihan dan keamanan kantor dan fasilitas umum								
4	1	1	10	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	12 Bulan	256.600.000		256.600.000		12 Bulan	282.260.000
4	1	1	11	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya jasa cetak dan penggandaan dokumen	12 Bulan	387.665.000		387.665.000		12 Bulan	426.431.500
					terbayarnya jasa penggandaan dan cetak								
4	1	1	12	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya bahan dan alat listrik	12 Bulan	6.000.000		6.000.000		12 Bulan	6.600.000
4	1	1	13	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya kelengkapan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	450.000.000		450.000.000		12 Bulan	495.000.000
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan					12 Bulan	
4	1	1	14	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terbelinya peralatan rumah tangga	12 Bulan	164.500.000		164.500.000		12 Bulan	180.950.000
					Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhi dan tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga						12 Bulan	
4	1	1	15	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	15.970.000		15.970.000		12 Bulan	17.567.000
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhi dan tersedianya nahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan					12 Bulan	
4	1	1	16	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terbelinya bahan logistik kantor	12 Bulan	231.500.000		231.500.000		12 Bulan	254.650.000
					Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya bahan logistik kantor	12 Bulan					12 Bulan	
4	1	1	17	17	Penyediaan makanan dan minuman	terbelinya konsumsi untuk rapat dan tamu	12 Bulan	953.204.000		953.204.000		12 Bulan	1.048.524.400
					Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya konsumsi untuk rapat dan tamu	12 Bulan					12 Bulan	
4	1	1	18	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rapat rapat koordinas konsultasi keluar daerah	12 Bulan	1.320.933.000		1.320.933.000		12 Bulan	1.453.026.300
					Terlaksananya fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah								
4	1	1	19	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terciptannya kebersihan dan keindahan gedung kantor	12 Bulan	550.000.000		550.000.000		12 Bulan	605.000.000
					terbayarnya jasa kebersihan dan keindahan gedung kantor							12 Bulan	
					terbayarnya honorarium narasumber non PNS								
4	1	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
4	1	2	10	10	Pengadaan mebeleur	Terbelinya Mebeleur	1 Tahun	50.000.000		50.000.000		1 Tahun	55.000.000
						Terpenuhinya meubeleur di Setda							
4	1	2	21	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksannya pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	1 Tahun	200.000.000		200.000.000		1 Tahun	220.000.000
						Terpeliharanya rumah dinas jabatan							
4	1	2	22	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	400.000.000		400.000.000		12 Bulan	440.000.000
						Terpelihara Gedung Kantor							
4	1	2	24	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	286.000.000		286.000.000		12 Bulan	314.600.000

OPD: SEKRETARIAT DAERAH

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional								
4	1	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	78.137.000			78.137.000		12 Bulan	85.950.700
					Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor								
				-	Terlaksananya rehab gedung kantor	1 paket	2.000.000.000			2.000.000.000	Dalam usulan RKPD blm muncul dan direncanakan tahun 2021 akan dilakukan rehabilitasi untuk BENDORO GEDHE		
				-	Terpenuhinya pakaian PSL Muspida plus	9 set	45.000.000			45.000.000	Dalam usulan RKPD 2021 masuk ke dalam Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga		
1	5	21		Program pendidikan politik masyarakat									
1	5	21	5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemilu partisipasi masyarakat dalam pemilu	1 Tahun						1 Tahun	
4	1	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Rumusan kebijakan teknis pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administrasi/Terlaksananya Rakor Muspika/Perangkat Kelurahan	135 Dokumen/19 Kecamatan							
4	1	16	3	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Terlaksananya rapat koordinasi Forkopimda	5 Kali	97.600.000			97.600.000		5 Kali	107.360.000
					Terselesaikannya permasalahan daerah								
4	1	16	7	Koordinasi bidang sosial dan keagamaan	Terlaksananya koordinsi bidang sosial keagaamaan	5 agama	451.000.000	0	0	451.000.000		5 agama	496.100.000
4	1	16	8	Koordinasi bidang bina kesehatan dan pemberdayaan perempuan	terkoordinasinya dan termonitornya kegiatan UKS dan organisasi perempuan	50 lembaga	0	0	0	0		50 lembaga	0
4	1	16	9	Koordinasi bidang Pendidikan , Kebudayaan dan Olah Raga	Meningkatnya tingkat pendidikan bagi siswa sekolah dari keluarga miskin, kelompok bidang kebudayaan dan kegiatan olahraga	5 kali	0	0	0	0		5 kali	0
			16	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah /Perangkat Kelurahan	Terlaksananya Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan Belanja Langsung	4 kali	0			0		4 kali	0
4	1	16	17	Pengendalian Manajemen pelaksanaan pembangunan daerah	Terlaksananya pengendalian kegiatan belanja langsung	6 dokumen	56.650.000			56.650.000		6 dokumen	62.315.000
4	1	16	13	Perumusan Kebijakan Pembangunan Bina Ekonomi Daerah	Tersusunnya kebijakan perencanaan ekonomi daerah dan pembinaan BUMD	1 kgt	0			0			0
					Terkoordinasinya penyusunan kebijakan perencanaan ekonomi daerah dan pembinaan BUMD.	1 kgt							
4	1	16	14	Pengembangan Lingkungan Sosial Pertanian	Tersusunnya kebijakan pembinaan bagi petani tembakau	3 kgt			261.628.000	261.628.000			265.000.000
					Terfasilitasinya pembinaan petani tembakau, pelaku wirausaha/UMKM.	3 kgt							
4	1	16	21	Penataan Acara Kedinasan Pemerintah Daerah	Terkoordinirnya kunjungan tamu dan acara kedinasan Pejabat Daerah dan Pusat	12 bln	168.000.000			168.000.000		12 bl	168.000.000
					Terfasilitasinya kegiatan Komunikasi Pimpinan Daerah	12 bln	201.000.000			201.000.000		12 bl	201.000.000
					Terfasilitasinya kegiatan kedinasan Pimpinan Daerah	12 bln	146.500.000			146.500.000		12 bl	146.500.000
4	3	16		Program Kerjasama Pembangunan									
4	3	16	1	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan	Tertib Administrasi Wilayah Perbatasan	100 Prosentase	100.000.000			100.000.000		100 Prosentase	100.000.000
				Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	terfasilitasinya kegiatan KAD, jumlah MOU	1	0			0		1	0

OPD: SEKRETARIAT DAERAH

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	10	18		Program kerjasama informasi dengan mas media									
2	10	18	2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Publikasi di media masa/ Jumlah eksemplar media massa yang memuat ILPPD Bupati sehingga memudahkan diakses masyarakat	100 Prosentase	45.000.000			45.000.000		100 Prosentase	49.500.000
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah									
4	3	21	12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Terselenggaranya Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD dan Kepada GUBERNUR	100 Prosentase	0			0			
					Terselenggaranya Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD dan Kepada GUBERNUR	100 Prosentase	0						
4	3	21	12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LPPD yang tersusun dan disampaikan tepat waktu kepada pihak-pihak sesuai ketentuan	2 Dokumen	38.000.000			38.000.000		2 Dokumen	41.800.000
					dokumen LPPD yang tersusun dan disampaikan tepat waktu kepada pihak-pihak sesuai ketentuan	2 Dokumen						2 Dokumen	
4	3	21		Koodinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemeintah Daerah	Jumlah dokumen SAKIP Kabupaten	7 dok	100.000.000			100.000.000		5 dok	100.000.000
					Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan dokumen sakip OPD	1 keg							
4	1	3	21	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Tersusunnya dokuemen Renja, Renstra dan dokumen perencanaan lainnya	2 dokumen	0			0		2 dokumen	
1	5	17		Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang- undangan									
1	5	17	1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Meningkatnya toleransi dan kerukunan inter, antar umat beragama	1 Tahun	10.700.000	0	0	10.700.000		1 Tahun	11.770.000
1	5	17	2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terbantunya alim ulama, anak panti asuhan petugas kebersihan, buruh gendong dan pemulung	500 orang	0	0	0	0		500 orang	0
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya Iman dan Taqwa dikalangan masyarakat	8 Kali	291.700.000	0	0	291.700.000		8 Kali	320.870.000
4	1	19		Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda	90 prosetase							
4	1	19	2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	terbahasnya ranperda yang diusulkan dalam propemperda	12 bulan	14.750.000			14.750.000		12 bulan	16.225.000
					jumlah perda yang diundangkan								
					rancangan produk hukum yang dibahas dan ditetapkan	12 Bulan							
				Legislasi rancangan peraturan perundang - undangan						0			
4	1	19	4	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang- undangan	terlaksananya sosialisasi hukum dan HAM bagi masyarakat	12 bulan			60.000.000	60.000.000		12 bulan	66.000.000
4	1	19	5	Publikasi peraturan perundang-undangan	cakupan fasilitasi layanan akses/publikasi produk hukum	12 Bulan	26.190.000			26.190.000		12 Bulan	28.809.000
4	1	19	6	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah	terkajinya produk hukum pusat dan daerah	12 Bulan	100.000.000			100.000.000		12 Bulan	110.000.000
4	2	15		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH									
4	2	15	2	Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan pemerintah	Tertanganinya kasus di lingkungan pemerintah daerah	1 kasus	108.500.000			108.500.000			119.350.000
4	1	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi									
4	1	15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terfasilitasinya promosi dan investasi bagi UMKM	1 kali	41.500.000			41.500.000			50.000.000
					Dikenalnya produk unggulan UMKM	1 kali							

OPD: SEKRETARIAT DAERAH

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi									
4	1	16	07	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Terumusnya kebijakan penanaman modal	1 dok	50.000.000			50.000.000		1 dok	50.000.000
					Terkoordinasinya penyusunan kebijakan penanaman modal	1 Dokemen							
4	1	15		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan									
4	1	15	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terkoordinasinya kegiatan penambangan dan pemanfaatan air tanah	4 kali	0			0		4 kali	0
					Laporan kegiatan penambangan dan pemanfaatan air tanah	4 kali						4 kali	
4	1	18		Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri									
4	1	18	06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Terkoordinasinya laporan pengendalian inflasi daerah	1 kgt	0			0			0
					Jumlah rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah	1 kgt							
4	1	15		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi									
4	1	15	02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan	Terkoordinasinya kebijakan kerjasama antar wilayah Pengembangan transmigrasi	1 kgt	0			0			0
					Tersusunnya kebijakan dengan wilayah transmigrasi	1 Kgt							
4	1	15		Program Pengembangan data/informasi									
4	1	15	04	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Tersusunnya laporan laju inflasi daerah, tersusunnya data SIKP, dan terumuskannya kebijakan TPAKD	4 kgt	0			0			85.000.000
					Terkoordinasinya perkembangan inflasi daerah, tersusunnya data base SIKP dan terkoordinasinya TPKAD	4 kgt							
4	1	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi									
4	1	22	04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terselenggaranya rakor perencanaan pembangunan perekonomian	1kgt	0			0			0
					Jumlah rakor terhadap pembinaan, UKM/IKM dan pelaku usaha	1 kgt							
4	1	15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Cakupan permasalahan pertanian yang diselesaikan	80 Prosentase							
4	1	15	08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi kebijakan subsidi pertanian	22 Kec	0			0			0
					Terpantaunya penyaluran pupuk bersubsidi	22 Kec							
2	4	17		Program penyelesaian konflik-konflik pertanian									
2	4	17	1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanian	Tertib administrasi pemerintah di bidang keagrarian/prosentasi fasilitas penyelesaian permasalahan pertanian	1 tahun	29.150.000			29.150.000		1 tahun	32.065.000
				Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanian	Tertanganinya permasalahan di bidang keagrariaan								
4	1	23		Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Kualitas layanan e-procurement	81 Prosentase							
4	1	23	1	Fasilitasi Pelayanan Barang dan Jasa	Fasilitasi proses pengadaan barang dan jasa	12 bulan	0			0		12 bulan	
4	1	23	2	Fasilitasi Pelayanan LPSE	Fasilitasi Layanan LPSE	12 bulan	260.000.000			260.000.000		12 bulan	286.000.000
					Kelancaran dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik	12 bulan						12 bulan	

OPD: SEKRETARIAT DAERAH

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	23	3	Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi dan pengembangan layanan pengadaan barang/jasa	12 bulan	11.000.000			11.000.000		12 bulan	12.100.000
					Peningkatan kualitas dan kemampuan penyedia dan aparaturnegara dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa	12 bulan						12 bulan	
4	1	23	4	Ketersediaan dan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Ketersediaan dan terpeliharanya peralatan gedung kantor sebagai pendukung layanan pengadaan barang/jasa	12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 bulan	11.000.000
					Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	2 Unit						1 unit	
					Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan						12 bulan	
4	1	20		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan	5 Dokumen							
4	1	20	4	Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	Jumlah kebijakan tentang kelembagaan	1 dok	10.000.000			10.000.000		1 dok	15.000.000
					Jumlah kegiatan fasilitasi kelembagaan perangkat daerah								
4	2	16		Program pembinaan dan pengembangan aparatur									
4	2	16	6	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah dokumen tentang data/informasi jabatan	1 dok	0			0		1 dok	
					Jumlah kegiatan fasilitasi data/informasi jabatan perangkat daerah								
4	2	16	6	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi RB	1 dok	0			0		1 dok	0
					Jumlah kegiatan falisitasi reformasi birokrasi perangkat daerah	1 keg						1 keg	
4	1	21		Program Peningkatan Pelayanan Publik	Nilai IKM Kabupaten Boyolali/Kebijakan teknis di bidang organisasi dan tata laksana serta kepegawaian	80 Prosentase/70 Dokumen							
4	1	21	1	Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan	Jumlah kegiatan Pembinaan Pelayanan Publik	1 keg	10.000.000			10.000.000		1 keg	15.000.000
					Jumlah kegiatan penilaian Pelayanan Publik	1 keg						1 keg	
					Jumlah kegiatan pembinaan ketatalaksanaan	1 keg						1 keg	
4	1	21	5	Peyusunan Standar Pelayanan	Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan SP/SOP	1 keg	0			0		1 keg	
4	1	21	4	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Terlaksananya Peninmgkatan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1 Tahun	20.000.000			20.000.000		1 Tahun	
					Tercapainya Pelacakan Batas Daerah/Cakupan tanda batas wilayah dengan kabupaten lain sehingga tercipta tertib administrasi	100 Prosentase						100 Prosentase	
4	2	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
4	1	03	14	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terciptanya kemudahan dan kelancaran untuk pedoman pelaksanaan kegiatan	12 bln	410.000.000			410.000.000		12 bln	451.000.000
4	1	03	15	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya data laporan keuangan semesteran	2 kali	0			0		2 kali	
4	1	03	16	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya data laporan keuangan akhir tahun	1 tahun	0			0		1 tahun	
TOTAL PAGU 1							11.045.999.000	0	321.628.000	11.367.627.000			10.095.323.900
5	1	1		Belanja Pegawai			14.378.418.000			14.378.418.000			
													14.378.418.000

OPD: SEKRETARIAT DAERAH

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	17		Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang- undangan									
1	5	17	1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Meningkatnya toleransi dan kerukunan inter, antar umat beragama	1 Tahun	3.403.380.000			3.403.380.000			
4	1	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah									
4	1	16	7	Koordinasi bidang sosial dan keagamaan	Terlaksananya koordinsi bidang sosial keagaamaan	5 agama	35.000.000			35.000.000			
4	1	16	8	Koordinasi bidang bina kesehatan dan pemberdayaan perempuan	terkoordinasinya dan termonitornya kegiatan UKS dan organisasi perempuan	50 lembaga	750.000.000			750.000.000			
4	1	16	9	Koordinasi bidang Pendidikan , Kebudayaan dan Olah Raga	Meningkatnya tingkat pendidikan bagi siswa sekolah dari keluarga miskin, kelompok bidang kebudayaan dan kegiatan	5 kali	275.000.000			275.000.000			
TOTAL PAGU 2							29.887.797.000		321.628.000	30.209.425.000			24.473.741.900

OPD: KDH/WKDH

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.199.735.000			2.199.735.000			2.419.708.500
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terbayarnya jasa pengiriman pos dan kegiatan administrasi lainnya	12 Bulan	2.760.000			2.760.000		12 Bulan	3.036.000
					Terpenuhinya jasa surat menyurat, materai dan jasa/benda pos lainnya								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	Terbayarnya tagihan listrik ,telkom dan air	12 Bulan	240.800.000			240.800.000		12 Bulan	264.880.000
					Terbayarnya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta internet								
4	1	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	Terbayarnya tagian sewa alat dan tempat	12 Bulan	85.000.000			85.000.000		12 Bulan	93.500.000
					Terpenuhinya kebutuhan sewa peralatan dan perlengkapan kantor								
				Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terjaga dan terpeliharanya kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	50.000.000			50.000.000		12 bulan	55.000.000
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya PBB dan retribusi Rumah Dinas Jabatan	2 Bidang Tanah	3.450.000			3.450.000		2 Bidang Tanah	3.795.000
					Terbayarnya Pajak Bumi dan Bangunan Rumah Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya jasa kebersihan dan keamanan Rumah Dinas Jabatan	12 Bulan	390.000.000			390.000.000		12 Bulan	429.000.000
					Terciptanya suasana kantor yang nyaman, bersih dan aman								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya ATK	12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	11.000.000
					Terpenuhinya ATK								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya jasa cetak dan penggandaan dokumen	12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	11.000.000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terbelinya bahan dan alat listrik untuk Rumah Dinas jabatan	12 Bulan	5.175.000			5.175.000		12 Bulan	5.692.500
					terpenuhinya komponen instalasi listrik								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	100.000.000			100.000.000		1 Paket	110.000.000
					terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinnya peralatan rumah tangga Rumah Dinas Jabatan	12 Bulan	350.000.000			350.000.000		12 Bulan	385.000.000
					Terpenuhinya peralatan rumah tangga Rumah Dinas Jabatan								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	15.000.000			15.000.000		12 Bulan	16.500.000
					Terbayarnya langganan bahan bacaan dan peraturan								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terbelinya bahan logistik kantor	12 Bulan	100.000.000			100.000.000		12 Bulan	110.000.000
					Tersediannya bahan logistik kantor								

OPD: KDH/WKDH

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terbelinya konsumsi untuk rapat ,tamu dan haruian pegawai.	12 Bulan	442.550.000			442.550.000		12 Bulan	486.805.000
					Terpenuhinya makan dan minum								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanannya rapat rapat koordinas konsultasi keluar daerah	12 Bulan	395.000.000			395.000.000		12 Bulan	434.500.000
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kegiatan rapat rapat dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			905.000.000			905.000.000			995.500.000
4	1	2	8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Tersedianya peralatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati	1 Paket	200.000.000			200.000.000		1 Paket	220.000.000
4	1	2	8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Terpenuhinya peralatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati	1 Paket						1 Paket	
4	1	2	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terlaksanannya pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	12 Bulan	220.000.000			220.000.000		12 Bulan	242.000.000
4	1	2	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	terpeliharanya secara rutin / berkala rumah jabatan	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	200.000.000			200.000.000		12 Bulan	220.000.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin /berkala gedung kantor	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	2	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/jabatan	12 Bulan	200.000.000			200.000.000		12 Bulan	220.000.000
4	1	2	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya secara rutin / berkala mobil jabatan	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	2	25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terlaksanannya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	12 Bulan	60.000.000			60.000.000		12 Bulan	66.000.000
					Terpeliharanya secara rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas								
4	1	2	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Terlaksanannya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	12 Bulan	25.000.000			25.000.000		12 Bulan	27.500.000
					Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas								
4	1	3		Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya pakaian dinas Bupati/ Wakil Bupati		60.000.000			60.000.000			66.000.000
4	1	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terbelinya pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 Paket	60.000.000			60.000.000		1 Paket	66.000.000
					Terpenuhinya pakaian dinas berserta perlengkapannya								
TOTAL PAGU 1							3.164.735.000			3.164.735.000			3.481.208.500
5	1	1		Belanja Pegawai			759.588.000			759.588.000			759.588.000
TOTAL PAGU 2							3.924.323.000			3.924.323.000			4.240.796.500

OPD: SETWAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5.000.000			5.000.000		12 Bulan	5.000.000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kontinuitas Kegiatan Perkantoran	12 Bulan	338.000.000			338.000.000		12 Bulan	338.000.000
4	1	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	51.000.000			51.000.000		12 Bulan	51.000.000
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	12 Bulan	309.000.000			309.000.000		12 Bulan	309.000.000
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	485.000.000			485.000.000		12 Bulan	485.000.000
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	45.000.000			45.000.000		12 Bulan	45.000.000
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	109.000.000			109.000.000		12 Bulan	109.000.000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	8.000.000			8.000.000		12 Bulan	8.000.000
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	122.000.000			122.000.000		12 Bulan	122.000.000
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	35.000.000			35.000.000		12 Bulan	35.000.000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	34.000 Liter	450.000.000			450.000.000		34.000 Liter	450.000.000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	12 Bulan	658.000.000			658.000.000		12 Bulan	658.000.000
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya kegiatan konsultasi ke pusat dan provinsi	12 Bulan	330.000.000			330.000.000		12 Bulan	330.000.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
4	1	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	10 Unit	66.000.000			66.000.000		10 Unit	66.000.000
4	1	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	7 Unit	295.000.000			295.000.000		7 Unit	295.000.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya perawatan gedung kantor	12 Bulan	243.000.000			243.000.000		12 Bulan	243.000.000
4	1	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	203.000.000			203.000.000		12 Bulan	203.000.000
4	1	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tepenuhinya kebutuhan pemeliharaan mebeleur	12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	10.000.000
4	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
4	1	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terkirim Peserta (Jumlah Pegawai) yang Mengikuti Pelatihan/Bintex	12 Orang	54.000.000			54.000.000		12 Orang	54.000.000
4	1	15		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	100%							
4	1	15	4	Rapat - rapat Paripurna	Terselenggaranya Rapat -rapat Paripurna	4 kali	473.000.000			473.000.000		4 kali	473.000.000
						-						-	
					tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD	225 stel	336.870.000			336.870.000		225 stel	336.870.000
					Terpenuhinya Jaminan Pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya	12 Bulan	175.000.000			175.000.000		12 bulan	175.000.000

OPD: SETWAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	15		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	100%							
4	1	15	1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Keputusan hasil pembahasan Propemperda	1 dokumen	1.650.000.000			1.650.000.000		1 dokumen	1.650.000.000
					Keputusan hasil pembahasan ranperda	18 ranperda	5.994.270.000			5.994.270.000		18 ranperda	5.994.270.000
					Keputusan hasil pengkajian Perda	1 dokumen	466.870.000			466.870.000		1 dokumen	466.870.000
					tersusunnya Naskah Akademis	10 Naskah akademik	415.000.000			415.000.000		10 naskah akademik	415.000.000
					Keputusan hasil pembahasan Peraturan DPRD	-						-	
4	1	15	1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terwujudnya KUA dan PPAS	1 dokumen	556.870.000			556.870.000		1 dokumen	556.870.000
					Terwujudnya KUPA dan PPAS Perubahan	1 dokumen	556.870.000			556.870.000		1 dokumen	556.870.000
					Keputusan hasil pembahasan APBD	1 ranperda	489.560.000			489.560.000		1 ranperda	489.560.000
					Keputusan hasil pembahasan APBD Perubahan	1 ranperda	489.560.000			489.560.000		1 ranperda	489.560.000
					terlaksananya pembahasan laporan smester	-						-	
					keputusan hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 ranperda	489.560.000			489.560.000		1 ranperda	489.560.000
4	1	15	3	Alat -alat kelengkapan Dewan	terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	12 bulan	1.000.000.000			1.000.000.000		12 bulan	1.000.000.000
					terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	12 bulan	1.000.000.000			1.000.000.000		12 bulan	1.000.000.000
					terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	12 Bulan	1.000.000.000			1.000.000.000		12 Bulan	1.000.000.000
					terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	12 bulan	1.000.000.000			1.000.000.000		12 bulan	1.000.000.000
					terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	-						-	
					terlaksananya pengawasan tindaklanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	-						-	
					terlaksananya pengawasan penggunaan anggaran	12 bulan	1.167.000.000			1.167.000.000		12 bulan	1.167.000.000
4	1	15	7	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	terlaksananya orientasi DPRD	-						-	
					terlaksananya bimbingan teknis DPRD	6 kegiatan	2.000.000.000			2.000.000.000		6 kegiatan	2.000.000.000
					terlaksanakannya publikasi dan dokumentasi kegiatan dewan	12 bulan	990.000.000			990.000.000		12 bulan	990.000.000
					-	-						-	
					Tersedianya tenaga ahli fraksi	12 bulan	135.000.000			135.000.000		12 bulan	
					terselenggaranya hubungan masyarakat	-						-	
					tersusunnya program kerja DPRD	1 dokumen	1.650.000.000			1.650.000.000		-	1.650.000.000
4	1	15	5	Kegiatan Reses	Terlaksananya kunjungan kerja DPRD dalam daerah	12 bulan	99.570.000			99.570.000		12 bulan	99.570.000
					tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	1 dokumen						1 dokumen	
					Terselenggaranya kegiatan Reses bagi pimpinan dan anggota DPRD	3 Tahap	8.175.000.000			8.175.000.000		3 Tahap	8.175.000.000

OPD: SETWAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	15	1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	tersusunnya kode etik DPRD	1 dokumen	600.000.000			600.000.000		1 dokumen	600.000.000
					terlaksananya pengawasan kode etik DPRD	12 bulan	550.000.000			550.000.000		12 bulan	550.000.000
4	1	15	3	Alat -alat kelengkapan Dewan	terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12 bulan	450.000.000			450.000.000		12 bulan	450.000.000
					terlaksananya penyusunan laporan kinerja Pimpinan DPRD	12 bulan	100.000.000			100.000.000		12 bulan	100.000.000
					terlaksananya undangan DPRD	12 bulan	250.000.000			250.000.000		12 bulan	250.000.000
TOTAL PAGU 1							36.076.000.000			36.076.000.000			35.941.000.000
5	1	1		Belanja Pegawai (SETWAN)			3.937.545.000			3.937.545.000			3.937.545.000
5	1	1		Belanja Pegawai (DPRD)			25.423.580.000			25.423.580.000			25.423.580.000
TOTAL PAGU 2							65.437.125.000			65.437.125.000			39.878.545.000

OPD: KECAMATAN BOYOLALI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	3			Pekerjaan umum dan penataan ruang									
1	3	40		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			86.070.000			86.070.000			100.000.000
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 paket	86.070.000			86.070.000		1 paket	100.000.000
					Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum								
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			50.000.000			50.000.000			58.000.000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan	12 bln	50.000.000			50.000.000		12 Desa / Kelurahan	58.000.000
					Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan								
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial		304.930.000			304.930.000			120.000.000
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa		1 Kegiatan						1 Kegiatan	95.000.000
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Cakupan fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap kecamatan	1 Kegiatan	219.930.000			219.930.000		1 Kegiatan	25.000.000
					Meningkatkan iman dan taqwa di kalangan masyarakat								
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kepemudaaan dan olah raga	1 Kegiatan	85.000.000			85.000.000		1 Kegiatan	95.000.000
					Terlaksananya partisipasi dalam kompetisi sepakbola antar kecamatan								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	Terlaksananya fasilitas penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan								
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kepemudaaan dan olah raga	1 Kegiatan						1 Kegiatan	
					Terlaksananya partisipasi dalam kompetisi sepakbola antar kecamatan								
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		400.000.000			400.000.000			400.000.000
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Tersedianya Jambanisasi masyarakat dan Pemugaran RTLH dan	1 Paket	400.000.000			400.000.000		1 Paket	400.000.000
					Tersedianya Jambanisasi masyarakat dan Pemugaran RTLH dan								
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan			50.000.000			50.000.000			63.000.000
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Meningkatnya kemampuan pengurus PKK dan tertib administrasi PKK di desa/kelurahan dan kecamatan	10 kali / Kelurahan	50.000.000			50.000.000		12 Desa / Kelurahan	63.000.000
					Meningkatnya kemampuan pengurus PKK dan tertib administrasi PKK di desa/kel dan kecamatan								

OPD: KECAMATAN BOYOLALI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	7	20		Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa /kelurahan			6.000.000			6.000.000			10.000.000
2	7	20	6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Terisinya buku administrasi keuangan desa/kelurahan	2 kegiatan	6.000.000			6.000.000		12 Desa / Kelurahan	10.000.000
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		495.475.000			495.475.000			313.000.000
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat	12 Bulan	900.000			900.000		12 Bulan	3.000.000
					Tercapainya tertib administasi surat menyurat								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	21.000.000			21.000.000		12 Bulan	45.000.000
					Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik air dan langganan koran								
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua dan roda empat	12 bulan	12.175.000			12.175.000			
					Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	12 Bulan	7.960.000			7.960.000		12 Bulan	10.000.000
					Terpeliharanya peralatan kantor								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	15.000.000			15.000.000		12 Bulan	22.000.000
					Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	18.000.000
					Tercukupinya penggandaan barang cetakan dan penggandaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon/bangunan kantor	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik/telepon	12 Bulan	6.000.000			6.000.000		12 Bulan	5.000.000
					Tercukupinya komponen instlasi listrik / telepon								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	134.000.000			134.000.000		3 Unit	17.000.000
					Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga	15 jenis	6.000.000			6.000.000		12 Bulan	6.000.000
					Tercukupinya peralatan rumah tangga kantor								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercukupinya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG	1 tahun	15.000.000			15.000.000		3.500 Liter	32.000.000
					Tercukupinya kebutuhan barang logistik kantor								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan dan miuman harian, rapat dan tamu	12 Bulan	83.840.000			83.840.000		12 Bulan	50.000.000
					Tersedianya makanan dan minuman								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya keikutsertaan rapat koordinasi	12 Bulan	30.000.000			30.000.000		12 Bulan	47.000.000
					Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terciptanya pelayanan administrasi yang baik	12 Bulan	153.600.000			153.600.000		12 Bulan	58.000.000
					Tercukupinya jasa administrasi perkantoran	1 kegiatan							

OPD: KECAMATAN BOYOLALI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		15.000.000			15.000.000			20.000.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terciptanya kenyamanan kantor	12 Bulan	15.000.000			15.000.000		12 Bulan	20.000.000
					Terciptanya kenyamanan kantor								
4	1	22		Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan			0			0			5.000.000
4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Terwujudnya pelayanan administrasi dan publik kecamatan	12 Bulan						12 Bulan	5.000.000
					Terwujudnya pelayanan administrasi dan publik kecamatan								
4	3			Perencanaan									
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel		0			0			12.000.000
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Tesusunnya data-data usulan pembangunan (DSP)	1 Dokumen						1 Dokumen	12.000.000
					Terlaksananya kegiatan Musrenbang								
TOTAL PAGU 1							1.407.475.000			1.407.475.000			1.148.500.000
5	1	1		Belanja Pegawai			4.248.169.000			4.248.169.000			4.248.169.000
TOTAL PAGU 2							5.655.644.000		-	5.655.644.000			5.396.669.000

OPD: KELURAHAN BANARAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			13.000.000			13.000.000			11.500.000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Tersedianya sarana prasarana anggota linmas	12 bulan	13.000.000			13.000.000		12 bulan	11.500.000
					Perpenuhinya kebutuhan anggota satuan linmas								
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan			5.025.000			5.025.000			28.750.000
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	terbinanya kegiatan di kalangan masyarakat	1 kegiatan	5.025.000			5.025.000		1 kegiatan	28.750.000
					Meningkatnya Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan			1.324.708.000			1.324.708.000			2.261.010.250
2	7	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya lembaga dan organisasi kemasyarakatan di pedesaan / kelurahan	12 bulan	327.400.000			327.400.000		12 bulan	541.627.000
					Meningkatnya lembaga dan organisasi kemasyarakatan di pedesaan / kelurahan								
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya kesehatan Masyarakat	1 kegiatan	11.200.000			11.200.000		1 kegiatan	19.383.250
					Meningkatnya kesehatan Masyarakat								
2	7	15	6	Pembangunan infrastruktur kelurahan	Terbangunya sarpras / infrastruktur kelurahan	5 paket	986.108.000			986.108.000		6 paket	1.700.000.000
					Terbangunya sarpras / infrastruktur kelurahan								
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan			4.800.000			4.800.000			30.736.625
2	7	19	3	Fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas PKK kabupaten/ desa/ kelurahan	terlaksananya pembinaan PKK	12 bulan	4.800.000			4.800.000		12 bulan	30.736.625
					terhindarnya pemuda dari penyalah gunaan obat obat terlarang								
2	13			Kepemudaan dan Olah Raga									
				Progran Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			7.275.000			7.275.000			8.000.000
2	13	16	5	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	terbinanya pemuda akan budaya jawa	12 Bulan	7.275.000			7.275.000		1 Kegiatan	8.000.000
					terhindarnya pemuda dari penyalah gunaan obat obat terlarang	12 Bulan							
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			273.708.000			231.828.000			148.438.500
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat	12 bulan	1.478.000			1.478.000		12 bulan	1.138.500
					Terkirimnya surat								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 bulan	31.475.000			31.475.000		12 bulan	19.550.000
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharaanya kendaraan dinas dan alat alat dinas	12 bulan	4.000.000			4.000.000		12 bulan	2.300.000

OPD: KELURAHAN BANARAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya dan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	6.000.000			6.000.000		12 bulan	4.025.000
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	15.000.000			15.000.000		12 bulan	8.050.000
					Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya pengadaan dan barang cetakan	12 bulan	8.000.000			8.000.000		12 bulan	8.050.000
					Terpenuhinya pengadaan dan barang cetakan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpeliharanya penerangan kantor	12 bulan	3.000.000			3.000.000		12 bulan	4.025.000
					Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	91.000.000			91.000.000		12 bulan	19.550.000
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	3.000.000			3.000.000		12 bulan	3.450.000
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbelinya majalah dan surat kabar	12 bulan	1.800.000			1.800.000		12 bulan	2.875.000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	784 l	3.000.000			3.000.000		915 l	7.000.000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan konsumsi untuk rapat dan tamu	12 bulan	58.075.000			58.075.000		12 bulan	33.465.000
					tersedianya kebutuhan makan dan minum								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya koordinasi antar kelurahan	12 bulan	6.000.000			6.000.000		12 bulan	11.500.000
					Meningkatnya koordinasi antar kelurahan								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan adm perkantoran		41.880.000			41.880.000			
				- Tenaga Kebersihan dan keamanan	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan adm perkantoran	12 bulan	41.880.000			41.880.000			
				- Tenaga Kebersihan dan keamanan		12 bulan				-		12 bulan	23.460.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-			-			11.500.000
4	1	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12 bulan	-			-		12 bulan	11.500.000
4	3			Perencanaan									
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah			2.100.000			2.100.000			7.000.000
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Tersusunnya Skala Prioritas Pembangunan Kelurahan	1 kegiatan	2.100.000			2.100.000		1 kegiatan	4.500.000
4	3	21	19	Penyusunan Profil Kelurahan	Tersedianya Profil Kelurahan	12 bulan				-		12 bulan	2.500.000
TOTAL							1.630.616.000			1.630.616.000			2.498.935.375

OPD: KELURAHAN PULISEN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			35.000.000			35.000.000			35.000.000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	12 bulan	35.000.000			35.000.000		12 bulan	35.000.000
					Terpenuhinya keamanan dan kenyamanan lingkungan								
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan			100.000.000			100.000.000			100.000.000
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat	1 kegiatan	100.000.000			100.000.000		1 kegiatan	100.000.000
					Terpenuhinya kegiatan keimanan dan ketaqwaan								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan			1.260.000.000			1.260.000.000			1.360.000.000
2	7	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	12 bulan	250.000.000			250.000.000		12 bulan	250.000.000
					Terpenuhinya kegiatan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan								
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya kesehatan masyarakat	1 kegiatan	10.000.000			10.000.000		1 kegiatan	10.000.000
					Terpenuhinya kesehatan masyarakat								
2	7	15	6	Pembangunan infrastruktur kelurahan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	5 paket	1.000.000.000			1.000.000.000		6 paket	1.100.000.000
					Terpenuhinya pembangunan dan sarana lokal kelurahan								
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perempuan		5.000.000			5.000.000			5.000.000
2	7	19	3	Fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas PKK kabupaten/ desa/ kelurahan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perempuan	12 bulan	5.000.000			5.000.000		12 bulan	5.000.000
					Terpenuhinya kegiatan organisasi perempuan								
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			249.000.000			249.000.000			263.000.000
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat	12 bulan	1.000.000			1.000.000		12 bulan	1.000.000
					Terlaksananya pengiriman surat								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	18.000.000			18.000.000		12 bulan	20.000.000
					Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik								
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua	12 bulan	2.500.000			2.500.000		12 bulan	2.500.000
					Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	12 bulan	5.000.000			5.000.000		12 bulan	5.000.000
					tersedianya peralatan kantor yang baik								

OPD: KELURAHAN PULISEN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	14.000.000			14.000.000		12 bulan	14.000.000
					terselenggaranya administrasi perkantoran								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12.000.000			12.000.000		12 bulan	12.000.000
					Tersedianya barang cetak dan penggandaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik/telepon	12 bulan	1.500.000			1.500.000		12 bulan	1.500.000
					Terpenuhinya komponen dan instalasi listrik								
5	2	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	50.000.000			50.000.000		12 bulan	50.000.000
					Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga	12 bulan	3.000.000			3.000.000		12 bulan	3.000.000
					Tercukupinya peralatan rumah tangga								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercukupinya kebutuhan BBM	8.000 liter	5.000.000			5.000.000		8.000 liter	5.000.000
					Terpenuhinya bahan logistik kantor								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan dan minuman harian, rapat dan tamu	12 bulan	70.000.000			70.000.000		12 bulan	70.000.000
					Terpenuhinya makanan dan minuman rapat								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	10.000.000			10.000.000		12 bulan	10.000.000
					Terpenuhinya koordinasi								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya tenaga kebersihan dan keamanan								
					Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran								
				- Tenaga Kebersihan dan keamanan		12 bulan	45.000.000			45.000.000		12 bulan	54.000.000
				- Tenaga Administrasi		12 bulan	12.000.000			12.000.000		12 bulan	15.000.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100.000.000			100.000.000			100.000.000
4	1	2		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang memadai	12 bulan	100.000.000			100.000.000		12 bulan	100.000.000
4	3			Perencanaan									
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya DSP usulan kegiatan kecamatan/kelurahan		2.550.000			2.550.000			2.550.000
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Terpenuhinya kegiatan musrenbang	1 kegiatan	550.000			550.000		1 kegiatan	550.000
					Tersusunnya DSP usulan kegiatan kecamatan/kelurahan								
4	3	21	19	Penyusunan Profil Kelurahan	Tersedianya Profil Kelurahan	12 bulan	2.000.000			2.000.000		12 bulan	2.000.000
					Terpenuhinya penyusunan profil kelurahan								
TOTAL							1.751.550.000			1.751.550.000			1.865.550.000

OPD: KELURAHAN SISWODIPURAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan			9.899.000			9.899.000			11.500.000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan terpenuhinya kebutuhan anggota satlinmas kelurahan	12 bulan	9.899.000			9.899.000		12 bulan	11.500.000
					Terciptanya keamanan dan terpenuhinya kebutuhan anggota satlinmas kelurahan								
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan			24.580.000			24.580.000			28.750.000
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan di wilayah kelurahan siswodipuran	1 kegiatan	24.580.000			24.580.000		1 kegiatan	28.750.000
					Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan di wilayah kelurahan siswodipuran								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	2			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat			1.237.835.000			1.237.835.000			2.261.010.250
2	7	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Meningkatkan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	12 bulan	470.980.000			470.980.000		12 bulan	541.627.000
					Meningkatkan pemberdayaan lembaga dan organisasi								
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Meningkatkan kesehatan di kalangan masyarakat	1 kegiatan	16.855.000			16.855.000		1 kegiatan	19.383.250
					Meningkatkan kesehatan di kalangan masyarakat								
2	7	15	6	Pembangunan infrastruktur kelurahan	Terbangunnya Infrastruktur di wilayah kelurahan	5 paket	750.000.000			750.000.000		6 paket	1.700.000.000
					Terwujudnya pembangunan sarana prasarana di wilayah kelurahan								
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan	Terlaksananya pembinaan PKK		26.727.500			26.727.500			30.736.625
2	2	19	3	Fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas PKK kabupaten/ desa/ kelurahan	Terbinanya organisasi PKK	12 bulan	26.727.500			26.727.500		12 bulan	30.736.625
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			123.762.000			123.762.000			148.438.500
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat	12 bulan	990.000			990.000		12 bulan	1.138.500
					Tersedianya jasa surat menyurat								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	12 bulan	15.200.000			15.200.000		12 bulan	19.550.000
					terpenuhinya sumber daya listrik, air dan telepon								
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda dua	12 bulan	2.000.000			2.000.000		12 bulan	2.300.000
					terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya perbaikan peralatan kantor yang baik	12 bulan	2.500.000			2.500.000		12 bulan	4.025.000
					Tersedianya perbaikan peralatan kantor yang baik								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	7.000.000			7.000.000		12 bulan	8.050.000
					Tersedianya Alat Tulis Kantor								

OPD: KELURAHAN SISWODIPURAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	6.116.000			6.116.000		12 bulan	8.050.000
					Tersedianya barang cetakan dan penggandaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 bulan	3.500.000			3.500.000		12 bulan	4.025.000
					Tersedianya komponen instalasi listrik								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang	12 bulan	17.000.000			17.000.000		12 bulan	19.550.000
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	3.000.000			3.000.000		12 bulan	3.450.000
					Tersedianya Peralatan Rumah Tangga								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran, majalah	12 bulan	2.500.000			2.500.000		12 bulan	2.875.000
					Tersedianya informasi								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan bakar minyak	784 l	4.456.000			4.456.000		915 l	7.000.000
					tersedianya bahan bakar minyak								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan minum rapat	12 bulan	29.100.000			29.100.000		12 bulan	33.465.000
					Tersedianya makan minum rapat								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatkan koordinasi dan peningkatan kapasitas	12 bulan	10.000.000			10.000.000		12 bulan	11.500.000
					Tercapainya Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya tenaga kebersihan dan keamanan kantor								
				- Tenaga Kebersihan dan keamanan	Tercapainya sedianya jasa tenaga kebersihan kantor	12 bulan	20.400.000			20.400.000		12 bulan	23.460.000
4	1	5		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			310.000.000			310.000.000			11.500.000
4	1	5	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terwujudnya bangunan gedung kantor yang memadai	12 bulan	10.000.000			10.000.000		12 bulan	11.500.000
				Pembangunan gedung kantor	terbangunnya bangunan PKK dan Gudang yang memadai	1 paket	300.000.000			300.000.000			
4	3			Perencanaan									
4	3	21	19	Program perencanaan pembangunan daerah			4.122.500			4.122.500			7.000.000
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan dalam RKP	1 kegiatan	4.122.500			4.122.500		1 kegiatan	4.500.000
4	3	21	19	Penyusunan Profil Kelurahan	Tersedianya Profil Kelurahan	12 bulan	-			-		12 bulan	2.500.000
TOTAL							1.761.506.000			1.761.506.000			2.498.935.375

OPD: KECAMATAN MUSUK

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	3			Pekerjaan umum dan penataan ruang									
1	3	40		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			100.000.000			100.000.000			100.000.000
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 Paket	100.000.000			100.000.000		1 Paket	100.000.000
					Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum (Jalan Evakuasi)								
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			50.000.000			50.000.000			50.000.000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan lingkungan yang kondusif		50.000.000			50.000.000			50.000.000
					keamanan lingkungan yang kondusif								
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan			195.270.000			195.270.000			195.270.000
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Terciptanya kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa		174.500.000			174.500.000			174.500.000
					Terlaksananya kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI								
					Terlaksananya kegiatan peringatan HUT Kabupaten								
					Bantuan alat Kewirausahaan								
					Keikutsertaan kontingen olahraga ke tingkat kabupaten								
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya safari romadhon dan berbuka puasa bersama		20.770.000			20.770.000			20.770.000
					Terlaksananya Kegiatan buka puasa bersama dengan Bupati/Wakil Bupati								
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan									-
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Bantuan alat Kewirausahaan		-			-			-
					Keikutsertaan kontingen olahraga ke tingkat kabupaten								
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			400.000.000			400.000.000			400.000.000
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa		10 Desa / Kelurahan	400.000.000			400.000.000		10 Desa / Kelurahan	400.000.000
					Air Bersih untuk Masyarakat								
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan			70.958.000			70.958.000		0	70.958.000
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terciptanya tertib administrasi organisasi perempuan	10 Desa / Kelurahan	70.958.000			70.958.000		10 Desa / Kelurahan	70.958.000
					administrasi organisasi perempuan tertib								
2	7	20		Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			9.000.000			9.000.000			9.000.000
2	7	20	2	Pengisian Perangkat Desa	Terisnya perangkat desa	10 Desa / Kelurahan	3.000.000			3.000.000		10 Desa / Kelurahan	3.000.000
2	7	20	6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan dana desa		6.000.000			6.000.000			6.000.000
					administrasi pengelolaan keuangan dana desa tertib								

OPD: KECAMATAN MUSUK

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			217.987.000			217.987.000			217.987.000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya langganan listrik, telepon, dan air	12 Bulan	29.760.000			29.760.000		12 Bulan	29.760.000
					Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terawatnya peralatan kerja kantor	12 Bulan	4.000.000			4.000.000		12 Bulan	4.000.000
					Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	16.477.000			16.477.000		12 Bulan	16.477.000
					Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	10.300.000			10.300.000		12 Bulan	10.300.000
					Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpenuhinya Peralatan Penerangan Tempat Kerja	12 Bulan	4.000.000			4.000.000		12 Bulan	4.000.000
					Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	20.000.000			20.000.000		1 paket	20.000.000
					Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	12 Bulan	3.000.000			3.000.000		12 Bulan	3.000.000
					Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran selama								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tepenuhinya berita atau informasi yang aktual	360 Buah	1.800.000			1.800.000		360 Buah	1.800.000
					Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	12 Bulan	17.000.000			17.000.000		12 Bulan	17.000.000
					Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	12 Bulan	50.050.000			50.050.000		12 Bulan	50.050.000
					Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi daerah	12 Bulan	40.000.000			40.000.000		12 Bulan	40.000.000
					Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terciptanya kelancaran tugas dan kebersihan kantor	12 Bulan	21.600.000			21.600.000		12 Bulan	21.600.000
					Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran selama								
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			313.000.000			313.000.000			313.000.000
4	1	2	19	Penataan Lingkungan Kantor	Terbangunnya penataan lingkungan kantor	1 Paket	-			-		1 Paket	-
					Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur								
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terciptanya kantor dan lingkungan kantor bersih dan nyaman	1 Paket	300.000.000			300.000.000		1 Paket	300.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur								
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 Bulan	13.000.000			13.000.000		12 Bulan	13.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur								
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			-			-			-
4	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		-			-			-
					Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD terkendali								

OPD: KECAMATAN MUSUK

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			-			-			
4	1	16	4	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/ perangkat kelurahan	Terciptanya koordinasi yang baik antar instansi tingkat kecamatan		-			-			-
					Koordinasi yang baik antar instansi tingkat kecamatan								
4	1	22		Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan			-			-			-
4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Terciptanya pelayanan yang cepat, ramah, mudah dan murah		-			-			
					Pelayanan administrasi masyarakat meningkat								
4	3			Perencanaan									
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah			-			-			-
4	3	21	9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Tersusunnya usulan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan					-			
					Tersusunnya Daftar Skala Prioritas								
4	3	21	16	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja SKPD		-			-			-
					Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan permendagri								
TOTAL PAGU 1							1.356.215.000			1.356.215.000			1.356.215.000
5	1	1		Belanja Pegawai			2.110.989.000			2.110.989.000			2.110.989.000
TOTAL PAGU 2							3.467.204.000		-	3.467.204.000			3.467.204.000

OPD: KECAMATAN TAMANSARI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan wajib Pelayanan Dasar									
1	3			Pekerjaan Umum dan penataan ruang									
1	3	40		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			100.000.000	-	-	100.000.000			
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 paket	100.000.000			100.000.000		1 paket	100.000.000
					Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum (Jalan Evakuasi)					-			
										-			
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat						-			
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			50.000.000	-	-	50.000.000			
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Keamanan lingkungan yang kondusif	10 Desa	50.000.000			50.000.000		10 Desa	50.000.000
					Lingkungan yang kondusif aman dan nyaman					-			
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan			195.200.000	-	-	195.200.000			
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI dan HUT Kab Boyolali, pengiriman tim sepak bola ke tingkat kabupaten dan bantuan alat wirausaha bagi pemuda	4 kegiatan	181.700.000			181.700.000		2 kegiatan	125.000.000
					Pelaksanaan kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI dan HUT Kab Boyolali yang tertip								
					keikutsertaan kontingen olah raga ke Kabupaten								
					Bantuan alat wirausahaan kepemudaan								
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan buka bersama dengan bupati/wakil bupati	1 kegiatan	13.500.000			13.500.000		1 kegiatan	13.500.000
					Kegiatan buka bersama bupati/wakil bupati terlaksana								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						-			
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						-			
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan			-	-	-	-			
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Kontingen olah raga kecamatan mengikuti ke tingkat kabupaten	1 kegiatan	-			-		1 kegiatan	100.000.000
					Kontingen kecamatan mengikuti ke tingkat kabupaten								
4	1	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			-	-	-	-			
4	1	16	4	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/perangkat kelurahan		4 kali	-			-		4 kali	-
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			400.000.000	-	-	400.000.000			
2	7	17	4	Monitoring evaluasi dan pelaporan			-			-			
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terciptanya infrastruktur Perdesaan	1 paket	400.000.000			400.000.000		1 paket	400.000.000
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan			53.000.000	-	-	53.000.000			
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Administrasi organisasi perempuan tertib	10 desa	53.000.000			53.000.000		10 desa	60.000.000
					administrasi organisasi perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku								

OPD: KECAMATAN TAMANSARI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	7	20		Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			6.000.000	-	-	6.000.000			
2	7	20	2	Pengisian Perangkat Desa	terisnya perangkat desa	10 desa	-			-		10 desa	-
2	7	20	6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Administrasi pengelolaan keuangan dana desa tertib	10 desa	6.000.000			6.000.000		10 desa	6.000.000
					Administrasi pengelolaan dana desa tertib								
2	7	20	7	Pembinaan administrasi desa/kelurahan		10 desa	-			-		10 desa	-
2	7	20	9	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes		10 desa	-			-		10 desa	-
2	7	20	10	Pembinaan dan pengawasan implementasi UU Desa		10 desa	-			-		10 desa	-
4	3			Perencanaan									
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen DSP, Renstra, Renja dan Evaluasi								
2	7	20		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Tersusunnya Daftar Prioritas	1 kegiatan	-			-		1 kegiatan	-
					Kesesuaian Kewenangan OPD dalam Pembangunan								
2	7	20		Penyusunan renstra dan renja SKPD	Dokumen perencanaan yang sesuai dengan permendagri	12 bulan	-			-		12 bulan	-
					Dokumen perencanaan yang sesuai dengan permendagri								
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran		440.265.000	-	-	440.265.000			
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	indikator output	12 bulan	900.000			900.000		12 bulan	900.000
					Indikator Outcame								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	21.700.000			21.700.000		12 bulan	30.000.000
					Peningkatan kinerja aparatur								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	7.500.000			7.500.000		12 bulan	7.500.000
					Meningkatnya kinerja aparatur								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	15.000.000			15.000.000		12 bulan	15.000.000
					Peningkatan kinerja aparatur								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	10.000.000			10.000.000		12 bulan	10.000.000
					Meningkatnya kinerja aparatur								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	2.500.000			2.500.000		12 bulan	5.000.000
					Peningkatan kinerja aparatur								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	174.500.000			174.500.000		12 bulan	170.000.000
					Peningkatan kinerja aparatur								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	10.000.000			10.000.000		12 bulan	7.500.000
					Peningkatan kinerja aparatur								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	1.500.000			1.500.000		12 bulan	2.000.000
					Peningkatan kinerja aparatur								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	16.500.000			16.500.000		12 bulan	17.500.000
					Peningkatan kinerja aparatur								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	68.385.000			68.385.000		12 bulan	80.000.000
					Peningkatan kinerja aparatur								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	45.000.000			45.000.000		12 bulan	45.000.000
					peningkatan kinerja aparatur								

OPD: KECAMATAN TAMANSARI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	66.780.000			66.780.000		12 bulan	72.000.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.299.500.000	-	-	1.299.500.000			
4	1	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana gedung kantor	1 paket	275.000.000			275.000.000		1 paket	100.000.000
					Peningkatan kinerja aparatur								
4	1	2	19	Penataan Lingkungan Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	1 paket	850.000.000			850.000.000		1 paket	200.000.000
					Peningkatan pelayanan kepada masyarakat								
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	160.000.000			160.000.000		12 bulan	25.000.000
					Peningkatan kinerja aparatur								
4	1	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Peningkatan kinerja aparatur	1 paket	-			-		1 paket	-
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	12 bulan	14.500.000			14.500.000		12 bulan	17.500.000
					Peningkatan kinerja aparatur								
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						-			
4	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		12 bulan	-			-		12 bulan	
4	1	22		Program penyelenggaraan pelayanan administrasi dan publik kecamatan						-			
4	1	22	1	Pelayanan administrasi dan publik kecamatan/kelurahan		12 bulan	-			-		12 bulan	
TOTAL PAGU 1							2.543.965.000			2.543.965.000			1.659.400.000
5	1	1		Belanja Pegawai			1.557.087.000			1.557.087.000			1.557.087.000
TOTAL PAGU 2							4.101.052.000		-	4.101.052.000			3.216.487.000

OPD: KECAMATAN MOJOSONGO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	3			Pekerjaan umum dan penataan ruang									
1	3	40		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan									
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum	1 Paket	100.000.000			100.000.000		1 Paket	100.000.000
					pembanguana dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum berjalan lancar								
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan									
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terpeliharanya keamanan lingkungan	13 Desa / Kelurahan	50.000.000			50.000.000		13 Desa / Kelurahan	50.000.000
					Keamanan Lingkungan								
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan									
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya hari besar	4 Kali	118.451.000			238.451.000		4 Kali	135.000.000
					Terlaksnanya kegiatan kepemudaan dan olahraga								
					Memahami rasa persatuan								
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terselenggaranya Tarqim dan MTQ di Kecamatan	13 Desa / Kelurahan	20.000.000			20.000.000		13 Desa / Kelurahan	45.000.000
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan									
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terlaksnanya kegiatan kepemudaan dan olahraga	13 Desa / Kelurahan	120.000.000			0		13 Desa / Kelurahan	120.000.000
					Kegiatan kepemudaan dan olahraga								
2	7	15	7	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan monitoring dan pelaporan	12 Bulan	0			0		12 Bulan	215.000.000
					Kegiatan monitoring dan pelaporan berjalan lancar								
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa									
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya pemberian stimulan	1 Paket	240.000.000			240.000.000		1 Paket	240.000.000
					Terlaksananya pembangunan jalan desa								
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan									
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terlaksananya pembinaan PKK	13 Desa / Kelurahan	114.000.000			114.000.000		13 Desa / Kelurahan	145.000.000
					Terbinanya organisasi PKK								
2	7	20		Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan									
2	7	20	6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Tertibnya administrasi desa	13 Desa / Kelurahan	6.000.000			6.000.000		13 Desa / Kelurahan	15.000.000
					Lancarnya administrasi desa								

OPD: KECAMATAN MOJOSONGO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
							Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang										
4	1			Administrasi Pemerintahan										
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat/ dokumen	12 Bulan	900.000			900.000		12 Bulan	900.000	
					Terkirimnya surat/ dokumen dinas									
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	35.284.000			35.284.000		12 Bulan	50.000.000	
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa kebersihan	12 Bulan	21.480.000			21.480.000		12 Bulan	24.000.000	
					Tercukupinya jasa kebersihan									
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	5.000.000			5.000.000		12 Bulan	15.000.000	
					Terpeliharanya peralatan kerja									
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	11.500.000			11.500.000		12 Bulan	11.500.000	
					Terpenuhinya alat tulis kantor									
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	5.000.000			5.000.000		12 Bulan	5.000.000	
					Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan									
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 Bulan	2.500.000			2.500.000		12 Bulan	3.500.000	
					Tercukupinya komponen listrik									
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	3.000.000			3.000.000		1 Paket	5.000.000	
					Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor									
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	360 Buah	1.500.000			1.500.000		360 Buah	2.000.000	
					Tercukupinya bahan bacaan									
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya BBM	12 Bulan	14.200.000			14.200.000		12 Bulan	20.000.000	
					Meningkatnya kelancaran tugas									
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	115.000.000			115.000.000		12 Bulan	90.000.000	
					Terpenuhinya makanan dan minuman									
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rakor dan konsultasi	12 Bulan	20.000.000			20.000.000		12 Bulan	20.000.000	
					Tindak lanjut hasil konsultasi dan koordinasi									
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terbayarnya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	25.529.000			25.529.000		12 Bulan	27.558.000	
					Tersedianya jasa administrasi perkantoran									
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
4	1	2	7	Pembangunan gedung kantor	Adanya gedung kantor	1 Paket	400.000.000			400.000.000		1 Paket	400.000.000	
					Adanya Bangunan Kantor									
4	1	2	19	Penataan Lingkungan Kantor	Tertatanya lingkungan kantor	1 Paket	45.000.000			45.000.000		1 Paket		
					Lingkungan kantor yang nyaman									
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	5.000.000			5.000.000		12 Bulan	5.000.000	
					gedung kantor dalam kondisi layak									
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas layak pakai	8 Unit	14.800.000			14.800.000		8 Unit	20.000.000	
					Terpeliharanya kendaraan dinas									
				Perencanaan										
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah										
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Terpantaunya rencana pengembangan	1 Kegiatan	0			0		1 Kegiatan	-	
					Kegiatan terprogram									
TOTAL PAGU 1							1.494.144.000			1.494.144.000			1.764.458.000	
5	1	1		Belanja Pegawai			3.478.904.000			3.478.904.000			3.478.904.000	
TOTAL PAGU 2							4.973.048.000			4.973.048.000			5.243.362.000	

OPD: KELURAHAN MOJOSONGO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		6.200.000			6.200.000			7.000.000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	12 bulan	6.200.000			6.200.000		12 bulan	7.000.000
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terciptanya pengembangan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat		7.300.000			7.300.000			8.000.000
1	5	17	6	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan,peningkatan iman dan Taqwa di kalangan masyarakat	1 kegiatan	7.300.000			7.300.000		1 kegiatan	8.000.000
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat kelurahan		1.027.993.000			1.027.993.000			1.054.383.250
2	7	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya koordinasi antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah kelurahan	12 bulan	234.000.000			234.000.000		12 bulan	235.000.000
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terciptanya masyarakat yang sehat dan berprestasi	1 kegiatan	17.052.000			17.052.000		1 kegiatan	19.383.250
2	7	15	6	Pembangunan infrastruktur kelurahan	Terbangunnya infrastruktur wilayah yang baik	5 paket	776.941.000			776.941.000		6 paket	800.000.000
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan	Meningkatnya kegiatan pembinaan organisasi perempuan kelurahan		3.000.000			3.000.000			5.000.000
2	7	19	2	Fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas PKK kabupaten/ desa/ kelurahan	Terciptanya tertib Administrasi PKK Kelurahan	12 bulan	3.000.000			3.000.000		12 bulan	5.000.000
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang baik		175.644.000			175.644.000			191.400.000
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya dokumen dan transaksi keuangan	12 bulan	1.200.000			1.200.000		12 bulan	1.300.000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komonikasi , Air dan Listrik	12 bulan	20.990.000			20.990.000		12 bulan	21.000.000
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 bulan	3.000.000			3.000.000		12 bulan	5.000.000
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	12 bulan	4.000.000			4.000.000		12 bulan	5.000.000
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 bulan	7.831.000			7.831.000		12 bulan	8.050.000
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebuuhan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	7.820.000			7.820.000		12 bulan	8.050.000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tercukupinya komponen instalasi listrik/ penerangan gedung dan telpon kantor	12 bulan	2.000.000			2.000.000		12 bulan	3.000.000
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	10.000.000			10.000.000		12 bulan	12.000.000
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya peralatan rumah tangga kantor	12 bulan	2.943.000			2.943.000		12 bulan	3.000.000
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya wawasan aparatur pemerintah	12 bulan	2.000.000			2.000.000		12 bulan	3.000.000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	liter	5.550.000			5.550.000		liter	6.000.000

OPD: KELURAHAN MOJOSONGO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan minuman pegawai	12 bulan	59.000.000			59.000.000		12 bulan	60.000.000
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi Tupoksi	12 bulan	5.000.000			5.000.000		12 bulan	6.000.000
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	44.310.000			44.310.000		12 bulan	50.000.000
				Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa Administrasi perkantoran	12 bulan							
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan Sarana dan parasarana Aparatur Pemerintah		708.000.000			708.000.000			243.000.000
4	1	2	3	Pembangunan gedung kantor	terbangunnya aula kentor kelurahan	12 bulan	700.000.000			700.000.000		12 bulan	235.000.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung kantor yang baik	12 bulan	8.000.000			8.000.000		12 bulan	8.000.000
4	3			Perencanaan									
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya Daftar Skala perioritas kegiatan kelurahan		700.000			700.000			7.500.000
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Tersusunya Daftar Skala Prioritas pembangunan kelurahan	1 kegiatan	700.000			700.000		1 kegiatan	7.500.000
TOTAL							1.928.837.000			1.928.837.000			1.516.283.250

OPD: KELURAHAN KEMIRI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan								
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan	12 bulan	12.600.000			12.600.000		12 bulan	12.600.000
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan iman dan taqwa								
1	5	17	6	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan iman dan taqwa	1 kegiatan	14.100.000			14.100.000		1 kegiatan	14.100.000
					Terpenuhinya Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olegraga								
2	7	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	12 bulan	398.350.000			398.350.000		12 bulan	515.000.000
					Terpenuhinya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan								
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga	2 kegiatan	17.900.000			17.900.000		2 kegiatan	18.900.000
					Terpenuhinya kegiatan kepemudaan dan olahraga								
2	7	15	6	Pembangunan infrastruktur kelurahan	Tersedianya infrastruktur di wilayah Kelurahan Kemiri	10 paket	1.000.000.000			1.000.000.000		10 paket	1.000.000.000
					Terpenuhinya pembangunan infrastruktur kelurahan								
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan								
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terciptanya PKK yang tertib administrasi	12 bulan	6.200.000			6.200.000		12 bulan	6.500.000
					Terpenuhinya kegiatan PKK								
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah								
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dinas dan dokumen laporan	12 bulan	1.200.000			1.200.000		12 bulan	1.800.000
					Terpenuhinya jasa surat menyurat								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi air dan listrik	12 bulan	15.840.000			15.840.000		12 bulan	25.200.000
					Terpenuhinya komunikasi, sumber daya air dan listrik								
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan	1.060.000			1.060.000		12 bulan	3.750.000
					Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	12 bulan	8.000.000			8.000.000		12 bulan	12.000.000
					Terlaksananya perbaikan peralatan kerja								

OPD: KELURAHAN KEMIRI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	8.000.000			8.000.000		12 bulan	10.000.000
					Tercukupinya alat tulis kantor								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	6.000.000			6.000.000		12 bulan	7.500.000
					Terlaksananya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpenuhinya komponen listrik dan penerangan bangunan	12 bulan	2.000.000			2.000.000		12 bulan	3.000.000
					Terlaksananya kebutuhan komponen instalasi listrik/telpon								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit	10.000.000			10.000.000		3 unit	30.000.000
					Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	12 bulan	2.000.000			2.000.000		12 bulan	3.500.000
					Tersedianya peralatan rumah tangga								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	372 buah	1.800.000			1.800.000		372 buah	1.800.000
					Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya bahan logistik kantor	250 liter	2.480.000			2.480.000		250 liter	2.528.000
					Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	29.235.000			29.235.000		12 bulan	73.720.000
					Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terjalinnya koordinasi dan konsultasi dan bertambahnya wawasan pegawai	12 bulan	9.000.000			9.000.000		12 bulan	17.500.000
					Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terpeliharanya kebersihan, kenyamanan dan keamanan								
					Terpenuhinya administrasi perkantoran								
				- Jasa tenaga kebersihan	Tersedianya tenaga keberihan kantor	12 bulan	12.000.000			12.000.000		12 bulan	24.000.000
				- Jasa tenaga penjaga malam, keamanan/saptam	Tersedianya tenaga keamanan lingkungan kantor	12 bulan	21.480.000			21.480.000		12 bulan	24.000.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah								
4	1	2	19	Penataan Lingkungan Kantor	Terpeliharanya lingkungan kantor	1 paket	5.060.000			5.060.000		1 paket	20.000.000
					Terpenuhinya penataan lingkungan kantor								
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	10.000.000			10.000.000		12 bulan	10.000.000
					Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor								
4	1	22		Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan/Kelurahan	Terlaksananya fungsi layanan di kecamatan								
4	1	22	1	Pelayanan administrasi dan publik kecamatan/keluraahan	Terlaksananya fungsi pelayanan di kelurahan	12 bulan	10.000.000			10.000.000		12 bulan	20.000.000
					Terpenuhinya pelayanan administrasi dan publik kecamatan/kelurahan								

OPD: KELURAHAN KEMIRI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	3			Perencanaan									
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya informasi rencana pembangunan wilayah								
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Tersusunnya DSP usulan kegiatan kecamatan/kelurahan	1 dok	1.000.000			1.000.000		1 dok	1.000.000
					Terpenuhinya kegiatan musrenbang								
4	3	21	19	Penyusunan Profil Kelurahan	Terpenuhinya data-data kelurahan	1 dok	10.000.000			10.000.000		1 dok	10.000.000
					Tersedianya profil kelurahan								
TOTAL							1.615.305.000	-	-	1.615.305.000	-	-	1.868.398.000

OPD: KECAMATAN TERAS

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	3			Pekerjaan umum dan penataan ruang									
1	3	40		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			100.000.000			100.000.000			100.000.000
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 Paket	100.000.000			100.000.000		1 Paket	100.000.000
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	cakupan pengendalian keamanan lingkungan		50.000.000			50.000.000			50.000.000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	terlaksananya kegiatan patroli keamanan wilayah	12 bulan	50.000.000			50.000.000		12 bulan	50.000.000
					Tersedianya bantuan untuk keamanan wilayah								
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	cakupan fasilitas pengembangan nilai- nilai wawasan kebangsaan disetiap kecamatan /kelurahan dan cakupan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan		195.000.000			195.000.000			195.000.000
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peringatan hari jadi Kabupaten Boyolali	4 Keg	175.000.000			175.000.000		4 Keg	175.000.000
					Terlaksanya peringatan HUT RI								
					terlaksananya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga								
					Tersedianya bantuan alat kewirusahaan								
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	terlaksananya kegiatan pembinaan peningkatan iman dan taqwa di kalangan masyarakat yang di laksanakan	2 Keg	20.000.000			20.000.000		2 Keg	20.000.000
					Tersedianya anggaran untuk buka bersama Bupati dan pengiriman lomba MTQ								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah,bantuan sosial dan bantuan keuangan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga		400.000.000			400.000.000			400.000.000
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	terlaksananya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga								
2	7	15	4	Fasilitasi kegiatan dana belanja hibah dan bantuan sosial	terlaksananya fasilitasi belanja hibah dan bantuan sosial	13 Desa	400.000.000			400.000.000		13 Desa	400.000.000
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan			50.000.000			50.000.000			50.000.000
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	jumlah organisasi PKK desa yang aktif	1 Keg	50.000.000			50.000.000		1 Keg	50.000.000
					Tersedianya bantuan untuk peningkatan peran perempuan								

OPD: KECAMATAN TERAS

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	7	20		Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			6.000.000			6.000.000			10.000.000
2	7	20	7	Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	jumlah desa yang dibina	13 Desa	6.000.000			6.000.000		13 Desa	10.000.000
					tertibnya administrasi desa								
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya pengiriman surat menyurat		282.500.000			282.500.000			573.000.000
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya pengiriman surat menyurat	12 Bulan	1.500.000			1.500.000		12 Bulan	5.000.000
					terpenuhinya kebutuhan penanganan surat- surat dinas								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terbayarnya rekening,telpon,listrik air dan internet	12 Bulan	33.650.000			33.650.000		12 Bulan	50.000.000
					tersedianya kebutuhan telpon,sumbert daya air dan listrik								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terpeliharanya peralatan kantor	12 Bulan	8.000.000			8.000.000		12 Bulan	10.000.000
					peralatan kerja dalam kondisi baik								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	15.000.000			15.000.000		12 Bulan	20.000.000
					terpenuhinya alat tulis kantor								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	15.000.000
					terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dokumen								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	tersedianya komponen instalasi listrik,telpon	12 Bulan	4.000.000			4.000.000		12 Bulan	10.000.000
					terpenuhinya komponen listrik/telpon								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya mebeleur perkantoran	12 Bulan	25.000.000			25.000.000		12 Bulan	200.000.000
					tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	12 Bulan	4.000.000			4.000.000		12 Bulan	15.000.000
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga	12 Bulan	3.000.000			3.000.000		12 Bulan	10.000.000
					terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	360 buah	1.600.000			1.600.000		360 buah	3.000.000
					terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan bakar minyak (bbm) dan LPG	2500 ltr	17.000.000			17.000.000		2500 ltr	25.000.000
					terpenuhinya kebutuhan bahan bakar minyak dan gas								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makan dan minum harian,rapat dan tamu	12 Bulan	70.250.000			70.250.000		12 Bulan	75.000.000
					terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai ,rapat dan tamu								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	45.000.000			45.000.000		12 Bulan	50.000.000
					terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	terbayarnya tenaga administrasi perkantoran	12 Bulan	44.500.000			44.500.000		12 Bulan	85.000.000

OPD: KECAMATAN TERAS

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			72.700.000			72.700.000			100.000.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	25.000.000
					gedung kantor dalam kondisi layak								
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12 Bulan	12.700.000			12.700.000		12 Bulan	25.000.000
					tersedianya kendaraan dinas dalam kondisi layak dan siap pakai								
4	1	2	19	Penataan Lingkungan Kantor	terlaksananya penataan lingkungan kantor	12 Bulan	50.000.000			50.000.000		12 Bulan	50.000.000
4	1	22		Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan			-			-			-
4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	terselenggaranya pelayanan administrasi publik kecamatan								
					terlaksananya fungsi pelayanan kecamatan								
TOTAL PAGU 1							1.156.200.000			1.156.200.000			1.478.000.000
5	1	1		Belanja Pegawai			2.072.961.000			2.072.961.000			2.072.961.000
TOTAL PAGU 2							3.229.161.000			3.229.161.000			3.550.961.000

OPD: KECAMATAN BANYUDONO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	3			Pekerjaan umum dan penataan ruang									
1	3	40		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			100.000.000			100.000.000			125.000.000
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 Paket	100.000.000			100.000.000		1 Paket	125.000.000
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			50.000.000			50.000.000			50.000.000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	15 Desa / Kelurahan	50.000.000			50.000.000		15 Desa / Kelurahan	50.000.000
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	cakupan fasilitas pengembangan nilai- nilai wawasan kebangsaan disetiap kecamatan/kelurahan dan cakupan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan		134.450.000			134.450.000			120.000.000
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa	jumlah kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai bangsa yang di laksanakan	3 Kegiatan	121.000.000			121.000.000		2 Kegiatan	100.000.000
					cakupan kegiatan fasilitas pengembangan nilai-nilai luhur bangsa yang dilaksanakan								
					terlaksananya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga								
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	jumlah kegiatan pembinaan peningkatan iman dan taqwa di kalangan masyarakat yang di laksanakan	1 Kegiatan	13.450.000			13.450.000		1 Kegiatan	20.000.000
					cakupan fasilitas pembinaan,peningkatan iman dan taqwa di kalangan masyarakat								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah,bantuan sosial dan bantuan keuangan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga		-			-			30.000.000
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	terlaksananya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga	1 Kegiatan	-			-		1 Kegiatan	30.000.000
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			400.000.000			400.000.000			200.000.000
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya pemberian stimulan pembangunan desa	1 Kegiatan	400.000.000			400.000.000		1 Kegiatan	200.000.000
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan			50.000.000			50.000.000			50.000.000
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Meningkatnya peran perempuan pengurus PKK dan tertib administrasi PKK di desa/kelurahan	15 Desa / Kelurahan	50.000.000			50.000.000		15 Desa / Kelurahan	50.000.000
2	7	20		Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			6.000.000			6.000.000			3.000.000
2	7	20	6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Tertibnya administrasi desa	15 Desa / Kelurahan	6.000.000			6.000.000			

OPD: KECAMATAN BANYUDONO

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
							Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	7	20	7		Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	Terwujudnya tertib administrasi desa	15 Desa / Kelurahan	-			-		15 Desa / Kelurahan	1.500.000
2	7	20	9		Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terciptanya APBDes sesuai ketentuan yang berlaku	15 Desa / Kelurahan	-			-		15 Desa / Kelurahan	1.500.000
4					Urusan Fungsi Penunjang									
4	1				Administrasi Pemerintahan									
4	1	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			318.225.000			318.225.000			371.260.000
4	1	1	1		Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya surat menyurat	12 Bulan	1.000.000			1.000.000		12 Bulan	1.000.000
						terkirimnya surat								
4	1	1	2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik, air dan langganan koran	12 Bulan	46.000.000			46.000.000		12 Bulan	48.000.000
						terbayarnya tagihan rekening listrik, surat kabar, telepon dan air								
4	1	1	9		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	12 Bulan	6.000.000			6.000.000		12 Bulan	14.000.000
4	1	1	10		Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	15.000.000			15.000.000		12 Bulan	20.000.000
4	1	1	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	9.000.000			9.000.000		12 Bulan	10.000.000
4	1	1	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik/telepon	12 Bulan	3.000.000			3.000.000		12 Bulan	5.000.000
4	1	1	13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Tercukupiya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit	35.000.000			35.000.000		3 Unit	23.000.000
4	1	1	14		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupiya kebutuhan peralatan rumah tangga	12 Bulan	3.000.000			3.000.000		12 Bulan	5.000.000
4	1	1	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	12 Bulan	2.000.000			2.000.000		12 Bulan	2.500.000
						terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan								
4	1	1	16		Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan bakar minyak (bbm) dan LPG	12 Bulan	12.590.000			12.590.000		12 Bulan	15.000.000
						terpenuhinya kebutuhan bahan bakar minyak dan gas								
4	1	1	17		Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan dan minuman harian, rapat dan tamu	12 Bulan	60.000.000			60.000.000		12 Bulan	80.000.000
4	1	1	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya keikutsertaan rapat koordinasi	12 Bulan	37.475.000			37.475.000		12 Bulan	50.000.000
4	1	1	19		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya tenaga kebersihan kantor, penjaga malam dan tenaga kontrak	12 Bulan	88.160.000			88.160.000		12 Bulan	97.760.000
							12 Bulan						12 Bulan	
4	1	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			17.750.000			17.750.000			40.000.000
4	1	2	3		Pembangunan gedung kantor	Terbangunya Dapur dan Parkir Kendaraan								
4	1	2	22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	7.000.000			7.000.000		12 Bulan	25.000.000
4	1	2	24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	12 Bulan	10.750.000			10.750.000		12 Bulan	15.000.000
4	1	6			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			-			-			2.000.000
4	1	6	1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya perjanjian kinerja, LKJIP, LKPJ dan LPPD	3 Dokumen	-			-		3 Dokumen	1.000.000
4	1	6	4		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	-			-		1 Dokumen	1.000.000

OPD: KECAMATAN BANYUDONO

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
							Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	1	16			Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			4.500.000			4.500.000			4.125.000	
4	1	16	4		Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/ perangkat kelurahan	Terlaksananya Rakor pejabat pemerintahan/kelurahan/desa	12 Kali	4.500.000			4.500.000		12 Kali	4.125.000	
4	1	22			Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan			-			-			1.250.000	
4	1	22	1		Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Terwujudnya pelayanan administrasi dan publik kecamatan	4 K4giatan	-			-		4 K4giatan	1.250.000	
4	3				Perencanaan										
4	3	21			Program perencanaan pembangunan daerah			-			-			2.500.000	
4	3	21	15		Monitoring dan Evaluasi RKPDes	Terlaksananya monitoring dan evaluasi RKPDes	15 Desa / Kelurahan	-			-		15 Desa / Kelurahan	1.000.000	
4	3	21	18		Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Tersusunnya data data usulan pembangunan (Daftar Skala Prioritas)	1 Dokumen	-			-		1 Dokumen	1.500.000	
TOTAL PAGU 1								1.080.925.000			1.080.925.000			999.135.000	
5	1	1			Belanja Pegawai			2.808.209.000			2.808.209.000			2.808.209.000	
TOTAL PAGU 2								3.889.134.000			-		3.889.134.000		3.807.344.000

OPD: KECAMATAN SAWIT

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	3			Pekerjaan umum dan penataan ruang									
1	3	40		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			100.000.000			100.000.000			100.000.000
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana	1 Paket	100.000.000			100.000.000		1 Paket	100.000.000
					Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan								
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			50.000.000			50.000.000			50.000.000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	12 desa/kel	50.000.000			50.000.000		12 desa/kel	50.000.000
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan			196.000.000			196.000.000			196.000.000
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur	Jumlah kegiatan peringatan HUT RI dan HUT Boyolali	4 Keg	176.000.000			176.000.000		4 Keg	176.000.000
					Terlaksananya kegiatan peringatan HUT RI dan HUT								
					Tergalinya potensi olah raga daerah								
					Bantuan alat kewirausahaan								
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan	Terlaksananya pembinaan peningkatan Iman dan	1 Keg	20.000.000			20.000.000		1 Keg	20.000.000
					Terwujudnya pembinaan peningkatan Iman dan								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat			-			-			-
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Tergalinya potensi olah raga daerah	2 keg	-			0		2 keg	-
					Meningkatnya prestasi Olah raga								
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			400.000.000			400.000.000			400.000.000
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya pemberian stimulan pembangunan	1 keg	400.000.000			400.000.000		1keg	400.000.000
					Terwujudnya pemberian stimulan pembangunan								
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan			50.000.000			50.000.000			50.000.000
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam	12 desa/kel	50.000.000			50.000.000		12 desa/kel	50.000.000
					Terwujudnya peningkatan partisipasi perempuan								
2	7	20		Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			6.000.000			6.000.000			6.000.000
2	7	20	6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya sosialisasi pendampingan pengelolaan	1 keg	6.000.000			6.000.000		1 keg	6.000.000
					Terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik								

OPD: KECAMATAN SAWIT

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			284.995.000			284.995.000			314.890.000
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terdistribusinya surat menyurat	12 Bulan	900.000			900.000		12 Bulan	1.200.000
					Tercapainya tertib administrasi surat menyurat								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya jasa komunikasi, sumber daya air dan	12 Bulan	38.100.000			38.100.000		12 Bulan	48.600.000
					Terbayarnya tagihan pajak listrik dan telepon								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terawatnya peralatan kantor	12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	11.000.000
					Terwujudnya peralatan kerja yang memadai								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	12 Bulan	15.000.000			15.000.000		12 Bulan	17.000.000
					Terwujudnya peralatan kerja yang memadai								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	12.000.000
					Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	12 Bulan	3.000.000			3.000.000		12 Bulan	5.000.000
					Terwujudnya kantor yang nyaman dan memadai								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	12 Bulan	3.000.000			3.000.000		12 Bulan	5.000.000
					Terwujudnya kebutuhan peralatan rumah tangga								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Tersedianya bahan bacaan	360 buah	1.440.000			1.440.000		360 buah	1.440.000
					Terpenuhinya bahan bacaan								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercukupinya kebutuhan bahan bakar minyak	1600 lt	16.000.000			16.000.000		1800 lt	18.000.000
					Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kerja								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum pegawai dan tamu	12 Bulan	68.905.000			68.905.000		12 Bulan	72.000.000
					Terpenuhinya makan dan minum pegawai dan tamu								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan ke luar	12 Bulan	45.000.000			45.000.000		12 Bulan	50.000.000
					Lancarnya pelaksanaan tugas								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terbayarnya gaji pihak ketiga	12 Bulan	73.650.000			73.650.000		12 Bulan	73.650.000
					Terpenuhinya pembayaran jasa pihak ketiga								
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			33.000.000			33.000.000			35.000.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor	12 Bulan	20.000.000			20.000.000		12 Bulan	20.000.000
					Terwujudnya gedung kantor yang memadai								
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas	12 Bulan	13.000.000			13.000.000		12 Bulan	15.000.000
					Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan								
TOTAL PAGU 1							1.119.995.000			1.119.995.000			1.151.890.000
5	1	1		Belanja Pegawai			2.467.962.000			2.467.962.000			2.467.962.000
TOTAL PAGU 2							3.587.957.000		-	3.587.957.000			3.619.852.000

OPD : KECAMATAN SAMBI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
												11
4				Urusan Fungsi Penunjang								
4	1			Administrasi Pemerintahan								
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan administrasi perkantoran							
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	1.500.000			1.500.000		12 bulan
					Terpenuhinya administrasi jasa surat menyurat							
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya seluruh tagihan rekening telpon air dan listrik	12 bulan	57.000.000			57.000.000		12 bulan
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor	12 bulan	10.000.000			10.000.000		12 bulan
					Terpeliharanya peralatan kerja							
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	15.000.000			15.000.000		12 bulan
4	1	1	11	Penyediaan barang cetaan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	10.000.000			10.000.000		12 bulan
					Tercukupinya barang cetakan dan kebutuhan penggandaan							
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya kebutuhan alat penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.000.000			1.000.000		12 bulan
					Tercukupinya kebutuhan alat / komponen penerangan bangunan kantor							
4	1	1	13	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	30.000.000			30.000.000		12 bulan
					tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan							
4	1	1	14	penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	3.000.000			3.000.000		12 bulan
					Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga							
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	350 buah	1.500.000			1.500.000		12 bulan
					Terpenuhinya bahan bacaan							
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya kebutuhan bahan minyak	2.375 liter	19.000.000			19.000.000		12 bulan
					Tercukupinya kebutuhan BBM untuk mobilitas kegiatan kecamatan							
4	1	1	17	Penyediaan makan dan minum	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	12 bulan	108.950.000			108.950.000		12 bulan
					Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai/tamu							
4	1	1	18	Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rakor dan konsultasi tingka kabupaten dan luar daerah	12 bulan	45.000.000			45.000.000		12 bulan
					Lancarnya pelaksanaan tugas							
4	1	1	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersdianya gaji PTT dan Tenaga Kontrak	12 bulan	66.000.000			66.000.000		12 bulan
					Terpenuhinya gaji PTT dan Tenaga kontrak							
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan sarana dan prasarana aparatur							
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	12.500.000			12.500.000		12 bulan
					Terwujudnya Gedung kantor dalam kondisi layak/baik							
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	12 bulan	13.500.000			13.500.000		12 bulan
					Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang layak pakai							
2	7			Pemberdayaan masyarakat dan desa								
2	7	1		Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan kelurahan	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga							
2	7	1	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga	Terlaksananya faslitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga	1 kegiatan	-			-		1 kegiatan
					Jumlah kegiatan turnamen olah raga yang diikuti							

OPD : KECAMATAN SAMBI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	2		Program penyelenggaraan pelayanan administrasi dan publik kecamatan	Terlaksananya fungsi layanan di kecamatan								
4	1	2	1	Pelayanan administrasi dan publik kecamatan/ kelurahan	Terlaksananya fungsi pelayanan administrasi publik di kecamatan	12 bulan						12 bulan	1.000.000
					Terwujudnya fungsi pelayanan administrasi publik di kecamatan								
1	3			Pekerjaan umum dan penataan ruang									
1	3	40		Program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kecamatan									
1	3	40	1	pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 paket	100.000.000			100.000.000		1 paket	200.000.000
4	3			Perencanaan									
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen DSP, Renstra, Renja dan evaluasi								
4	3	21	18	Musrenbang kecamatan/desa/kelurahan	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	1 dokumen						1 dokumen	10.000.000
					Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan								
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan									
1	5	15	5	pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	16 desa/ kelurahan	50.000.000			50.000.000		16 desa/ kelurahan	50.000.000
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan fasilitasi pengembangan nilai- nilai kebangsaan								
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan memperingati hari- hari besar	4 kegiatan	283.500.000			283.500.000		4 kegiatan	250.000.000
					Terlaksananya faslitasi penyelengaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga								
					Jumlah kegiatan memperingati HUT RI dan hari besar lainnya								
1	5	17	5	Pembinaan, peningkatan iman dan taqwa di kalangan masyarakat	Terlaksananya kegiatan keagamaan	1 kegiatan	9.600.000			9.600.000		1 kegiatan	20.000.000
					Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan								
2	7	20		Program pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan									
2	7	20	6	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	jumlah desa yang di dampingi	16 desa/ kelurahan	6.000.000			6.000.000		16 desa/ keluarga	10.000.000
					jumlah desa yang tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa								
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa									
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya pelaksanaan stimulan pembangunan desa	1 kegiatan	400.000.000			400.000.000		1 kegiatan	800.000.000
					terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan	16 desa/ kelurahan	50.000.000			50.000.000			

OPD : KECAMATAN SAMBI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/ kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan								
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/ kelurahan	Terlaksananya rakor organisasi perempuan							12 bulan	70.000.000
					Terwujudnya rakor organisasi perempuan tingkat kecamatan								
TOTAL PAGU 1							1.293.050.000			1.293.050.000			1.780.500.000
5	1	1		Belanja Pegawai			2.555.210.000			2.555.210.000			2.555.210.000
TOTAL PAGU 2							3.848.260.000			3.848.260.000			4.335.710.000

OPD : KECAMATAN NGEMPLAK

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022				
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
1	3	40		Pekerjaan umum dan penataan ruang											
1	3	40		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan				100.000.000				100.000.000			100.000.000
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 paket	100.000.000			100.000.000			1 paket		100.000.000
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat											
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				54.000.000				54.000.000			58.000.000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif	12 Desa / Kelurahan	54.000.000			54.000.000			12 Desa / Kelurahan		58.000.000
					Tersediany a dana untuk pengendalian keamanan lingkungan										
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				191.550.000				191.550.000			120.000.000
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hari jadi Boyolali dan HUT RI	2 Kegiatan	172.150.000			172.150.000			1 Kegiatan		95.000.000
					Tersedianya dana dalam rangka peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kab Boyolali										
					Terlaksananya keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga	1 Kegiatan									
					Bantuanalat kewira usahaan bagi kepemudaan	1 Kegiatan									
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat	1 Kegiatan	19.400.000			19.400.000			1 Kegiatan		25.000.000
					Tersedianya anggaran untuk buka bersama Bupati dan pengiriman lomba MTQ										
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan				0				0			95.000.000
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga	1 Kegiatan	0			0			1 Kegiatan		95.000.000
					tersedianya dana untuk kegiatan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga										
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				400.000.000				400.000.000			400.000.000
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	terlaksana nya pemberian stimulan pembangunan desa	1 Paket	400.000.000			400.000.000			1 Paket		400.000.000
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan		Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan		58.000.000				58.000.000			63.000.000
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Tersedianya dana untuk pembinaan organisasi perempuan	12 Desa / Kelurahan	58.000.000			58.000.000			12 Desa / Kelurahan		63.000.000
2	7	20		Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan				6.000.000				6.000.000			16.000.000
2	7	20	6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Keuangan daerah yang akuntabel	12 Desa / Kelurahan	6.000.000			6.000.000			12 Desa / Kelurahan		10.000.000
					Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa										
2	7	20	9	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terciptanya APBDes dan administrasi desa sesuai ketentuan yang berlaku	12 Desa / Kelurahan	0			0			12 Desa / Kelurahan		6.000.000
					Terlaksananya kegiatan evaluasi administrasi desa										

OPD : KECAMATAN NGEMPLAK

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			266.270.000			266.270.000			316.600.000
	4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya pengiriman surat menyurat	12 Bulan	1.800.000		1.800.000		12 Bulan	3.000.000
					Tersedianya dana untuk jasa surat menyurat								
	4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah langganan telepon, listrik dan air yang terbayar	12 Bulan	37.000.000		37.000.000		12 Bulan	45.000.000
					Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik								
	4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	memperlancar kegiatan administrasi kantor	12 Bulan	7.000.000		7.000.000		12 Bulan	10.000.000
					Tersedianya anggaran perbaikan peralatan kerja								
	4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk kelancaran tugas	12 Bulan	18.000.000		18.000.000		12 Bulan	22.000.000
					Tersedianya alat tulis kantor								
	4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	13.300.000		13.300.000		12 Bulan	18.000.000
					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan								
	4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	kontinuitas kegiatan perkantoran terkait penyediaan komponen listrik	12 Bulan	2.460.000		2.460.000		12 Bulan	5.000.000
					Tersedianya komponen instalasi listril/telepon								
	4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	memperlancar aktifitas kegiatan kantor	3 Unit	13.000.000		13.000.000		3 Unit	17.000.000
					Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor								
	4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	3.500.000		3.500.000		12 Bulan	6.000.000
					Tersedianya anggaran untuk penyediaan peralatan rumah tangga								
	4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bertambahnya wawasan pengetahuan umum dan sosial	360 Buah	1.800.000		1.800.000		360 Buah	3.600.000
					Tersedianya dana untuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangann								
	4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	memperlancar penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	3.500 Liter	24.000.000		24.000.000		3.500 Liter	32.000.000
					Tersedianya anggaran untuk penyediaan bahan logistik kantor								
	4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	55.410.000		55.410.000		12 Bulan	50.000.000
					Tersedianya anggaran makanan dan minuman kantor								
	4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terwujudnya kereja sama lintas sektoral	12 Bulan	45.000.000		45.000.000		12 Bulan	47.000.000
					Tersedianya anggaran perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi SKPD								
	4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	terpeliharanya kebersihan dan keamanan kantor		0		0		12 Bulan	58.000.000
					Tersedianya anggaran jasa administrasi, jasa kebersihan dan penjaga malam								
					terpeliharanya kebersihan dan keamanan kantor		12 Bulan	44.000.000		44.000.000			
					Tersedianya anggaran jasa administrasi, jasa kebersihan dan penjaga malam								
	4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah		18.000.000		18.000.000			35.000.000
	4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terwujudnya kenyamanan kantor	12 Bulan	8.000.000		8.000.000		12 Bulan	20.000.000
					Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor								
	4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	memperpanjang umur ekonomis kendaraan kantor	12 Buah	10.000.000		10.000.000		12 Buah	15.000.000
					Tersedianya anggaran perawatan dan perizinan kendaraan dinas								
	4	1	22		Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan			0		0			5.000.000
	4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Terwujudnya kelancaran dalam pelayanan masyarakat	12 Bulan	0		0		12 Bulan	5.000.000

OPD : KECAMATAN NGEMPLAK

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					tersedianya dana untuk penyelenggaraan pelayanan administrasi dan publik kecamatan/kelurahan								
4	3			Perencanaan									
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah	tersusunnya dokumen RPJMD dan RKPD		0			0			12.000.000
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Terwujudnya Dokumen Hasil Musrenbang (DSP)	1 Dokumen	0			0		1 Dokumen	12.000.000
					Terlaksananya Musrenbang Kecamatan								
TOTAL PAGU 1							1.093.820.000			1.093.820.000			1.220.600.000
5	1	1		Belanja Pegawai			2.112.024.000			2.112.024.000			2.112.024.000
TOTAL PAGU 2							3.205.844.000		-	3.205.844.000			3.332.624.000

OPD : KECAMATAN SIMO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	3			Pekerjaan umum dan penataan ruang									
1	3	40		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			100.000.000			100.000.000			100.000.000
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Terlaksananya pembangunan sarana prasarana umum	1 Paket	100.000.000			100.000.000		1 Paket	100.000.000
					Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana umum								
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			50.000.000			50.000.000			50.000.000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya kegiatan patroli wilayah.	12 bulan	50.000.000			50.000.000		12 bulan	50.000.000
					Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan								
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan			176.000.000			176.000.000			176.000.000
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan memperingati hari besar HUT RI dan Hari Besar lainnya.	3 Keg	91.000.000			91.000.000		3 Keg	91.000.000
					Terlaksananya kegiatan memperingati hari besar HUT RI dan Hari Besar lainnya.								
					Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	1 Keg	85.000.000			85.000.000		1 Keg	85.000.000
							20.000.000			20.000.000			20.000.000
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan	Terlaksananya kegiatan keagamaan	1 Keg	20.000.000			20.000.000		1 Keg	20.000.000
					Terlaksananya kegiatan pembinaan, peningkatan Iman dan Taqwa dikalangan masyarakat								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan			-			-			-
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	1 Keg	-			-		1 Keg	-
					Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga								
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			400.000.000			400.000.000			400.000.000
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Betonisasi jalan Dk. Pancuran Desa Pentur-Dk Jeringan Desa walen	1 keg	400.000.000			400.000.000		1keg	400.000.000
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di			50.000.000			50.000.000			50.000.000
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah	Terlaksananya rakor organisasi perempuan	1 Keg	50.000.000			50.000.000		1 Keg	50.000.000
					Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan diwilayah kecamatan/kelurahan								
2	7	20		Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan	Keuangan daerah yang akuntabel		6.000.000			6.000.000			6.000.000
2	7	20	7	Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa	13 Desa	6.000.000			6.000.000		13 Desa	6.000.000

OPD : KECAMATAN SIMO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah		326.720.000			326.720.000			332.120.000
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat dinas	12 Bulan	1.500.000			1.500.000		12 Bulan	1.500.000
					Terlaksananya pengiriman surat dinas								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya daya listrik dan jaringan internet	12 Bulan	44.170.000			44.170.000		12 Bulan	44.170.000
					Tersedianya daya listrik dan jaringan internet								
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Terlaksananya ajak kendaraan dinas	12 Bulan	12.000.000			12.000.000		12 Bulan	12.000.000
					Terbayarnya biaya service dan pajak kendaraan								
4	1	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 bulan	150.000			150.000		12 Bulan	150.000
					Terlaksananya jasa administrasi keuangan								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	9.965.000			9.965.000		12 Bulan	9.965.000
					Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	15.000.000			15.000.000		12 Bulan	17.500.000
					Tersedianya alat tulis kantor								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	12.000.000
					Tersedianya barang cetak dan penggandaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen listrik	12 Bulan	2.000.000			2.000.000		12 Bulan	2.000.000
					Tersedianya komponen listrik								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	4.675.000			4.675.000		12 Bulan	4.675.000
					Tersedianya peralatan rumah tangga								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Tersedinya bahan bacaan surat kabar	720 buah	1.800.000			1.800.000		720 buah	1.800.000
					Tersedianya bahan bacaan surat kabar								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan bakar bagi kendaraan dinas	2500 ltr	25.000.000			25.000.000		2500 ltr	25.000.000
					Tersedianya bahan bakar bagi kendaraan dinas								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu	12 Bulan	69.600.000			69.600.000		12 Bulan	70.500.000
					Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	63.900.000			63.900.000		12 Bulan	63.900.000
					Terlaksananya keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi								
4	1	1	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi Keuangan	12 Bulan	66.960.000			66.960.000		12 Bulan	66.960.000
					Terpenuhinya jasa administrasi Keuangan								
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah		89.500.000			89.500.000			114.500.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 paket	84.500.000			84.500.000		1 paket	84.500.000
					Terpeliharanya gedung kantor								
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur	12 Bulan	5.000.000			5.000.000		12 Bulan	5.000.000
					Terlaksananya pemeliharaan mebeleur								
	1	2	19	Penataan Lingkungan Kantor		1 Paket						1 paket	25.000.000

OPD : KECAMATAN SIMO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	22		Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan			-			-			-
4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Terlaksananya fungsi layanan administrasi dan publik kecamatan/kelurahan	12 Bulan	-			-		12 Bulan	
					Terlaksananya fungsi layanan administrasi dan publik kecamatan/kelurahan								
TOTAL PAGU 1							1.218.220.000			1.218.220.000		828.620.000	
5	1	1		Belanja Pegawai			1.915.455.000			1.915.455.000			1.915.455.000
TOTAL PAGU 2							3.133.675.000			3.133.675.000			1.915.455.000

OPD : KECAMATAN NOGOSARI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	3			Pekerjaan umum dan penataan ruang									
1	3	40		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			100.000.000			100.000.000			100.000.000
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 Paket	100.000.000			100.000.000		1 Paket	100.000.000
					Terbangunnya sarana dan prasarana umum Kecamatan								
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Kegiatan Pengdalian Kemanan Lingkungan		55.000.000			55.000.000			55.000.000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya patroli wilayah	1 Tahun	55.000.000			55.000.000		1 Tahun	55.000.000
					Laporan hasil patroli wilayah								
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan fasilitasi pengembangan nilai- nilai wawasan kebangsaan setiap Kecamatan/Kelurahan		211.065.000			211.065.000			211.065.000
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya pengiriman kontingen kesenian daerah	1 Paket	191.365.000			191.365.000		1 Paket	191.365.000
					Terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya bangsa								
					Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan	12 Bulan	0			0		12 Bulan	0
					Hasil monev bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan								
					Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga	12 Bulan						12 Bulan	
					Terlaksananya pembinaan cabang olah raga								
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya tarawih keliling dan pengiriman lomba MTQ	1 Paket	19.700.000			19.700.000		1 Paket	19.700.000
					Terpeliharanya nilai-nilai keagamaan								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan			0			0			0
2	7	15	4	Fasilitasi Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan	12 Bulan	0			0		12 Bulan	0
					Hasil monev bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan								
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga	12 Bulan	0			0		12 Bulan	0
					Terlaksananya pembinaan cabang olah raga								
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa		400.000.000			400.000.000			400.000.000
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Desa/Kelurahan	1 Paket	400.000.000			400.000.000		1 Paket	400.000.000
					Terbangunnya sarana prasarana desa								
2	7	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Terlaksananya Pengisian Perangkat Desa		0			0			0
2	7	18	5	Penyelenggaraan pemilihan,pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa / perangkat desa	13 Desa / Kelurahan	0			0		13 Desa / Kelurahan	0
					Terpilihnya Kepala Desa dan terisinya Perangkat Desa								

OPD : KECAMATAN NOGOSARI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan		63.000.000			63.000.000			63.000.000
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan	13 Desa / Kelurahan	63.000.000			63.000.000		13 Desa / Kelurahan	63.000.000
					Hasil pembinaan PKK								
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			247.756.000			247.756.000			247.756.000
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terbayarnya jasa surat menyurat	12 Bulan	3.000.000			3.000.000		12 Bulan	3.000.000
					Pengiriman surat-surat lancar								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komonikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	34.000.000			34.000.000		12 Bulan	34.000.000
					Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi								
4	1	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	10.000.000
					Peralatan dan Perlengkapan Alat Kantor Awet								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	16.850.000			16.850.000		12 Bulan	16.850.000
					Terpenuhinya kebutuhan kantor								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	15.300.000			15.300.000		12 Bulan	15.300.000
					Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 Bulan	3.000.000			3.000.000		12 Bulan	3.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	1.800.000			1.800.000		12 Bulan	1.800.000
					Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercukupinya bahan bakar minyak	3350 Liter	23.800.000			23.800.000		3350 Liter	23.800.000
					Tercukupinya kebutuhan transportasi kantor								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya minuman harian kantor	12 Bulan	43.337.000			43.337.000		12 Bulan	43.337.000
					Kebutuhan minuman harian kantor terpenuhi								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terbayarnya biaya perjalanan dinas	12 Bulan	59.475.000			59.475.000		12 Bulan	59.475.000
					Kebutuhan biaya perjalanan dinas terpenuhi								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terbayarnya gaji PTT	12 Bulan	37.194.000			37.194.000		12 Bulan	37.194.000
					Tercukupinya kebutuhan pegawai PTT								
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah		19.500.000			19.500.000			19.500.000
4	1	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	12 Bulan	0			0		12 Bulan	0
					Peralatan kantor								
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor	12 Bulan	5.500.000			5.500.000		12 Bulan	5.500.000
					Gedung kantor awet								
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas	12 Bulan	14.000.000			14.000.000		12 Bulan	14.000.000
					Servis mobil dan kendaraan dinas								
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya pengembangan sistem pelapran capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah		0			0			0
4	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LKPJ, LPPD dan LKJIP	3 dokumen	0			0		3 dokumen	0
					Dokumen LKPJ, LPPD dan LKPJ								

OPD : KECAMATAN NOGOSARI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunya laporan akhir tahun	12 bulan	0			0		12 bulan	0
					Laporan keuangan akhir tahun								
4	1	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terlaksananya Rakor Muspika		14.400.000			14.400.000			14.400.000
4	1	16	4	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/ perangkat kelurahan	terlaksananya rakor pemerintah daerah	12 bulan	14.400.000			14.400.000		12 bulan	14.400.000
					Hasil Rakor pemerintah daerah								
4	1	22		Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan	Terlaksananya Fungsi Layanan di Kecamatan		4.000.000			4.000.000			4.000.000
4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Terlaksananya survey IKM	1 Paket	4.000.000			4.000.000		1 Paket	4.000.000
					Nilai SKM								
4	3			Perencanaan									
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Dokumen Renstra dan Renja PD		0			0			0
4	3	21	15	Monitoring dan Evaluasi RKPDes	Terlaksananya monitoring dan evaluasi RKPDes	13 Desa / Kelurahan	0			0		13 Desa / Kelurahan	0
					Hasil movev RKPDes								
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 Tahun	0			0		1 Tahun	0
					Daftar skala prioritas pembangunan								
2	7	20		Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan		6.000.000			6.000.000			6.000.000
2	7	20	6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa	13 Desa / Kelurahan	6.000.000			6.000.000		13 Desa / Kelurahan	6.000.000
					Hasil pembinaan pengelolaan keuangan desa								
2	7	20	7	Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	terlaksananya pembinaan administrasi desa	13 Desa / Kelurahan	0			0		13 Desa / Kelurahan	0
					Hasil pembinaan adinistrasi desa								
2	7	20	9	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terlaksananya evaluasi penyusunan APBDes	13 Desa / Kelurahan	0			0		13 Desa / Kelurahan	0
					Hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes								
					Terlaksananya pembinaan dan pengawasan implementasi UU Desa								
2	7	20	10	Pembinaan dan Pengawasan implementasi UU Desa	Hasil pembinaan dan pengawasan implementasi UU Desa	13 Desa / Kelurahan	0			0		13 Desa / Kelurahan	0
TOTAL PAGU 1							1.120.721.000			1.120.721.000			1.120.721.000
5	1	1		Belanja Pegawai			2.581.868.000			2.581.868.000			2.581.868.000
TOTAL PAGU 2							3.702.589.000			3.702.589.000			3.702.589.000

OPD : KECAMATAN KLEGO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	3			Pekerjaan umum dan penataan ruang									
1	3	40		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			100.000.000			100.000.000			100.000.000
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 paket	100.000.000			100.000.000			100.000.000
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			51.250.000			51.250.000			53.000.000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	desa yang dipantau keamanan dan ketertiban wilayah	13 Desa / Kelurahan	51.250.000			51.250.000			53.000.000
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan disetiap kecamatan		169.260.000			169.260.000			176.000.000
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa	kegiatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa (HUT RI & Hari Jadi)	2 Kegiatan	49.450.000			49.450.000			52.000.000
					partisipasi aktif kecamatan dalam kompetisi olahraga tingkat kabupaten	2 Kegiatan	85.000.000			85.000.000			85.000.000
					partisipasi aktif kecamatan dalam pengembangan seni budaya tingkat kabupaten	1 Kegiatan	10.180.000			10.180.000			13.000.000
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan peningkatan iman dan taqwa	2 Kegiatan	24.630.000			24.630.000			26.000.000
1	5	17	6	Pemeliharaan dan pengembangan seni budaya daerah	partisipasi aktif kecamatan dalam pengembangan seni budaya tingkat kabupaten	1 Kegiatan	0			-			0
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga		0			0			0
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	partisipasi aktif kecamatan dalam kompetisi olahraga tingkat kabupaten	1 Kegiatan							
2	7	15	7	Monitoring evaluasi dan pelaporan	dokumen monitoring evaluasi	1 Dokumen	0			-			0
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			400.000.000			400.000.000			400.000.000
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	bantuan ke masyarakat	1 Paket	400.000.000			400.000.000			400.000.000
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan		62.500.000			62.500.000			70.000.000
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	desa yang dibina dalam wilayah kecamatan	13 Desa / Kelurahan	62.500.000			62.500.000			70.000.000
2	7	20		Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			7.550.000			7.550.000			8.500.000
2	7	20	6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	terpenuhinya formasi perangkat desa dalam wilayah kecamatan	13 Desa / Kelurahan	6.000.000			6.000.000			6.000.000
2	7	20	9	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	jumlah desa yang didampingi pengelolaan keuangan desa	13 Desa / Kelurahan	0			-			0

OPD : KECAMATAN KLEGO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	7	20	2	Pengisian perangkat desa	dokumen evaluasi rancangan perdes tentang APBDesa		1.550.000			1.550.000			2.500.000
2	7	20	10	Pembinaan dan pengawasan Implementasi UU desa	dokumen pembinaan dan pengawasan implementasi UU desa		0			-			0
				Pembinaan administrasi desa			0			-			0
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			422.915.000			422.915.000			503.760.000
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	terjaganya terdistribusinya surat keluar OPD tepat waktu	12 Bulan	700.000			700.000			1.000.000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tercukupinya kebutuhan listrik dan internet kantor	12 Bulan	41.840.000			41.840.000			41.840.000
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terjaganya rasio kendaran siap pakai	12 Bulan	12.515.000			12.515.000			15.000.000
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terjaganya rasio alat kerja siap pakai	12 Bulan	7.500.000			7.500.000			15.000.000
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	16.000.000			16.000.000			17.000.000
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terbayarnya kebutuhan fotocopi kantor	12 Bulan	11.000.000			11.000.000			16.000.000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	terpenuhinya kebutuhan komponen listrik kantor	12 Bulan	1.000.000			1.000.000			3.000.000
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terpenuhunya kebutuhan alat kerja kantor	3 Unit	32.000.000			32.000.000			75.000.000
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	terpenuhuinya kebutuhan rumah tangga kantor	12 Bulan	3.000.000			3.000.000			5.000.000
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya koran bahan bacaan kantor	360 Buah	1.800.000			1.800.000			2.400.000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	tercukupinya kebutuhan BBM kantor	3.500 Liter	26.300.000			26.300.000			29.000.000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya minum pegawai dan makan minum tamu camat	12 Bulan	103.510.000			103.510.000			111.770.000
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koornidasi dan konsultasi OPD	12 Bulan	65.750.000			65.750.000			71.750.000
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terbayarnya upah tenaga kebersihan	12 Bulan	100.000.000			100.000.000			100.000.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah		30.000.000			30.000.000			80.000.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	30.000.000			30.000.000			80.000.000
4	1	6		Progam Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			0			0			
4	1	6	1	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	2 dokumen	0			-			0
4	1	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		2 dokumen	0			-			0
4	1	16		Progam peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terlaksananya rakor muspika perangkat kelurahan		0			0			0
4	1	16	4	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	terlaksanannya rapat koordinasi kecamatan setiap bulan	12 bulan	0			0			0
4	1	22		Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan	Terlaksananya layanan di kecamatan		0			0			0
4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	terlaksanannya fungsi pelayanan administrasi publik kecamatan	12 Bulan	0			-			0

OPD : KECAMATAN KLEGO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	3			Perencanaan									
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Cakupan dokumen Rentra, Renja dan DSP		0			0			0
4	3	21	13	Monitoring, evaluasi, pelaporan	dokumen monitoring evaluasi RKP desa	2 dokumen	0			-			0
4	3	21	16	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	dokumen renstra, renja dan renja perubahan	3 dokumen	0			0			0
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	dokumen DSP tingkat kecamatan	1 Dokumen	0			0			0
TOTAL PAGU 1							1.243.475.000			1.243.475.000			1.391.260.000
5	1	1		Belanja Pegawai			2.116.016.000			2.116.016.000			2.116.016.000
TOTAL PAGU 2							3.359.491.000			3.359.491.000			3.507.276.000

OPD : KECAMATAN ANDONG

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	3			Pekerjaan umum dan penataan ruang									
1	3	40		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan									
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 Paket	100.000.000			100.000.000		1 Paket	100.000.000
					Tersedianya Infrastruktur yang memadai bagi masyarakat								
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan								
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terwujudnya situasi aman kondusif di wilayah desa	1 Paket	50.000.000			50.000.000		1 Paket	50.000.000
					Terwujudnya koordinasi yang baik antar pejabat pemerintah								
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Fasilitas nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan/Kelurahan								
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatkan Rasa Nasionalisme Masyarakat, Terlaksananya Kegiatan Seni Budaya Daerah, Terciptanya prestasi olahraga, Meningkatkan rasa solidaritas persatuan dan kesatuan masyarakat	16 Desa / Kelurahan	147.000.000			147.000.000		16 Desa / Kelurahan	159.000.000
					Kebutuhan konsumsi pada hari besar terpenuhi								
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya kualitas keagamaan masyarakat	2 kegiatan	15.000.000			15.000.000		2 kegiatan	15.000.000
					Kegiatan keagamaan berjalan dengan lancar								
1	5	17	6	Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah	Terlaksananya Kegiatan Seni Budaya Daerah	2 kegiatan	-			-		2 kegiatan	-
					Lancarnya kegiatan kesenian								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan									
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terciptanya prestasi olahraga	1 kegiatan	-			-		1 kegiatan	-
					Meningkatnya rasa solidaritas persatuan dan kesatuan masyarakat								
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa									
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya Pemberian stimulan pembangunan desa	1 kegiatan	400.000.000			400.000.000		1 kegiatan	400.000.000
					Terfasilitasinya Pemberian stimulan pembangunan								
2	7	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan								
2	2	18	1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terwujudnya Kegiatan TP PKK	16 Desa / Kelurahan	50.000.000			50.000.000		16 Desa / Kelurahan	50.000.000
					Kegiatan TP PKK berjalan lancar								
2	7	20		Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan									
2	7	20	7	Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	Terciptanya administrasi desa yang baik	16 Desa / Kelurahan	6.000.000			6.000.000		16 Desa / Kelurahan	6.000.000
					Terciptanya tertib administrasi desa								

OPD : KECAMATAN ANDONG

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Fungsi Layanan Operasional Perangkat Daerah								
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Distribusi surat-menyurat lancar	12 Bulan	3.000.000			3.000.000		12 Bulan	3.000.000
					Koordinasi berjalan lancar								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	48.000.000			48.000.000		12 Bulan	48.000.000
					Lancarnya Pembayaran Telepon, Air dan Listrik								
4	1	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik	12 Bulan	3.000.000			3.000.000		12 Bulan	3.000.000
					Peralatan dapat menunjang pekerjaan								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	16.000.000			16.000.000		12 Bulan	16.000.000
					Alat Tulis Kantor sebagai sarana memperlancar pekerjaan								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12.000.000			12.000.000		12 Bulan	12.000.000
					Tersedianya barang cetakan mempermudah pekerjaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik dan telepon	12 Bulan	3.000.000			3.000.000		12 Bulan	3.000.000
					Tercukupinya kebutuhan belanja alat listrik dan elektronik								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor	1 unit	3.000.000			3.000.000		1 unit	3.000.000
					Tersedianya penyimpanan alat perlengkapan kantor								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	3.000.000			3.000.000		12 Bulan	3.000.000
					Tersedianya peralatan kebersihan								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya bahan logistik kantor	4.000 liter	50.000.000			50.000.000		4.000 liter	50.000.000
					Logistik kantor mempermudah pekerjaan								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	12 Bulan	103.790.000			103.790.000		12 Bulan	115.000.000
					Konsumsi Harian Pegawai Terpenuhi								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciptanya koordinasi yang lancar	12 Bulan	110.000.000			110.000.000		12 Bulan	130.000.000
					Koordinasi berjalan dengan lancar								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya tenaga pelayanan dan kebersihan	12 bulan	66.000.000			66.000.000		12 bulan	66.000.000
					Meningkatnya kinerja aparatur								
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Fungsi Layanan Operasional Perangkat Daerah								
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang baik	12 Bulan	3.000.000			3.000.000		12 Bulan	3.000.000
					Terawatnya Gedung Kantor								
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Sarana Transportasi Kantor	12 bulan	11.000.000			11.000.000		12 bulan	11.000.000
					Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Terpenuhi								
				Pembangunan Gedung Kantor									
TOTAL PAGU 1							1.202.790.000			1.202.790.000			1.246.000.000
5	1	1		Belanja Pegawai			2.272.743.000			2.272.743.000			2.272.743.000
TOTAL PAGU 2							3.475.533.000		-	3.475.533.000			3.518.743.000

OPD : KECAMATAN WONOSEGORO

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	40		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	Cakupan kegiatan pemeliharaan jalan di kecamatan sesuai target		100.000.000			100.000.000			200.000.000
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 paket	100.000.000			100.000.000		2 paket	200.000.000
					Terwujudnya sarana dan prasarana umum yang memadai								
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase kejadian pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti		60.000.000			60.000.000			70.000.000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya kegiatan patroli wilayah	12 bulan	60.000.000			60.000.000		12 bulan	70.000.000
					Terwujudnya wilayah yang aman dan kondusif								
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan kegiatan hari besar yang dilaksanakan		196.000.000			196.000.000			160.000.000
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan memperingati HUT RI dan Hari besar lainnya	3 keg	176.000.000			176.000.000		2 keg	130.000.000
					Terlaksananya fasilitasi kegiatan olah raga								
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan keagamaan	1 keg	20.000.000			20.000.000		1 keg	30.000.000
					Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan								
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang olah raga dan pembangunan		0			0			
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya fasilitasi kegiatan olah raga	1 keg	0			-		1 keg	90.000.000
					Jumlah kegiatan turnamen olah raga yang diikuti								
2	7	15	7	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring bidang pembangunan, perekonomian dan lainnya	11 desa	0			-		11 desa	1.000.000
					Ketersediaan data bidang perekonomian, pembangunan dan lainnya								
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan bantuan kepada masyarakat bidang pembangunan dan sosial		400.000.000			400.000.000			400.000.000
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya pemberian bantuan pembangunan, sosial	3 paket	400.000.000			400.000.000		3 paket	400.000.000
					Jumlah paket bantuan yang diberikan kepada masyarakat								
2	7	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Tingkat ketepatan pengisian kades/perangkat desa		2.000.000			2.000.000			3.000.000
		18	5	Fasilitasi Monitoring Pengisian dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya monitoring pengisian perangkat desa	1 desa	2.000.000			2.000.000		3 desa	3.000.000
					Terisinya kekosongan jabatan sesuai SOTK								
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan	Cakupan PKK Desa yang dibina		70.500.000			70.500.000			75.000.000
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terlaksananya rakor organisasi perempuan	12 bln	70.500.000			70.500.000		12 bln	75.000.000
					Terwujudnya rakor organisasi perempuan tingkat kecamatan								
2	7	20		Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Prosentase desa tertib administrasi	hal 239	6.420.000			6.420.000			3.500.000
2	7	20	6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa	11 desa	6.000.000			6.000.000		11 desa	1.500.000
					Jumlah desa yang di dampingi								
2	7	20	7	Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	Terlaksananya pembinaan administrasi desa	11 desa	420.000			420.000		11 desa	1.000.000
					Jumlah desa tertib administrasi								

OPD : KECAMATAN WONOSEGORO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	7	20	9	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terlaksananya evaluasi penyusunan APB Desa	11 desa	0			-		11 desa	1.000.000
					Jumlah APBDes yang di evaluasi								
4	1			Administrasi pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan fungsi layanan operasional perangkat daerah		263.013.000			263.013.000			396.460.000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya daya Listrik dan Jaringan internet	12 bln	59.060.000			59.060.000		12 bln	70.000.000
					Tercukupinya kebutuhan listrik dan internet								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor	12 bln	9.800.000			9.800.000		12 bln	10.000.000
					Terwujudnya peralatan kerja siap pakai								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bln	15.000.000			15.000.000		12 bln	17.000.000
					Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bln	9.813.000			9.813.000		12 bln	10.000.000
					Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen listrik	12 bln	1.100.000			1.100.000		12 bln	1.200.000
					Tercukupinya kebutuhan komponen listrik								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor	1 unit	10.000.000			10.000.000		4 unit	100.000.000
					Tercukupinya kebutuhan peralatan kantor								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bln	3.000.000			3.000.000		12 bln	4.000.000
					Tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	354 bh	1.800.000			1.800.000		354 bh	2.000.000
					Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan surat kabar								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan bakar bagi kendaraan dinas	2100 lt	25.800.000			25.800.000		2600 lt	35.000.000
					Tercukupinya kebutuhan bahan bakar bagi kendaraan dinas								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum harian,rapat dan tamu	12 bln	50.380.000			50.380.000		12 bln	60.000.000
					Tercukupinya kebutuhan makan dan minum harian rapat dan tamu								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya keikutsertaan rapat koordinasi keluar daerah	12 bln	55.000.000			55.000.000		12 bln	65.000.000
					Terwujudnya keikutsertaan rapat koordinasi								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kebersihan kantor	12 bln	22.260.000			22.260.000		12 bln	22.260.000
					Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman								
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan fungsi layanan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah		22.430.000			22.430.000			305.000.000
4	1	2	19	Penataan lingkungan kantor	Terlaksananya penataan lingkungan kantor	1 keg	0			-		1 keg	190.000.000
					Terwujudnya lingkungan kantor yang memadai								
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 bln	10.000.000			10.000.000		12 bln	100.000.000
					Terwujudnya kantor yang representative								
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan gedung dinas	12 bln	12.430.000			12.430.000		12 bln	15.000.000
					Terwujudnya kendaraan dinas layak pakai								
4	1	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah rakor muspika		975.000			975.000			10.000.000
4	1	16	4	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/ perangkat kelurahan	Terlaksananya rakor muspika/perangkat kelurahan/desa	12 bln	975.000			975.000		12 bln	10.000.000
					Jumlah rakor muspika yang dilaksanakan								
4	1	22		Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat		0						

OPD : KECAMATAN WONOSEGORO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Terlaksananya fungsi layanan di kecamatan	12 bln	0			-		12 bln	1.500.000
					Terwujudnya fungsi pelayanan publik yang optimal								
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan		0						
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Tersusunnya DSP usulan kegiatan kecamatan	1 dok				-		1 dok	7.000.000
					Jumlah DSP usulan kegiatan yang disusun								
TOTAL PAGU 1							1.121.338.000			1.121.338.000			1.672.710.000
5	1	1		Belanja Pegawai			2.843.910.000			2.843.910.000			2.843.910.000
TOTAL PAGU 2							3.965.248.000			3.965.248.000			4.516.620.000

OPD : KECAMATAN WONOSAMUDRO

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	3									
1	3	40		100.000.000			100.000.000			100.000.000
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum	1 paket	100.000.000		1 paket	100.000.000
1	5									
1	5	15		50.000.000			50.000.000			50.000.000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya patroli wilayah	12 bln	50.000.000		12 bln	50.000.000
					Terwujudnya Patroli					
1	5	17		170.250.000			170.250.000			170.250.000
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya peringatan HUT RI, Hari Jadi Boyolali, Kegiatan Pemuda dan Olahraga, dan Pembinaan Kelompok pemuda	1 Kegiatan	161.750.000		1 Kegiatan	161.750.000
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pembinaan iman dan taqwa	1 Kegiatan	8.500.000		1 Kegiatan	8.500.000
2										
2	7									
2	7	15		0			0			0
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya kegiatan olahraga	1 Kegiatan			1 Kegiatan	0
2	7	15	7	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev pembangunan	1 Kegiatan			1 Kegiatan	0
2	7	17		200.000.000			200.000.000			200.000.000
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Pembangunan jembatan antar desa, RTLH, Jambanisasi, dan URC	1 Paket	200.000.000		1 Paket	200.000.000
2	7	18		0			0			0
2	7	18	5	Penyelenggaraan pemilihan,pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa / perangkat desa	2 desa	0		2 desa	0
					Terpilainya Kepala Desa dan terisinya Perangkat Desa					
2	7	19		0			0			0
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terselenggaranya kegiatan PKK	10 kali / Kelurahan	0		10 kali / Kelurahan	0
					Terwujudnya Pembinaan kegiatan PKK					
2	7	20		0			0			0
2	7	20	6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang didampingi	10 Desa	0		10 Desa	0

OPD : KECAMATAN WONOSAMUDRO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Pengelolaan keuangan desa semakin tertib								
2	7	20	7	Pembinaan Administrasi Desa	Terbinanya administrasi desa dengan baik	10 Desa	0			0		10 Desa	0
					Terwujudnya tertib administrasi desa								
2	7	20	9	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	Jumlah rancangan APBDes yang dievaluasi	10 Desa	0			0		10 Desa	0
					Tersusunnya APBDes yang akuntabel								
2	7	20	10	Pembinaan dan pengawasan implementasi UU Desa	Jumlah rancangan APBDes yang dievaluasi	10 Desa	0			0		10 Desa	0
					Tersusunnya APBDes yang akuntabel								
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			754.585.000			754.585.000			754.585.000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya daya listrik dan internet	12 Bulan	35.000.000			35.000.000		12 Bulan	35.000.000
					Tercukupinya kebutuhan								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja dalam kondisi baik	12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	10.000.000
					Peralatan kerja dalam kondisi baik dan siap pakai								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	20.000.000			20.000.000		12 Bulan	20.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan alat tulis								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan cetak dan ganda	12 Bulan	15.000.000			15.000.000		12 Bulan	15.000.000
					Terpenuhinya Kebutuhan kantor								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tercukupinya Kebutuhan alat alat listrik	12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	10.000.000
					Tercukupinya Kebutuhan alat alat listrik								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor	1 paket	300.000.000			300.000.000		1 paket	300.000.000
					Tercukupinya perlengkapan dan peralatan kerja yang memadai								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 paket	30.000.000			30.000.000		1 paket	30.000.000
					Tercukupinya kebutuhan rumah tangga								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	12 Bulan	5.500.000			5.500.000		12 Bulan	5.500.000
					Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan surat kabar								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan bakar	1 tahun	55.000.000			55.000.000		1 tahun	55.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum harian pegawai rapat dan tamu	12 Bulan	123.685.000			123.685.000		12 Bulan	123.685.000
					Tercukupinya makan dan minum harian pegawai rapat dan tamu								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat rapat koordinasi	12 Bulan	80.000.000			80.000.000		12 Bulan	80.000.000
					Terwujudnya Perjalanan dinas								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Kebersihan kantor	12 Bulan	70.400.000			70.400.000		12 Bulan	70.400.000
					Terwujudnya kantor yang bersih								

OPD : KECAMATAN WONOSAMUDRO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			340.000.000			340.000.000			340.000.000
4	1	2	19	Penataan Lingkungan kantor	Terlaksananya lingkungan kantor	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	0
					Terwujudnya lingkungan kantor yang memadai								
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya lingkungan kantor yang nyaman	1 kegiatan	320.000.000			320.000.000		1 kegiatan	320.000.000
					Terpeliharanya lingkungan kantor								
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Terlaksananya pemeliharaan	12 bulan	20.000.000			20.000.000		12 bulan	20.000.000
					Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas								
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			0			0			0
4	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya pengelolaan ddokumen	12 Bulan	0			0		12 Bulan	0
					Tersusunya dokumen								
4	1	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			0			0			0
4	1	16	4	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/perangkat kelurahan	Terlaksananya rapat koordinasi	12 Bulan	0			0		12 Bulan	0
					Terwujudnya rapat koordinasi antar perangkat daerah								
4	1	22		Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan			0			0			0
4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Terlaksananya pelayanan yang baik	12 Bulan	0			0		12 Bulan	0
					Terwujudnya pelayanan yang baik								
4	3			Perencanaan									
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah			0			0			0
4	3	21	15	Monitoring dan evaluasi RKPDes	Terlaksananya kegiatan monev	1 Dokumen	0			0		1 Dokumen	0
					Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Tahunan								
4	3	21	16	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Terlaksananya perencanaan kegiatan OPD	1 Dokumen	0			0		1 Dokumen	0
					Terlaksananya perencanaan kegiatan OPD								
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Terlaksananya pelaksanaan musrenbang kecamatan /kelurahan	1 Dokumen	0			0		1 Dokumen	0
					Tersusunya Dokumen Pembangunan		0			0			
TOTAL PAGU 1							1.614.835.000			1.614.835.000			1.614.835.000
5	1	1		Belanja Pegawai			1.821.079.000			1.821.079.000			1.821.079.000
TOTAL PAGU 2							3.435.914.000			3.435.914.000			3.435.914.000

OPD : KECAMATAN KARANGGEDE

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan dasar									
1	3			Pekerjaan umum dan penataan ruang									
1	3	40		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			100.000.000	0	0	100.000.000		1 Paket	100.000.000
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 paket	100.000.000			100.000.000		1 Paket	100.000.000
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat								16 Desa / Kelurahan	
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	16 Desa / Kelurahan	50.000.000	0	0	50.000.000		16 Desa / Kelurahan	50.000.000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya kegiatan patroli wilayah	16 Desa / Kelurahan	50.000.000			50.000.000		16 Desa / Kelurahan	50.000.000
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan fasilitasi pengembangan nilai- nilai wawasan kebangsaan	1 Kegiatan	105.000.000	0	0	105.000.000		1 Kegiatan	105.000.000
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya kegitan keagamaan	1 Kegiatan	20.000.000			20.000.000		1 Kegiatan	20.000.000
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga	1 Kegiatan	85.000.000			85.000.000		1 Kegiatan	85.000.000
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	7			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga	1 Kegiatan	-	0	0	-		1 Kegiatan	0
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga	1 Kegiatan	-			-		1 Kegiatan	0
					Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga								
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah desa yang dimonev	1 Paket	400.000.000	0	0	400.000.000		1 Paket	400.000.000
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Talud saluran tinatah	1 Paket	400.000.000			400.000.000		1 Paket	400.000.000
					Terlaksananya pembangunan talut saluran tinatah								
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan	12 Bulan	50.000.000	0	0	50.000.000		12 Bulan	65.000.000
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terlaksananya rakor organisasi perempuan	12 Bulan	50.000.000			50.000.000		12 Bulan	65.000.000
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi pemerintahan								12 Bulan	
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah	12 Bulan	335.580.000	0	0	335.580.000		12 Bulan	397.500.000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan listrik dan internet	12 Bulan	39.000.000			39.000.000		12 Bulan	47.000.000
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terwujudnya peralatan kerja yang siap pakai	12 Bulan	9.160.000			9.160.000		12 Bulan	25.000.000
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	15.000.000			15.000.000		12 Bulan	18.000.000
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	9.500.000			9.500.000		12 Bulan	10.000.000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tercukupinya kebutuhan komponen listrik dan telepon	12 Bulan	3.000.000			3.000.000		12 Bulan	4.000.000
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Unit	17.500.000			17.500.000		3 Unit	25.000.000
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya peralatan rumah tangga	12 Bulan	12.500.000			12.500.000		12 Bulan	15.500.000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Lancarnya distribusi surat menyurat	12 Bulan	25.000.000			25.000.000		12 Bulan	28.500.000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum harian, rapat dan tamu	12 Bulan	56.000.000			56.000.000		12 Bulan	55.000.000
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya keikutsertaan rapat koordinasi	12 Bulan	50.000.000			50.000.000		12 Bulan	55.000.000
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman	12 Bulan	98.920.000			98.920.000		12 Bulan	114.500.000

OPD : KECAMATAN KARANGGEDE

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	28.500.000	0	0	28.500.000		3 Unit	31.500.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	3 Unit	15.000.000			15.000.000		3 Unit	16.500.000
4	1	1	6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	13.500.000			13.500.000		12 Bulan	15.000.000
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 Dokumen	-	0	0	-		1 Dokumen	-
4	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen LKJip	1 Dokumen	-			-		1 Dokumen	-
4	1	16		Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan	Terlaksananya fungsi layanan di Kecamatan	12 Bulan	-	0	0	-		12 Bulan	0
4	1	16	4	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Terlaksananya fungsi layanan di kecamatan	12 Bulan	-			-		12 Bulan	0
4	3			Perencanaan								5 Dokumen	
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen DSP, Renstra, Renja dan Evaluasi	5 Dokumen	-	0	0	-		1 Dokumen	0
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Tersusunnya dokumen DSP usulan kegiatan	1 Dokumen	-			-		1 Dokumen	0
4	4			Keuangan								16 Desa / Kelurahan	
4	4	17		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya pembinaan dan penglolaan keuangan desa/kelurahan	16 Desa / Kelurahan	6.000.000	0	0	6.000.000		16 Desa / Kelurahan	7.500.000
				Pembinaan Administrasi Desa	Terlaksananya pembinaan administrasi desa	16 Desa / Kelurahan	6.000.000			6.000.000		16 Desa / Kelurahan	7.500.000
TOTAL PAGU 1							1.075.080.000			1.075.080.000			1.156.500.000
5	1	1		Belanja Pegawai			2.340.779.000			2.340.779.000			2.340.779.000
TOTAL PAGU 2							3.415.859.000		-	3.415.859.000			3.497.279.000

OPD : KECAMATAN KEMUSU

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	3			Pekerjaan umum dan penataan ruang									
1	3	40		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			100.000.000			100.000.000			110.000.000
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 paket	100.000.000			100.000.000		1 paket	110.000.000
					Meningkatnya kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses jalan								
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			70.000.000			70.000.000			77.000.000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya movev pengendalian dan patroli keamanan lingkungan	10 Desa / Kelurahan	70.000.000			70.000.000		10 Desa / Kelurahan	77.000.000
					Terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat								
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan			113.125.000			113.125.000			69.437.500
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai -nilai luhur	1 Kegiatan	50.125.000			50.125.000		1 Kegiatan	55.137.500
					peningkatan rasa nasionalisme di kalangan madsyarakat								
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan iman dan taqwa di kalangan masyarakat	1 Kegiatan	13.000.000			13.000.000		1 Kegiatan	14.300.000
					Meningkatnya iman dan taqwa di kalangan masyarakat								
				Fasilitasi kegiatan dana belanja hibah dan bantuan sosial	Terlaksananya movev kegiatan dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan	12 Bulan	50.000.000			50.000.000		12 Bulan	55.000.000
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan			23.500.000			23.500.000			25.850.000
				Fasilitasi kegiatan dana belanja hibah dan bantuan sosial	Terlaksananya movev kegiatan dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan	12 Bulan						12 Bulan	
					Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial dengan peraturan								
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terkirimnya kontingen olah raga	1 Kegiatan	23.500.000			23.500.000		1 Kegiatan	25.850.000
					Meningkatnya keikutsertaan tim sepakbola kecamatan dalam kompetisi di kabupaten								
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			400.000.000			400.000.000			440.000.000
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya pembangunan Jalan Poros Bawu Kadipaten dan Jalan Desa Kauman	1 Paket	400.000.000			400.000.000		1 Paket	440.000.000
					Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan di perdesaan								

OPD : KECAMATAN KEMUSU

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan		50.000.000			50.000.000			55.000.000
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terlaksananya pembinaan PKK	10 Desa / Kelurahan	50.000.000		50.000.000		10 Desa / Kelurahan	55.000.000
					Meningkatnya kinerja Organisasi PKK							
4	4			Keuangan								
4	4	17		Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan		6.000.000			6.000.000			6.300.000
4	4	17	12	Pendampingan Pengelolaan Keuangan desa	Terlaksananya pembinaan administrasi desa	10 Desa / Kelurahan	6.000.000		6.000.000		10 Desa / Kelurahan	6.300.000
					Terlaksananya pembinaan administrasi desa							
4	3			Perencanaan								
4	3	21		Program Perencanaan pembangunan daerah		0			0			0
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Tersusunnya dokumen daftar skala prioritas pembangunan desa/ kecamatan	10 Desa / Kelurahan					10 Desa / Kelurahan	
					Tersusunnya rencana pembangunan daerah yang aspiratif							
4				Urusan Fungsi Penunjang								
4	1			Administrasi Pemerintahan								
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		436.190.000			436.190.000			467.619.000
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat	12 Bulan	1.800.000		1.800.000		12 Bulan	1.890.000
					Terdistribusinya surat-surat kedinasan							
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan air dan listrik kantor	12 Bulan	33.400.000		33.400.000		12 Bulan	36.740.000
					Pelaksanaan program dan kegiatan OPD berjalan dengan baik							
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terperliharnya peralatan kerja kantor yang berfungsi baik dan memperlancar pekerjaan	12 Bulan	5.000.000		5.000.000		12 Bulan	5.500.000
					Pelaksanaan program dan kegiatan OPD dapat berjalan dengan baik dengan ditunjang perlatan yang representatif							
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	15.000.000		15.000.000		12 Bulan	16.500.000
					Terselenggaranya administrasi OPD yang baik							
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	10.000.000		10.000.000		12 Bulan	11.000.000
					Terdokumentasinya dengan baik pelaksanaan program dan kegiatan OPD							
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ telepon	12 Bulan	2.000.000		2.000.000		12 Bulan	2.200.000
					Pelaksanaan program kegiatan yang membutuhkan energi listrik dapat berjalan dengan baik							
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	53.000.000		53.000.000		3 Unit	58.300.000
					Tertunjangnya pelaksanaan program kegiatan dengan adanya perlengkapan kantor yang memadai							

OPD : KECAMATAN KEMUSU

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya peralatan rumah tangga	12 Bulan	3.000.000			3.000.000		12 Bulan	3.300.000
					Meningkatnya representasi rumah tangga kantor dalam menunjang pelaksanaan program kegiatan OPD								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas	5.000 Liter	39.510.000			39.510.000		5.000 Liter	43.461.000
					Terdukungnya mobilitas aparatur pemerintah kecamatan								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan minum kantor	12 Bulan	121.480.000			121.480.000		12 Bulan	125.928.000
					Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	84.000.000			84.000.000		12 Bulan	88.000.000
					Meningkatnya komunikasi dan tersampainya informasi								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terpeliharanya kebersihan dan keamanan lingkungan kantor	12 Bulan	68.000.000			68.000.000		12 Bulan	74.800.000
					Tercapainya target kinerja OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan								
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			35.000.000			35.000.000			38.500.000
4	1	2	6	pengadaan Perlengkapan rumah jabatan /dinas	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas	2 unit	8.000.000			8.000.000		2 Unit	8.800.000
					Meningkatnya kenyamanan rumah jabatan								
4	1	2	20	pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan/dinas	2 unit	5.000.000			5.000.000		2 Unit	5.500.000
					Meningkatnya kenyamanan rumah jabatan								
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung/kantor	12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	11.000.000
					Meningkatnya kenyamanan gedung/kantor								
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 Buah	12.000.000			12.000.000		12 Buah	13.200.000
					Terdukungnya mobilitas aparatur pemerintah kecamatan								
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			0			0			0
4	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersusunnya laporan kinerja OPD	12 Bulan						12 Bulan	
					Tersedianya dokumen kinerja guna evaluasi kinerja								
4	1	22		Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan			0			0			0
4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Terpenuhinya pelayanan kantor dan publik yang optimal	12 Bulan						12 Bulan	
4	3				Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat								
4	3	21		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah			5.000.000			5.000.000			5.500.000
4	3	21	18	Rapat koordinasi pejabat pemerintah Daerah / perangkat kelurahan	Terselenggaranya rakor muspika/ perangkat kelurahan	1 Dokumen	5.000.000			5.000.000		1 Dokumen	5.500.000
TOTAL PAGU 1							1.238.815.000			1.238.815.000			1.322.706.500
5	1	1		Belanja Pegawai			2.147.439.000			2.147.439.000			2.147.439.000
TOTAL PAGU 2							3.386.254.000			3.386.254.000			3.470.145.500

OPD : KECAMATAN JUWANGI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	3			Pekerjaan umum dan penataan ruang									
1	3	40		Program Pembangunan dan Pemeliharaan			100.000.000			100.000.000			100.000.000
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 Paket	100.000.000			100.000.000		1 Paket	100.000.000
					Terkendalinya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum								
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			50.000.000			50.000.000			50.000.000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terwujudnya kegiatan patroli wilayah	12 bulan	50.000.000			50.000.000		12 bulan	50.000.000
					Terwujudnya keamanan dan Ketertiban								
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan			189.500.000			189.500.000			200.000.000
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai -nilai luhur	2 Keg	176.000.000			176.000.000		2 Keg	180.000.000
					peningkatan rasa nasionalisme di kalangan madsyarakat								
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan di kalangan masyarakat	1 Keg	13.500.000			13.500.000		1 Keg	20.000.000
					Terwujudnya peningkatan perilaku yang baik								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan			0			0			0
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	meningkatnya prestasi di kalangan remaja	1 Keg	0			0		1 Keg	0
					Terwujudnya keberhasilan pembinaan								
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			400.000.000			400.000.000			400.000.000
2	7	17	4	Pemberian stimulan pembangunan desa	Pembangunan jalan juwangi-cerme	9 Desa	400.000.000			400.000.000		13 Desa	400.000.000
					terselenggaranya pembangunan								
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan			50.000.000			50.000.000			50.000.000
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terlaksananya kegiatan PKK	1 Keg	50.000.000			50.000.000		1 Keg	50.000.000
					Terwujudnya Peningkatan Gender								
2	7	20		Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			6.000.000			6.000.000			10.000.000
2	7	20	7	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	terselenggaranya pengelolaan dana desa yang baik	10 Desa	6.000.000			6.000.000		13 Desa	10.000.000
					peningkatan ketertiban administrasi desa								
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			344.420.000			344.420.000			623.500.000
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat	12 Bulan							
					Terdistribusinya surat-surat kedinasan								

OPD : KECAMATAN JUWANGI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya kebutuhan air, listrik dan internet	12 Bulan	34.000.000			34.000.000		12 Bulan	50.000.000
					Tercukupinya kebutuhan								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terwujudnya peralatan kerja yang siap pakai	12 Bulan	5.000.000			5.000.000		12 Bulan	10.000.000
					kegiatan berjalan dengan baik								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	12.000.000			12.000.000		12 Bulan	20.000.000
					Terselenggaranya kegiatan								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	15.000.000
					Terarsipkannya dokumen dengan baik								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tercukupinya Kebutuhan Listrik dan Telepon	12 Bulan	1.500.000			1.500.000		12 Bulan	10.000.000
					kegiatan berjalan dengan baik								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan kebutuhan kantor	12 Bulan	20.000.000			20.000.000		12 Bulan	200.000.000
					kegiatan berjalan dengan baik								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya Kebutuhan Rumah tangga	12 Bulan	2.000.000			2.000.000		12 Bulan	10.000.000
					Kebutuhan terpehi								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	360 buah						360 buah	3.000.000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercukupinya Kebutuhan bahan bakar bagi kendaraan	3800 Itr	30.000.000			30.000.000		4500 Itr	35.500.000
					Terwujudnya perjalanan dinas								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan minum harian dan tamu	12 Bulan	65.480.000			65.480.000		12 Bulan	75.000.000
					Kebutuhan rakor terpenuhi								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya penyelenggaraan rapat koodinasi	12 Bulan	100.000.000			100.000.000		12 Bulan	110.000.000
					Terwujudnya perjalanan dinas								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman	12 Bulan	64.440.000			64.440.000		12 Bulan	85.000.000
					serapan anggaran kegiatan terpenuhi								
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			183.060.000			183.060.000			125.000.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	33.700.000			33.700.000		12 Bulan	40.000.000
					kenyamanan dalam bekerja								
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	27.000.000			27.000.000		12 Bulan	35.000.000
					transportasi layak pakai								
4	1	2	19	Penataan Lingkungan Kantor	Terpeliharanya lingkungan kantor	12 Bulan	122.360.000			122.360.000		12 Bulan	50.000.000
					pembangunan lingkungan kantor								
4	1	22		Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan			2.500.000			2.500.000			15.000.000
4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Terpenuhinya pelayanan kantor dan publik yang optimal	1 Keg	2.500.000			2.500.000		12 Bulan	15.000.000
					Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat								
TOTAL PAGU 1							1.325.480.000			1.325.480.000			1.173.500.000
5	1	1		Belanja Pegawai			2.332.107.000			2.332.107.000			2.332.107.000
TOTAL PAGU 2							3.657.587.000			3.657.587.000			3.505.607.000

OPD : KELURAHAN SAMBENG

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan			974.541.000			974.541.000			1.465.000.000
2	7	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	12 bulan	208.600.000			208.600.000		12 bulan	210.000.000
					Terpenuhinya kegiatan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan								
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya kesehatan masyarakat	1 kegiatan	4.000.000			4.000.000		1 kegiatan	5.000.000
					Terpenuhinya kesehatan masyarakat								
2	7	15	6	Pembangunan infrastruktur kelurahan	Terbangunnya Infrastruktur di wilayah kelurahan	4 paket	761.941.000			761.941.000		6 paket	1.250.000.000
					Terwujudnya pembangunan sarana prasarana di wilayah kelurahan								
2	13	21		Progran Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Bertambahnya lapangan olahraga		10.000.000			10.000.000			50.000.000
2	13	21	2	Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terwujudnya sarana olahraga yang memadai	1 paket	10.000.000			10.000.000			50.000.000
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah.		246.100.000			246.100.000			450.000.000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	12 bulan	10.600.000			10.600.000		12 bulan	10.000.000
					terpenuhinya Jasa Komunikasi, sumber daya listrik, air								
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda dua	12 bulan	10.500.000			10.500.000		12 bulan	15.000.000
					terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan bermotor								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	12 bulan	3.000.000			3.000.000		12 bulan	10.000.000
					tersedianya peralatan kantor yang baik								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	15.000.000			15.000.000		12 bulan	15.000.000
					Tersedianya Alat Tulis Kantor								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	10.000.000			10.000.000		12 bulan	10.000.000
					Tersedianya barang cetakan dan penggandaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik/telepon	12 bulan	1.600.000			1.600.000		12 bulan	5.000.000
					Terpenuhinya komponen dan instalasi listrik								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	20.000.000			20.000.000		12 bulan	15.000.000
					Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga	12 bulan	3.000.000			3.000.000		12 bulan	5.000.000
					Tercukupinya peralatan rumah tangga								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercukupinya kebutuhan BBM	1000 liter	10.000.000			10.000.000		12 bulan	15.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan BBM								

OPD : KELURAHAN SAMBENG

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian, rapat dan Kegiatan	12 bulan	55.000.000			55.000.000		12 bulan	55.000.000
					Terpenuhinya makanan dan minuman harian, rapat dan Kegiatan								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	30.000.000			30.000.000		12 bulan	35.000.000
					Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran			44.400.000			44.400.000			50.000.000
				- Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	12 bulan	22.200.000			22.200.000		12 bulan	25.000.000
				- Tenaga Kebersihan dan keamanan	Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 bulan	22.200.000			22.200.000		12 bulan	25.000.000
4	1			Perencanaan									
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah								
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	3.000.000			3.000.000		12 bulan	10.000.000
					Terwujudnya Gedung Kantor yang memadai								
4	1	2	33	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terwujudnya Pendopo yang representatif	1 paket	30.000.000			30.000.000		1 paket	200.000.000
TOTAL PAGU							1.230.641.000			1.230.641.000			1.965.000.000

OPD : KECAMATAN AMPEL

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	3			Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang									
1	3	40		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			100.000.000			100.000.000			200.000.000
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 Paket	100.000.000			100.000.000		1 Paket	200.000.000
					Terkendalinya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum								
1	5			Bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	40 Kali	50.000.000			50.000.000		40 Kali	50.000.000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah patroli yang dilaksanakan	40 Kali	50.000.000			50.000.000		40 Kali	50.000.000
					Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif								
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan fasilitasi pengembangan nilai- nilai kebangsaan	4 Kegiatan	139.398.000			139.398.000		4 Kegiatan	70.000.000
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya peringatan hari jadi dan HUT RI	2 Kegiatan	43.918.000			43.918.000		2 Kegiatan	50.000.000
					Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peringatan hari jadi dan HUT RI								
					Jumlah kegiatan olahraga yang diikuti	1 Kegiatan	28.280.000			28.280.000		1 Kegiatan	30.000.000
					Bantuan hibah kegiatan kepemudaan	1 Kegiatan	50.000.000			50.000.000		1 Kegiatan	50.000.000
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan keagamaan MTQ dan Buka Bersama	2 Kegiatan	17.200.000			17.200.000		2 Kegiatan	20.000.000
					Terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	7			Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan serta kegiatan olahraga yang diikuti	1 Kegiatan	-			-		1 Kegiatan	-
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Jumlah kegiatan olahraga yang diikuti	1 Kegiatan	-			-		1 Kegiatan	-
					Tercapainya prestasi di tingkat daerah								
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan peran serta masyarakat dalam membangun desa	1 Tahun	400.000.000			400.000.000		1 Tahun	500.000.000
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya pembangunan desa (RTLH dan Jambanisasi)	1 Tahun	400.000.000			400.000.000		1 Tahun	500.000.000
					Terkendalinya sasaran pembangunan desa								

OPD : KECAMATAN AMPEL

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	7	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Terlaksananya pengisian Kepala Desa/Perangkat Desa	10 Desa / Kelurahan	-			-		10 Desa / Kelurahan	-
2	7	18	5	Fasilitasi Monitoring Pengisian dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa / perangkat desa	10 Desa / Kelurahan	-			-		10 Desa / Kelurahan	-
					Terpilihnya Kepala Desa dan terisinya Perangkat Desa								
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan	10 Desa / Kelurahan	50.000.000			50.000.000		10 Desa / Kelurahan	50.000.000
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah PKK desa yang dibina	10 Desa / Kelurahan	50.000.000			50.000.000		10 Desa / Kelurahan	50.000.000
					Terciptanya peran serta PKK dalam pembangunan								
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Bidang Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	14 Kegiatan	323.682.000			323.682.000		14 Kegiatan	480.900.000
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman surat lancar	12 Bulan	900.000			900.000		12 Bulan	900.000
					Pengiriman surat lancar dan tersedianya benda pos								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	15.450.000			15.450.000		12 Bulan	20.000.000
					Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik								
4	1	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan kantor dalam kondisi siap pakai	12 Bulan	3.000.000			3.000.000		12 Bulan	5.000.000
					Peralatan kerja dalam kondisi baik dan siap pakai								
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai	12 Bulan	13.900.000			13.900.000		12 Bulan	18.000.000
					Tercukupinya pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	15.000.000			15.000.000		12 Bulan	17.000.000
					Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	11.100.000			11.100.000		12 Bulan	13.000.000
					Tersedianya barang cetakan dan penggandaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya alat listrik dan bangunan kantor	12 Bulan	2.000.000			2.000.000		12 Bulan	5.000.000
					Tercukupinya alat/komponen listrik dan telepon								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor	1 Paket	9.000.000			9.000.000		1 Paket	100.000.000
					Tercukupinya perlengkapan dan peralatan kerja yang memadai								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	12 Bulan	3.000.000			3.000.000		12 Bulan	5.000.000
					Tercukupinya peralatan rumah tangga								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	12 Bulan	1.800.000			1.800.000		12 Bulan	2.000.000

OPD : KECAMATAN AMPEL

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Tercukupinya bahan bacaan surat kabar								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan bakar minyak dan gas	1.630 Liter	18.220.000			18.220.000		1.630 Liter	20.000.000
					Tercukupinya bahan bakar minyak kendaraan dinas dan pengisian tabung gas bagi kantor								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya belanja makan dan minum	12 Bulan	115.382.000			115.382.000		12 Bulan	125.000.000
					Tercukupinya makan dan minum								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 Bulan	45.000.000			45.000.000		12 Bulan	60.000.000
					Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi kedinasan								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi pelayanan dan keamanan kantor	12 Bulan	69.930.000			69.930.000		12 Bulan	90.000.000
					Terciptanya pelayanan prima dan lingkungan aman								
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan gedung, pembangunan rumah dinas, penataan lingkungan kantor dan pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	10.000.000			10.000.000		1 Paket	25.000.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Paket	10.000.000			10.000.000		1 Paket	25.000.000
					Terawatnya sarana gedung kantor								
4	1	22		Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan	Terlaksananya fungsi pelayanan di Kecamatan	86 IKM	2.500.000			2.500.000		88 IKM	15.000.000
4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Nilai IKM pelayanan	86 IKM	2.500.000			2.500.000		88 IKM	15.000.000
					Terciptanya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan yang optimal								
5	2			Bidang Keuangan									
5	2	17		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya pengelolaan administrasi dan keuangan desa	10 Desa / Kelurahan	6.000.000			6.000.000		10 Desa / Kelurahan	10.000.000
5	2	17	14	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang mengelola keuangannya dengan baik	10 Desa / Kelurahan	6.000.000			6.000.000		10 Desa / Kelurahan	10.000.000
TOTAL PAGU 1							1.081.580.000			1.081.580.000	-	-	1.440.900.000
5	1	1		Belanja Pegawai			1.848.957.000			1.848.957.000			1.848.957.000
TOTAL PAGU 2							2.930.537.000			2.930.537.000			3.289.857.000

OPD : KECAMATAN GLADAGSARI

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
							Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4					Urusan Fungsi Penunjang									
4	1				Bidang Administrasi Pemerintahan									
4	1	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya layanan operasional perangkat daerah		369.404.000	-		369.404.000			369.404.000
4	1	1	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 Bulan	900.000	-	-	900.000	-	12 Bulan	900.000
						Terkirimnya surat-surat dinas								
4	1	1	2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi telepon, internet dan listrik	12 Bulan	32.500.000	-	-	32.500.000	-	12 Bulan	32.500.000
						Tersedianya kendaraan dinas/opersional yang siap pakai								
4	1	1	2		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / opsional	12 Bulan	13.400.000			13.400.000		12 Bulan	13.400.000
						Tercukupinya Kebutuhan Komunikasi dan Koordinasi Lewat Telpo n dan Internet								
4	1	1	6		Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	3.747.000	-	-	3.747.000	-	12 Bulan	3.747.000
						Tersedianya Peralatan Kerja Yang Siap Pakai								
4	1	1	10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	12 Bulan	15.206.000	-	-	15.206.000	-	12 Bulan	15.206.000
						Tercukupinya Kebutuhan Alat - Alat Tulis Kantor								
4	1	1	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	10.360.000	-	-	10.360.000	-	12 Bulan	10.360.000
						Tercukupinya Barang Cetakan dan Penggandaan								
4	1	1	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	2.993.000	-	-	2.993.000	-	12 Bulan	2.993.000
						Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor								
4	1	1	13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit	29.638.000	-	-	29.638.000		10 Unit	29.638.000
						Tercukupinya Kebutuhan Komponen Listrik								
4	1	1	14		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	5.163.000	-	-	5.163.000	-	12 Bulan	5.163.000
						Tercukupinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga								
4	1	1	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bacaan surat kabar	125 Buah	2.000.000			2.000.000		125 Buah	2.000.000
						Tercukupinya bahan bacaan surat kabar								
4	1	1	16		Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya kebutuhan bahan bakar minyak	4,133 liter	17.000.000	-	-	17.000.000	-	4,133 liter	17.000.000
						Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bakar Minyak								
4	1	1	17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum harian/rapat/tamu	12 Bulan	101.970.000	-	-	101.970.000	-	12 Bulan	101.970.000
						Tercukupinya Kebutuhan Makan dan Minum Harian/Rapat/Tamu								
4	1	1	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rakor dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	45.000.000	-	-	45.000.000	-	12 Bulan	45.000.000
						Terjalannya Koordinasi Lintas Sektoral								
4	1	1	19		Penyediaan jasa administrasi Perkantoran	Terciptanya kebersihan dan keamanan kantor	12 Bulan	89.527.000	-	-	89.527.000	-	12 Bulan	89.527.000
						Terciptanya kebersihan dan keamanan kantor								
4	1	22			Program Penyelenggaraan Pelayanan Adminstrasi dan Publik Kecamatan	Terciptanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan		3.250.000			3.250.000			3.250.000

OPD : KECAMATAN GLADAGSARI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan/Kelurahan	Terciptanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang Optimal	1 Paket	3.250.000	-	-	3.250.000	-	1 Paket	3.250.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai		5.000.000			5.000.000			5.000.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung/bangunan kantor	12 Bulan	5.000.000	-	-	5.000.000	-	12 Bulan	5.000.000
					Terpenuhinya Sarana Prasarana Gedung Kantor								
1	5	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan		50.000.000			50.000.000			50.000.000
1	5	15	5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya patroli pengendalian keamanan lingkungan	25 Kali	50.000.000	-	-	50.000.000	-	25 Kali	50.000.000
					Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan								
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pembinaan olah raga		-			-			-
2	7	15	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah kegiatan olah raga yang diikuti	1 Kegiatann		-	-		-	1 Kegiatann	
					Tercapainya prestasi di tingkat daerah								
5	2	17		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya fungsi administrasi pemerintahan desa		10.000.000			10.000.000			10.000.000
5	2	17	14	Pendampingan Pengelolaan Keuangan	Jumlah desa yang mengelola keuangannya dengan baik	10 Desa/Kelurahan	10.000.000	-	.-	10.000.000	-	10 Desa/Kelurahan	10.000.000
1	5	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya fasilitasi terhadap kegiatan pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kegiatan keagamaan		236.136.000			236.136.000			236.136.000
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya peringatan hari besar	2 Kegiatan	134.166.000	-	-	134.166.000	-	1 Kegiatan	134.166.000
					Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peringatan hari jadi dan HUT RI								
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan keagamaan	1 Kegiatan	17.700.000	-	-	17.700.000	-	1 Kegiatan	17.700.000
					Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat								
					Jumlah kegiatan olah raga yang diikuti	1 Kegiatann	84.270.000	-	-	84.270.000	-	1 Kegiatann	84.270.000
					Tercapainya prestasi di tingkat daerah								
2	7	17		Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pembangunan desa		400.000.000			400.000.000			400.000.000
2	7	17	3	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Terlaksananya pembangunan	10 Desa / Kelurahan	400.000.000	-	-	400.000.000	-	10 Desa / Kelurahan	400.000.000
					Terkendalnya sasaran pembangunan desa								
2	7	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa / Perangkat Desa		300.000	-	-	300.000	-		300.000
2	7	18	5	Fasilitasi Monitoring Pengisian dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terpilihnnya Kepala Desa / Perangkat Desa	2 Org / hr / angk	300.000	-	-	300.000	-	2 Org / hr / angk	300.000
					Terisnya Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa								

OPD : KECAMATAN GLADAGSARI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	7	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/Kelurahan	Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi perempuan/PKK		50.000.000	-	-	50.000.000	-		50.000.000
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah PKK desa yang dibina	10 Desa/Kelurahan	50.000.000	-	-	50.000.000	-	10 Desa/Kelurahan	50.000.000
					Terciptanya peran serta PKK dalam pembangunan								
1	3	40		Program Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			100.000.000			100.000.000			100.000.000
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 Paket	100.000.000	-	-	100.000.000	-	1 Paket	100.000.000
					Terkendalinya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum								
TOTAL PAGU 1							1.224.090.000			1.224.090.000			1.224.090.000
5	1	1		Belanja Pegawai			1.780.886.000			1.780.886.000			1.780.886.000
TOTAL PAGU 2							3.004.976.000		-	3.004.976.000			3.004.976.000

OPD : KECAMATAN CEPOGO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Bidang Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya layanan operasional perangkat daerah		323.690.000			323.690.000			323.600.000
4	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 Bulan	1.500.000	-	-	1.500.000	-	12 Bulan	1.500.000
					Terkirimnya surat-surat dinas								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi telepon, internet dan listrik	12 Bulan	18.250.000	-	-	18.250.000	-	12 Bulan	18.250.000
					Tercukupinya Kebutuhan Komunikasi dan Koordinasi Lewat Telpn dan Internet								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	4.000.000	-	-	4.000.000	-	12 Bulan	4.000.000
					Tersedianya Peralatan Kerja Yang Siap Pakai								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	12 Bulan	15.000.000	-	-	15.000.000	-	12 Bulan	15.000.000
					Tercukupinya Kebutuhan Alat - Alat Tulis Kantor								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	10.000.000	-	-	10.000.000	-	12 Bulan	10.000.000
					Tercukupinya Barang Cetakan dan Penggandaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	2.000.000	-	-	2.000.000	-	12 Bulan	2.000.000
					Tercukupinya Kebutuhan Komponen Listrik								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	3.000.000	-	-	3.000.000	-	12 Bulan	3.000.000
					Tercukupinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya kebutuhan bahan bakar minyak	4,133 liter	17.000.000	-	-	17.000.000	-	4,133 liter	17.000.000
					Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bakar Minyak								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum harian/rapat/tamu	12 Bulan	100.540.000	-	-	100.540.000	-	12 Bulan	100.450.000
					Tercukupinya Kebutuhan Makan dan Minum Harian/Rapat/Tamu								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rakor dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	45.000.000	-	-	45.000.000	-	12 Bulan	45.000.000
					Terjalinnnya Koordinasi Lintas Sektoral								
4	1	1	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Terciptanya kebersihan dan keamanan kantor	12 Bulan	107.400.000	-	-	107.400.000	-	12 Bulan	107.400.000
					Terciptanya kebersihan dan keamanan kantor								
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai		20.000.000			20.000.000			20.000.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung/bangunan kantor	12 bulan	10.000.000	-	-	10.000.000	-	12 bulan	10.000.000
					Terpenuhinya Sarana Prasarana Gedung Kantor								
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	7 Unit	10.000.000	-	-	10.000.000	-	7 Unit	10.000.000
					Tersedianya Kendaraan Dinas Yang Siap Pakai								
1	5	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan		50.000.000			50.000.000			50.000.000
1	5	15	5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya patroli pengendalian keamanan lingkungan	15 Desa/Kelurahan	50.000.000	-	-	50.000.000	-	15 Desa/ Kelurahan	50.000.000
					Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan								

OPD : KECAMATAN CEPOGO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pembinaan olah raga								79.000.000
2	7	15	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah cabang olah raga yang diikuti dalam kompetisi tingkat kabupaten	1 Jenis		-	-		-	1 Jenis	79.000.000
5	2	17		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya fungsi administrasi pemerintahan desa		6.000.000			6.000.000			6.000.000
5	2	17	14	Pendampingan Pengelolaan Keuangan	Jumlah desa yang mengelola keuangannya dengan baik	15 Desa/Kelurahan	6.000.000	.-	.-	6.000.000	.-	15 Desa/ Kelurahan	6.000.000
1	5	17		Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya fasilitasi terhadap kegiatan pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kegiatan keagamaan		230.350.000			230.350.000			230.350.000
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peringatan hari Jadi Kabupaten Boyolali	4 Kegiatan	210.350.000	-	-	210.350.000	-	4 Kegiatan	210.350.000
					terlaksananya HUT RI								
					terlaksananya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga								
					tersedianya bantuan alat kewirausahaan								
1	5	17	3	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat	1 Kegiatan	20.000.000	-	-	20.000.000	-	1 Kegiatan	20.000.000
					Tersedianya anggaran untuk pengiriman peserta lomba MTQ								
2	7	17		Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa			450.000.000			450.000.000			450.000.000
2	7	17	3	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	terlaksananya fasilitasi belanja hibah dan bantuan sosial	15 Desa/ Kelurahan	400.000.000	-	-	400.000.000	-	15 desa / Kelurahan	400.000.000
2	7	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/Kelurahan	Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi perempuan/PKK	15 Desa/Kelurahan	50.000.000	-	-	50.000.000	-	15 Desa/ Kelurahan	50.000.000
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan/PKK	15 Desa/Kelurahan	50.000.000	-	-	50.000.000	-	15 Desa/ Kelurahan	50.000.000
					Jumlah organisasi perempuan/PKK Desa yang aktif dan tertib administrasi								
1	3	40		Program Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			100.000.000			100.000.000			100.000.000
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 Paket	100.000.000	-	-	100.000.000	-	1 Paket	100.000.000
					Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana umum								
TOTAL PAGU 1							1.205.040.000			1.205.040.000			1.283.950.000
5	1	1		Belanja Pegawai			2.084.768.000			2.084.768.000			2.084.768.000
TOTAL PAGU 2							3.289.808.000			3.289.808.000			3.368.718.000

OPD : KECAMATAN SELO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat	12 Bulan	1.500.000			1.500.000	-	12 Bulan	1.500.000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	17.100.000			17.100.000		12 Bulan	38.900.000
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	12 Bulan	8.000.000			8.000.000		12 Bulan	10.000.000
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	15.000.000			15.000.000		12 Bulan	15.000.000
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	10.000.000			10.000.000		12 Bulan	10.000.000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik/telepon	12 Bulan	4.743.000			4.743.000		12 Bulan	5.000.000
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	15.000.000			15.000.000		2 Paket	50.000.000
					Tercukupinya sarana dan prasarana perlengkapan kantor								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga	12 Bulan	3.000.000			3.000.000		3 Paket	2.000.000
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	360 Buah	2.400.000			2.400.000		12 Bulan	2.400.000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercukupinya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG	12 Bulan	25.000.000			25.000.000		12 Bulan	257.500.000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan dan miuman harian, rapat dan tamu	12 Bulan	96.740.000			96.740.000		12 Bulan	99.900.000
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	60.000.000			60.000.000		12 Bulan	60.000.000
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	Terciptanya pelayanan administrasi yang baik	12 Bulan	107.400.000			107.400.000		12 Bulan	120.000.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terciptanya kenyamanan rumah dinas	1 Keg						1 Keg	
					Terciptanya kenyamanan kantor	1 Keg	35.057.000			35.057.000		1 Keg	100.000
					Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua dan roda empat	12 Bulan	14.000.000			14.000.000		12 Bulan	15.000.000
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan									
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan	1 Paket	50.000.000			50.000.000		1 Paket	50.000.000
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan									
2	7	15	4	Fasilitas kegiatan dana belanja hibah dan bantuan sosial	tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Keg	50.000.000			50.000.000		1 Keg	50.000.000

OPD : KECAMATAN SELO

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kepemudaan dan olah raga	12 Bulan	19.500.000			19.500.000		1 Paket	19.500.000
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Cakupan fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap kecamatan	2 Keg	48.000.000			48.000.000		2 Keg	50.200.000
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Meningkatkan iman dan taqwa di kalangan masyarakat	1 Keg	9.000.000			9.000.000		1 Keg	9.000.000
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa									
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Tersedianya Jambanisasi masyarakat dan Pemugaran RTLH dan Jambanisasi	1 Keg	69.000.000			69.000.000		1 Keg	400.000.000
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan									
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Meningkatnya kemampuan pengurus PKK dan tertib administrasi PKK di desa/kelurahan dan kecamatan	10 desa	50.700.000			50.700.000		10 desa	51.000.000
2	7	20		Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan									
2	7	20	6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Terciptanya administrasi, pengelolaan keuangan dan pengeloan aset desa/kelurahan yang baik	10 desa	6.000.000			6.000.000		10 desa	10.000.000
				Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Lancarnya kegiatan pemilihan kepala desa								
					Lancarnya kegiatan pemilihan dan pemberhentian perangkat desa								
				Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Lancarnya kegiatan kerja sama antar desa								
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah									
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Musrenbang	1 Keg	0			0		1 Keg	0
4	1	22		Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan									
4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Terwujudnya pelayanan administrasi dan publik kecamatan	1 Paket	0			0		1 Paket	0
1	3	40		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan									
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 Paket	100.000.000			100.000.000		1 Paket	100.000.000
TOTAL PAGU 1							817.140.000			817.140.000			
5	1	1		Belanja Pegawai			1.871.558.000			1.871.558.000			1.871.558.000
TOTAL PAGU 2							2.688.698.000			2.688.698.000			1.871.558.000

OPD : INSPEKTORAT

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat	12 Bulan	8.000.000			8.000.000		12 Bulan	8.800.000
					Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya daya listrik air dan telepon	12 Bulan	53.000.000			53.000.000		12 Bulan	58.300.000
					Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	1		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya transaksi keuangan OPD	12 Bulan	1.000.000			1.000.000		12 Bulan	
					Terbayarnya transaksi keuangan	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor	12 Bulan	40.000.000			40.000.000		12 Bulan	44.000.000
					Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	69.000.000			69.000.000		12 Bulan	75.900.000
					Terpenuhinya alat tulis kantor	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	52.000.000			52.000.000		12 Bulan	57.200.000
					Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya alat listrik dan elektronik	12 Bulan	5.000.000			5.000.000		12 Bulan	5.500.000
					Terpenuhinya alat listrik dan elektronik	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor dan perlengkapan kantor	5 unit	90.000.000			90.000.000		5 unit	99.000.000
					Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit						5 unit	
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	9.000.000			9.000.000		12 Bulan	9.900.000
					Tercukupinya peralatan rumah tangga	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Tersedianya bahan bacaan dan perundangan-undangan	360 Buah	3.000.000			3.000.000		360 Buah	3.300.000
					Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	13.000 liter	130.000.000			130.000.000		13.000 liter	143.000.000
					Tercukupinya operasional perjalanan dinas	13.000 liter						13.000 liter	
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	12 Bulan	90.000.000			90.000.000		12 Bulan	99.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan makan minum kantor	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya konsultasi keluar daerah	12 Bulan	385.000.000			385.000.000		12 Bulan	423.500.000
					Terpenuhinya konsultasi luar daerah	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya tenaga non PNS	12 Bulan	133.443.000			133.443.000		12 Bulan	146.787.300
					Terpenuhinya tenaga non PNS	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									-
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan kedung kantor	12 Bulan						12 Bulan	-
					Tersedianyanya gedung yang siap pakai	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	12 Bulan	100.000.000			100.000.000		12 Bulan	110.000.000
					Tersedianya kendaraan yang siap pakai	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya pemeliharaan mebelair	12 Bulan	1.000.000			1.000.000		12 Bulan	1.100.000
					Tersedianya mebelair yang siap pakai								
				Pengawasan									
4	2	1		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Menurunnya temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	25 Temuan/ Rekomendasi						25 Temuan/ Rekomendasi	
4	2	1	1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala									
				Reviu/ Evaluasi Capaian RPJMD	Reviu/ Evaluasi Capaian RPJMD	1 laporan	0			0		1 laporan	-
				Reviu RKPD	Terlaksananya Reviu RKPD	1 laporan	0			0		1 laporan	-
				Reviu RKA	Terlaksananya Reviu RKA	9 laporan	0			0		9 laporan	-
				Reviu LKPD	Terlaksananya Reviu LKPD	9 laporan	0			0		9 laporan	-
				Reviu dan Evaluasi Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu dan Evaluasi Laporan Kinerja	9 laporan	0			0		9 laporan	-
				Reviu Penyerapan Anggaran	Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran	1 laporan	0			0		1 laporan	-
				Reviu Laporan Keuangan Desa	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Desa	1 laporan	0			0		1 laporan	-

OPD : INSPEKTORAT

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeriksaan kinerja perangkat daerah (Pendapatan, BM, Belanja B/J, Lainnya)	Terlaksananya Pemeriksaan kinerja perangkat daerah (Pendapatan, BM, Belanja B/J, Lainnya)	20 laporan	0			0		20 laporan	-
	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Pemeriksaan Investigatif, Proses Penyelesaian TP/TGR, Penghitungan Kerugian Negara, Pemeriksaan Kepatuhan UKPBJ, Pemeriksaan Kepatuhan Proses Perijinan dan Non Perijinan	Terlaksananya Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Pemeriksaan Investigatif, Proses Penyelesaian TP/TGR, Penghitungan Kerugian Negara, Pemeriksaan Kepatuhan UKPBJ, Pemeriksaan Kepatuhan Proses Perijinan dan Non Perijinan	40 laporan	0			0		40 laporan	-
	Pemeriksaan serentak kas opname OPD	Terlaksananya Pemeriksaan serentak kas opname OPD	8 laporan	0			0		8 laporan	-
	Pemeriksaan pajak dan retribusi daerah	Terlaksananya Pemeriksaan pajak dan retribusi daerah	4 laporan	0			0		4 laporan	-
	Evaluasi SPIP	Terlaksananya Evaluasi SPIP	8 laporan	0			0		8 laporan	-
	Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terlaksananya Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 laporan	0			0		1 laporan	-
	Monitoring dan Evaluasi TLHP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi TLHP	36 laporan	0			0		36 laporan	-
4 2 1 18	Pengembangan Peran Konsultan dan Agen Perubahan									-
	Rekrutmen, Pelatihan dan Pengembangan Kerjasama “Agen Perubahan OPD” Admin RB dan Integritas	Terlaksananya Rekrutmen, Pelatihan dan Pengembangan Kerjasama “Agen Perubahan OPD” Admin RB dan Integritas	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	Rekrutmen, Pelatihan dan Pengembangan Kerjasama “Agen Perubahan Desa”	Rekrutmen, Pelatihan dan Pengembangan Kerjasama “Agen Perubahan Desa”	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	Jejaring Pengawasan (Pengawas BLUD, PPNS, dan Stakeholder)	Jejaring Pengawasan (Pengawas BLUD, PPNS, dan Stakeholder)	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	Pengembangan Layanan Konsultasi Auditor (Auditor Pendamping, Auditor Menjawab)	Pengembangan Layanan Konsultasi Auditor (Auditor Pendamping, Auditor Menjawab)	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	Pendampingan Optimalisasi Pendapatan Daerah, dengan Pemantauan Belanja Per-Jenis, Sumber Anggaran, dan OPD (SIPAD)	Pendampingan Optimalisasi Pendapatan Daerah, dengan Pemantauan Belanja Per-Jenis, Sumber Anggaran, dan OPD (SIPAD)	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	Pendampingan Efisiensi Belanja Daerah, dengan Pemantauan Belanja Per-Jenis, Sumber Anggaran, dan OPD (E-Laporan/E-Money)	Pendampingan Efisiensi Belanja Daerah, dengan Pemantauan Belanja Per-Jenis, Sumber Anggaran, dan OPD (E-Laporan/E-Money)	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	Pendampingan Efektifitas Pembiayaan Daerah, dengan Penguatan Peran Komite Audit BUMD dan Audit Committee Charter	Pendampingan Efektifitas Pembiayaan Daerah, dengan Penguatan Peran Komite Audit BUMD dan Audit Committee Charter	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan Pemantauan APBDes melalui Siskeudes, Siswaskeudes dan Sipades	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan Pemantauan APBDes melalui Siskeudes, Siswaskeudes dan Sipades	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Sekolah, dengan Pemantauan BOS	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Sekolah, dengan Pemantauan BOS	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	Fasilitasi Pendidikan Anti Korupsi	Fasilitasi Pendidikan Anti Korupsi	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
4 2 1 19	Pengawasan Prioritas Nasional									-
	Koordinasi Teknis APIP dan APH/ penanganan laporan pengaduan masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Teknis APIP dan APH/ penanganan laporan pengaduan masyarakat	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	Koordinasi dan operasionalisasi SABER PUNGLI	Terlaksananya Koordinasi dan operasionalisasi SABER PUNGLI	12 Laporan	108.400.000			108.400.000		12 Laporan	119.240.000
	Evaluasi perencanaan dan penganggaran Responsive gender	Terlaksananya Evaluasi perencanaan dan penganggaran Responsive gender	1 laporan	0			0		1 laporan	-
	Pemeriksaan/ Reviu Dana Desa	Terlaksananya Pemeriksaan/ Reviu Dana Desa	1 laporan	0			0		1 laporan	-
	Joint Audit Dana Desa dengan KAP	Terlaksananya Joint Audit Laporan Keuangan Desa dengan KAP	22 Lap	110.000.000			110.000.000		22 Lap	121.000.000
	Pemeriksaan Dana BOS	Terlaksananya Pemeriksaan Dana BOS	1 laporan	0			0		1 laporan	-
										-
4 2 1 20	Pengawasan Reformasi Birokrasi									-
	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	Asistensi Pembangunan RB sub area penguatan pengawasan,	Terlaksananya Asistensi Pembangunan RB sub area penguatan pengawasan,								-
	- SPIP/ Maturitas SPIP		1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	- Kapabilitas APIP		1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-

OPD : INSPEKTORAT

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Verifikasi LHKPN/ LHKASN/ SIHARKABOY		1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	- Verifikasi MCP Boyolali		1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	- Penilaian Zona Integritas (ZI)		1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	- Penanganan benturan kepentingan		1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	- Penanganan laporan pengaduan (<i>whistle blower system</i>)		1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	- Penanganan pengaduan masyarakat		1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	Evaluasi Pelayanan Publik	Terlaksananya Evaluasi Pelayanan Publik	1 laporan	0			0		1 laporan	-
	Reward LHKPN, LHKASN, SIHARKABOY, Pelaporan Gratifikasi dan Integritas OPD dan ASN	Terlaksananya Reward LHKPN, LHKASN, SIHARKABOY, Pelaporan Gratifikasi dan Integritas OPD dan ASN	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	Paparan/ Pameran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Paparan/ Pameran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 kegiatan	40.000.000			40.000.000		1 kegiatan	44.000.000
4 2 1 21	Penegakan Integritas									-
	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Terlaksananya Survey Penilaian Integritas (SPI)	6 OPD	100.000.000			100.000.000		6 OPD	110.000.000
	Penanganan Laporan Gratifikasi – UPG	Terlaksananya Penanganan Laporan Gratifikasi – UPG	1 laporan	0			0		1 laporan	-
	Aksi Pencegahan Korupsi/ Stranas PK	Terlaksananya Aksi Pencegahan Korupsi/ Stranas PK	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi/ MCP Korsupgah	Terlaksananya Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi/ MCP Korsupgah	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	Pendidikan Anti Korupsi	Terlaksananya Pendidikan Anti Korupsi		0			0			-
	- Sosialisasi bersama APH		1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	- Pendidikan Anti Korupsi Legislatif - Eksekutif		1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	- Pendidikan Anti Korupsi Desa/ Kelurahan - Kecamatan		1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	- Pendidikan Anti Korupsi bersama Disdik		1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	- Pendidikan Anti Korupsi Stakeholder lainnya		1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	Hakordia	Terlaksananya Hakordia	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	Lomba Penilaian Integritas	Terlaksananya Lomba Penilaian Integritas	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	-
	Larwasda	Terlaksananya Larwasda	1 Kegiatan	10.000.000			10.000.000		1 Kegiatan	11.000.000
4 2 1 22	Pengembangan Teknologi Informasi Pengawasan									-
	Pengembangan Siswasda – E Audit	Terlaksananya Pengembangan Siswasda – E Audit	1 Kegiatan	0			0		1 Kegiatan	-
	Pengembangan E WBS	Terlaksananya Pengembangan E WBS	1 Kegiatan	0			0		1 Kegiatan	-
	Pembuatan Video Kampanye Pengawasan, Integritas dan Anti Korupsi	Terlaksananya Pembuatan Video Kampanye Pengawasan, Integritas dan Anti Korupsi	1 Kegiatan	0			0		1 Kegiatan	-
	Lomba Fotografi “Integritas – Manfaat”	Terlaksananya Lomba Fotografi “Integritas – Manfaat”	1 Kegiatan	0			0		1 Kegiatan	-
	Pemanfaatan Aplikasi Pengawasan Keuangan/ Kinerja Daerah (Sibangun, Simda, BMD, E Laporan, E Monev , E TPP)	Terlaksananya Pemanfaatan Aplikasi Pengawasan Keuangan/ Kinerja Daerah (Sibangun, Simda, BMD, E Laporan, E Monev , E TPP)	1 Kegiatan	0			0		1 Kegiatan	-
	Pemanfaatan Aplikasi Layanan Konsultasi Auditor (Auditor Pendamping, Auditor Menjawab)	Pemanfaatan Aplikasi Layanan Konsultasi Auditor (Auditor Pendamping, Auditor Menjawab)	1 Kegiatan	0			0		1 Kegiatan	-
	Pemanfaatan Aplikasi Belanja Per-Jenis, Sumber Anggaran, dan OPD (SIPAD)	Terlaksananya Pemanfaatan Aplikasi Belanja Per-Jenis, Sumber Anggaran, dan OPD (SIPAD)	1 Kegiatan	0			0		1 Kegiatan	-
	Pemanfaatan Aplikasi Belanja Per-Jenis, Sumber Anggaran, dan OPD (E-Laporan/ E Monev)	Terlaksananya Pemanfaatan Aplikasi Belanja Per-Jenis, Sumber Anggaran, dan OPD (E-Laporan/ E Monev)	1 Kegiatan	0			0		1 Kegiatan	-
	Pemanfaatan Aplikasi Komite Audit pada LK-BUMD	Terlaksananya Pemanfaatan Aplikasi Komite Audit pada LK-BUMD	1 Kegiatan	0			0		1 Kegiatan	-
	Pemanfaatan Aplikasi Pemantauan APBDes melalui Siskeudes, Siswaskeudes dan Sipades	Terlaksananya Pemanfaatan Aplikasi Pemantauan APBDes melalui Siskeudes, Siswaskeudes dan Sipades	1 Kegiatan	0			0		1 Kegiatan	-
	Pemanfaatan Aplikasi SI-RB OPD	Terlaksananya Pemanfaatan Aplikasi SI-RB OPD	1 Kegiatan	0			0		1 Kegiatan	-
4 2 1 16	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional	86 prosentase						86 prosentase	-
4 2 1 3	Peningkatan kapasitas / Kapabilitas APIP	Terselenggaranya Pelatihan di Kantor Sendiri, Penilaian Kapabilitas APIP, dan Penilaian Angka Kredit								-
		Peningkatan Level Kapabilitas APIP								
	Diklat Pemeriksaan Investigatif		0	0			0		0	-

OPD : INSPEKTORAT

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
							Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Diklat Audit Kinerja.		25 auditor	95.000.000			95.000.000		25 auditor	104.500.000
					Diklat Probity		0	0			0		0	-
					Diklat Manajemen Resiko		0	0			0		0	-
					Bimtek Pemeriksaan DAK		0	0			0		0	-
					Diklat Audit Forensik		0	0			0		0	-
					Sertifikasi Profesi		0	0			0		0	-
					Bimtek Penyusunan LK Desa Reviu LK Desa		0	0			0		0	-
					Bimtek Simwas, E Planning-E Budgeting, BMD, SIM BOS		0	0			0		0	-
TOTAL PAGU 1								1.632.843.000			1.632.843.000			1.795.027.300
5	1	1			Belanja Pegawai			6.072.252.000			6.072.252.000			6.072.252.000
TOTAL PAGU 2								7.705.095.000			7.705.095.000			7.867.279.300

OPD : BP3D

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	14			Statistik									
2	14	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	7 Dokumen	25.000.000			25.000.000			25.000.000
2	14	15	1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Boyolali.	1 Dokumen	25.000.000			25.000.000		1 Dokumen	25.000.000
					Tersusunnya buku indek pembangunan manusia	1 Dokumen						1 Dokumen	
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	3			Admininstrasi Pemerintahan									
4	3	1		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terukurnya perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	12 Bulan	0			0			0
4	3	1	17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Laporan BL, RKT, LKjIP, SPIP, Renja, RKA, RKAP, DPA, DPAP	9 dokumen	0			0		12 Bulan	0
												12 Bulan	
					Terukurnya capaian realisasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	0			0			0
					Tersusunnya dokumen keuangan bulanan, semesteran, prognosis, CaLK	16 dokumen	0			0		12 Bulan	1.000.000
												12 Bulan	
4	3	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah	12 Bulan	2.258.000.000			2.258.000.000			2.258.000.000
4	3	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	1.000.000			1.000.000		12 Bulan	1.000.000
					Medukung kinerja pelaksanaan kedinasan	12 Bulan						12 Bulan	
4	3	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 Bulan	100.000.000			100.000.000		12 Bulan	100.000.000
					Tercukupinya kebutuhan listrik, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan						12 Bulan	
4	3	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	100.000.000			100.000.000		12 Bulan	100.000.000
					Kendaraan dinas siap pakai untuk operasional kantor	12 Bulan						12 Bulan	
4	3	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya transaksi keuangan OPD	12 Bulan	3.500.000			3.500.000		12 Bulan	3.500.000
					Terbayarnya transaksi keuangan	12 Bulan						12 Bulan	
4	3	1	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	15.000.000			15.000.000		12 Bulan	15.000.000
					Tercukupinya kebersihan kantor	12 Bulan						12 Bulan	
4	3	1	6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya kelancaran tugas kantor	12 Bulan	60.000.000			60.000.000		12 Bulan	60.000.000
					Peralatan dan perlengkapan kantor siap pakai	12 Bulan						12 Bulan	
4	3	1	7	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	160.000.000			160.000.000		12 Bulan	160.000.000
					Kelancaran administrasi perkantoran	12 Bulan						12 Bulan	
4	3	1	8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	120.000.000			120.000.000		12 Bulan	120.000.000
					Kelancaran administrasi perkantoran	12 Bulan						12 Bulan	
4	3	1	9	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	15.000.000			15.000.000		12 Bulan	15.000.000
					Tercukupinya komponen instalasi listrik/telepon	12 Bulan						12 Bulan	
4	3	1	10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Unit	100.000.000			100.000.000		5 Unit	100.000.000
					Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Unit						5 Unit	
4	3	1	11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	12 Bulan	6.000.000			6.000.000		12 Bulan	6.000.000
					Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	12 Bulan						12 Bulan	
4	3	1	12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.000 Buah	2.500.000			2.500.000		300 buah	2.500.000

OPD : BP3D

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundangan	1.000 Buah						300 buah	
4	3	1	13	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	13.000 Liter	140.000.000			140.000.000		13.000 Liter	140.000.000
					Tercukupinya operasional perjalanan dinas	13.000 Liter						13.000 Liter	
4	3	1	14	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makan minum kantor	12 Bulan	210.000.000			210.000.000		12 Bulan	210.000.000
					Tercukupinya kebutuhan makan dan minum kantor	12 Bulan						12 Bulan	
4	3	1	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	800.000.000			800.000.000		12 Bulan	800.000.000
					Lapuan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan						12 Bulan	
4	3	1	16	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	425.000.000			425.000.000		12 Bulan	425.000.000
					Terpenuhinya honor tenaga PTT kantor	12 Bulan						12 Bulan	
4	3	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional sarana dan prasarana perangkat daerah	12 Bulan	130.000.000			130.000.000			260.000.000
4	3	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	80.000.000			80.000.000		12 Bulan	80.000.000
					Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan						12 Bulan	
4	3	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Paket	50.000.000			50.000.000		12 Bulan	50.000.000
					Terciptanya kenyamanan kerja	1 Paket						12 Bulan	
4	3	15		Program pengembangan data/informasi	Dokumen data informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan	5 Dokumen	100.000.000			100.000.000			200.000.000
4	3	15	1	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen studi kelayakan kawasan industri	1 Dokumen	100.000.000			100.000.000		1 Dokumen	100.000.000
					Hasil yang didapat berupa 1 aplikasi infrastruktur daerah Kabupaten Boyolali	1 Dokumen						1 Dokumen	
							70.000.000			70.000.000			
4	3	15	2	Penyusunan dan Pengelolaan SIPD Online	Jumlah paket aplikasi SIPD online Kabupaten Boyolali	1 Paket	45.000.000		1 Paket	45.000.000		1 Paket	45.000.000
					Tersusunnya aplikasi SIPD online Kabupaten Boyolali	1 Paket						1 Paket	
4	3	15	3	Pengelolaan dan Pengembangan Web	Tersusunnya,terkelolanya, dan terupdatenya web Bappeda	12 Bulan	25.000.000			25.000.000		12 Bulan	25.000.000
					Tersusun terkelolanya dan ter updatenya website BP3D	12 Bulan						12 Bulan	
4	3	19		Program perencanaan pengembangan kota- kota menengah dan besar	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan air minum/air bersih dan sanitasi	2 Dokumen	85.000.000			85.000.000			170.000.000
2	3	19	1	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah dokumen kebijakan teknis perencanaan pengembangan air minum/air bersih dan sanitasi	1 Dokumen	85.000.000			85.000.000		1 Dokumen	85.000.000
					Tersusunnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan air minum/air bersih dan sanitasi.	1 Dokumen						1 Dokumen	
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan daerah yang dipublikasikan. Dokumen RKPD dan RPJMD/Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	3 Dokumen/3 Dokumen	450.000.000			450.000.000			900.000.000
4	3	21	1	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD	1 Dokumen	260.000.000			260.000.000		1 Dokumen	260.000.000
					Tersusunnya perencanaan jangka menengah sesuai dengan regulasi	1 Dokumen						1 Dokumen	
4	3	21	2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi	2 Dokumen	190.000.000			190.000.000		2 Dokumen	190.000.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan, evaluasi RPJMD, aplikasi laporan, laporan bulanan dan triwulanan, laporan monev, buku sebaran lokasi kegiatan	2 Dokumen						2 Dokumen	
					Tersusunnya dokumen perencanaan daerah yang dipublikasikan	10 Dokumen	100.000.000			100.000.000			200.000.000
4	3	21	3	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	1 Dokumen	100.000.000			100.000.000		1 Dokumen	100.000.000
					Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	1 Dokumen						1 Dokumen	
4	3	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan ekonomi	3 Dokumen	160.000.000			160.000.000			320.000.000
4	3	22	1	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	Jumlah dokumen pendampingan penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat (PLKSDA)	2 Dokumen	160.000.000			160.000.000		2 Dokumen	160.000.000
					Dokumen produk unggulan Kabupaten Boyolali	2 Dokumen						2 Dokumen	
4	3	23		Program perencanaan sosial dan budaya	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan sosial budaya	4 Dokumen	120.000.000			120.000.000			120.000.000
4	3	23	1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen pelaporan bidang sosial budaya	4 Dokumen	120.000.000			120.000.000		4 Dokumen	120.000.000
					Tersusunnya dokumen pelaporan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	4 Dokumen						4 Dokumen	
4	3	24		Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Kajian rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Dokumen	100.000.000			100.000.000			200.000.000
4	3	24	1	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (KLHS)	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1 Dokumen	100.000.000			100.000.000		1 Dokumen	100.000.000
					Sebagai dasar penyusunan perbub RAD pangan dan gizi	1 Dokumen						1 Dokumen	
4	3	25		Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Tersusunnya studi data infrastruktur dan potensi rawan bencana	1 Dokumen	70.000.000			70.000.000			140.000.000
4	3	25	1	Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	Jumlah dokumen studi potensi rawan bencana	1 Dokumen	70.000.000			70.000.000		1 Dokumen	70.000.000
					Dokumen rawan bencana Kecamatan Juwangi	1 Dokumen						1 Dokumen	
4	3	27		Program Perencanaan Pembangunan bidang pemerintahan	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan permukiman perdesaan	5 Dokumen	30.000.000			30.000.000			60.000.000
4	3	27	1	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	1 Dokumen	30.000.000			30.000.000		1 Dokumen	30.000.000
					Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan permukiman perdesaan	4 Dokumen						4 Dokumen	
4	7			Penelitian dan Pengembangan									
4	7	15		Program Penelitian dan pengembangan inovasi daerah	Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	8 inventor	390.000.000			390.000.000			780.000.000
4	7	15	1	Penjaringan KRENOVA Kabupaten Boyolali	Jumlah inovasi hasil pemenang lomba krenova	2 inventor	150.000.000			150.000.000		2 inventor	200.000.000
					Inventor pemenang lomba krenova	2 inventor						2 inventor	
4	7	15	2	Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	Terkoordinasinya sistem perencanaan bidang litbang di Kabupaten Boyolali	12 Bulan	30.000.000			30.000.000		12 Bulan	30.000.000
					Kegiatan litbang dapat berjalan lancar dan optimal sehingga sasaran dan tujuan dapat tercapai	12 Bulan						12 Bulan	
4	7	15	3	Kajian Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen kajian litbang Dokumen /aplikasi rekomendasi dan izin penelitian	1 Dokumen	70.000.000			70.000.000		1 Dokumen	70.000.000
						1 Dokumen						1 Dokumen	

OPD : BP3D

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
							Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	7	15	4		Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan SIDA	1 Dokumen	70.000.000			70.000.000		1 Dokumen	70.000.000
						Terwujudnya kapasitas kelembagaan SIDA yang memadai (1 dokumen)	1 Dokumen						1 Dokumen	
4	7	15	5		Fasilitasi penerapan hasil penelitian dan pengembangan		1 Dokumen	70.000.000			70.000.000		1 Dokumen	70.000.000
TOTAL PAGU 1									4.088.000.000			4.088.000.000		4.886.000.000
5	1	1			Belanja Pegawai			5.136.275.000			5.136.275.000			5.136.275.000
TOTAL PAGU 2									9.224.275.000			9.224.275.000		10.022.275.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.129.797.000						3.443.334.700
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat terkirim	12 bulan	12.000.000			12.000.000		12 bulan	13.200.000
					Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpeliharanya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	382.000.000			382.000.000		12 bulan	420.200.000
					tercukupinya jasa komunikasi sumber daya dan air								
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	30 Kendaraan	105.092.000			105.092.000		30 Kendaraan	115.601.200
					pembayaran jasa pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional								
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terpenuhinya jasa administrasi keuangan	12 bulan	71.392.000			71.392.000		12 bulan	79.125.200
					terlaksananya jasa administrasi keuangan								
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tenaga kebersihan	12 bulan	20.000.000			20.000.000		12 bulan	22.000.000
					terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tercukupinya jasa perbaikan peralatan kerja	166 unit	92.923.000			92.923.000		166 unit	102.215.300
					jumlah peralatan kerja yang diperbaiki								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	tercukupinya perlengkapan alat tulis kantor	12 bulan	185.811.000			185.811.000		12 bulan	204.392.100
					alat tulis perkantoran								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tercukupinya barang cetakan dan pengadaan	12 bulan	430.000.000			430.000.000		12 bulan	473.000.000
					tersedianya barang cetakan dan pengadaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	tercukupinya kebutuhan komponen listrik dan penerangan	12 bulan	15.000.000			15.000.000		12 bulan	16.500.000
					tercukupinya kebutuhan komponen listrik dan penerangan								
					tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	12 bulan	7.500.000			7.500.000		12 bulan	8.250.000
					tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	12 bulan							
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	10 jenis	517.000.000			517.000.000		10 jenis	568.700.000
					terlaksananya jasa perbaikan peralatan kantor								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	14.050.000			14.050.000		12 bulan	15.455.000
					terwujudnya peralatan rumah tangga yang memadai								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	8.810.000			8.810.000		12 bulan	9.691.000
					tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	tercukupinya kebutuhan bahan logistik kantor	12 bulan	127.500.000			127.500.000		12 bulan	140.250.000
					tersedianya bahan logistik kantor BBM,tabung pemadan kebakaran dan tabung gas LPG								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman rapat tamu harian	12 bulan	207.610.000			207.610.000		12 bulan	228.371.000
					tersedianya makan dan minum rapat tamu dan harian pegawai								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	implementasi hasil rapat dan koordinasi keluar daerah	12 bulan	544.410.000			544.410.000		12 bulan	598.815.000
					terlaksananya rapat dan koordinasi keluar daerah								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kebersihan	12 bulan	388.699.000			388.699.000		12 bulan	427.568.900
					terpenuhinya kebutuhan tenaga kebersihan dan keamanan serta administrasi perkantoran								
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			19.479.218.000						21.427.139.800
4	1	2	5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	44 Kendaraan	8.265.761.000			8.265.761.000		44 Kendaraan	9.092.337.100
					terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional								
4	1	2	10	Pengadaan mebeleur	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	3 Paket	260.980.000			260.980.000		3 Paket	287.078.000
					terlaksananya sarana dan prasarana aparatur								
4	1	2	11	Pengadaan Tanah	Terlaksananya pengadaan tanah untuk fasilitas umum	3 Paket	10.304.113.000			10.304.113.000		3 Paket	11.334.524.300
					terlaksanya pengadaan tanah untuk fasilitas umum								
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung yang representatif	2 Paket	643.364.000			643.364.000		2 Paket	707.700.400
					terlaksananya pemeliharaan gedung								

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	2	29		Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpenuhinya sarana dan prasarana mebeleur yang memadai	1 Paket	5.000.000			5.000.000		1 Paket	5.500.000
						tersedianya biaya untuk pemeliharaan rutin mebeleur								
4	1	5			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Bertambahnya PAD								
4	1	5	1		Penyusunan analisa standar belanja	Tercukupinya kebijakan akuntansi pemerintah daerah	2 Dokumen	45.290.000			45.290.000		2 Dokumen	49.819.000
						terselesainya penyusunan analisa								
						Tercukupinya kebijakan akuntansi pemerintah daerah	2 Dokumen	22.645.000			22.645.000		2 Dokumen	24.909.500
						terselesainya penyusunan analisa	2 Dokumen							
4	1	5	4		Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	tersedianya pedoman penata uasahaan pelaksanaan APBD	2 Dokumen	91.000.000			91.000.000		2 Dokumen	100.100.000
						tersusunnya pedoman penata usahaan pelaksanaan APBD								
4	1	5	6		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	dilaksanakannya perda APBD dan peraturan KDH oleh SKPD	2 Kegiatan	40.000.000			40.000.000		2 Kegiatan	44.000.000
						dilaksanakannya perda APBD dan peraturan KDH oleh SKPD								
						dilaksanakannya perda APBD dan peraturan KDH oleh SKPD	2 Kegiatan	-			-		2 kegiatan	-
						dilaksanakannya perda APBD dan peraturan KDH oleh SKPD								
4	1	5	10		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	ranperda/perda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	2 Buku	70.551.000			70.551.000		2 Buku	77.606.100
						perda perbub pertanggungjawaban pelaksanaan APBD								
4	1	5	13		Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	tercukupinya laporan keuangan yang terintegritas	100 Prosentase	50.385.000			50.385.000		100 Prosentase	55.423.500
						tersedianya update dan versi terbaru program SIMDA pendapatan dan SIMDA keuangan								
4	1	5	16		Peningkatan manajemen aset/barang daerah	update data aset tetap pemerintah Kabupaten Boyolali sesuai dengan akuntansi pemerintahan	160 SKPD/UPT	88.000.000			88.000.000		160 SKPD/UPT	96.800.000
						terpenuhinya data aset tetap pemerintah kabupaten boyolali sesuai standar akuntansi pemerintahan								
4	1	5	18		Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	terpenuhinya data penilaian barang milik daerah	3 Paket	330.000.000			330.000.000		3 Paket	363.000.000
						terlaksananya barang milik daerah oleh pihak lain								
4	1	5	24		Koordinasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	laporan rekonsiliasi pendapatan deposito	12 Bulan	50.000.000			50.000.000		12 Bulan	55.000.000
						laporan rekonsiliasi pendapatan deposito								
4	1	5	28		Penatausahaan Barang Milik Daerah	terpenuhinya data aset yang valid guna penyusunan laporan	160 SKPD/UPT	100.000.000			100.000.000		160 SKPD/UPT	110.000.000
						terlaksananya data aset daerah yang valid guna penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten boyolali								
4	1	5	29		Pemanfaatan Barang Milik Daerah	peningkatan PAD dari pemanfaatan BMD	20 Bidang Tanah	50.000.000			50.000.000		20 Bidang Tanah	55.000.000
						terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah								
4	1	5	30		Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah	meningkatnya bukti kepemilikan tanah milik pemerintah kabupaten	45 Sertifikat / stnk	568.630.000			568.630.000		45 Sertifikat / stnk	625.493.000
						terpenuhinya bukti kepemilikan tanah, terlaksananya pengamanan BMD								
4	1	5	31		Penghapusan dan Pemindah Tanganan Aset	terlaksananya penghapusan barang milik daerah	2 Kegiatan	103.000.000			103.000.000		2 Kegiatan	113.300.000
						terlaksananya penghapusan BMD kab.Boyolali	2 Kegiatan							
4	1	5	44		Pengembangan Pengelolaan Gaji	terlaksananya tertib administrasi gaji	1 Paket	170.000.000			170.000.000		1 Paket	187.000.000
						terwujudnya tertib administrasi gaji								
4	1	5	46		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase	3.780.031.000			3.780.031.000		100 Prosentase	4.158.034.100
						terwujudnya laporan meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase							
						meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase	-			-		100 Prosentase	-

OPD : BKD

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
								Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							terwujudnya laporan meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase							
							meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase	-			-		100 Prosentase	-
							terwujudnya laporan meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase							
							meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase	-			-		100 Prosentase	-
							terwujudnya laporan meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase							
							meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase	-			-		100 Prosentase	-
							terwujudnya laporan meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase							
							meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase	-			-		100 Prosentase	-
							terwujudnya laporan meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase							
TOTAL PAGU 1									28.138.402.000			28.138.402.000			30.952.800.200
							Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase	3.780.031.000		3.780.031.000		100 Prosentase	4.158.034.100
							terwujudnya laporan meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase							
							meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase						100 Prosentase	-
							terwujudnya laporan meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase							
							meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase						100 Prosentase	-
							terwujudnya laporan meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase							
							meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase						100 Prosentase	-
							terwujudnya laporan meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase							
							meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase						100 Prosentase	-
							terwujudnya laporan meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase							
							meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase						100 Prosentase	-
							terwujudnya laporan meningkatnya pajak daerah	100 Prosentase							
5	1	1				Belanja Pegawai			42.630.140.000			42.630.140.000			42.630.140.000
5	1	6				Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Daerah			14.854.110.000			14.854.110.000			
5	1	7				Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik			356.786.129.000			356.786.129.000			
TOTAL PAGU 2									446.188.812.000			446.188.812.000			73.582.940.200

OPD : BKP2D

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				Urusan Fungsi Penunjang									
4	1			Administrasi Pemerintahan									
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.466.117.000			1.466.117.000			1.556.876.000
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan atas jasa surat menyurat	12 Bulan	5.580.000			5.580.000		12 Bulan	6.000.000
4	5	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat tepat waktu	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terbayarnya jasa komunikasi, air, listrik dan internet	12 Bulan	81.000.000			81.000.000		12 Bulan	85.000.000
4	5	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air		12 Bulan						12 Bulan	
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	85.000.000			85.000.000		12 Bulan	90.000.000
4	5	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelayakan kendaraan untuk kegiatan dinas	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	terlaksananya penyediaan ATK	12 Bulan	59.570.000			59.570.000		12 Bulan	70.000.000
4	5	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan ATK	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya cetakan dan pengadaan	12 Bulan	38.488.000			38.488.000		12 Bulan	45.000.000
4	5	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	terlaksananya penyediaan komponen listrik- listrik dan telepon	12 Bulan	9.000.000			9.000.000		12 Bulan	9.000.000
4	5	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	tercukupinya komponen instalasi listrik dan telepon	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pembelian peralatan kantor	40 Unit	50.000.000			50.000.000		40 Unit	50.000.000
4	5	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	40 Unit						40 Unit	
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor	27 Jenis	10.000.000			10.000.000		27 Jenis	10.000.000
4	5	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	27 Jenis						27 Jenis	
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terlaksananya penyediaan surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	720 Buah	1.800.000			1.800.000		720 Buah	2.000.000
4	5	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	720 Buah						720 Buah	
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya penyediaan logistik kantor	10.000 Liter	127.350.000			127.350.000		10.000 Liter	137.350.000
4	5	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya logistik kantor	10.000 Liter						10.000 Liter	
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman kebutuhan dinas	12 Bulan	153.526.000			153.526.000		12 Bulan	158.526.000
4	5	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makanan dan minuman kebutuhan dinas	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Terlaksananya perjalanan dinas	12 Bulan	712.803.000			712.803.000		12 Bulan	750.000.000

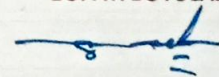
KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	5	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pembayaran upah dan asuransi kesehatan pegawai non PNS	12 Bulan	132.000.000			132.000.000		12 Bulan	144.000.000
4	5	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tercukupinya upah dan asuransi kesehatan pegawai non PNS	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			103.500.000			103.500.000			
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	88.500.000			88.500.000		12 Bulan	100.000.000
4	5	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan						12 Bulan	
4	1	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya perawatan Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	15.000.000			15.000.000		12 Bulan	20.000.000
4	5	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan						12 Bulan	
4	3			Perencanaan									
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah									
4	3	21	16	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen Renstra dan Renja	1 Dokumen						1 Dokumen	
4	3	21	16	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja SKPD	1 Dokumen						1 Dokumen	
4	5			Kepegawaian									
4	5	3		Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan tingkat ketaatan aparatur terhadap peraturan kepegawaian/ Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur beserta perlengkapannya	100%	490.000.000			490.000.000			490.000.000
4	5	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya proses pengadaan pakaian dinas aparatur daerah	9.000 Orang	490.000.000			490.000.000		9.000 Orang	490.000.000
4	5	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparatur daerah	9.000 Orang						9.000 Orang	
4	5	4		Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Prosentase pegawai yang memperoleh keputusan pensiun tepat waktu	100%	142.144.000			142.144.000			150.000.000
4	5	4	4	Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki masa purna tugas	Terlaksananya Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki masa purna tugas	400 Orang	142.144.000			142.144.000		400 Orang	150.000.000
4	5	4	4	Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki masa purna tugas	Terbekalnya PNS yang akan memasuki masa purna tugas	400 Orang						400 Orang	
4	5	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur yang memiliki sertifikasi pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugasnya	12%	3.112.842.000			3.112.842.000			7.882.250.000
4	5	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi dan workshop dalam bidang kepegawaian	600 Orang	7.250.000			7.250.000		600 Orang	7.250.000
4	5	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya jumlah aparatur daerah yang mengikuti sosialisasi dan workshop bidang kepegawaian	600 Orang						600 Orang	
4	5	5	5	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Keikutsertaan peserta dalam diklat prajabatan	150 Orang	2.790.467.000			2.790.467.000		500 Orang	7.500.000.000

OPD : BKP2D

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
						Target Capaian Kinerja	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	5	5	5	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon	lulusnya peserta diklat prajabatan	150 Orang						500 Orang	
4	5	5	6	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Terkirimnya peserta diklat, rakor, ratek lokakarya	250 Orang	315.125.000			315.125.000		250 Orang	375.000.000
4	5	5	6	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Meningkatnya jumlah PNS yang mengikuti diklat, rakor, ratek dan lokakarya	250 Orang						250 Orang	
4	5	16		Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya/Prosentase penyelesaian kasus-kasus kepegawaian	81%/90%	1.802.988.000			1.802.988.000			1.862.595.000
4	5	16	2	Seleksi penerimaan calon PNS	Terselesaikannya proses penerimaan ASN	1 Kegiatan	1.055.225.000			1.055.225.000		1 Kegiatan	1.055.225.000
4	5	16	2	Seleksi penerimaan calon PNS	Terbitnya keputusan tentang CPNS yang lolos seleksi	1 Kegiatan						1 Kegiatan	
4	5	16	3	Penempatan PNS	Terlaksananya pengisian jabatan struktural, fungsional dan staf	12 Kali	100.000.000			100.000.000		12 Kali	150.000.000
4	5	16	3	Penempatan PNS	Terisinya jabatan struktural, fungsional dan staf	12 Kali						12 Kali	
4	5	16	4	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Terfasilitasinya penerbitan SK Kenaikan Pangkat (KP) dan Ujian dinas	650 Dokumen	36.220.000			36.220.000		650 Dokumen	40.220.000
4	5	16	4	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Diterbitkannya SK KP tepat waktu dan lulusnya Ujian Dinas PNS	650 Dokumen						650 Dokumen	
4	5	16	5	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Terlaksananya penataan dokumen dan arsip kepegawaian	9.000 Orang	252.000.000			252.000.000		9.000 Orang	252.000.000
4	5	16	5	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Tertatanya dokumen dan arsip kepegawaian	9.000 Orang						9.000 Orang	
4	5	16	6	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Terlaksananya pengukuran tingkat potensi, kompetensi dan kesehatan mental PNS	64 Orang	112.000.000			112.000.000		64 Orang	115.000.000
4	5	16	6	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Terukurnya tingkat potensi, kompetensi dan kesehatan mental PNS	64 Orang						64 Orang	
4	5	16	8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terlaksananya proses pemberian tanda jasa satya lencana karya satya dan penghargaan bagi PNS yang berprestasi	100 Orang	150.000			150.000		100 Orang	150.000
4	5	16	8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Diberikannya tanda jasa satya lencana karya satya dan penghargaan bagi PNS yang berprestasi	100 Orang						100 Orang	
4	5	16	9	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terlaksananya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran PNS	100 Prosentase	48.000.000			48.000.000		100 Prosentase	50.000.000
4	5	16	9	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terbitnya keputusan kepada PNS yang melanggar aturan disiplin pegawai	100 Prosentase						100 Prosentase	
4	5	16	13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	Terselenggarakanya diklat teknis dan fungsional	120 Orang	199.393.000			199.393.000		120 Orang	200.000.000
4	5	16	13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	Meningkatnya jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	120 Orang						120 Orang	

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN 2021				REVISI TAHUN 2022	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebijakan Dana / Paga Indikator	Capaian Peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	6		Pendidikan dan Pelatihan							
4	6	15	Program Pendidikan Kedinasan	Prosentase pejabat struktural yang telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai tingkatan	85%	375.500.000		375.500.000		375.600.000
4	6	15	2 Pendidikan penjenjangan struktural	Pengiriman peserta dari penyelenggaraan Diklat Pim II, III dan IV	60 Orang	264.600.000		264.600.000		264.600.000
4	6	15	2 Pendidikan penjenjangan struktural	Lulusnya peserta Diklat Pim II, III dan IV	60 Orang					60 Orang
4	6	15	5 Pengembangan kurikulum pendidikan dan	Terealisasinya penyusunan AKD	1 Kegiatan	1.450.000		1.450.000		1.550.000
4	6	15	5 Pengembangan kurikulum pendidikan dan	Tersusunnya dokumen AKD	1 Kegiatan					1 Kegiatan
4	6	15	6 Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Keikutsertaan PNS dalam kegiatan peningkatan kompetensinya	30 Orang	108.000.000		108.000.000		108.000.000
4	6	15	6 Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Jumlah PNS yang meningkat kompetensinya	30 Orang					30 Orang
4	6	15	7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Teraksananya evaluasi alumni diklat	1 Kali	1.450.000		1.450.000		1.450.000
4	6	15	7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya dokumen evaluasi alumni diklat	1 Kali					1 Kali
TOTAL PAGU 1						7.493.091.000		7.493.091.000		12.377.321.000
5	1	1	Belanja Pegawai			4.385.463.000		4.385.463.000		4.385.463.000
TOTAL PAGU 2						11.878.554.000		11.878.554.000		16.762.784.000

BUPATI BOYOLALI



SENO SAMODRO